



SALINAN

GUBERNUR BALI
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI
 TAHUN 2024-2026
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024-2026 sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Provinsi Tahun 2024-2026 adalah dokumen transisi rencana pembangunan menengah daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026.

Pasal 2

RPD Provinsi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah di masa transisi menuju ke pemilihan umum kepala daerah 2024 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPD Provinsi Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum;
 - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. Bab V Tujuan dan Sasaran;

- f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
 - g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. Bab IX Penutup.
- (2) RPD Provinsi Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penjabat Gubernur menggunakan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Pemerintah Provinsi menjabarkan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPD Provinsi Tahun 2024-2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. capaian target tujuan dan sasaran RPD Provinsi Tahun 2024-2026;
 - b. capaian target indikator kinerja daerah RPD Provinsi Tahun 2024-2026;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
 - d. efektivitas program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Pasal 6

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 yang diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. konsistensi kinerja RKPD dengan kinerja RPD Provinsi Tahun 2024-2026; dan
 - b. konsistensi kinerja Renja Perangkat Daerah dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah sudah konsisten/sesuai dan mendukung pencapaian target, tujuan, dan sasaran RPD Provinsi Tahun 2024-2026.

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup evaluasi terhadap program prioritas daerah dan program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pertumbuhan derajat keotonomian daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan pencapaian target RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dan keselarasan dengan pembangunan nasional.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi *existing*;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 9 Maret 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pemerintah pusat pada tanggal 5 Desember 2022 melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran penting bagi struktur dan fundamental Ekonomi Bali. Dampaknya sangat signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, serta gejolak ekonomi jika tetap bertumpu pada satu dominasi sektor. Walau sempat membaik di tahun 2022, kondisi ekonomi global yang semakin tertekan diprediksi memberikan tekanan bagi perekonomian Bali kedepan. Maka dari itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang dapat mengakselerasi peningkatan ekonomi Bali lebih terarah, menyeluruh, terpadu, seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Untuk mendorong peningkatan ekonomi Bali tahun 2024-2026, Pemerintah Provinsi Bali fokus pada Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 1) sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sampai tahun 2021, target indikator makro, program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025, isu-isu strategis, serta kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, maka dalam RPD ini dirumuskan 7 tujuan dengan 8 indikator tujuan, 24 sasaran dengan 28 indikator sasaran serta 69 program prioritas daerah dengan 90 indikator *outcome* yang ditargetkan.

Untuk mencapai target sasaran yang telah dirumuskan setiap tahunnya, maka disusunlah tema/fokus pembangunan tahunan yang dimulai dari tahun 2024 yaitu Percepatan transformasi ekonomi kerthi Bali yang hijau, tangguh dan sejahtera serta peningkatan daya saing daerah, dilanjutkan dengan pemantapan transformasi ekonomi kerthi Bali yang hijau, tangguh dan sejahtera serta peningkatan daya saing daerah pada tahun 2025, sehingga diharapkan di tahun 2026 tema penyeimbangan struktur dan fundamental Ekonomi Bali menuju Bali Era Baru dapat terwujud.

Selanjutnya untuk mendukung target program prioritas yang telah ditetapkan, maka dirancang kerangka pendanaan yang mengimplementasikan konsep *money follow program* berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Dari pendapatan yang dirancang sebesar Rp. 6.182.194.776.093,- di tahun 2024, dirancang pagu belanja sebesar Rp 6.458.587.289.699,-, dengan defisit sebesar Rp.276.392.513.606,-. Sementara pada tahun 2025 pendapatan dirancang sebesar Rp.5.921.934.369.161,- pagu belanja sebesar Rp.6.184.107.575.713,- dengan defisit sebesar Rp.262.173.206.551,- dan terakhir di tahun 2026 dari pendapatan Rp.6.187.764.377.570 dirancang belanja sebesar Rp 6.462.917.551.321 dengan defisit sebesar Rp.275.153.173.751,-.

Dalam upaya menjaga konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan, maka RPD ini akan dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali sebagai rencana tahunan pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

I-1

1.1	Latar Belakang.....	I-1
1.2	Dasar Hukum	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.3.1	Hubungan Antara RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.....	I-6
1.3.2	Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Provinsi Bali .	I-6
1.3.3	Hubungan Antara RPD dengan RKPD Provinsi Bali...	I-7
1.3.4	Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah.....	I-7
1.3.5	Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
1.4	Maksud dan Tujuan	I-8
1.5	Sistematika Penulisan	I-8

BAB II GAMBARAN UMUM.....

II-1

2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Aspek Geografi	II-1
2.1.2	Aspek Demografi	II-30
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-32
2.2.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-32
2.2.2	Inflasi.....	II-35
2.2.3	PDRB per Kapita Provinsi Bali.....	II-36
2.2.4	Ketimpangan Pendapatan	II-38
2.2.5	Persentase Penduduk Miskin	II-39
2.2.6	Indeks Pembangunan Manusia	II-41
2.2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-42

2.2.8	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-44
2.3	Aspek Pelayanan Umum.....	II-45
2.3.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-45
2.3.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-90
2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-116
2.3.4	Penunjang Urusan.....	II-240
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-274
2.4.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-274
2.4.2	Nilai Tukar Petani.....	II-274
2.4.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	II-276
2.4.4	Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 Penduduk	II-276
2.4.5	Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	II-277
2.4.6	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum	II-278
2.4.7	Angka Kriminalitas	II-279
2.5	Hasil Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021	II-279
2.6	Kerjasama Daerah.....	II-365
2.7	Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Bali di Kabupaten/Kota	II-371
2.8	Capaian BUMD dalam Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi Bali	II-371
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2017-2021)	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2	Neraca Daerah	III-31
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Tahun 2017-2021)	III-40
3.2.1	Kebijakan Pendapatan	III-40
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah.....	III-46

3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-49
3.2.4	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-51
3.2.5	Analisis Pembiayaan.....	III-53
3.2.6	Defisit Riil Anggaran.....	III-60
3.3	Kerangka Pendanaan	III-66
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja APBD Bali 2024-2026	III-67
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-69
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-1
4.1.2	Aspek Pelayanan Umum	IV-15
4.1.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	IV-29
4.2	Isu Global	IV-39
4.2.1	Permasalahan Global Pandemi COVID-19.....	IV-39
4.2.2	Gejolak Perekonomian Global.....	IV-41
4.2.3	Sustainable Development Goals (SDG's)	IV-44
4.2.4	Lingkungan Hidup.....	IV-47
4.2.5	Perkembangan Teknologi Informasi	IV-49
4.2.6	Ketahanan Pangan	IV-49
4.2.7	Keterbatasan Energi	IV-50
4.3	Isu Nasional.....	IV-51
4.4	Isu Strategis Provinsi Bali.....	IV-53
BAB V TUJUAN DAN SASARAN		V-1
5.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran	V-1
5.1.1	Telaah Dokumen RPJMN 2020-2024.....	V-1
5.1.2	Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025.....	V-4
5.2	Cascading Kinerja	V-18
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....		VI-1
6.1	Strategi.....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-3

6.3 Program Prioritas VI-10

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH..... VII-1**

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah VII-3

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH..... VIII-1**

8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII-3

BAB IX PENUTUP..... IX-1

9.1 Pedoman Transisi..... IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan..... IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administratif Provinsi Bali.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Wilayah Provinsi Bali	II-3
Gambar 2.3	Sebaran 391 DAS di Provinsi Bali	II-7
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Wilayah Provinsi Bali.....	II-17
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Wilayah Provinsi Bali.....	II-18
Gambar 2.6	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Tahun Sensus.....	II-30
Gambar 2.7	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (jiwa/km2).....	II-32
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2017-2022	II-33
Gambar 2.9	Nilai PDRB ADHB (dalam miliar) Provinsi Bali Tahun 2017-2022	II-34
Gambar 2.10	Kontribusi PDRB ADHB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022	II-35
Gambar 2.11	Laju Inflasi Provinsi Bali Tahun 2017-2022.....	II-36
Gambar 2.12	Laju Inflasi Provinsi Bali Menurut Komoditas	II-36
Gambar 2.13	PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Bali Tahun 2017-2022	II-38
Gambar 2.14	Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2017-2022	II-39
Gambar 2.15	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2022	II-41
Gambar 2.16	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2017-2022	II-42
Gambar 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2017-2022	II-43
Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Perempuan (IPG) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-44
Gambar 2.19	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-45
Gambar 2.20	APK PAUD Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-46

Gambar 2.21	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-47
Gambar 2.22	Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-48
Gambar 2.23	Angka Partisipasi Murni Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-49
Gambar 2.24	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2017-2021	II-50
Gambar 2.25	Angka Putus Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-50
Gambar 2.26	Angka Kelulusan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-51
Gambar 2.27	Angka Melanjutkan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-52
Gambar 2.28	Fasilitas Pendidikan (Kondisi Ruang Kelas Baik) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-52
Gambar 2.29	Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017-2021	II-53
Gambar 2.30	Rasio Jumlah Ketersediaan Guru Terhadap Jumlah Murid Per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-54
Gambar 2.31	Angka Melek Huruf di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-54
Gambar 2.32	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-55
Gambar 2.33	Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-56
Gambar 2.34	Angka Kematian Balita per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-57
Gambar 2.35	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-58
Gambar 2.36	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-59
Gambar 2.37	Rasio Posyandu per Satuan Balita di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-61

Gambar 2.38	Rasio Puskesmas, Klinik,dan Pustu diProvinsi Bali Tahun 2017-2021	II-62
Gambar 2.39	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-63
Gambar 2.40	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021	II-64
Gambar 2.41	Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-64
Gambar 2.42	Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-65
Gambar 2.43	Jumlah Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten /Kota Tahun 2021.....	II-65
Gambar 2.44	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-66
Gambar 2.45	Persentase Ibu Hamil yang Ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021	II-67
Gambar 2.46	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-68
Gambar 2.47	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-69
Gambar 2.48	Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2017-2021	II-70
Gambar 2.49	Jumlah Balita Ditimbang di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-71
Gambar 2.50	Persentase Cakupan Imunisasi Campak	II-72
Gambar 2.51	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-73
Gambar 2.52	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani di provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-74
Gambar 2.53	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Coverage) di Provinsi Bali tahun 2017-2021	II-74
Gambar 2.54	Case Notification Rate (CNR) kasus TBC di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-75

Gambar 2.55	Angka Kesembuhan TB Paru (Success Rate / SR) menurut Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-76
Gambar 2.56	Persentase Penderita Hipertensi Pada Usia >15 Tahun di Provinsi Bali Tahun 2021	II-77
Gambar 2.57	Jumlah Penderita Hipertensi Pada Usia >15 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2021	II-78
Gambar 2.58	Tren Incidence Rate DBD Provinsi Bali Tahun 2016-2021	II-79
Gambar 2.59	Trend CFR DBD Provinsi Bali Tahun 2016-2021 ...	II-80
Gambar 2.60	Penderita Diare Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-81
Gambar 2.61	Tren Annual Parasite Incidence (API) Malaria Provinsi Bali Tahun 2016-2021	II-82
Gambar 2.62	Jumlah Kasus HIV berdasarkan Kelompok umur di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-83
Gambar 2.63	Jumlah Kasus Kumulatif AIDS Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Bali Tahun 2018-2021	II-84
Gambar 2.64	Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-86
Gambar 2.65	Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-97
Gambar 2.66	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4 di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-88
Gambar 2.67	Cakupan Pelayanan Nifas (KF3) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-90
Gambar 2.68	Cakupan Pelayanan Nifas yang Mendapat Vitamin A di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-90
Gambar 2.69	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-91
Gambar 2.70	Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-92
Gambar 2.71	Cakupan Balita Pendek/Stunting di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-92

Gambar 2.72	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-93
Gambar 2.73	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021 ..	II-94
Gambar 2.74	Persentase Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2022.....	II-96
Gambar 2.75	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2022	II-99
Gambar 2.76	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.....	II-100
Gambar 2.77	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Layak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.....	II-102
Gambar 2.78	Grafik Perbandingan Peningkatan Kualitas Dengan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali	II-107
Gambar 2.79	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10000 Penduduk Tahun 2017-2021	II-109
Gambar 2.80	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021... ..	II-109
Gambar 2.81	Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/ Kelurahan Tahun 2017-2021	II-110
Gambar 2.82	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-111
Gambar 2.83	Persentase Penegakan Perda di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-111
Gambar 2.84	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-112
Gambar 2.85	Persentase PMKS Yang Tertangani di Provinsi Bali 2017-2021	II-113
Gambar 2.86	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-114

Gambar 2.87	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-115
Gambar 2.88	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-115
Gambar 2.89	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-116
Gambar 2.90	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-117
Gambar 2.91	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2017-202	II-120
Gambar 2.92	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-121
Gambar 2.93	Gambar 295 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Pekerja Jamsostek di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-122
Gambar 2.94	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2017-2021	II-124
Gambar 2.95	Capaian IPG di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-126
Gambar 2.96	Capaian IDG di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-127
Gambar 2.97	Rasio KDRT di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-129
Gambar 2.98	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2017-2021	II-130
Gambar 2.99	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-131
Gambar 2.100	Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-135
Gambar 2.101	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	II-142
Gambar 2.102	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2023	II-143

Gambar 2.103	Bauran Energi Terbarukan Tahun 2018-2021	II-145
Gambar 2.104	Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-154
Gambar 2.105	Rasio Pasangan Berakta Nikah per Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-155
Gambar 2.106	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-160
Gambar 2.107	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-161
Gambar 2.108	Persentase LPM Berprestasi di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-162
Gambar 2.109	Persentase PKK Aktif Desa/Kelurahan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-162
Gambar 2.110	Persentase Posyandu Aktif di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-163
Gambar 2.111	Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-165
Gambar 2.112	Persentase PKK Desa/Kelurahan yang Dibina di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-166
Gambar 2.113	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-167
Gambar 2.114	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Tahun 2017-2021.....	II-168
Gambar 2.115	Persentase KB Aktif di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-168
Gambar 2.116	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2017-2021	II-169
Gambar 2.117	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-171

Gambar 2.118	Rasio Akseptor KB di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-172
Gambar 2.119	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15–49 di Provinsi Bali	II-173
Gambar 2.120	Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) di Provinsi Bali	II-174
Gambar 2.121	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Bali	II-174
Gambar 2.122	Cakupan Anggota BKB, BKR, dan BKL Ber-KB di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-175
Gambar 2.123	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Bali 2017-2021	II-177
Gambar 2.124	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-179
Gambar 2.125	Jumlah Pelabuhan dan Bandara di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-179
Gambar 2.126	Persentase Layanan Angkutan Darat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-180
Gambar 2.127	Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-181
Gambar 2.128	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan HP/Telepon Rumah	II-184
Gambar 2.129	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	II-186
Gambar 2.130	Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Bali	II-187
Gambar 2.131	Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020	II-189
Gambar 2.132	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda di Provinsi Bali	II-190
Gambar 2.133	Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda di Provinsi Bali	II-191
Gambar 2.134	Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga di Provinsi Bali	II-191

Gambar 2.135	Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bali.....	II-196
Gambar 2.136	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Provinsi Bali.....	II-197
Gambar 2.137	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi Bali.....	II-198
Gambar 2.138	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Provinsi Bali.....	II-199
Gambar 2.139	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip secara Baku di Provinsi Bali.....	II-200
Gambar 2.140	Jumlah Arsip yang Dilestarikan di Provinsi Bali ..	II-201
Gambar 2.141	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Provinsi Bali.....	II-201
Gambar 2.142	Jumlah Daya Tarik Wisata.....	II-202
Gambar 2.143	Jumlah DTW Kabupaten/Kota.....	II-202
Gambar 2.144	Tingkat Kunjungan Wisatawan ke Bali.....	II-203
Gambar 2.145	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	II-205
Gambar 2.146	Jumlah Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata, dan Lembaga Pariwisata di Provinsi Bali	II-210
Gambar 2.147	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB.....	II-211
Gambar 2.148	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB di Provinsi Bali.....	II-212
Gambar 2.149	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar.....	II-213
Gambar 2.150	Cakupan Bina Kelompok Petani.....	II-213
Gambar 2.151	Jumlah Kelompok Ternak Pembibitan	II-214
Gambar 2.152	Jumlah Kelompok Pengolah Pakan Ternak, Sarana Prasarana Ternak, dan Pasar Ternak.....	II-214
Gambar 2.153	Rumah Potong Hewan dan Unggas Tahun 2017-2021	II-216
Gambar 2.154	Jumlah Pemotongan Ternak Tahun 2021	II-216
Gambar 2.155	Jumlah Peternak.....	II-220
Gambar 2.156	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	II-227
Gambar 2.157	Nilai Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-228

Gambar 2.158	Nilai Ekspor dan Impor di Provinsi Bali	II-229
Gambar 2.159	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	II-231
Gambar 2.160	Nilai Perindustrian	II-232
Gambar 2.161	Jumlah Industri Kecil dan Menengah.....	II-233
Gambar 2.162	Cakupan Bina Perajin Tahun 2017-2021	II-233
Gambar 2.163	Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU)	II-234
Gambar 2.164	Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.....	II-237
Gambar 2.165	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-239
Gambar 2.166	Nilai Tukar Nelayan.....	II-240
Gambar 2.167	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD.....	II-242
Gambar 2.168	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	II-243
Gambar 2.169	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Anggaran Induk	II-246
Gambar 2.170	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Anggaran Induk	II-246
Gambar 2.171	Pesentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal di Provinsi Bali	II-252
Gambar 2.172	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.....	II-253
Gambar 2.173	Persentase Tindak Lanjut Temuan di Provinsi Bali.....	II-255
Gambar 2.174	Jumlah Temuan BPK di provinsi Bali.....	II-257
Gambar 2.175	Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev	II-258
Gambar 2.176	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.....	II-274
Gambar 2.177	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita.....	II-276
Gambar 2.178	Jumlah Kantor Bank di Provinsi Bali	II-277

Gambar 2.179	Jumlah Kantor ATM di Provinsi Bali.....	II-277
Gambar 2.180	Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB di Provinsi Bali.....	II-278
Gambar 2.181	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum	II-278
Gambar 3.1	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2017-2022	III-9
Gambar 3.2	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.....	III-10
Gambar 3.3	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.....	III-11
Gambar 3.4	Rata-Rata Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022	III-12
Gambar 4.1	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 2017-2022.....	IV-2
Gambar 4.2	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	IV-3
Gambar 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali 2017-2022	IV-3
Gambar 4.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Indonesia sampai dengan Maret 2021	IV-4
Gambar 4.5	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	IV-7
Gambar 4.6	Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertanian terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2017-2021...	IV-9
Gambar 4.7	PDRB Per Kapita Atas Dasar Konstan Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	IV-10
Gambar 4.8	Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi BaliTahun 2017-2021	IV-14
Gambar 4.9	Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bali Tahun 2021	IV-29
Gambar 4.10	Skor Ekosistem Inovasi Provinsi Bali Tahun 2021	IV-30

Gambar 4.11	Capaian Skor Pilar Provinsi Bali Tahun 2021.	IV-30
Gambar 5.1	Cascading Kinerja Tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	V-19
Gambar 5.2	Cascading Kinerja Tujuan 1 (lanjutan) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	V-20
Gambar 5.3	Cascading Kinerja Tujuan 1 (lanjutan) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	V-21
Gambar 5.4	Cascading Kinerja Tujuan 2 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	V-22
Gambar 5.5	Cascading Kinerja Tujuan 3 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	V-23
Gambar 5.6	Cascading Kinerja Tujuan 4 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	V-24
Gambar 5.7	Cascading Kinerja Tujuan 5 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	V-25
Gambar 5.8	Cascading Kinerja Tujuan 6 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	V-26
Gambar 5.9	Cascading Kinerja Tujuan 7 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	V-27
Gambar 6.1	Tema/Fokus Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026	VI-10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.....	II-2
Tabel 2.2	Jumlah dan Sebaran DAS Di Provinsi Bali Menurut Zone	II-6
Tabel 2.3	Potensi Air Danau dan Situ di WS Bali Penida.....	II-8
Tabel 2.4	Potensi Air Bendungan/Waduk/Embung di Provinsi Bali).....	II-9
Tabel 2.5	Potensi Mata Air di Provinsi Bali	II-13
Tabel 2.6	Potensi Air Tanah Wilayah Sungai Bali Penida.....	II-16
Tabel 2.7	Kawasan Lindung di Provinsi Bali	II-21
Tabel 2.8	Kawasan Budidaya di Provinsi Bali	II-21
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Bali Tahun 2021 (dalam ribu)	II-31
Tabel 2.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2017-2022.....	II-40
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2022.....	II-42
Tabel 2.12	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.13	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisi Campak di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.14	Inventaris Bendung dan Panjang Saluran Irigasi Daerah Irigasi di Provinsi Bali.....	II-95
Tabel 2.15	Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Bali Tahun 2022	II-95
Tabel 2.16	Kondisi Pantai di Bali	II-97
Tabel 2.17	Status RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.....	II-103
Tabel 2.18	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) ber SKA di Provinsi Bali Tahun 2017 sd 2020.....	II-105
Tabel 2.19	Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2018-2019	II-108

Tabel 2.20	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	II-118
Tabel 2.21	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-125
Tabel 2.22	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-127
Tabel 2.23	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-128
Tabel 2.24	Rasio APM Laki-Laki dan Perempuan di SD Tahun 2017-2021	II-132
Tabel 2.25	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Tahun 2017-2021	II-132
Tabel 2.26	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA Tahun 2017-2021	II-133
Tabel 2.27	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-134
Tabel 2.28	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-136
Tabel 2.29	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-136
Tabel 2.30	Tanah Pemerintah Provinsi Bali Tercatat Pada Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-137
Tabel 2.31	Tanah Pemerintah Provinsi Bali Yang Sudah Bersertifikat	II-138
Tabel 2.32	Tanah Pemerintah Provinsi Bali Yang Belum Bersertifikat	II-138
Tabel 2.33	Ketersediaan Dokumen KLHS di Provinsi Bali	II-140
Tabel 2.34	Kondisi Emisi GRK Provinsi Bali Tahun 2018-2021 (Ton CO ₂ e)	II-146
Tabel 2.35	Jumlah Timbulan Sampah per Kabupaten/Kota	II-148
Tabel 2.36	Komposisi Timbulan Sampah	II-149
Tabel 2.37	Jumlah TPS3R/TPST di Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2021	II-150

Tabel 2.38	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-153
Tabel 2.39	Rasio Bayi Berakte Kelahiran.....	II-154
Tabel 2.40	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi.....	II-156
Tabel 2.41	Kabupaten/Kota Mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Provinsi Bali .	II-157
Tabel 2.42	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2017-2021	II-158
Tabel 2.43	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	II-159
Tabel 2.44	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Tahun 2017-2021	II-170
Tabel 2.45	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	II-171
Tabel 2.46	Persentase Remaja (Umur 14 s.d 19 th) Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	II-176
Tabel 2.47	Rasio Izin Trayek Provinsi Bali Tahun 2017-2021	II-178
Tabel 2.48	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Bali 2017-2021	II-182
Tabel 2.49	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-182
Tabel 2.50	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-183
Tabel 2.51	Cakupan Layanan Telekomunikasi	II-184
Tabel 2.52	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	II-185
Tabel 2.53	Jumlah UMKM.....	II-188
Tabel 2.54	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja.....	II-189
Tabel 2.55	Buku Kabupaten Dalam Angka.....	II-192
Tabel 2.56	Buku PDRB	II-192
Tabel 2.57	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah.....	II-193

Tabel 2.58	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	II-194
Tabel 2.59	Cagar Budaya yang Dilestarikan	II-194
Tabel 2.60	Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi	II-195
Tabel 2.61	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	II-199
Tabel 2.62	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Langsung Menuju Bali Tahun 2017-2021	II-203
Tabel 2.63	Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2017-2021	II-204
Tabel 2.64	Jumlah dan Jenis Akomodasi Pariwisata	II-206
Tabel 2.65	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	II-208
Tabel 2.66	Jumlah Bar di Provinsi Bali	II-208
Tabel 2.67	Jumlah Pramuwisata di Provinsi Bali	II-209
Tabel 2.68	Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Hasil Ternak Tahun 2017-2022	II-215
Tabel 2.69	Jumlah Penyakit Hewan	II-216
Tabel 2.70	Pemasukan Ternak Besar dan Ternak Kecil ke Bali .	II-217
Tabel 2.71	Pemasukan Bahan Asal Ternak ke Bali (kg)	II-218
Tabel 2.72	Pengeluaran Ternak dari Bali	II-219
Tabel 2.73	Pengeluaran Bahan Asal Ternak dari Bali	II-219
Tabel 2.74	Kelas Kelompok Peternak	II-220
Tabel 2.75	Pasar Hasil Peternakan	II-221
Tabel 2.76	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali	II-223
Tabel 2.77	Lahan Kritis di Provinsi Bali	II-224
Tabel 2.78	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan di Provinsi Bali	II-225
Tabel 2.79	Perhutanan Sosial di Provinsi Bali	II-226
Tabel 2.80	Jumlah izin Usaha Perdagangan Luar Negeri	II-229
Tabel 2.81	Kinerja Perlindungan Konsumen	II-230
Tabel 2.82	Capaian Pengiriman Transmigrasi	II-235
Tabel 2.83	Konsumsi Ikan	II-237
Tabel 2.84	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	II-238
Tabel 2.85	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	II-238
Tabel 2.86	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman	II-239
Tabel 2.87	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	II-242
Tabel 2.88	Opini BPK	II-244

Tabel 2.89	Realisasi SiLPA Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	II-244
Tabel 2.90	persentase SILPA terhadap APBD tahun 2017-2021	II-255
Tabel 2.91	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2017-2021	II-247
Tabel 2.92	Perbandingan Komponen Belanja Pada Tahun Anggaran 2021	II-248
Tabel 2.93	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	II-249
Tabel 2.94	Penetapan APBD Tahun 2017-2021	II-250
Tabel 2.95	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	II-251
Tabel 2.96	Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan \Struktural	II-252
Tabel 2.97	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah di Provinsi Bali.....	II-253
Tabel 2.98	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	II-254
Tabel 2.99	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah.....	II-254
Tabel 2.100	Persentase Pelanggaran Pegawai	II-256
Tabel 2.101	Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi	II-258
Tabel 2.102	Fungsi Pengawasan, Pembentukan dan Fungsi Anggaran	II-258
Tabel 2.103	Fungsi Pengawasan	II-259
Tabel 2.104	Jumlah Sistem Peringatan Dini.....	II-260
Tabel 2.105	Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali.	II-261
Tabel 2.106	Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali (Lanjutan)	II-263
Tabel 2.107	Jumlah Korban Bencana	II-264
Tabel 2.108	Data Tertanganinya Bantuan Pasca Bencana	II-266
Tabel 2.109	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana	II-267
Tabel 2.110	Data Kerusakan Pasca Bencana Tahun 2017-2021	II-269

Tabel 2.111	Data Kerugian Pasca Bencana	II-269
Tabel 2.112	Jumlah Kejadian Bencana	II-270
Tabel 2.113	Nilai IKM Penerima Pelayanan Hubungan Antar Lembaga	II-271
Tabel 2.114	Jumlah Permintaan Pelayanan Hubungan Antar Lembaga	II-272
Tabel 2.115	Nilai IKM Pelayanan Tamu Wisma	II-272
Tabel 2.116	Jumlah Tamu Wisma Badan Penghubung	II-272
Tabel 2.117	Jumlah Kegiatan Protokol Pimpinan yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	II-273
Tabel 2.118	Nilai IKM Pengunjung Anjungan Bali TMII	II-273
Tabel 2.119	Jumlah Pengunjung Anjungan Bali TMII	II-273
Tabel 2.120	Nilai Tukar Petani	II-275
Tabel 2.121	Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenisnya di Provinsi Bali, 2018-2021	II-279
Tabel 2.122	Hasil Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-281
Tabel 2.123	Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Bali Tahun 2019-2021	II-289
Tabel 2.124	Capaian Indikator Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021	II-293
Tabel 2.125	Kondisi Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara Tahun 2017-2021	II-372
Tabel 2.126	Kondisi keuangan Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna Tahun 2017-2021	II-374
Tabel 2.127	Kondisi keuangan PT BPD Bali Tahun 2017-2021 .	II-375
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2017-2022	III-3
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2017-2022	III-14
Tabel 3.3	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali Menurut Pintu Masuk	III-20
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali 2017-2022	III-22
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Daerah Menurut Komponen Belanja Tahun 2017-2022	III-26

Tabel 3.6	Neraca Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2022	III-34
Tabel 3.7	Proporsi Penggunaan Anggaran APBD Provinsi Bali Tahun 2017–2021	III-53
Tabel 3.8	Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah Provinsi Bali Tahun 2017-2020 .	III-56
Tabel 3.9	Perbandingan Komponen Belanja Pada Tahun Anggaran 2022.....	III-58
Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2017-2022	III-61
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2017-2022 (realisasi	III-61
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Bali Tahun 2017-2022.....	III-64
Tabel 3.13	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	III-95
Tabel 3.14	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 .	III-98
Tabel 4.1	Rumusan Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran	IV-5
Tabel 4.2	Rumusan Permasalahan Kesenjangan	IV-13
Tabel 4.3	Rumusan Permasalahan Kualitas SDM Bali	IV-14
Tabel 4.4	Rumusan Permasalahan Tingkat Daya Saing	IV-31
Tabel 4.5	Rumusan Permasalahan Kebudayaan Bali	IV-32
Tabel 4.6	Rumusan Permasalahan Lingkungan Hidup.....	IV-33
Tabel 4.7	Rumusan Permasalahan Infrastruktur.....	IV-36
Tabel 4.8	Rumusan Permasalahan Keamanan dan kebencanaan.....	IV-38
Tabel 4.9	Rumusan Permasalahan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.....	IV-39
Tabel 4.10	Sandingan Permasalahan Dominan dengan Isu Strategi	IV-53
Tabel 5.1	Keterkaitan Misi, Tujuan RPJPD dengan RPD	V-10
Tabel 5.2	Keterkaitan Sasaran RPJMN dengan Sasaran RPD	V-16
Tabel 5.3	Tujuan dan Sasaran Provinsi Bali 2024-2026.....	V-28
Tabel 6.1	Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD	

	Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	VI-1
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026	VI-4
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026	VI-13
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Bali tahun 2024- 2026	VII-1
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	VII-5
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	VII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	VII-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Mengacu amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilu 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Provinsi Bali sampai tahun 2021, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-

2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya telah memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

1.3.1 Hubungan Antara RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan melakukan penyelarasan terhadap kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional dan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, pembangunan Provinsi Bali diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Bali. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

1.3.2 Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Provinsi Bali

Dalam penyusunannya, RPD Tahun 2024-2026 telah menyesuaikan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Perubahan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 pada arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahunan tahap IV.

1.3.3 Hubungan Antara RPD dengan RKPD Provinsi Bali

RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen perencanaan tahunan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Selain berpedoman pada dokumen RPD, penyusunan RKPD juga mengacu pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD berpedoman pada RPD dalam hal penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah, dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan kepala daerah tentang RPD.

1.3.4 Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagai penjabaran teknis RPD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

Renstra-PD sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

1.3.5 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan berbagai dokumen lainnya.

Tujuan penataan ruang Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 pada Pasal 3 adalah untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjiwa diri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan

berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah memberikan arahan dalam perencanaan pembangunan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah sebagai penjabaran visi, misi dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali;
2. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum, permasalahan, isu strategis, serta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini terdiri dari sembilan BAB sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran kondisi daerah pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kinerja keuangan masa lalu, pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka kebijakan pendanaan daerah.

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat pemetaan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan mengenai tujuan, dan sasaran Pembangunan Provinsi Bali yang telah disepakati dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

BAB VI Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat kerangka pendanaan dan program prioritas, serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah berikut indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menggambarkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IX Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 07°51'39" - 09°03'01" Lintang Selatan dan 114°24'43" - 115°52'28" Bujur Timur yang meliputi wilayah darat dan perairan pesisir. Berdasarkan data Gazeter Nasional tahun 2020, Provinsi Bali memiliki 1 Pulau Besar dan 33 pulau kecil, yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, Serangan, Menjangan, Sebihah, Batu Jineng, Batu Dua, Batu Abah, Batu Padasan, Batu Bolong, Batu Sepatu, Batu Pahet, Kuan, Selang, Burung, Kalong, Batu Serutan, Batu Sanggah, Maimpang Utara, Maimpang Tengah Maimpang Selatan, Nusa Pudut, Batu Satu, Pulau Batu Kita, Batu Mejineng, Biaha, Batujineng Bungamekar, Batupawon Atuh Lilin, Batujineng Kandik Barat, Batujineng Kandik Timur, Batu Temeling, dan Gili Putih. Provinsi Bali berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Selat Bali dan Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Timur : Selat Lombok dan Provinsi NTB

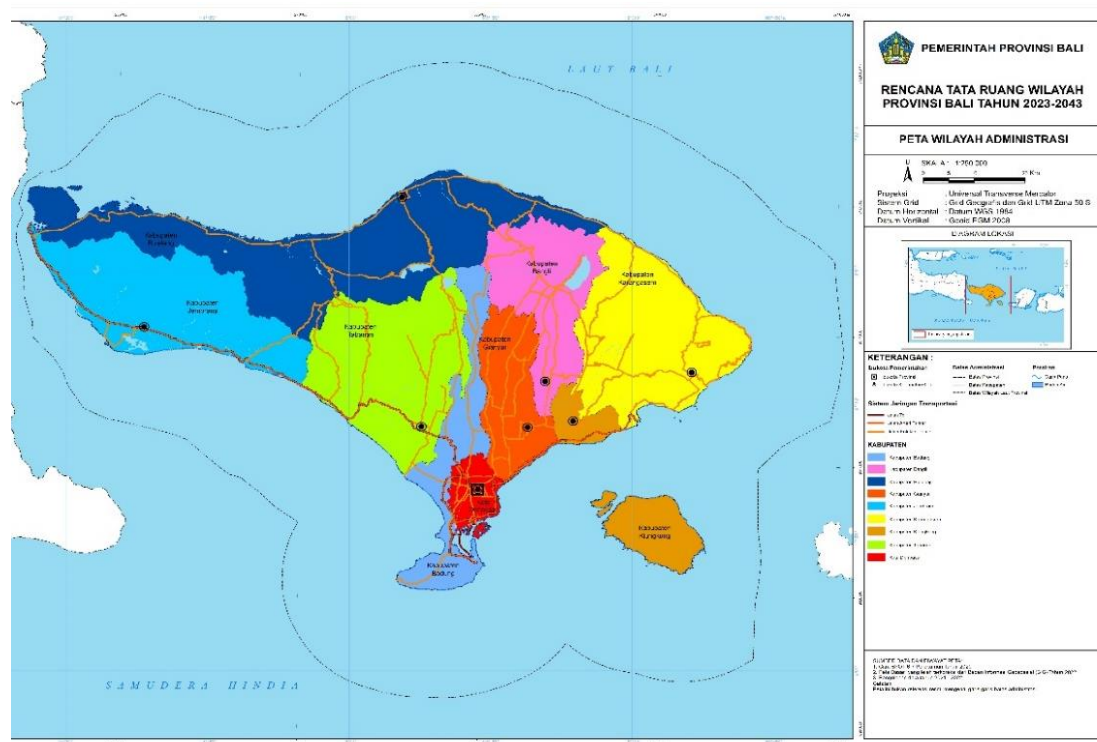
Luas wilayah Provinsi Bali mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 558.795 ha dan wilayah perairan pesisir seluas kurang lebih 915.302 ha. Secara administratif dibagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.493 desa adat, 1.596 subak sawah, dan 1.130 subak abian dengan total 2.726 subak sawah/subak sawah. Luas dan persentase luas wilayah masing-masing kabupaten dan kota dibandingkan luas wilayah provinsi disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Dibandingkan Luas Provinsi Bali (%)
1	Jembrana	848,81	14,56
2	Tabanan	848,84	17,54
3	Badung	398,38	7,24
4	Gianyar	364,11	6,37
5	Klungkung	312,91	5,45
6	Bangli	526,76	8,49
7	Karangasem	839,55	14,52
8	Buleleng	1.322,61	23,61
9	Denpasar	125,98	2,21
Bali		5.587,95	100,00

Sumber Data : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Provinsi Bali



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRWP Bali Tahun 2023-2043

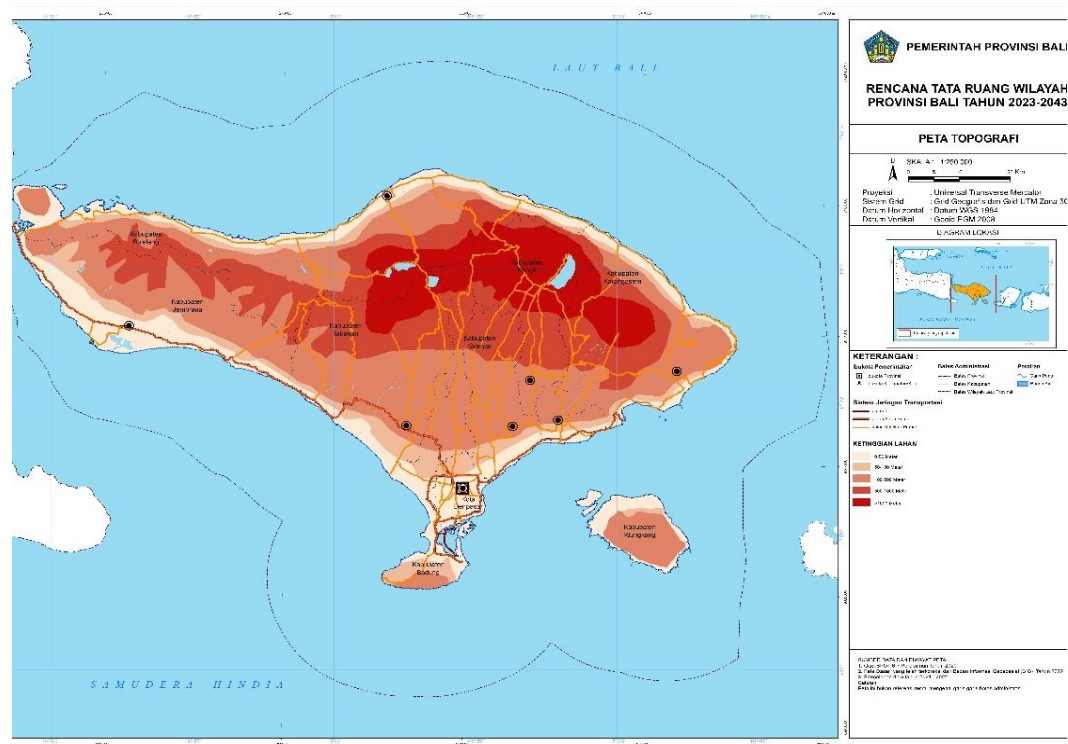
A. Kondisi Topografi dan Geologi

Berdasarkan relief dan topografinya, di bagian tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur.

Diantara bentangan pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Agung (3.142 m) dan Gunung Batur (1.717 m). Selain itu, terdapat gunung yang tidak berapi antara lain Gunung Merbuk (1.356 m), Gunung Patas (1.414 m), dan Gunung Seraya (1.058 m), dan lain sebagainya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Provinsi Bali terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama. Bagian pertama, adalah Bali Utara yang memiliki dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Sementara bagian kedua adalah Bali Selatan, yang memiliki dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan yang ada di Provinsi Bali, yaitu lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha.

Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut lahan ketinggian 0-50 mdpl dengan permukaan cukup landai seluas 77.321,38 ha; lahan ketinggian 50-100 mdpl dengan permukaan berombak sampai bergelombang seluas 60.620,34 ha; lahan ketinggian 100-500 mdpl dengan permukaan bergelombang sampai berbukit seluas 211.923,85 ha; lahan dengan ketinggian 500-1.000 meter seluas 145.188,61 ha; lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 ha. Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regosol dan Latosol. Hanya sebagian kecil terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol secara keseluruhan meliputi 44,90 persen dari luas Provinsi Bali. Jenis tanah Regosol meliputi sekitar 39,93 persen dari luas Provinsi Bali. Jenis tanah Andosol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49 persen dari luas Provinsi Bali

Gambar 2.2 Peta Topografi Wilayah Provinsi Bali



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRWP Bali Tahun 2023-2043

B. Hidrologi

Secara umum, kondisi hidrologi wilayah Provinsi Bali mencakup air permukaan seperti sungai, danau, waduk dan sumber air lainnya. Provinsi Bali memiliki empat buah danau sebagai sumber air utama yaitu Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Selain sumber air danau, potensi ketersediaan air di Provinsi Bali dapat berasal dari mata air, air sungai dan air tanah. Jumlah mata air di Bali mencapai 1394 buah dengan total debit air mencapai 32.463,12 lt/dt. Mata air tersebut merupakan sumber air dari 391 buah sungai dengan panjang total mencapai 2776 km. Potensi tampungan air danau dan situ di Provinsi Bali mencapai 872,68 juta m³ yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan pertanian. Untuk air tanah, Provinsi Bali memiliki potensi yang mencapai 285,15 juta m³/tahun

1. Sungai

Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat – timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau

dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Sungai-sungai di Provinsi Bali dikelompokkan dalam Wilayah Sungai Bali Penida, terdiri dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling terintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan. Komponen utama DAS meliputi vegetasi, lahan dan air, dimana air berperan sebagai pengikat keterkaitan dan ketergantungan antar komponen utama DAS.

DAS mempunyai peran yang sangat besar sebagai sistem perlindungan dan penyangga kehidupan, oleh karena itu keberadaannya perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat berfungsi secara lestari. Beberapa kebutuhan penting dalam pengelolaan lahan di daerah aliran adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan dalam hal rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air.
- Kebutuhan untuk mencapai pendapatan wilayah dan pendapatan perkapita sesuai dengan kondisi kelayakan;
- Kebutuhan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sungai-sungai di Bali merupakan Satuan Wilayah Sungai Bali Penida yang terdiri atas 391 daerah aliran sungai. Karakteristik sungai yang ada merupakan sungai pharennial, intermitten dan ephemeral. Sungai Pharennial yaitu sungai dengan kondisi aliran sepanjang tahun, sungai Intermitten yaitu sungai yang mengalir hanya pada waktu musim hujan, sedangkan sungai Ephemeral yaitu sungai yang mengalir hanya pada waktu ada hujan dan sebanyak 172 sungai di Bali merupakan sungai Pharennial. Dari 391 DAS yang ada **74** DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota sedangkan

sisanya merupakan DAS yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Daerah aliran sungai di Bali dibagi dalam 5 zone yaitu Zone Utara, Zone Timur, Zone Tengah, Zone Sarbagita dan Zone Barat.

Tabel 2.2 Jumlah dan Sebaran DAS Di Provinsi Bali Menurut Zone

NO	NAMA ZONE	LUAS DAS	PANJANG SUNGAI	LOKASI		
		(km ²)	(km)	Dalam Kab./Kota	Lintas Kab./Kota	Jumlah
1	Zone Utara	1.315,43	865,8	97	41	138
2	Zone Timur	845,25	420,47	62	6	68
3	Zone Tengah	469,02	344,81	66	4	70
4	Zone Sarbagita	1.830,18	806,51	75	10	85
5	Zone Barat	981,06	339,01	17	13	30
WS Bali Penida		5.440,94	2.776,6	317	74	391

Sumber: RPSDA Wilayah Sungai Bali Penida, 2019

[illegible]

2. Danau/Waduk/Bendungan/Embung

Waduk/bendungan di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, yang terbaru adalah Bendungan Tamblang selain Bendungan Sidan yang masih dalam proses pembangunan. Sedangkan embung yang ada di Bali sebanyak 24 buah, yang mana 22 buah embung terdapat di Kabupaten Karangasem, 1 buah embung

terdapat di Kabupaten Buleleng dan 1 buah embung di Kota Denpasar (Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022). Data Potensi Air Bendungan/Waduk/Embung di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Potensi Air Danau dan Situ di WS Bali Penida

NO	NAMA DANAU	KAB/ KOTA	LUAS PERMUKAAN (HA)	VOL AIR (JUTA m³)
1	Batur	Bangli	389,09	773,33
2	Beratan	Tabanan	137	29,74
3	Buyan	Buleleng	460	49,6
4	Tamblingan	Buleleng	1655	19,8
5	Situ Yeh Malet	Karangasem	7,59	0,211
	Jumlah			872,68

Sumber: Studi Evaluasi dan Perencanaan Pemantauan 4 Buah Danau di Provinsi Bali (2015) dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air oleh BWS Bali-Penida (2019)

Sedangkan potensi Bendungan/Waduk/Embung di Provinsi Bali mengacu pada kajian di Wilayah Sungai Bali Penida.

Tabel 2.4 Potensi Air Bendungan/Waduk/Embung di Provinsi Bali

No	Sumber Air	Lokasi	Kapasitas (m3)	Pemanfaatan Sumber Air
1	Bendungan Sidan	Lokasi Tubuh Dam, terbagi atas 2 (dua) wilayah administrasi a) Kiri : Ds. Buah, Kec. Payangan, Kab. Gianyar b) Kanan : Ds. Sidan, Kec. Petang, Kab. Badung c) Genangan pada Desa Bunutin, Langgahan, Mengani Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli	3,13 x 106	Air baku = 1700 Liter/dt Listrik adalah 0.65 Mw.

No	Sumber Air	Lokasi	Kapasitas (m3)	Pemanfaatan Sumber Air
2	Bendungan Tamblang	Lokasi pekerjaan Desa Sawan Kec. Sawan dan Desa Bila, Kec. Kubutambahan Kabupaten Buleleng.	2,93 x 106	Air baku = 0,433 m3/detik Irigasi seluas 600 Ha Listrik sebesar 145,188 kw
3	Bendungan Selat Kiri	Lokasi Selat kiri : Sungai Siap (Kab. Gianyar)	5,4 x 106	Air baku = 384 Liter/dt, Suplesi Area Irigasi seluas 9598 ha
4	Bendungan Lambuk	Lokasi : Desa Megati, Kec. Selemadeg, Kabupaten Tabanan	3,44 x 106	Mensuplai air irigasi seluas 1.049 ha dengan debit sebesar 0.65 m3/detik, Penyediaan air baku sebesar 0,052, m3/detik.
5	Waduk Muara Unda	Lokasi di DAS Tukad Unda, Desa Tangkas di Kecamatan Klungkung, serta Desa Gunaksa dan Sampalan Klod di Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung	2,43 x 106	Air baku = 1500 Liter/dt
6	Bendungan Selat Kanan	Lokasi Selat Kanan : Sungai Ayung (Kab. Gianyar)	0,125 x 106	Air baku = 200 Liter/dt Suplesi Areal Irigasi seluas 9598 ha
7	Bendungan Sorga	Bendungan Sorga terletak ± 185,00 m sebelah hilir pertemuan Tukad Gemgem dan Tukad Yeh Asah, di perbatasan desa Ularan dan desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.	3,65 x 106	Air baku = 0,04 m3/det Irigasi seluas 748 Ha
8	Bendungan Telagawaja	Tukad Telagawaja, DAS Unda yang secara di Br. Langsung Desa Rendang Kec. Rendang Kab. Karangasem	13,68 x 106	Air baku = 1.410 Liter/dt Areal Irigasi seluas 2003 ha Listrik adalah 2.36 Mw.
9	Bendungan Jehem	Tukad Melangit kabupaten Bangli	1,2 x 106	Air Baku = 200 lt/dt
10	Bendungan Poh Santen	Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo	12 x 103	Irigasi 293 Ha

No	Sumber Air	Lokasi	Kapasitas (m3)	Pemanfaatan Sumber Air
11	Waduk Muara Nusa Dua Tahap II	Lokasi rencana waduk Muara Nusa Dua Tahap II terletak pada DAS Tukad Badung di desa Suwung Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali.	2,772 x 106	Air baku = 600 liter/det
12	Long Storage Yeh Sumbul	Desa Yeh Embang Kangin, Kabupaten Mendoyo di Kabupaten Jembrana.	50,997 x103	Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk wilayah Kecamatan Mendoyo dan Pekutatan dengan jumlah penduduk 67.733 jiwa dan 34.125 jiwa dengan pengambilan optimal mencapai Q = 100 Ltr/dt.
14	Long Storage Tukad Balian	Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat,	7,83 x 103	Rencana Pengambilan sebesar 300 lt/dt untuk memenuhi kebutuah air di kecamatan Selemadeg Barat sebesar 50 lt/dt, di Kecamatan Tabanan sebesar 50 lt/dt dan masuk ke system penet untuk suplai sistem barat sebesar 200 lt/dt
15	Long Storage Tukad Yeh Empas	Desa Pangkung Tibah, Kec. Kediri	16,99 x 103	Rencana Pengambilan sebesar 300 lt/dt untuk memenuhi kebutuah air di kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri sebesar 100 lt/dt, masuk ke system penet untuk suplai sistem barat sebesar 200 lt/dt
16	Long Storage Oos	Lokasi long storage dipilih di desa Guwang Kecamatan Sukawati	4,044 x 103	Rencana Pengambilan sebesar 100 lt/dt untuk memenuhi kebutuah air di kecamatan Sukawati sebesar 30 lt/dt, masuk ke system petanu untuk suplai sistem timur sebesar 70 lt/dt
17	Long Storage Melangit	Lokasi long storage dipilih di desa Tulikup, Kec. Gianyar	40,13 x 103	Rencana Pengambilan sebesar 150 lt/dt untuk memenuhi kebutuhan air di kecamatan Gianyar sebesar 50 lt/dt, dan masuk ke system petanu untuk suplai sistem timur sebesar 100 lt/dt
18	Embung Belong	Dusun belong, Desa Ban, kecamatan kubu, Kab Karangasem	11,15 x 103	Manfaat air baku :4.79 lt/dt, di dusun Belong, Bonyoh, Pucang s/d Proyeksi tahun 2040 : 5,607 Jiwa
19	Embung Bantas	Dusun Bantas, Desa Baturinggut, Kec. Kubu Kab. Karangasem	26,99 x 103	Manfaat air baku :2.683 lt/dt, di dusun Belong ,s/d Proyeksi tahun 2040 : 2,318 Jiwa
20	Embung Bejug	Desa Tulamben,Kecamatan Kubu	6 x 103	Manfaat air baku :0.72 lt/dt, di lingkungan bejug Proyeksi tahun 2035 : 520 Jiwa
21	Embung Bulian	Desa Bulian, Kec. Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng;	30,23	

No	Sumber Air	Lokasi	Kapasitas (m3)	Pemanfaatan Sumber Air
22	Embung Tukad Sumaga	Desa Tukad Sumaga, Kec. Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;	9,3 x 103	
23	Embung Penyaringan	Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;	23,389	
24	Embung Berangbang	Desa Berangbang, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana ;	23,389	
25	Embung Dukuh II	Dusun Dukuh Desa Dukuh Kec. Kubu	10,53 x 103	Manfaat air baku :5.15 lt/dt, di desa Dukuh ,s/d Proyeksi tahun 2021 : 7,417 Jiwa
26	Embung Pengalusan/Ban	Dusun Pengalusan Desa Ban Kec. Kubu	8,1 x 103	Manfaat air baku : 10.3167 lt/dt didesa Ban, s/d Proyeksi tahun 2021 :14,856 jiwa
27	Embung Lebih	Dusun Lebih, Desa Sebudi Kec. Selat	8,95 x 103	Manfaat air baku: 4.60972 lt/dt di desa sebudi, s/d Proyeksi thn 2021 :6,638 jiwa
28	Embung Kecagbalung	Dusun Kecagbalung, Desa Seraya Tengah Kec. Karangasem	3,97 x 103	Manfaat air baku: 6.87 lt/dt didesa Seraya Tengah s/d Proyeksi thn 2021 :9,895 jiwa
29	Embung Salak	Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak	115	Manfaat air baku sebesar 7,00 l/detik s/d proyeksi tahun 2040 sebanyak 9.658 jiwa
30	Embung Cemara	Desa Umejero Kecamatan Busungbiu	110	Manfaat air baku sebesar 2,00 l/detik s/d proyeksi tahun 2040 sebanyak 3.436 jiwa.
31	Embung Tampekan	Desa Tampekan Kecamatan Seririt.	100	Manfaat air baku sebesar 1,00 l/detik untuk proyeksi sampai tahun 2040 sebanyak 724 jiwa.
32	Embung Tejakula	Desa Tejakula Kecamatan Tejakula	100	Manfaat air baku sebesar 10,00 l/detik untuk proyeksi sampai tahun 2040 sebanyak 6.899 jiwa
33	Embung Antepan (Alternatif 1)	Desa Batukandik	5,88 x 103	Manfaat dari embung ini untuk perkebunan & ternak serta air baku(tadah hujan). Dengan Jumlah KK di Desa Batukandik 1224 KK . Kebutuhan tampungan: hidup (Vu) :1224 KK x 192 =234.968 m3
34	Embung Adegan Kangin (Alternatif 1)	Desa Ped	5,68 x 103	Manfaat dari embung ini untuk perkebunan & ternak serta air baku(tadah hujan). Dengan jumlah KK di Desa Ped : 1195 KK. Kebutuhan tampungan hidup (Vu) :1195 KK x 192 =229.435 m3
35	Embng Pendem (Alternatif 1)	Desa Ped	12,5 x 103	Manfaat dari embung ini untuk perkebunan & ternak serta air baku(tadah hujan).Jumlah KK di Desa Ped : 1195 KK. Kebutuhan tampungan hidup (Vu) :1195 KK x 192=229.435 m3

No	Sumber Air	Lokasi	Kapasitas (m3)	Pemanfaatan Sumber Air
36	Embung/Kolam Desa Sekartaji	Desa Sekartaji	3,2 x 103	Manfaat dari embung ini untuk perkebunan & ternak serta air baku(tadah hujan). Jumlah KK di Desa Sekartaji : 870 KK. Kebutuhan tampungan hidup (Vu) :1224 KK x 192=166.951 m3
37	Cubang Batumadek	Desa Batumadeg	31,5	Manfaat dari embung ini untuk perkebunan & ternak serta air baku(tadah hujan). Jumlah KK di Desa Batumadek: 870 KK. Kebutuhan tampungan hidup (Vu) :147,099 m3
38	Embung Tandang	Batur Selatan	256,4	Memanfaatkan sumber mata air dan hujan. Adapun manfaat untuk melayani kebutuhan air untuk penduduk di Banjar Tandang Desa Batur Selatan dengan jumlah 200 KK dan untuk Banjar Yehmaph Desa Batur Selatan dengan jumlah 250 KK.
39	Cubang Bayung Gede	Bayunggede	48	sebagai bangunan penampung air hujan dan sebagai penyimpanan air bila masyarakat membeli air dari PDAM. Bangunan ini akan dimanfaatkan untuk penduduk Bayunggede Desa Bayunggede dengan jumlah 200 KK
40	Cubang Kutuh	Kutuh	6,75	Bangunan ini akan dimanfaatkan untuk penduduk Banjar Kutuh Desa Kutuh dengan jumlah 200 KK.
41	Reservoar Banjar Biaskaja I	Abangsongan	36	Banguan Reservoar Abangsongan direncanakan untuk memanfaatkan sumber mata air, melayani kebutuhan air di Banjar Biaskaja Desa Abangsongan dengan jumlah 400 kk
42	Reservoar Banjar Biaskaja II	Abangsongan	36	
43	Reservoar M.A. Desa Gunung Bau	Gunung Bau	36	untuk memanfaatkan mata air, adapun manfaatnya untuk melayani kebutuhan air di Banjar Gunung Bau Desa Gunung Bau dengan jumlah 250 KK
44	Reservoar Ulian	Ulian	36	Adapun manfaatnya untuk melayani Banjar Ulian Desa Ulian dengan jumlah 250 KK
45	Embung Poh Santen	Desa Poh Santen Kecamatan Mendoyo	1,5 x 106	Bangunan Pengambilan Intake Debit rencana : 0,60 m3/dt Irigasi ; Qir = 0,405 m3/dt Air minum ; Qm = 0,142 m3/dt
46	Embung Gelar	Desa Petanahan Kecamatan Jembrana	2,7 x 106	Bangunan Pengambilan Intake Debit rencana : 1,65 m3/dt (Irigasi, Qir = 1,529 m3/dt ; air minum, Qm = 0,110 m3/dt)
47	Embung Sukadana	Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem	20 x 103	Pelayanan air bersih untuk rumah tangga direncanakan dengan kran umum sebesar 30 ltr/org/hr. Perkiraan kebutuhan air total adalah 109296 ltr/hr.Harus dipenuhi dalam 69 jam. Q = 80,5 ltr/dt

No	Sumber Air	Lokasi	Kapasitas (m3)	Pemanfaatan Sumber Air
48	Embung Gianyar	Br. Yeh Tengah, Ds. Klusa, Kecamatan Payangan, Br. Pejeng Aji, Ds. Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Br. Gagak, Ds. Tegalalang, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar.	18,5 x 104	Dengan adanya embung diharapkan mampu memberikan air bersih sebesar 6.90 lt/dt sebesar 40 % dari 19.07 lt/dt di tahun 2027 (18303 jiwa)
49	Embung Asangan	Desa Kayu Putih, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng	2,1 x 104	Produksi air baku (m3/thn) :102.492
50	Embung Pule	Dusun Wanasari, Desa Sanggalangit, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	28,4 x 103	mampu mengalirkan debit air untuk kebutuhan penduduk sebesar 6 - 9 l/dtk
51	Embung Bukit Cemara	Desa Jungutan, Kecamatan Behandem, Kabupaten Karangasem	1,25 x 104	Menampung limbah Embung Yeh Kori untuk dimanfaatkan masyarakat Desa Jungutan

Sumber: RPSDA Wilayah Sungai Bali Penida, 2019 dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, 2022

3. Mata Air

Berdasarkan data pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bali Penida (2019), diketahui jumlah mata air di Provinsi Bali adalah sebanyak 1.394 mata air dengan debit kurang lebih sebanyak 32.463,12 lt/dtk. Potensi Mata Air di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Potensi Mata Air di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH MATA AIR	DEBIT (lt/dt)
1	Gianyar	106	3.280,36
2	Bangli	447	3.632,74
3	Klungkung	42	1.336,17
4	Karangasem	215	13.023,48

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH MATA AIR	DEBIT (lt/dt)
5	Tabanan	188	6.575,84
6	Buleleng	229	2.782,69
7	Jembrana	129	395,30
8	Badung	38	1.436,54
9	Denpasar	0	-
TOTAL		1.394	32.463,12

Sumber: RPSDA Wilayah Sungai Bali Penida, 2019

4. Kondisi Air Tanah Dan Cekungan Air Tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri).
2. Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).
3. Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan Mendoyo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Geokgak, Seririt, dan Banjar).

4. Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima).
5. Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya > 5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja).
6. Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng (Tejakula, Buleleng dan Seririt).
7. Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan Buleleng.
8. Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan.
9. Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah

- umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.
10. Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan dan Sumberkima).
 11. Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten Jembrana.

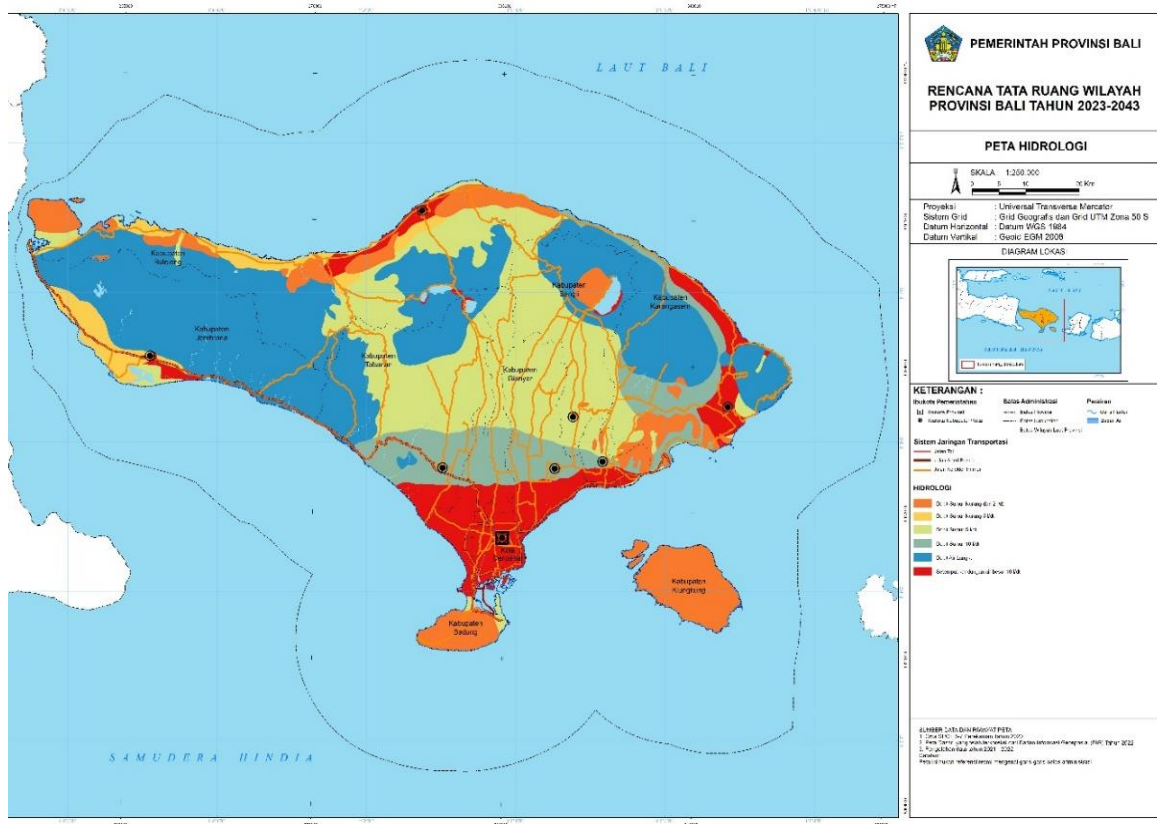
Potensi air tanah menurut RPSDA Wilayah Sungai Bali Penida adalah sebesar 285,15 juta m³/Tahun atau sebesar 9,04 m³/det. Potensi air tanah dibagi dalam 5 zone yaitu Zone Utara, Zone Timur, Zone Tengah, Zone Sarbagita, Zone Barat.

Tabel 2.6 Potensi Air Tanah Wilayah Sungai Bali Penida

No	Zona	Air Tanah	
		Juta m ³ /th	m ³ /dt
1.	Zone Utara	27,01	0,856
2.	Zone Timur	6,2	0,197
3.	Zone Tengah	1,42	0,045
4.	Zone Sarbagita	225,77	7,159
5.	Zone Barat	24,75	0,785
Total		285,15	9,042

Sumber: RPSDA Wilayah Sungai Bali Penida, 2019

Gambar 2.4 Kondisi Hidrologi Wilayah Provinsi Bali

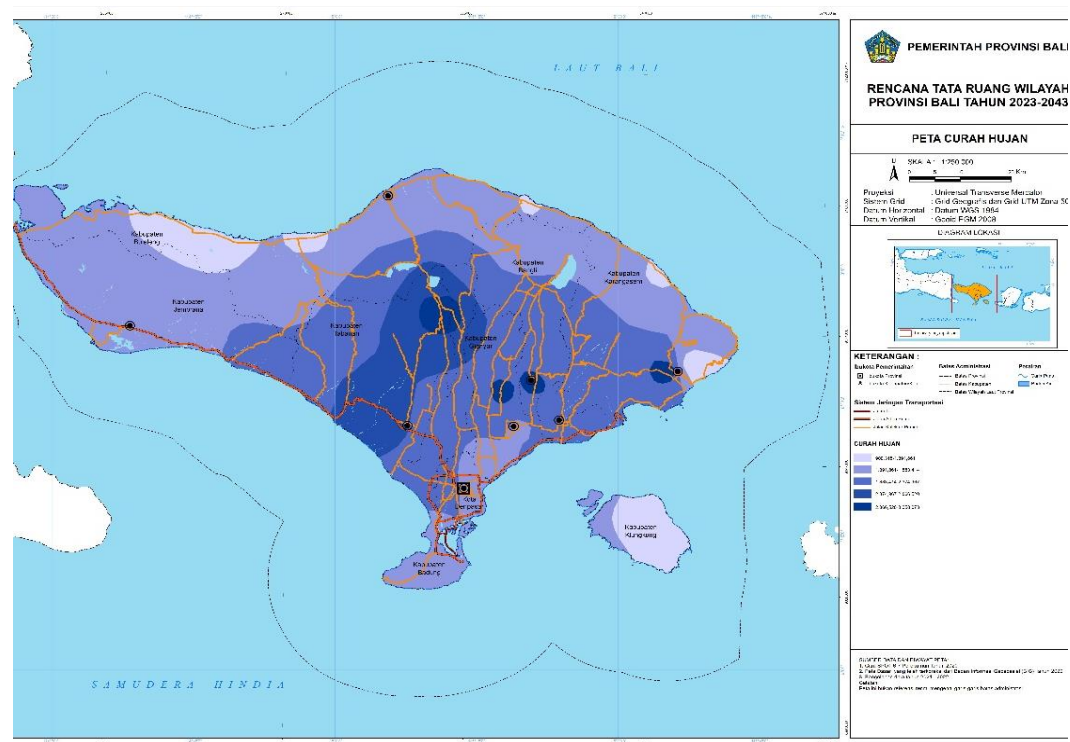


Sumber: Materi Teknis Revisi RTRWP Bali Tahun 2023-2043

C. Iklim dan Suhu

Provinsi Bali, sebagaimana umumnya wilayah Indonesia lainnya beriklim tropis yang hangat dengan 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Provinsi Bali termasuk ke dalam monsun yang ditandai dengan pergantian arah angin permukaan sekitar enam bulan sekali. Pada musim barat, (Oktober - Maret), cuaca di Bali dipengaruhi oleh angin Barat, baik yang melalui Laut Jawa (disebut monsun Pasifik), maupun yang melalui Samudra Hindia. Dua samudra ini mempengaruhi karakteristik curah hujan di wilayah Bali, dengan pengaruh monsun Barat Samudra Hindia dominan di sebelah selatan, dan monsun timur umumnya menyebabkan kondisi kurang hujan (musim kemarau) yang terjadi sekitar bulan Agustus (Sofian et al., 2008). Pada tahun 2021 suhu minimum di wilayah provinsi Bali tercatat 19,2⁰C yang terjadi pada bulan Juli dan maksimum 35,1⁰C yang terjadi pada bulan Februari. Kelembaban udara berkisar antara 40% – 100%. Curah hujan tertinggi tahun 2021 yaitu 856,9 mm.

Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Wilayah Provinsi Bali



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRWP Bali Tahun 2023-2043

D. Potensi Pengembangan Wilayah

Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas ruang daratan kurang lebih 558.795 Ha dan luas ruang laut kurang lebih 915.302 Ha yang merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia.

Pesatnya pengembangan pariwisata di Provinsi Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali terutama pada wilayah Bali selatan, baik yang berasal dari wilayah Bali maupun luar wilayah Bali. Perkembangan pariwisata

yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung dan daya tampung seperti: meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi wilayah; meningkatnya intrusi air laut ke daratan, menurunnya debit air tanah dan air permukaan, meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri masyarakat dan daerah Bali. Hal tersebut menyebabkan kerentanan ekologi Bali semakin tinggi yang bermuara pada makin rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Bali. Jika keseimbangan ekosistem tersebut terganggu, maka keunggulan bersaing Bali dari sektor pariwisata akan menurun, dan Bali akan ditinggalkan.

Neraca lahan atau penatagunaan tanah di Provinsi Bali belum pernah dihitung, namun dapat diperkirakan bahwa tutupan lahan hutan, perkebunan, persawahan terus mengalami penurunan. Target kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) berdasarkan arahan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan keleluasaan untuk alih fungsi lahan pertanian sawah sebesar 10% dari luas sawah yang ada sesuai arahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali cenderung sulit untuk dipenuhi terlebih belum ditetapkannya sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai arahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sesuai

dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043, rencana pola ruang RTRW Provinsi Bali terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan lindung mencakup:
 - 1) Badan Air
 - 2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - 3) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Konservasi;
 - 4) Kawasan Perlindungan Setempat;
 - 5) Kawasan Konservasi;
 - 6) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
 - 7) Kawasan Ekosistem Mangrove;
- b. Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas:
 - 1) Kawasan Hutan Produksi;
 - 2) Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi;
 - 3) Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
 - 4) Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman;
 - 5) Kawasan Pertanian;
 - 6) Kawasan Perikanan;
 - 7) Kawasan Perikanan/Kawasan Konservasi;
 - 8) Kawasan Pergaraman;
 - 9) Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - 10) Kawasan Peruntukan Industri;
 - 11) Kawasan Pariwisata;
 - 12) Kawasan Permukiman;
 - 13) Kawasan Transportasi; dan
 - 14) Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Tabel 2.7 Kawasan Lindung di Provinsi Bali

No	Jenis Peruntukan	Luas Peruntukan	
		Ha	%
I	Kawasan Lindung	-	-
1	Badan Air	2.359	0,16
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	96.630	6,56
3	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Konservasi	4	0,00
4	Kawasan Perlindungan Setempat	8.330	0,57
5	Kawasan Konservasi	45.451	3,08
6	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	81.396	5,52
7	Kawasan Ekosistem Mangrove	252	0,02
Sub Total I		234.423	15,90

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRWP Bali Tahun 2023-2043

Tabel 2.8 Kawasan Budidaya di Provinsi Bali

No	Jenis Peruntukan	Luas Peruntukan	
		Ha	%
II	Kawasan Budidaya		
1	Kawasan Hutan Produksi	8.862	0,60
2	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi	167	0,01
3	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	0,4	0,00
4	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman	4	0,00
5	Kawasan Pertanian	300.320	20.37
6	Kawasan Perikanan	787.397	53,42
7	Kawasan Perikanan/Kawasan Konservasi	1.141	0,08
8	Kawasan Pergaraman	276	0,02

No	Jenis Peruntukan	Luas Peruntukan	
		Ha	%
9	Kawasan Pertambangan dan Energi	1,393	0,09
10	Kawasan Peruntukan Industri	2.400	0,16
11	Kawasan Pariwisata	38.480	2,61
12	Kawasan Permukiman	91.372	6,20
13	Kawasan Transportasi	7.771	0,53
14	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	90	0,01
Sub Total II		1.239.674	84,10

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRWP Bali Tahun 2023-2043

Komposisi rencana pola ruang secara umum adalah kawasan peruntukan lindung sebesar 234.423 ha atau 15,90% dan kawasan peruntukan budidaya sebesar 1.239.674 ha atau 84,10%. Komponen kawasan budidaya yang banyak menghabiskan tutupan lahan di darat adalah kawasan pertanian sebesar 300.320 ha atau 20,37%, kawasan permukiman sebesar 91.372 ha atau 6,20%, dan kawasan pariwisata sebesar 38.480 ha atau 2,61%. Komposisi kawasan pertanian terdiri dari pertanian tanaman pangan sebesar 64.773,94 ha atau 4,39%, hortikultura sebesar 27.530,17 ha atau 1,87%, dan perkebunan sebesar 207.974,15 ha atau 14,11%. Komposisi kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang tersebar berdasarkan lokasi permukiman tersebut. Peruntukan kawasan pariwisata adalah rancangan untuk kawasan efektif pariwisata.

Arahan peruntukan untuk kawasan permukiman, kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan peruntukan perindustrian merupakan proyeksi pengembangan rencana pola ruang terbangun di Provinsi Bali yang pada gilirannya akan terkait dengan pemusatan intensitas aktivitas. Pemusatan intensitas aktivitas pada umumnya terdiri dari pemusatan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari kawasan lainnya yang pada gilirannya juga membutuhkan lahan dan sumberdaya air minum yang lebih tinggi pula. Peraturan zonasi kawasan merupakan perangkat lanjut untuk mengendalikan arahan peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, tata massa bangunan dan

kebutuhan sarana dan prasarana minimal yang harus dipenuhi di setiap kawasan pengembangan.

Di sisi lain, kawasan budidaya non terbangun seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai pendukung ketahanan pangan, sosial budaya kawasan serta pelestarian lingkungan juga membutuhkan lahan yang tidak sedikit dan dialokasikan sebanyak 73,79% dari luas wilayah Provinsi Bali. Namun demikian keberlanjutan kegiatan budidaya pertanian juga sangat tergantung pada ketahanan terhadap alih fungsi dan ketersediaan air baku untuk pertanian. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas keseimbangan proporsi rencana pola ruang yang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya harus tetap dipertahankan untuk mewujudkan daya dukung lahan secara optimal. Berkurangnya tutupan lahan hutan, perkebunan dan lainnya juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya air.

Isu utama pengembangan wilayah saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Bali bagian Selatan dengan Bali Utara, Timur dan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah provinsi difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan. Strategi kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan (*strategic development regions*) dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*), di masing-masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan seperti PKN, PKLW dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan

kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut kebijakan pembangunan sektor transportasi khususnya transportasi darat harus dilakukan secara merata yang menembus semua kawasan/wilayah. Sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, beberapa pembangunan jalan bebas hambatan dan peningkatan jalan arteri primer dan kolektor primer 1 yang menghubungkan antar kota kabupaten dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai ibu kota provinsi dan outlet antar provinsi dan internasional. Sistem transportasi darat tersebut dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan dan sentra-sentra produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk pertanian pada kawasan yang dilintasinya.

Rencana pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah antara lain: pembangunan bandara Baru Bali Utara, pembangunan Kawasan Peruntukan Industri Pengambangan, Kawasan Peruntukan Industri Candikusuma, Kawasan Peruntukan Industri Kaliakah, Kawasan Peruntukan Industri Mendoyo dan Kawasan Peruntukan Industri Celukan Bawang, pembangunan kawasan pariwisata dan pelabuhan laut Celukan Bawang dalam rangka mendorong pusat-pusat pertumbuhan. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan di Provinsi Bali khususnya jalan bebas hambatan antar kota, mencakup: Gilimanuk-Sumberkelampok; Gilimanuk-Negara; Negara-Pekutatan; Pekutatan-Soka (ruas bagian barat); Mengwitani-Singaraja; Soka-Celukan Bawang (ruas tengah-utara); Kuta-Tanah Lot-Soka; Singapadu-Padangbai, Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama; Mengwi-Singapadu (ruas selatan-timur). Peningkatan jalan kolektor primer, mencakup ruas jalan: Cekik-Seririt-Singaraja-Kubutambahan-Amed-

Amlapura-Angantelu (ruas utara-ampenan); dan Mengwitani-Singaraja; Soka-Seririt (ruas tengah).

Keterpaduan pembangunan antar sektor juga sangat penting untuk memperkecil ketimpangan melalui perencanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, keterpaduan perencanaan daratan, pesisir dan lautan dapat mendorong kinerja pembangunan maritim dan perikanan yang menjadi salah satu fokus pemerintahan kedepan.

Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tema dikelompokkan menjadi, pengembangan wilayah dengan tema pariwisata, pengembangan wilayah dengan tema pertanian, pengembangan wilayah dengan tema ekonomi produktif, dan pengembangan wilayah dengan tema UMKM.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan di Bali. Tren pariwisata dunia saat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan. Disamping itu, Bali juga menghadapi berbagai tantangan penting antara lain:

- Pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata;
- Rendahnya kapasitas untuk mempertahankan penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, industri, pariwisata dan perumahan;
- Pencemaran lingkungan;
- Kemacetan yang semakin buruk;
- Pandemi COVID-19.

Sebagai sektor ekonomi utama di Bali, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 dimana pembangunan kepariwisataan merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- Pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- Pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
- Pembangunan industri pariwisata daerah; dan
- Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.

Dalam upaya mewujudkan pariwisata budaya yang berkualitas dan berkelanjutan serta memiliki daya saing yang berlandaskan Tri Hita Karana yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik dengan mengedepankan kekayaan dan keragaman potensi daya tarik wisata berwawasan lingkungan berdasarkan budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu berlandaskan Tri Hita Karana. Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- 1) Pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- 2) Pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
- 3) Pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- 4) Pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- 5) Pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) menurun secara drastis sebanyak 99,99% di tahun 2021 dibanding tahun 2020. Sebelum terjadinya pandemi, Bali menyumbang hampir 40% total wisman yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah wisman yang berkunjung ke Bali di tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 6.275.210 wisman dibanding dengan tahun 2018 yaitu sebesar 6.070.473 dan menurun secara signifikan di tahun 2020 yaitu 1.069.473 wisman dan 2021 menjadi 51 wisman. Mengingat tingginya ketergantungan kepada wisman, Bali menjadi daerah yang ekonominya paling terdampak pandemi COVID-19.

Pengembangan kawasan Pertanian, Peternakan dan perkebunan diarahkan di beberapa lokasi di Provinsi Bali antara lain:

- 1) Padi sebagai komoditas Tanaman Pangan dikembangkan di 9 kabupaten/kota se-Bali.
- 2) Jagung sebagai komoditas Tanaman Pangan dikembangkan di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
- 3) Bawang Merah sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Tabanan, Buleleng, Karangasem dan Bangli.
- 4) Cabai sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Bangli, Tabanan, Buleleng, Klungkung dan Gianyar.
- 5) Jeruk sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Bangli dan Buleleng.
- 6) Kopi sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Buleleng, Badung, Bangli dan Tabanan.
- 7) Kakao sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Jembrana.
- 8) Jambu Mete merupakan komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem.
- 9) Cengkeh sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana.
- 10) Sapi Potong sebagai komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Badung, Klungkung, Karangasem dan Buleleng.
- 11) Kambing sebagai komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Tabanan.

- 12) Babi komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Gianyar.

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sekiranya perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsep Minapolitan. Pengembangan kegiatan terpadu tersebut diarahkan di beberapa lokasi di Provinsi Bali antara lain:

- 1) Kabupaten Klungkung Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya diarahkan di Nusa Penida dan Klungkung Daratan, sedangkan Kawasan Minapolitan Perikanan tangkap di pusatkan di PPI Kusamba.
- 2) Kabupaten Bangli Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya diarahkan di Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku
- 3) Kabupaten Tabanan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya diarahkan di Kecamatan Penebel, Kecamatan Tabanan, Kecamatan Marga, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat dan Kecamatan Pupuan.
- 4) Kabupaten Jembrana Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap diarahkan di PPN Pengambengan.
- 5) Kabupaten Buleleng Kawasan Minapolitan Perikanan tangkap diarahkan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Gerokgak.

Adapun industri yang sekiranya dapat dijadikan industri unggulan di Provinsi Bali adalah:

- 1) Industri pangan diantaranya
 - Industri pengolahan biji kakao, lokasi pengembangannya dilakukan di Kabupaten Jembrana dengan kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Badung, Karangasem dan Bangli.
 - Industri pengolahan buah-buahan, lokasi pengembangannya di Kabupaten Buleleng dan Karangasem, dengan seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali sebagai kabupaten penyangganya.

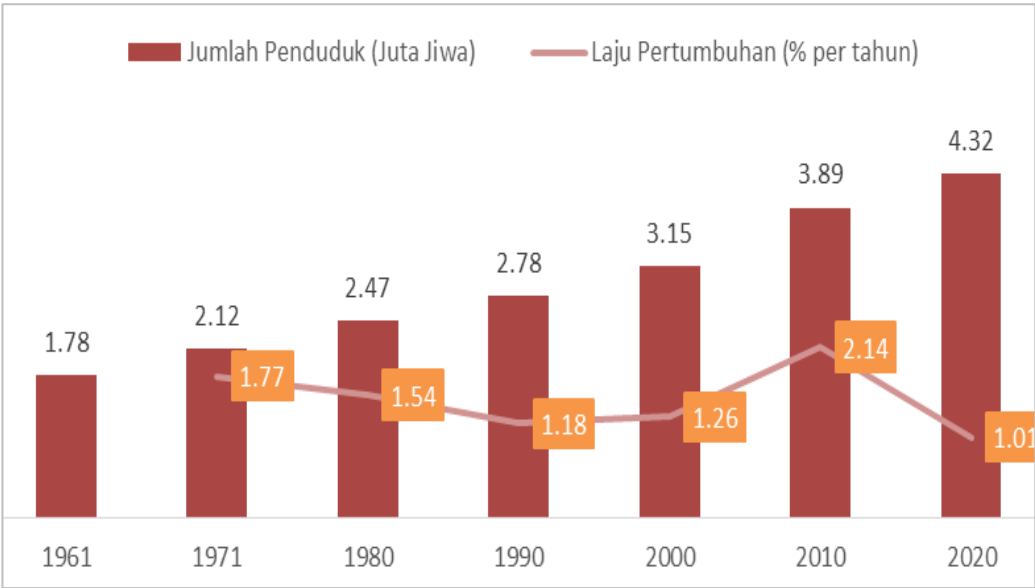
- Industri pengolahan biji kopi, lokasi pengembangannya di Kabupaten Tabanan dan Buleleng, dengan kabupaten Bangli sebagai kabupaten penyangganya.
 - Industri pengolahan mente, lokasi pengembangannya di Kabupaten Karangasem dengan kabupaten bangli, Buleleng dan Gianyar sebagai kabupaten penyangganya.
 - Industri pengolahan kelapa, lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana, dengan kabupaten Tabanan sebagai Kabupaten penyangganya.
 - Industri pengolahan ikan, lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana dengan kabupaten Buleleng, Badung dan Klungkung sebagai kabupaten penyangganya.
 - Industri pengolahan daging, lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana dan Tabanan dengan Kabupaten Badung sebagai kabupaten penyangganya.
- 2) Industri Farmasi dan Kosmetik berupa industri dan kosmetik farmasi berbahan herbal.
- Industri tersebut berpotensi menjadi industri unggulan dengan menjalin kerjasama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen/pelaku usaha, melakukan inovasi produk/peningkatan kapasitas produksi produk herbal, upaya perlindungan produk herbal melalui hak cipta/paten, pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan dan pengendalian mutu, dan penguatan jaringan pasar dan promosi produk.
- 3) Industri tekstil dan aneka industri berupa industri kerajinan kayu, tekstil dan produk tekstil.
- Industri kerajinan kayu perlu didukung dengan adanya kelancaran pengadaan bahan baku kayu, kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan kayu dengan konsentrasi kepada desain modern dan sistem produksi berwawasan lingkungan, peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran dari SDM industri serta peningkatan pertumbuhan industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.

- 4) Industri Elektronika dan Telematika/ICT.
- Didukung dengan pembentukan IT centre serta kelompok-kelompok pengembang software, peningkatan jumlah unit usaha yang menghasilkan piranti lunak, animasi, maupun game, serta penguatan produk dengan mengembangkan ciri khas Bali.

2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali dari tahun 2010-2020 sebesar 1.01%. Pertumbuhan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata pada tahun 2000-2010 yaitu sebesar 2,14%. Ini menunjukkan bahwa tren pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali semakin menurun. Gambar 2.6 menunjukkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali menurut periode sensus.

Gambar 2.6 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Tahun Sensus



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2020 sebesar 4,32 juta jiwa yang terdiri dari 2,17 juta jiwa laki-laki atau 50,2% dan 2,14 juta jiwa perempuan atau 49,8%. Ini menunjukkan bahwa sex rasio masih didominasi laki-laki dan sekaligus menjadi salah satu bonus demografi untuk pengembangan ketenagakerjaan yang lebih produktif.

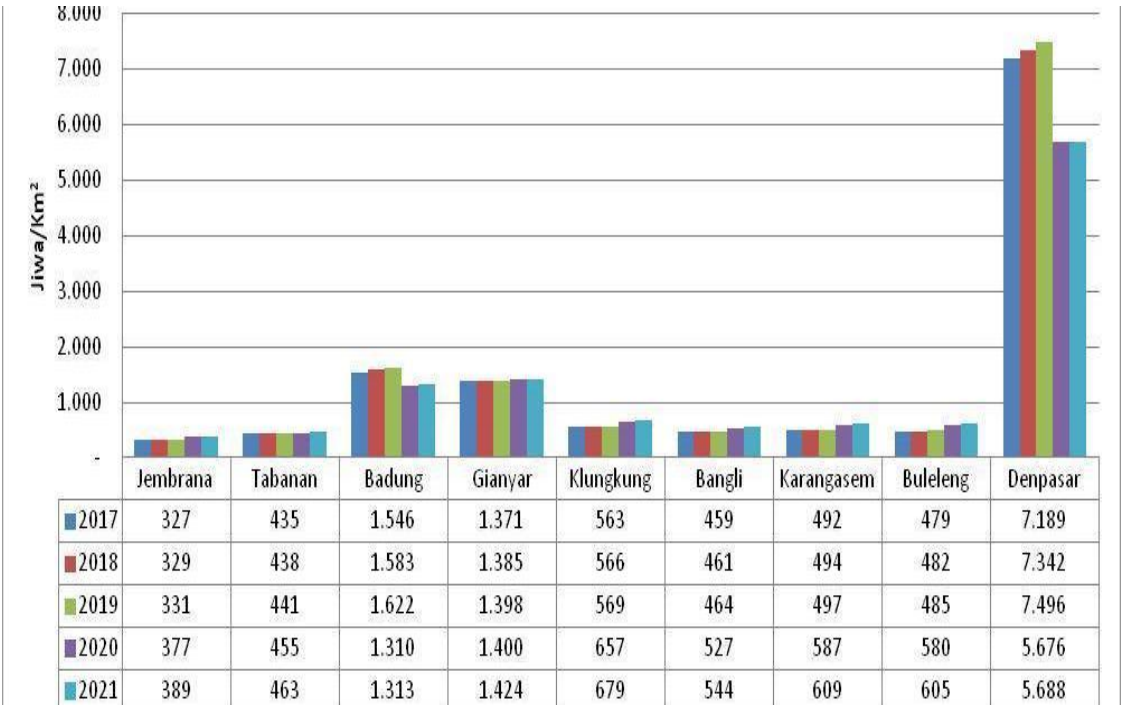
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Provinsi Bali Tahun 2021 (dalam ribu)

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	153.5	146.2	299.7
5-9	152.6	145.7	298.3
10-14	166.6	156.3	322.9
15-19	173.2	162.4	335.5
20-24	174.6	165.4	340.0
25-29	172.2	166.1	338.2
30-34	167.8	146.8	332.6
35-39	164.1	163.1	327.2
40-44	166.0	165.9	331.9
45-49	157.3	158.3	315.6
50-54	144.8	145.6	290.3
55-59	125.0	126.7	251.6
60-64	98.8	101.2	199.9
65-69	74.2	77.9	152.2
70-74	49.4	55.0	104.4
75+	53.7	68.5	122.2
Jumlah Provinsi	2193.7	2169.1	4362.7

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Kepadatan penduduk di Provinsi Bali mencapai 747 jiwa/km² pada tahun 2020. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kota Denpasar, dimana selama kurun waktu 2016 sampai 2020 kepadatan penduduk Kota Denpasar terus mengalami peningkatan hingga mencapai 5.676 jiwa/km² pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan dalam ketersebaran kepadatan penduduk di Provinsi Bali yang bermuara pada kondisi ekonomi dan penyediaan infrastruktur pendukung yang juga belum merata di setiap kabupaten/kota.

Gambar 2.7 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (jiwa/km²)



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

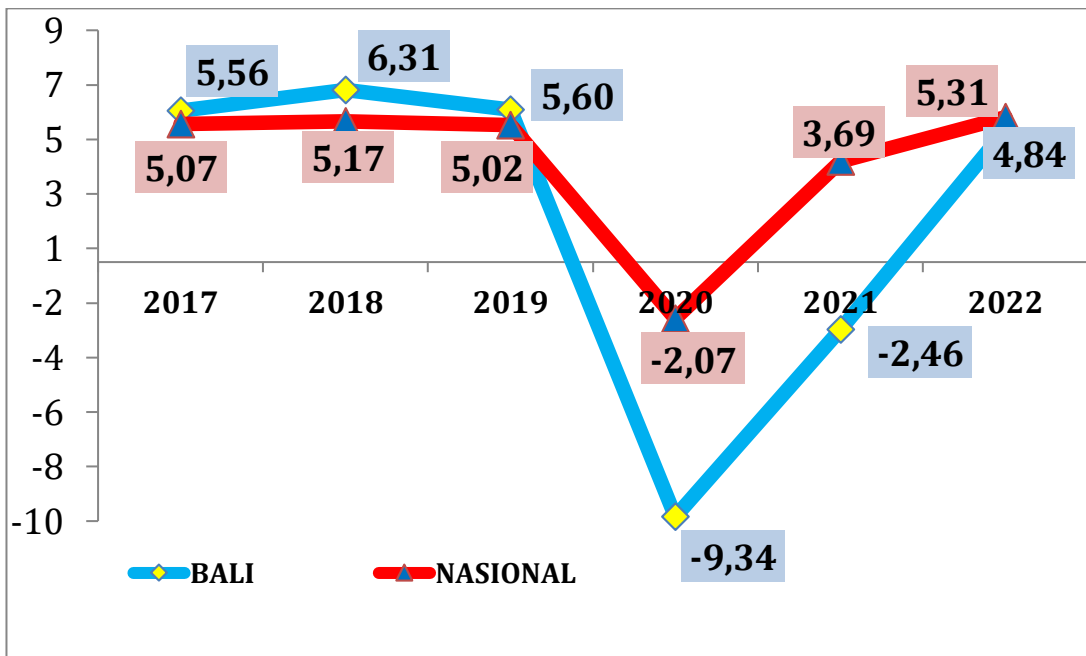
Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Daya dukung sektor pariwisata dan sektor jasa pendukung pariwisata, serta sektor pertanian adalah modal dasar dalam menggerakan pembangunan di Provinsi Bali. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% aktivitas ekonomi Bali disumbangkan oleh industri pariwisata sedangkan kontribusi sektor pertanian tidak lebih dari 20%. Kondisi perekonomian Provinsi Bali

berfluktuasi selama tahun 2017-2022. Pada tahun 2019 pertumbuhan Ekonomi Bali yang sebesar 5,60% lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,02%. Terjadinya COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan Ekonomi Bali mengalami kontraksi sebesar 9,31% paling dalam di antara provinsi lain di Indonesia. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di berbagai negara menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi Bali yang sebagian besar bersumber dari sektor pariwisata. Pada tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali naik menjadi 4,84% dikarenakan Covid -19 sudah mulai mereda.

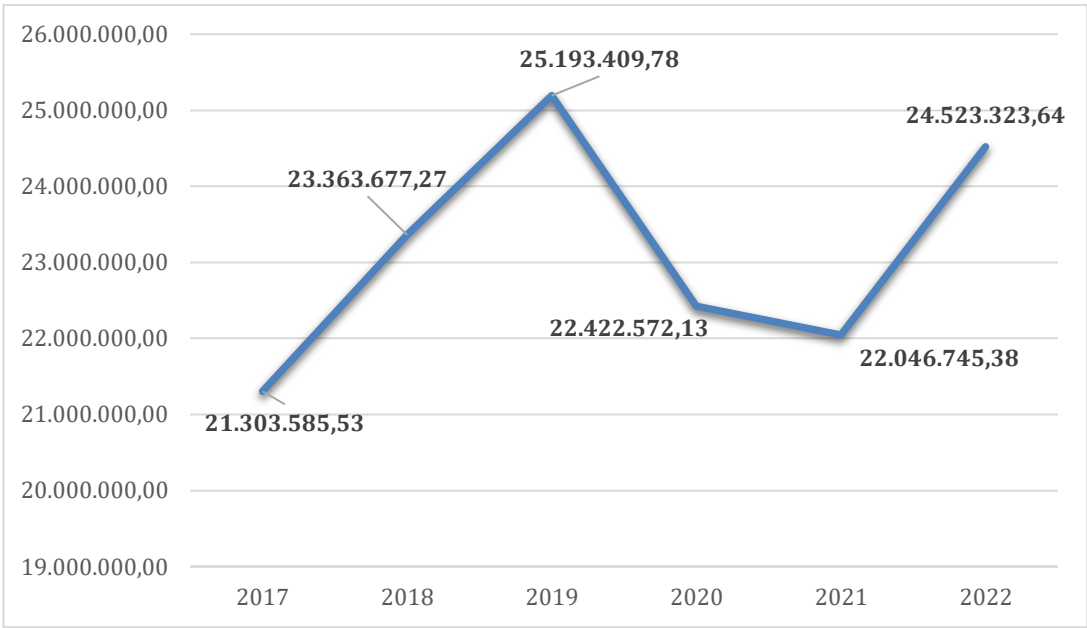
Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Kinerja ekonomi Bali selama periode tahun 2017-2022 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang dihasilkan pada masing-masing lapangan usaha/sektor ekonomi. Pada tahun 2019, total nilai tambah yang tercipta (PDRB atas dasar harga berlaku) di Bali mencapai 251,93 triliun rupiah. Nilai tambah yang tercipta di Bali termasuk dalam kategori cukup besar untuk ukuran provinsi kecil yang tidak memiliki sumberdaya alam dan migas. Pada tahun 2022, total nilai tambah yang tercipta (PDRB atas dasar harga berlaku) di Provinsi Bali naik mencapai 245,53 triliun rupiah dibanding tahun 2021 sekitar 220,46 Triliun.

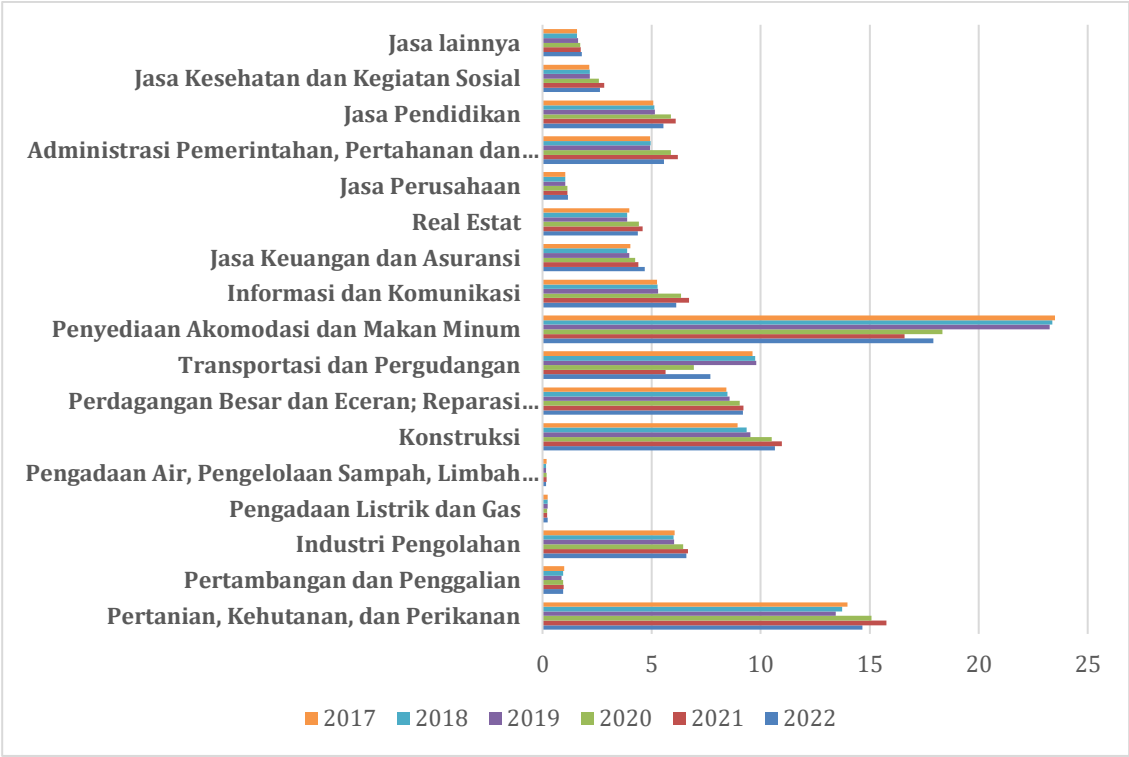
Gambar 2.9 Nilai PDRB ADHB (dalam miliar)
Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Struktur perekonomian Provinsi Bali masih ditunjang oleh sektor tersier (pariwisata). Hal tersebut terlihat dari kategori yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu kategori penyediaan akomodasi makan dan minum. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi makan dan minum tahun 2017-2022 berturut-turut yaitu 23,49 persen, 23,38 persen, 23,25 persen, 18,33 persen, 16,6 persen dan 17,93 persen. Segmentasi wilayah sektor tersier ini berada di wilayah Bali bagian selatan atau biasa disebut “Sarbagita” (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), karena di wilayah tersebut terkonsentrasi aktivitas ekonomi pendukung pariwisata, seperti: hotel, villa, agen dan biro perjalanan wisata, restoran, rumah makan, cafe, dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, tetapi justru terjadi peningkatan pada sektor lainnya.

Gambar 2.10 Kontribusi PDRB ADHB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

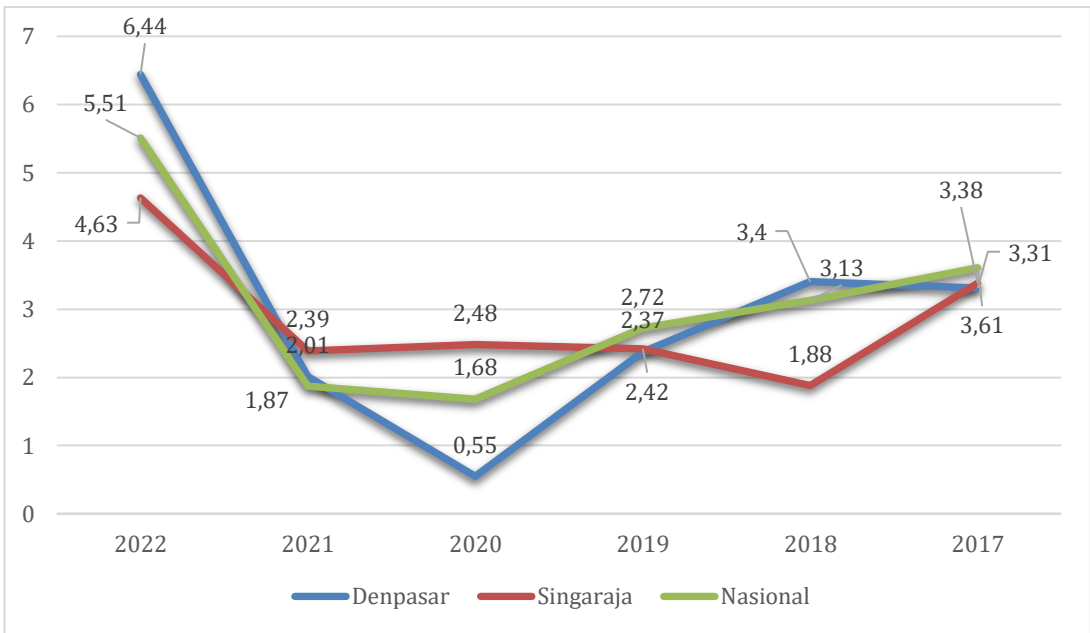
2.2.2 Inflasi

Laju inflasi Provinsi Bali (Kota Denpasar) mengalami penurunan selama 2018-2022. Laju inflasi Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 3,4 persen mengalami penurunan menjadi 2,37 persen pada tahun 2019 begitu juga pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,55 persen. Pada Bulan Mei 2020 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi sedalam 0,55 persen yang ditunjukkan dengan penurunan indeks harga konsumen dari 104,42 persen pada April 2020 menjadi 104,32 persen pada Mei 2020. Pada tahun 2022, dari sebelas kelompok pengeluaran, dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok Pakaian dan Alas Kaki padasedalam -0,11 persen, dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sedalam -0,39 persen.

Sementara itu, tiga kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi tertinggi yaitu kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan rumag tangga setinggi 14,85 persen; kelompok VII Bahan Makanan, Minuman, dan Tembakau setinggi 10,85 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya setinggi 7,49 persen. Empat kelompok pengeluaran tercatat tidak mengalami perubahan

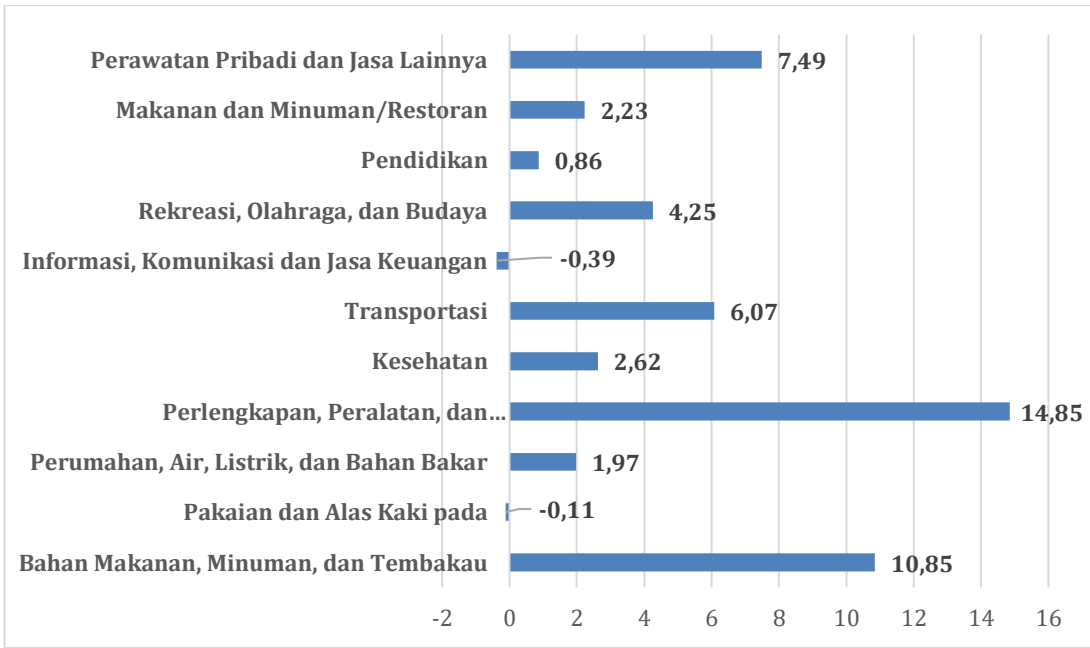
indeks atau stagnan yaitu kelompok V (kesehatan); kelompok VIII (rekreasi, olahraga dan budaya); kelompok IX (pendidikan); dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran).

Gambar 2.11 Laju Inflasi Provinsi Bali Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.12 Laju Inflasi Provinsi Bali Menurut Komoditas Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia, 2022

2.2.3 PDRB per Kapita Provinsi Bali

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada

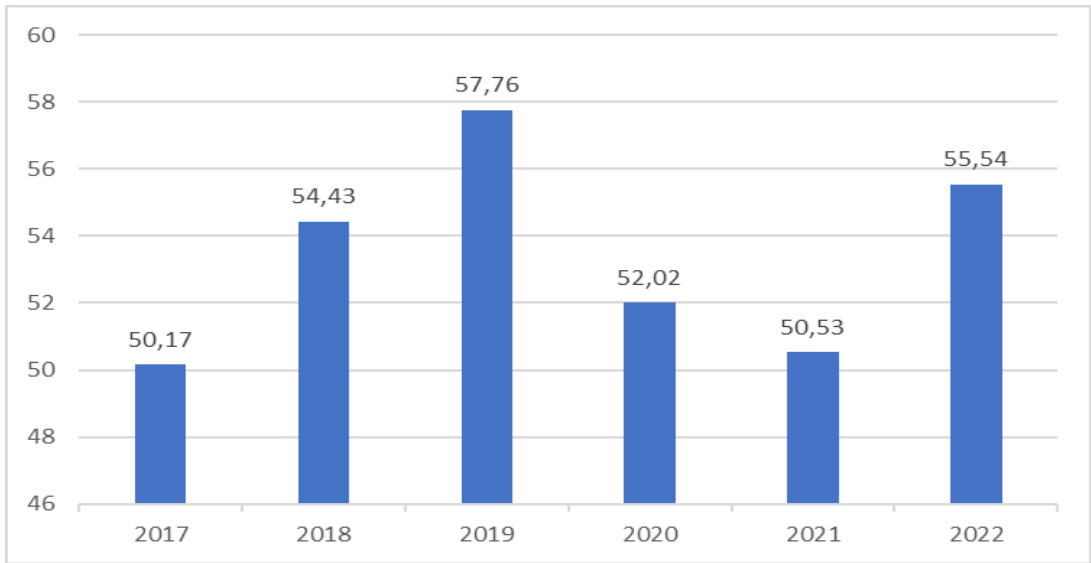
pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun. Dalam konteks Bali, selama periode 2017 sampai 2022 PDRB per kapita terus mengalami peningkatan.

Tahun 2017 PDRB per kapita di Bali adalah sebesar 50.17 juta rupiah terus meningkat menjadi 54.43 juta rupiah pada tahun 2018 dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 57.75 juta rupiah. Pada tahun 2020, diperkirakan PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi Rp51,94 Juta. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi Rp50,38 Juta dan tahun 2022 meningkat Rp.55,54.

Namun demikian, PDRB per kapita Bali masih berada di bawah angka rata-rata nasional, hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh semua *stakeholder* untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita penduduk Bali. Berdasarkan data BPS Nasional, pada tahun 2018, PDRB Perkapita nasional adalah sebesar 55,98 Juta sedangkan Provinsi Bali adalah sebesar 54,43 Juta. Pada tahun 2021, PDRB Perkapita tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 260,44 Juta. PDRB Perkapita Provinsi Bali tahun 2021 juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2021, target PDRB Perkapita yang ditetapkan adalah 56 juta sampai 61 juta. Target ini berada jauh di atas realisasi

yaitu yang hanya 50,38 Juta dan pada tahun 2022 realisasi PDRB meningkat Rp.55,54 Juta. Dampak dari pandemi COVID-19 turut menjadi andil paling besar penyebab turunnya angka PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali. Pada tahun 2022 PDRB Bali kembali naik menjadi 55,54%.

Gambar 2.13 PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Bali
Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

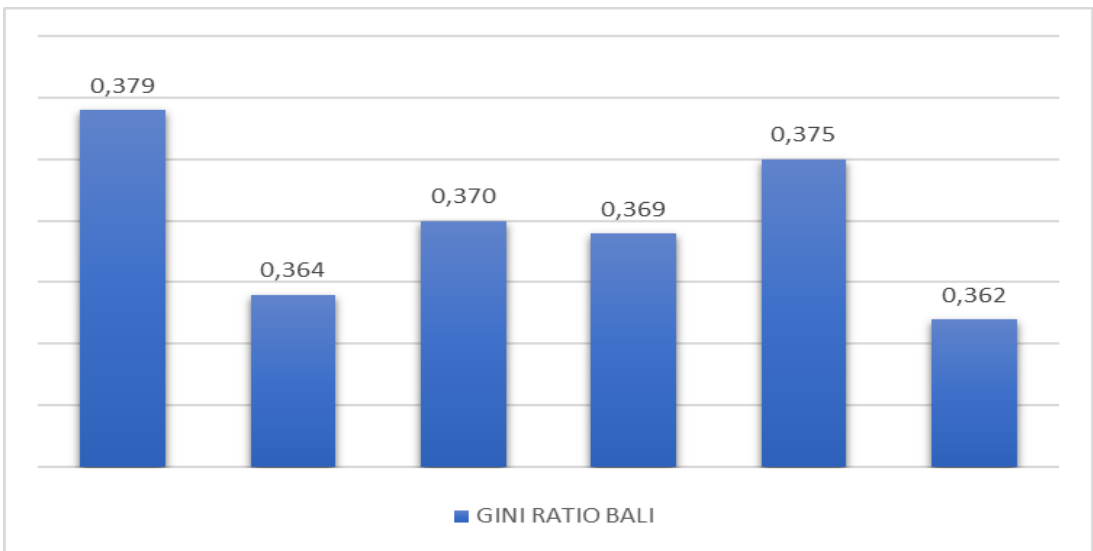
2.2.4 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat pemerataan pendapatan pada umumnya diukur dengan indeks gini atau gini rasio dan kriteria Bank Dunia. Kedua indikator tersebut, menghitung berapa persen bagian dari total pendapatan penduduk suatu wilayah yang diterima oleh penduduk pada masing-masing golongan pendapatan.

Gini rasio Provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data BPS gini rasio di Provinsi Bali pada tahun 2017 adalah sebesar 0,379 dan menurun menjadi 0,364 pada tahun 2018. Ini mengindikasikan bahwa selama kurun waktu tersebut ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali menjadi 0,37 dan terakhir 0,375 di tahun 2021. Gini rasio Provinsi Bali pada September 2021 tercatat sebesar 0,375 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan moderat. Nilai ini mengalami penurunan dari

kondisi Maret 2021 dengan indeks gini 0,378 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali kondisi September 2021 mengalami penurunan. Namun, apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, gini rasio Bali mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin yang tercatat sebesar 0,369. Pada Tahun 2022 gini ratio Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 0,362, turun sebesar 0,013 dari tahun 2021 sebesar 0,375.

Gambar 2.14 Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.2.5 Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan dan papan. Semakin tinggi angka kemiskinan menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat di suatu daerah/negara yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sebaliknya semakin rendah angka kemiskinan menunjukkan semakin kecil jumlah masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Angka kemiskinan di Provinsi Bali menunjukkan trend yang cukup baik yaitu cenderung mengalami penurunan yang artinya jumlah masyarakat miskin (mampu memenuhi kebutuhan dasar) setiap tahunnya semakin kecil namun kembali terjadi peningkatan akibat pandemi COVID-19.

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka kemiskinan di Bali adalah sebesar 4,25% yang berarti ada sebanyak 4,25% dari total populasi di Bali masih berada pada garis kemiskinan.

Angka ini beranjak turun sampai pada angka 3,78% pada tahun 2020. Dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian Bali berimbas pada naiknya penduduk miskin pada tahun 2021.

Pada level kabupaten/kota Gambar 2.15, Kabupaten Badung menempati posisi pertama dengan angka kemiskinan terendah yaitu 1,78% pada tahun 2019. Angka ini sudah melewati target nasional dan melewati pencapaian level provinsi. Kota Denpasar menduduki peringkat kedua dengan angka kemiskinan mencapai 2,1% pada tahun 2019, sedangkan Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2019 adalah Kabupaten Karangasem yaitu 6,25%.

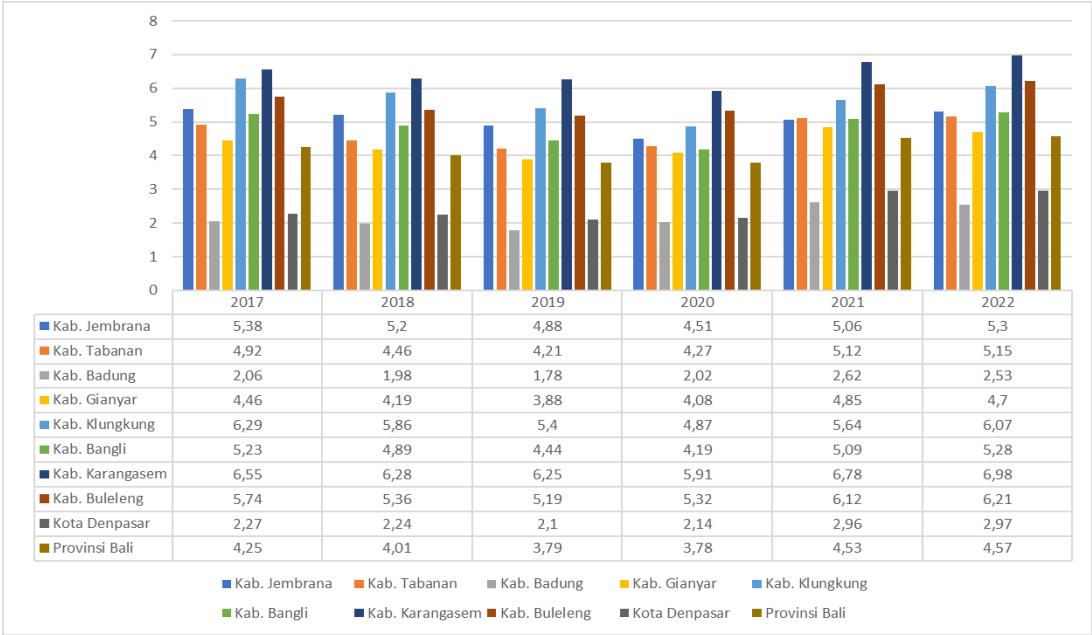
Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2021 sebesar 4,53% atau naik 0,79 poin dari tahun 2020 yang sebesar 3,78%. Angka ini masih jauh berada pada rata-rata nasional yaitu sebesar 9,71%. Namun demikian, persentase penduduk miskin nasional mengalami penurunan dari periode Maret 2021. Pada periode Maret 2021, persentase penduduk miskin nasional tercatat sebesar 9,54%. Papua masih merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu 27,38%. Jumlah penduduk miskin di Bali pada tahun 2021 sebanyak 201,97 ribu orang, mengalami peningkatan 36,78 ribu orang dari tahun 2020 dan pada tahun 2022 penduduk miskin sebanyak 205,68 ribu mengalami penigkatan 3,71 ribu dari tahun 2021.

Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2017-2022

No	Penduduk Miskin	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah (Ribu Jiwa)	176,48	171,76	163,85	165,19	201,97	205,68
2	Persentase (%)	4,25	4,01	3,79	3,78	4,53	4,57

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.15 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2022



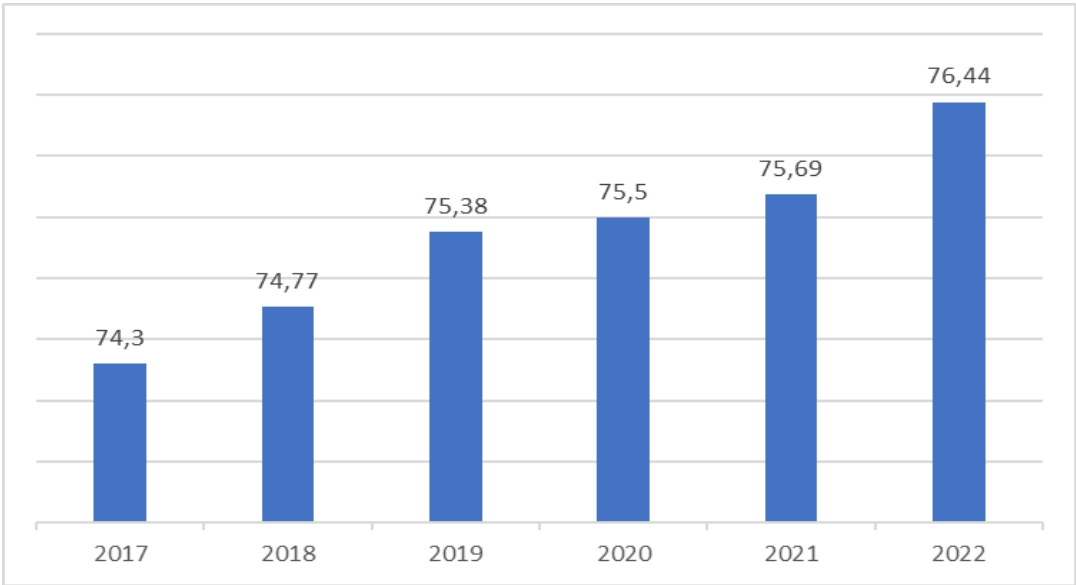
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan terhadap angka, tingkat melek huruf, tingkat pendidikan dan standar hidup masyarakat suatu daerah/negara. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu 1) umur panjang dan hidup sehat; 2) pengetahuan; dan 3) standar hidup layak.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali yang berhasil dihimpun, kecenderungan angka IPM di Provinsi Bali selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Realisasi IPM Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 74,30 dan terus meningkat menjadi 75,69 pada tahun 2021. Angka IPM tersebut termasuk dalam kategori tinggi dan jika dibandingkan dengan IPM Nasional tinggi dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebesar 72,29 dan tahun 2022 IPM meningkat sebesar 76,44. Berdasarkan data tersebut, secara rata-rata penduduk di Provinsi Bali sudah mendapatkan akses pendidikan yang baik, akses kesehatan yang baik termasuk juga mendapatkan kesejahteraan melalui akses pekerjaan yang baik.

Gambar 2.16 Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Bali Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2022

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	71,46	71,68	71,99	72,13	72,24	72.60
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,21	13,23	13,27	13,33	13,4	13,48
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,55	8,65	8,84	8,95	9,06	9,39
Pengeluaran Perkapita	Rupiah	13,573	13,886	14,146	13,929	13,82	13 942
IPM	Nilai	74,3	74,77	75,38	75,5	75,69	76,44
Pertumbuhan IPM	Persen	0,06	0,04	0,06	0,01	0,25	0,99

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

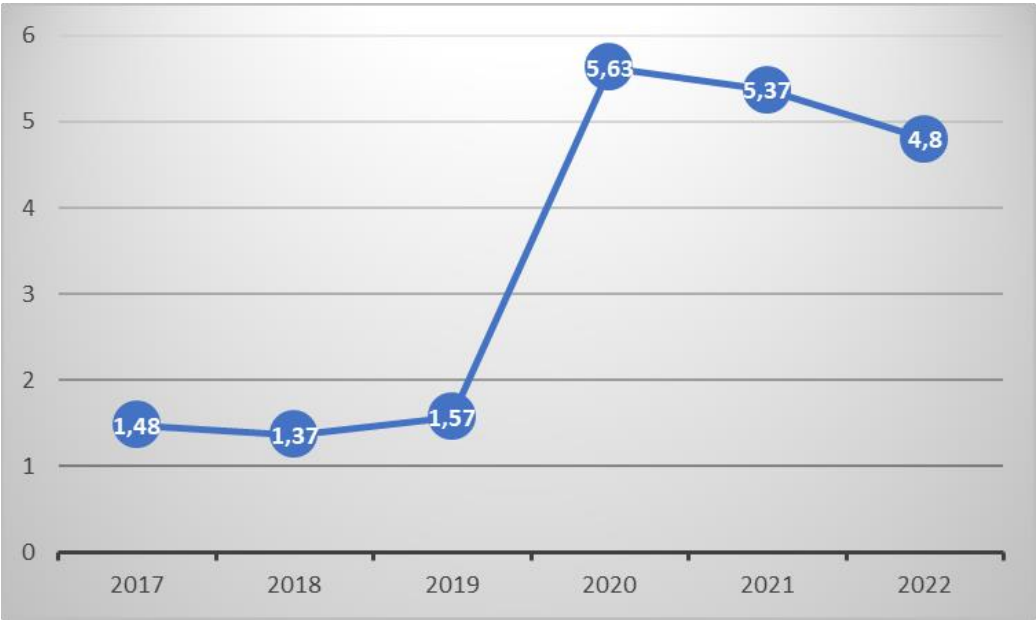
2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan demikian TPT dapat dibedakan menjadi 1) penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; 2) penduduk yang tak punya pekerjaan dan

mempersiapkan usaha; 3) penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan 4) penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT ini menunjukkan kemampuan sebuah negara/daerah dalam menyiapkan kesempatan kerja pada penduduk yang siap bekerja. Semakin rendah nilai TPT maka semakin kuat struktur ekonomi sebuah daerah/negara, sebaliknya semakin tinggi TPT maka semakin siap pemerintah menyediakan ruang kerja bagi penduduk dalam usia angkatan kerja.

Angka TPT di Provinsi Bali periode tahun 2017-2019 selalu berada di bawah rata-rata nasional. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap industri di Provinsi Bali mengakibatkan capaian TPT Provinsi Bali tahun 2019 sebesar 1,52 persen. Akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perusahaan-perusahaan/industri utamanya yang bergerak pada sektor akomodasi dan makan minum, transportasi, serta jasa perusahaan banyak yang memberhentikan/merumahkan tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan angka TPT yang sangat signifikan mencapai 5,63 persen, tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 5,37 persen dan tahun 2022 TPT menurun lagi menjadi 4,8 persen.

Gambar 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2017-2022

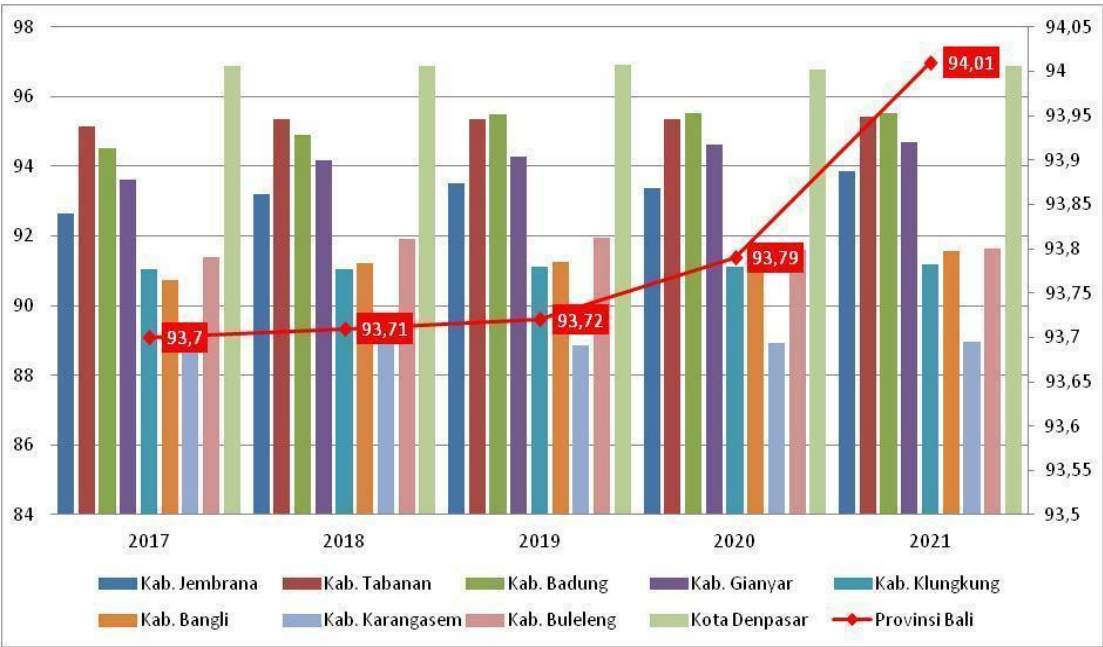


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Gambar 2.18 menunjukkan bahwa IPG di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu dari 93,7 persen menjadi 94,01 persen hal ini menunjukkan rendahnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Bali.

Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Perempuan (IPG) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

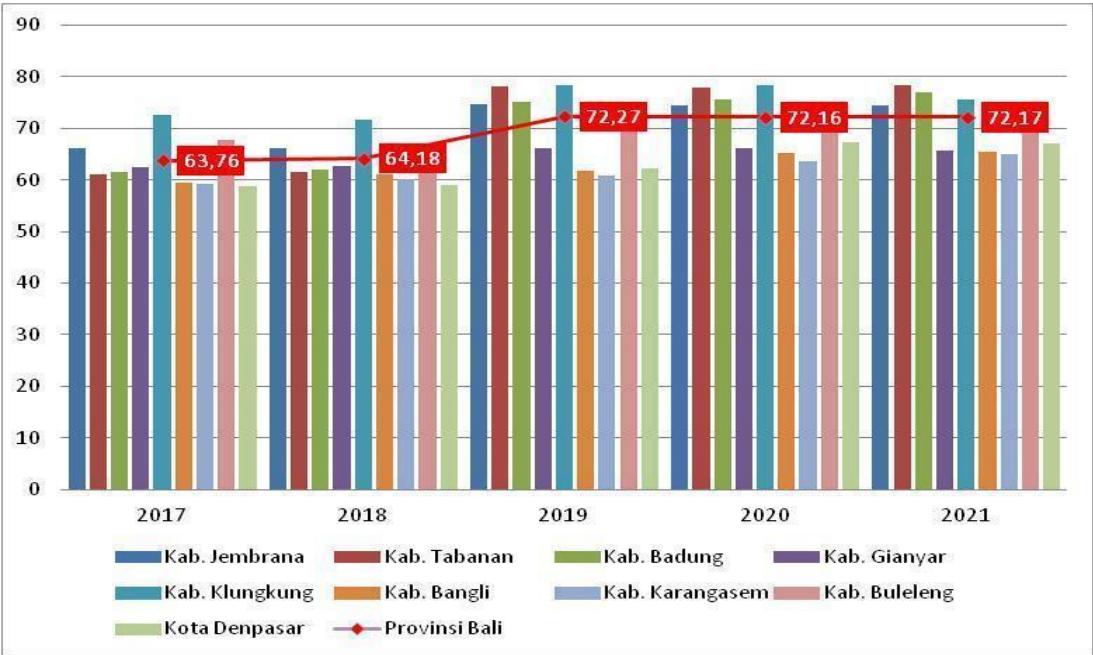


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Gambar 2.19 menunjukkan bahwa IDG di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yaitu dari 63,76 persen menjadi 72,27 persen dan mengalami sedikit penurunan menjadi 72,17 di tahun 2021. Ini

mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan baik itu pada bidang politik dan ekonomi semakin baik dari tahun ke tahunnya walau sedikit mengalami penurunan di tahun 2021.

Gambar 2.19 Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

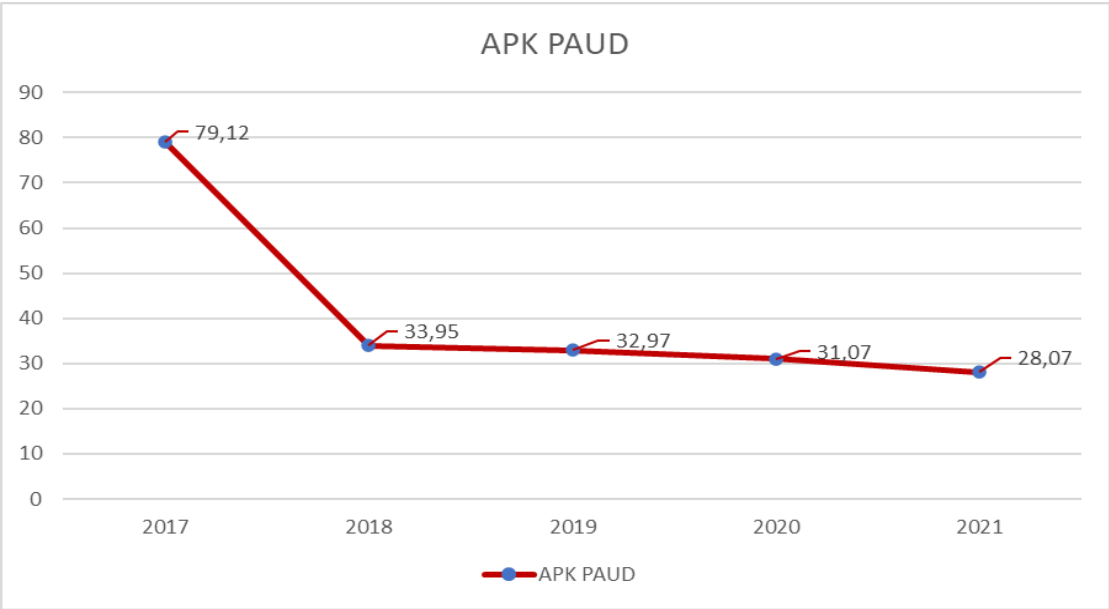
Keberhasilan pembangunan di Provinsi Bali salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karenanya peningkatan akses dan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah dapat melalui beberapa indikator untuk

mengetahuinya, yaitu: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut adalah gambaran kondisi pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perkembangan partisipasi penduduk untuk mengenyam pendidikan anak usia dini mengalami tren penurunan, sehingga perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk mengedukasi masyarakat agar menempuh pendidikan dimulai dari jenjang PAUD. Berikut adalah gambaran capaian APK jenjang PAUD di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Gambar 2.20 APK PAUD Provinsi Bali Tahun 2017-2021



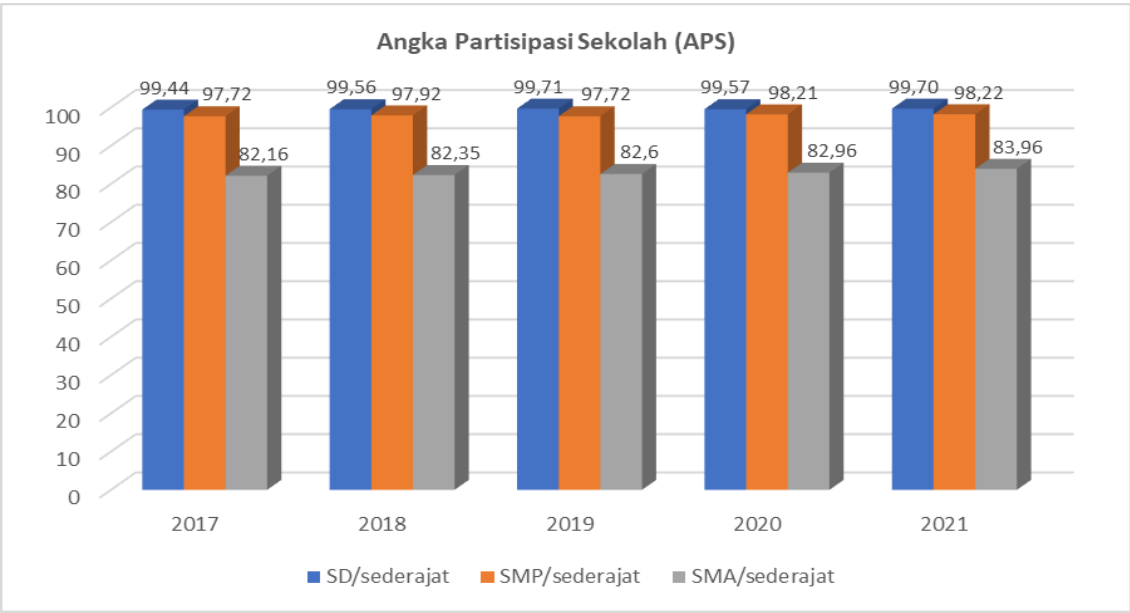
Sumber: Kemendikbud Ristek, 2022

2) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2021 untuk tingkat SD/ sederajat sebesar 99,70 persen sedangkan untuk tingkat SMP/ sederajat sebesar 98,22 persen dan untuk tingkat SMA/ sederajat sebesar 83,96 persen. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian partisipasi masyarakat untuk

masing-masing jenjang pendidikan sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan pencapaiannya, sesuai amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) pencapaian APS diharapkan mencapai 100 persen. Berikut adalah gambaran capaian APS jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Gambar 2.21 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Bali Tahun 2017-2021

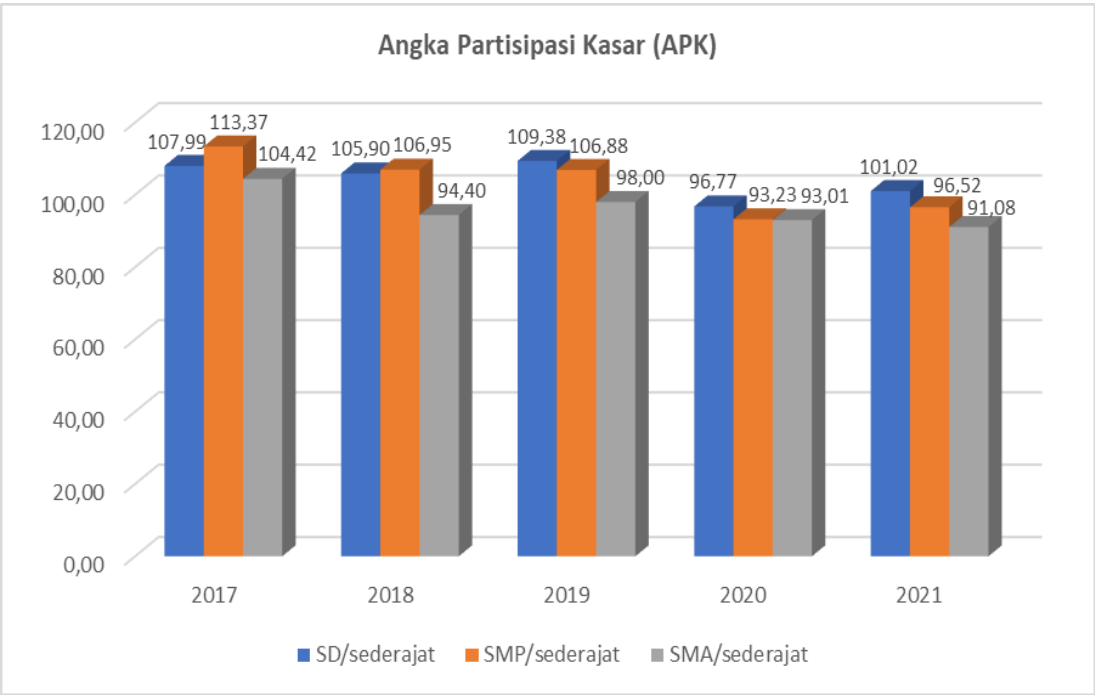


Sumber Data: BPS Bali, 2022

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan kesesuaian usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2021 untuk tingkat SD/ sederajat sebesar 102.02 persen sedangkan untuk tingkat SMP/ sederajat sebesar 96,52 persen dan untuk tingkat SMA/ sederajat sebesar 91,08 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa capaian partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan sudah cukup baik. Berikut adalah gambaran capaian APK jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Gambar 2.22 Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Bali
Tahun 2017-2021

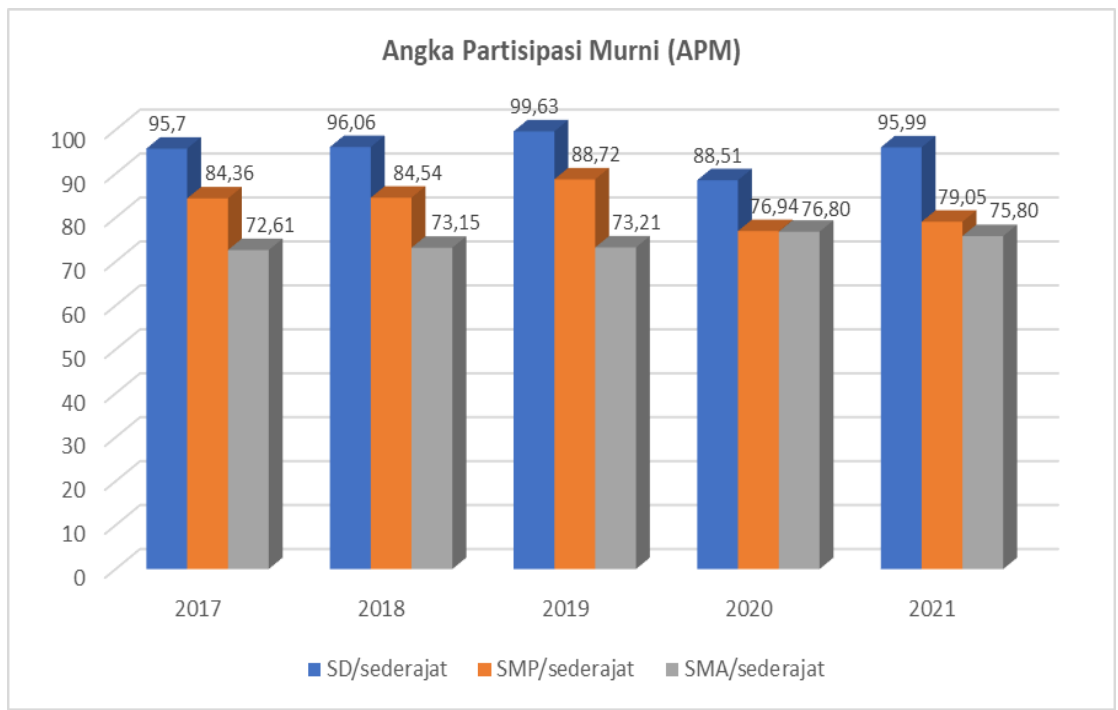


Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM didapat dengan membagi jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2021 untuk tingkat SD/ sederajat sebesar 95,99 persen, SMP/ sederajat sebesar 79,05 persen dan untuk tingkat SMA/ sederajat sebesar 75,80 persen. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian partisipasi masyarakat untuk masing-masing jenjang pendidikan sudah cukup baik namun masih belum mencapai target sehingga perlu adanya terobosan program/kegiatan dalam mendukung peningkatan akses pendidikan. Berikut adalah gambaran capaian APM jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Gambar 2.23 Angka Partisipasi Murni Provinsi Bali
Tahun 2017-2021

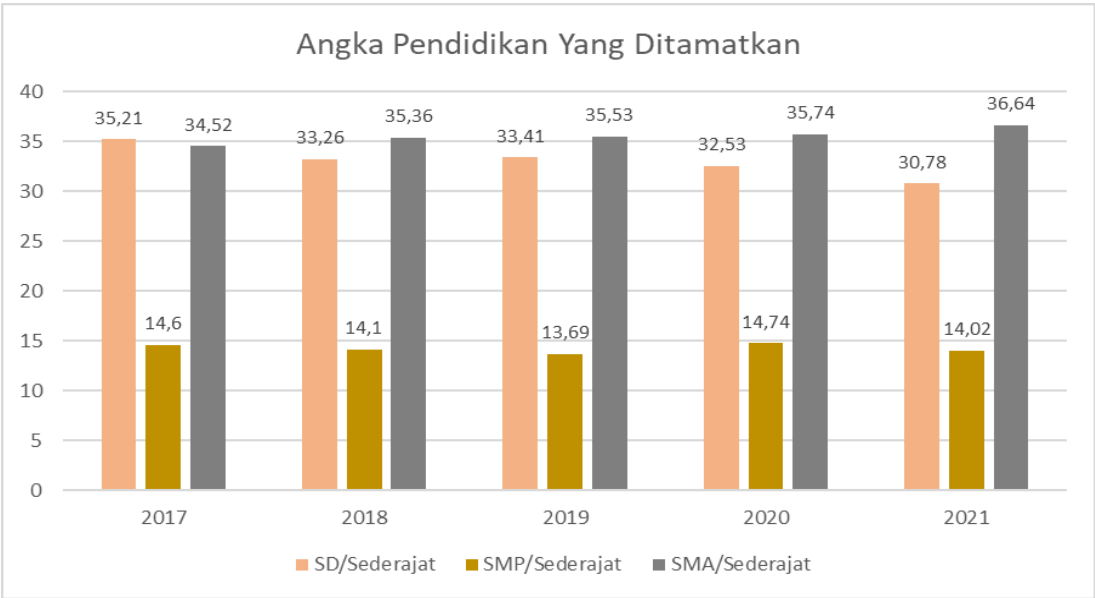


Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

5) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan menunjukkan seberapa besar jenjang pendidikan yang bisa diselesaikan oleh peserta didik di Provinsi Bali. Angka ini menunjukkan besarnya potensi kualitas SDM yang nantinya masuk ke angkatan kerja di Provinsi Bali. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan maka diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja yang tentunya bisa semakin menggerakkan ekonomi di Bali. Sampai dengan tahun 2021 yaitu untuk SD/average sebesar 30,78 persen, jenjang SMP/average sebesar 14,02 persen dan jenjang SMA/average sebesar 36,64 persen. Angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SD/average dan SMA/average sudah mencapai target yang sudah ditetapkan namun untuk SMP/average belum memenuhi target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta stakeholder terkait harus semakin meningkatkan upaya peningkatan pendidikan yang bisa diselesaikan khususnya pada jenjang SMP/average.

Gambar 2.24 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2017-2021

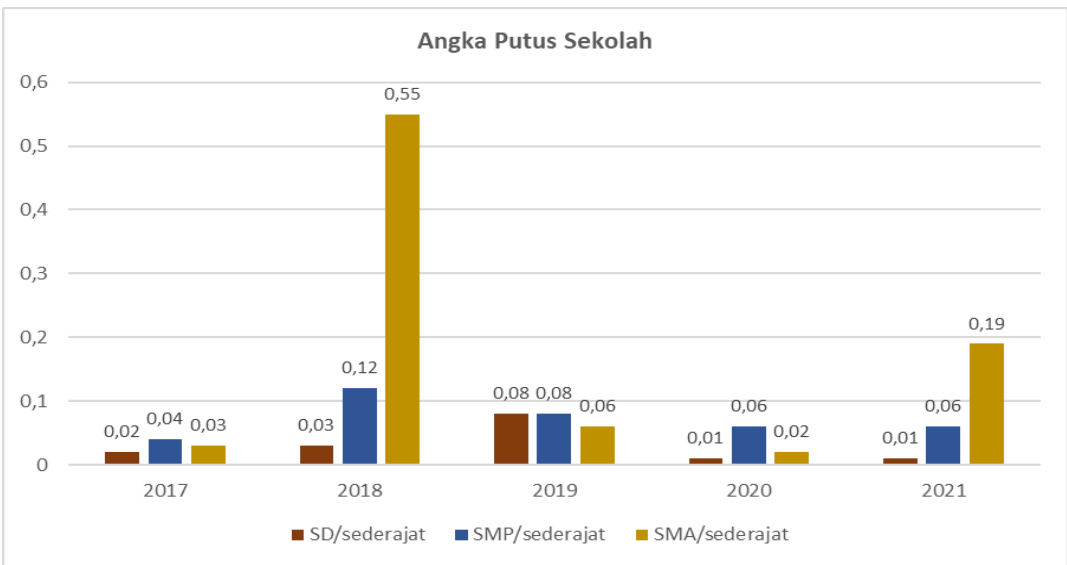


Sumber: BPS Bali, 2022

6) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan banyaknya peserta didik yang tidak menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Pada tahun 2021 angka putus sekolah di Provinsi Bali secara berturut-turut untuk jenjang SD/ sederajat sebesar 0,01 persen, SMP/ sederajat sebesar 0,06 persen dan SMA/ sederajat sebesar 0,19 persen. Angka ini menunjukkan pencapaian yang sudah baik karena sudah mampu mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Gambar 2.25 Angka Putus Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

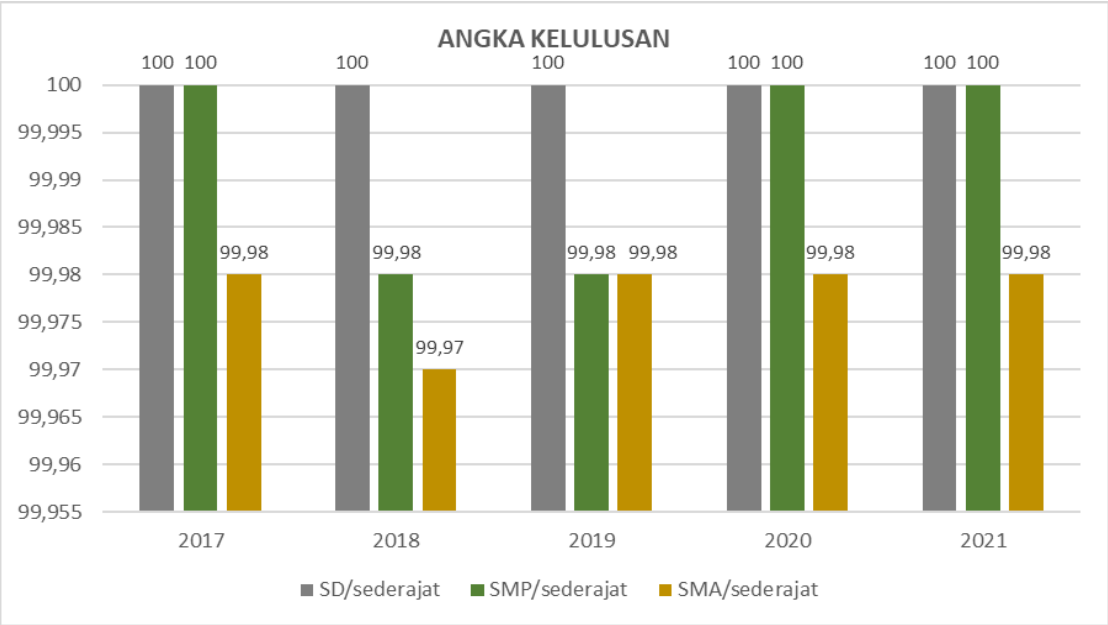


Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

7) Angka Kelulusan

Angka kelulusan baik pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat selama periode 2017-2021 sudah sangat baik yaitu hampir mencapai 100 persen secara keseluruhan. Dengan demikian ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah melalui berbagai program yang disusun oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta stakeholder terkait.

Gambar 2.26 Angka Kelulusan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

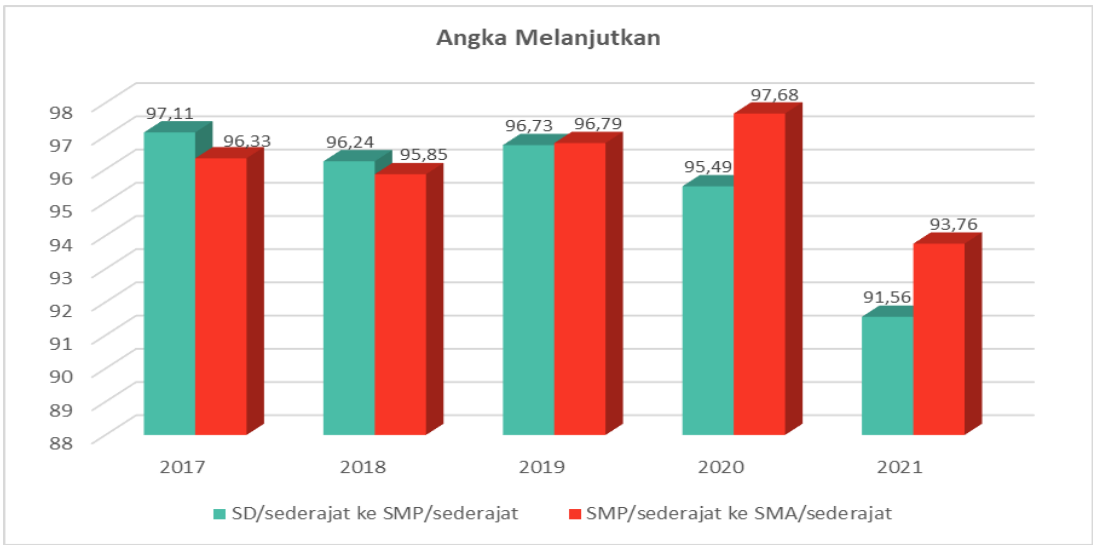


Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

8) Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah di Provinsi Bali sudah baik sebagaimana ditunjukkan oleh grafik di bawah. Rata-rata angka melanjutkan dari SD/ sederajat ke SMP/ sederajat tahun 2021 adalah 91,56 persen, sedangkan angka melanjutkan dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat adalah sebesar 93,76 persen. Ini mengindikasikan bahwa tingkat motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan di Provinsi Bali masih tinggi dan hal ini bisa menjadi keuntungan bagi kualitas SDM kependudukan usia produktif.

Gambar 2.27 Angka Melanjutkan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

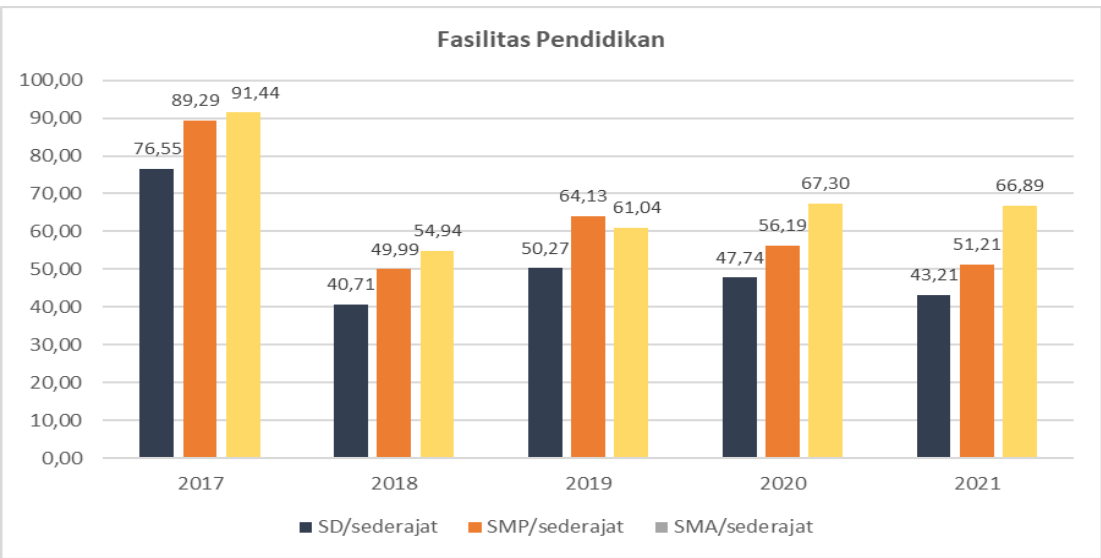


Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

9) Fasilitas Pendidikan

Secara umum fasilitas pendidikan (ruang kelas dalam kondisi baik) di Provinsi Bali pada jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat pada tahun 2021 berturut-turut adalah sebesar 43,21 persen, 51,21 persen, dan 66,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kedepannya pemerintah perlu mengupayakan kembali dorongan bantuan sarana/prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar fasilitas pendidikan yang diperlukan oleh peserta didik pada setiap jenjang di Provinsi Bali. Ketersediaan fasilitas pendidikan menjadi modal penting agar peserta didik di Provinsi Bali bisa meningkatkan kualitas SDMnya melalui pendidikan yang baik.

Gambar 2.28 Fasilitas Pendidikan (Kondisi Ruang Kelas Baik) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



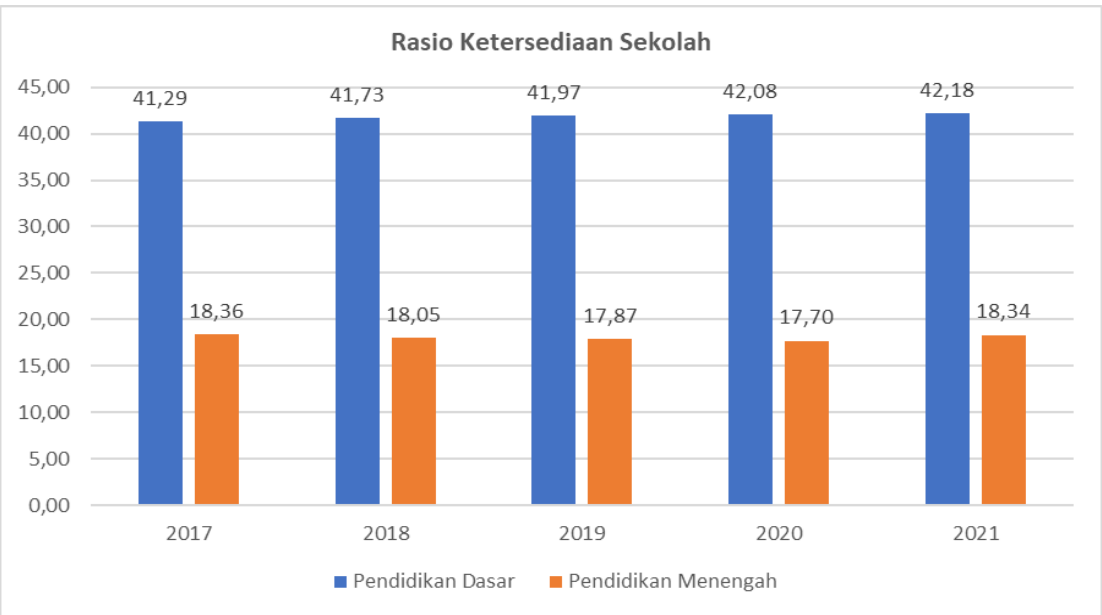
Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

10) Rasio Ketersediaan Sekolah dan Rasio Jumlah Guru

Rasio ketersediaan sekolah dan rasio jumlah guru terhadap murid ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Secara umum rasio ketersediaan sekolah selama kurun waktu 2017 sampai 2021 mengalami trend peningkatan. Dengan demikian program pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan menurut jenjang pendidikan sudah mampu mengakomodasi kebutuhan fasilitas pendidikan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

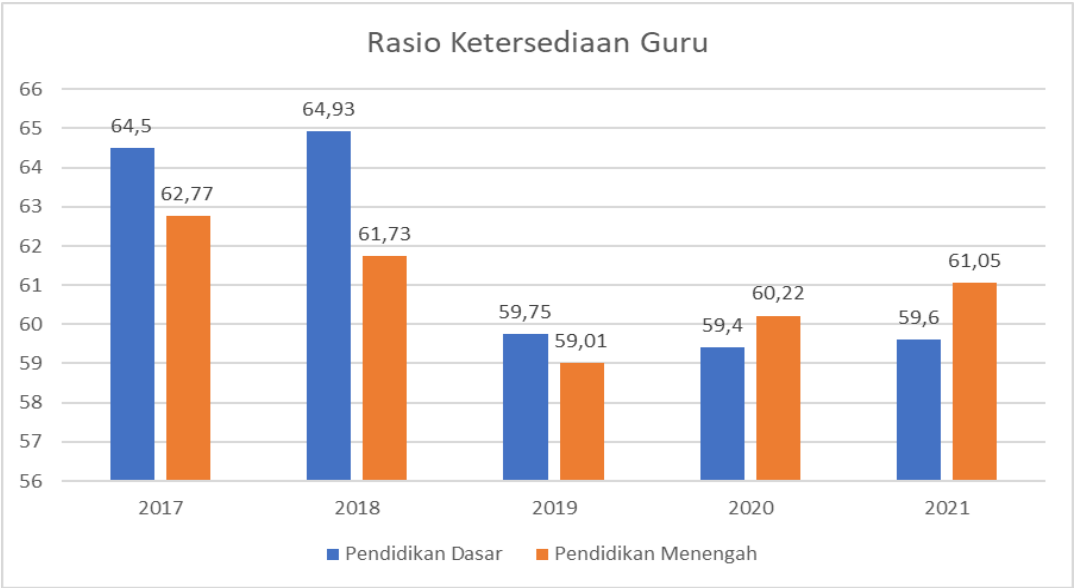
Rasio ketersediaan guru baik pada jenjang dasar dan menengah selama kurun waktu 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Sehingga kedepannya perlu dilakukan pemetaan dan analisis kebutuhan guru yang lebih intensif sehingga didapatkan rasio guru yang lebih optimal.

Gambar 2.29 Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017-2021



Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.30 Rasio Jumlah Ketersediaan Guru Terhadap Jumlah Murid Per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

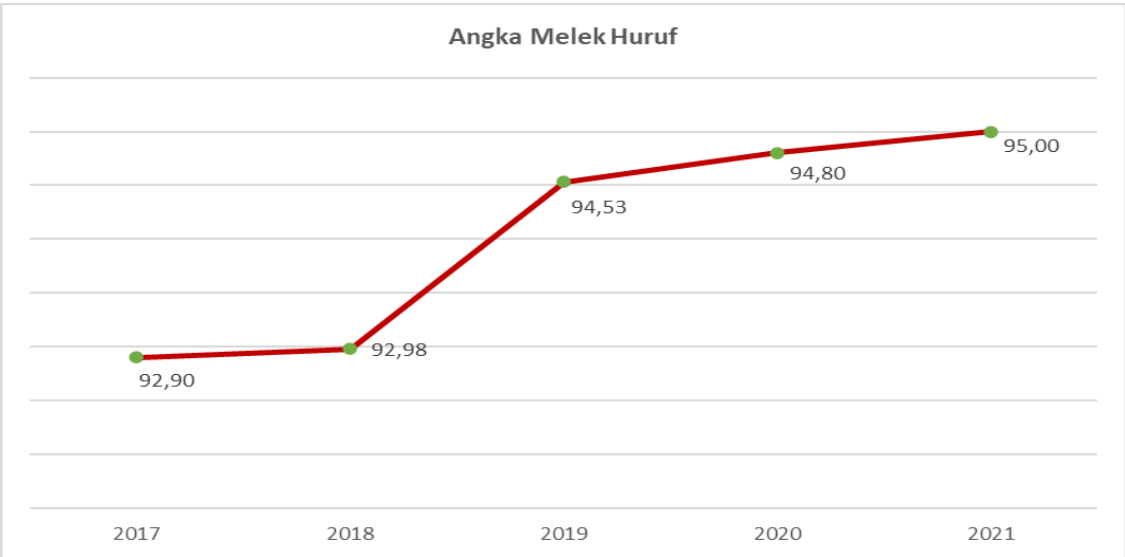


Sumber Data: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

11) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis di suatu wilayah. Angka melek huruf menjadi salah satu dasar dalam pertimbangan pengembangan suatu daerah karena akan berpengaruh terhadap kualitas SDM di usia produktif/angkatan kerja. Angka melek huruf di Provinsi Bali cenderung meningkat pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021.

Gambar 2.31 Angka Melek Huruf di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

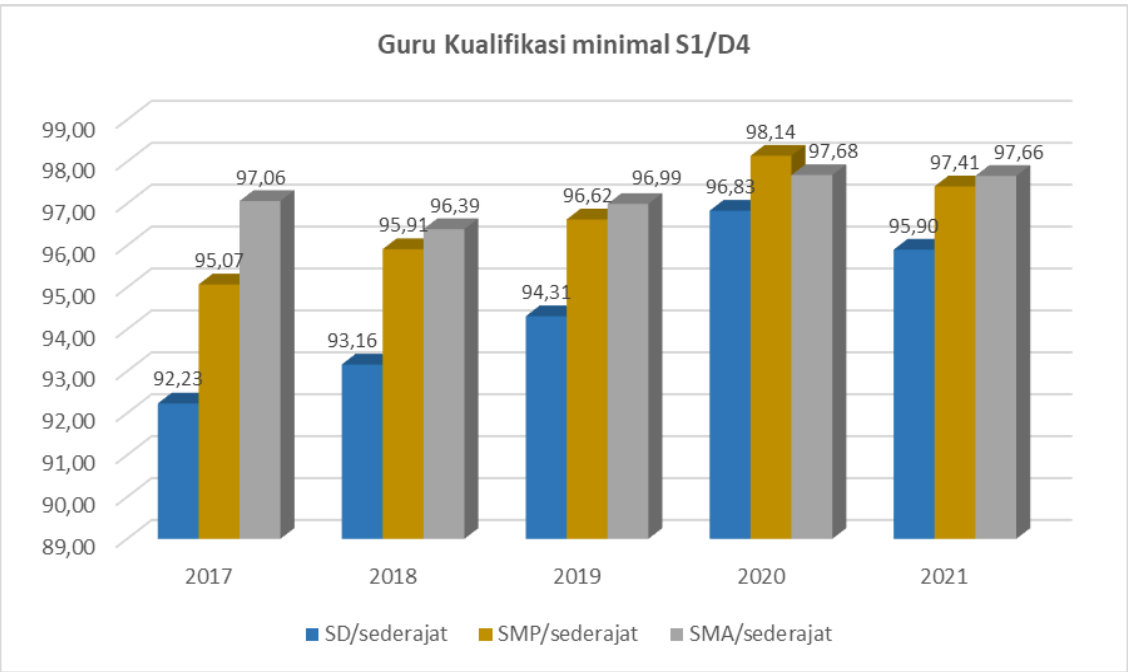


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

12) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi guru dengan pendidikan minimal S1/DIV pada tahun 2021 pada setiap jenjang pendidikan berturut - turut untuk SD/ sederajat sebesar 95,90 persen, SMP/ sederajat sebesar 97,41 persen, dan SMA/ sederajat sebesar 97,66, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru - guru di Provinsi Bali telah memenuhi kualifikasi minimal S1/D4.

Gambar 2.32 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4
Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

B. Kesehatan

Pemerintah Provinsi Bali mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Provinsi Bali dengan meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan. Urusan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Keberhasilan program pembangunan pada bidang kesehatan dapat diukur dari capaian berbagai indikator kesehatan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut.

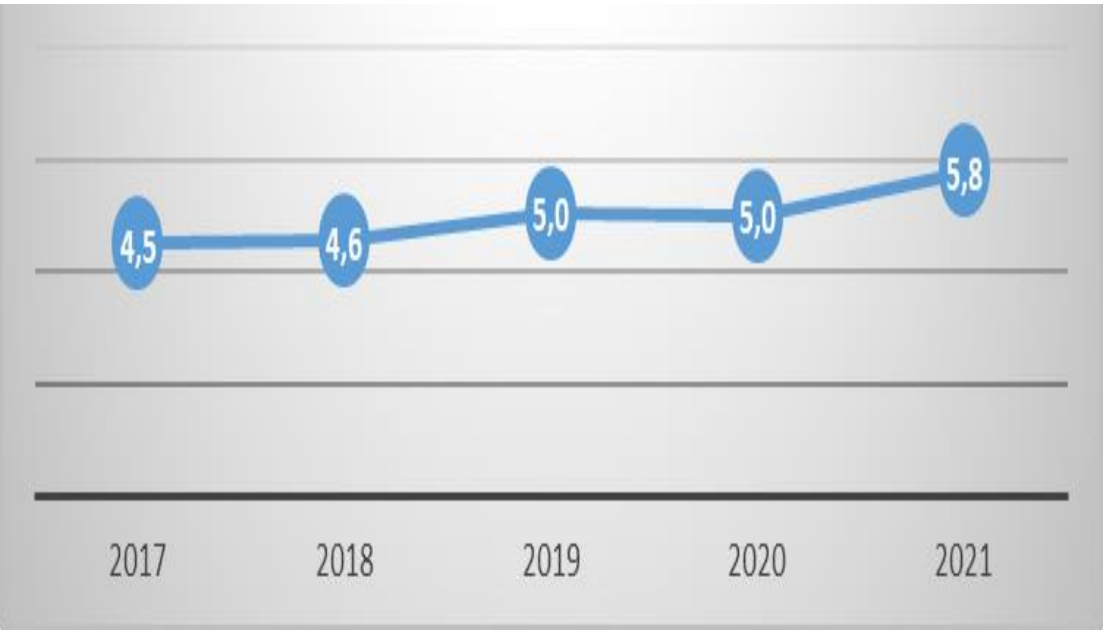
1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran

hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu Kelahiran Hidup (KH)). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu berturut-turut 4,80/1000 KH; 4,55/1000 KH; 5,04/1000 KH; 5,00/1000 KH; dan 5,8/1000 KH. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi angka kematian bayi di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program terkait penurunan AKB di Bali belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini perlu didorong agar tingkat AKB bisa lebih baik lagi.

Gambar 2.33 Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



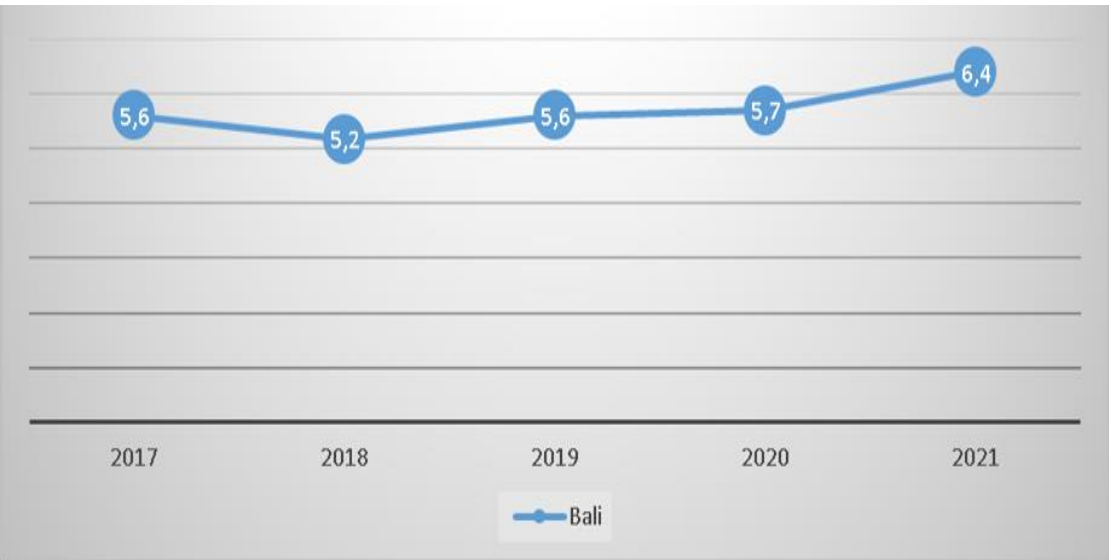
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

2) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

AKBa di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu sebesar 5,6/1000 anak; 5,2 /1000 anak; 5,6 /1000 anak; 5,7 /1000 anak; dan 6,4/1000 anak. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan angka kematian balita di Provinsi Bali dikarenakan adanya Pandemi Covid -19. Demi mencegah kematian balita, perlu upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Bahkan, pemerintah mengupayakan kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun.

Gambar 2.34 Angka Kematian Balita per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

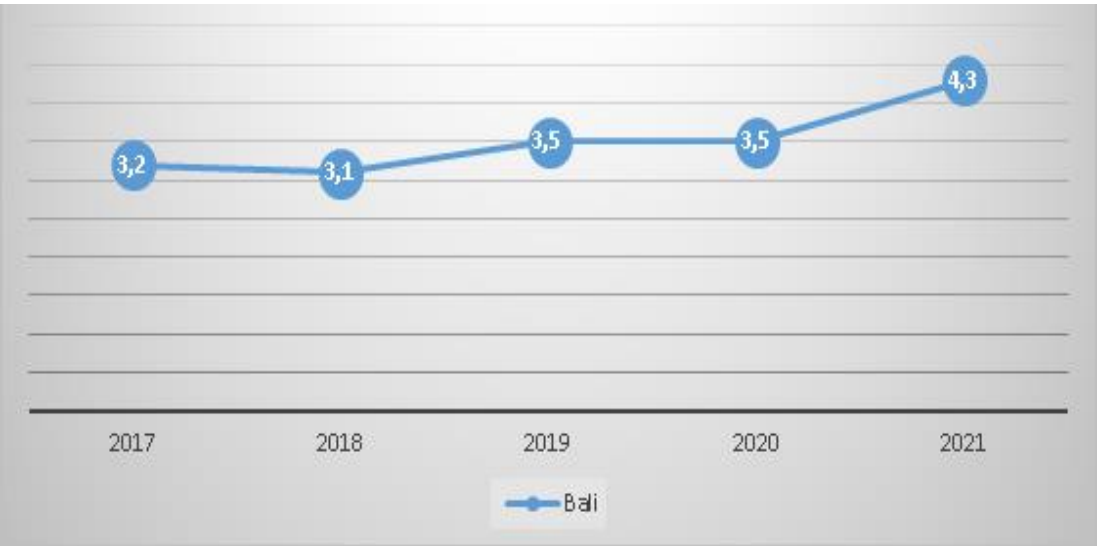
3) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan dan

umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Oleh karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Angka kematian neonatal di Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 3,2/1000 kelahiran hidup. Angka tersebut menurun menjadi 3,1/1000 kelahiran hidup pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 3,5/1000 kelahiran hidup dan tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 4,3 kelahiran hidup. Kenaikan angka kematian neonatal disebabkan karena pandemic COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin, baik secara akses maupun kualitas, termasuk pembatasan dalam pelayanan kesehatan neonatal, disamping itu juga adanya kekhawatiran orangtua untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Gambar 2.35 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



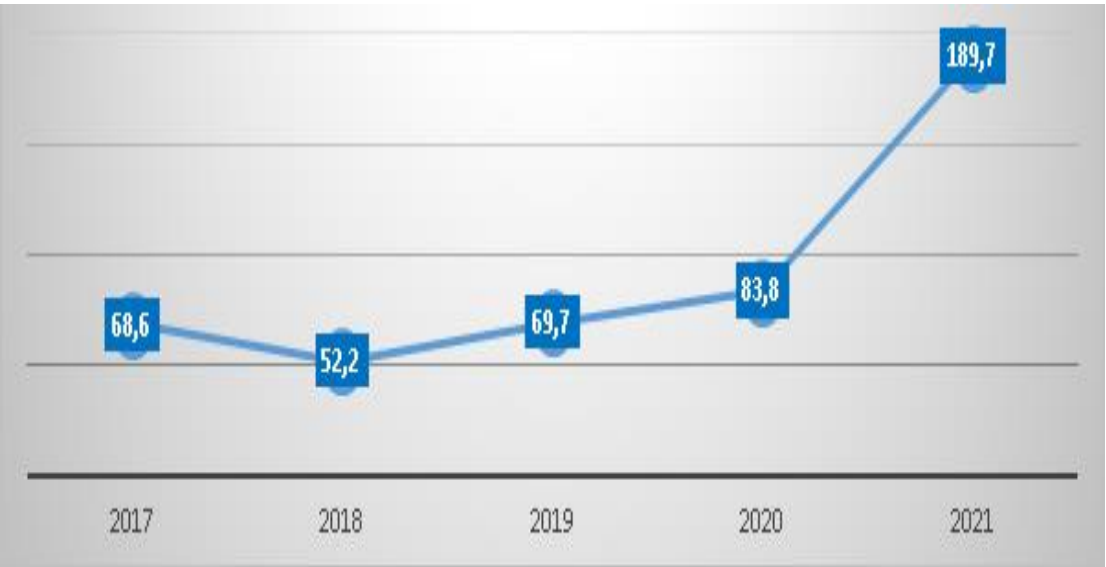
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

- 4) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi

kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain sebagainya per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya Angka Kematian Ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi AKI dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Secara umum Angka Kematian Ibu di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir berada di bawah angka nasional dan dibawah target yang ditetapkan 100 per 100.000 kelahiran hidup, namun setiap tahunnya belum bisa diturunkan secara signifikan.

Gambar 2.36 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 52,2 per 100.000 KH merupakan angka terendah dalam 5 tahun. Angka kematian ibu mulai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,7 per 100.000 KH,

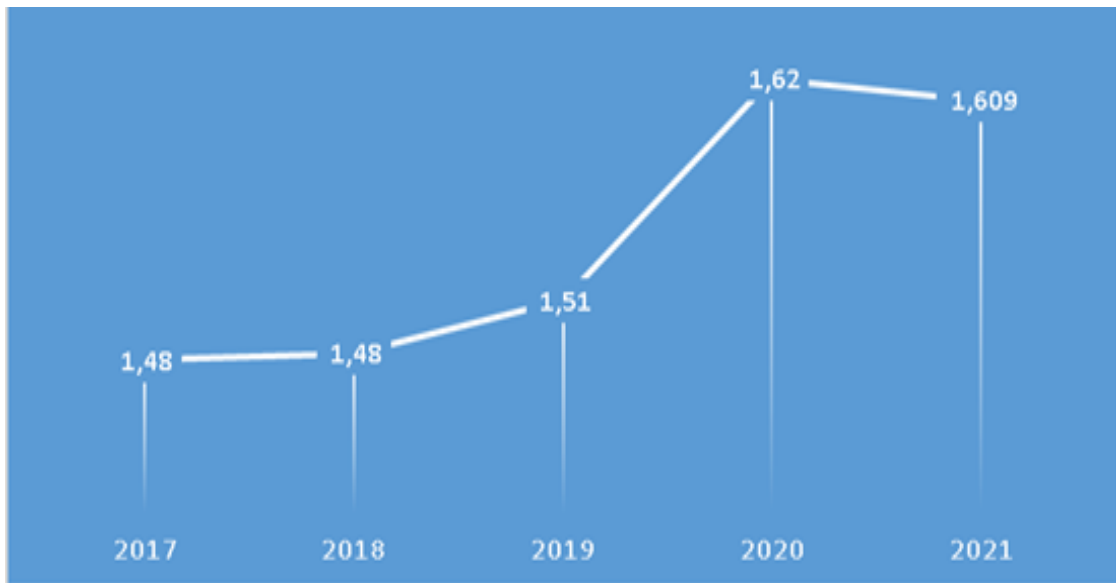
tahun 2020 meningkat lagi menjadi 83,8 per 100.000 KH dan tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu 189,7 per 100.000 KH. Peningkatan kematian ibu pada tahun 2021 secara absolut menjadi 125 kasus, dan peningkatan ini terjadi di semua kabupaten/kota. Berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan Provinsi, kondisi yang memperburuk kesehatan ibu adalah karena infeksi COVID-19 pada ibu hamil walaupun telah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan dengan tepat waktu.

5) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Rasio posyandu per balita di Provinsi Bali pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 1,48 persen terus mengalami peningkatan secara berturut-turut sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut 1,51 persen dan 1,62 persen sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 1,609. Kenaikan rasio posyandu mengindikasikan bahwa pelayanan posyandu untuk balita di Provinsi Bali masih dibawah kondisi ideal yaitu 1:50 atau 2 persen. Namun demikian usaha peningkatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga dari tahun ketahun (2017-2020) terjadi peningkatan rasio posyandu di Provinsi Bali.

Gambar 2.37 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



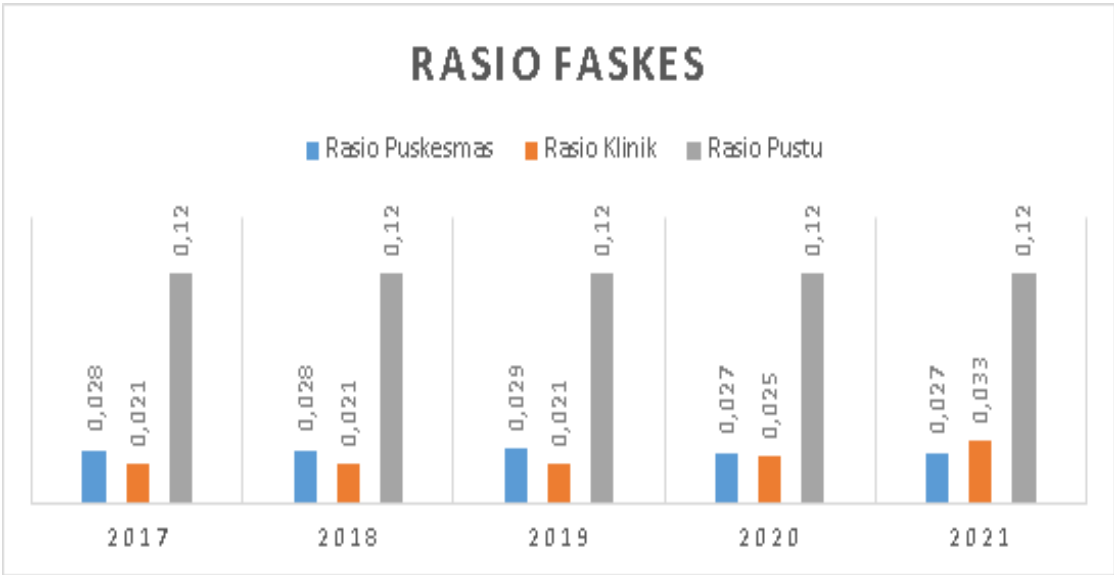
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

6) Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu

Puskesmas, Klinik dan Pustu merupakan beberapa sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 0,028 dan tahun 2019 sebesar 0,029 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi 0,028 dan pada tahun 2020 menjadi 0,027 sedangkan untuk Pustu cenderung stabil dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu sebesar 0,12. Rasio Klinik dari tahun 2017 ke 2019 stabil di angka 0,021 dan meningkat di tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 0,033. Ini menunjukkan bahwa jumlah pelayanan untuk klinik cenderung bertambah. Dengan demikian dari sisi jangkauan pelayanan, hampir semua penduduk sudah bisa dilayani oleh faskes. Harapannya kondisi ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Provinsi Bali. Kebijakan dan program peningkatan kualitas layanan perlu terus menerus ditingkatkan agar terjadi keseimbangan antara akses pelayanan yang terpenuhi dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Gambar 2.38 Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

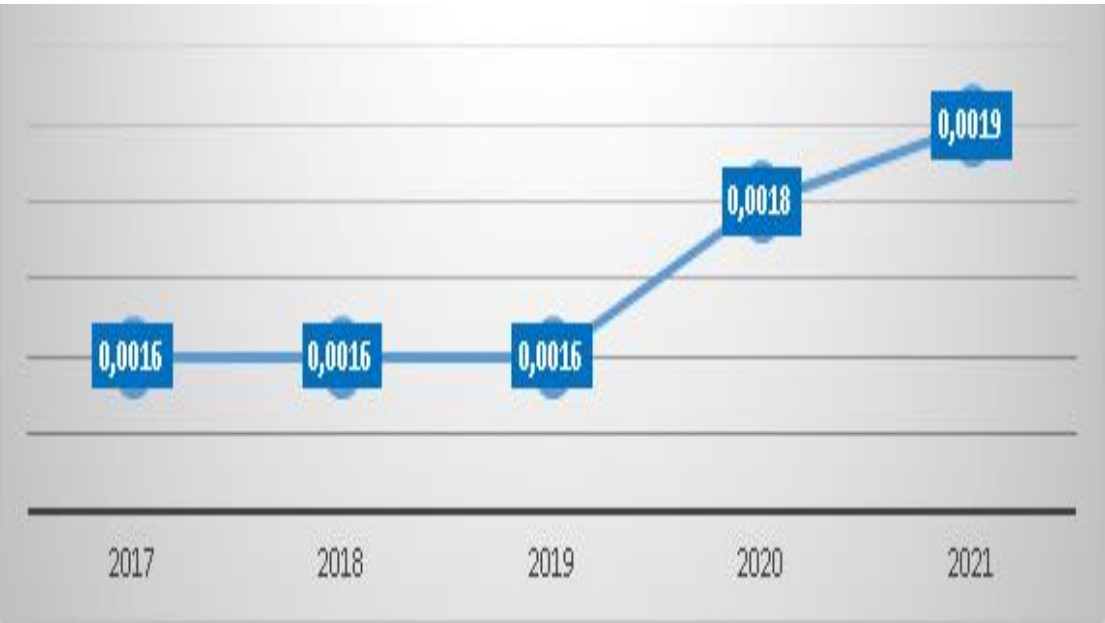
7) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Masyarakat yang tidak bisa dilayani secara optimal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik) karena jenis penyakit dan gejala penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih lanjut harus dirujuk ke rumah sakit. Dengan demikian rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan rujukan lanjutan yang harus bisa menyediakan fasilitas dan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik). Untuk mengetahui akses terhadap pelayanan rumah sakit harus dihitung besarnya akses fasilitas kesehatan rumah sakit terhadap jumlah penduduk.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai 2021 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2017 rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah sebesar 0,0016 sampai dengan tahun 2019. Rasio ini sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,0018 dan pada tahun 2021 menjadi 0,0019. Hal ini dikarenakan ada beberapa rumah sakit yang sudah selesai di bangun serta mendapatkan izin operasional pada tahun 2020

sehingga tingkat keterlayanan fasilitas kesehatan yang lebih baik bisa disediakan oleh pemerintah.

Gambar 2.39 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

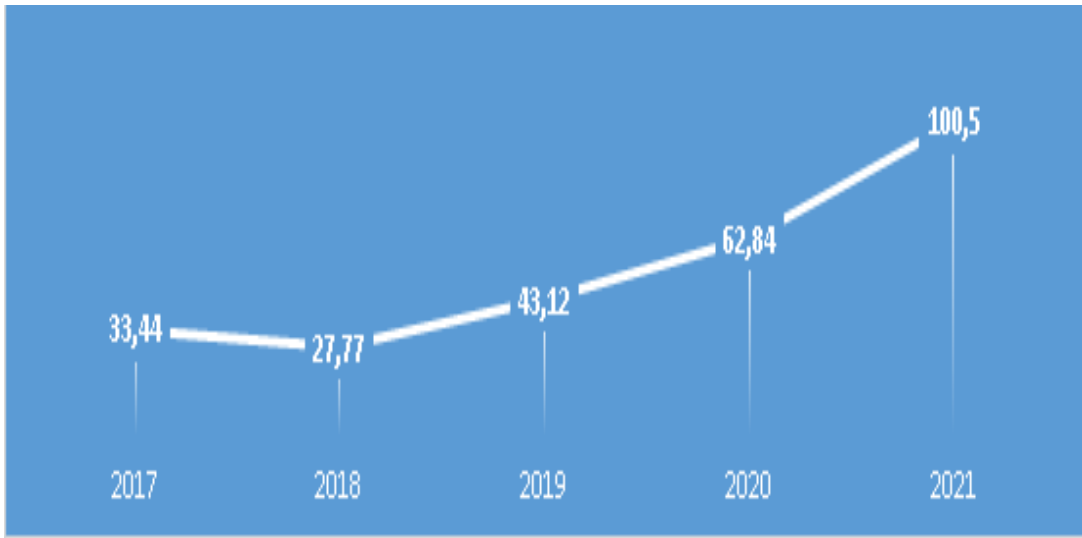


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

8) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

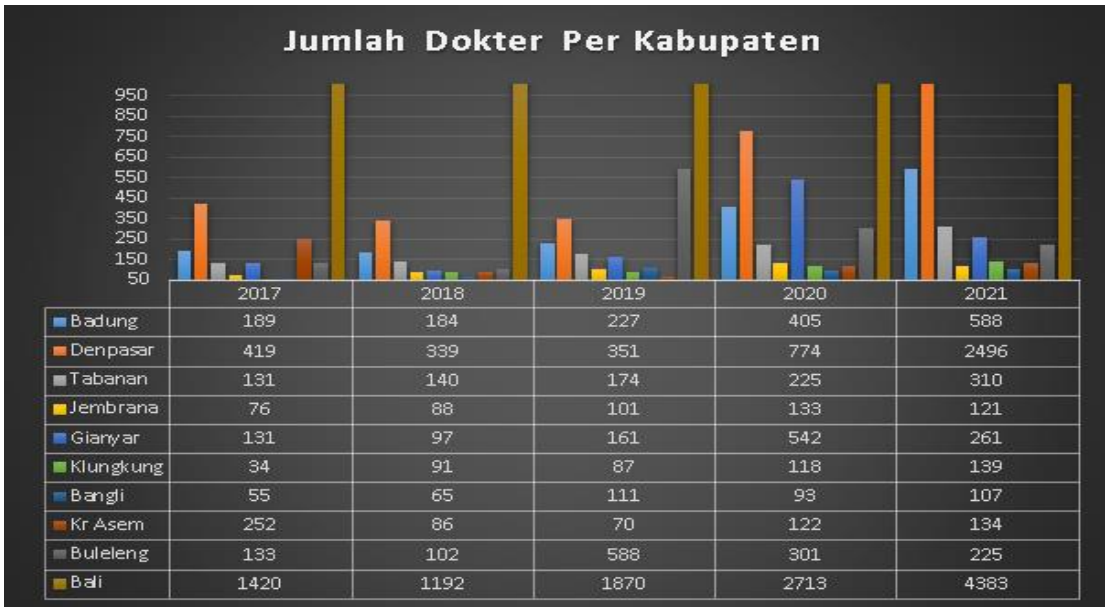
Salah satu fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini salah satunya bisa dilakukan dengan meningkatkan rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk. Menurut data BPS rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk di Indonesia adalah sebesar 36. Rasio dokter di Provinsi Bali telah mencapai 100,5 per 100.000 yang artinya capaiannya lebih tinggi daripada capaian nasional. Dengan demikian pada tahun 2021 Provinsi Bali sudah menyediakan dokter yang melebihi kapasitas dokter yang bisa disediakan secara nasional. Dengan telah terpenuhinya jumlah dokter maka usaha pemerintah selanjutnya adalah memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperoleh akses fasilitas pelayanan kesehatan dan juga kualitas layanan kesehatan yang baik.

Gambar 2.40 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.41 Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

- 9) Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk
- Rasio tenaga perawat per 1000 penduduk selama kurun waktu 2017 sampai 2021 terus mengalami peningkatan. Rasio tenaga perawat tahun 2017 adalah sebesar 1,97 meningkat menjadi 2,29 pada tahun 2019 selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 2,66. Hal yang sama juga terjadi pada tenaga bidan, dimana tercatat rasio tenaga bidan pada tahun 2017 adalah sebesar 0,99 meningkat menjadi 1,50 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 1,25 di tahun 2021. Sedangkan jika dilihat dari jumlah tenaga kesehatan

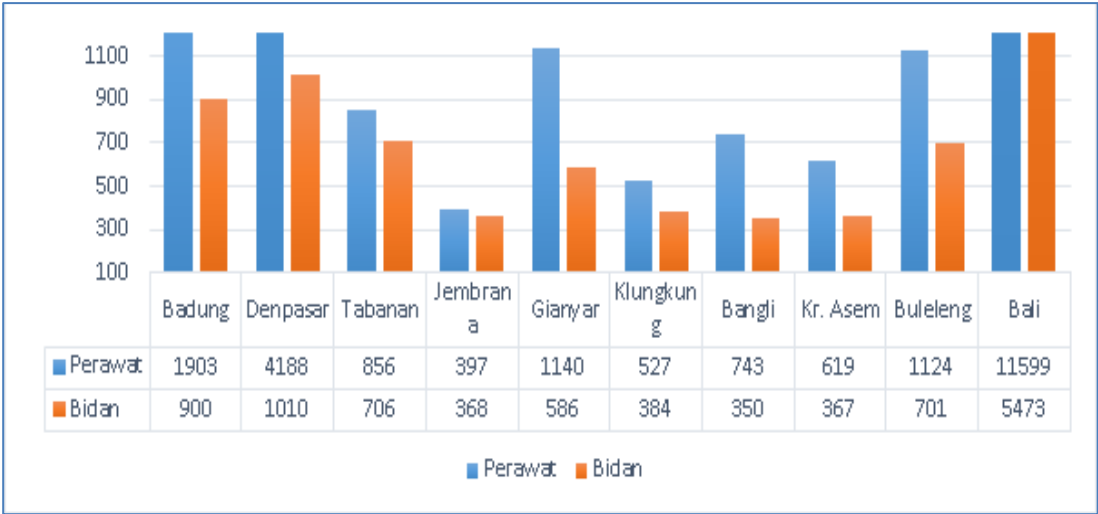
(perawat dan bidan) untuk skala kabupaten/kota, maka Kota Denpasar merupakan penyumbang tenaga kesehatan terbesar baik itu untuk tenaga bidan maupun tenaga perawat. Tercatat jumlah tenaga perawat di Kota Denpasar pada tahun 2021 adalah sebanyak 4.188 sedangkan untuk tenaga bidan adalah sebanyak 1.010. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Semakin banyak jumlah tenaga medis, maka harapannya semakin banyak masyarakat yang siap dilayani.

Gambar 2.42 Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.43 Jumlah Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

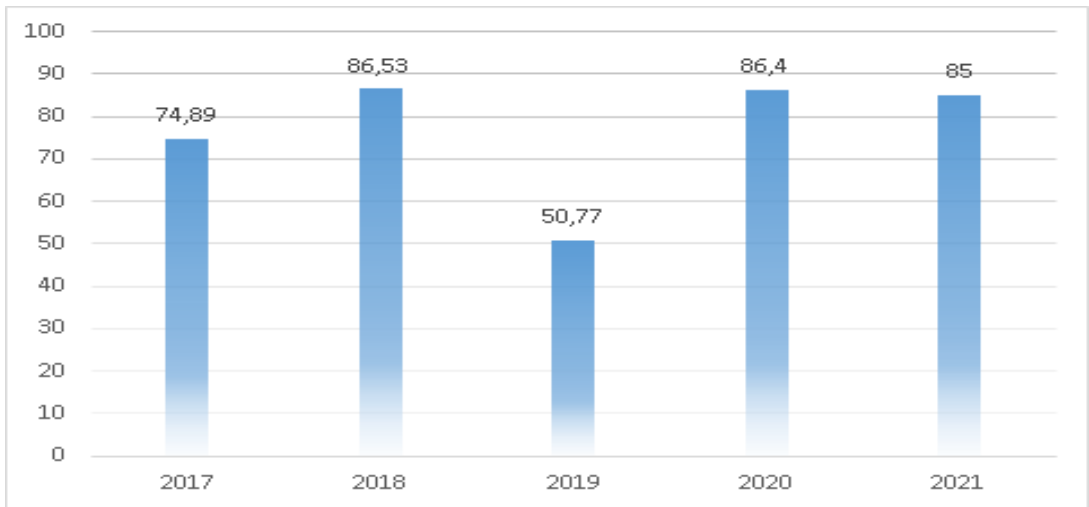


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

10) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2017 adalah sebesar 74,89 persen. Cakupan tersebut meningkat menjadi 86,53 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 50,77 persen. Dan tahun 2020 kembali lagi mengalami peningkatan sebesar 86,4 dan kembali turun di tahun 2021 sebesar 85. Angka tersebut menunjukkan cakupan komplikasi kebidanan yang berhasil ditangani mengalami fluktuasi kasus sehingga perlu ada pendataan yang baik dalam serta pencatatan yang baik terhadap pelayanan kesehatan keseriusan lebih baik lagi dalam penanganan komplikasi kebidanan oleh tenaga medis dan faskes di Provinsi Bali.

Gambar 2.44 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

11) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (di Fasyankes)

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Bali pada tahun 2017 adalah sebesar 93,6 persen. Cakupan tersebut meningkat menjadi 98,3 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai 2021 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan berturut-turut dari tahun sebelumnya menjadi 98,0 persen, 97,8 persen dan 96,2 persen. Meskipun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

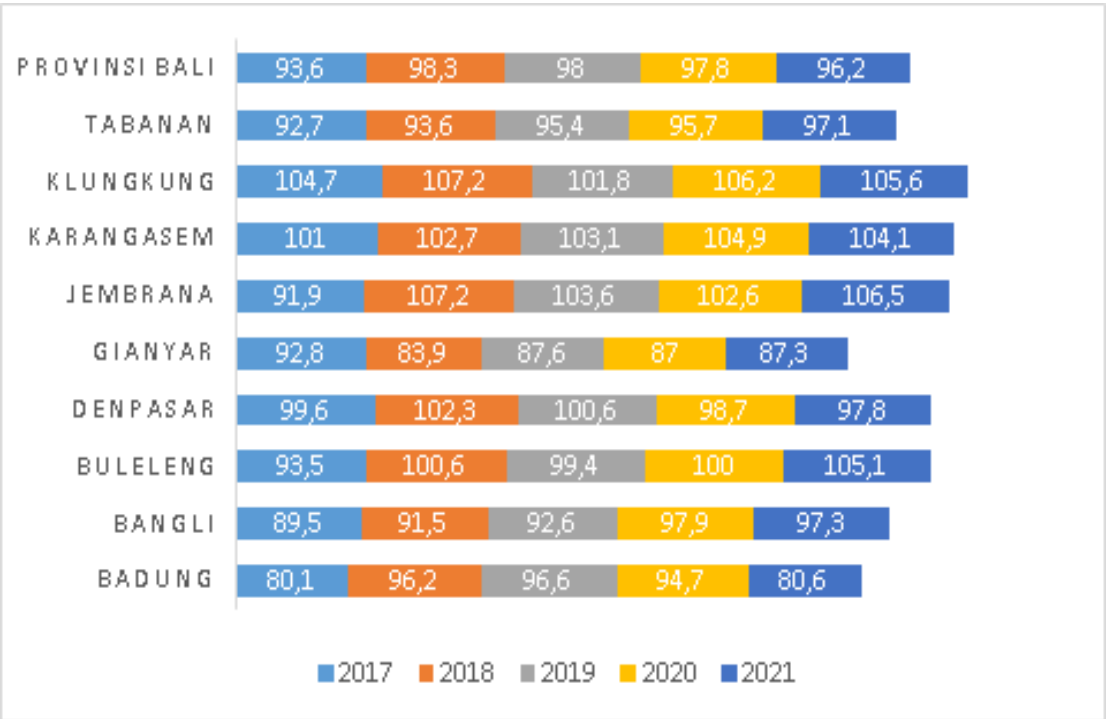
mengalami fluktuasi yang berkaitan dengan jumlah kelahiran di Bali, namun angka tersebut sudah sangat baik karena dalam 5 tahun terakhir angkanya sudah berada di atas 90 persen.

Tabel 2.12 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Badung	80,1	96,2	96,6	94,7	80,6
Bangli	89,5	91,5	92,6	97,9	97,3
Buleleng	93,5	100,6	99,4	100,0	105,1
Denpasar	99,6	102,3	100,6	98,7	97,8
Gianyar	92,8	83,9	87,6	87,0	87,3
Jembrana	91,9	107,2	103,6	102,6	106,5
Karangasem	101	102,7	103,1	104,9	104,1
Klungkung	104,7	107,2	101,8	106,2	105,6
Tabanan	92,7	93,6	95,4	95,7	97,1
Provinsi Bali	93,6	98,3	98,0	97,8	96,2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.45 Persentase Ibu Hamil yang Ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021

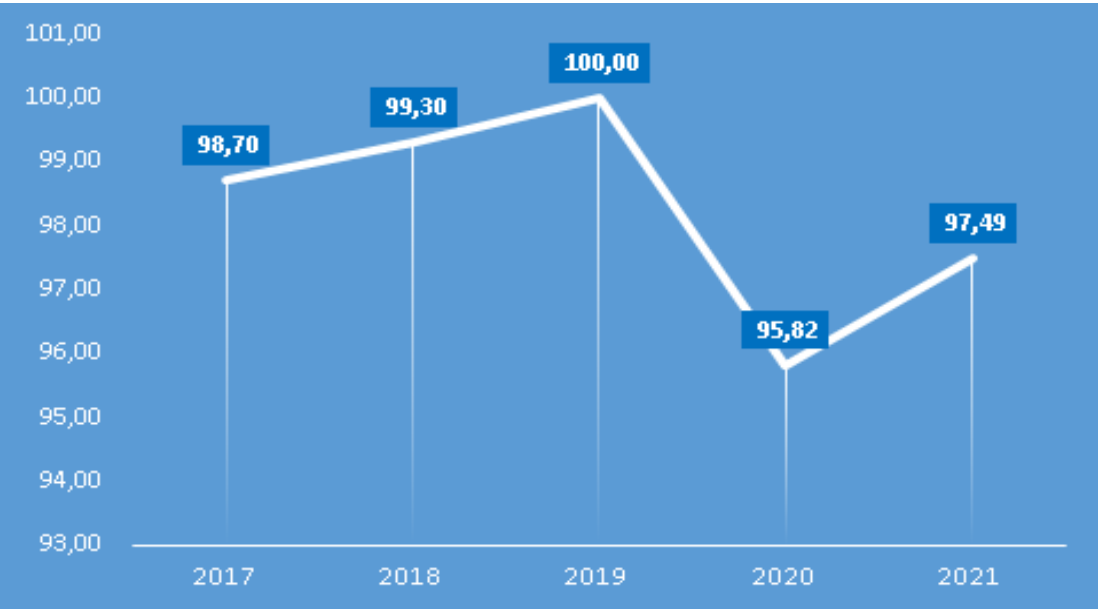


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

12) Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI mengalami fluktuasi selama periode 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017, cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 98,7 persen meningkat menjadi 99,30 persen pada tahun 2018. Selanjutnya meningkat secara berturut-turut pada tahun 2019 menjadi 100 persen. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 95,82 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 97,49 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh Pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya di Bali.

Gambar 2.46 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

13) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

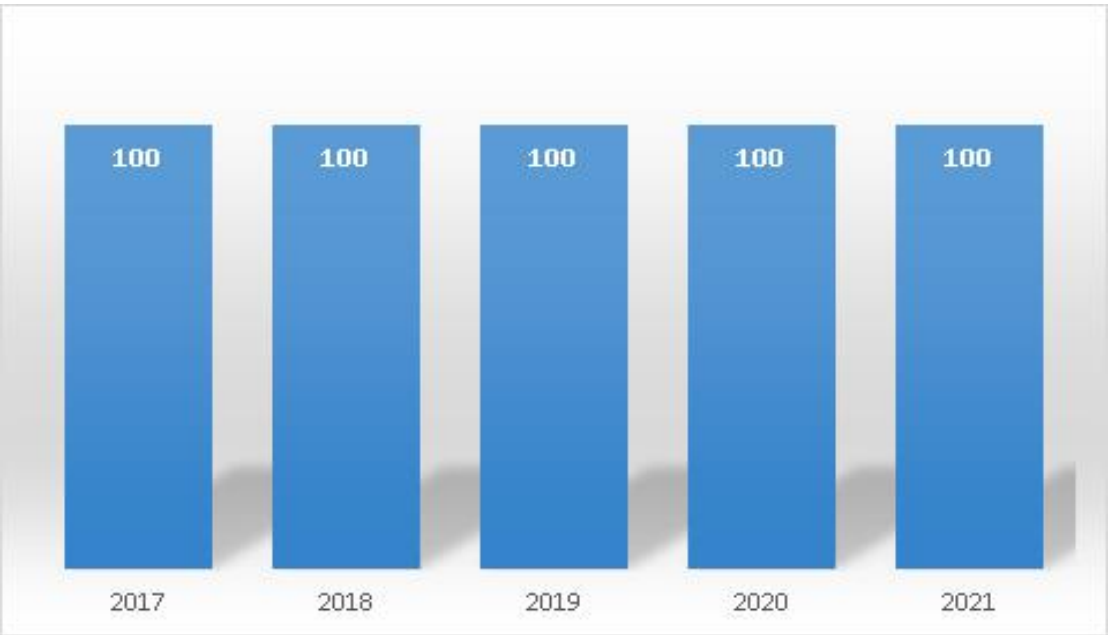
Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Karena itulah penting untuk menjalankan diet gizi seimbang untuk menjaga kadar nutrisi yang cukup di dalam tubuh. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab balita gizi buruk.

- a) Kurang makan: kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan nutrisi yang penting hingga berujung pada gizi buruk.

- b) Makan tidak teratur: makan secara tidak teratur bisa memicu masalah pencernaan dan malnutrisi.
- c) Gangguan pencernaan: beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan, seperti penyakit *Crohn's*, yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi meski mengonsumsi makanan sehat.
- d) Kurang ASI: Air susu ibu bagi anak yang baru lahir sangat penting karena mengandung nutrisi penting. Kurangnya ASI berisiko menyebabkan bayi gizi buruk.
- e) Kurang aktivitas: pencernaan tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktivitas hingga memicu malnutrisi.
- f) Fasilitas layanan dasar buruk: sejumlah layanan dasar, misalnya sanitasi, yang buruk juga bisa memicu masalah gizi.

Dengan demikian penting sekali agar balita yang mengalami gizi buruk bisa mendapatkan perawatan yang baik dari faskes terdekat dan tenaga medis yang tersedia. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.47 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

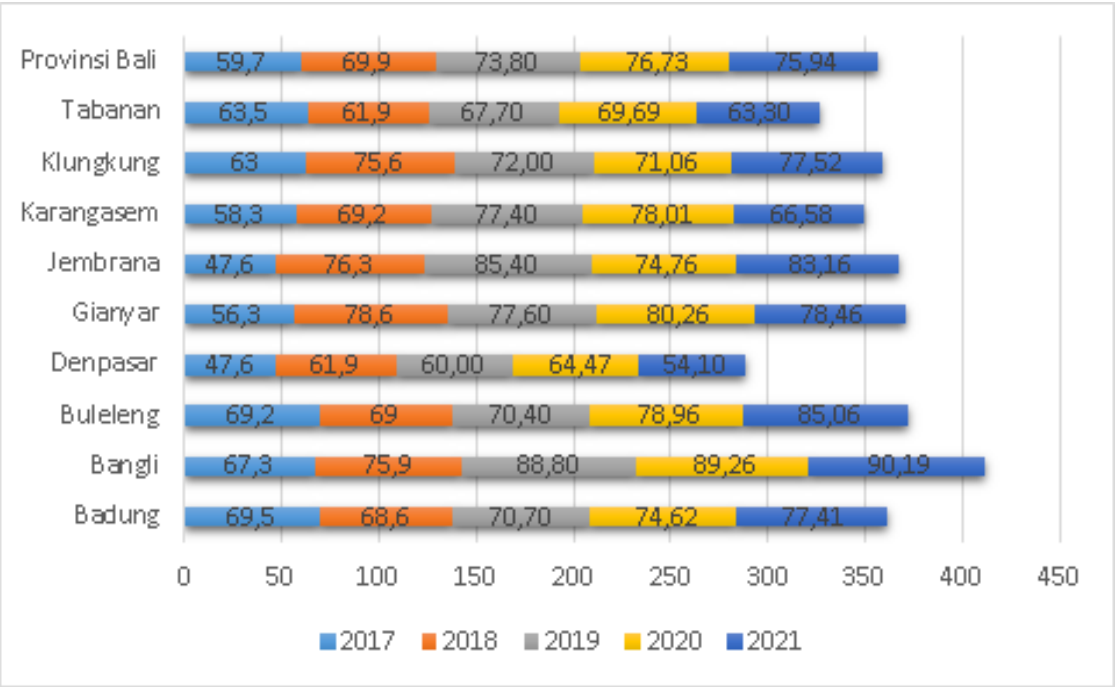


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

14) Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

Persentase balita usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif cenderung meningkat. Tercatat pada tahun 2017 persentase balita yang mendapatkan ASI Eksklusif adalah sebesar 59,7 persen, selanjutnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 69,9 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019 dan 2021 dimana angka asupan ASI Eksklusif pada balita mencapai 73,80 persen, 76,73 persen dan 75,94 persen. Jika dilihat pada skala kabupaten kota, maka persentase asupan ASI eksklusif tertinggi pada tahun 2017 adalah Kabupaten Badung dengan persentase mencapai 69,5 persen sedangkan untuk tahun 2021 persentase terbesar adalah Kabupaten Bangli dengan nilai 90,19 persen.

Gambar 2.48 Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2017-2021



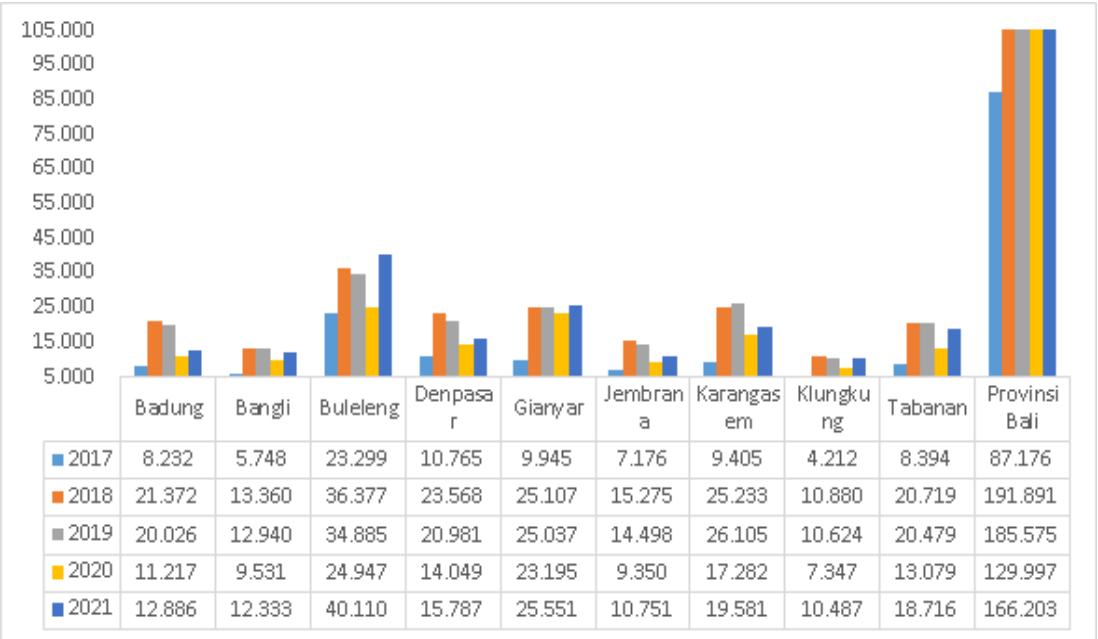
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

15) Jumlah Balita Ditimbang

Menimbang bayi secara rutin adalah salah satu instrumen yang bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau tenaga medis untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang bayi. Dalam buku KIA biasanya sudah disediakan catatan untuk merekam hasil timbangan bayi secara berkala. Sehingga dari riwayat catatan tersebut bisa diketahui bagaimana proses tumbuh kembang bayi. Selain itu, hasil

timbangan juga bisa menjadi rujukan bagi tenaga medis untuk menilai apakah bayi dalam kondisi gizi yang baik atau kurang. Jumlah balita yang ditimbang di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 87.176 pada tahun 2017 menjadi 166.203 pada tahun 2021. Jumlah balita yang ditimbang terbesar pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Buleleng sebesar 40.110 dan yang terendah yaitu Kabupaten Klungkung sebesar 10.487. Penimbangan bayi harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat agar bisa memantau tumbuh kembang bayi dengan lebih baik.

Gambar 2.49 Jumlah Balita Ditimbang di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

16) Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

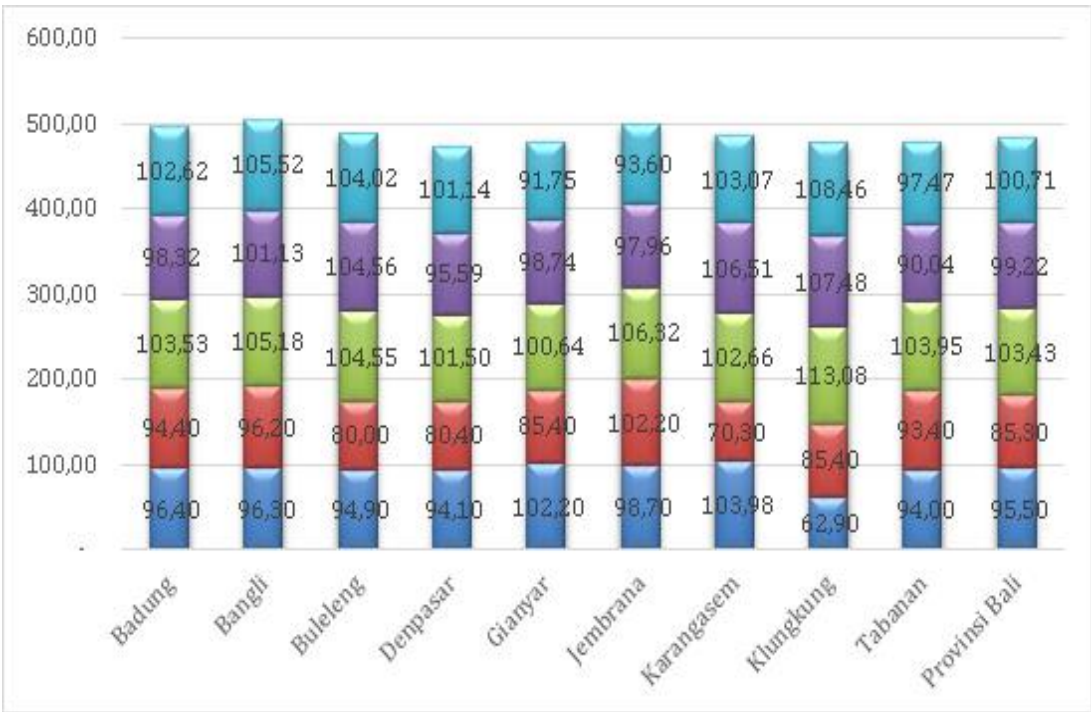
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan angka yang fluktuatif. Tercatat pada tahun 2017 jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sebesar 99,50 persen menurun pada tahun 2018 menjadi 85,3 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 103,43 persen, tahun 2020 menurun menjadi 99,22 persen dan terakhir pada tahun 2021 naik menjadi 100,71 persen. Dengan demikian angka terendah terjadi pada tahun 2018 dan sudah meningkat di tahun selanjutnya.

Tabel 2.13 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisi Campak di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Badung	96,40	94,40	103,53	98,32	102,62
Bangli	96,30	96,20	105,18	101,13	105,52
Buleleng	94,90	80,00	104,55	104,56	104,02
Denpasar	94,10	80,40	101,50	95,59	101,14
Gianyar	102,20	85,40	100,64	98,74	91,75
Jembrana	98,70	102,20	106,32	97,96	93,60
Karangasem	103,98	70,30	102,66	106,51	103,07
Klungkung	62,90	85,40	113,08	107,48	108,46
Tabanan	94,00	93,40	103,95	90,04	97,47
Provinsi Bali	95,50	85,30	103,43	99,22	100,71

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.50 Persentase Cakupan Imunisasi Campak

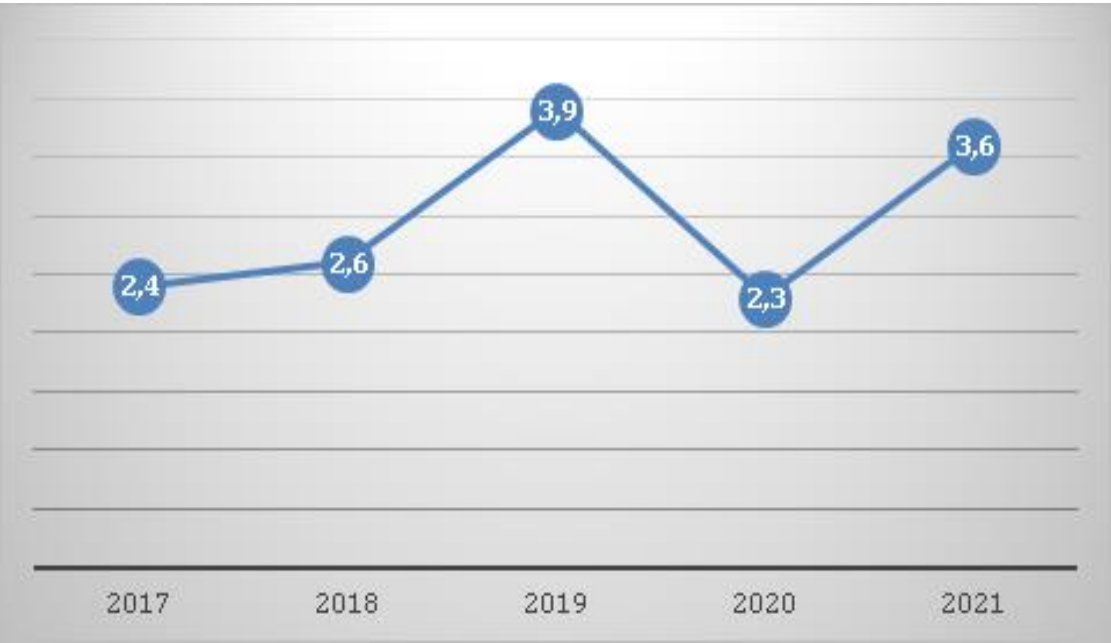


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

17) Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk berfluktuasi selama kurun waktu 2017 sampai 2021. Tahun 2017, non polio AFP Rate per 100.000 penduduk sebesar 2,4, meningkat menjadi 2,6 dan 3,9 pada tahun 2018 dan tahun 2019. Namun, menurun menjadi 2,3 pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 3,6 pada tahun 2021.

Gambar 2.51 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

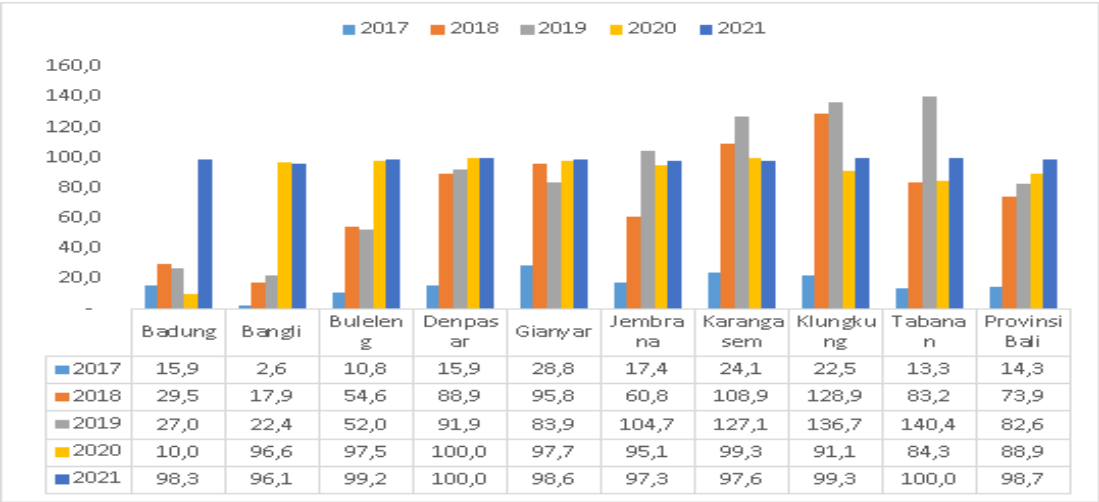


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

18) Cakupan Balita *Pneumonia* Yang Ditangani

Cakupan balita *pneumonia* yang ditangani selama tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan grafik yang meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2017 cakupan balita *pneumonia* menunjukkan angka 14,3 meningkat pada tahun 2018 menjadi 73,9 tahun 2019 pada angka 82,6 di tahun 2020 sampai 2021 berturut-turut meningkat menjadi 88,9 dan 98,7. Jika dilihat pada skala kabupaten/kota maka pada tahun 2017 jumlah cakupan balita *pneumonia* tertinggi adalah Kabupaten Gianyar sebesar 28,8 dan yang terendah adalah Kabupaten Bangli dengan nilai 2,6 sedangkan pada tahun 2021 cakupan balita *pneumonia* terbesar adalah Kota Denpasar dan Tabanan dengan angka 100 dan yang terendah adalah Kabupaten Bangli dengan angka 96,1.

Gambar 2.52 Cakupan Balita *Pneumonia* Yang Ditangani di provinsi Bali Tahun 2017-2021

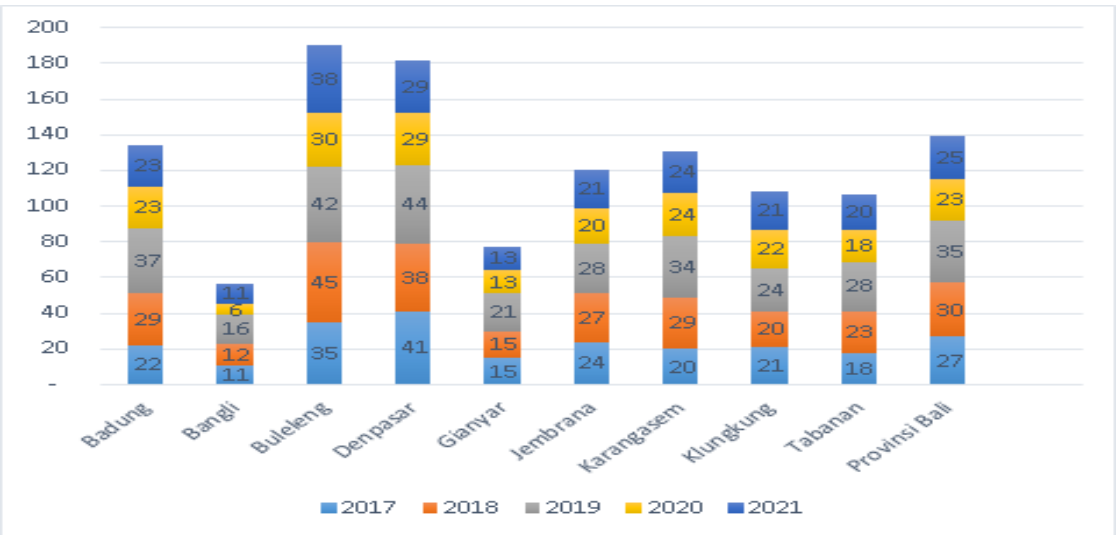


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

19) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)

Cakupan penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 27 kasus. Cakupan tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 30 kasus dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 35 kasus. Pada tahun 2021 cakupan penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Provinsi Bali menurun menjadi 23 kasus dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 25 kasus.

Gambar 2.53 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Provinsi Bali tahun 2017-2021

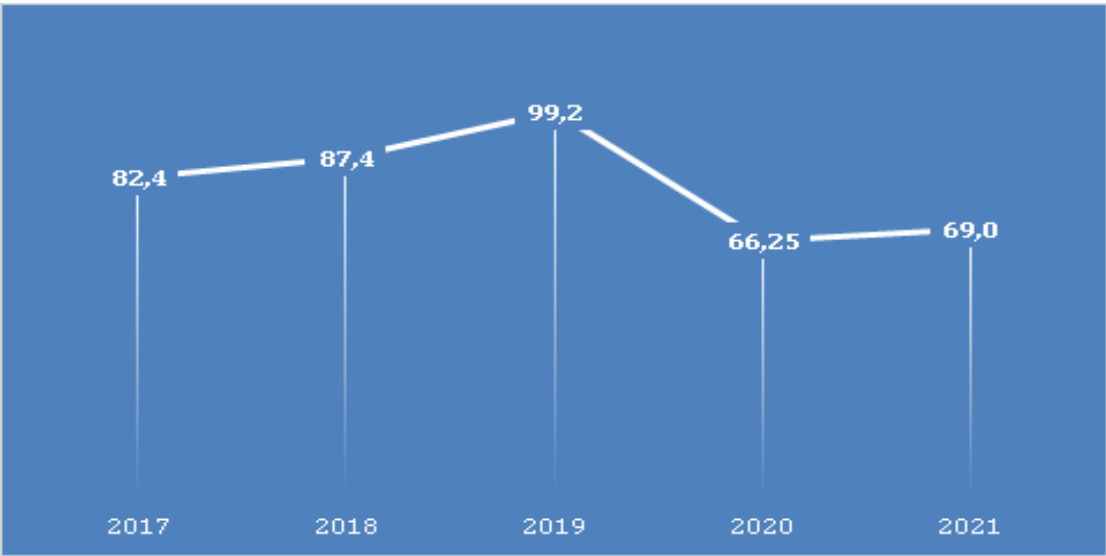


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Case Detection Rate (CDR) kasus TBC merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan program dalam menemukan, mengobati dan melaporkan kasus Tuberkulosis (TBC) secara berjenjang mulai dari layanan di tingkat dasar sampai dengan pusat (Kementerian Kesehatan). CDR diartikan sebagai jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus TB (insiden). Untuk tahun 2021 target yang dibebankan untuk dicapai untuk indikator CDR kasus TB ini baik yang dituangkan dalam Renstra maupun Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah sebesar 30 %. Pada tahun 2021 indikator CDR ini tidak tercapai dimana realisasinya adalah 24,3 %.

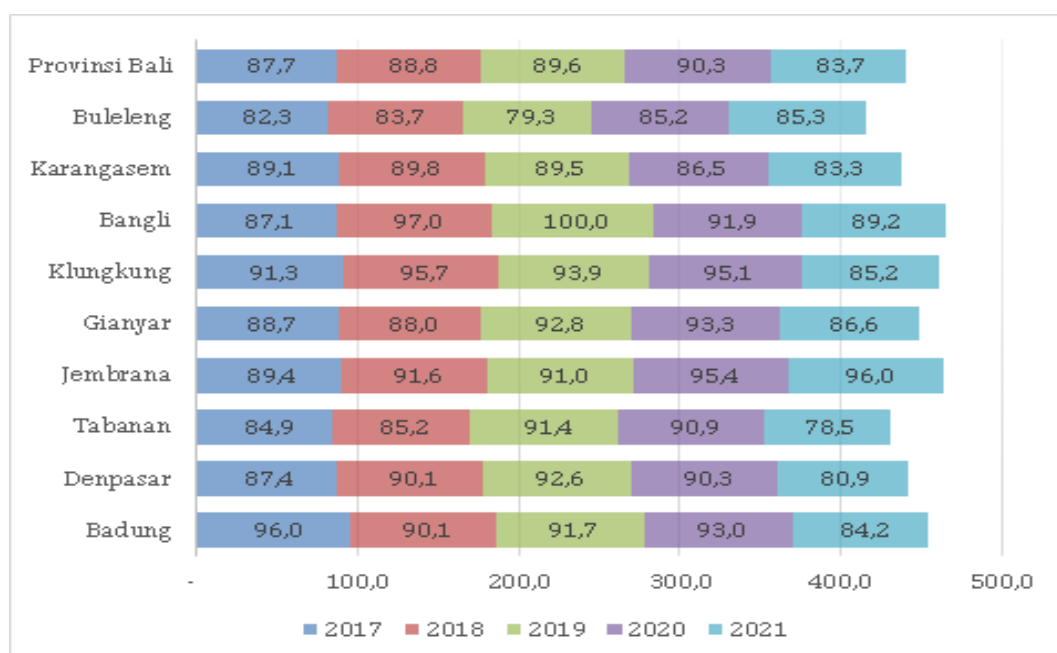
Case Notification Rate (CNR) adalah kasus yang ditemukan dan tercatat di program dibandingkan dengan jumlah penduduk. Semakin banyak kasus TBC yang ditemukan dan diobati semakin baik karena akan semakin cepat memutus mata rantai penularan. Berikut CNR Semua kasus TB di Provinsi Bali tahun 2021.

Gambar 2.54 Case Notification Rate (CNR) kasus TBC di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Untuk indikator *Case Notification Rate* (CNR) kasus TBC atau kasus TBC yang ternotifikasi dan terlaporkan adalah jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa CNR TBC untuk Provinsi Bali mengalami peningkatan pada Tahun 2021.

Gambar 2.55 Angka Kesembuhan TB Paru (*Success Rate / SR*) menurut Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Angka Keberhasilan Pengobatan adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus, angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB. Angka kesembuhan semua kasus yang harus dicapai minimal 85% sedangkan angka keberhasilan pengobatan semua kasus minimal 90%. Angka kesembuhan Tahun 2021 mengalami penurunan 6,6% dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 83,7%. Untuk angka keberhasilan pengobatan di Provinsi Bali hanya satu kabupaten/kota yang telah mencapai angka keberhasilan di atas 90% yaitu Kabupaten Jembrana. Angka capaian dibawah 90% disebabkan oleh beberapa hal seperti meninggal selama pengobatan, gagal pengobatan putus obat dan pindah yang tidak bisa terlacak.

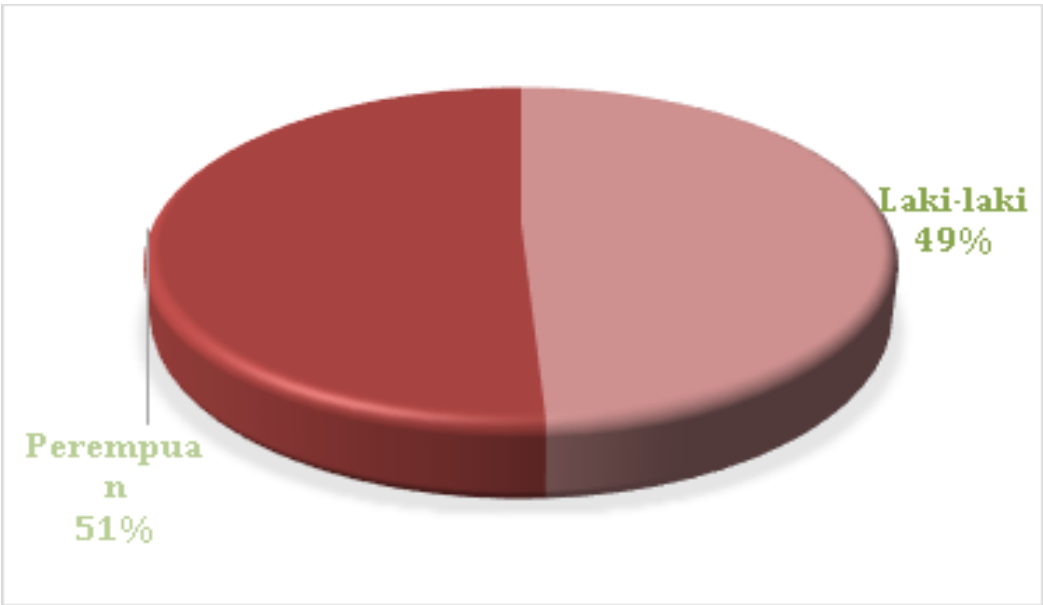
20) Prevalensi Tekanan Darah Tinggi

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular, masih menjadi tantangan besar bagi masalah kesehatan masyarakat secara global maupun nasional dan menjadi salah satu penyebab

utama kematian prematur di Dunia.. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi merupakan kondisi kronis yang dalam jangka waktu lama akan dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), penyakit jantung koroner dan otak, hipertensi juga disebut sebagai pembunuh diam-diam karena tekanan darah yang tidak terkontrol.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan saat ini prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Secara nasional hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi sebesar 34,11%. Prevalensi tekanan darah tinggi pada perempuan (36,85%) lebih tinggi dibanding dengan laki-laki (31,34%). Hal yang sama juga ditemukan pada data penderita hipertensi di Provinsi Bali. Sesuai gambar 6.14 di bawah menunjukkan bahwa persentase penderita hipertensi pada usia >15 tahun lebih tinggi pada perempuan (51%) dibandingkan dengan laki-laki (49%). Adapun jumlah ini merupakan estimasi sasaran yang digunakan berdasarkan Riskesdas 2018.

Gambar 2.56 Persentase Penderita Hipertensi Pada Usia >15 Tahun di Provinsi Bali Tahun 2021

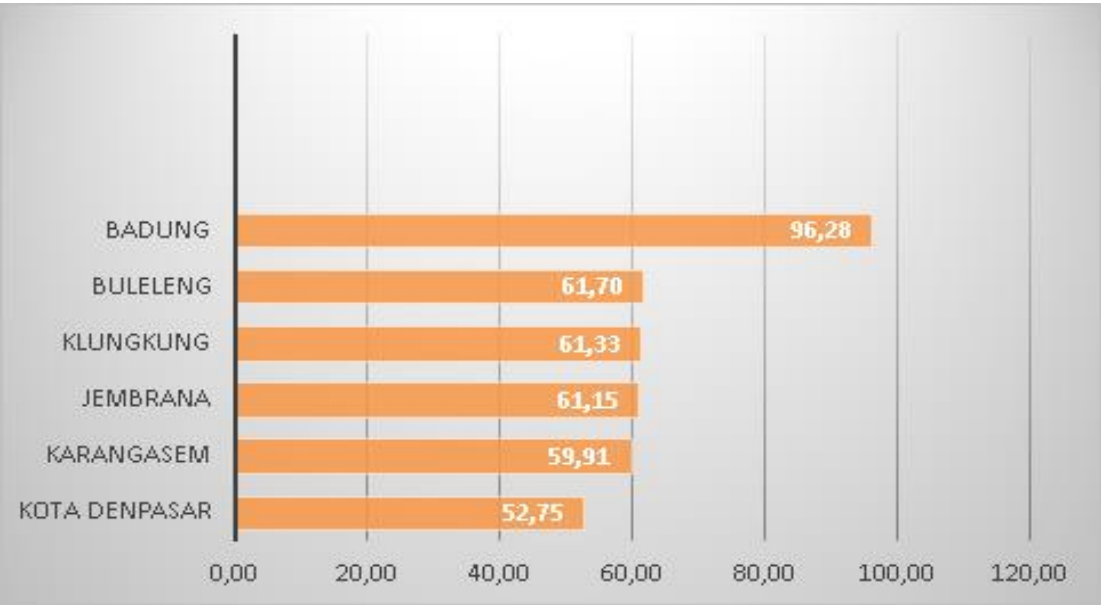


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Penderita hipertensi berdasarkan hasil estimasi tersebut diharapkan mampu diberikan pelayanan di fasilitas pelayanan

kesehatan yang ada di wilayahnya. Berdasarkan data yang diperoleh ditemukan bahwa jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai berikut.

Gambar 2.57 Jumlah Penderita Hipertensi Pada Usia >15 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Pada data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penderita hipertensi usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan kurang dari 50% pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Tabanan, Gianyar dan Bangli. Kondisi ini disebabkan oleh karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dirinya menderita hipertensi, adanya pembatasan sosial pandemi COVID-19, dan masih banyak penderita hipertensi yang belum terdeteksi. Dalam penanganan dan memberikan pelayanan bagi penderita hipertensi telah ditempuh dengan berbagai upaya antara lain pendekatan pelayanan melalui pembentukan dan penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) pada 716 desa, Pelayanan Pandu PTM di 120 Puskesmas, serta pelaksanaan Program Indonesia Sehat.

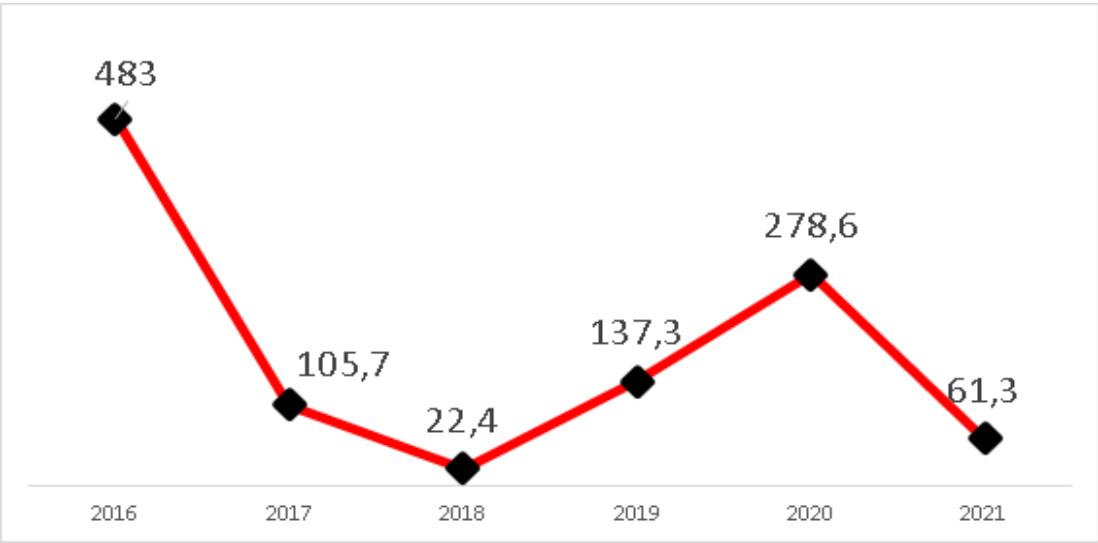
21) Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Arthropod-

Borne virus, genus flavivirus, family flaviviridae. Demam Berdarah Dengue (DBD) ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes spp, aedes aegypti, dan aedes albopictus merupakan vektor utama penyakit DBD. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Penyakit DBD ada 2 (dua) indikator yang dikerjakan yaitu *Incidence Rate* (IR) dan *Case Fatality Rate* (CFR). *Incidence Rate* adalah untuk melihat frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit di masyarakat pada kurun waktu tertentu (1 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Capaian indikator angka kesakitan ini apabila makin kecil maka dikatakan semakin baik. *Incidence Rate* kasus DBD di Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebesar 61,3 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2021 IR DBD telah mencapai target karena target yang dipasang dalam RPJMD, Renstra dan Renja adalah sebesar 100 per 100.000 penduduk. Target nasional Angka Kesakitan (IR) DBD tahun 2021 yaitu < 49 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan kejadian penyakit DBD di Provinsi Bali tahun 2021 ini jauh lebih menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

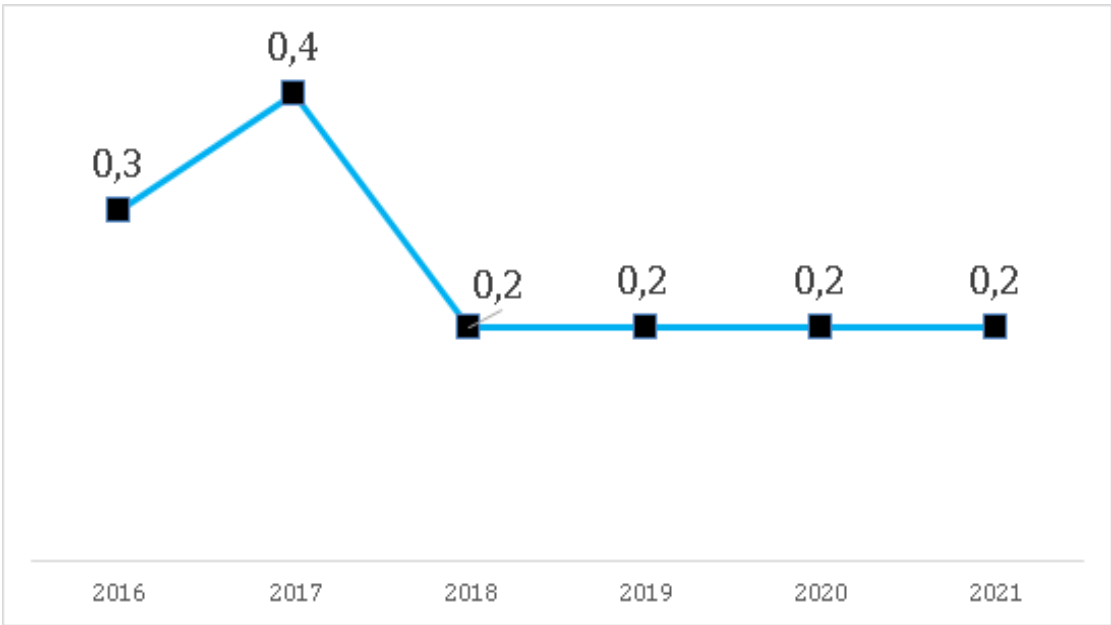
Gambar 2.58 Tren *Incidence Rate* DBD Provinsi Bali Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Sedangkan untuk *Case Fatality Rate* (CFR) adalah untuk melihat jumlah penderita DBD yang meninggal dibandingkan dengan jumlah yang sakit karena DBD. Target CFR DBD secara nasional adalah lebih kecil dari 1 % sedangkan capaian CFR DBD Provinsi Bali seperti gambar dibawah adalah sebesar 0,2 %. Angka ini menunjukkan jumlah penderita DBD yang meninggal tahun dibandingkan dengan jumlah penderita sangat kecil. Berikut ini gambaran CFR DBD tahun 2016-2021.

Gambar 2.59 Trend CFR DBD Provinsi Bali Tahun 2016-2021

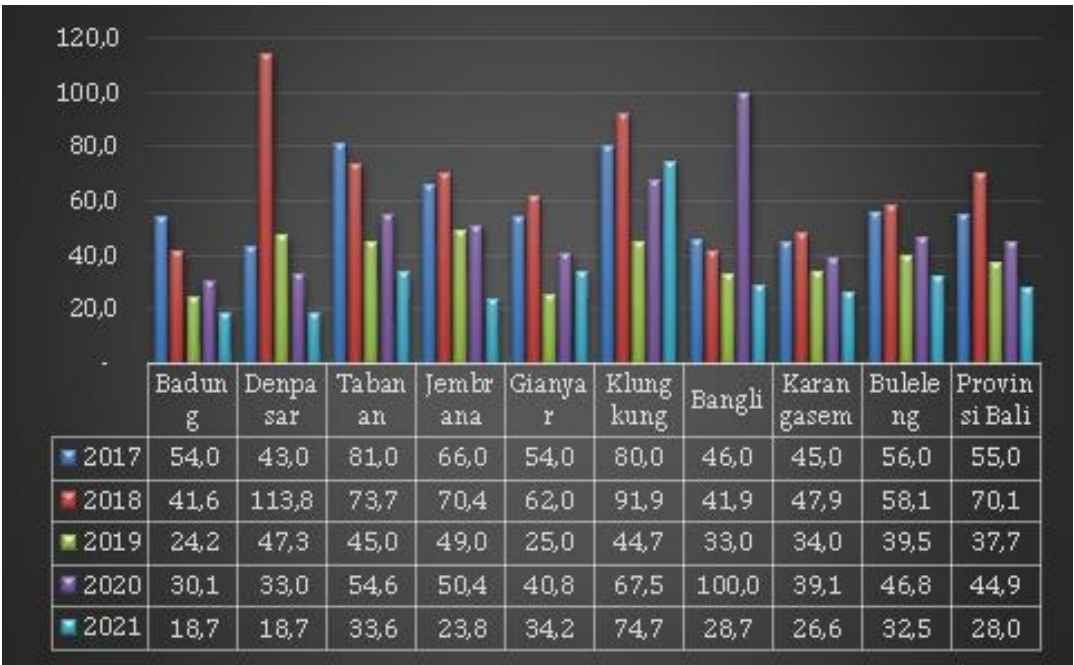


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

22) Penderita Diare Yang Ditangani

Penderita diare di Provinsi Bali yang telah ditangani selama kurun waktu 2017 sampai 2021 yaitu sebesar 55 persen, 70,1 persen, 37,7 persen, 44,9 persen dan 28 persen Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 berhasil menangani penderita diare sebesar 74,7 persen sedangkan Kabupaten Badung dan Denpasar berhasil menangani penderita diare sebesar 18,7 persen.

Gambar 2.60 Penderita Diare Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

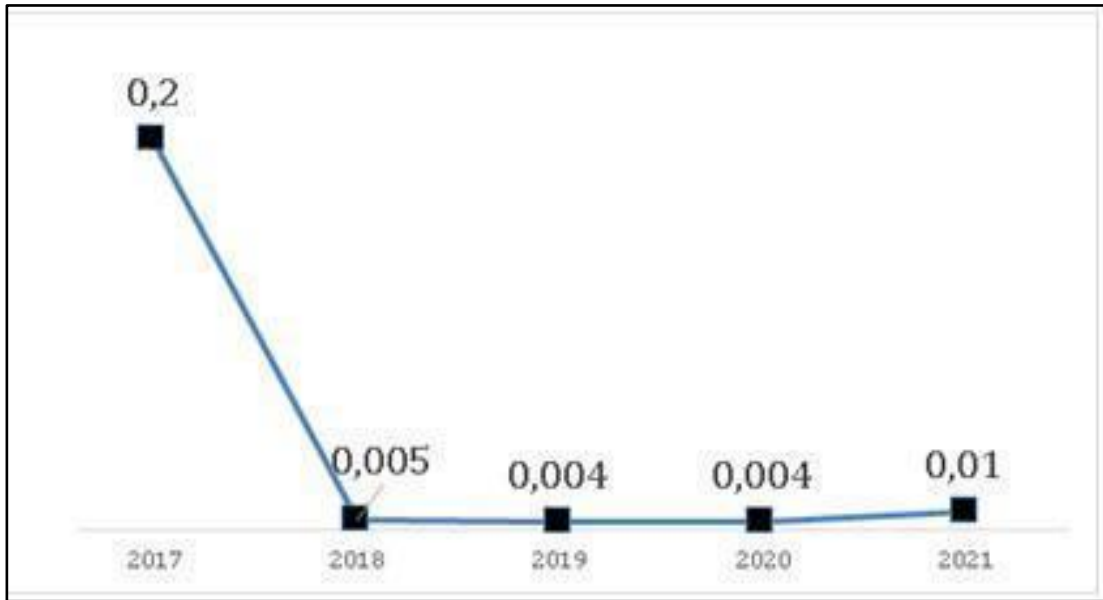


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

23) Angka Kesakitan Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam Millenium Development Goals (MDGs). Malaria disebabkan oleh hewan bersel satu (protozoa) plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Wilayah endemis malaria pada umumnya adalah wilayah terpencil dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, sarana transportasi dan komunikasi yang sulit, akses pelayanan kesehatan kurang, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah serta buruknya perilaku masyarakat terhadap kebiasaan hidup sehat.

Gambar 2.61 Tren *Annual Parasite Incidence* (API) Malaria Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

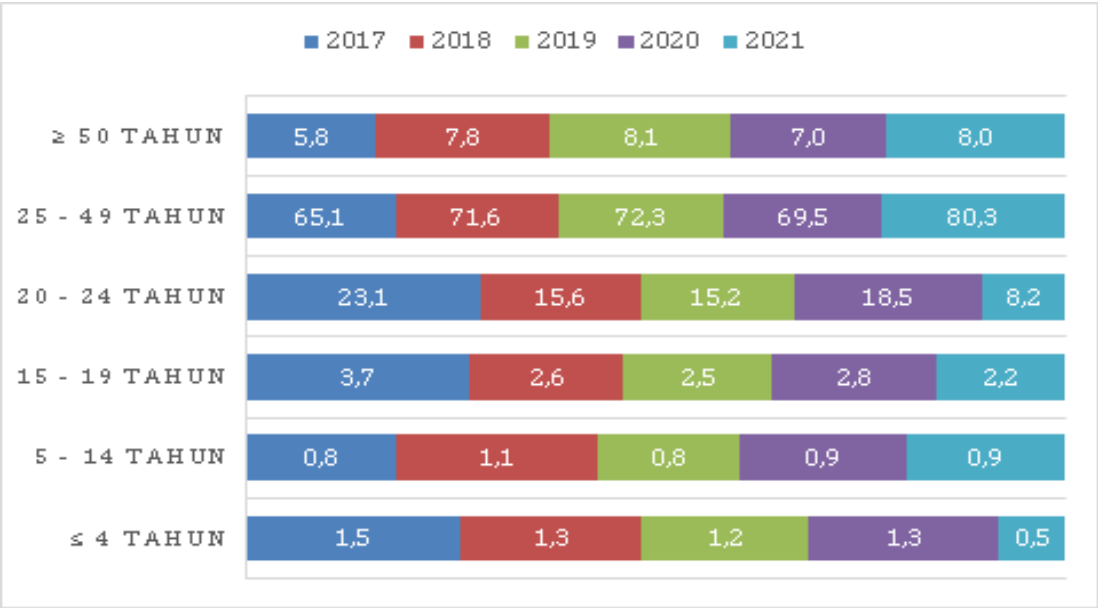
Indikator *Annual Parasite Incidence* (API) Malaria atau angka kesakitan malaria adalah banyaknya kasus (kasus baru maupun kasus lama) malaria per 1000 penduduk. Seperti yang terlihat dalam gambar diatas API Malaria Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebesar 0,01 per 1000 penduduk sedangkan target nasional adalah dibawah 1 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Malaria di Provinsi Bali tahun 2021 ini sangat kecil namun meningkat 0,006 dari tahun sebelumnya, sedangkan kasus positif malaria pada tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Buleleng sebanyak 19 kasus. Apabila dicermati lebih mendalam lagi bahwa kasus malaria yang ditemukan seluruhnya merupakan kasus impor atau kasus yang datang dari luar Bali. Pencapaian API di Bali didasari dengan adanya peningkatan penemuan penderita pada penduduk pendatang, peningkatan mutu sumber daya manusia (JMD, tenaga mikroskopis termasuk tenaga pembersih lumut) dan peningkatan sosialisasi kegiatan KIE tentang penanggulangan malaria.

24) HIV dan AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing (VCT)*. Penyakit ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita yang terjadi melalui proses hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi secara bergantian, dan penularan dari ibu ke anak dalam kandungan melalui plasenta dan kegiatan menyusui.

Gambar 2.62 Jumlah Kasus HIV berdasarkan Kelompok umur di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Jumlah kasus HIV berdasarkan kelompok umur tahun 2017 sampai tahun 2021 terbanyak terdapat pada golongan usia 25-49 tahun yaitu 65,1 persen, 71,6 persen, 72,3 persen, 69,5 persen dan 80,3 persen, dimana golongan usia ini adalah golongan usia

produktif. Penyebaran kasus HIV di Bali saat ini lebih banyak ditularkan melalui hubungan seksual.

Gambar 2.63 Jumlah Kasus Kumulatif AIDS Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Bali Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Jumlah kasus Kumulatif AIDS berdasarkan kelompok umur tahun 2018 sampai tahun 2021 terbanyak terdapat pada golongan usia 30-39 tahun yaitu 310,9 persen, 349,8 persen, 430,2 persen dan 35,8 persen, dimana golongan usia ini adalah golongan usia produktif. Pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit HIV-AIDS di Provinsi Bali dilakukan oleh 3 (tiga) pilar yaitu:

- a) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) wilayah Bali, dimana PKBI ini tugasnya adalah melakukan penjangkauan terhadap orang-orang beresiko tertular HIV-AIDS
- b) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali (KPAP-Bali), dimana KPAP Bali ini mempunyai tugas untuk Advokasi, Sosialisasi, dan pendampingan terhadap Orang dengan HIV-AIDS (Odha).
- c) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan konseling, testing, dan pengobatan.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya KPA Provinsi Bali membentuk kelompok-kelompok masyarakat (kader) peduli AIDS diantaranya: Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN),

Kader Desa Peduli AIDS (KDPA), Kelompok Mahasiswa Peduli AIDS dan Narkoba (KMPAN), Kelompok Jurnalis Peduli AIDS (KJPA) dan lain-lain. KPA menargetkan 100% para kader ini sudah terlatih tentang pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS dan tahun 2021 realisasinya sudah 100 %.

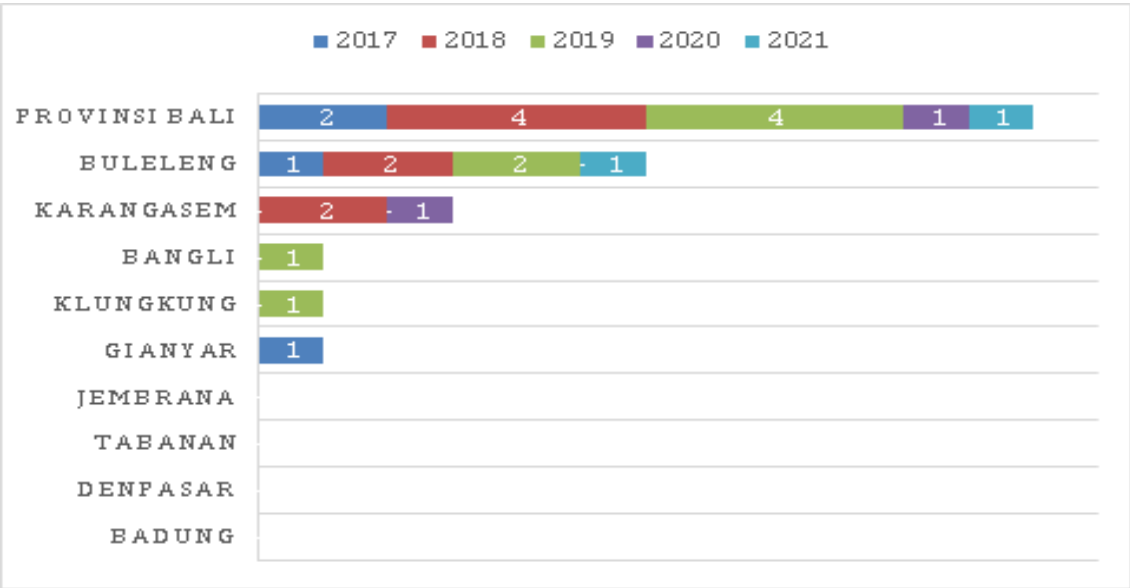
Program Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS merupakan salah satu program yang tercantum dalam target MDGs maupun SDGs. Badan PBB untuk HIV-AIDS (UNAIDS) mengelompokkan epidemic HIV-AIDS menjadi tiga kelompok, yaitu : 1). low epidemic bila proporsi (prevalensi) HIV pada kelompok-kelompok masyarakat masih dibawah 1 %, 2). Concentrated epidemic, bila proporsi HIV pada key population diatas 5 %, dan 3). Generalized epidemic bila proporsi HIV di masyarakat umum di atas 1% dan adanya perilaku berganti-ganti pasangan seksual yang luas di masyarakat umum. Karena penularan HIV di Indonesia kebanyakan melalui hubungan seksual dan jarum suntik pada pemakai narkoba, maka yang dikategorikan sebagai populasi kunci adalah: pemakai narkoba suntik, pekerja seks, pelanggan pekerja seks, lelaki yang hubungan seks dengan lelaki (LSL). Sangat penting mengetahui status HIV untuk memudahkan pengendaliannya.

25) Kasus Rabies Pada Manusia

Rabies atau yang dikenal juga dengan istilah “anjing gila” adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Penyakit ini tergolong sangat berbahaya karena berpotensi besar menyebabkan kematian. Pada tahun 2017, di Indonesia terdapat lebih dari 25.000 kasus gigitan hewan penular rabies yang diberi vaksin anti rabies, namun tetap ada 90 korban meninggal. Di Bali penyakit rabies menjadi salah satu penyakit yang sangat diperhatikan karena potensi perkembangan penyakit ini sangat tinggi, dimana persebaran anjing liar sangat banyak terutama di daerah-daerah pedesaan. Untuk anjing peliharaan kebanyakan sudah divaksin oleh pemilik anjing, akan tetapi sangat sedikit anjing-anjing liar yang juga mendapatkan perawatan yang sama. Hewan yang tidak divaksin ini sangat berisiko mengalami penyakit rabies yang kemudian bisa ditularkan ke manusia.

Jumlah kasus rabies pada manusia di Provinsi Bali berfluktuasi mulai dari 5 kasus pada tahun 2017; 4 kasus pada tahun 2018; 4 kasus pada tahun 2019, 1 kasus pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dengan demikian antisipasi terhadap penyebaran penyakit ini harus dilakukan dengan melakukan vaksinasi terhadap anjing-anjing liar yang ada di Bali dan meningkatkan pasokan vaksin rabies di faskes-faskes yang ada sampai pada level Puskesmas.

Gambar 2.64 Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

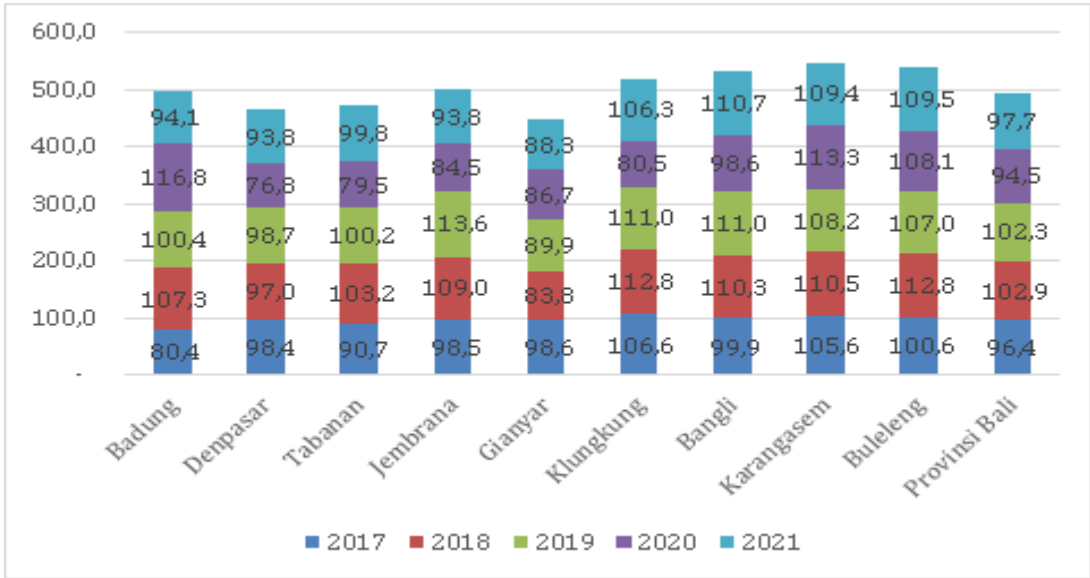
26) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin merupakan salah satu target prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin memiliki akses yang rendah terhadap pelayanan kesehatan yang baik akibat dari kemampuan ekonomi yang rendah. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin selama kurun waktu 2017 sampai 2021 telah mencapai 100 persen. Artinya pemerintah sudah sangat optimal memberikan kualitas layanan dan keterjangkauannya terhadap kelompok masyarakat miskin.

27) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Provinsi Bali selama tahun 2017 sampai 2021, yaitu 96,4 persen, 102,9 persen, 102,3 persen, 94,5 persen dan 97,7 persen. Cakupan kunjungan bayi tertinggi tahun 2021 ada di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 109,5 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Gianyar yaitu dengan dengan angka kunjungan sebesar 88,3 persen.

Gambar 2.65 Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

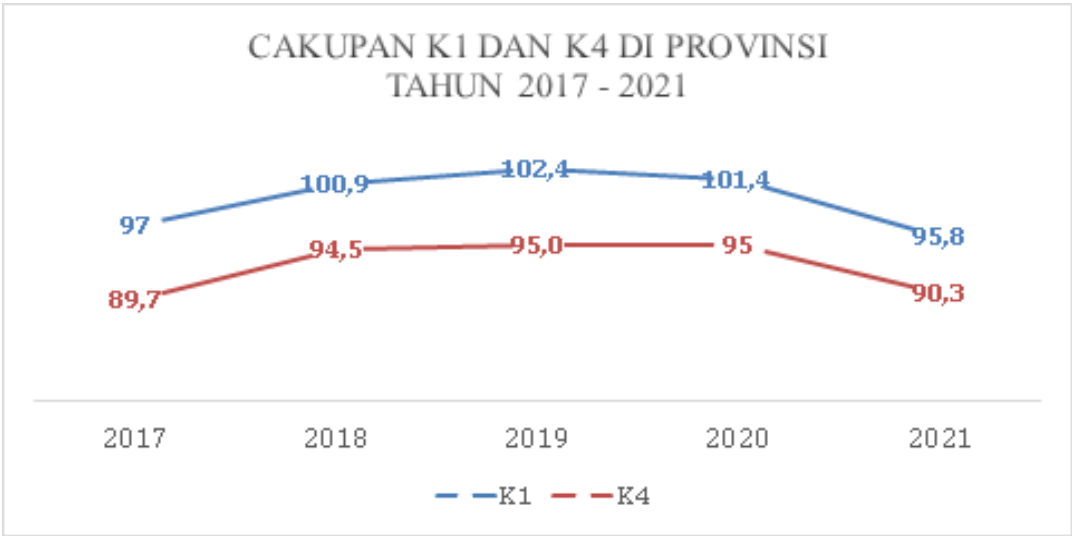
28) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu

hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Cakupan K1 dan K4 dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 2.66 Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4 di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa cakupan K1 dan K4 mengalami peningkatan sejak tahun 2017 dan tertinggi di tahun 2019. Mulai tahun 2020 mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 dengan cakupan K1 sebesar 95,8% dan K4 sebesar 90,3%. Ada kesenjangan yang terjadi antara cakupan K1 dan K4 sebesar 5,5% di tahun 2021. Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka drop out K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dengan K4 kecil maka hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal selalu berkunjung ke pelayanan kesehatan sampai pada kunjungan kedua trimester ketiga kehamilannya dengan kata lain seluruh ibu hamil telah mendapatkan pelayanan kehamilannya sesuai dengan standar, hal ini dapat meminimalisir kematian ibu melahirkan. Selain itu faktor yang

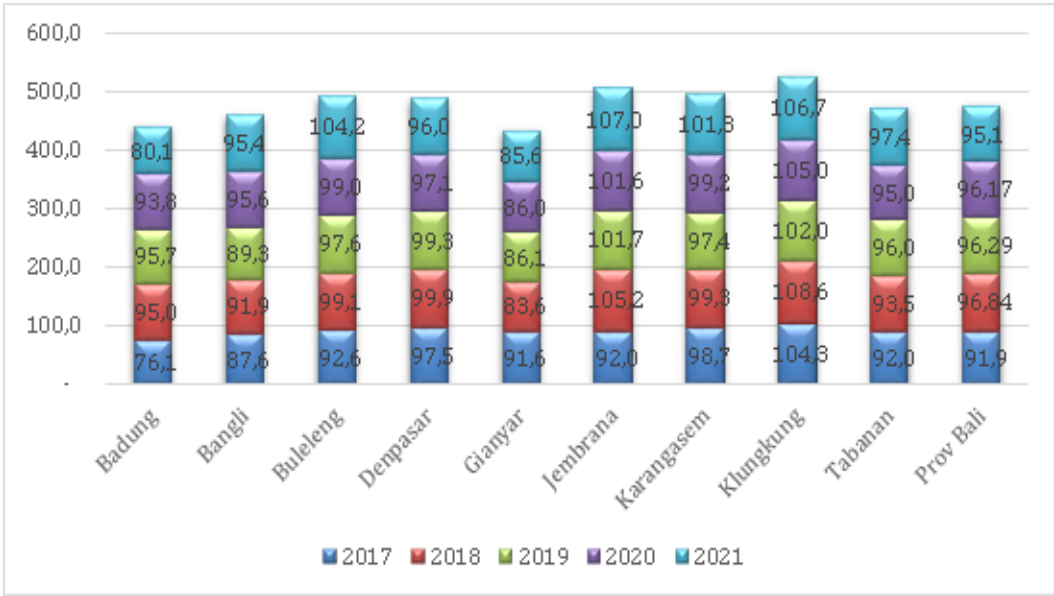
mempengaruhi penurunan capaian K1 dan K4 diantaranya adalah masih tingginya ibu hamil yang terinfeksi COVID-19. Walaupun akses masyarakat ke fasilitas kesehatan sudah baik, tetapi masa pandemi COVID-19 menyebabkan kunjungan ke fasilitas kesehatan menurun. Kegiatan yang berbasis peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti kelas ibu dan posyandu tidak berjalan selama penerapan PPKM.

29) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke 4 sampai dengan hari ke 28 pasca persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan hari ke 42 pasca persalinan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: a) kunjungan pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; b) kunjungan nifas (KF2) dilakukan pada minggu ke 2 setelah persalinan; c) kunjungan nifas ke 3 (KF3) dilakukan pada minggu ke 6 setelah persalinan.

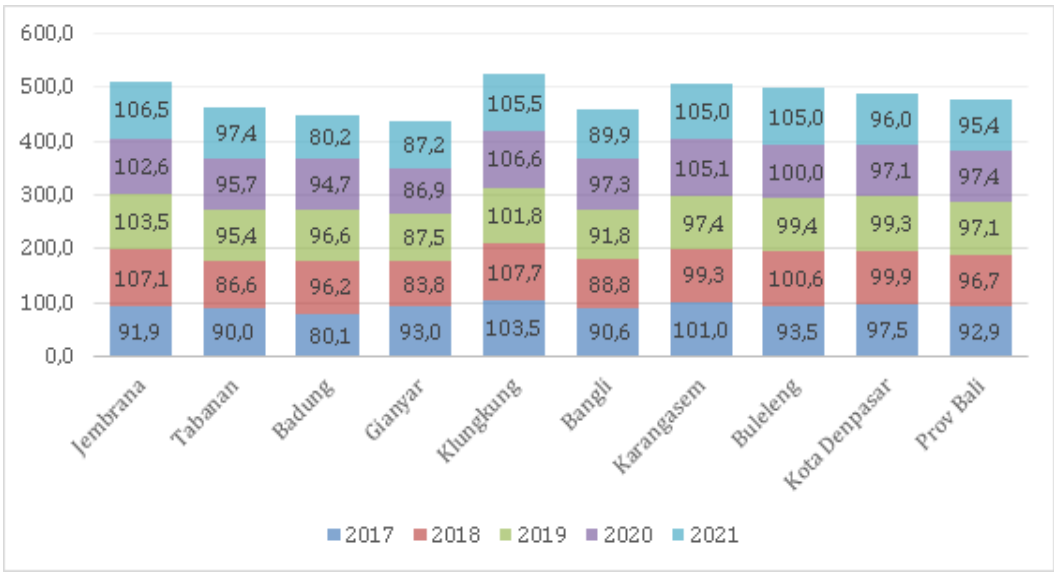
Cakupan pelayanan nifas di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2017 sampai 2021, yaitu 91,9 persen, 96,84 persen, 96,29 persen, 96,17 persen dan 95,1 persen. Pada tahun 2021, cakupan pelayanan nifas tertinggi ada di Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 107 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan terendah pada tahun 2020 ada di Kabupaten Badung yaitu 80,1 persen.

Gambar 2.67 Cakupan Pelayanan Nifas (KF3) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.68 Cakupan Pelayanan Nifas yang Mendapat Vitamin A di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



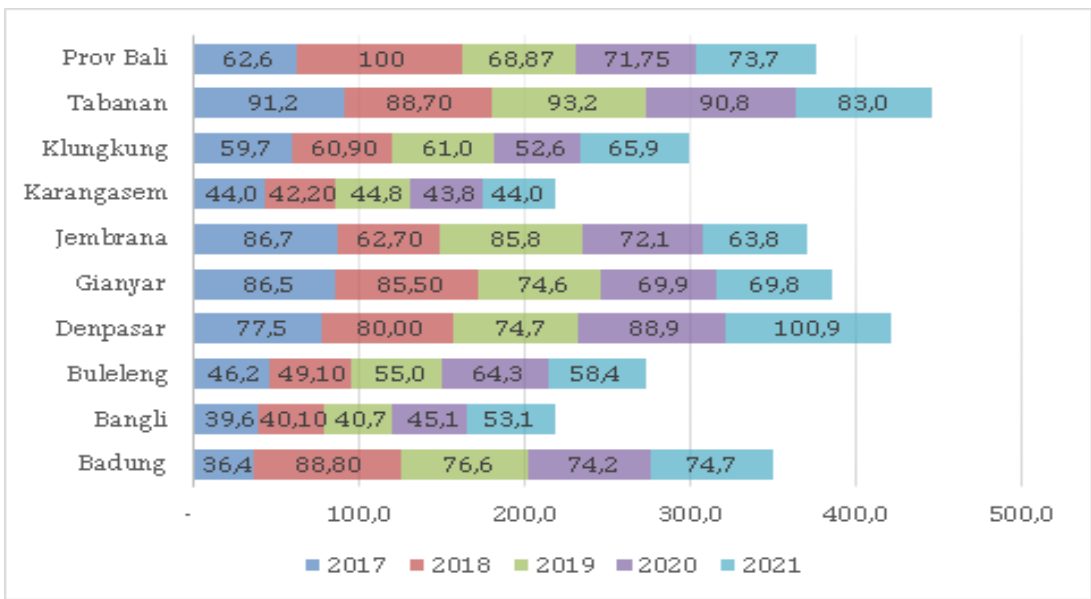
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Cakupan pelayanan nifas yang mendapat Vitamin A di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2017 sampai 2021, yaitu 92,9 persen, 96,7 persen, 97,1 persen, 97,4 persen dan 95,4 persen. Pada tahun 2021, cakupan pelayanan nifas tertinggi ada di Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 106,5 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan terendah pada tahun 2020 ada di Kabupaten Badung yaitu 80,2 persen.

30) Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2017 sampai 2021, yaitu 62,6 persen, 100 persen, 68,87 persen 71,75 persen dan 73,7 persen. Cakupan neonatus terendah di Provinsi Bali tahun 2021 ada di Kabupaten Karangasem dengan 44 persen. Sedangkan, cakupan neonatus tertinggi di Provinsi Bali tahun 2021 yaitu di Kabupaten Tabanan dengan 100,9 persen.

Gambar 2.69 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

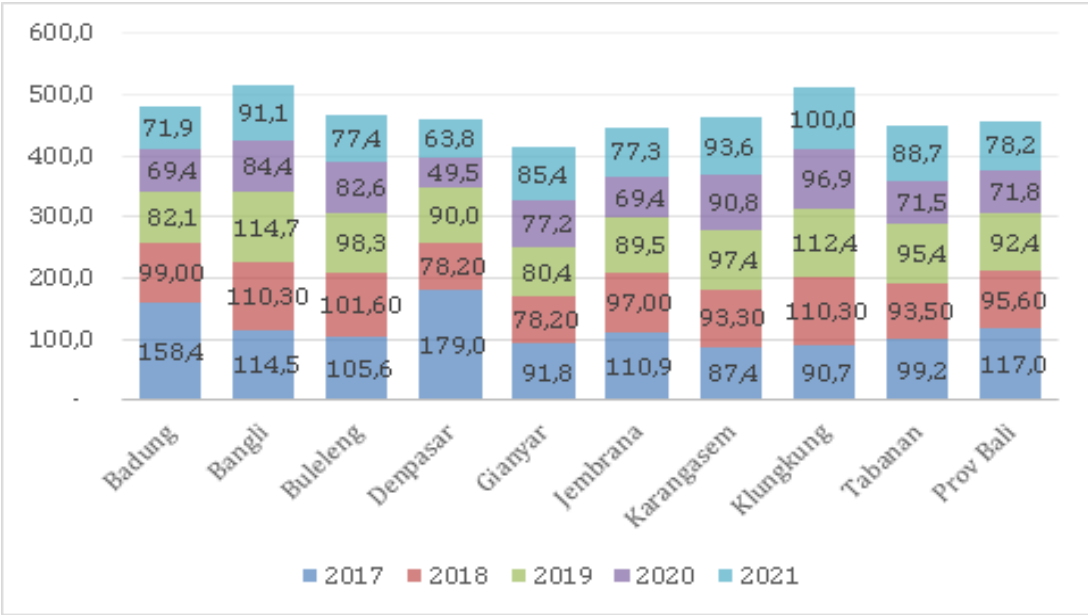


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

31) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak Balita di Provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai 2021, yaitu 117 persen, 95,6 persen, 92,4 persen, 71,8 persen dan 78,2 persen. Pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita terendah ada di Kota Denpasar yaitu 63,8 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan balita tertinggi ada di Kabupaten Klungkung dengan 100 persen.

Gambar 2.70 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

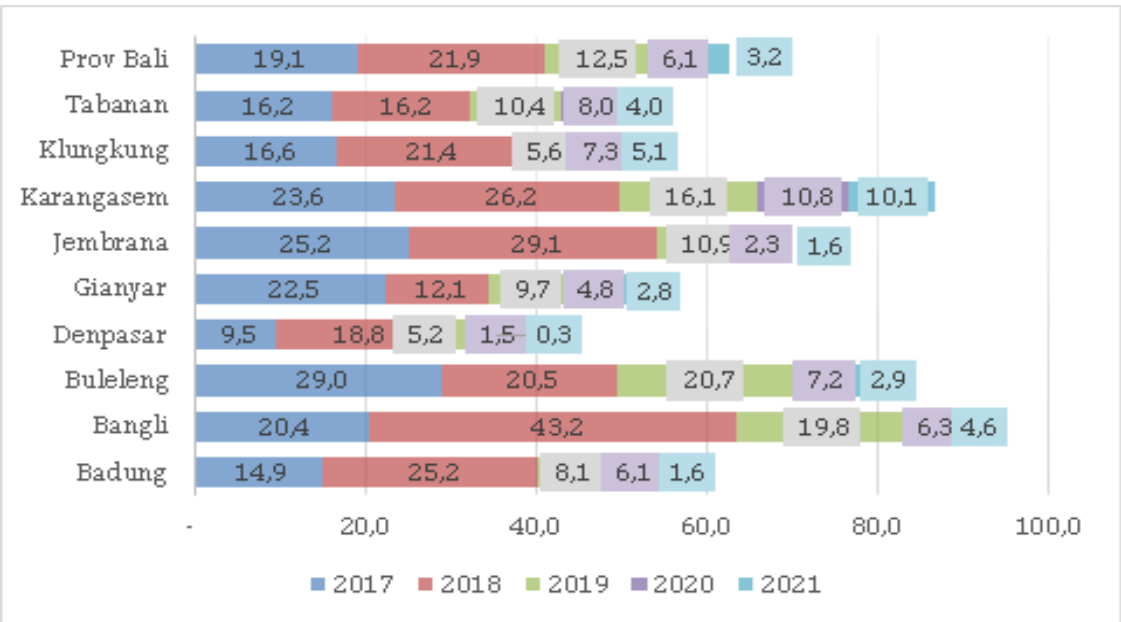


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

32) Cakupan Balita Pendek/Stunting

Cakupan balita pendek/stunting mengalami penurunan yang dratis dari 19,7 persen pada tahun 2017 menjadi 3,2 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2021, cakupan balita pendek/stunting terbesar ada di Kabupaten Karangasem yaitu 10,1 persen dan terendah ada di Kota Denpasar yaitu 0,3 persen.

Gambar 2.71 Cakupan Balita Pendek/Stunting di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

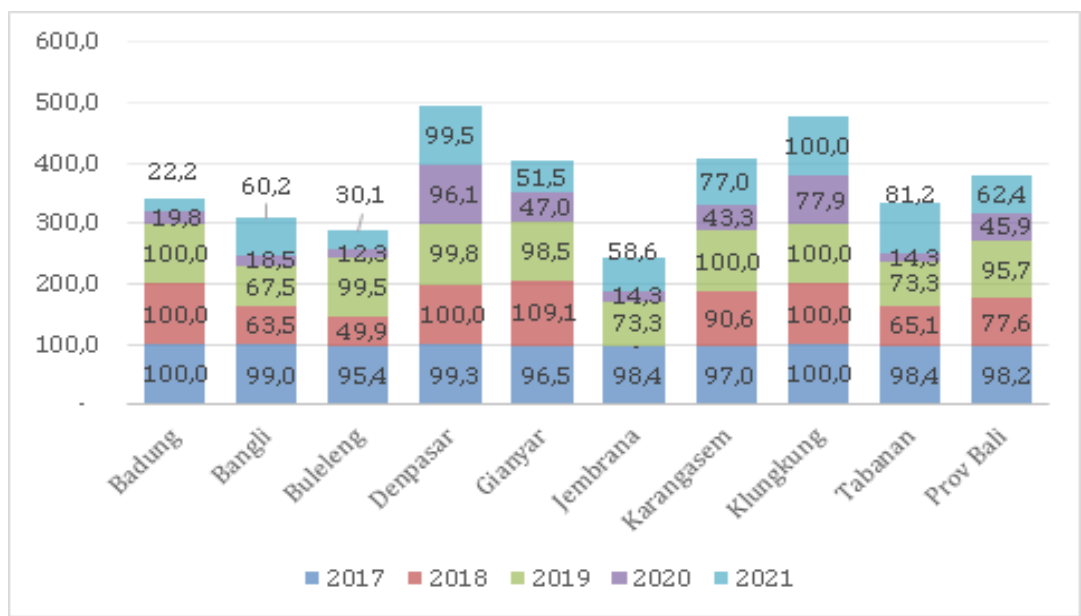


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

33) Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat di Provinsi Bali berfluktuasi selama kurun waktu 2017 sampai 2021, yaitu 98,2 persen, 77,6 persen, 95,7 persen, 45,9 persen dan 62,4 persen. Pada tahun 2021, cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan tingkat Provinsi Bali yang tertinggi adalah Kota Denpasar sebesar 100 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Badung sebesar 22,2 persen.

Gambar 2.72 Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

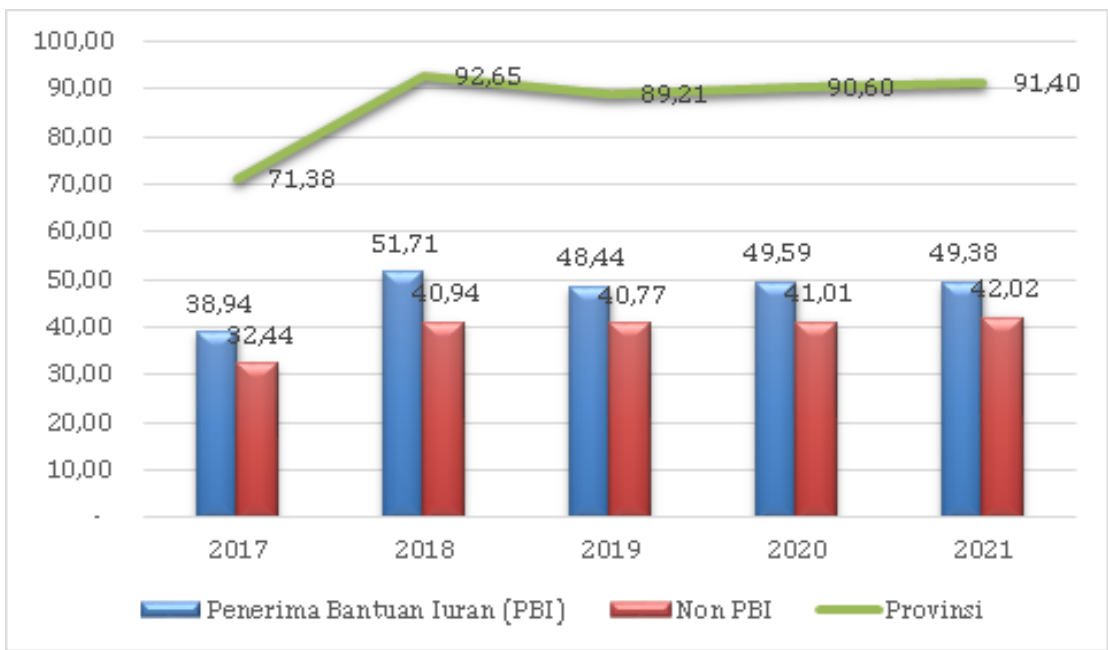


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

34) Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan

Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut jenis jaminan berfluktuasi dari tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu, 71,38 persen dan 92,65 persen kemudian menurun di tahun 2019 sebesar 89,21 persen dan meningkat lagi di tahun 2020 sampai 2021 yaitu sebesar 90,60 persen dan 91,40 persen.

Gambar 2.73 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

B. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Provinsi Bali dilakukan sesuai dengan kewenangan diantaranya pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap daerah Irigasi dengan luasan lebih dari 3000 ha, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pada sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap daerah Irigasi dengan luasan kurang dari 1000 ha.

Pemanfaatan air yang utamanya untuk kebutuhan air baku sehari-hari dan kebutuhan untuk pertanian merupakan prioritas dalam pelaksanaan pemanfaatan air. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas irigasi permukaan di Provinsi Bali sebesar 107.617 Ha. Sedangkan luas irigasi permukaan yang menjadi kewenangan Provinsi Bali adalah 9.271 ha dengan panjang jaringan irigasi primer dan sekunder sebesar 172.972 meter/172,972 kilometer. Untuk menjaga kinerja jaringan irigasi, diperlukan kondisi jaringan irigasi yang lebih baik untuk

meningkatkan ketersediaan air di sawah untuk penunjang peningkatan produksi padi di daerah.

Tabel 2.14 Inventarisasi Bendung dan Panjang Saluran Irigasi Daerah Irigasi di Provinsi Bali

Kewenangan	Luas Baku (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Jaringan Irigasi					
			Bendung/ Pengambilan	Bangunan Air	Satuan Pembawa Primer	Saluran Pembawa Sekunder	Saluran Tersier	Total Saluran
Provinsi	9.271	6.808	19	999	67.789	105.183	267.602	440.574

Sumber: Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

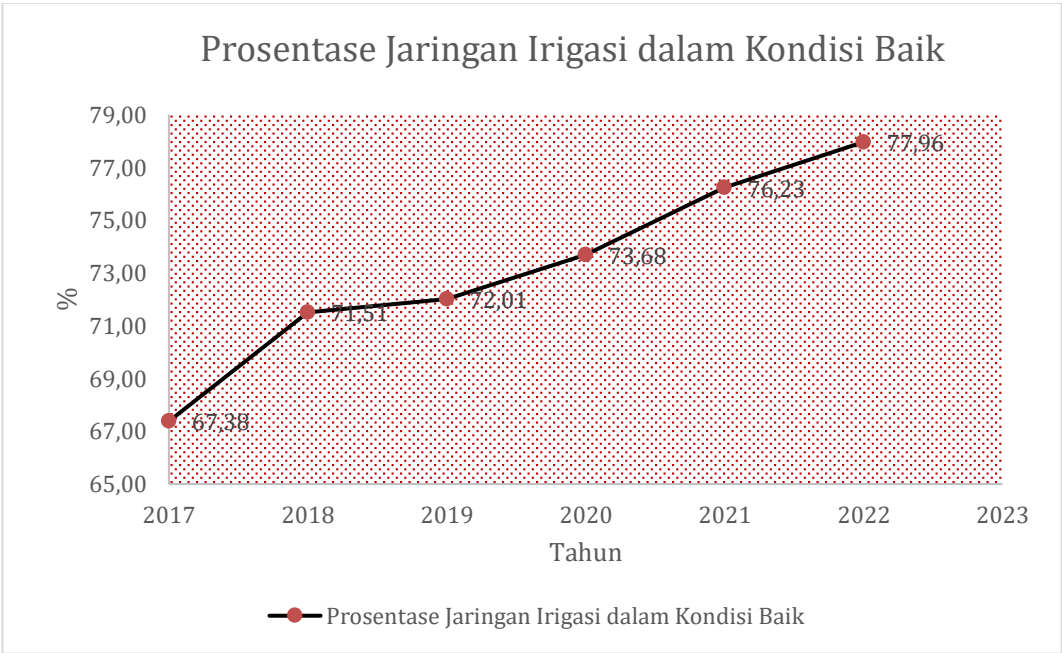
Tabel 2.15 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Bali Tahun 2022

No.	Nama Daerah Irigasi	Lokasi (Kab/Kota)	Luas Baku (ha)	Kondisi jaringan irigasi (Primer + Sekunder)	
				Baik (m)	Tidak Baik (m)
1.	Apuan	Bangli-Gianyar	160	3.464	1.595
2.	Bekutel	Bangli-Gianyar	224	3.550	1.879
3.	Tembuku	Bangli-Gianyar	152	2.489	287
4.	Banjarangkan	Klungkung-Bangli	543	3.262	629
5.	Yeh Leh	Tabanan-Jembrana	230	5.153	290
6.	Dwi Eka Buana	Bangli-Gianyar	150	6.764	688
7.	Mergaya	Denpasar-Badung	372	3.510	0
8.	Padpadan	Bangli-Gianyar	81	3.616	513
9.	Gerana	Badung	1.027	8.008	11.009
10.	Tiyingtali	Buleleng	1.177	13.811	10.552
11.	Benel	Jembrana	1.047	15.772	2.414
11.	Pala Sari	Jembrana	1,300	25.349	4.985
13.	Balian	Tabanan	1.027	18.479	3.081
14.	Oongan	Denpasar	1.781	21.623	200
Total			9.271	134.850	38.122

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, 2022.

Rasio jaringan irigasi kewenangan Provinsi Bali sebesar 47,52 (dalam 1 ha sawah memiliki panjang saluran irigasi 47,52 km). Untuk Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi, kondisi jaringan irigasi terus diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun dalam kurun waktu tertentu terdapat penurunan angka yang diakibatkan oleh penurunan kondisi jaringan irigasi yang signifikan serta bersifat tidak terduga. Pada tahun 2017-2022, persentase kondisi jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik berturut-turut: 67,38 %, 71,51 %, 72,01 %, 73,68 %, 76,23 %, dan 77,96 %.

Gambar 2.74 Persentase Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2022



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, 2022

2. Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan di Provinsi Bali meliputi pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air sebagai bentuk pengendalian daya rusak air, yaitu : pengamanan pantai agar terlindungi dari abrasi, pengaman sungai baik berupa perlindungan tebing maupun normalisasi alur, serta pengendalian daya rusak air pada sumber air lainnya. Selain itu embung kewenangan provinsi yang merupakan sarana dan prasarana

penyediaan air baku juga merupakan salah satu unsur yang akan dijaga dan ditingkatkan kondisinya.

A. Pantai

Wilayah Provinsi Bali dikelilingi oleh laut dan pantai yang menjadi salah satu daya tarik wisata di Bali. Pantai di Bali juga merupakan tempat sarana upacara keagamaan (Melasti). Kondisi pantai di Bali dari tahun ke tahun mengalami kemunduran garis pantai sebesar 1,86 m/tahun akibat adanya abrasi. Tentunya hal ini memerlukan penanganan segera, mengingat pentingnya peran pantai untuk masyarakat Bali. Panjang pantai Provinsi Bali adalah 633,35 km dan panjang pantai yang terabrasi sebesar 215,82 km. Namun penanganan abrasi pantai baru mencapai 114,83 km. Kondisi pantai di Bali ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Kondisi Pantai di Bali

No	Kabupaten	Panjang Garis Pantai (km)*	Panjang Garis Pantai Terabrasi (km)*	Laju Kemunduran Garis Pantai (m/thn)*	Panjang Garis Pantai Tertangani (km)**	Panjang Garis Pantai Belum Tertangani (km)*
1.	Buleleng	172.301	69.96	1.21	45.350	24.61
2.	Karangasem	86.070	40.98	2.11	12.546	28.43
3.	Klungkung	113.397	25.77	1.66	14.005	11.76
4.	Gianyar	14.284	10.48	3.20	8.875	1.61
5.	Denpasar	46.164	11.26	1.07	11.26	0.00
6.	Badung	83.786	23.01	1.96	13.51	9.50
7.	Tabanan	30.177	12.51	1.99	3.16	9.35
8.	Jembrana	87.173	21.86	1.67	6.14	15.72
TOTAL		633.35	215.83	1.86	114.85	100.98

* Sumber :Updating Abrasi Pantai Provinsi Bali Tahun 2015

** Rekap Data Sampai Tahun 2022

B. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, wilayah sungai di Provinsi Bali merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional. Namun penangangan sungai terhadap daya rusak air di Bali merupakan

kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali yang diprioritaskan terhadap perlindungan aset dan fasilitas umum. Berdasarkan data dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida yang dikompilasi dengan data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, jumlah sungai yang rawan terhadap kerusakan baru bisa ditangani sebesar 14,32% hingga Tahun 2022.

C. Embung

Bali dengan potensi yang tidak merata di seluruh wilayah tentunya memerlukan sistem penyediaan air baku yang dapat dijangkau di seluruh wilayah dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi wilayah yang bersangkutan. Embung merupakan salah satu alternatif sistem penyediaan air baku bagi masyarakat yang tidak terjangkau pelayanan air bersih. Sebagai upaya peningkatan sistem penyediaan air baku, Provinsi Bali telah membangun 4 (empat) buah embung yaitu Embung Puragae, Embung Tukad Mantri dan Embung Ban yang terletak di Kabupaten Karangasem dan Embung Tembok yang terletak di Kabupaten Buleleng, yang mana belum dapat berfungsi secara optimal. Kondisi daya tampung embung dari tahun 2019-2022 baru mencapai 47,5%, 48%, 48,5% dan 49%. Untuk itu diperlukan penanganan dalam rangka peningkatan fungsi embung.

Mulai Tahun 2022, perhitungan target kinerja kondisi sarana dan prasarana sumber daya air secara keseluruhan dihitung dari hasil pembobotan kondisi pantai, sungai dan embung, sehingga Data Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik Tahun 2022 sebesar 48,33%.

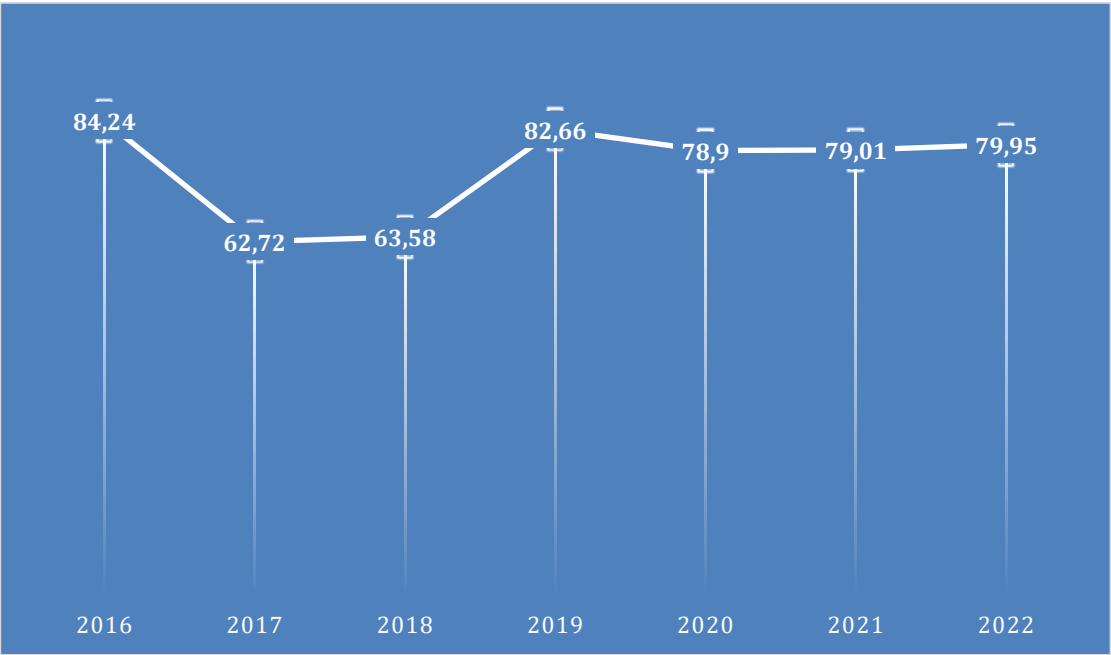
3. Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 84,24%. Kondisi ini mengalami penurunan di beberapa titik, tetapi ada juga peningkatan di beberapa tempat karena sudah mendapat penanganan. Sampai di akhir tahun 2022 kondisi jalan mantap menjadi 79,95%, dimana nilai persentase tersebut terdiri dari 594,28 Km dengan kondisi mantap dan sepanjang

149,06 Km dengan kondisi tidak mantap, dari total 743,34 Km panjang keseluruhan ruas jalan Provinsi Bali. Kondisi ini dapat berubah tatkala dilakukan perubahan Surat Keputusan Gubernur Bali tentang Penetapan Jalan Provinsi yang mengikuti perubahan penetapan jalan nasional.

Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas pendanaan baik dari APBD maupun APBN yang mendukung peningkatan kualitas jalan dan jembatan dipandang belum memadai dibandingkan dengan kerusakan jalan yang timbul. Kondisi ini ditambah lagi dengan potensi kerusakan jalan yang diakibatkan oleh volume/beban kendaraan yang melintas di jalan dan jembatan serta kontribusi penurunan kualitas jalan dan jembatan oleh penyedia layanan utilitas yang jaringannya dibawah jalan. Persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Gambar 2.75 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2022

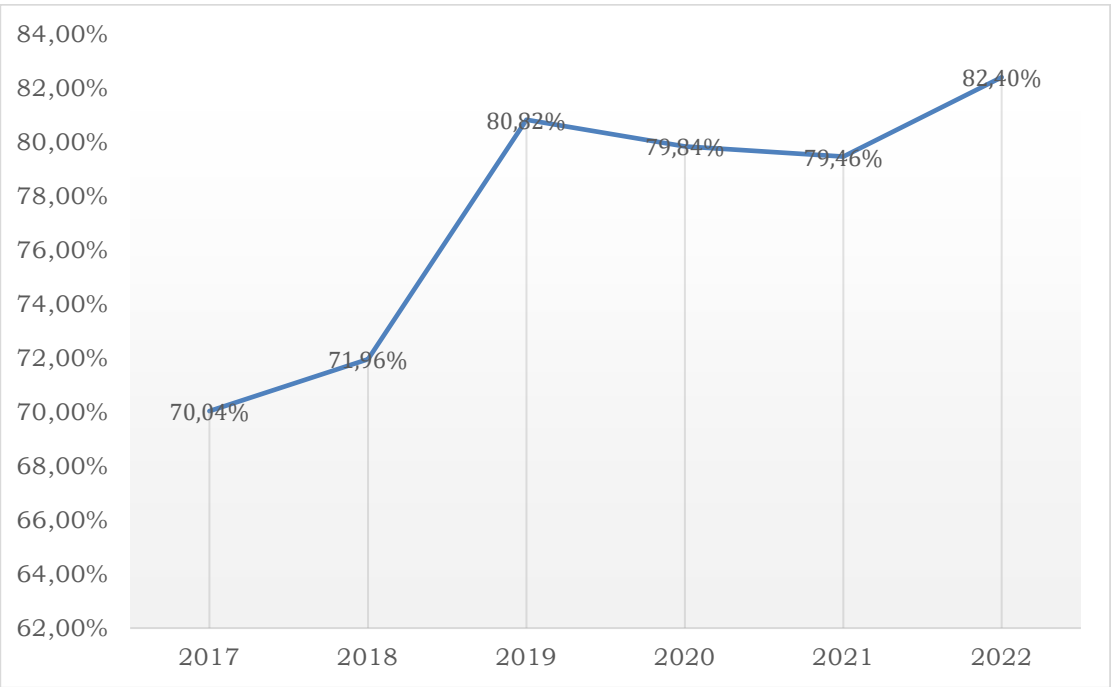


Sumber Data: Dinas PUPRKIM Provinsi Bali

4. Penyelenggaraan Air Limbah

Pengelolaan Air Limbah di Provinsi Bali menggunakan persentase cakupan layanan air limbah layak sebagai indikator untuk mengukur tingkat capaian layanan air limbah domestik. Yang merupakan air limbah domestik adalah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Adapun dalam penyediaan layanan air limbah layak, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali adalah penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Berdasarkan data dari UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas PUPRKIM Provinsi Bali dapat disampaikan persentase cakupan layanan air limbah layak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Gambar 2.76 Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali



Sumber: Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

Tempat pengelolaan air limbah domestik regional di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung memiliki kapasitas untuk melayani 21.807 Sambungan Rumah (SR) dan sampai saat ini sudah

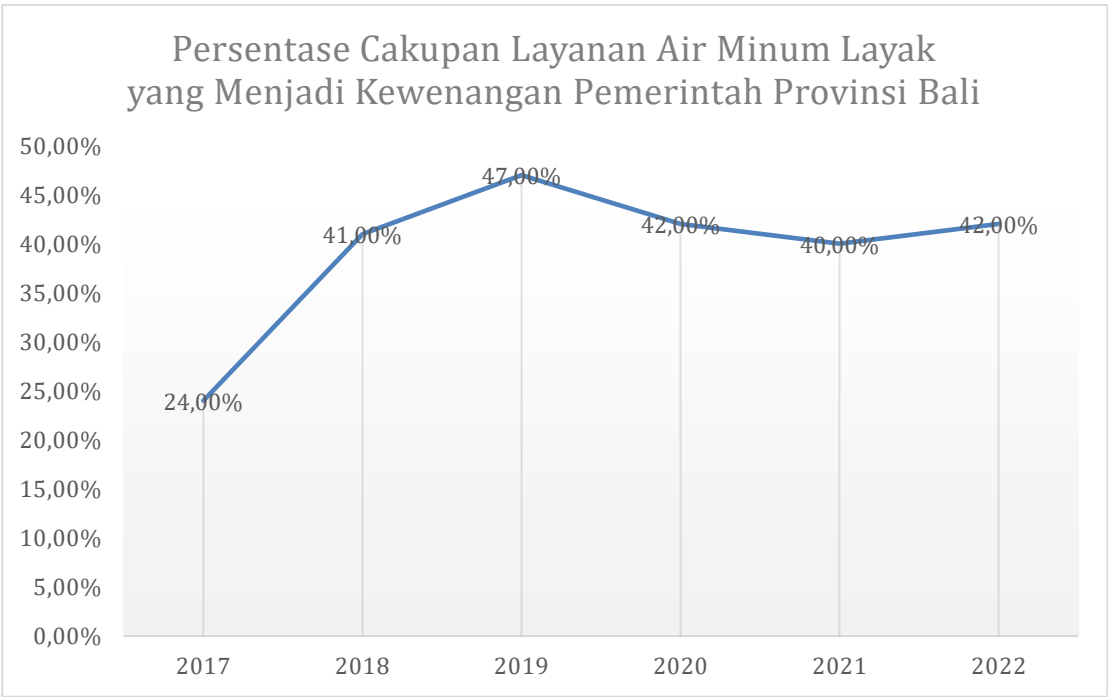
melayani sebanyak 15.584 SR. Sampai dengan tahun 2022, persentase cakupan layanan air limbah layak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali adalah 71,46%.

Setiap tahunnya jumlah SR dan tingkat pelayanan telah mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh pembangunan SR yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Untuk selanjutnya pembangunan SR perlu ditingkatkan guna memenuhi kapasitas maksimal IPAL Suwung, memperluas daerah pelayanan serta mengurangi dampak negatif dari air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik. Selain pembangunan SR, pemeliharaan sistem eksisting juga perlu dilaksanakan agar sistem bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kapasitasnya.

5. Penyelenggaraan Air Minum

Persentase Cakupan Layanan Air Minum Layak adalah indikator untuk mengukur tingkat serapan air minum curah pada SPAM yang dikelola Provinsi oleh Kabupaten/Kota. Adapun dalam penyediaan layanan air minum layak, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali adalah pemenuhan kebutuhan air minum curah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sampai tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali mengelola 4 (empat) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yaitu SPAM Petanu, SPAM Penet, SPAM Burana dan SPAM Telagawaja serta 1 (satu) SPAM Strategis yaitu SPAM Guyangan di Nusa Penida. Berdasarkan data dari UPTD Pengelolaan Air Minum (PAM) Dinas PUPRKIM Provinsi Bali dapat disampaikan Persentase cakupan layanan air minum layak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Gambar 2.77 Persentase Cakupan Layanan Air Minum Layak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali



Sumber: Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, persentase serapan air curah mengalami fluktuasi namun debit serapan air curah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan karena efek pandemi Covid-19. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali perlu melakukan pembangunan dan pengembangan SPAM Regional guna meningkatkan serapan air curah, mengurangi *idle capacity* dan meningkatkan pendapatan sebagai sumber PAD yang bersumber dari air minum. Pembangunan dan pengembangan SPAM Regional dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) masing-masing SPAM.

6. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penataan Bangunan dan Lingkungan di Provinsi Bali dilakukan pada kewenangan Provinsi Bali, seperti : Lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Bali, Kawasan Strategis Provinsi Bali termasuk Pura Sad Khayangan dan Khayangan Jagad, Proyek prioritas provinsi, Bangunan dan Lingkungan Aset Provinsi Bali lainnya serta bangunan

lain di wilayah desa dan kabupaten/kota se-Bali yang mendukung prioritas daerah di Provinsi Bali. Pendanaannya dilakukan dalam belanja langsung maupun dalam bentuk hibah uang dan barang. Hingga Tahun 2022, kondisi bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik tercapai sebesar 64,98%.

7. Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bali

Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bali meliputi penyusunan Rencana Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Koordinasi serta fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Saat ini, Provinsi Bali sedang melakukan Revisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 khususnya integrasi materi RZWP3K kedalam materi RTRW. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan pada kawasan strategis provinsi. Keterbatasan anggaran daerah, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah, belum optimalnya kepemilikan produk hukum di daerah dan terbatasnya pegawai bidang PPNS Penataan Ruang, menjadi penyebab belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Selain penyelenggaraan penataan ruang kewenangan Provinsi Bali, Urusan Penataan Ruang juga melaksanakan pembinaan penataan ruang di kabupaten/kota se-Bali. Hal ini dapat dilihat dalam tabel Status RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tabel 2. 17 Status RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Status	Keterangan
1.	Jembrana	Ada (sedang proses penetapan revisi)	Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 11 Tahun 2012 RTRW Tahun 2012-2032 Ditetapkan: 9 Agustus 2012
2.	Tabanan	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten TabananTahun 2012-2032 Ditetapkan: 27 Desember 2012
3.	Badung	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Status	Keterangan
			tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 Ditetapkan: 30 Desember 2013
4.	Gianyar	Ada (sedang proses penetapan revisi)	Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 Ditetapkan: 6 Nopember 2012
5.	Klungkung	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 Ditetapkan: 28 September 2013
6.	Bangli	Ada (sedang proses penetapan revisi)	Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 Ditetapkan: 30 Desember 2013
7.	Karangasem	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2020 Ditetapkan: 23 Desember 2020
8.	Buleleng	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 Ditetapkan: 30 Desember 2013
9.	Denpasar	Ada	Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 8 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041 Ditetapkan: 17 Desember 2021

Sumber Data : Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

8. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi Bali dilaksanakan sesuai kewenangan yang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kewenangan tersebut ada pada sub-urusan Jasa Konstruksi, khususnya sertifikasi tenaga ahli konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Target Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat di Provinsi Bali adalah 16,51% untuk tahun 2022 dan

19,64% untuk tahun 2023. Data Capaian Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18.Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) ber SKA di Provinsi Bali Tahun 2017 sd 2020

No	Kabupaten/ Kota	TKK ber SKA				Total
		2017	2018	2019	2020	
1	Jembrana	24	123	114	41	302
2	Tabanan	52	218	153	93	516
3	Badung	109	342	257	168	876
4	Gianyar	69	211	190	100	570
5	Klungkung	21	67	65	45	198
6	Bangli	21	41	33	15	110
7	Karangasem	24	91	74	59	248
8	Buleleng	49	126	98	56	329
9	Denpasar	306	794	675	429	2204
	Jumlah	675	2.013	1,659	1.006	5.353

Sumber Data: Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

Untuk data capaian tahun 2022, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi menggunakan sumber data yaitu melalui data digital *dashboard* bina konstruksi yang diperoleh secara online. Berdasarkan data dari dashboard bina konstruksi TKK bersertifikat SKA di Bali sejumlah 782 SKA, sehingga realisasi sampai tahun 2022 dalam persentase adalah 6,1%. Kecilnya persentase realisasi SKA hingga Tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Terhambatnya kegiatan sertifikasi yang diakibatkan oleh terjadinya masa transisi bubarnya LPJKD pada tahun awal 2020 sd 2021, pergeseran kewenangan sertifikasi dari LPJKD ke LSP, perubahan NSPK dan Juknis yang meliputi perubahan fundamental skema kegiatan sertifikasi, perubahan skema dari perijinan konvensional ke perijinan *online* dan terjadinya masa pandemi covid-19 yang berdampak pada diberlakukannya PPKM
2. Database jumlah TKK yang saat ini tersedia secara *online* melalui *dashboard* bina konstruksi belum diketahui secara luas
3. Belum optimalnya kesadaran TKK untuk memperpanjang sertifikatnya.

Program penyelenggaraan Jasa Konstruksi juga menaungi aktivitas pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian. UPTD ini melayani aktivitas pengujian tanah, bahan bangunan dan penyewaan alat berat untuk menunjang konstruksi di Provinsi Bali. Penyewaan alat berat memberikan kontribusi terhadap pendapatan di Provinsi Bali. Dalam rangka peningkatan layanan uji, UPTD sedang melakukan akreditasi terhadap laboratorium yang dimiliki.

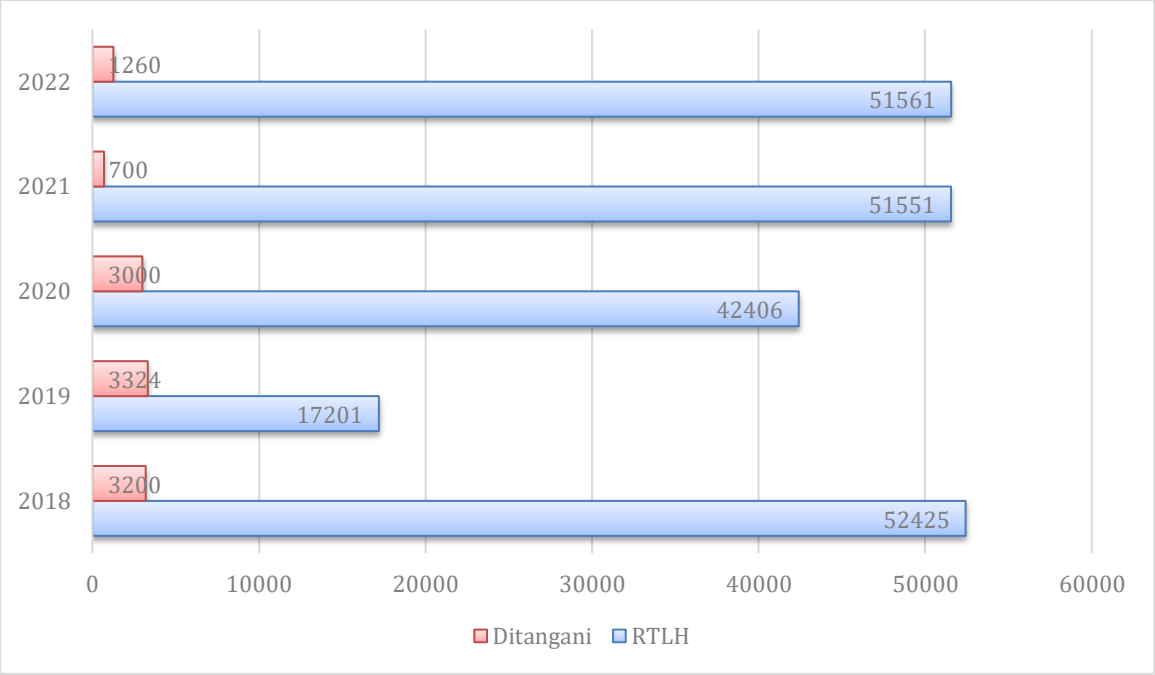
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni baru memiliki data Jumlah RTLH pada tahun 2018 dengan jumlah 52.425 unit rumah. Tahun 2019 data menunjukkan penurunan jumlah RTLH menjadi 17.201 unit pada akhir tahun 2019 setelah data RTLH dikurangi dengan realisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari kegiatan pemerintah provinsi sebanyak 7 unit di Desa Ababi, Karangasem. Selain itu, terdapat bantuan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta melalui program perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Namun, terjadi peningkatan data RTLH Pada Tahun 2020 menjadi 42.406 unit. Tahun 2020 hingga 2021, tidak terdapat realisasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni karena terjadi *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 serta Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sudah bukan lagi menjadi kewenangan bidang perumahan pada pemerintah provinsi sesuai pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur. Penuntasan RTLH ditunjang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melakukan 3.700 peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tahun 2021 data menunjukkan peningkatan jumlah RTLH menjadi 51.551 unit bersumber dari SIBARU (Sistem Bantuan Perumahan). Sedangkan pada tahun 2022, program peningkatan kualitas RTLH kembali dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.260 unit di 5 Kecamatan.

Gambar 2.78 Grafik Perbandingan Peningkatan Kualitas Dengan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali



Sumber Data : Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

2. Luas Kawasan Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota se-Bali, yang diinventarisir hingga pada tahun 2021, terdapat sebanyak 2.205,69 Ha luas kawasan kumuh yang tersebar di Kabupaten/Kota. Sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk kawasan kumuh kewenangan pusat (>15 Ha) seluas 1.830,68 Ha, kewenangan provinsi (10-15 Ha) seluas 131,47 Ha, dan kewenangan kabupaten (<10 Ha) seluas 243,54 Ha. Pemerintah provinsi sendiri mampu menangani kekumuhan kewenangan provinsi sebesar 7 Ha. Program penanganan kawasan kumuh yang dilakukan meliputi penataan infrastruktur kawasan, penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan peningkatan layanan. Pada tahun 2021 tidak ada program penanganan kumuh yang dilakukan karena adanya kebijakan refocusing anggaran, sehingga jumlah kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawab Provinsi Bali masih sama yaitu 131,47 Ha. Selanjutnya, penanganan

kawasan kumuh akan menjadi prioritas pemerintah daerah sehingga pada masa mendatang jumlah kawasan kumuh di Provinsi Bali bisa dikurangi sampai dengan 0 persen.

Tabel 2.19 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2022

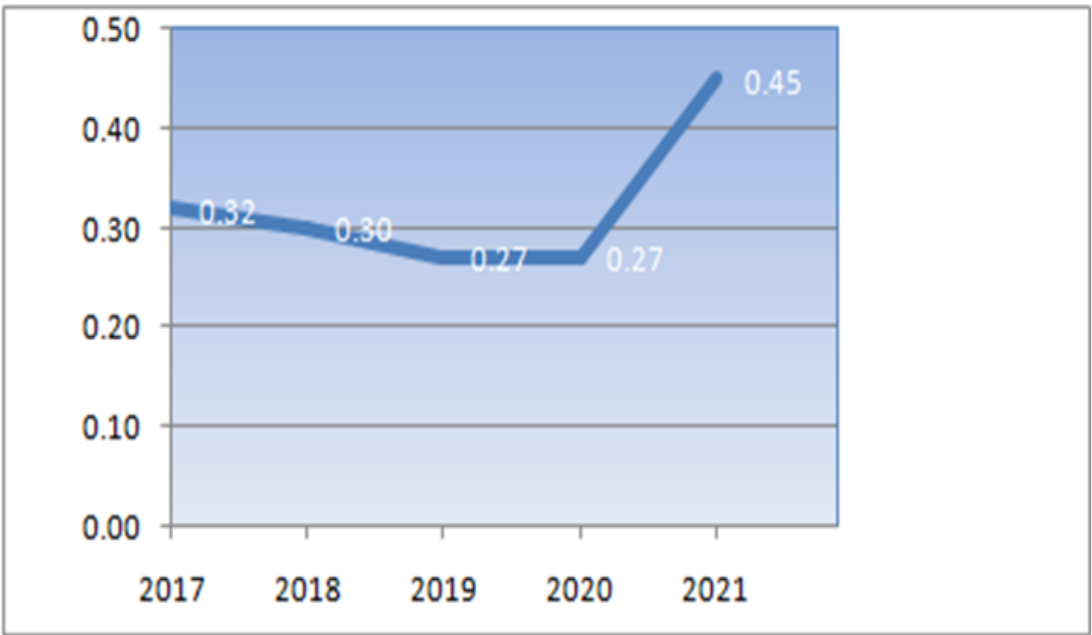
Kewenangan	Kawasan Kumuh berdasarkan SK Bupati/Wali Kota (Ha)	Tertangani (Ha)	Belum tertangani (Ha)
Nasional	1.869,88	185,35	1.661,04
Prov	158,68	7	151,68
Kab/Kota	177,45	-	177,45
Total	2.206,01	193,35	2.057,49

Sumber Data : Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
- Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari 0,32 pada tahun 2017 menjadi 0,27 pada tahun 2020. Selama kurun waktu 4 tahun terjadi penurunan rasio jumlah Satpol PP sebanyak 0,05 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,45. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap rasio jumlah Satpol PP, tetapi juga menunjukkan bahwa jumlah Satpol PP di Provinsi Bali masih tergolong kecil.

Gambar 2.79 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2017-2021

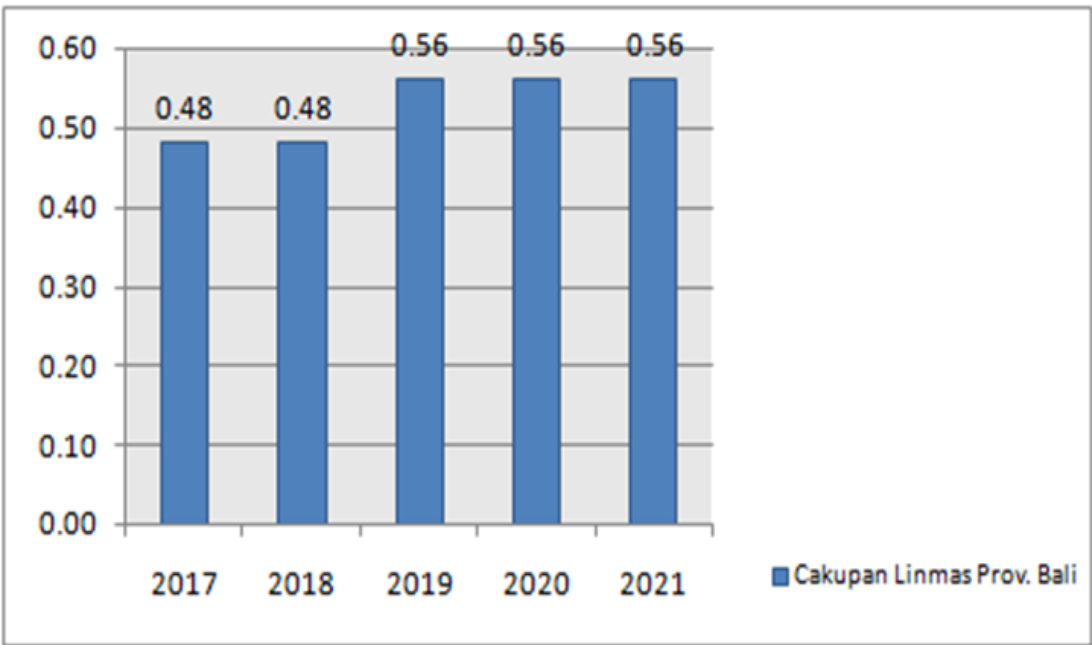


Sumber: Satpol PP Provinsi Bali, 2022

2) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat

Cakupan pelayanan linmas di Provinsi Bali terhadap jumlah penduduk pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,48 dan angka tersebut meningkat menjadi 0,56 pada tahun 2021. Ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah perlindungan masyarakat mulai dari tahun 2019 ke tahun 2021.

Gambar 2.80 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

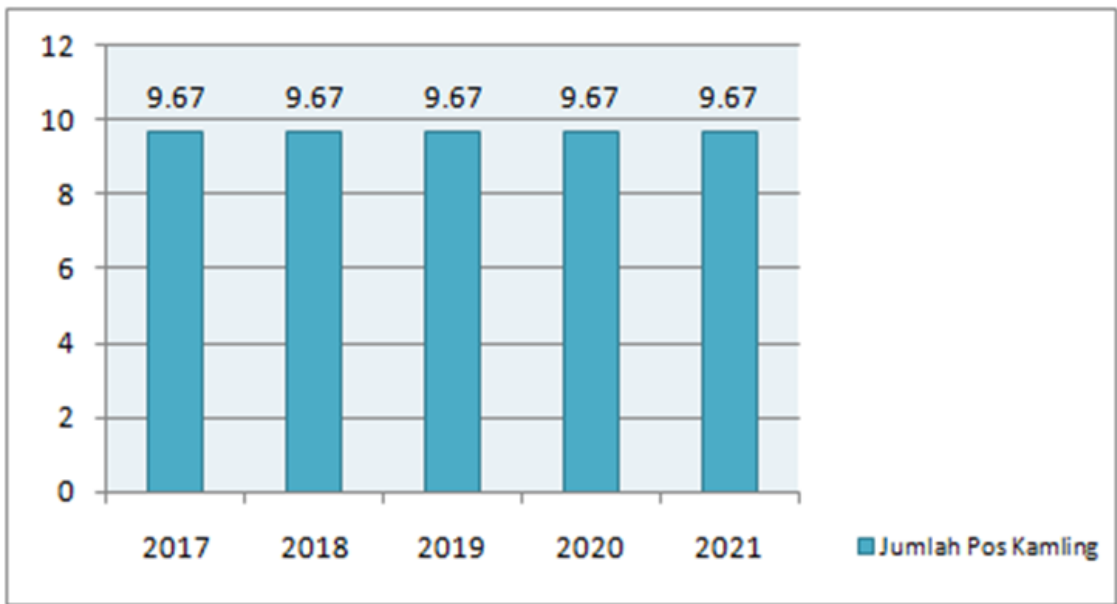


Sumber: Satpol PP Provinsi Bali, 2022

3) Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio jumlah pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2021 di Provinsi Bali tercatat sebesar 9,67%. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari data kabupaten/kota di Provinsi Bali, Kabupaten Badung memiliki rasio pos siskamling terbesar yaitu 8,8% sedangkan kabupaten yang memiliki angka terendah adalah Kota Denpasar dengan nilai 1,0%.

Gambar 2.81 Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2017-2021

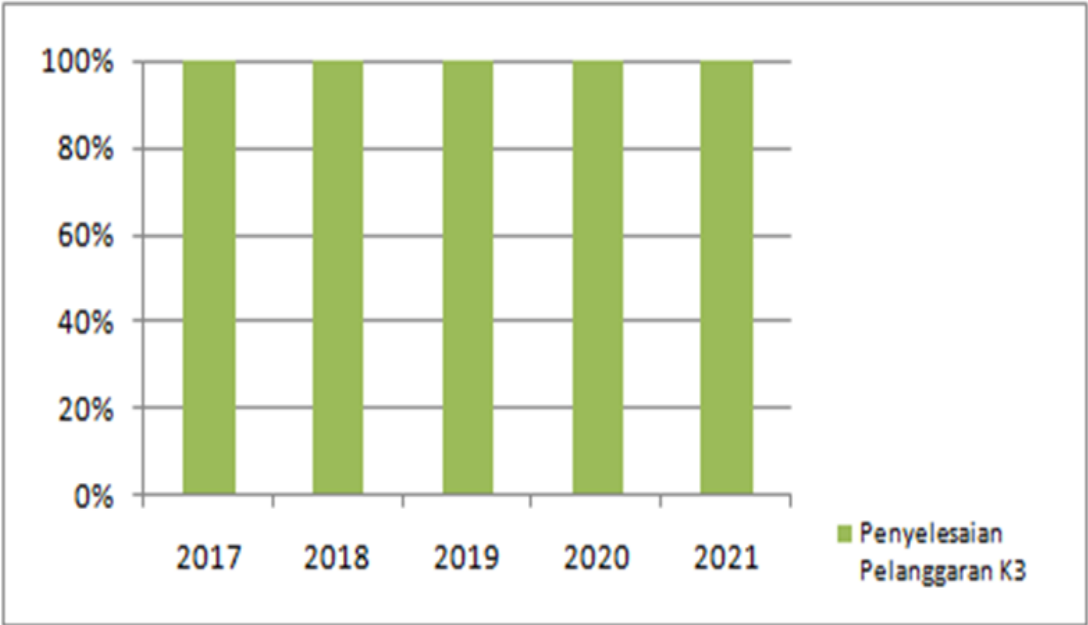


Sumber: Satpol PP Provinsi Bali, 2022

4) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Selama tahun 2017 sampai tahun 2021, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) telah mencapai 100 persen. Hal tersebut berarti seluruh jumlah pelanggaran yang terjadi selama tahun 2017 sampai 2021 telah dapat diselesaikan.

Gambar 2.82 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

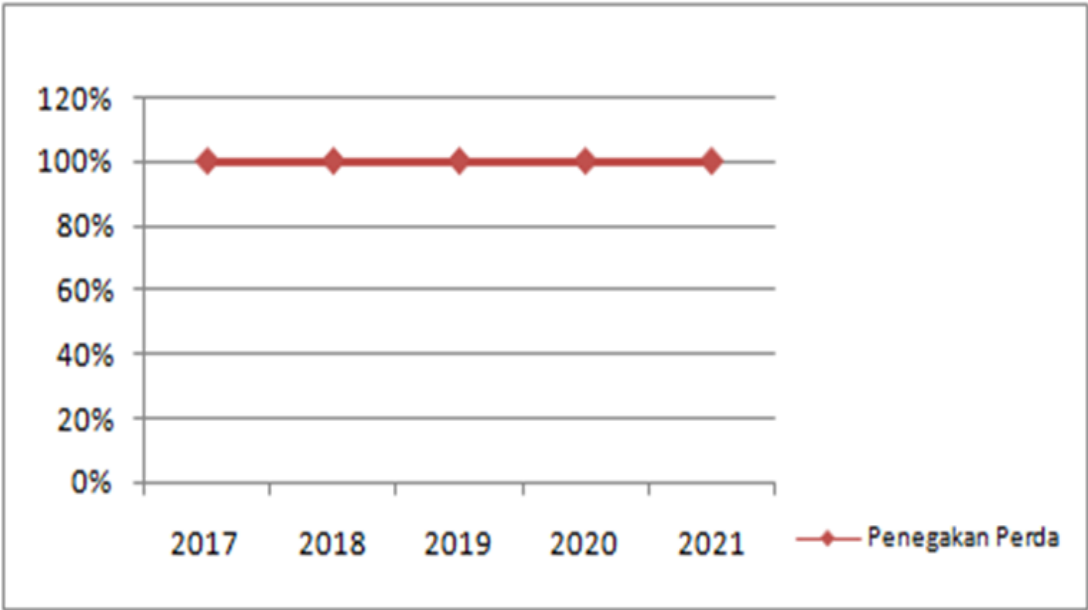


Sumber: Satpol PP Provinsi Bali, 2022

5) Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan perda di Provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai 2021 telah mencapai 100 persen. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa jumlah seluruh pelanggaran perda yang terjadi telah dapat diselesaikan.

Gambar 2.83 Persentase Penegakan Perda di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Satpol PP Provinsi Bali, 2022

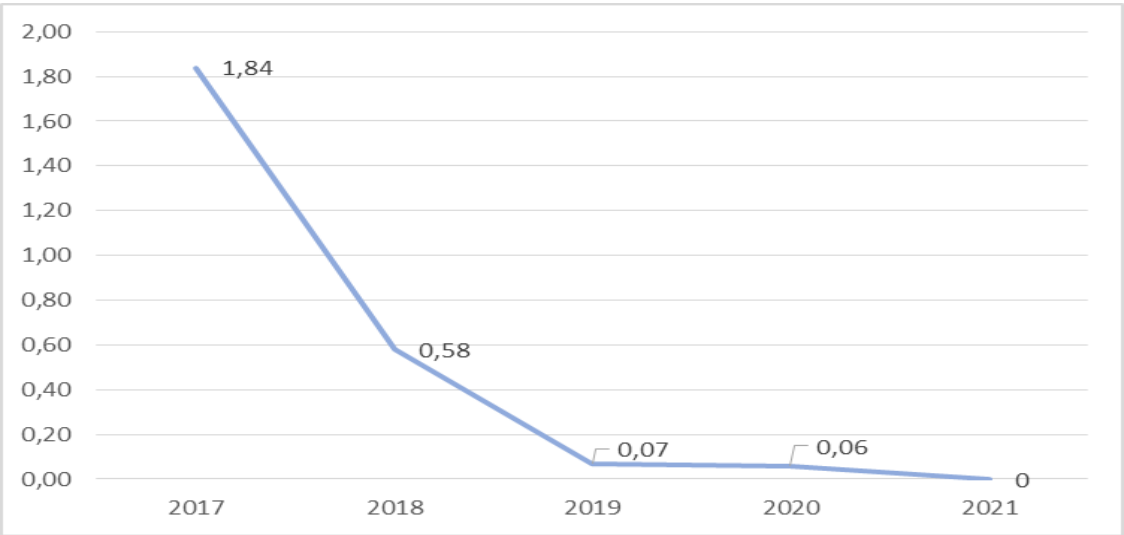
F. Sosial

1) Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Bantuan Sosial untuk PMKS di Provinsi Bali, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.84 memperlihatkan tren penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 bantuan sosial kepada PMKS melalui dana APBD masih dilaksanakan di luar dan di dalam panti sosial sedangkan mulai tahun 2018 bantuan sosial kepada PMKS dilaksanakan hanya di dalam panti sosial sesuai kewenangan Provinsi sehingga dibandingkan dengan besaran data PMKS yang ada di Provinsi Bali. Dinas Sosial P3A Provinsi Bali tidak ada memberikan bantuan sosial pada tahun 2021.

Gambar 2.84 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di provinsi Bali Tahun 2017-2021

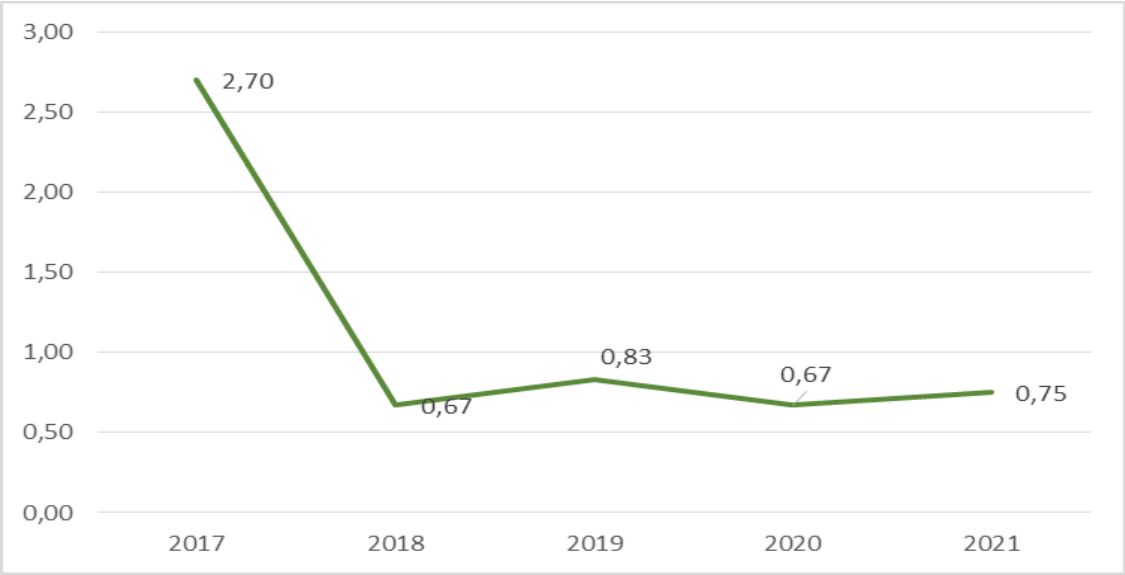


Sumber: Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, 2022

2) Persentase PMKS Yang Tertangani

Selama kurun waktu 2017 sampai 2021, persentase PMKS yang tertangani mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang bisa memberikan bantuan sosial kepada PMKS yang ada di panti sosial. Dari Gambar 2.85 terlihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan angka PMKS yang tertangani yaitu 2,70 persen pada tahun 2017 menjadi 0,75 pada tahun 2021.

Gambar 2.85 Persentase PMKS Yang Tertangani di Provinsi Bali 2017-2021

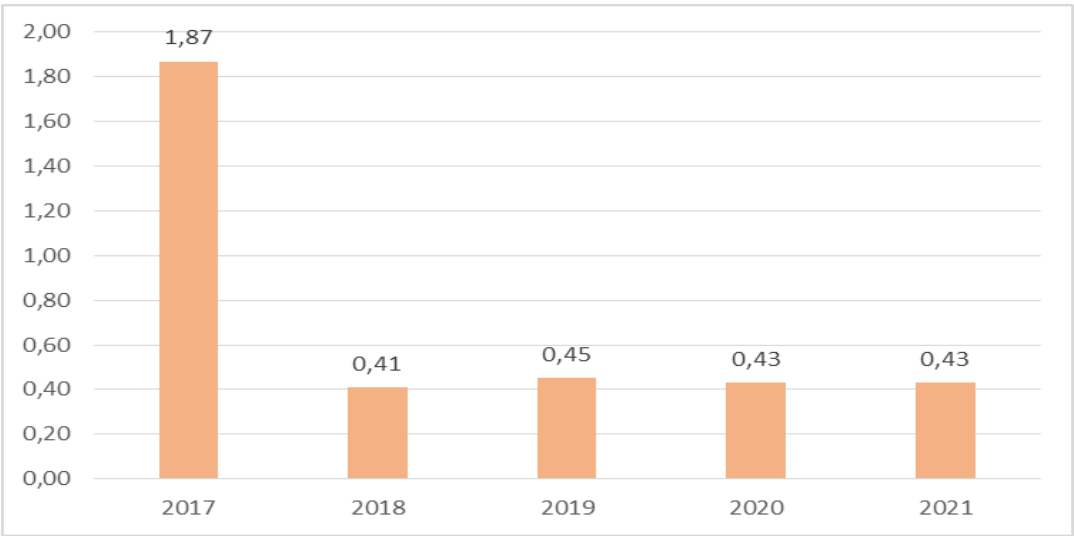


Sumber: Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, 2022

3) Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sejalan dengan penurunan anggaran untuk bantuan sosial kepada PMKS karena pengaruh kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Maka jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dari pemerintah juga mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada Gambar 2.86, persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2016 adalah sebesar 2,4 persen dan mencapai titik terendah pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 0,43 persen.

Gambar 2.86 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

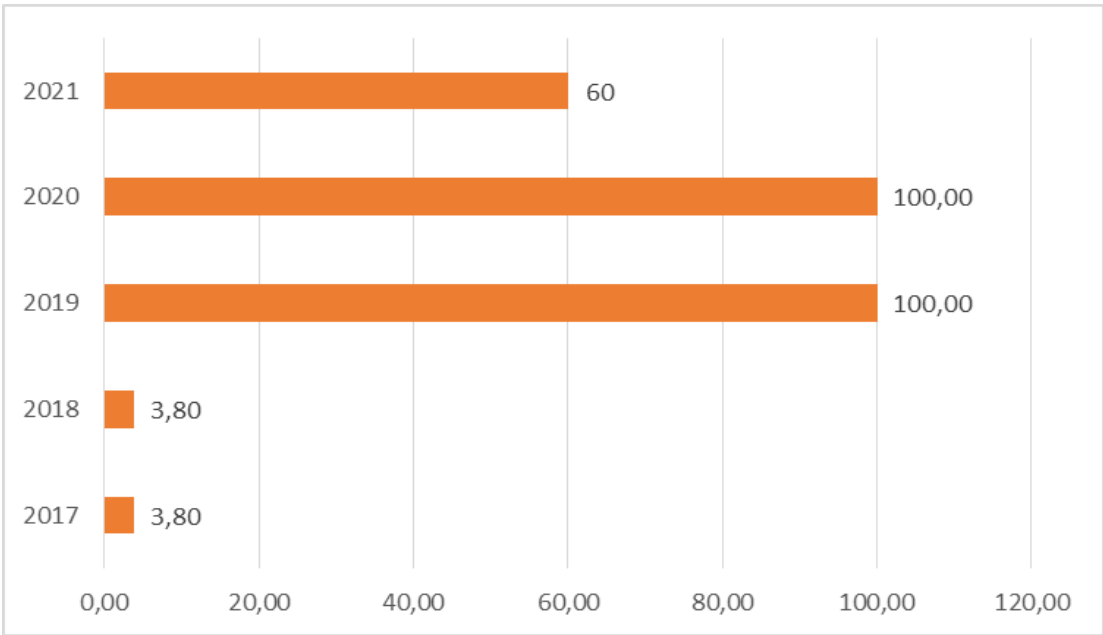


Sumber: Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, 2022

4) Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial mewajibkan terpenuhinya kebutuhan dasar, sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam panti sosial. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial mengalami peningkatan yang drastis terutama pada tahun 2019. Menurut data dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2017 dan 2018 adalah 3,8 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 setiap panti sosial sudah bisa menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan 2021 hanya mengalami penurunan kembali menjadi 60% karena ada satu panti yang tidak berfungsi.

Gambar 2.87 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

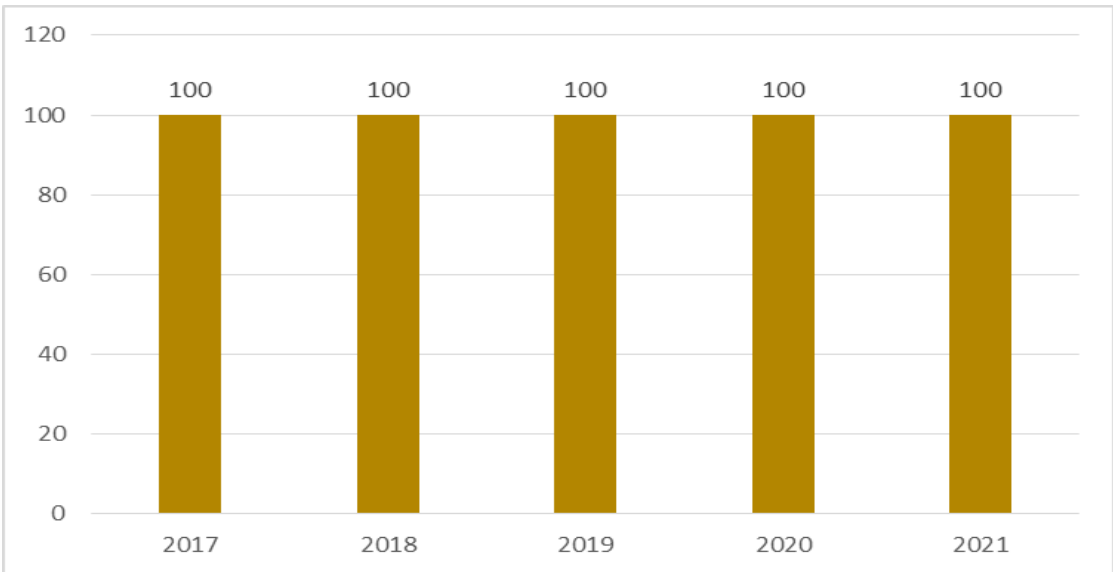


Sumber: Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, 2022

5) Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Selama kurun waktu 2017 sampai 2021, capaian korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Provinsi Bali telah mencapai 100 persen.

Gambar 2.88 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

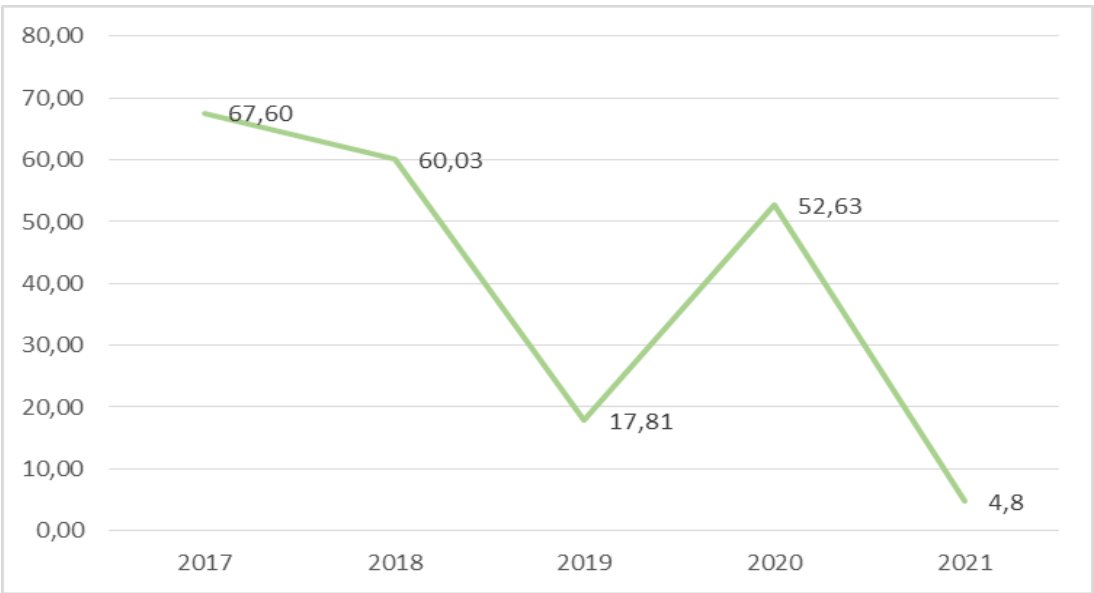


Sumber: Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, 2022

6) Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Selama kurun waktu 2017 sampai 2021, Provinsi Bali memiliki persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami penurunan seiring dengan kewenangan provinsi bali yang hanya memberikan pelayanan bagi sasaran yang berada di dalam panti saja.

Gambar 2.89 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, 2022

2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun merupakan jumlah sengketa yang terjadi per 1.000 jumlah perusahaan. Angka ini mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi. Angka sengketa pengusaha pekerja pada tahun 2017 terjadi sebesar 0,047: 1000 perusahaan. Dari sebanyak 9.947 perusahaan yang terdaftar, terdata sebanyak 47 sengketa pengusaha pekerja yang terjadi. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,006 : 1000 perusahaan, dan pada tahun 2019 sampai dengan 2021

mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,003 : 1000 perusahaan.

Sengketa pengusaha pekerja biasanya terjadi karena adanya perbedaan penafsiran para pihak terhadap Perjanjian Kerja (PK)/Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga memicu terjadinya perselisihan. Perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya secara Bipartit (pengusaha-pekerja). Jika belum menemukan jalan keluar, maka dilakukan proses mediasi oleh mediator di masing-masing kabupaten/kota. Akan tetapi, jika Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi tenaga kerja tidak memiliki Mediator, atau permasalahan belum dapat terselesaikan, maka sengketa akan dilanjutkan melalui proses mediasi di Disnaker Provinsi.

Data sengketa pengusaha pekerja yang disajikan adalah sengketa yang proses penyelesaiannya difasilitasi oleh Disnaker ESDM Provinsi Bali. Capaian yang disajikan berdasarkan surat permohonan dari kabupaten/kota, dan bukan target yang ditetapkan oleh Provinsi karena sengketa pengusaha pekerja diharapkan tidak ada/tidak terjadi.



Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.20 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	0,047 : 1000 perusahaan	0,006 : 1000 perusahaan	0,003 : 1000 perusahaan	0,003 : 1000 perusahaan	0,003 : 1000 perusahaan
Jumlah sengketa pengusaha pekerja	47	63	34	35	33
Jumlah perusahaan	9.947	11.053	9.838	11.836	10.555

Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

- 2) Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama
- Pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diuraikan bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
- a) Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 - b) Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 - c) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai

pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

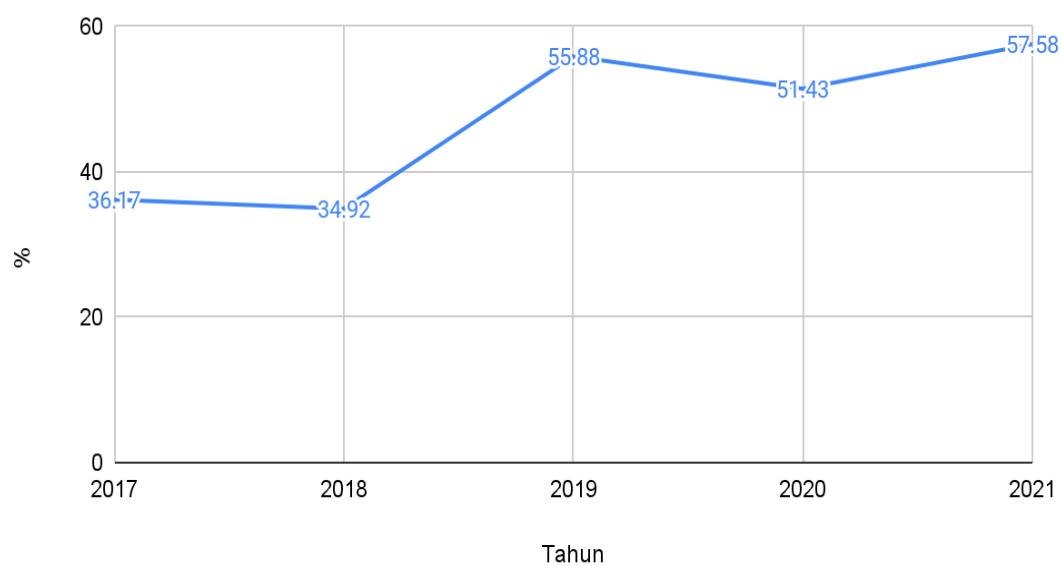
- d) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerjaan.

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran, sedangkan jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis.

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2017 sebesar 36,17%. Dari sebanyak 47 kasus yang dicatatkan, sebanyak 17 Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB). Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, penyelesaian kasus melalui Perjanjian Bersama (PB) berfluktuasi,

mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2018 yaitu sebesar 34,92%, dan tahun 2019 sebesar 55,88%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 51,43%, dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi sebesar 57,58%.

Gambar 2.91 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2017-2021



Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

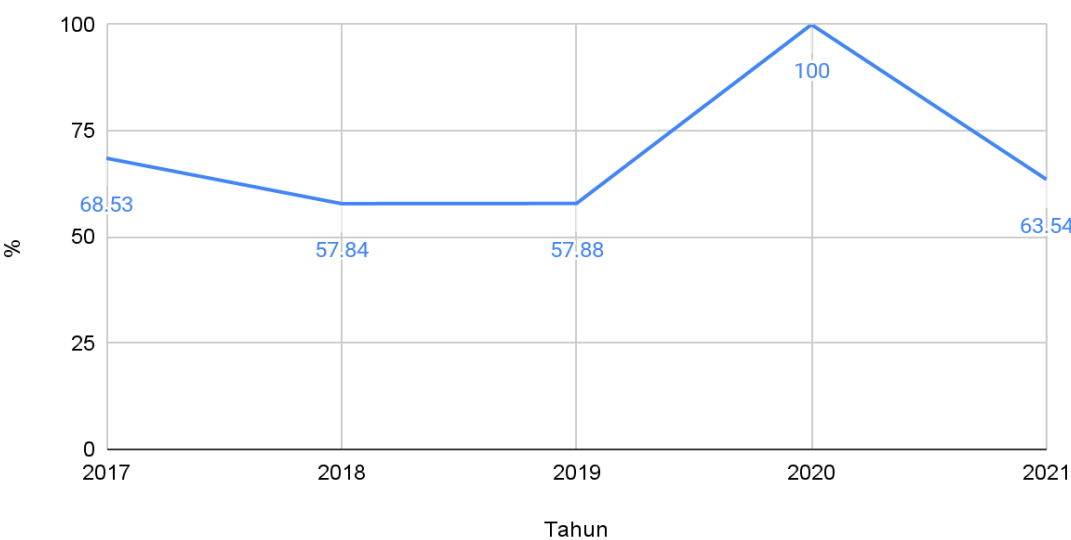
3) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang ketenagakerjaan. Pencari kerja terdaftar adalah orang yang sedang mencari pekerjaan dan terdaftar pada kantor Dinas Tenaga Kerja di masing-masing kabupaten/kota sebagai pemegang kartu kuning (Kartu AK1) namun belum dapat ditempatkan/bekerja. Pada tahun 2017, besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah sebesar 68,53%, mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 57,84%, tahun 2019 sebesar 57,88%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 100%, dimana seluruh pencari kerja yang terdaftar telah dapat ditempatkan/diterima bekerja. Akan tetapi, pada tahun 2021, data

tersebut kembali menurun menjadi 63,54%. Data yang tersaji tersebut adalah berdasarkan pada fasilitasi penempatan melalui Informasi Pasar Kerja, melalui kegiatan *Job Fair*, *Sisnaker*, dan data dari BP2MI. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dari tahun ke tahun. Secara umum, faktor tersebut diantaranya:

- a) Terbatasnya lowongan kerja/permintaan tenaga kerja dari dunia usaha/instansi.
- b) Minimnya tingkat keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan pencari kerja tidak sesuai dengan lowongan yang ada.
- c) Mencari kerja memilih-milih pekerjaan, dan rendahnya motivasi pencari kerja ke arah usaha mandiri.

Gambar 2.92 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



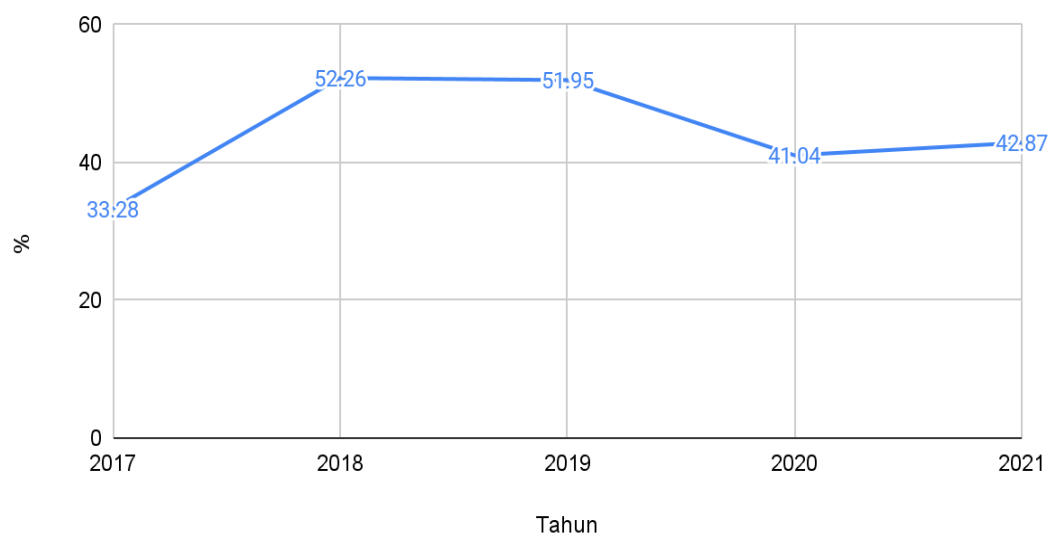
Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

- 4) Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Pekerja Jamsostek
Ketentuan mengenai program jaminan kesehatan bagi tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko kerja, sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan

harga diri manusia dalam menghadapi berbagai resiko sosial-ekonomi tersebut.

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek dirumuskan melalui jumlah pekerja/buruh formal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap Jumlah Pekerja/Buruh Formal yang ada di Provinsi Bali. Pada Tahun 2017 besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek adalah sebesar 33,28 %. Dari sebanyak 1.203.866 tenaga kerja formal (data BPS), hanya sebanyak 400.626 orang yang menjadi peserta Jamsostek. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 52,26%, di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 51,95%, dan tahun 2020 juga kembali menurun menjadi 41,04% dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 perlahan mulai mengalami peningkatan menjadi 42,87%. Data tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, menunjukkan adanya kesadaran perusahaan dalam upaya memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), JKM (Jaminan Kematian), dan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

Gambar 2.93 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Pekerja Jamsostek di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

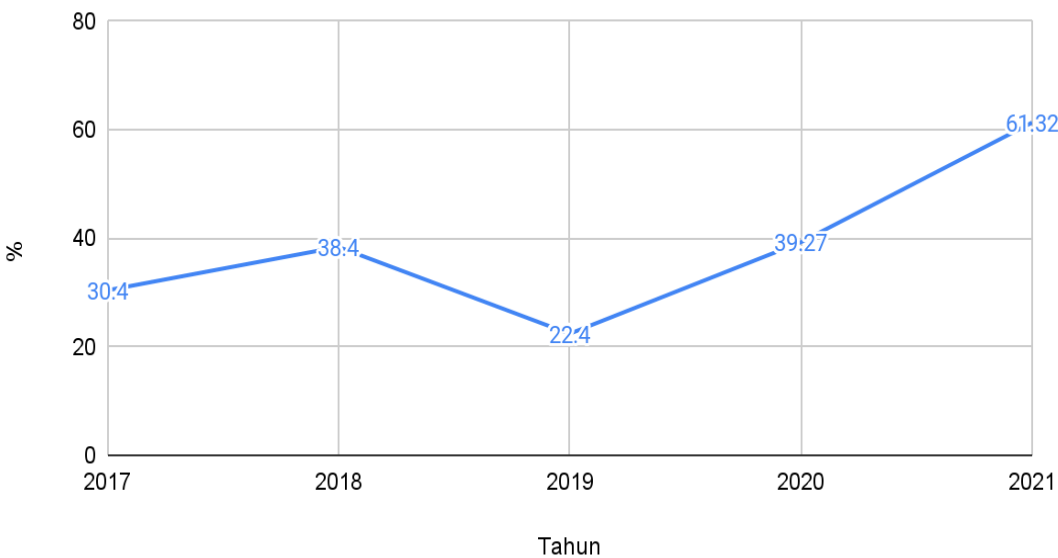
5) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Sebagai upaya untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing, Pemerintah Provinsi Bali melalui UPTD BLKIP (Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) menyelenggarakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Program/kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selalu diupayakan transformatif, disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja/dunia industri, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja sehingga mampu mengisi peluang kerja di DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri).

Pelatihan pada UPTD BLKIP dilaksanakan tidak hanya dari alokasi APBD tetapi juga APBN melalui UPTP Lombok Timur. Kehadiran Balai Latihan Kerja diharapkan memberikan pelatihan dengan *skilling* yaitu: *Skilling* untuk calon calon tenaga kerja yang ingin mendapatkan keterampilan, *up skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan dan *re skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin memperoleh keterampilan yang baru.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada UPTD BLKIP dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2017, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah sebesar 30,40%. Dari sebanyak 1.000 orang yang mendaftar, hanya sebanyak 304 orang yang dilatih. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 38,40%, tahun 2019 menurun menjadi 22,40%, meningkat kembali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 39,27% dan 61,32%. Tingginya animo masyarakat/pencari kerja yang mendaftar untuk dapat mengikuti pelatihan terkendala kuota peserta yang terbatas sehingga dalam pemilihan peserta dilakukan seleksi sebelumnya.

Gambar 2.94 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2017-2021



Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

6) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

Pemerintah Provinsi Bali melalui UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata (UPTD BLKIP) tidak hanya melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, tetapi juga berbasis masyarakat/MTU (*mobile training unit*). Program Pelatihan MTU (*Mobile Training Unit*) merupakan program pelatihan kerja yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal warga/masyarakat pada suatu wilayah, dilaksanakan berdasarkan pengajuan dari warga setempat. Pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU) merupakan salah satu program pelatihan UPTD BLKIP dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat untuk dapat berwirausaha mandiri dalam rangka peningkatan ekonomi dan pendapatan keluarga.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat melalui UPTD BLKIP Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu tercapai 100%. Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat dibatasi sesuai dengan kuota peserta yang tersedia, sehingga besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dapat tercapai 100% dari tahun ke tahunnya.

Tabel 2.21 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih	160	240	256	48	64
Jumlah Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat	160	240	256	48	64

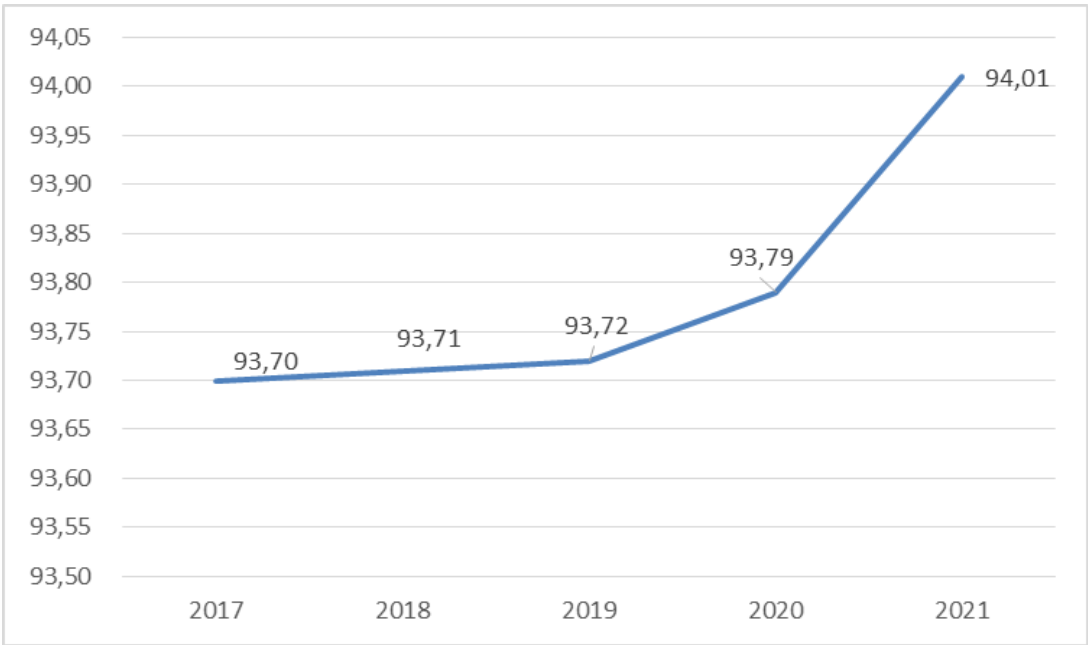
Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Capaian IPG dan IDG di Provinsi Bali

Untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali dapat dilihat dari Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Perempuan (IDG). Indikator ini dapat dipakai dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun 2021 capaian IPG Provinsi Bali mencapai 94,01 hal ini menunjukkan capaian IPG yang bagus.

Gambar 2.95 Capaian IPG di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

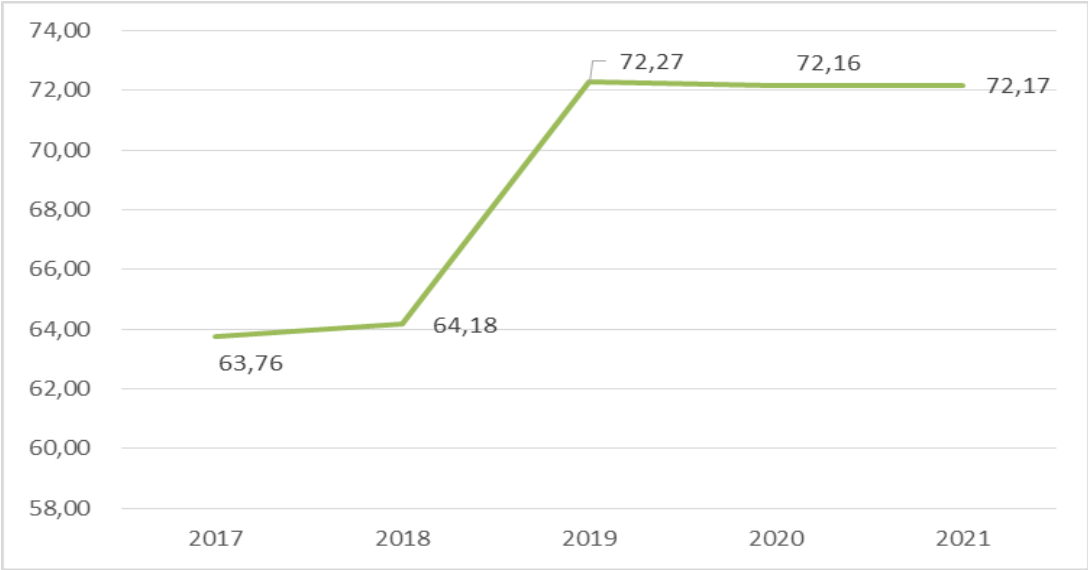


Sumber: Dinsos P3A Provinsi Bali, 2022

Selain IPG indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Dengan capaian IDG Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 72,17 hal ini menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, masih berada dibawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi se-Pulau Jawa dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang lambat. Jika diperbandingkan dengan beberapa Provinsi se-Pulau Jawa, maka nampak posisi Provinsi Bali berada paling bawah dan jaraknya cukup jauh. Artinya para perempuan Bali dalam hal kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih di bawah dari para perempuan di provinsi se-Pulau Jawa.

Gambar 2.96 Capaian IDG di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinsos P3A Provinsi Bali, 2022

2) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan pada tahun 2017 mencapai 45,22% menurun pada tahun 2016 dengan realisasinya yaitu sebesar 41,70%. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan lagi sebesar 4,33% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 47,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ideologi gender yang meletakkan peran perempuan di ranah domestik masih mempengaruhi eksistensi perempuan di dunia publik. Namun demikian perempuan boleh berbangga karena sudah diberi kesempatan menduduki posisi di pemerintahan, meskipun belum sepadan dengan laki-laki, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	41,70%	46,03%	47,29%	47,53%	48,31%

Sumber: Dinsos P3A Provinsi Bali, 2022

3) Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh proporsi keanggotaan legislatif. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tercatat bahwa jumlah perempuan yang terpilih dan duduk di lembaga Legislatif jumlahnya masih sangat minim dan jauh dari harapan, yaitu sebesar 9,09%. Namun demikian pada tahun 2019 angka keterwakilan perempuan pada Lembaga Legislatif mengalami peningkatan yaitu menjadi 16,36%. Meskipun demikian angka ini masih jauh dari 30% kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun Demikian perempuan sudah mampu mengakses dunia politik yang selama ini diidentifikasi dengan dunianya laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan gender yang cukup tinggi di lembaga Legislatif.

Tabel 2.23 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	9,09%	9,09%	14,11%	16,00%	16,36%

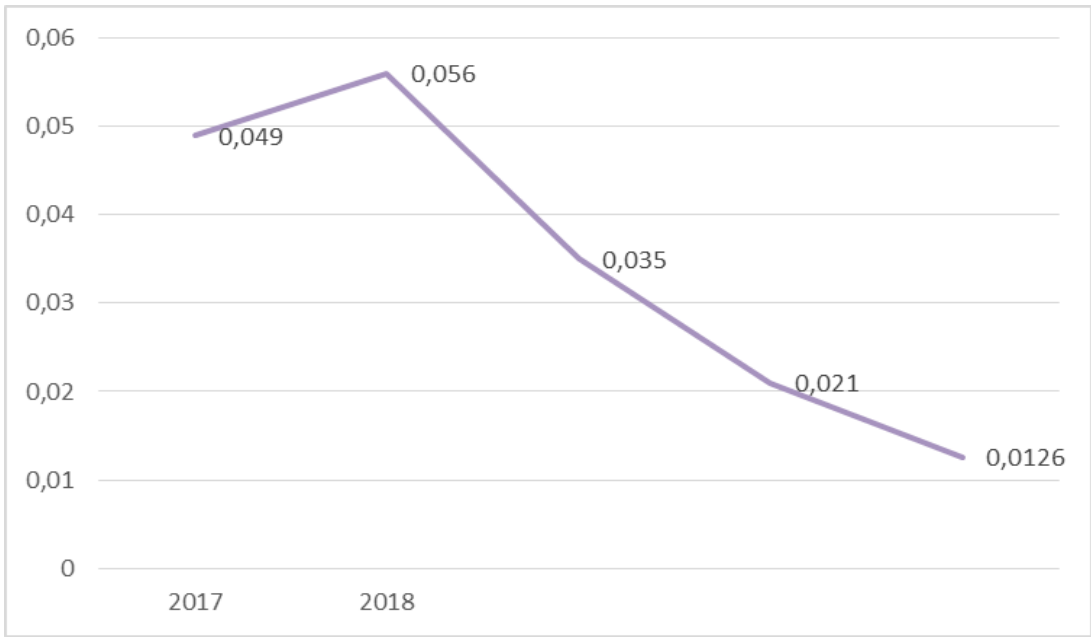
Sumber: Dinsos P3A Provinsi Bali, 2022

4) Rasio KDRT

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya diibaratkan seperti fenomena gunung es. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat dan tidak terungkap sehingga kasus kekerasan ini tidak terdata dengan baik. Banyak kasus dimasyarakat yang tidak dilaporkan karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kasus KDRT merupakan aib keluarga dan masalah keluarga sehingga orang lain tidak perlu tahu. Pendekatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan dilakukan dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Memberikan wawasan yang benar kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak positif terhadap penurunan jumlah kasus KDRT di Provinsi Bali. Dilihat dari data korban yang melapor dan tercatat di lembaga pemberi layanan yang tersebar di Provinsi Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio KDRT yang terjadi di Provinsi Bali adalah 0,0467 meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,049 dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 0,056. Selanjutnya dari tahun 2018-2020 terjadi tren penurunan rasio KDRT di Provinsi Bali yaitu menjadi 0,025 pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa jumlah laporan dan penyelesaian kasus KDRT terus menurun.

Gambar 2.97 Rasio KDRT di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinsos P3A Provinsi Bali, 2022

5) Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

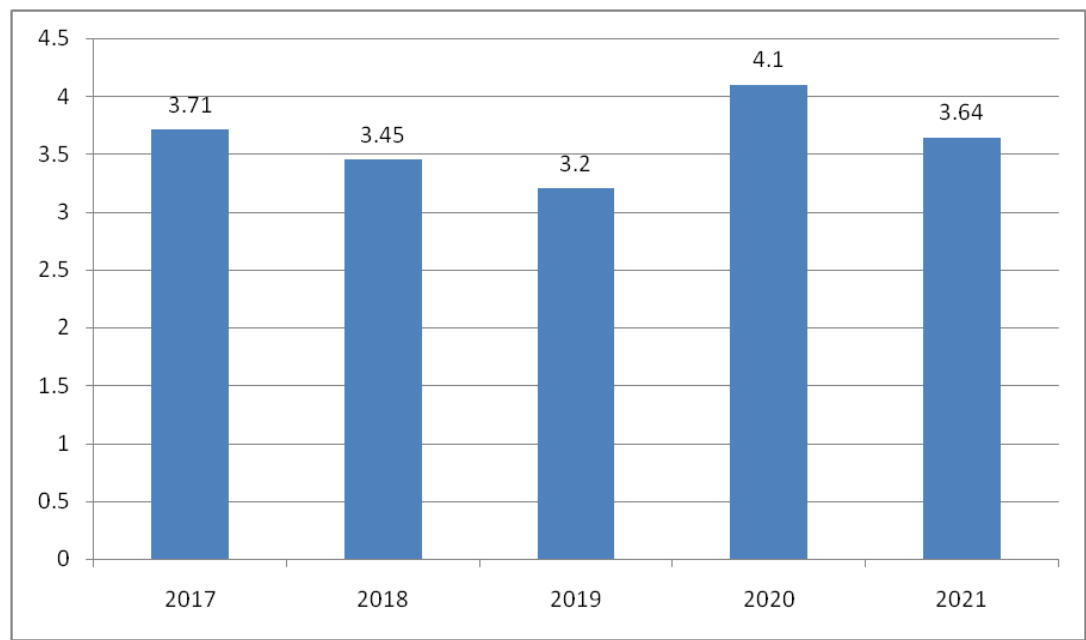
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pada pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun demikian mengacu pada pasal 69, 70 dan 71 juga diatur tentang pengecualian bagi anak usia 13–15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental dan sosial. Dari data yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali menunjukkan bahwa masih ada anak usia 15–19 yang bekerja. Jumlah tenaga kerja di bawah umur pada tahun 2017 adalah sebanyak 29.063 orang menurun pada tahun 2018

menjadi 87.311 orang dan terus mengalami penurunan hingga 78.796 orang pada tahun 2019. Terjadi peningkatan kembali di tahun 2020 hingga sebanyak 96.952 orang dan akhirnya pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 88.963 orang.

Berdasarkan data hasil survei angkatan kerja nasional sebagaimana dirilis BPS Provinsi Bali tahun 2022, jumlah tenaga kerja dibawah umur pada tahun 2021 sebanyak 88.963 orang atau 3,64 % dari keseluruhan angkatan kerja sebanyak 2.441.854 orang. Persentase ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,1 %. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh:

- a) Mulai diperketatnya aturan usia bagi pencari kerja
- b) Data BPS tidak didasarkan pada batasan usia anak 0-18 tahun tetapi kelompok umur 15-19 tahun sehingga ada kemungkinan besar anak usia di atas 18 tahun yang cukup banyak.

Gambar 2.98 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2017-2021



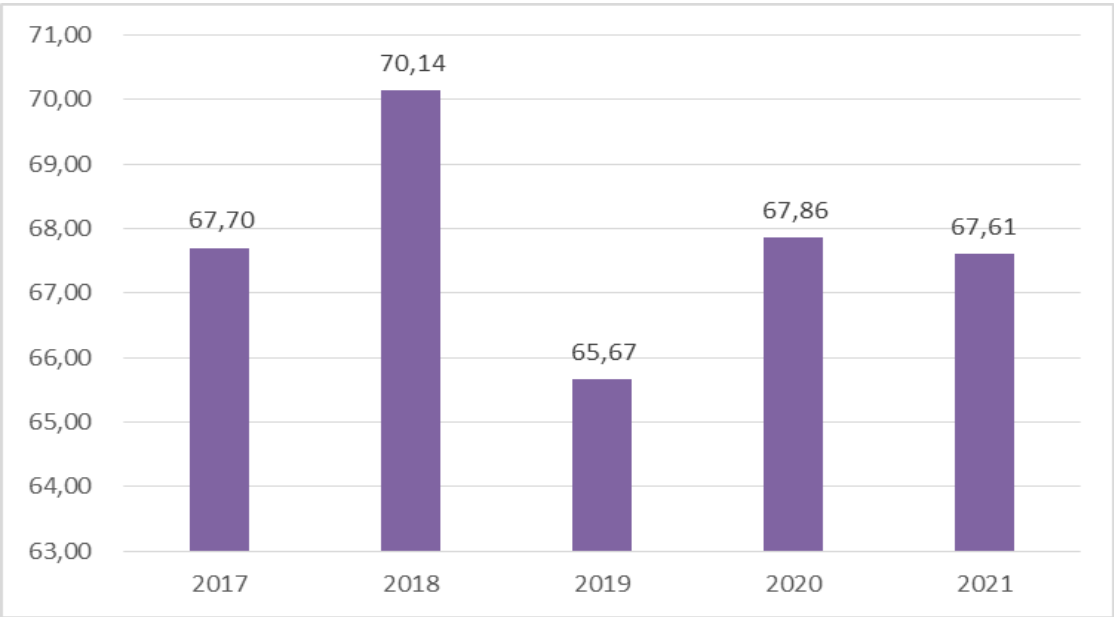
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

6) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Angkatan kerja perempuan di Provinsi Bali selama tiga 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 sebesar 70,56% menurun menjadi 67,7% kemudian pada tahun 2018

meningkat menjadi 70,14% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 65,86%. Realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari data jumlah angkatan kerja ini dapat diindikasikan masih adanya kesenjangan gender dimana angkatan kerja perempuan di Provinsi Bali jumlahnya masih di bawah laki-laki. Angkatan kerja perempuan ini bekerja di berbagai sektor pembangunan seperti sebagai PNS, pegawai swasta, perdagangan dan lain-lain.

Gambar 2.99 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinsos P3A Provinsi Bali, 2022

7) Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk dengan usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap sekolah karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standard di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standard tersebut. Rasio APM SD di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 0,99 pada tahun 2017 menjadi 1 pada tahun 2018 dan 2019 kemudian turun kembali di tahun 2020 menjadi 0,99 dan kembali naik menjadi 1 di tahun 2021. Rasio APM perempuan juga cenderung menurun dari 96,56 pada tahun 2016

menjadi 95,52 pada tahun 2019. Namun, rasio APM perempuan selama kurun waktu 2017-2019 masih di bawah rasio APM laki-laki. APM laki-laki cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 yaitu dari 95,66 ke 97,64.

Tabel 2.24 Rasio APM Laki-Laki dan Perempuan di SD Tahun 2017-2021

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
APM Laki-Laki	95,66	96,60	97,04	96,71	97,38
APM Perempuan	96,56	95,75	96,52	96,98	97,01
Rasio APM Laki-Laki/Perempuan	0,99	1	1	0,99	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

8) Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Rasio APM SMP adalah penduduk usia 12–14 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 12–14 tahun. Pada tahun 2017 rasio APM laki-lai dibandingkan dengan APM perempuan adalah sebesar 1,03 menurun pada tahun 2019 menjadi 0,97 kemudian kembali naik di tahun 2021 menjadi 1. Ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun mulai dari tahun 2017-2019 terjadi peningkatan angka partisipasi murni untuk perempuan di Provinsi Bali selama kurun waktu tersebut.

Tabel 2.25 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Tahun 2017-2021

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
APM Laki-Laki	86,55	87,21	85,85	86,06	87,21
APM Perempuan	83,99	84,65	87,66	88,52	86,99
Rasio APM Laki-Laki/Perempuan	1,03	1,03	0,97	0,97	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

9) Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

APM SMA adalah penduduk usia 15 – 17 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMA dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 – 17 tahun. Pada tahun 2017 rata-rata APM tingkat SMA/ sederajat sebesar 72,39% selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 73 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 72,93. Rasio APM laki-laki dibandingkan dengan APM perempuan adalah sebesar 1,02 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1,06. Angka ini sekaligus menunjukkan bahwa APM laki-laki masih lebih besar dibandingkan APM perempuan di kisaran tahun 2017-2019 untuk SMA di Provinsi Bali. Namun di tahun 2021 terjadi pergeseran, dengan rata-rata APM yaitu 74,85 dengan rasio APM laki-laki terhadap perempuan turun ke angka 0,97, paling rendah jika dilihat dari rentang waktu 2017-2021.

Tabel 2.26 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA Tahun 2017-2021

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
APM Laki-Laki	74,44	72,38	73,55	74,18	74,01
APM Perempuan	70,34	73,61	72,30	72,36	75,69
Rasio APM Laki-Laki/Perempuan	1,06	0,98	1,02	1,02	0,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

10) Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia, karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia. Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan baik dalam indek pembangunan manusia maupun indek pembangunan gender salah satunya adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun keatas, yang mampu membaca dan menulis. Dapat diartikan sebagai kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan, tertulis yang menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai

media. Hal ini dapat digunakan untuk melihat potensi intelektual masyarakat, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu daerah.

Dari tren angka melek huruf dapat dilihat bahwa angka melek huruf perempuan sedikit lebih cepat dibandingkan angka melek huruf laki-laki yang meningkat tipis. Tercatat pada tahun 2016 terlihat bahwa angka melek huruf Provinsi Bali sudah mencapai level diatas 90%, dimana 96,37% penduduk laki-laki dan 89,23% untuk perempuan, dengan kata lain pada tahun 2016 sebanyak 3,63% penduduk laki-laki dengan 10,77% penduduk perempuan berumur 15 tahun keatas yang masih buta huruf. Hal ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam hal baca dan tulis di Provinsi Bali antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama pada keluarga miskin yang jumlahnya masih banyak di Provinsi Bali.

Tabel 2.27 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Melek Huruf Laki-Laki	89,40%	96,49%	97,38%	96,99%	97,39%
Angka Melek Huruf Perempuan	96,40%	89,48%	91,66%	92,59%	92,59%
Rasio APM Laki-Laki/Perempuan	93,00%	107%	106,2%	104,75%	105,18%

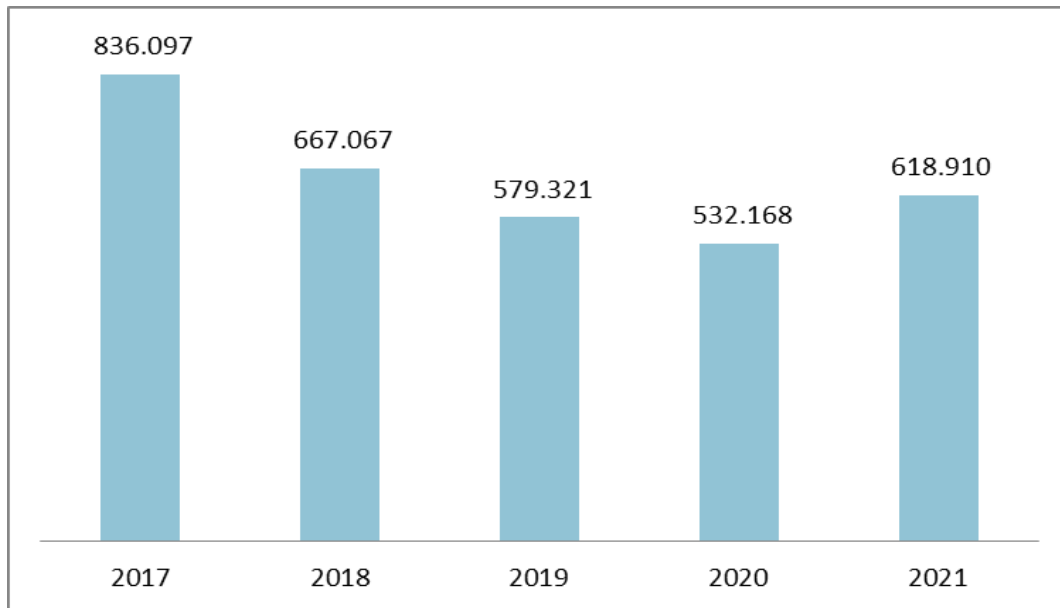
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Realisasi ketersediaan beras selama kurun waktu 2017 sampai 2021, berturut-turut yaitu 836.097ton, 667.067ton, 579.321ton 532.168 ton 618.910 tahun 2021. Realisasi ketersediaan tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.100 Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali
Tahun 2017-2021



Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

2) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Ketersediaan energi mengalami peningkatan dari tahun 2017, dimana ketersediaan energi sebesar 2.591 kkal/kap/hari pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 2.646 kkal/kap/hari pada tahun 2018. Realisasi ini sudah melebihi standar kebutuhan energi nasional (WNPG) yaitu sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Dari total ketersediaan energi lebih didominasi oleh pangan nabati sebesar 2.108 kkal/kap/hari atau 79,70%, sedangkan pangan hewani hanya sebesar 537 kkal/kap/hari atau sebesar 20,30%. Begitu juga ketersediaan protein untuk Bali sudah memenuhi angka kecukupan protein. Ketersediaan protein mengalami peningkatan, dimana tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 64.31 grkal/kap/hari dan selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 63.26 grkal/kap/hari. Walaupun terjadi penurunan ketersediaan protein sudah mencukupi kebutuhan.

Tabel 2.28 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita
Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Energi (kkal/kap/hari)	2.591	2.646	2.647	2.650	2.654
Protein (grkal/kap/hari)	60.00	63.00	63.51	64.31	63.26

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Kegiatan pengawasan pangan, penataan kelembagaan dan penyampaian informasi keamanan pangan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dari pusat, provinsi dan Kabupaten telah memberikan hasil yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan keamanan pangan yang aman dikonsumsi bagi masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tercatat sebesar 80% dan naik di tahun 2021 sebanyak 85%. Namun dengan adanya peningkatan keamanan pangan bukan berarti tugas dinas Ketahanan Pangan sudah berakhir, karena masih ada beberapa pangan yang masih tercemar residu baik cemaran pestisida, formalin maupun cemaran oleh mikroorganisme beredar dipasaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Tabel 2.29 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Provinsi
Bali Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	80%	80%	80%	85%

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

D. Pertanahan

Urusan pertanahan di Provinsi Bali dilakukan bersama-sama dengan Kantor Wilayah ATR/BPN sebagai instansi vertikal Kementerian ATR/BPN di Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali khususnya Bidang Aset dan OPD lain yang membutuhkan tanah dalam pelaksanaan urusannya. Urusan pertanahan yang dilakukan

hingga saat ini meliputi : pembebasan lahan yang dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dengan OPD/Instansi Vertikal Provinsi Bali yang membutuhkan tanah pada proyek/pembangunan lintas kabupaten/kota serta Penatagunaan aset tanah Provinsi Bali dengan BPKAD Provinsi Bali melalui pendataan aset Provinsi Bali. Pendataan aset tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung program pemerintah daerah yang berkaitan dengan penggunaan tanah seperti pengadaan tanah untuk rencana pembangunan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umum dan pelayanan publik serta relokasi rumah akibat proyek pemerintah.

Pada Tahun 2017 jumlah tersebut menurun sebesar 74 bidang yang disebabkan adanya dua kali pencatatan pada buku inventaris tanah. Pada tahun 2018 tanah aset pemerintah Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 428 bidang karena perubahan aturan terkait kewenangan SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi. Setelah dilakukan pendataan dan pemetaan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 tanah Pemprov Bali yang sudah bersertifikat semakin meningkat karena hal tersebut merupakan salah satu prioritas dalam rangka pengamanan BMD berupa tanah milik Pemerintah Provinsi sebagaimana telah menjadi target MCP Korsupgah KPK dengan melakukan kerjasama dengan BPN Kabupaten/Kota.

Tabel 2.30 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Tercatat Pada Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Badung	1.041	1.111	1.147	1.142	1.146
2	Bangli	205	206	209	215	233
3	Buleleng	181	250	252	340	357
4	Denpasar	398	460	469	454	445
5	Gianyar	435	438	436	436	462
6	Jembrana	226	232	237	232	231
7	Karangasem	578	585	622	629	631
8	Klungkung	963	1.063	1.069	1.068	1.079

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
9	Tabanan	490	598	617	618	628
	Luar Bali	10	11	9	11	5

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.31 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Yang Sudah Bersertifikat

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Badung	1.023	1.095	1.121	1.117	1.125
2	Bangli	163	164	168	177	226
3	Buleleng	143	213	217	309	340
4	Denpasar	337	396	410	409	410
5	Gianyar	401	404	408	412	430
6	Jembrana	209	215	219	216	225
7	Karangasem	544	549	583	586	596
8	Klungkung	945	1.047	1.047	1.043	1.061
9	Tabanan	451	560	566	568	599
	Luar Bali	9	10	9	9	4

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.32 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Yang Belum Bersertifikat

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Badung	18	16	24	25	21
2	Bangli	42	42	41	38	7
3	Buleleng	38	37	38	31	17
4	Denpasar	61	64	56	45	35
5	Gianyar	34	34	29	24	32
6	Jembrana	17	17	17	16	6
7	Karangasem	34	36	41	43	35
8	Klungkung	18	16	22	25	18
9	Tabanan	39	38	50	50	29
	Luar Bali	1	1	1	2	1

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

E. Lingkungan Hidup

1) Dokumen RPPLH Provinsi

Pada tahun 2017 telah tersedia Peraturan Daerah terkait Perlindungan Pengelolaan Hidup (PPLH) Provinsi Bali yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017. Lebih lanjut pada tahun 2021 sudah disusun kembali Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tersebut. Pada tahun 2022 dilakukan pemutakhiran Dokumen RPPLH Provinsi Bali dan sedang dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan dan pertimbangan dalam revisi dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

2) Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Provinsi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Bali telah diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang termuat dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 sebagaimana uraian tabel Analisis Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD.

Rencana Pembangunan Provinsi Bali yang telah berjalan diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009.

3) Dokumen KLHS Provinsi

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah tersusun pada Tahun 2018 yaitu KLHS Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Bedugul-Pancasari, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, KLHS RTR Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan Kajian Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sedangkan pada tahun 2019 ada 1 dokumen KLHS yang disusun yaitu KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Provinsi).

Tahun 2021 telah disusun Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023, KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K).

Tabel 2.33 Ketersediaan Dokumen KLHS di Provinsi Bali

No	Jenis KLHS	2017	2018	2019	2020	2021
1	KLHS RTRW	KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali	KLHS Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Bedugul-Pancasari	KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Provinsi)	-	-
2	KLHS RPJMD	KLHS Revisi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018	KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023	-	Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023	-
3	KLHS RTR	KLHS Kawasan Sepanjang Arteri Primer Tohpati-Dawan-Kusamba-Angantelu-Padang Bali.	KLHS RTR Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	-	KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K)	-

No	Jenis KLHS	2017	2018	2019	2020	2021
4	Kajian	-	Kajian Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	-	-	Pemutakhiran dan finaslisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

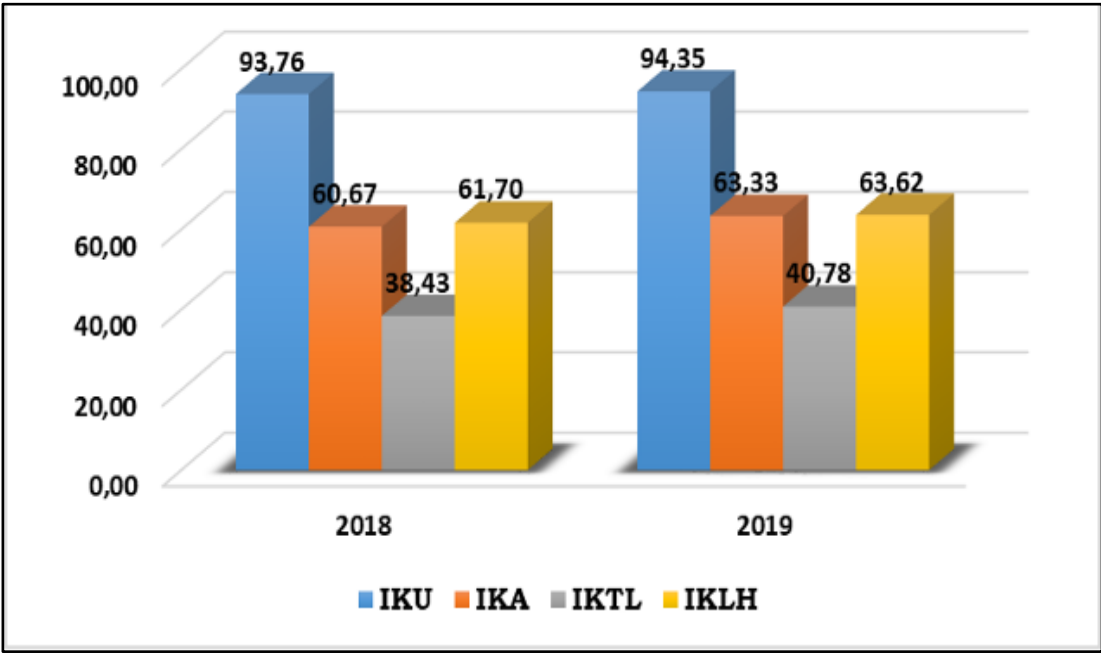
Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

4) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi KLHS tersebut telah digunakan untuk Kebijakan Rencana Program tingkat daerah Provinsi Bali. Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk KRPD.

5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. IKLH juga digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Gambar 2.101 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019



Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

IKLH Tahun 2019 menghitung nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Bali Tahun 2019 menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 63,62, hal ini dapat dilihat dari indeks kualitas air sebesar 63,33, indeks kualitas udara sebesar 94,35, dan tingkat tutupan lahan sebesar 40,79.

Berdasarkan hasil Pertemuan Tindak Lanjut Rapat Kerja Teknis (Rakernis) penetapan Target IKLH Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024, tanggal 21 April 2021, maka disampaikan proyeksi target IKLH Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024. Nilai indeks tersebut menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Perubahan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan memperhitungkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP). Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat

(NO₃-N), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2,5}. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai ortofosfat).

Gambar 2.102 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2023



Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2021 yaitu 70,70 mengalami penurunan dibanding dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2020 yaitu 71,98. Pada Tahun 2020 terdapat konversi perhitungan IKLH yang memperhitungkan capaian Indeks Kualitas Air Laut.

6) Bauran Energi Terbarukan

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi

terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi Nasional. Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

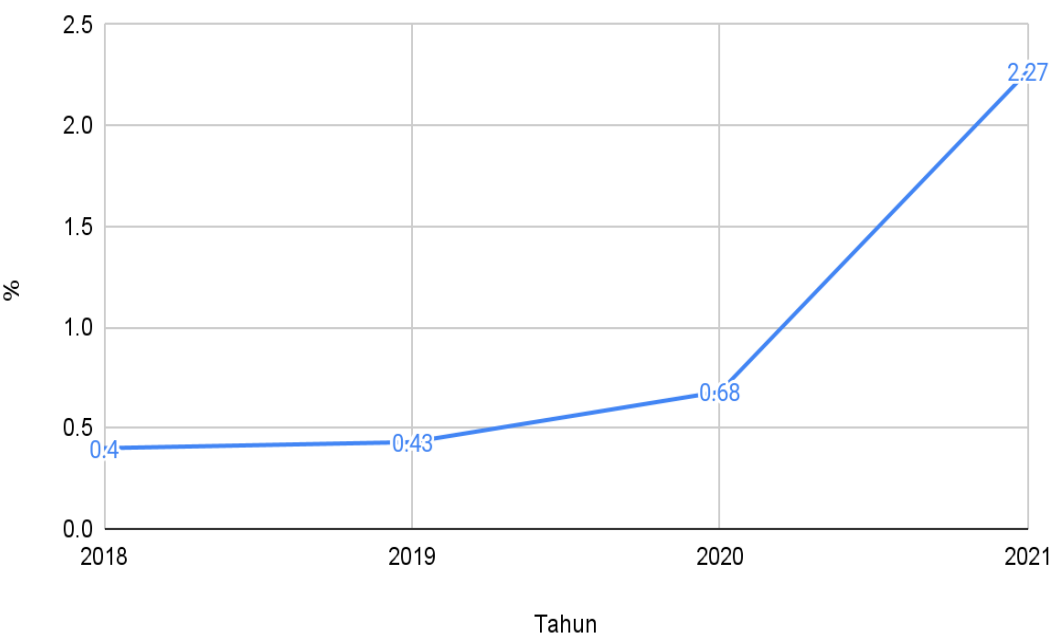
Kondisi energi pada tahun 2018, bahwa kapasitas pembangkit listrik terpasang total sebesar 1.259 MW dengan rincian: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Celukan Bawang berbahan bakar batubara sebesar 380 MW, Kabel Laut Jawa Bali sebesar 340 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pesanggaran sebesar 200 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pesanggaran sebesar 125 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Gilimanuk sebesar 130 MW dan Pemaron sebesar 80 MW serta Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan sebesar $\pm 4,0$ MW yaitu dari Tenaga Air sebesar 1,4 MW dan Tenaga Surya sebesar 2,6 MW. Beban puncak sebesar 863,29 MW sehingga cadangan saat ini ± 30 % masih termasuk aman, dengan catatan semua pembangkit beroperasi dengan baik dan lancar.

Sesuai dengan rancangan dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali serta untuk mendukung program dan tujuan Nasional untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, kondisi potensi dan pengembangan serta pemanfaatan energi bersih dan terbarukan menjadi sangat krusial, ditingkatkan penggunaan energi bersih dan terbarukan tidak hanya pada pembangkitan termasuk juga pemanfaatan langsung pada kegiatan sehari-hari, sehingga pengurangan penggunaan energi fosil dan peningkatan energi terbarukan memberikan dampak untuk mengurangi gas rumah kaca.

Bauran energi terbarukan adalah persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final. Energi final adalah energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas

bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bauran energi baru terbarukan (EBT) Provinsi Bali pada tahun 2018 adalah sebesar 0,40%, tahun 2019 sebesar 0,43%, tahun 2020 sebesar 0,68%, dan pada tahun 2021 sebesar 2,27%. Untuk mendukung upaya energi yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sumber daya energi yang ada di daerah bersangkutan, sehingga dapat membantu efisiensi biaya penyaluran energinya. Keandalan dan pemenuhan kelistrikan di Bali disediakan oleh PT. PLN (Persero) UID Bali, sedangkan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi Energi Bersih setempat untuk dimanfaatkan baik secara langsung maupun disambungkan ke dalam sistem ketenagalistrikan eksisting, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca serta pemberdayaan potensi setempat dengan optimal, dengan harapan bauran energi terbarukan di Bali naik sebesar 11,15 % pada tahun 2025.

Gambar 2.103 Bauran Energi Terbarukan Tahun 2018-2021



Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

7) Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pembangunan Rendah Karbon merupakan Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau. PPRK mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, disisi lain paradigma PRK mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Terdapat lima kebijakan utama dalam pembangunan rendah karbon yakni, terkait energi terbarukan, perlindungan hutan dan restorasi gambut, pengelolaan sampah industri dan sampah rumah tangga, peningkatan produktivitas pertanian, serta perbaikan kelembagaan maupun tata kelola. Kategori sumber emisi/serapan GRK dalam perhitungan PRK yaitu pertanian, kehutanan, penggunaan lahan lain; energy; limbah; ekosistem pesisir dan kelautan.

Tabel 2.34 Kondisi Emisi GRK Provinsi Bali Tahun 2018-2021
(Ton CO2e)

NO	KATEGORI	2018	2019	2020	2021
1	ENERGI	8.898	9.979	7.539	6.837
2	PERTANIAN	1.810	1.661	1.612	1.744
3	KEHUTANAN	-718	1.359	-1.127	0
4	LIMBAH	609	271	325	318
TOTAL		10599	13270	8349	8899

Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

Berdasarkan perhitungan IGRK menunjukkan bahwa besaran emisi sebelum Covid (2020) ada kecenderungan emisi GRK terus meningkat dan mengalami penurunan tajam pada saat puncak pandemi Covid-19 mencapai puncaknya pada Tahun 2020. Hal ini karena pada saat pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kinerja perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata dan ada berbagai pembatasan kegiatan keluar rumah sehingga menjadikan kontribusi

emisi dari sub sektor transportasi juga mengalami penurunan. Sektor energi tetap menyumbang emisi terbesar, dalam kisaran 80 % kemudian disusul oleh sektor pertanian, sektor limbah dan sektor kehutanan.

- 8) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan / Izin Lingkungan, Persetujuan Teknis / Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pembinaan dan pengawasan ketaatan Persetujuan Lingkungan/Izin Lingkungan, Persetujuan Teknis/Izin PPLH dan PUU LH Tahun 2018 dilakukan terhadap 154 perusahaan, Tahun 2019 pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap 173 perusahaan, Tahun 2020 pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap 115 perusahaan secara tidak langsung, karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga pengawasan langsung tidak dapat dilaksanakan. Tahun 2021 pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap 145 perusahaan dan Tahun 2022 telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 178 perusahaan.

- 9) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Lingkungan Hidup, dan Polisi Kehutanan di Provinsi

Pada Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup terdapat 1 (satu) orang PPLHD dan 3 (tiga) Orang PPNS Bidang Lingkungan Hidup, serta 31 (tiga puluh satu) Polisi Kehutanan. Hal ini belum optimal disebabkan oleh kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), PPNS dan Polisi Kehutanan. Solusi yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan kinerja ASN Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pemerhati lingkungan dalam melakukan pengawasan, pemberian informasi dan pengaduan terhadap para pelaku yang terindikasi membuang limbah/ sampah ke lingkungan.

10) Fasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Fasilitasi untuk pendampingan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dilakukan terhadap Desa Adat di Provinsi Bali yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

11) Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Lokasi Usaha Dan Dampak Lintas Kabupaten/Kota yang Ditangani

Pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang telah teregistrasi Tahun 2018 sebanyak 12 kasus, Tahun 2019 sebanyak 10 kasus, Tahun 2020 sebanyak 1 kasus dan Tahun 2021 sebanyak 2 kasus yang teregistrasi.

12) Pengelolaan Sampah

Salah satu upaya dalam mendorong penanganan sampah di Provinsi Bali yaitu dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penanganan dan pengurangan sampah di Provinsi Bali telah diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Tabel 2.35 Jumlah Timbulan Sampah per Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	KEC	DESA	KEL	DESA ADAT	TOTAL DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SAMPAH TON PER HARI
TPS3R/TPST							
1	DENPASAR	4	27	16	35	43	827
2	BADUNG	6	46	16	122	62	820
3	GIANYAR	7	64	6	273	70	468

NO	KAB/KOTA	KEC	DESA	KEL	DESA ADAT	TOTAL DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SAMPAH TON PER HARI
4	TABANAN	10	133	0	349	133	435
5	KLUNGKUNG	4	53	6	122	59	200
6	KARANGASEM	8	75	3	190	78	457
7	BULELENG	9	129	19	170	148	617
8	JEMBRANA	5	41	10	64	51	228
9	BANGLI	4	68	4	168	72	235
JUMLAH		57	636	80	1.493	716	4.281

Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

Timbulan sampah yang dihasilkan terdiri atas sampah organik, plastik, kertas, logam, kaca dan lain-lain, dengan komposisi berikut.

Tabel 2.36 Komposisi Timbulan Sampah

Timbulan Sampah	Persentase	Jumlah Sampah Ton per Hari
Organik	60,3%	2.581,44
Plastik	19,7%	843,36
Kertas	11,0%	470,91
Logam	1,8%	77,06
Kaca	2,2%	94,18
Lain-lain	5,0%	214,05
Total	100,0%	4.281

Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

Pengurangan dan penanganan sampah diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan

Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, serta Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat. Pelaksanaan pengelolaan sampah didukung adanya TPS3R dan TPST di Kabupaten/Kota. Provinsi memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan TPST dan TPS3R di Kabupaten/Kota.

Tabel 2.37 Jumlah TPS3R/TPST di Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	DESA ADAT	TOTAL DESA/ KELURAHAN	KAB/KOTA YANG MEMILIKI TPS3R /TPST		JUMLAH FASILITAS
				TPS3R 2021	TPST	
1	DENPASAR	35	43	16	3	27
2	BADUNG	122	62	19	2	29
3	GIANYAR	273	70	34	-	34
4	TABANAN	349	133	43	-	43
5	KLUNGKUNG	122	59	30	1	31
6	KARANGASEM	190	78	16	-	16
7	BULELENG	170	148	43	-	43
8	JEMBRANA	64	51	10	1	13
9	BANGLI	168	72	4	-	10
JUMLAH		1.493	716	215	7	246

Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk yang ber-KTP per satuan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan penduduk untuk mengurus KTP semakin meningkat, dan didorong

oleh kebutuhan bahwa semua pelayanan publik mensyaratkan KTP elektronik. Untuk mempercepat perekaman KTP-el, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Bali telah melakukan pelayanan Jebol atau Jemput Bola ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah penduduk, dan lembaga-lembaga serta di tempat keramaian yang strategis. Untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan Jemput Bola.

Cakupan penerbitan KTP-el semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan penduduk untuk mengurus KTP semakin meningkat, dan didorong oleh kebutuhan bahwa semua pelayanan publik mensyaratkan KTP elektronik. Untuk meningkatkan penerbitan KTP-el, maka telah dilakukan perekaman KTP-el bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun melalui pelayanan Jebol atau Jemput Bola ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah penduduk dan lembaga-lembaga serta di tempat keramaian yang strategis. Hal ini dilakukan, agar tepat pada umur 17 tahun penduduk sudah dapat menerima KTP-el. Selain itu dukungan ketersediaan blanko KTP-el berpengaruh pada penerbitan KTP-el di kabupaten/kota. Untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan KTP-el.

Cakupan penduduk yang memiliki akta kelahiran semakin tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk untuk segera mengurus akta kelahiran semakin meningkat. Selain itu semakin banyak rumah sakit/klinik bersalin yang melakukan kerja sama dalam pemberian akta kelahiran sesegera mungkin bagi bayi yang lahir di rumah sakit/klinik bersalin. Pada saat ini pemberian akta kelahiran sudah mencakup pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) yang baru dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pengajuan akta kelahiran dan dokumen akta pencatatan sipil lainnya sudah dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) tanpa memberikan fisik persyaratan, cukup diunggah semua persyaratan. Selain itu akta kelahiran yang sudah jadi diberikan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada

penduduk berupa softcopy pdf untuk dicetak sendiri atau melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Persentase penerbitan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun semakin tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk untuk segera mengurus akta kelahiran semakin meningkat. Selain itu semakin banyak rumah sakit/klinik bersalin yang melakukan kerja sama dalam pemberian akta kelahiran sesegera mungkin bagi bayi yang lahir di rumah sakit. Pada saat ini pemberian akta kelahiran sudah mencakup pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) yang baru dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pengajuan akta kelahiran dan dokumen akta pencatatan sipil lainnya sudah dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) tanpa memberikan fisik persyaratan dan cukup diunggah semua persyaratan. Selain itu akta kelahiran yang sudah jadi diberikan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada penduduk berupa *softcopy* pdf untuk dicetak sendiri atau melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Rasio pasangan berakta nikah menggambarkan angka kepemilikan akta nikah/kawin yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan akta nikah dirasakan semakin penting untuk melindungi status perkawinannya, dan memudahkan dalam mengurus akta kelahiran bagi anggota keluarganya yang baru lahir. Untuk mengurus akta nikah bagi pasangan nikah yang sudah lama dan tidak mempunyai bukti dokumen pernikahan yang telah terjadi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan yang diketahui saksi-saksi pembuatan SPTJM tersebut. Dengan SPTJM tersebut penduduk yang sudah menikah sesuai agamanya masing-masing dapat dikeluarkan akta nikah/kawin bagi penduduk di tempat domisili pasangan. Mengurus akta nikah dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan)/ *online*.

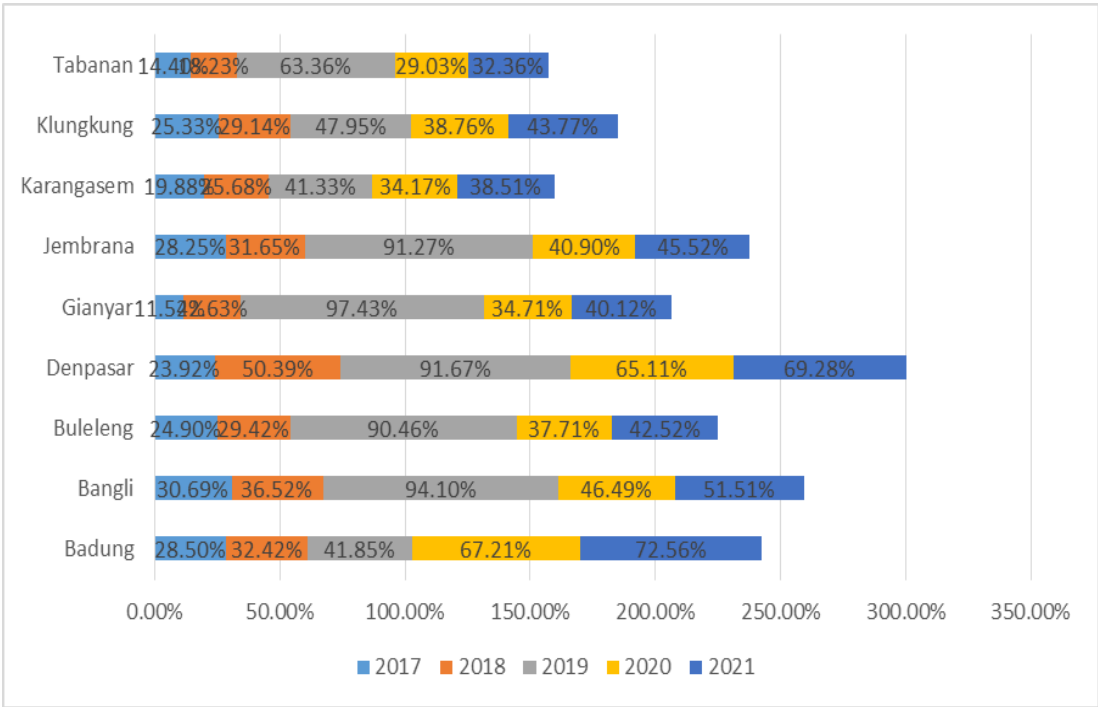
Tabel 2.38 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio/Persentase Penduduk Ber-KTP	0,84 (84,01%)	0,91 (90,43%)	0,95 (94,88%)	0,96 (95,71%)	0,98 (97,29%)
2	Persentase kepemilikan KTP-EL di Provinsi Bali	94,62 %	95,58 %	98,60 %	99,58 %	99,65 %
3	Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	33,85%	35,79%	40,42%	43,19%	46,12%
4	Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Provinsi Bali	65,15%	77,05%	86,65%	88,83%	91,76%
5	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Provinsi Bali	0,22 (22,35%)	0,31 (31,08%)	0,75 (74,97%)	0,44 (44,19%)	0,49 (48,80%)

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

Kepemilikan KTP-el di seluruh kabupaten/kota se-Bali setiap tahunnya meningkat. Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el di setiap kabupaten/kota segera dapat mencetak KTP-el. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan KTP-el telah didukung oleh kinerja perangkat keras dan perangkat lunak, serta ketersediaan blanko KTP-el yang cukup. Namun demikian perlu adanya peremajaan sarana prasarana berupa perangkat keras di seluruh kabupaten/kota yang sudah mulai uzur serta penambahan sarana prasarana pelayanan keliling yang memadai.

Gambar 2.104 Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi yang berakte kelahiran setiap tahun semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk untuk segera mengurus akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir semakin meningkat. Selain itu semakin banyak rumah sakit/klinik bersalin yang melakukan kerja sama dalam pemberian akta kelahiran dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sehingga rumah sakit dapat memberikan pelayanan lebih yaitu akta kelahiran dapat diurus oleh rumah sakit/klinik bersalin. Pada saat ini pemberian akta kelahiran sudah mencakup penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) yang baru dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel 2.39 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

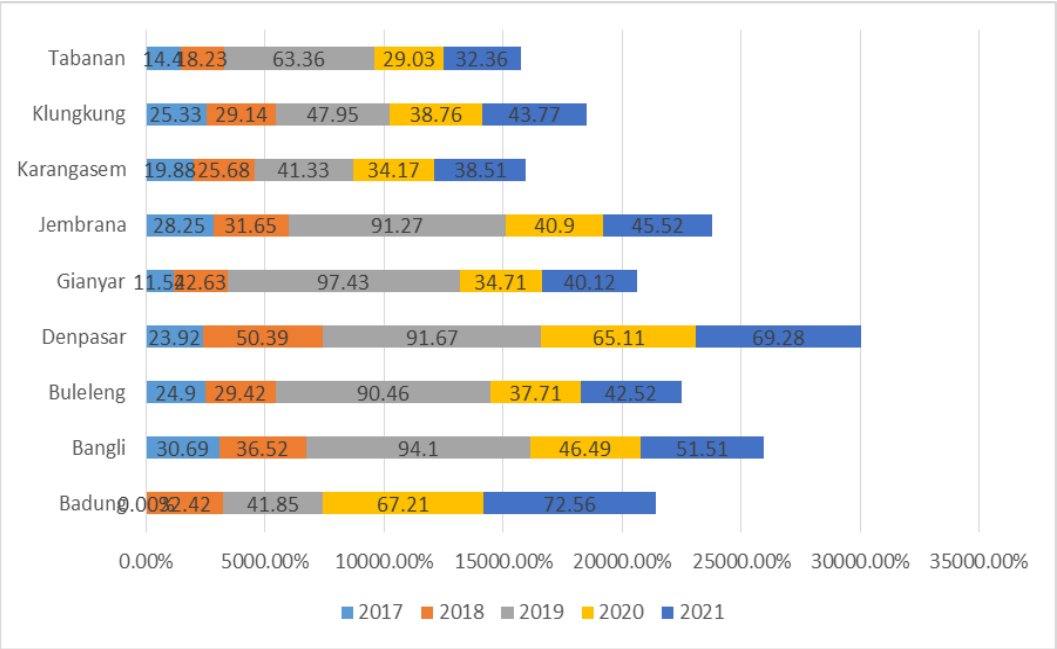
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Bayi Berakta	0,83 (82.56%)	0,92 (92.08%)	0,97 (97.67%)	0,98 (98.25%)	0,99 (98.79%)

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

3) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakta nikah menggambarkan angka kepemilikan akta nikah/kawin yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan akta nikah dirasakan semakin penting untuk melindungi status perkawinannya dan memudahkan dalam mengurus akta kelahiran bagi anggota keluarganya yang baru lahir. Untuk mengurus akta nikah bagi pasangan nikah yang sudah lama dan tidak mempunyai bukti dokumen pernikahan yang telah terjadi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan yang diketahui saksi-saksi pembuatan SPTJM tersebut. Dengan SPTJM tersebut penduduk yang sudah menikah sesuai agamanya masing-masing dapat dikeluarkan akta nikah/kawin bagi penduduk di tempat domisili pasangan. Mengurus akta nikah dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) / *online*.

Gambar 2.105 Rasio Pasangan Berakta Nikah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

4) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Pada saat seluruh kabupaten/kota se-Bali telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terdistribusi sehingga mampu mewujudkan database kependudukan skala Provinsi. Database yang dihasilkan telah dikonsolidasi dan

dibersihkan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dapat diolah menjadi Data Agregat tiap semester dan Data Profil Kependudukan Tingkat Provinsi setiap tahunnya. Database kependudukan ini sebagai hasil dari penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kegiatan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Bali. Mulai tahun 2022, akan menerapkan SIAK Terpusat sehingga pelayanan Administrasi Kependudukan akan semakin cepat dan jika ada perubahan pada elemen data kependudukan akan terupdate *real time*, sehingga data kependudukan yang ada di lembaga pengguna sama dengan data kependudukan yang ada di SIAK.

Tabel 2.40 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Database Kependudukan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

Pada saat ini seluruh kabupaten/kota telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terdistribusi yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil. Mulai tahun 2022 akan diterapkan SIAK Terpusat untuk seluruh kabupaten/kota. Pada saat ini Pelayanan Administrasi Kependudukan didukung oleh SIAK versi 7.3.4.1 yang dikembangkan terus oleh Ditjen Dukcapil. Dengan SIAK versi 7.3.4.1 pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota dapat mencetak dokumen dengan Tanda Tangan Elektronik, menggunakan kertas putih HVS 70 gr, perekaman dan pencetakan KTP-el luar domisili. Untuk meningkatkan kinerja SIAK perlu ada peremajaan sarana prasarana, seperti server SIAK, perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el, dan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat).

Tabel 2.41 Kabupaten/Kota Mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Provinsi Bali

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Badung	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4	Siak Versi 7.3.4.1
2	Bangli	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4	Siak Versi 7.3.4.1
3	Buleleng	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4	Siak Versi 7.3.4.1
4	Denpasar	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4	Siak Versi 7.3.4.1
5	Gianyar	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4	Siak Versi 7.3.4.1
6	Jembrana	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4	Siak Versi 7.3.4.1
7	Karangasem	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4	Siak Versi 7.3.4.1
8	Klungkung	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4	Siak Versi 7.3.4.1
9	Tabanan	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4	Siak Versi 7.3.4.1

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

5) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Seluruh kabupaten/kota telah menggunakan KTP berbasis NIK yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil dan akan dikembangkan KTP-el Digital. Penerapan KTP-el berbasis NIK berlaku seluruh Indonesia didukung oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berupa teknologi informatika SIAK, blanko KTP-el, Server dan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang memadai. Namun demikian perlu dilakukan peremajaan sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan KTP-el dan anggaran yang mencukupi untuk mengadakan ribbon dan film dan perlu perangkat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang memberikan kemudahan penduduk untuk mencetak sendiri dokumen kependudukan, serta penyediaan mobil pelayanan keliling untuk melakukan pelayanan Jemput Bola (Jebol).

Tabel 2.42 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
KTP Berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

6) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penduduk yang memiliki akta kelahiran semakin tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk untuk segera mengurus akta kelahiran semakin meningkat. Selain itu semakin banyak rumah sakit/klinik bersalin yang melakukan kerja sama dalam pemberian akta kelahiran sesegera mungkin bagi bayi yang lahir di rumah sakit. Pada saat ini pemberian akta kelahiran sudah mencakup pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) yang baru dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pengajuan akta kelahiran dan dokumen akta pencatatan sipil lainnya sudah dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) tanpa memberikan fisik persyaratan, cukup diunggah semua persyaratan. Selain itu akta kelahiran yang sudah jadi diberikan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada

penduduk berupa *softcopy* pdf untuk dicetak sendiri atau melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

Tabel 2.43 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Akte Kelahiran	33,85%	35,79%	40,42%	43,19%	46,12%

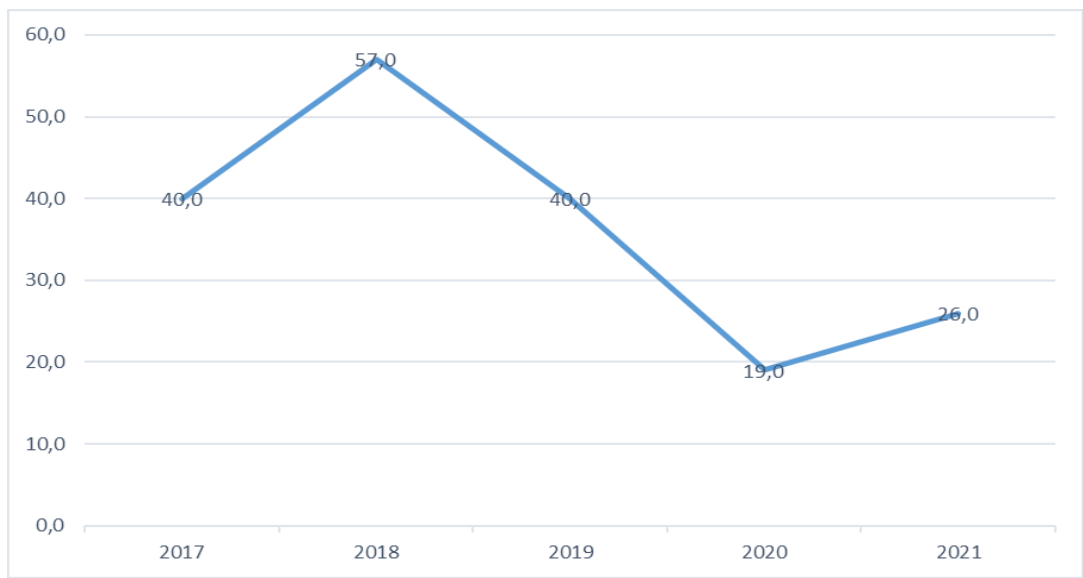
Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Terjadi peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali dari tahun 2017 ke tahun 2018 menjadi 57 kelompok, hal ini disebabkan karena meningkatnya dukungan anggaran tahun 2018 untuk kegiatan pembinaan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali menjadi 40 kelompok karena berkurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali menjadi 19 kelompok, hal ini disebabkan karena pada bulan Maret tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19 sehingga adanya rasionalisasi anggaran atau pengalihan anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kegiatan pembinaan di kabupaten lainnya tidak dapat dilaksanakan. Tahun 2021 memasuki tahapan pemulihan dampak Pandemi COVID-19 sehingga telah dapat diupayakan meningkatkannya sasaran dan realisasi jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi 26 kelompok.

Gambar 2.106 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

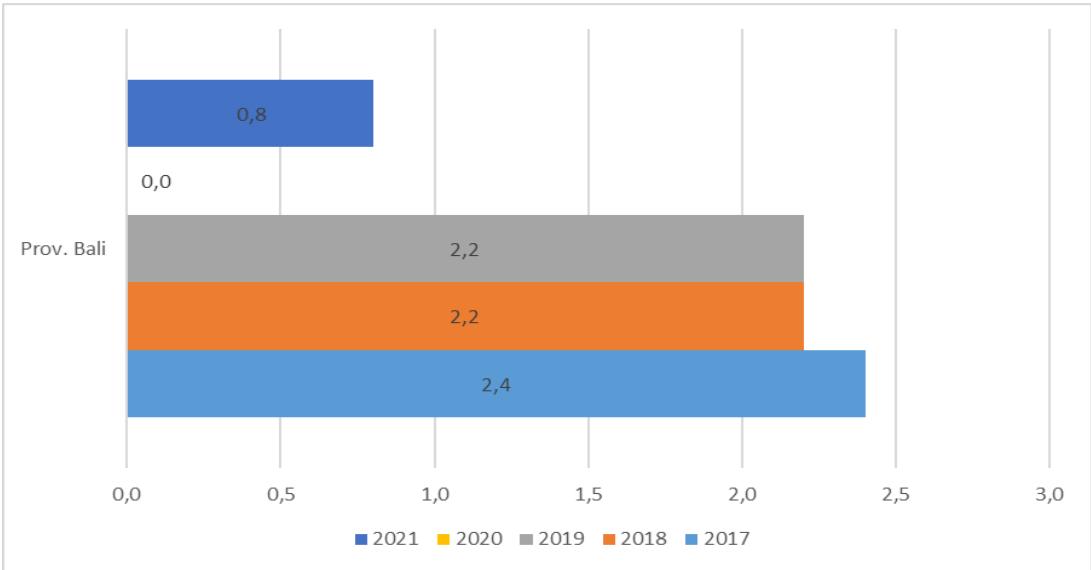


Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

2) Persentase LPM Berprestasi

Persentase LPM berprestasi di Provinsi Bali diukur dari banyaknya jumlah LPM desa dan LPM Kelurahan yang aktif dalam kegiatan lomba desa dan kelurahan, serta desa kelurahannya menjadi pemenang lomba desa lomba kelurahan Tingkat Provinsi Bali. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan persentase LPM berprestasi sebesar 0,2 % dibandingkan Tahun 2017. Penurunan persentase disebabkan karena pada Tahun 2018 Terjadi penurunan jumlah pemenang lomba kelurahan tingkat Provinsi Bali sebanyak 1 kelurahan menjadi 7 pemenang. Pada tahun 2019 persentase LPM berprestasi sama dengan Tahun 2018 karena tidak terjadi perubahan jumlah pemenang lomba desa dan kelurahan. Pada tahun 2020 tidak ada LPM berprestasi karena lomba desa dan kelurahan tidak diselenggarakan mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase LPM berprestasi sebesar 1,4 % dibandingkan tahun 2019, hal ini disebabkan karena terjadi penurunan jumlah pemenang lomba desa sebanyak 4 desa menjadi 3 menenang dan penurunan jumlah pemenang lomba kelurahan sebanyak 4 kelurahan menjadi 3 pemenang.

Gambar 2.107 Persentase LPM Berprestasi di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

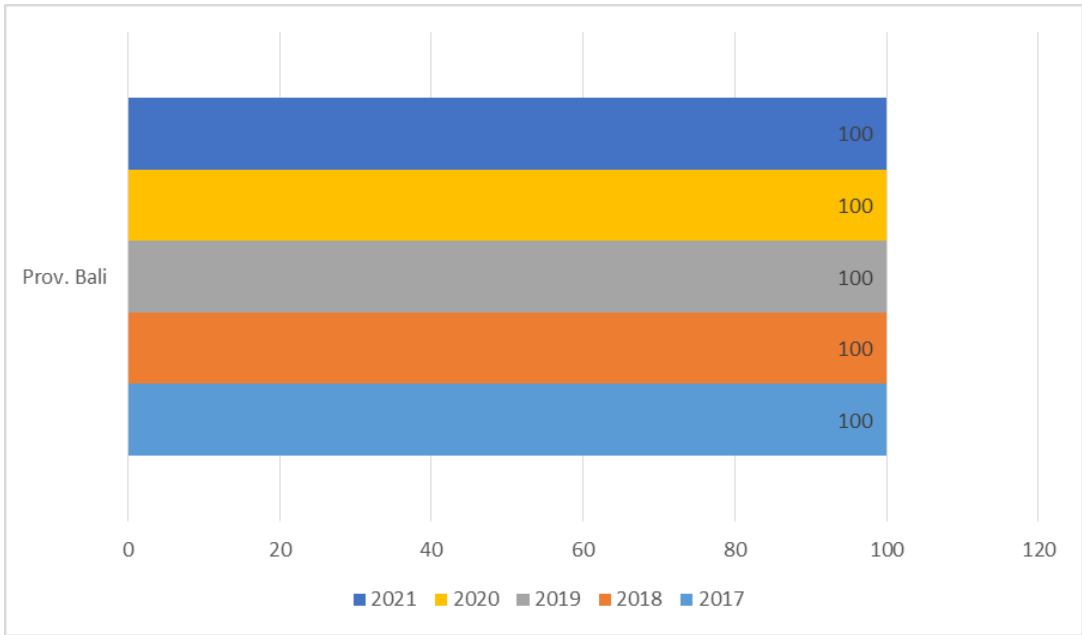


Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

3) Persentase PKK Aktif Desa/Kelurahan

Kelembagaan PKK secara terstruktur dari pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Lembaga PKK Desa/Kelurahan mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Gerakan PKK pada hakekatnya dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dengan sasaran para keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dengan melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK. Presentase PKK Aktif di Kabupaten/Kota dan dalam cakupan Provinsi Bali dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan data 100%, hal ini mencerminkan lembaga PKK pada jenjang Desa dan Kelurahan telah mampu mengimplementasikan 10 program pokok PKK dan Lembaga PKK telah mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan. Terlebih lagi pada Tahun 2021 Provinsi Bali telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Kegiatan PKK, dengan tujuan semakin meningkatkan fungsi dan peran PKK dalam melaksanakan 10 program Pokok PKK dan program-program PKK lainnya sampai jenjang Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Bali.

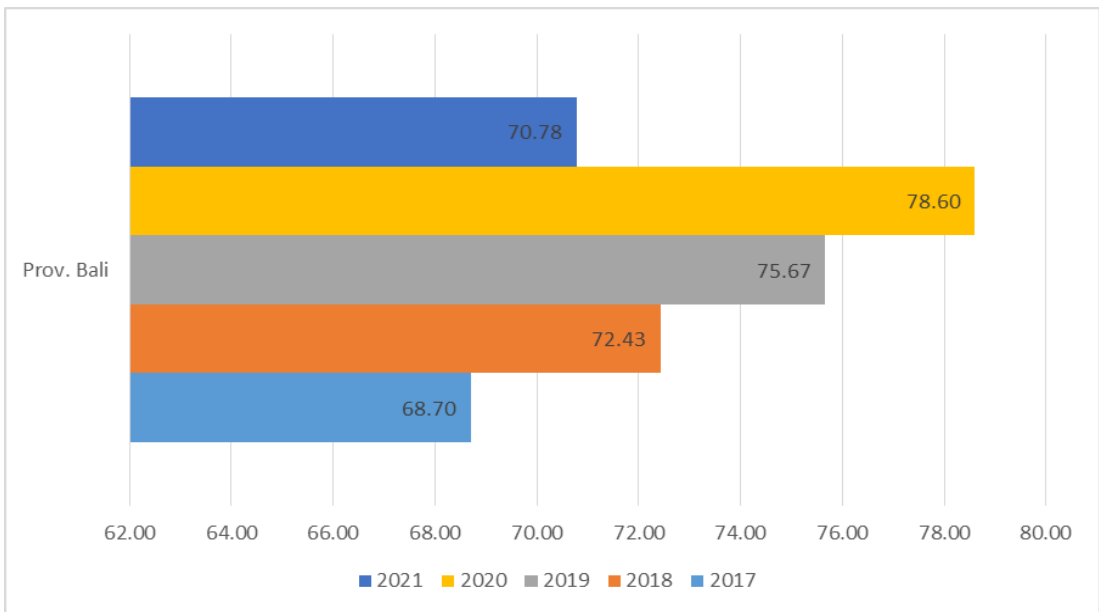
Gambar 2.108 Persentase PKK Aktif Desa/Kelurahan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

- 4) Persentase Posyandu Aktif
- Terjadinya Fluktuasi Data Posyandu Aktif dari Tahun 2020 ke 2021 dikarenakan adanya pandemi *covid 19* dan Fluktuasi terjadi karena tingkat kehadiran Balita ke Posyandu relatif kurang optimal dan tidak terdapat dukungan dana sehat dari masyarakat.

Gambar 2.109 Persentase Posyandu Aktif di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



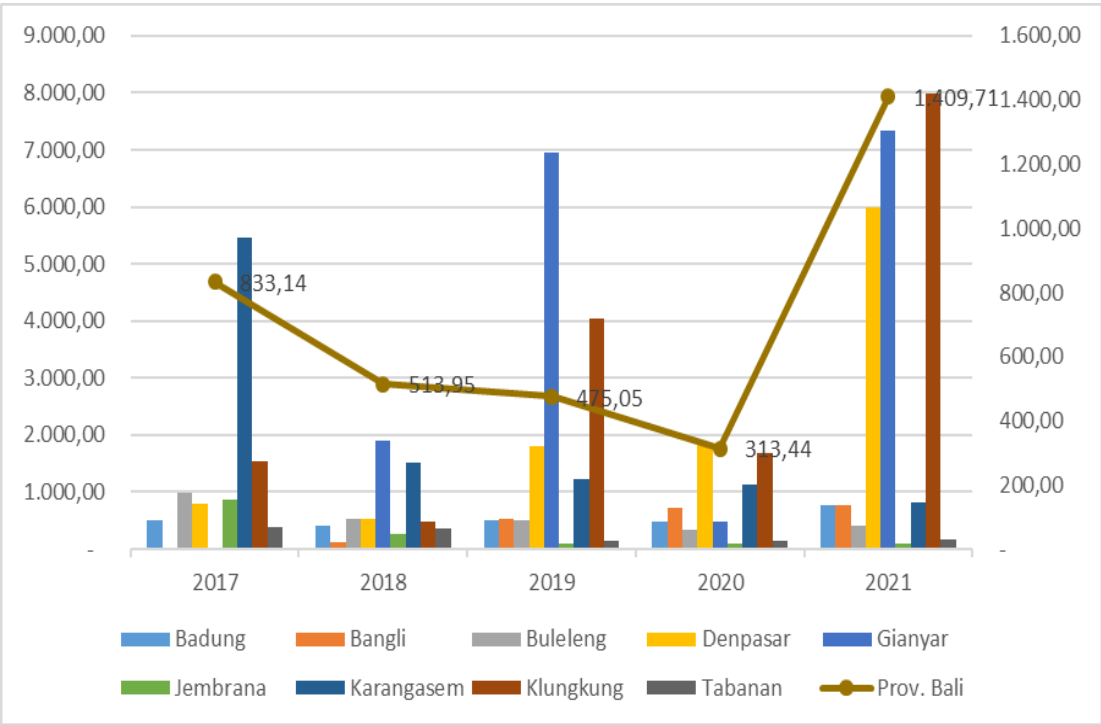
Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

Fokus pembinaan adalah pada upaya peningkatan di Strata I (Pratama) dan Strata II (Madya) untuk menuju Strata III (Purnama) dan Strata IV (Mandiri), sehingga Posyandu Model/Integrasi belum ada dibina.

5) Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Secara rata-rata terdapat penurunan persentase swadaya murni masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Bali dari tahun 2017 hingga 2020. Hal ini berarti semakin meningkatnya program-program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah kepada desa-desa di kabupaten/kota di Provinsi Bali setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase swadaya murni terhadap program pemberdayaan masyarakat secara signifikan. Terjadinya peningkatan yang sangat signifikan disebabkan karena situasi dan kondisi kegiatan swadaya masyarakat serta pencatatan program pemberdayaan masyarakat pada 2021 masih belum optimal karena situasi di desa-desa masih berfokus penanganan pandemi COVID-19.

Gambar 2.110 Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

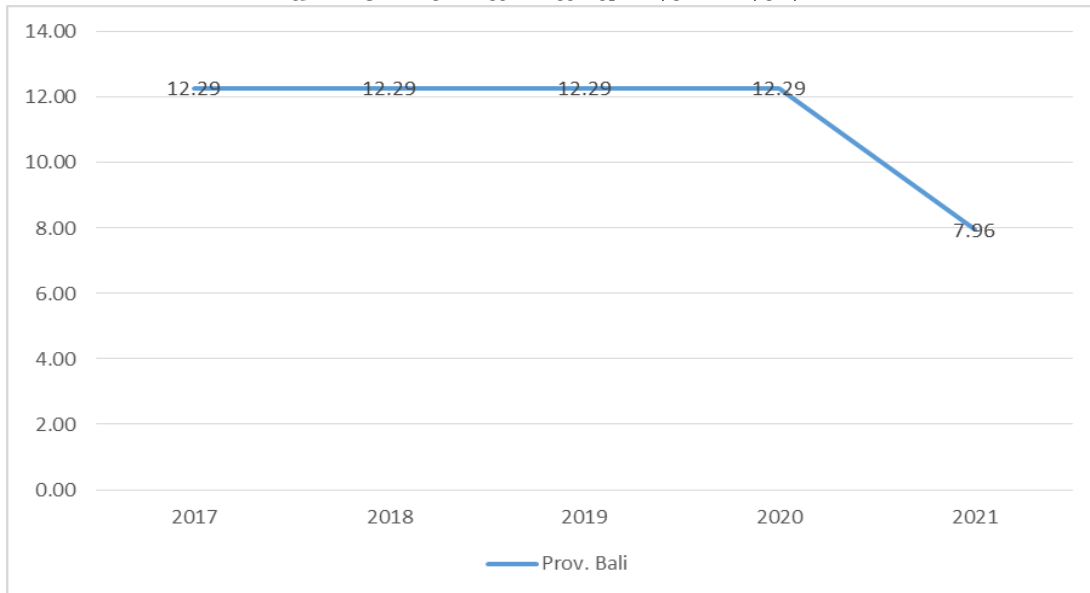


Sumber Data: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

6) Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah Dibina

Kelembagaan PKK secara terstruktur dari pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Lembaga PKK Desa/Kelurahan mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Gerakan PKK pada hakekatnya dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dengan sasaran para keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dengan melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK. Dalam kurun Tahun 2017 sampai dengan 2020 metode yang digunakan untuk membina kelompok PKK adalah melalui Lomba Kegiatan PKK (Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan, HKG dan Jambore) Tingkat Provinsi Bali. Pelaksanaan lomba selain bertujuan untuk mengevaluasi, juga sebagai bentuk penghargaan kepada Tim Penggerak PKK Desa yang telah berkomitmen dan menghasilkan inovasi - inovasi baru dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Provinsi Bali adalah Pembinaan kepada pemenang Lomba Kegiatan PKK Desa di sembilan Kabupaten/Kota, yaitu 9 jenis Lomba Kegiatan PKK dan 7 jenis Lomba Jambore Tingkat Provinsi Bali. Sedangkan pada tahun 2021 pembinaan dilakukan untuk mendorong implementasi 10 program pokok PKK oleh kelompok PKK. Terlebih pada Tahun 2021 Provinsi Bali telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Kegiatan PKK, dengan tujuan semakin meningkatkan fungsi dan peran PKK dalam melaksanakan 10 program Pokok PKK dan program-program PKK lainnya sampai jenjang Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Bali.

Gambar 2.111 Persentase PKK Desa/Kelurahan yang Dibina di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



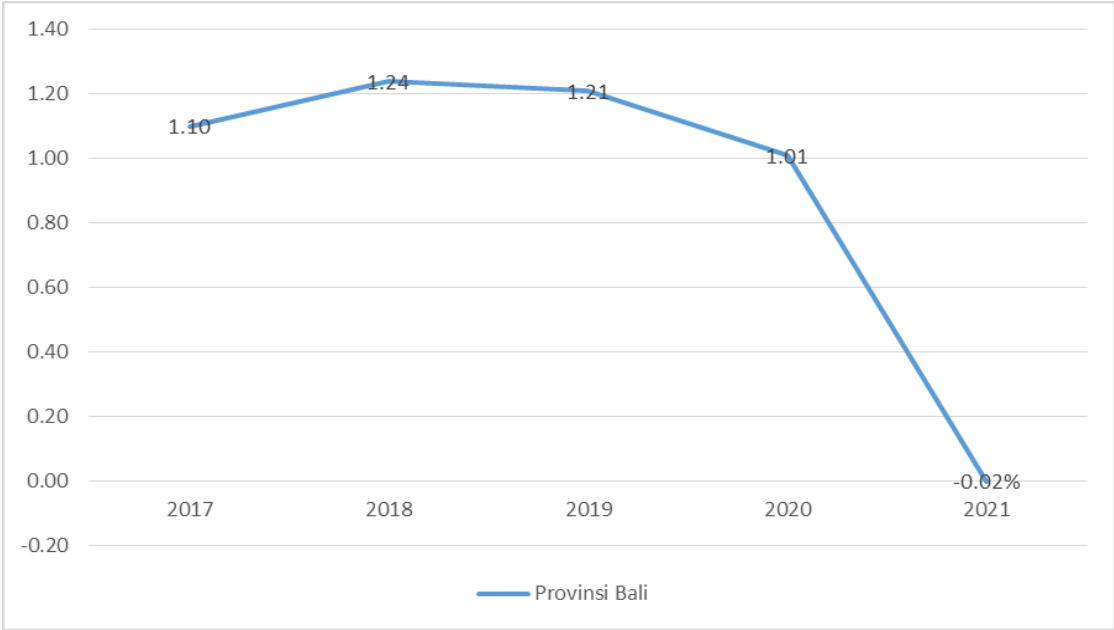
Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan, meskipun terjadi sedikit peningkatan maupun penurunan. LPP di Provinsi Bali tahun 2021 adalah -0,02% berdasarkan olahan data agregat DUKCAPIL Prov. Bali LPP di Provinsi Bali untuk kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan khususnya 2021 -0,02% ini diakibatkan banyaknya penduduk eksodus meninggalkan Bali sebagai akibat pandemi COVID-19.

Gambar 2.112 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



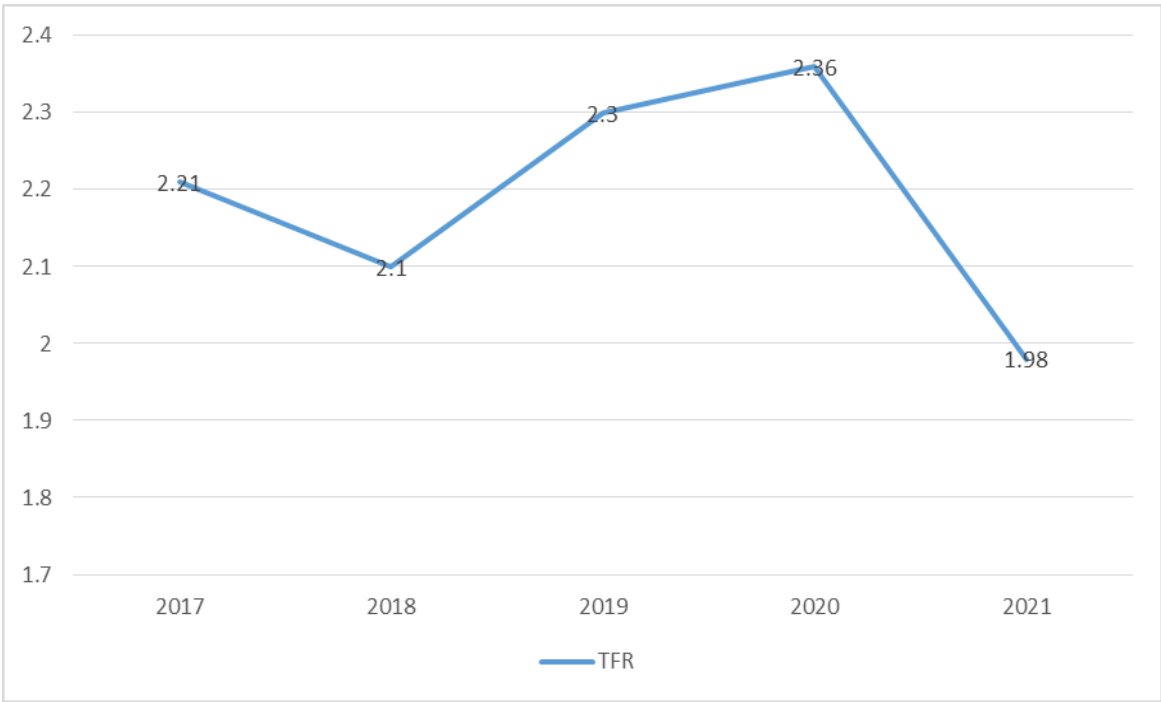
Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

2) *Total Fertility Rate (TFR)*

Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate (TFR)* adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR berfungsi sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Sumber data tahun 2017 berdasarkan LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Bali tahun 2017, Tahun 2018 berdasarkan LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Bali tahun 2018, tahun 2019 berdasarkan LAKIP BKKBN Tahun 2019 dan 2020 berdasarkan LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Bali tahun 2020, sedangkan tahun 2021 berdasarkan Capaian IKU Provinsi Bali Tahun 2021. TFR Provinsi Bali pada tahun 2021 sudah sangat baik dan sudah melampaui target yaitu 2,3%. Hal ini terjadi karena berhasilnya program KB sehingga terkendalnya jumlah kelahiran.

Gambar 2.113 *Total Fertility Rate (TFR)* di Provinsi Bali
Tahun 2017-2021

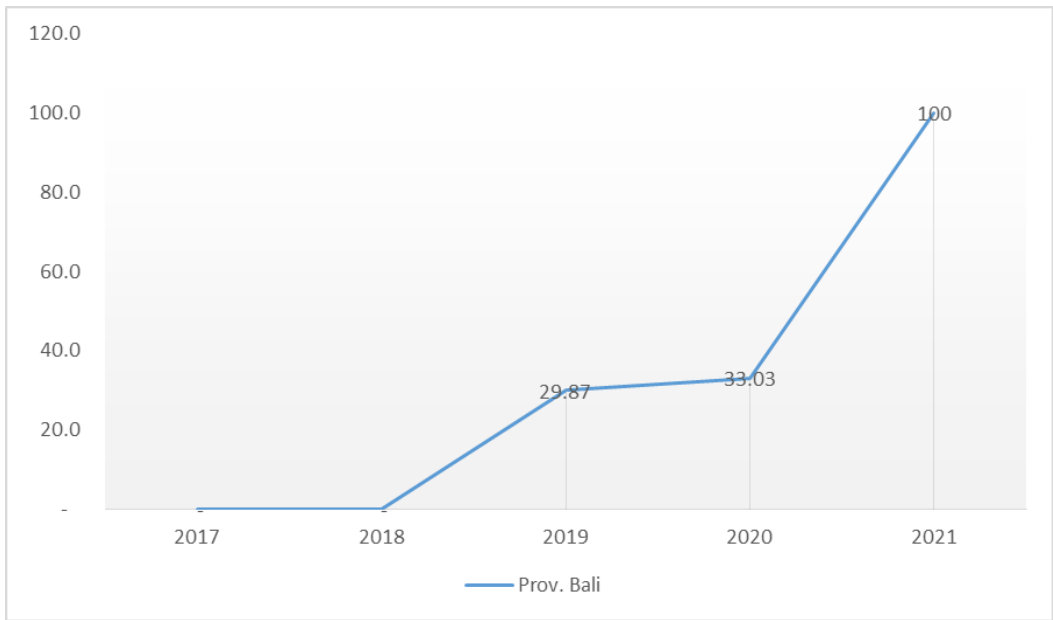


Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

3) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan terhadap persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB sebesar 3,16%. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB tahun 2021 berdasarkan data BKKBN adalah 100%.

Gambar 2.114 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Tahun 2017-2021

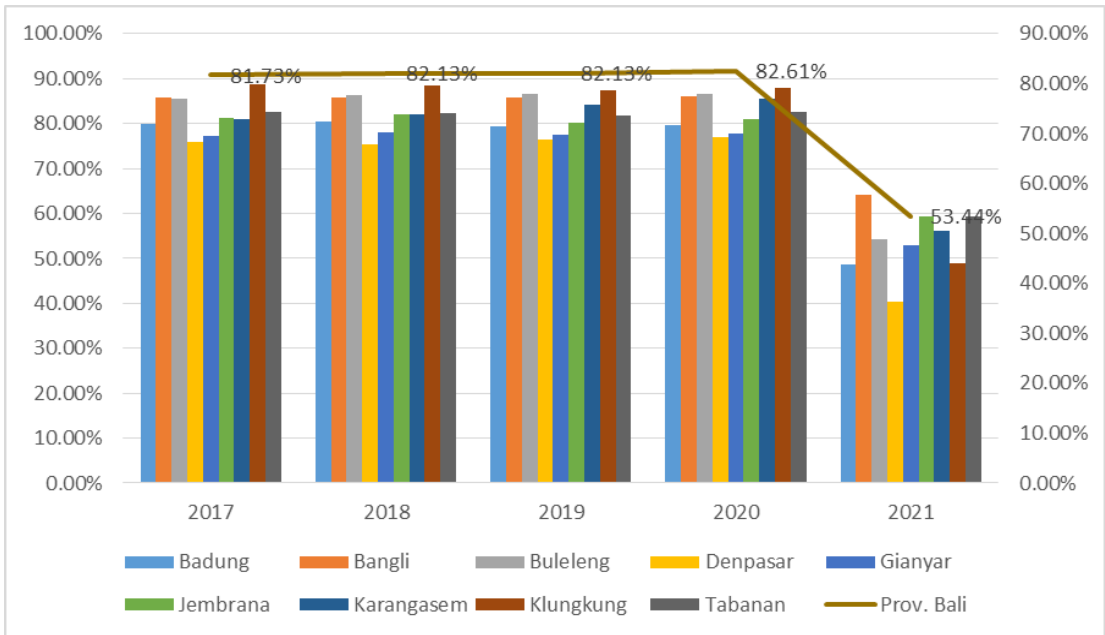


Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

4) Persentase KB Aktif di Provinsi Bali

Persentase KB Aktif di Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai dengan 2020 bervariasi. Dari tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sebesar 0.4%, dari tahun 2018 ke 2019 hasilnya tetap dan dari tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan sebesar 0.48%. Pada tahun 2021 Persentase KB Aktif berada di 53,44% berdasarkan Pendataan Keluarga 2021 (PK21).

Gambar 2.115 Persentase KB Aktif di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

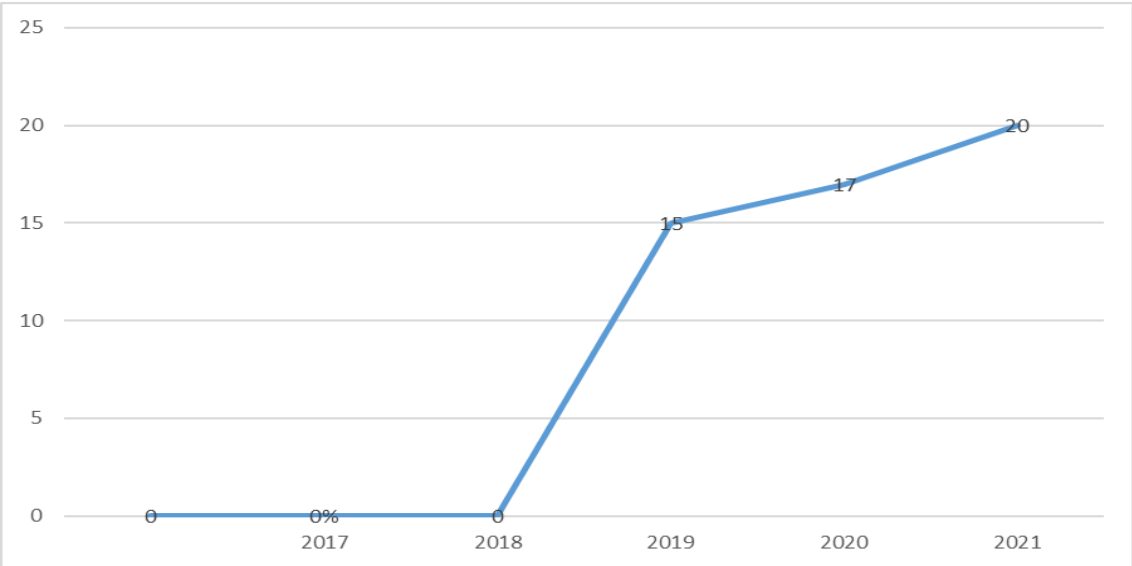


Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

5) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk selama kurun waktu 2017 sampai 2021 sebesar 20%, adapun Perangkat Daerah/Badan tersebut adalah PKK Provinsi Bali, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dan Koalisi Kependudukan Provinsi Bali.

Gambar 2.116 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

6) Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas Penduduk dalam kurun waktu 2018 sampai 2021 berjumlah 1 Kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.

Tabel 2.44 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	-	-	1	1	1

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

- 7) Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dan selama kurun waktu 2017 sampai 2021 sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil adalah sebagai berikut:

- a) Dinas Sosial PPPA Provinsi Bali
- b) Dinas PMA Provinsi Bali
- c) Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

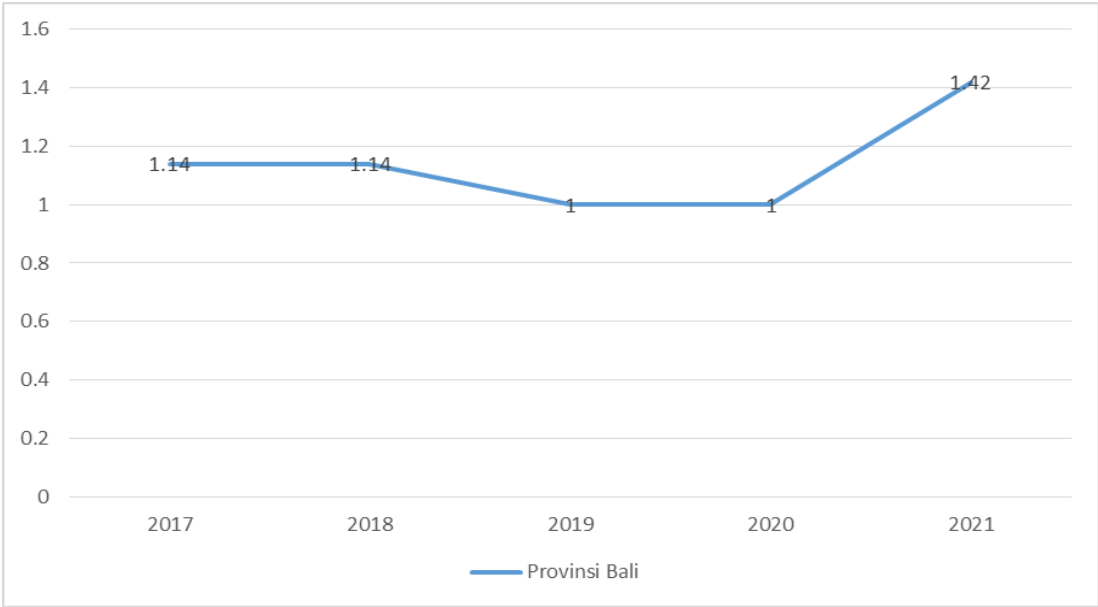
Tabel 2.45 Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan	-	-	3	3	3

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

- 8) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
- Rata-rata jumlah anak dalam Keluarga di Provinsi Bali semakin menurun setiap tahunnya berdasarkan data dari olahan data agregat DUKCAPIL Prov. Bali.

Gambar 2.117 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

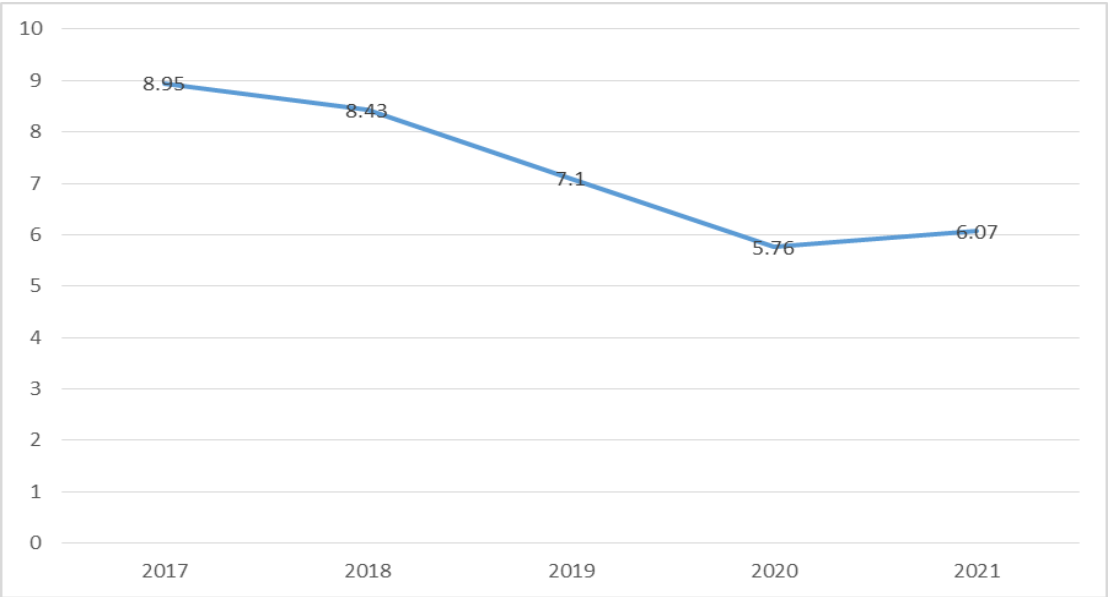


Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

9) Rasio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah penerima KB (berbagai jenis metode) dengan jumlah pasangan usia subur. Rasio ini dihitung untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan mengikuti program KB. Data Akseptor KB di Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2021. Dari tahun 2017 ke 2018 terjadi penurunan sebesar 0,52%, dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1,33 % dan dari tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan sebesar 1,34% dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,31% dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.118 Rasio Akseptor KB di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

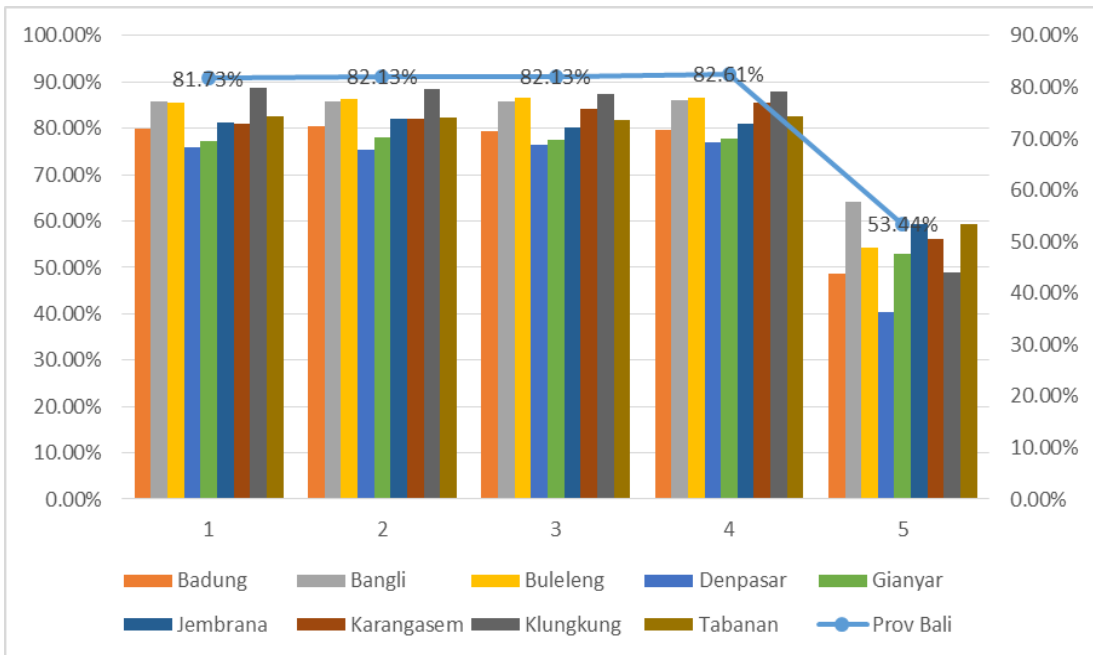


Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

10) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49.

Masyarakat Bali sudah semakin sadar untuk ber-KB dibuktikan dari semakin meningkatnya persentase penggunaan alat kontrasepsi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,4%, dari tahun 2018 ke 2019 hasilnya tetap dan dari tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,48%. Pada tahun 2021 angka CPR berada di 53,44% berdasarkan Pendataan Keluarga 2021 (PK21).

Gambar 2.19 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 di Provinsi Bali

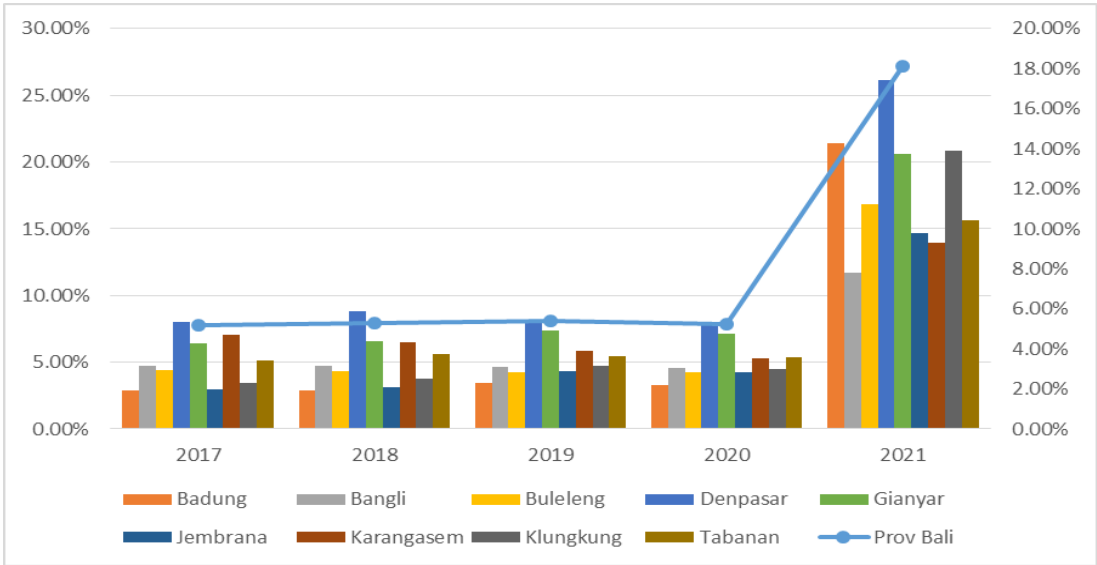


Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

11) Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi di Provinsi Bali bervariasi dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dari tahun 2017 ke 2018 meningkat 0.12%, dari tahun 2018 ke 2019 meningkat 0.1% dan dari tahun 2019 ke 2020 menurun sebesar 0.19%, sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan Pendataan Keluarga 2021 (PK 21) *Unmet Need* di Provinsi Bali sangat tinggi yaitu 18,10%.

Gambar 2.120 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) di Provinsi Bali

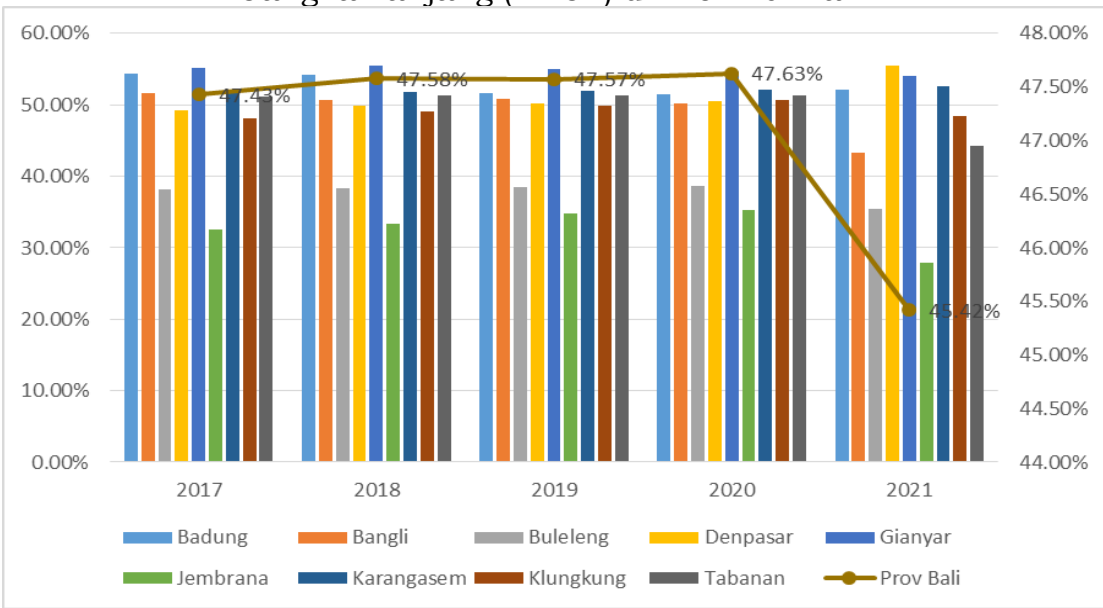


Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

12) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada tahun 2016 adalah sebesar 40,51 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 38,86%. Angka ini mengindikasikan bahwa pasangan usia subur masih belum memahami penggunaan dari kontrasepsi jangka panjang. Hal ini lebih karena masyarakat merasa khawatir dengan penggunaan kontrasepsi jangka panjang akan berdampak buruk kepada kesehatan dan reproduksi mereka nantinya.

Gambar 2.121 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Bali



Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

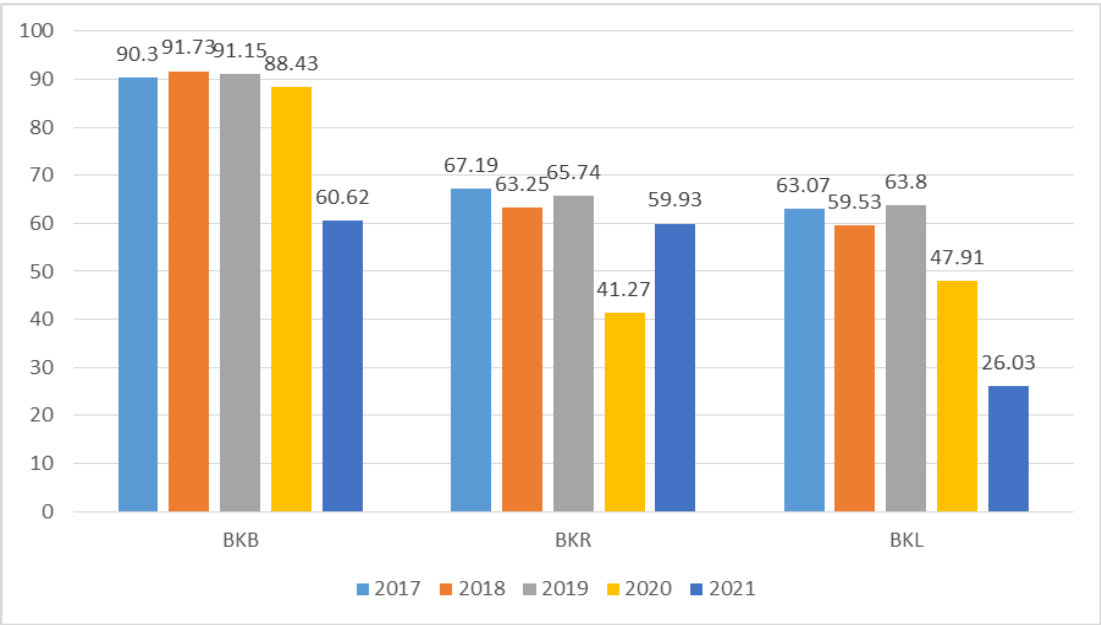
- 13) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Berkurangnya anggaran APBN dalam pelaksanaan kegiatan kelompok BKB membuat antusias dan partisipasi masyarakat menjadi anggota kelompok BKB menurun. Misalnya: sudah tidak ada lomba kelompok BKB, sudah tidak ada dukungan dana operasional kelompok. 2) Kurangnya kader terlatih.

Pada masa pandemi jarang terjadi pertemuan, sehingga aktivitas kelompok juga minim. 2) Prioritas dana desa difokuskan untuk menangani pandemi *covid 19*, sehingga pendanaan kelompok kegiatan di *refocusing*. 3) Peran PKB dalam pembinaan Poktan kurang optimal. 4) Pembinaan berjenjang dari Kabupaten dan Desa kurang optimal.

Berkurangnya anggaran APBN dalam pelaksanaan kegiatan kelompok BKL membuat antusias dan partisipasi masyarakat menjadi anggota kelompok BKL menurun, misalnya: sudah tidak ada dukungan dana operasional kelompok. 2) Kurangnya kader terlatih.

Gambar 2.122 Cakupan Anggota BKB, BKR, dan BKL Ber-KB di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, 2022

- 14) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan tetap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

yaitu 716 (pada 716 Desa/Kelurahan se-Bali). Artinya di setiap Desa/Kelurahan terdapat 1 PPKBD. Sumber data 2017 – 2021 : SR Pengendalian Lapangan BKKBN. Melihat keberhasilan pengendalian angka kelahiran mengindikasikan bahwa dengan 1 orang PPKBD di setiap Desa/Kelurahan sudah dianggap cukup.

15) Persentase Remaja (Umur 14-19 tahun) Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Berdasarkan data yang disampaikan oleh BKKBN melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali. Data persentase remaja (umur 14 tahun sampai dengan 19 tahun) yang terkena infeksi penyakit menular seksual (IMS) hanya tersedia pada tahun 2017. Setelah itu BKKBN tidak merilis data terkait sampai dengan tahun 2020. Jika merujuk pada pada yang telah disampaikan BKKBN, maka jumlah remaja yang terkena penyakit seksual tergolong kecil. Namun demikian angka ini kemungkinan tidak menunjukkan kondisi real di lapangan dikarenakan jenis penyakit ini biasanya lebih banyak ditutupi. Sehingga upaya edukasi tentang pendidikan sex sangat perlu dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya potensi perkembangan penyakit IMS di kalangan remaja di Provinsi Bali.

Tabel 2.46 Persentase Remaja (Umur 14 s.d 19 th)
Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Badung	40,0	-	-	-	-
2	Bangli	NA	-	-	-	-
3	Buleleng	17,0	-	-	-	-
4	Denpasar	83,0	-	-	-	-
5	Gianyar	57,0	-	-	-	-
6	Jembrana	1,0	-	-	-	-
7	Karangasem	NA	-	-	-	-
8	Klungkung	1,0	-	-	-	-
9	Tabanan	1,0	-	-	-	-
	Provinsi Bali	200,0	-	-	-	-

Sumber: BKKBN Provinsi Bali, 2022

16) Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita di Provinsi Bali pada tahun 2017 menjadi sebesar 21,64 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 22,7.

I. Perhubungan

Selama kurun waktu 2017 sampai 2018, jumlah arus penumpang angkutan umum terbesar yaitu untuk angkutan laut dan yang terendah untuk angkutan darat. Kurun waktu 2019 sampai 2021, jumlah arus penumpang angkutan umum terbesar yaitu untuk angkutan udara dan yang terendah untuk angkutan darat. Pada tahun 2021 jumlah penumpang angkutan udara sebesar 3.776.591 untuk angkutan laut 1.797.106 dan angkutan darat 1.323.232.

Penurunan arus penumpang menggunakan angkutan udara dan laut disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat karena pandemi COVID-19 dengan persyaratan yang sangat ketat. Peningkatan yang terjadi pada arus penumpang angkutan darat disebabkan karena mobilitas angkutan orang yang semula melalui laut dan udara beralih menggunakan angkutan darat, sedangkan angkutan barang melalui darat juga tetap mengalami penurunan.

Gambar 2.123 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Bali 2018-2021



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

1) Rasio Izin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Izin trayek selain sebagai salah satu penghasilan pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi penguasa transportasi untuk melakukan usaha secara legal. Izin trayek tersebut sekaligus menggambarkan tingkat keterlayanan masyarakat terhadap akses transportasi untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Dengan demikian penting sekali melakukan pencatatan izin trayek untuk bisa memetakan bagaimana kondisi transportasi di wilayah Provinsi Bali. Untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mendapatkan layanan transportasi, bisa dilakukan dengan menghitung rasio izin trayek. Rasio izin trayek di Provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai 2021, yaitu 1:44.234; 1:30.441; 1:45.176; 1:45.633 dan 1:46.250. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan atau penurunan yang signifikan terhadap layanan akses transportasi bagi masyarakat di Provinsi Bali. Selain itu budaya masyarakat yang kurang menyukai penggunaan transportasi umum menyebabkan kebutuhan akan pelayanan transportasi juga rendah.

Tabel 2.7 Rasio Izin Trayek Provinsi Bali Tahun 2017-2021

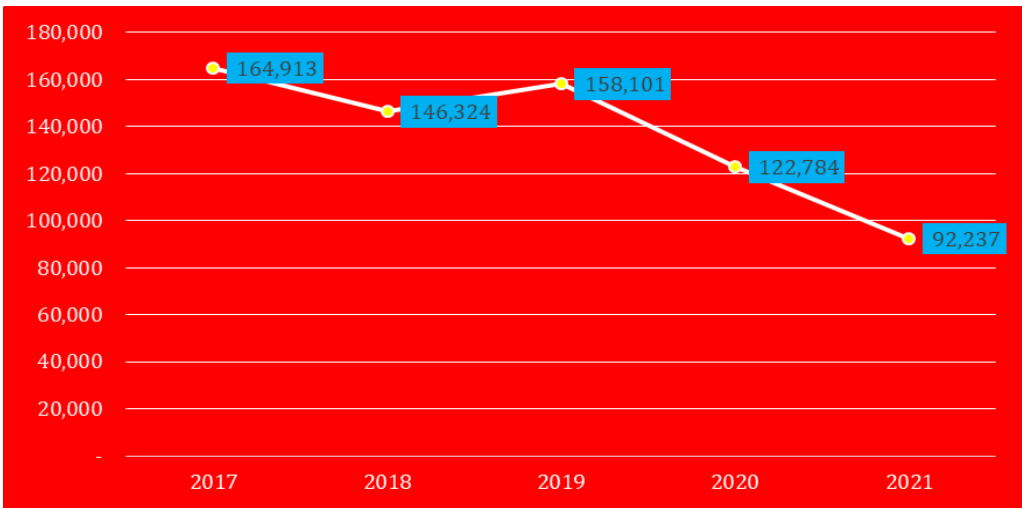
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Izin Trayek	96	141	96	96	96
2	Jumlah Penduduk	4.246.500	4.292.200	4.336.900	4.380.800	4.440.000
3	Rasio	1:44.234	1:30.441	1:45.176	1:45.633	1:46.250

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

2) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah uji Kir angkutan umum pada tahun 2017 yaitu 164.913 dan menurun menjadi 146.324 pada tahun 2018. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2019 sebesar 158.101 dan terus mengalami penurunan menjadi 122.784 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 92.237.

Gambar 2.124 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

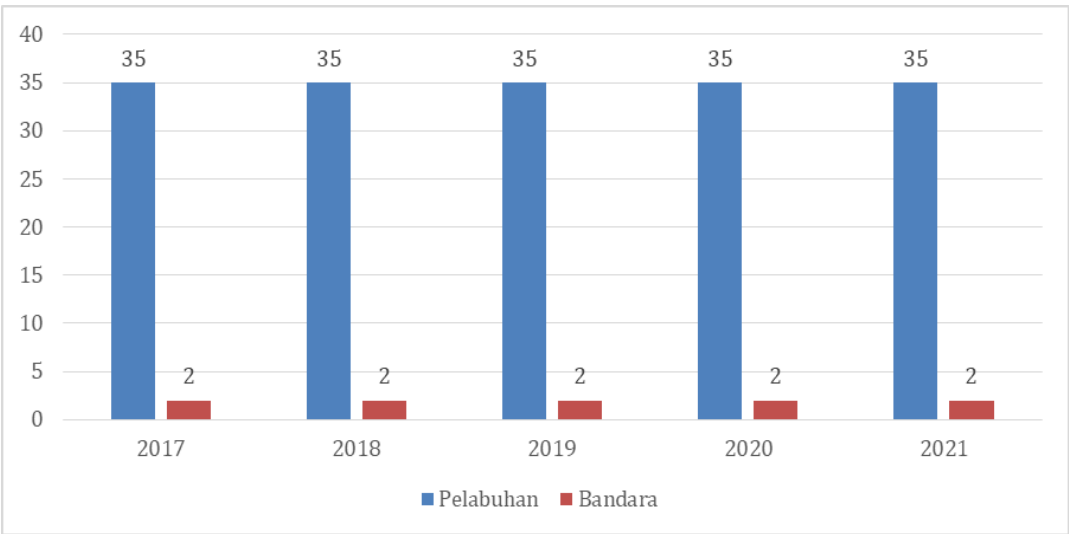


Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

3) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Jumlah rencana pelabuhan di Provinsi Bali menurut RIPNAS adalah 28 pelabuhan akan tetapi jumlah pelabuhan yang sudah ditetapkan selama kurun waktu 2017-2021 yaitu sebanyak 8 pelabuhan. Jumlah bandara di Provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai 2021 yaitu sebanyak 1 bandara dan untuk jumlah terminal bus di Provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 yaitu sebanyak 20 Terminal dan masih adanya progres sejumlah 3 pelabuhan yaitu pelabuhan sanur yang terletak di Denpasar, pelabuhan sampalan dan bias munjul yang terletak di kabupaten klungkung.

Gambar 2.125 Jumlah Pelabuhan dan Bandara di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

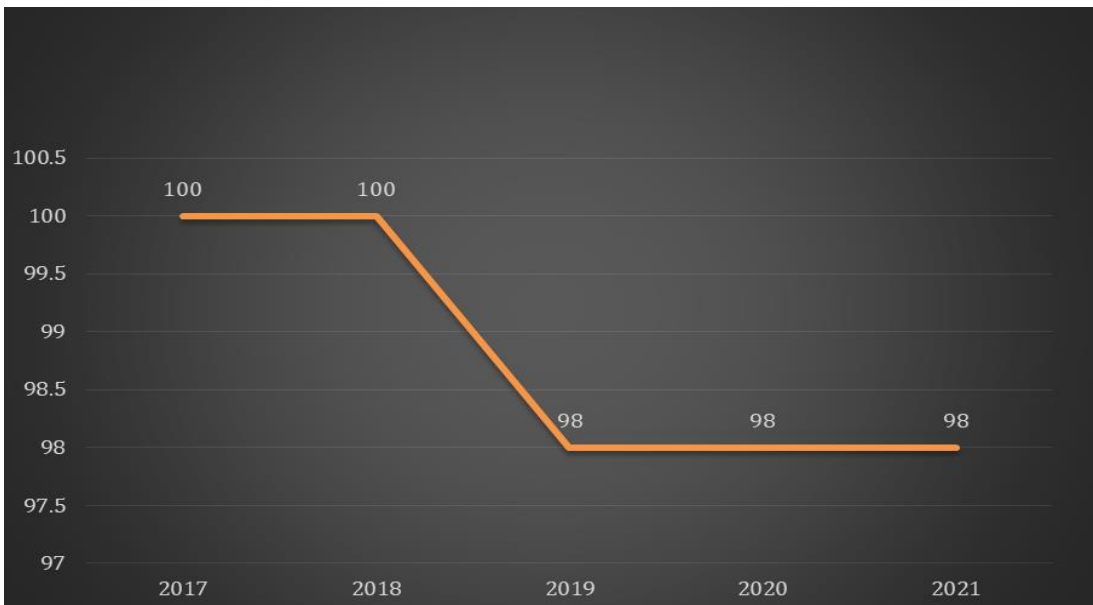


Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

4) Persentase Layanan Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan yaitu 21.780 pada tahun 2017. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun yang sama adalah sebesar 852.895. Berdasarkan perhitungan rasio angkutan terhadap jumlah penduduk, maka pada tahun 2017 100% penduduk di Provinsi Bali sudah mendapatkan layanan angkutan darat. Persentase layanan angkutan darat selama 2017 sampai 2021 diperlihatkan oleh gambar 2.146 dimana dari tahun ke tahun persentase layanan sudah menunjukkan angka yang sangat baik, namun adanya sedikit penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2021. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan dan kualitas berbagai fasilitas penunjang yang seharusnya bisa disiapkan.

Gambar 2.126 Persentase Layanan Angkutan Darat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

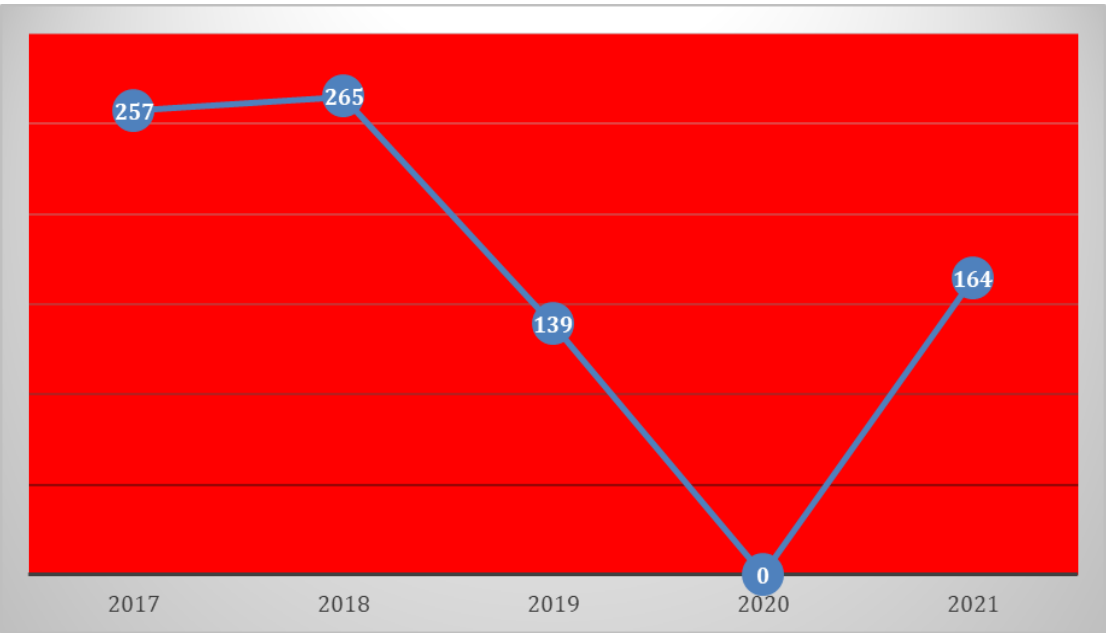
5) Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu lalu lintas adalah papan tanda yang didirikan di sisi atau di atas jalan untuk memberi instruksi atau informasi kepada pengguna jalan. Rambu lalu lintas berfungsi untuk memudahkan pengendara dan sebagai navigasi dalam perjalanan serta membantu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ada berbagai macam-macam rambu lalu lintas yang bisa Sahabat temui ketika berkendara.

Setiap rambu tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Rambu perintah adalah rambu-rambu yang berisi perintah kepada para pengguna jalan yang wajib untuk dipatuhi. Ada banyak simbol rambu perintah yang memiliki maknanya masing-masing. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, Pemerintah Provinsi Bali selalu menjaga dan meningkatkan rambu-rambu lalu lintas yang ada di wilayah Provinsi Bali sampai ke pelosok desa.

Persentase pemasangan rambu-rambu di Provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai 2021 yaitu, 257 pada tahun 2017, 265 pada tahun 2018 dan 139 pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 tidak adanya pemasangan rambu-rambu karena dampak pandemi COVID-19 kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas rambu-rambu tidak dapat dilaksanakan dan pada tahun 2021 pemasangan rambu sebesar 164.

Gambar 2.127 Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Dishub Provinsi Bali, 2022

6) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Bali selama tahun 2017 sampai 2021, yaitu 1:525,6; 1:553,9; 1:585,5; 1:437,6 dan 1:124.14.

Tabel 2.48 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Provinsi Bali 2017-2021

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan	743,34	743,34	743,34	743,34	743,34
2	Jumlah Kendaraan	3.907.049	4.117.949	4.352.596	3.253.511	92.237
3	Rasio	1:525,6	1:553,9	1:585,5	1:437,6	1:124,14

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

7) Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut dengan angkutan darat menurun dari 749.582 orang pada tahun 2017 menjadi 558.091 orang pada tahun 2021. Pada tahun 2017, jumlah barang yang terangkut dengan angkutan darat yaitu 119.381 barang meningkat menjadi 147.124 barang pada tahun 2021. Jumlah orang yang terangkut dengan angkutan laut paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 37.449.702 orang. Jumlah tertinggi untuk barang yang terangkut dengan angkutan laut terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 543.159.485 barang. Jumlah tertinggi orang yang terangkut dengan angkutan udara terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 24.169.561 orang dan untuk jumlah barang tertinggi pada tahun yang sama 2019 sebesar 313.520.106 barang.

Tabel 2.49 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkutan Darat					
a	Orang	749.582	351.739	314.877	435.525	1.323.232
b	Barang	119.381	121.818	392.129	70.612	147.124
2	Angkutan Laut					
a	Orang	37.449.702	13.958.386	15.697.534	3.761.026	1.797.106
b	Barang	11.597.731	543.159.485	200.412.990	1.539.540	83.935.216
3	Angkutan Udara					
a	Orang	21.051.094	23.779.178	24.169.561	5.806.270	3.776.591
b	Barang	214.493.127	313.520.106	72.013.846	47.276.383	63.085.539

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

8) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun

Pada tahun 2021 jumlah orang yang melalui dermaga sebesar 1 juta orang dan jumlah barang sebesar 2 juta barang. Jumlah orang yang melalui bandara pada tahun yang sama sebesar 3 juta orang dan jumlah barang mengalami penurunan di tahun 202 sebesar 335 juta barang. Jumlah orang/barang yang melalui terminal sebesar 1 juta dan 147 ribu barang.

Terjadinya mobilitas jumlah penumpang sehingga terjadinya perbedaan arus penumpang tiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan di dua tahun terakhir. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti arus wisatawan yang menurun disebabkan oleh pandemi COVID-19, kondisi ekonomi mikro dan makro dan lain sebagainya sehingga menyebabkan perbedaan preferensi masyarakat dalam melakukan pergerakan/perjalanan

Tabel 2.50 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dermaga					
a	Orang	37.449.702	13.958.286	15.697.534	4.945.965	1.797.106
b	Barang	11.597.731	543.159.485	200.412.990	2.425.410	83.935.216
2	Bandara					
a	Orang	21.051.094	23.779.178	24.169.561	5.806.270	3.776.591
b	Barang	214.493.127	313.520.106	372.013.846	47.276.383	63.085.539
3	Terminal					
a	Orang	749.582	351.739	314.877	435.525	1.323.232
b	Barang	119.381	121.818	392.129	70.612	147.124

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

J. Komunikasi dan Informatika

1) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan Layanan Telekomunikasi mengalami peningkatan pada Tahun 2021. Hal ini direpresentasikan melalui proporsi desa/kelurahan yang mendapatkan sinyal seluler dengan persentase

sebesar 100 persen. Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan aktivitas masyarakat dalam penggunaan layanan telekomunikasi yang mengharuskan operator seluler untuk mengoptimalkan layanan.

Tabel 2.51 Cakupan Layanan Telekomunikasi

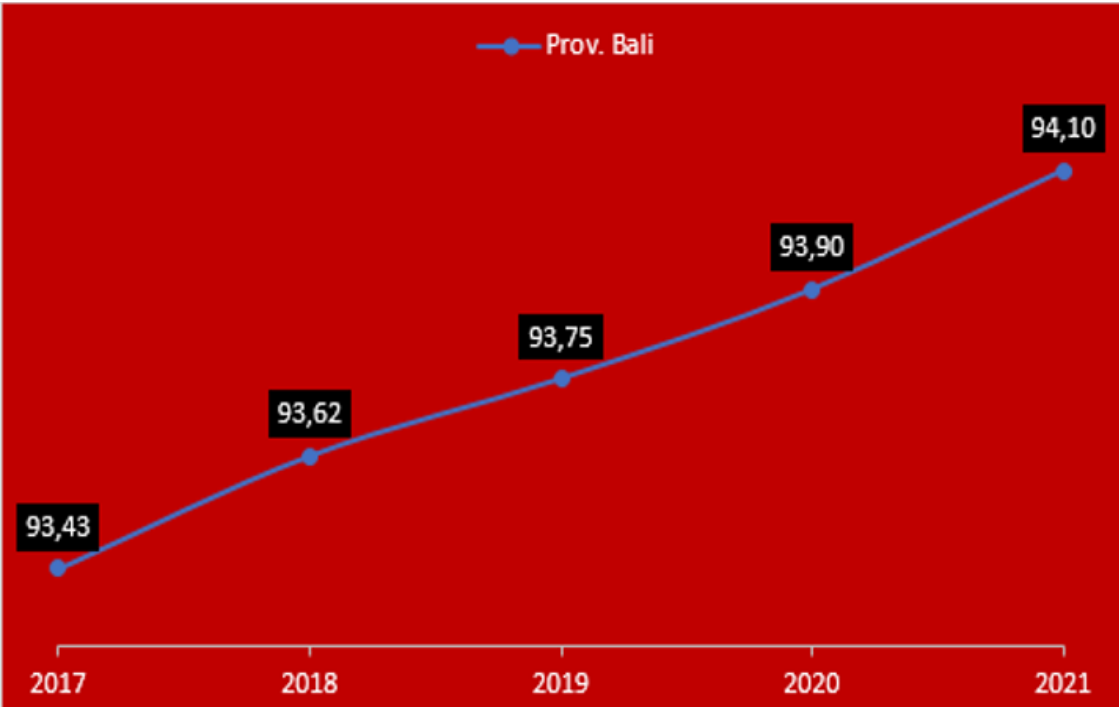
URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan layanan telekomunikasi	49,50	50,00	60,00	65,00	100,00

Sumber: Diskominfo Provinsi Bali, 2022

2) Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Penggunaan HP/telepon pada rumah tangga/masyarakat mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini menandakan bahwa kebutuhan akan komunikasi dan informasi yang mudah dan cepat menjadi tuntutan di era digital saat ini untuk berbagai tujuan.

Gambar 2.128 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan HP/Telepon Rumah



Sumber: Diskominfo Provinsi Bali, 2021

3) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Terjadi peningkatan pada data rumah tangga dengan akses internet. Berdasarkan analisis dari data yang telah dimiliki, peningkatan tren akses terhadap internet di tingkat rumah tangga diduga terjadi karena tiga faktor utama yaitu semakin tingginya tingkat pertumbuhan teknologi, dorongan dan dukungan pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan yang ada serta dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan bekerja dan belajar bisa dilakukan dari rumah. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi maka akses terhadap internet menjadi semakin mudah untuk dimiliki. Selain terhadap mudahnya memiliki akses internet, sarana pendukung lainnya seperti telepon seluler/HP, komputer, laptop, maupun tablet yang semakin berkembang dan mudah untuk dimiliki menyebabkan terjadinya pertumbuhan pada akses internet. Kebijakan pemerintah dalam mendukung adanya sarana seperti wifi gratis pada daerah publik serta program *Bali Smart Island* menjadi faktor pendorong yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses internet.

Tabel 2.52 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	67,1	74,15	79,59	85,67	87,8

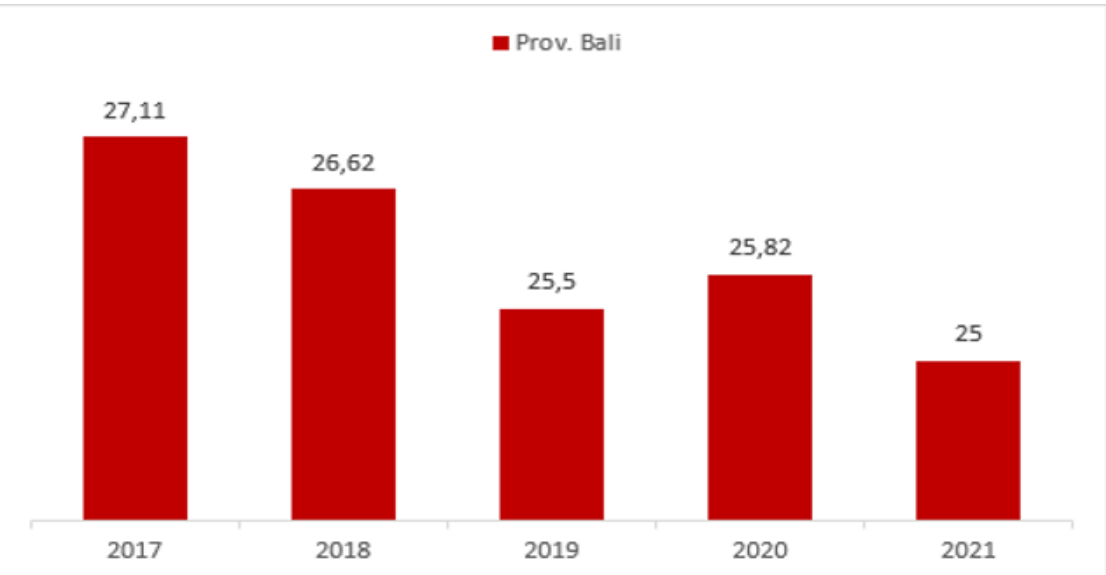
Sumber: Diskominfo Provinsi Bali, 2022

4) Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Berdasarkan data dari tabel dapat disimpulkan bahwa terjadi turun naik tingkat rumah tangga yang memiliki komputer pribadi namun masih dibawah 50%. Berdasarkan analisis terhadap tren yang terjadi, faktor kemajuan teknologi dan fleksibilitas yang menyebabkan rumah tangga di Provinsi Bali lambat laun lebih memilih untuk meninggalkan komputer. Seiring dengan kemajuan teknologi, ponsel/HP terkini memiliki kemampuan yang setara jika dibandingkan dengan fitur yang dimiliki oleh komputer. Selain itu fleksibilitas dari ponsel/HP yang dapat dibawa pada kondisi apapun

menjadi nilai tambah jika dibandingkan dengan komputer. Sebagai catatan dari data kepemilikan komputer diatas, yang dimaksud dengan komputer mengacu pada komputer desktop, laptop (portable), atau tablet (komputer genggam yang serupa)

Gambar 2.129 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi



Sumber Data: Diskominfo Provinsi Bali, 2021

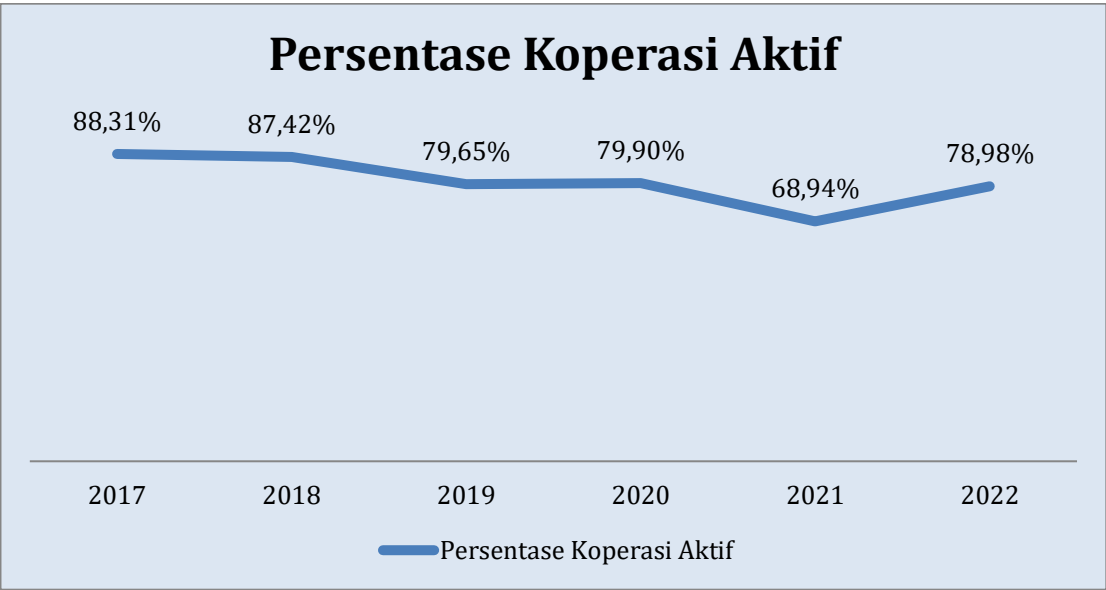
K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 88,31 persen, angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 87,42 persen. Hingga pada tahun 2019 sebanyak 79,65 persen. Data Koperasi Aktif mengalami sedikit peningkatan di Tahun 2020 yaitu menjadi 79,90%. Namun di tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 68,94 persen. Terakhir pada Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali pada di angka 78,98 persen. Persentase koperasi aktif yang fluktuatif disebabkan oleh adanya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena RAT merupakan indikator aktif atau tidaknya koperasi. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah SDM pengelola koperasi yang belum berkompeten dalam pengelolaan koperasi, baik dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi maupun dalam pembuatan laporan keuangan koperasi. Selain itu, masih banyak koperasi yang bergantung pada pemberian bantuan

dari pemerintah sehingga ketika bantuan pemerintah terhadap koperasi berkurang, koperasi menjadi tidak maksimal menjalankan usahanya. Selain permasalahan SDM dan bantuan pemerintah, menurunnya jumlah koperasi aktif yang cukup signifikan pada Tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada kondisi keuangan dan ekonomi di semua sektor usaha.

Gambar 2.130 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Bali



Sumber: Diskop UKM Provinsi Bali, 2021

2) Jumlah UMKM

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali dari tahun 2017-2022 cenderung mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017 jumlah UMKM di Provinsi Bali ada sebanyak 312.967 pertumbuhannya mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 326.009 atau 4,2% dan pada tahun 2019 menjadi 327.353 tumbuh sebesar 1.344 atau 0,4%. Perkembangan jumlah UMKM tersebut disebabkan karena program penumbuhan kewirausahaan yang telah digaungkan melalui dunia pendidikan baik pendidikan formal dan informal melalui perubahan pola pikir setelah tamat dari perguruan tinggi tidak harus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha. Untuk mewujudkan pembentukan jiwa wirausaha telah dilakukan dengan berbagai upaya yang ditempuh seperti melalui

pelaksanaan pelatihan, magang, studi banding, temu usaha, promosi, dan penyebaran publikasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Tabel 2.53 Jumlah UMKM

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Buleleng	31.563	34.552	34.374	54.489	57.216
Jembrana	10.525	27.654	24.346	46.277	66.537
Tabanan	38.980	41.459	42.744	43.715	47.160
Badung	16.899	19.688	19.261	22.647	40.989
Denpasar	30.840	31.826	32.026	32.224	32.226
Gianyar	91.511	75.412	75.482	75.542	75.620
Bangli	43.948	44.068	44.068	44.123	44.693
Klungkung	9.712	11.761	14.584	35.792	36.072
Karangasem	38.989	39.589	40.468	57.456	40.614
Provinsi Bali	312.967	326.009	327.353	412.265	441.127

Sumber Data : Diskop UKM Provinsi Bali, 2022

Pada tahun 2020, jumlah UMKM telah mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 84.912 atau 25,9% dengan total jumlah UMKM sebesar 412.265 dan peningkatan pertumbuhan ini terjadi pada kriteria Usaha Mikro yang diakibatkan dari dampak Pandemi Covid-19. Sedangkan pertumbuhan UMKM pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastic sekitar 6,5% atau dengan pertumbuhan sebesar 28.862 sehinggal total jumlah UMKM sebanyak 441.127. Pertumbuhan ini diperparah akibat adanya pengaruh Pandemi Covid-19 dengan pengetatan pemberlakuan PPKM dimana terjadi pembatasan transaksi melalui konvensional sehingga menyebabkan banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan sampai dengan pengurangan tenaga kerja.

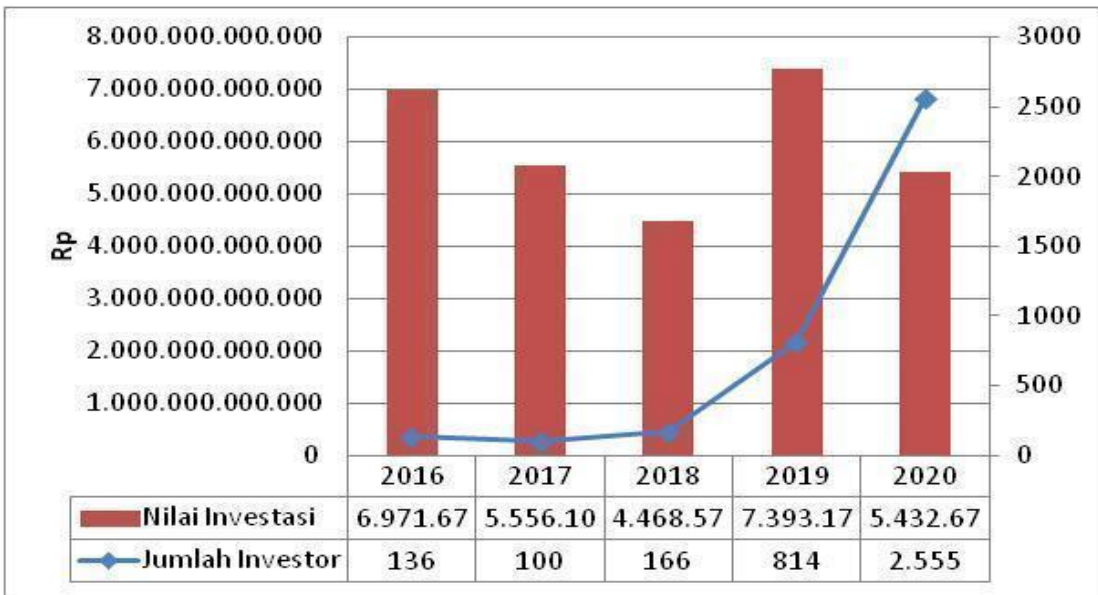
L. Penanaman Modal

- 1) Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional pada tahun 2016 sebesar investor dan jumlah investasi sebesar Rp.6.971.675.200.000, tahun 2017 jumlah investor berskala Nasional sebanyak 100 investor dan

jumlah nilai investasi sebesar Rp.5.556.102.230.000, pada tahun 2018 jumlah investor berskala nasional sebanyak 166 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.4.468.574.800.000, pada tahun 2019 jumlah investor berskala nasional sebanyak 814 dengan nilai investasi sebesar Rp.7.393.170.200.000, sedangkan pada tahun 2020 jumlah investor berskala nasional sebanyak 2.555 dengan jumlah investasi sebesar Rp.5.432.674.500.000.

Gambar 2.131 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Bali, 2021

2) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Untuk rasio daya serap tenaga kerja setiap pada tahun 2017 sebesar 42,43 dengan jumlah perusahaan PMDN sebanyak 110 investor dan yang tertinggi terlihat pada tahun 2015 sebesar 57,79 dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN sebanyak 86 investor

Tabel 2.54 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

URAIAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Rasio daya serap tenaga kerja	42,43	34,16	41,44	42,43

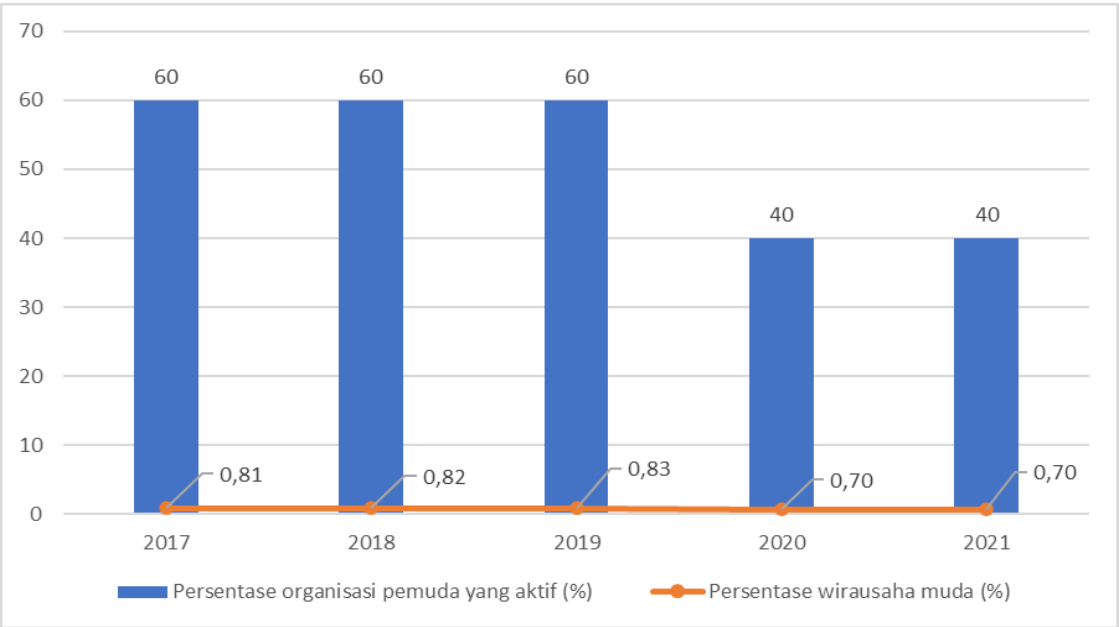
Sumber: DPMPSTSP Provinsi Bali, 2022

M. Kepemudaan dan Olahraga

1) Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda

Persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase wirausaha muda aktif secara berturut-turut selama kurun waktu 2017-2021 sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.132 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda di Provinsi Bali

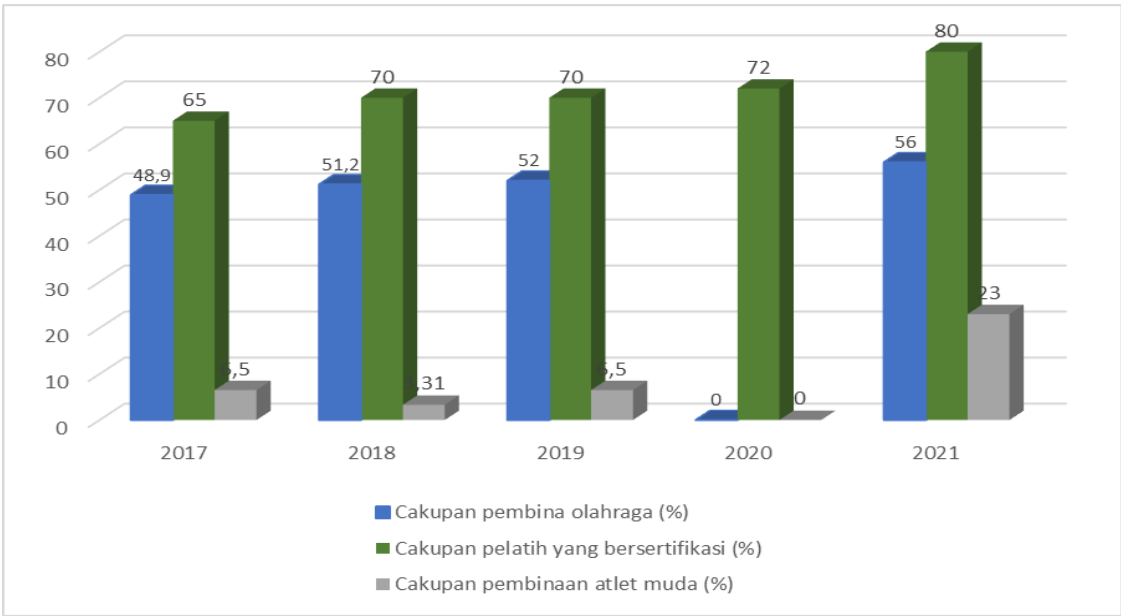


Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

2) Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda

Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2021 cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan dari 48,9 persen pada tahun 2017 menjadi 56 persen pada tahun 2021. Pembinaan tersebut melibatkan pelatih yang bersertifikat yaitu sebanyak 65 persen pada tahun 2017 terus meningkat sampai tahun 2021 menjadi 80 persen. Selama pembinaan ini atlet muda yang berhasil dibina sebanyak 6,5 persen pada tahun 2017 meningkat pada tahun 2021 menjadi 23 persen.

Gambar 2.133 Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda di Provinsi Bali

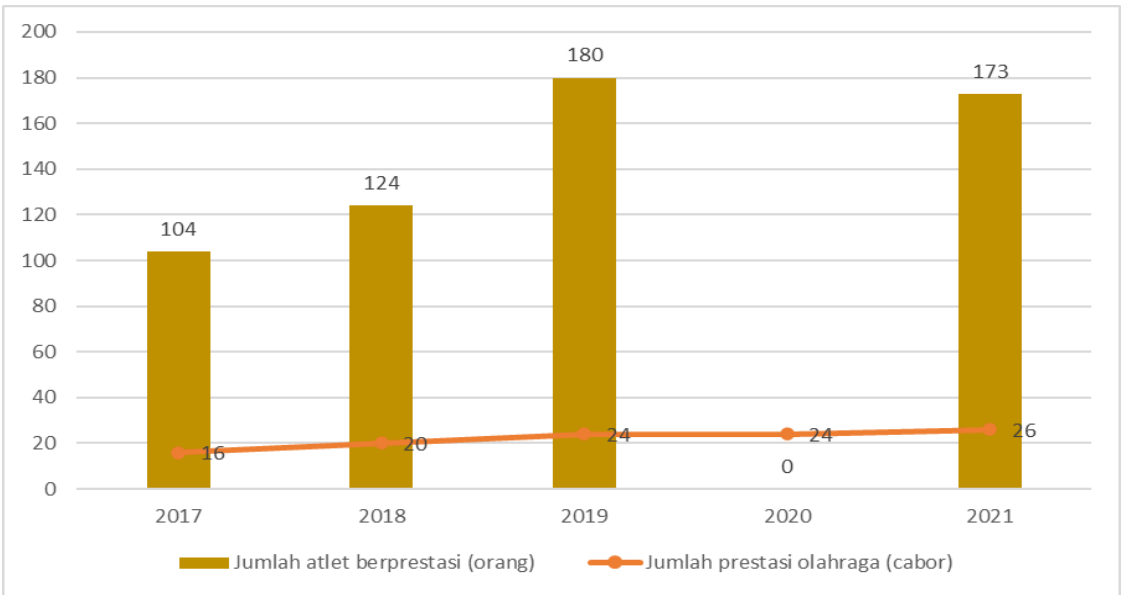


Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

3) Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah atlet berprestasi pada perhelatan berbagai kompetisi kejuaraan mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan selama periode tahun 2017-2021. Selanjutnya jumlah prestasi olahraga dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 2.134 Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga di Provinsi Bali



Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

N. Statistik

1) Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Kabupaten di Provinsi Bali setiap tahunnya membuat buku Kabupaten dalam Angka yang bekerjasama dengan Statistik Kabupaten yang mencapai 100 persen.

Tabel 2.55 Buku Kabupaten Dalam Angka

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Buku "Kabupaten Dalam Angka"	9	9	9	9	9

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2) Buku "PDRB"

Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat pembuatan buku PDRB oleh Pemerintah Provinsi Bali yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Pada tahun selanjutnya yaitu 2017 sampai dengan tahun 2021 kerjasama penyusunan buku PDRB tersebut tidak dilanjutkan lagi, tetapi BPS secara kontinyu sudah mempublikasikan hasil perhitungan PDRB setiap tahun.

Tabel 2.56 Buku PDRB

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Buku "PDRB"	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

O. Persandian

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 88,09 persen pada tahun 2017, 89,13 persen pada tahun 2018, 91,30 persen pada tahun 2019 dan 100 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Tabel 2.57 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Uraian	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat Daerah	88,09	89,13	91,30	100	100

Sumber: Diskominfo Provinsi Bali, 2022

P. Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Dalam mengimplementasikan semangat berkesenian masyarakat Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2018 telah menyelenggarakan 3 (tiga) festival seni budaya yaitu Pesta Kesenian Bali, Pesona Budaya Provinsi Bali (Bali Mandara Nawanatya), serta Peragaan dan Pementasan Seni Budaya (Bali Mandara Mahalango), sebagai ruang terhadap hasil karya seni dan bentuk presentasi serta ekspresi seni masyarakat Bali. Kreatifitas budaya dan ekonomi kreatif dalam perhelatan ketiga event seni budaya tersebut dapat mengeksplorasi, mengolah, mengemas dan mentransformasikan keragaman dari produk warisan budaya secara profesional dan modern, serta sebagai modal dalam meningkatkan pendapatan Nasional melalui pariwisata budaya demi kesejahteraan masyarakat. Ketiga *event* kebudayaan tersebut diselenggarakan di Taman Budaya Art Center Denpasar, selain bertujuan untuk melestarikan budaya juga untuk mengoptimalkan fungsi Taman Budaya sebagai pusat berkesenian dan berkebudayaan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 4 kegiatan festival menjadi hanya 2 kegiatan festival pada tahun 2020 dan 3 kegiatan festival tahun 2021.

Tabel 2.58 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	3	3	4	2	3

Sumber Data: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2021

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Pulau Bali karena sejarah perkembangannya, banyak memiliki cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah pulau Bali.

Cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 19.790 pada tahun 2017, sebanyak 20.178 pada tahun 2018, 20.688 pada tahun 2019, 20.898 pada tahun 2020 dan 24.579 pada tahun 2021.

Tabel 2.59 Cagar Budaya yang Dilestarikan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Cagar Budaya	19.790	20.178	20.688	20.898	24.579
*Benda	18.796	19.160	19.336	19.336	22.809
*Bangunan	95	96	341	493	533
*Situs	582	599	611	611	680
*Kawasan	5	5	12	12	5
*Struktur	312	318	388	446	532

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2021

3) Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi

Jumlah karya budaya yang diinventarisasi dari tahun ke tahun merupakan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan

Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Pelaksanaan inventarisasi mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, namun mengalami penurunan pada Tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan inventarisasi ke lapangan serta *refocusing* dan relokasi anggaran tahun 2020. sehingga warisan budaya yang diinventarisasi hanya sejumlah 30 warisan budaya saja. Tahun 2021 warisan budaya yang diinventarisasi meningkat menjadi 220.

Tabel 2.60 Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi	43	61	71	30	220

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2022

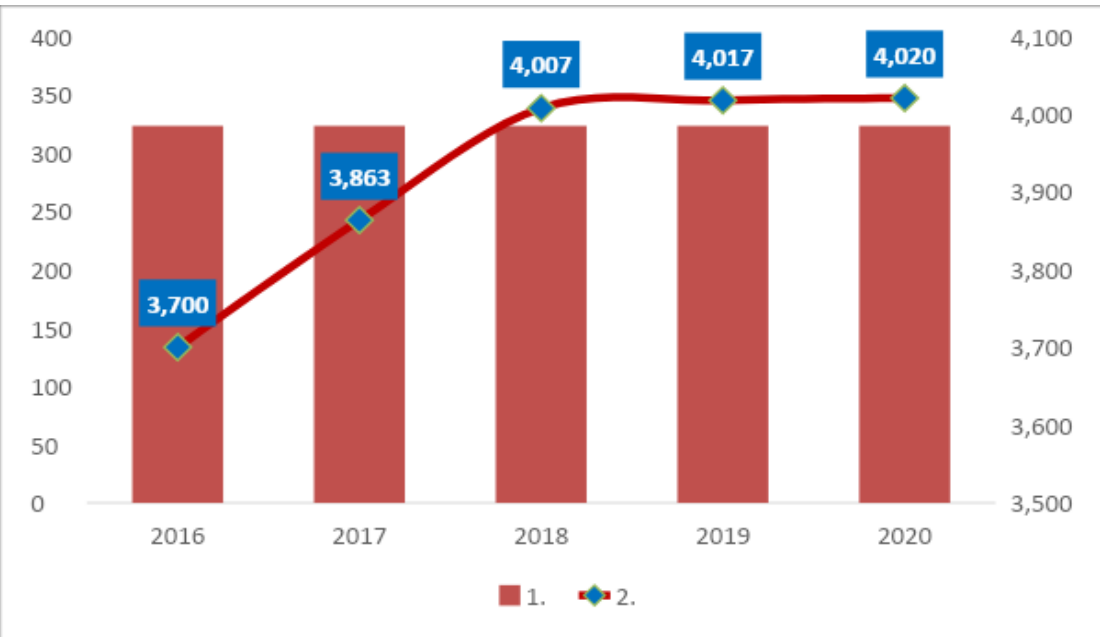
Q. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu Bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Dilihat dari luas pulau Bali kurang lebih sekitar 5.633 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak kurang lebih 4.200.000 jiwa. Kehadiran Perpustakaan sebagai penyedia Informasi sangat dibutuhkan Masyarakat, dengan kemajuan Teknologi Informasi yang telah berkembang dewasa ini mendorong Perpustakaan untuk lebih bertransformasi dalam rangka pengembangan di bidang Pendidikan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Transformasi Perpustakaan dilakukan melalui keterbukaan akses Informasi bagi masyarakat dengan mempergunakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan penyediaan fasilitas Teknologi Informasi yang dapat dimanfaatkan Masyarakat. Dalam perkembangan peran Perpustakaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya potensi Provinsi Bali tentang Pengelolaan Perpustakaan dapat disajikan data berikut.

1) Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bali

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan pada bidang perpustakaan, pembinaan teknis perpustakaan tingkat Provinsi berada pada tingkat Perpustakaan Sekolah SMA/SMK. Berdasarkan data Jumlah perpustakaan di Provinsi Bali dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah tetap yaitu sebesar 323. Dengan jumlah anggota yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk pergi ke perpustakaan dan memanfaatkan jasa perpustakaan juga semakin meningkat.

Gambar 2.135 Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bali



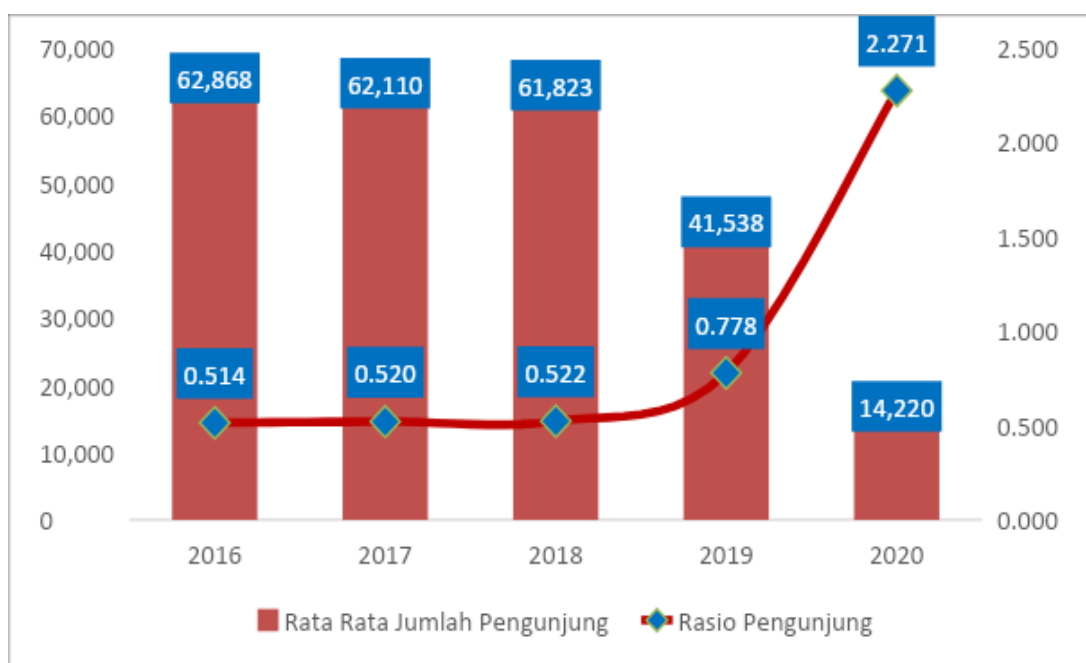
Sumber: Biro Organisasi, 2021

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Provinsi Bali

Rasio jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Bali selama tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami trend peningkatan. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa jumlah pengunjung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Angka tertinggi rasio jumlah pengunjung adalah tahun 2020 dengan angka 2,271 yang menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan semakin sedikit. Penurunan ini tidak mengindikasikan minat literasi masyarakat yang semakin menurun, tetapi perkembangan teknologi yang menyebabkan beralihnya sumber bacaan/literasi masyarakat yang semakin berkembang. Selain itu,

dampak dari adanya Pandemi COVID-19 adalah ditutupnya layanan perpustakaan sementara waktu sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali. Dengan demikian pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana cara mengakomodasi perkembangan teknologi ini untuk semakin mengarahkan dan meningkatkan minat literasi masyarakat.

Gambar 2.136 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Provinsi Bali

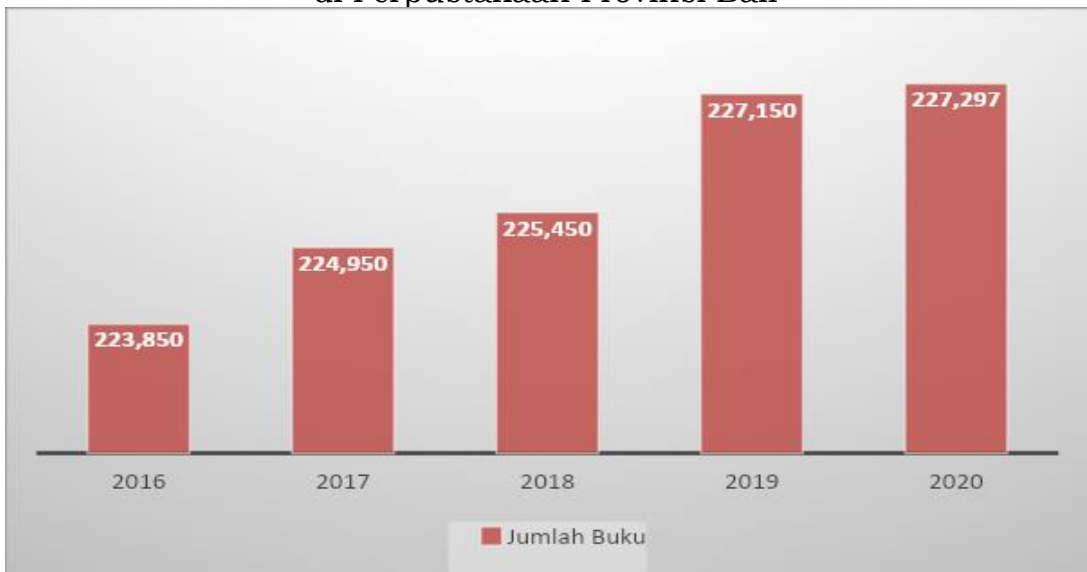


Sumber Data: Biro Organisasi, 2021

3) Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Sebagai salah satu sumber literasi perpustakaan daerah sudah seharusnya menyediakan banyak buku dengan berbagai subjek agar menarik semakin banyak orang untuk datang dan membaca buku di perpustakaan. Tercatat dari tahun ke tahun jumlah buku yang dikoleksi di perpustakaan sudah semakin banyak. Namun demikian berkembangnya teknologi seperti saat ini, akses terhadap perpustakaan sudah seharusnya bisa dilakukan secara online, sehingga koleksi buku dan referensi juga seharusnya bisa beralih dalam bentuk buku digital.

Gambar 2.137 Koleksi Buku Yang Tersedia
di Perpustakaan Provinsi Bali



Sumber: Biro Organisasi, 2021

4) Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Sebaran ketersediaan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat layanan perpustakaan. Sebaran ketersediaan perpustakaan di Provinsi berdasarkan jenis perpustakaan yaitu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan pendidikan tinggi di Indonesia. Rasio perpustakaan per satuan penduduk dipengaruhi oleh jumlah perpustakaan dan jumlah penduduk per tahun. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan jumlah perpustakaan yang ada di Provinsi Bali, dapat diketahui rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah setiap masyarakat sudah mendapatkan akses ke perpustakaan dengan baik. Berdasarkan data dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, rasio jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk menunjukkan tren yang positif dan hampir mencapai angka 1. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan perpustakaan saat ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.61 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

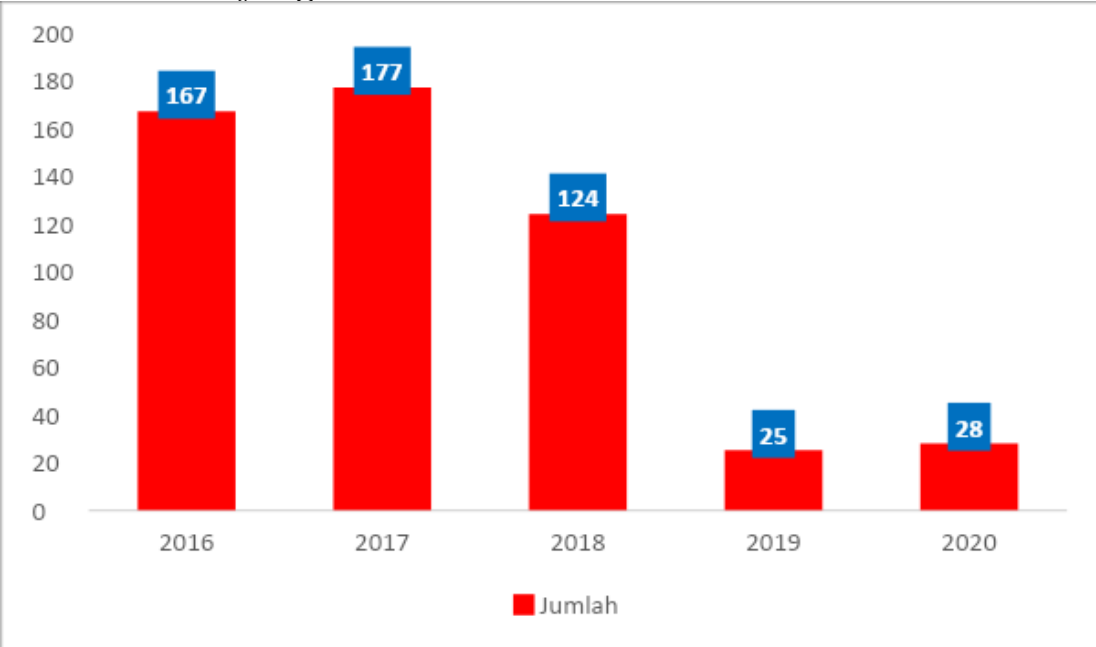
Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Rasio	0,91	1,02	0,92	0,93

Sumber: Biro Organisasi, 2021

5) Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat terus mengalami penurunan di Provinsi Bali. Terlihat dari grafik dibawah ini, jumlahnya hanya mencapai 25 pada tahun 2019 dan 28 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang pensiun dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun demikian tenaga pustakawan ini masih bisa memberikan pelayanan pada masyarakat yang akan berkunjung ke perpustakaan secara maksimal.

Gambar 2.138 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Provinsi Bali



Sumber Data: Biro Organisasi, 2021

R. Kearsipan

Sesuai Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Ruang Lingkup penyelenggaraan Kearsipan meliputi

keseluruhan Penetapan Kebijakan, Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip dalam suatu Sistem Kearsipan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Sumber Daya lainnya. Ruang Lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Perseorangan, serta Lembaga Kearsipan. Dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Kearsipan selama periode 2017 s.d 2021 berbagai upaya dilakukan secara optimal, namun upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga capaiannya belum sesuai dengan harapan.

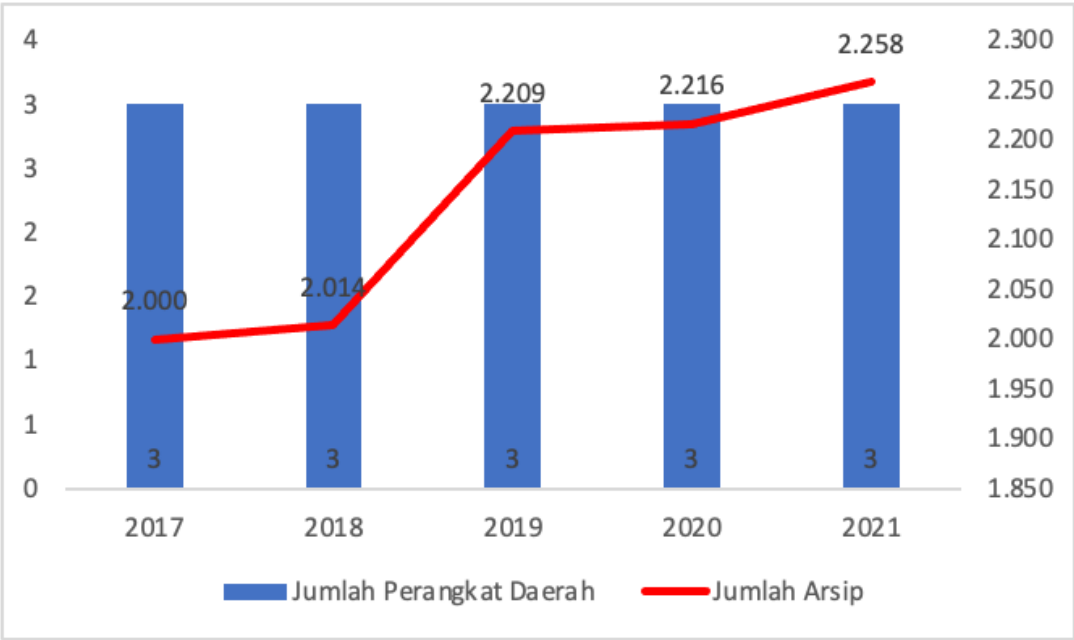
- 1) Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Jumlah arsip aktif yang diciptakan oleh semua perangkat daerah pada tahun 2021 adalah sebanyak 75.268 arsip. Jumlah ini dihasilkan oleh 39 perangkat daerah yang ada di Provinsi Bali.

Gambar 2.139 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip secara Baku di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Biro Umum dan Protokol, 2022

Gambar 2.140 Jumlah Arsip yang Dilestarikan di Provinsi Bali Tahun 2017-2022

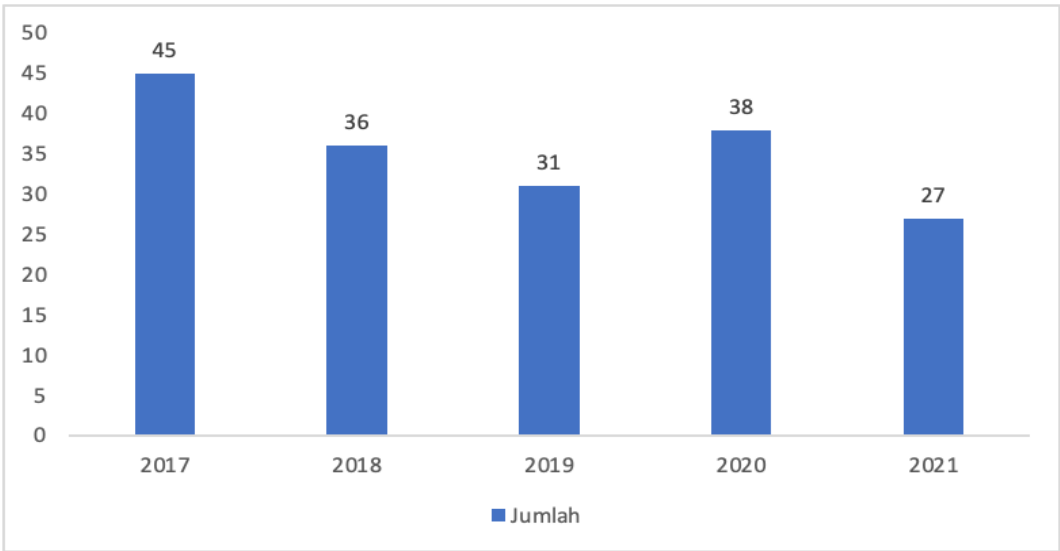


Sumber: Biro Umum dan Protokol, 2022

2) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan mengalami penurunan dari 45 orang pada tahun 2017 menjadi 27 pada tahun 2021. Data SDM pada bidang kearsipan cenderung menurun karena adanya pegawai yang pensiun pada rentang waktu tersebut.

Gambar 2.141 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Biro Umum dan Protokol, 2022

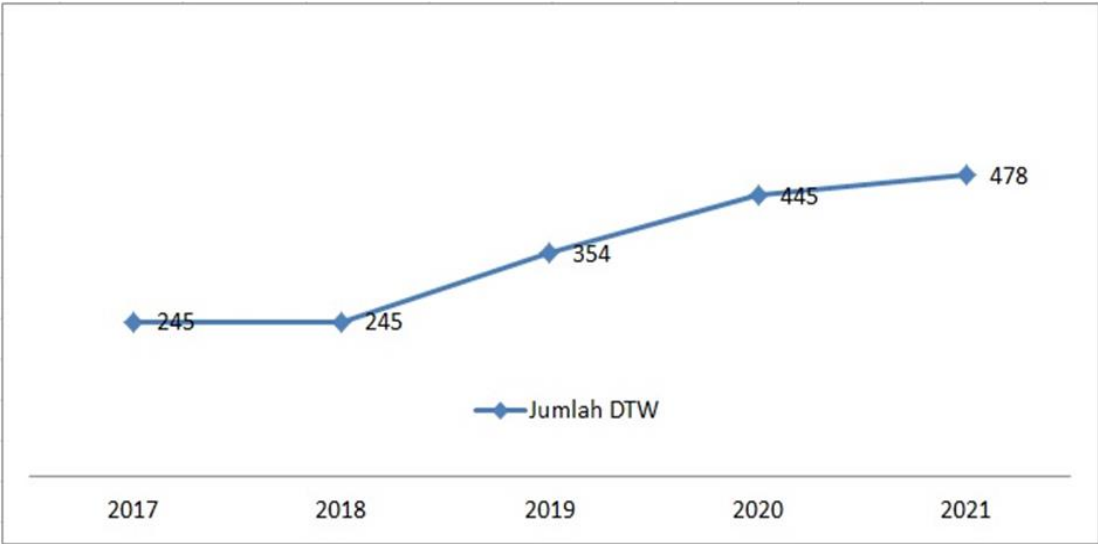
2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Pariwisata

1) Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)

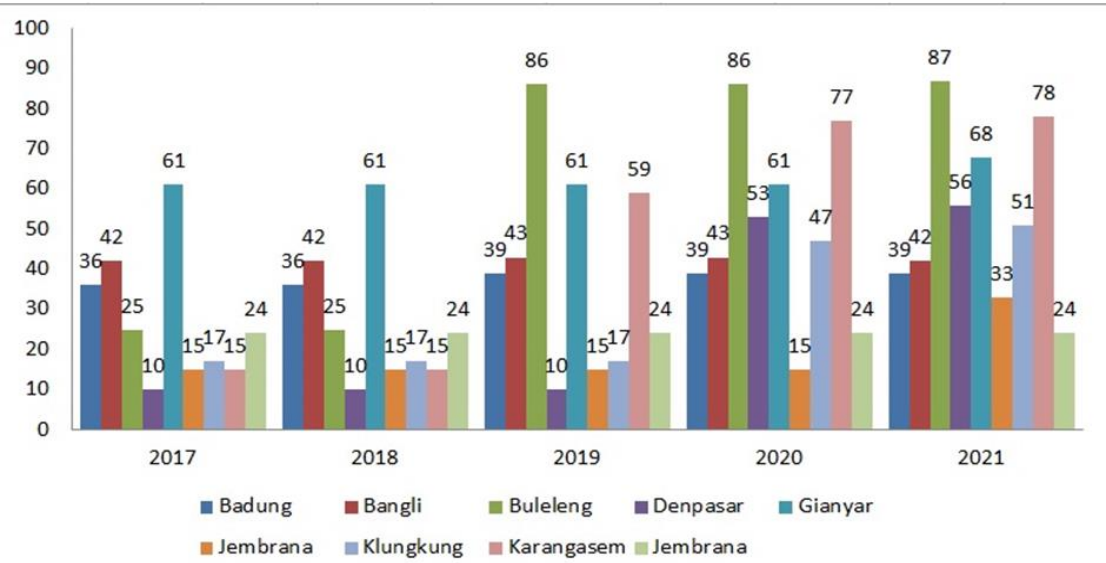
Jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Menurut grafik dibawah jumlah DTW di Provinsi Bali adalah sebanyak 478 DTW meningkat sebanyak 245 DTW jika dibandingkan tahun 2017. Jumlah DTW terbanyak menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2021 yaitu ada di Kabupaten Buleleng dengan 87 DTW dan yang terendah adalah di Kabupaten Jembrana yaitu 24 DTW.

Gambar 2.142 Jumlah Daya Tarik Wisata



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.143 Jumlah DTW Kabupaten/Kota

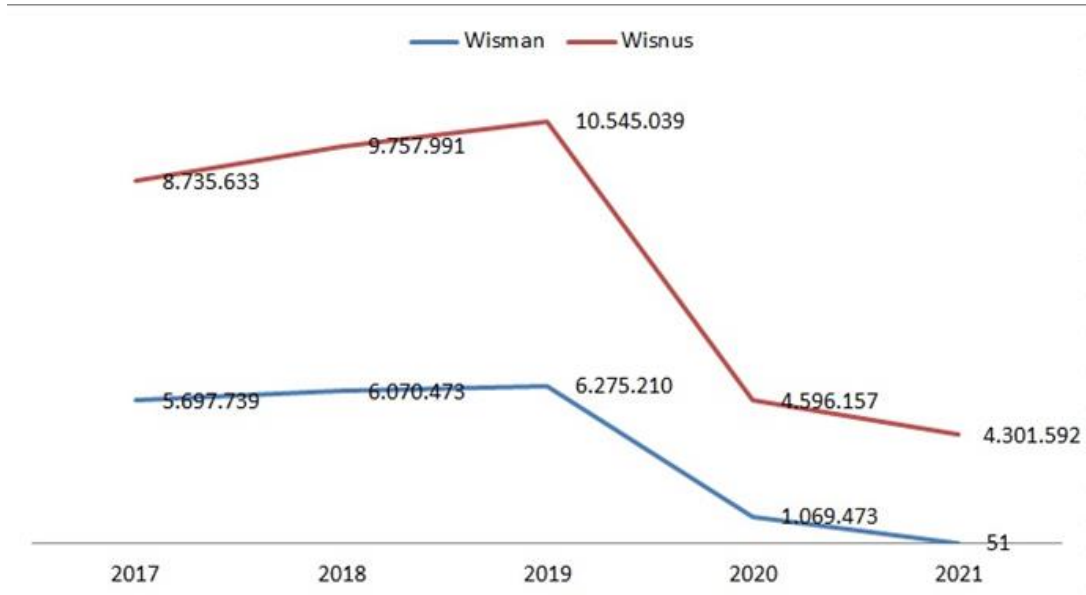


Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2022

2) Kunjungan Wisatawan

Selama kurun waktu 2017 sampai 2021, jumlah kunjungan wisatawan nusantara lebih banyak dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 10.545.039 wisatawan. Jumlah wisatawan mancanegara tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 6.275.210 wisatawan.

Gambar 2.144 Tingkat Kunjungan Wisatawan ke Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali & Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.62 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Langsung Menuju Bali Tahun 2017-2021

Asal Negara	2017	2018	2019	2020	2021
CHINESE	1.385.850	1.361.512	1.183.991	117.209	10
AUSTRALIAN	1.094.974	1.169.215	1.247.387	222.379	3
INDIAN	272.761	353.894	372.029	67.367	0
JAPANESE	252.998	261.666	257.220	48.260	16
BRITISH	243.827	243.827	287.258	46.528	0
AMERICAN	191.106	320.783	415.262	46.935	9
FRENCH	177.864	177.864	208.975	29.311	0
GERMAN	177.184	177.184	197.478	28.941	0
SOUTH KOREAN	174.842	143.581	212.846	42.498	0
MALAYSIAN	170.459	194.760	184.892	30.929	0

Asal Negara	2017	2018	2019	2020	2021
TAIWANESE	129.921	106.058	107.366	18.491	0
SINGAPOREAN	125.934	144.549	163.377	22.600	1
DUTCH	102.235	102.235	108429	22.055	0
RUSSIAN	94.898	94.898	143.238	56.603	3
NEW ZEALAND	86.463	111.967	132.284	16.561	0
CANADIAN	63.385	63.385	73.727	16.369	0
PHILIPINE	57.826	88.344	106.902	16.356	8
ITALIAN	50.045	50.045	56.374	7.249	0
SPAIN	44.690	44.690	56.431	7.727	0
THAILAND	42.070	47.367	61.083	7.953	0
Jumlah	4.939.332	5.257.824	5.576.549	872.321	50
Negara Lain	758.407	812.649	698.661	197.152	1
Total Kunjungan	5.697.739	6.070.473	6.275.210	1.069.473	51

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.63 Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2017-2021

Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	658.308	743.456	793.527	879.702	282.248
Februari	520.462	655.719	692.113	721.105	240.608
Maret	618.834	762.622	787.616	567.452	305.579
April	705.710	777.287	795.997	175.120	330.593
Mei	646.467	682.521	656.082	101.948	363.959
Juni	659.718	1.156.151	1.287.877	137.395	498.852
Juli	890.368	906.347	935.930	229.112	166.718
Agustus	790.323	770.364	925.360	355.732	202.187
September	832.026	774.144	812.003	283.349	298.950

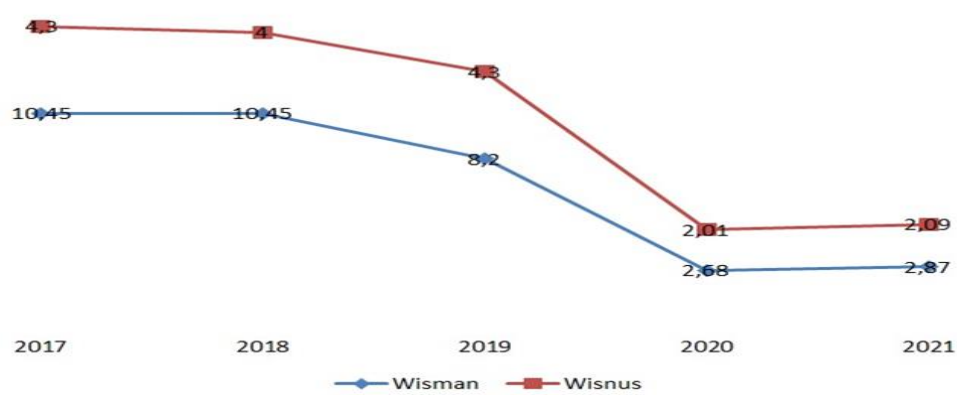
Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
Oktober	732.720	762.124	853.007	337.304	468.826
November	741.649	806.397	852.626	425.097	513.482
Desember	939.048	960.859	1.152.901	382.841	629.590
TOTAL	8.735.633	9.757.991	10.545.039	4.596.157	4.301.592

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2022

3) Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara sebesar 10,45 hari pada tahun 2017 dan 2018. Namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 berturut-turut sebesar 8,20 hari dan 2,68 hari, dan mengalami sedikit pertumbuhan pada tahun 2021 menjadi 2,87 hari. Pandemi COVID-19 menjadi alasan turunya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Provinsi Bali. Sedangkan rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara pada tahun 2017 adalah sebesar 4,30 hari turun menjadi 4,00 hari pada tahun 2018, kemudian kembali menjadi 4,30 hari pada tahun 2019 tetapi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi 2,01 hari. Hal yang sama juga disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Dan untuk tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,09 hari, angka tersebut menggambarkan masih belum pulih dibandingkan sebelum Pandemi COVID-19.

Gambar 2.145 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

4) Jumlah dan Jenis Akomodasi Pariwisata

Jumlah akomodasi pariwisata di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2017-2020 namun menurun pada tahun 2021. Pada tahun 2017 tercatat jumlah akomodasi di Provinsi Bali adalah sebanyak 4.281 yang terbagi menjadi hotel bintang sebanyak 222, hotel melati sebanyak 1.517 dan pondok wisata sebanyak 2.542. Pada tahun 2021 jumlah akomodasi di Provinsi Bali menjadi 2.698 yang terdiri dari hotel bintang sebanyak 406, hotel melati sebanyak 1.848 dan pondok wisata sebanyak 444. Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah akomodasi sebanyak 1.329 selama kurun waktu tahun 2017-2020 dan menurun 2.912 tahun 2021. Peningkatan terbesar adalah pada hotel berbintang yaitu meningkat sebanyak 140, dan penurunan terbesar adalah pada pondok wisata yaitu menurun sebanyak 2.803

Tabel 2.64 Jumlah dan Jenis Akomodasi Pariwisata

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Badung					
1. Hotel Bintang	157	156	156	157	299
2. Hotel Melati	406	406	405	426	458
3. Pondok Wisata	716	716	716	759	70
Bangli					
1. Hotel Bintang	-	-	-	-	-
2. Hotel Melati	6	26	45	45	45
3. Pondok Wisata	22	26	32	33	1
Buleleng					
1. Hotel Bintang	11	20	20	20	20
2. Hotel Melati	187	194	194	194	178
3. Pondok Wisata	263	320	322	322	14
Denpasar					
1. Hotel Bintang	26	34	47	47	47
2. Hotel Melati	214	214	224	229	214
3. Pondok Wisata	72	72	88	98	10
Gianyar					

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1. Hotel Bintang	14	23	29	29	28
2. Hotel Melati	199	297	304	365	282
3. Pondok Wisata	1079	1310	1302	1387	74
Jembrana					
1. Hotel Bintang	-	-	-	-	-
2. Hotel Melati	63	67	80	81	72
3. Pondok Wisata	21	21	53	55	8
Karangasem					
1. Hotel Bintang	9	10	10	10	9
2. Hotel Melati	187	244	308	308	238
3. Pondok Wisata	224	294	372	372	63
Klungkung					
1. Hotel Bintang	1	1	1	1	1
2. Hotel Melati	181	249	369	371	292
3. Pondok Wisata	15	16	16	16	84
Tabanan					
1. Hotel Bintang	4	4	2	2	2
2. Hotel Melati	74	74	76	78	69
3. Pondok Wisata	130	130	202	205	120
Prov. Bali					
1. Hotel Bintang	222	248	265	266	406
2. Hotel Melati	1517	1771	2005	2097	1848
3. Pondok Wisata	2542	2905	3103	3247	444

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2022

5) Jumlah Restoran dan Bar

Jumlah restoran dan rumah makan di Provinsi Bali pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3.868 meningkat sebanyak 1.617 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Tabel dibawah menjelaskan bahwa jumlah restoran dan rumah makan terbanyak pada tahun 2021 ada di Kabupaten Gianyar yaitu sebanyak 1.053 meningkat dari tahun 2017 sebanyak 548. Kabupaten yang memiliki jumlah restoran paling sedikit adalah Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 14 pada tahun 2021 menurun dari tahun 2017 sebanyak 16.

Tabel 2.65 Jumlah Restoran dan Rumah Makan

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Badung	823	823	823	823	728
2.	Bangli	30	36	44	47	14
3.	Buleleng	173	200	200	200	548
4.	Denpasar	455	455	582	604	604
5.	Gianyar	505	622	612	952	1.053
6.	Jembrana	76	76	134	136	158
7.	Karangasem	118	120	146	146	269
8.	Klungkung	31	146	243	245	375
9	Tabanan	40	40	80	80	119
Prov. Bali		2.251	2.518	2.864	3.233	3.868

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2022

Jumlah Bar di Provinsi Bali tercatat sebanyak 591 pada tahun 2021 meningkat sebanyak 165 dari tahun 2017. Berdasarkan tabel di bawah, jumlah Bar terbanyak ada di Kota Denpasar pada tahun 2021 yaitu sebanyak 155 meningkat sebanyak 22 buah Bar dari tahun 2017. Kabupaten yang memiliki Bar paling sedikit yaitu Kabupaten Bangli sebanyak 2 buah bar

Tabel 2.66 Jumlah Bar di Provinsi Bali

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Badung	-	-	-	-	59
2.	Bangli	-	-	-	-	2
3.	Buleleng	81	101	101	101	101
4.	Denpasar	133	133	152	155	155
5.	Gianyar	127	133	133	142	142
6.	Jembrana	6	6	6	6	6
7.	Karangasem	62	81	97	97	97
8.	Klungkung	17	17	17	21	21

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
9	Tabanan	-		-	-	8
Provinsi Bali		426	471	506	522	591

Sumber Data: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2022

6) Jumlah Pramuwisata

Jumlah pramuwisata di Provinsi Bali pada tahun 2021 adalah sebanyak 11.096 orang dengan spesialisasi dalam bahasa Inggris adalah jumlah terbanyak yaitu 3.396 orang. Sedangkan jumlah pramuwisata dengan spesialisasi bahasa terendah adalah bahasa Arab yaitu sebanyak 4 orang. Jumlah pramuwisata ini meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak 9.740 orang.

Tabel 2.67 Jumlah Pramuwisata di Provinsi Bali

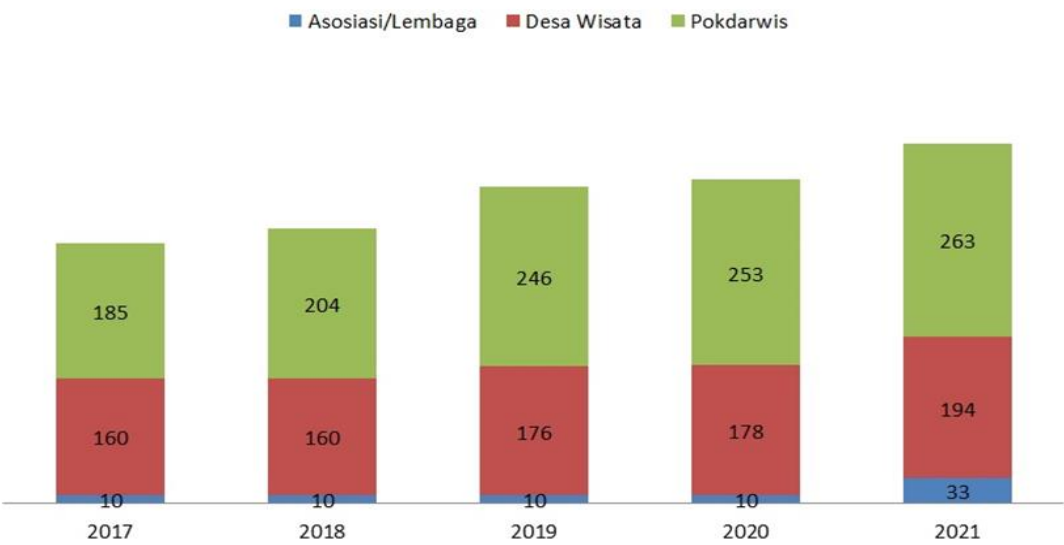
No	Spesialisasi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Inggris	2.980	3.166	3.227	3.396	3.396
2	Jepang	2.269	2.295	2.306	2.322	2.322
3	Italia	280	282	283	284	284
4	Belanda	126	130	131	133	133
5	Jerman	494	510	521	531	531
6	Spanyol	166	176	187	196	196
7	Perancis	372	400	417	458	458
8	Mandarin	1.585	1.857	1.932	1.989	1.990
9	Korea	776	797	802	841	841
10	Swedia	3	3	3	3	3
11	Arab	1	1	1	1	1
12	Rusia	129	146	148	155	155
13	Indonesia	553	692	727	779	779
14	Denmark	6	7	7	7	7
Total		9.740	10.462	10.692	11.095	11.096

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2022

7) Jumlah Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata, dan Lembaga Pariwisata

Jumlah kelompok sadar wisata cenderung meningkat dari 185 kelompok pada tahun 2017 menjadi 263 kelompok pada tahun 2021. Jumlah desa wisata juga mengalami peningkatan dari 160 desa wisata pada tahun 2017 menjadi 194 desa wisata pada tahun 2021. Jumlah asosiasi/lembaga pariwisata selama lima tahun terakhir sebesar 33 lembaga.

Gambar 2.146 Jumlah Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata, dan Lembaga Pariwisata di Provinsi Bali



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2022

8) PAD Sektor Pariwisata

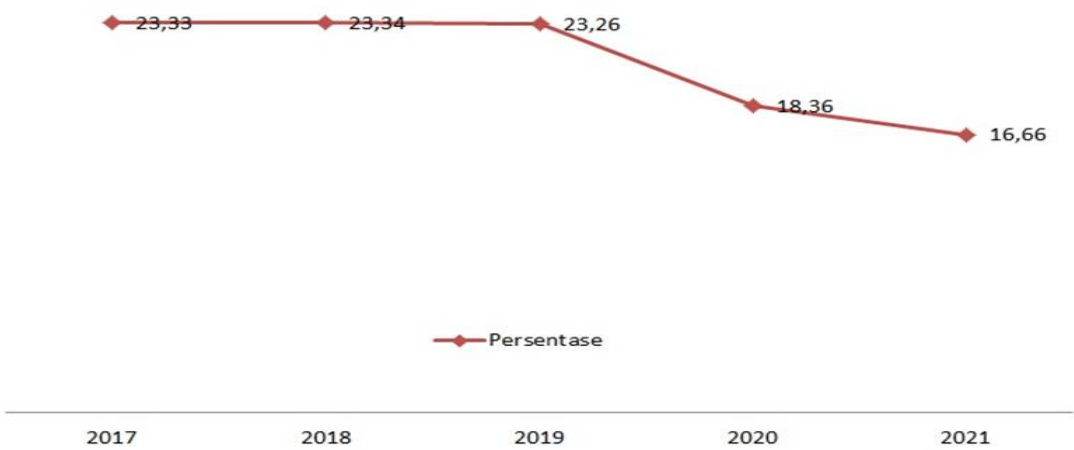
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan untuk memungut pajak sektor pariwisata (Pajak Hotel dan Restoran/PHR) dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota melalui Badan Pendapatan Daerah.

9) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Pariwisata menyumbangkan pendapatan terbesar di Provinsi Bali. Pada tahun 2021 tercatat besarnya kontribusi sektor ini terhadap total PDRB Provinsi Bali adalah sebesar 16,66 persen. Angka ini menurun dari data tahun 2017 sebesar 23,33 persen, dan mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan pada tahun 2018

sebesar 23,34 persen. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut sebesar 23,26 persen, dan 16,66 persen. Ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan pada kualitas pariwisata di Bali yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Selain itu faktor dominan yang menyebabkan penurunan ini di tahun 2020 dan 2021 adalah adanya Pandemi COVID-19.

Gambar 2.147 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB



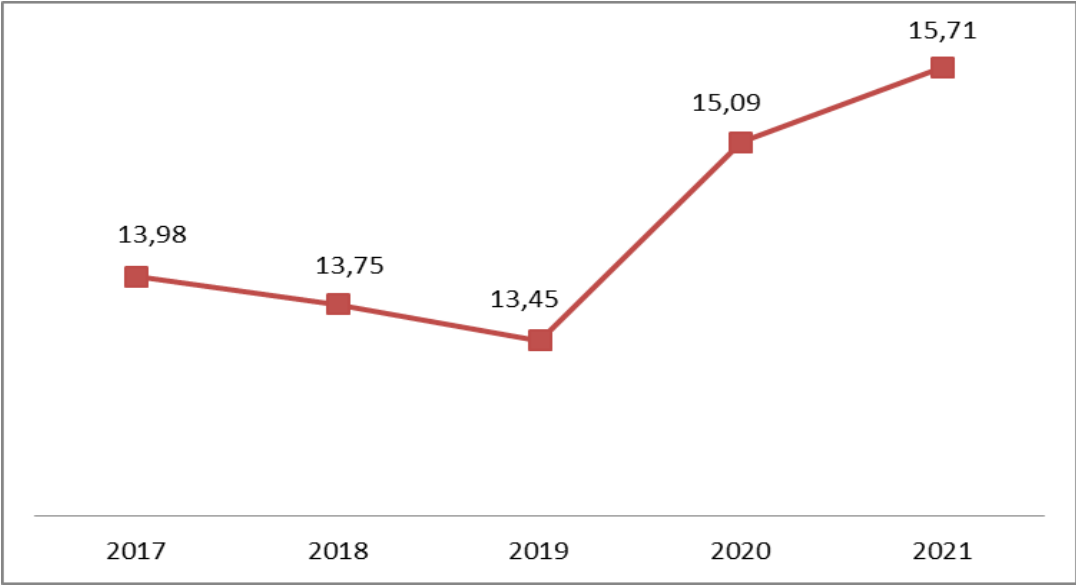
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

B. Pertanian

1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2017 sebesar 13.98 % dan cenderung menurun menjadi 13,75% sampai 13.45 pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya tahun 2020 meningkat lagi menjadi 15,09% dan 15,71 di tahun 2021. Secara keseluruhan terjadi peningkatan kontribusi PDRB sektor pertanian dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mulai memberikan harapan untuk menjadi sektor yang bisa diandalkan oleh masyarakat Bali. Meningkatnya kontribusi pertanian disebabkan oleh transformasi tenaga kerja dari sektor non pertanian ke pertanian akibat pandemi COVID-19.

Gambar 2.148 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB di Provinsi Bali

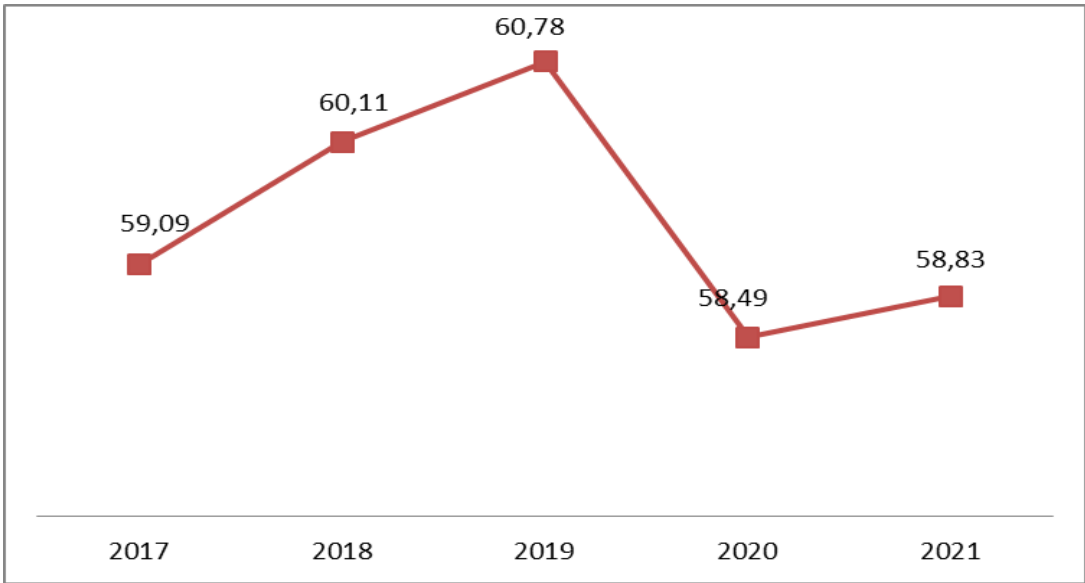


Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

2) Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai 2019. Tercatat pada tahun 2017 jumlah produksi padi mencapai 59,09 ton per hektar selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 60,11 ton per hektar. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017,2018 dan 2019 berturut-turut sebesar 59,090, 60,11 dan 60,78 ton per hektar produktivitas padi di Provinsi Bali akhirnya mengalami penurunan terbesar justru di tahun 2020 yaitu 58,49 ton per hektar. Disebabkan karena musim kemarau panjang di tahun 2019 yang seharusnya musim tanam musim penghujan di bulan Oktober, November dan Desember ternyata tidak terjadi hujan sehingga mempengaruhi luas panen di bulan Januari Pebruari dan Maret di tahun 2020 sehingga produktivitas turun. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 karena musim tanam sudah normal kembali.

Gambar 2.149 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

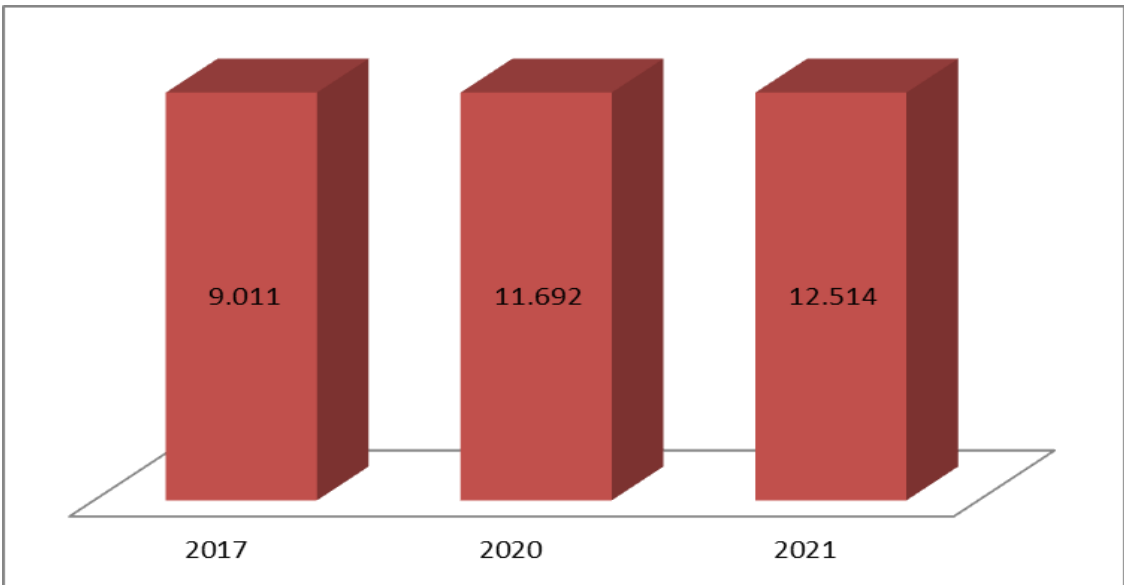


Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

3) Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani pada tahun 2020 sebesar 11.692 meningkat dari tahun 2017 yaitu sebesar 9,011 dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 12.514 kelompok tani.

Gambar 2.150 Cakupan Bina Kelompok Petani



Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

C. **Peternakan**

1) Kelompok Ternak

Jumlah kelompok ternak di Provinsi Bali pada tahun 2019 adalah sebanyak 56 meningkat menjadi 254, dan 263 pada tahun

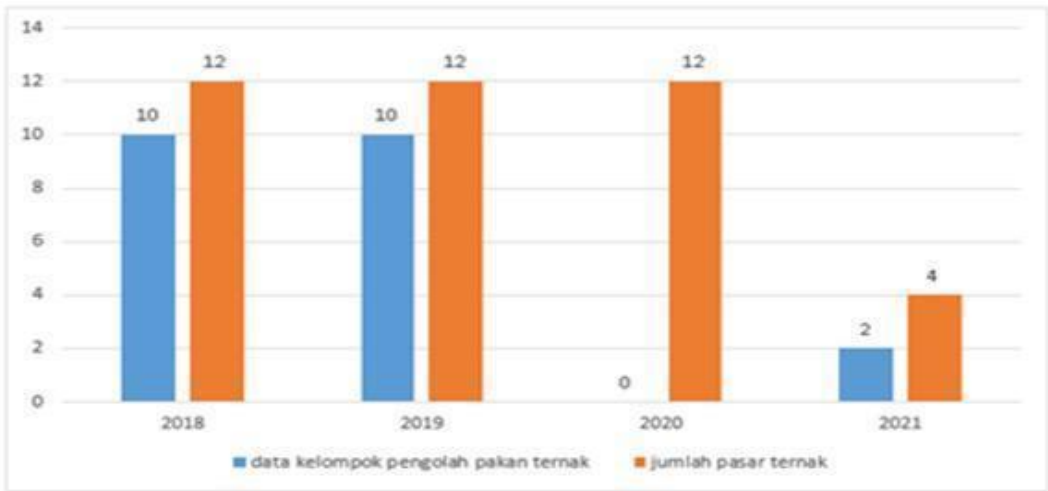
2020 dan 2021. Jumlah kelompok yang paling banyak di Provinsi Bali yaitu kelompok ternak sapi, tahun 2021 meningkat yaitu sebanyak 263 kelompok. Kelompok pengolah pakan ternak cukup stabil di angka 10 sampai dengan tahun 2018 dan menjadi nol pada tahun 2020. Sedangkan jumlah pasar ternak stabil pada angka 12 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Namun turun di tahun 2021 menjadi 4 pasar ternak.

Gambar 2.151 Jumlah Kelompok Ternak Pembibitan



Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.152 Jumlah Kelompok Pengolah Pakan Ternak, Sarana Prasarana Ternak, dan Pasar Ternak



Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

2) Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Hasil Ternak

Ketersediaan daging cenderung menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu 188.090 ton pada tahun 2016 menjadi 159.132 pada tahun 2020. Sedangkan jika dilihat kebutuhan produk hasil ternak, kebutuhan daging pada tahun 2016 adalah sebesar 178.685 ton dan pada tahun 2020 adalah sebesar 151.175 ton. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan daging masih lebih kecil dari pada produksi untuk tahun 2017-2021.

Tabel 2.68 Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Hasil Ternak Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Jenis	Kebutuhan (Ton)	Ketersediaan (Ton)
1	2017	Daging	166,577.71	175,344.96
		Telur	37,444.67	39,428.46
2	2018	Daging	137,846.64	146,100.67
		Telur	31,133.00	33,766.82
3	2019	Daging	166,585.45	175,353.11
		Telur	17,915.03	18,862.61
4	2020	Daging	149,159.73	157,010.23
		Telur	70,627.84	77,741.91
5	2021	Daging	176,500.04	185789.53
		Telur	56,666.93	63,288.45

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali

3) Rumah Potong Hewan dan Unggas

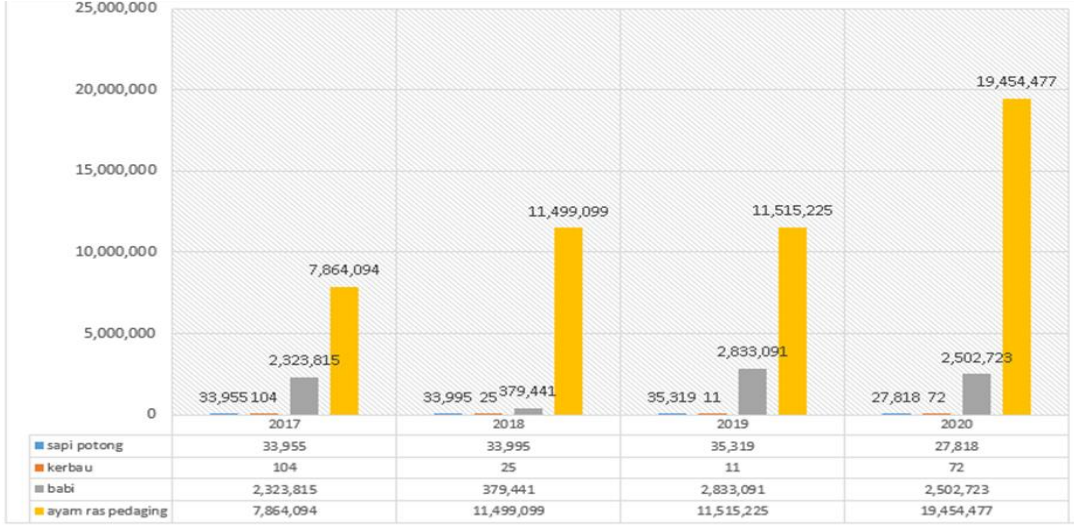
Rumah potong hewan selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan jumlah sebanyak 1 buah yaitu 10 buah pada tahun 2017 menjadi 9 buah pada tahun 2021. Sedangkan untuk rumah potong unggas berjumlah 6 buah pada tahun 2020 bertambah sebanyak 1 buah jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah ternak yang paling banyak dipotong yaitu jenis ayam ras pedaging sebanyak 7.864.094 ekor dan yang paling sedikit yaitu kerbau hanya 104 ekor. Sedangkan pada tahun 2021 jenis ayam ras pedaging yang dipotong adalah sebanyak 19.454.477 ekor dan ada 3 jenis ternak yang tidak dipotong yaitu ayam buras, ayam ras petelur dan itik.

Gambar 2.153 Rumah Potong Hewan dan Unggas Tahun 2017-2021



Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.154 Jumlah Pemotongan Ternak Tahun 2021



Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

4) Jumlah Kasus Penyakit Hewan

Penyakit hewan yang paling banyak terjadi pada tahun 2021 yaitu *Rabies* yaitu sebanyak 165 kasus.

Tabel 2.69 Jumlah Penyakit Hewan

Penyakit	2017	2018	2019	2020	2021
Septicaemia Epizootica (SE)	217	135	149	56	338
Penyakit Jembrana (JA)	-	13	13	-	1

Penyakit	2017	2018	2019	2020	2021
Bali Ziekte (BZ)	367	534	724	450	-
ORG	-	-	-	-	-
Scabies (SC)	16,881	9.822	28.992	12.803	-
New Castle Disease (ND)	214	202	1.081	424	-
Snot	-	-	-	-	-
Kesus Mencret Menular (DGS)	99	33	7	8	-
Rabies	92	149	230	100	165
Bophin Ephermal Fever (BEF)	4,053	3.500	7.696	10.943	-
Collibacilosis (CB)	34,493	1.972	53.019	15.640	-
Pink Eye	-	-	-	-	-
Chronic Respiratory Disease (CRD)	-	-	-	-	-
Hog Cholera (HC)	185	140	116	639	-
Avian Influenza	4	1	2	-	-

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

5) Pemasukan Ternak Besar dan Ternak Kecil ke Bali

Pemasukan ternak besar dan kecil ke Provinsi Bali yang paling banyak yaitu untuk kambing potong. Pemasukan kambing potong mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 52.321 menjadi 425 pada tahun 2021. Sedangkan untuk pemasukan bahan asal ternak, komoditas terbesar pada tahun 2017 adalah susu sebanyak 3.814.940 liter yang mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021 menjadi 693116 liter. Daging sapi beku pada tahun 2017 tercatat masuk ke Provinsi Bali sebanyak 1.382.533 mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 1.927.314.

Tabel 2.70 Pemasukan Ternak Besar dan Ternak Kecil ke Bali

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Babi Potong	-	-	-	-	-
Kambing Potong	52.321	330	-	375	425

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Babi Bibit	-	-	-	72	-
Kambing Bibit	42	-	-	-	-
Kerbau Potong	-	-	-	-	-

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.71 Pemasukan Bahan Asal Ternak ke Bali (kg)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Daging Sapi Beku	1,382,533	980.295	451.200	1.290.550	1.927.314
Daging Sapi Beku Untuk Industri	-	-	-	-	-
Daging Kambing/Daging Beku	127,425	183.200	151.700	70.000	-
Daging Ayam Beku	309,3	283.250	135.000	510.000	672.500
Daging Olahan	1,530,479	-	368.672	1.538.528	1.965.118
Daging Babi Beku	-	20.000	-	-	-
Daging Kalkun Beku	-	-	-	-	-
Daging Itik	-	321.000	41.000	78.000	3.450
Mentega	58,8	69.400	42.000	-	-
Cream	-	-	-	-	-
Susu (Liter)	3,626,200	2.366.500	196.000	516.000	693.116
Yogurt	189,7	123.600	5.000	130.125	133.125
Cheese	408,835	830.250	617.500	242.510	467.950

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

6) Pengeluaran Ternak dari Bali

Pengeluaran ternak dari Bali terbesar pada tahun 2017 yaitu ayam bibit/DOC sebanyak 19.779.200 ekor, jumlah tersebut menurun pada tahun selanjutnya menjadi 12.248.500 selanjutnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 41.527.620. Sedangkan pengeluaran bahan asal ternak yang terbesar pada tahun 2017 yaitu telur konsumsi sebanyak 157.153.980 butir menurun pada tahun selanjutnya menjadi 59.750.000 butir. Selanjutnya terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020

menjadi 60.830.000 butir. Kemudian di Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 95.264.240 butir.

Tabel 2.72 Pengeluaran Ternak dari Bali

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi Potong	52.513	47.100	54.375	53.449	56.715
Sapi Bibit	280	40	141	368	94
Babi Potong	3.098	6.710	-	3.334	23.429
Ayam Afkir	380.240	221.151	159.656	398.118	777.268
Babi Bibit	-	196	-	-	-
DOC Jantan	53.400	314.000	-	1.170.000	-
Jumlah Ayam Bibit/DOC	19.779.200	12.248.500	3.774.845	5.335.000	41.527.620

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.73 Pengeluaran Bahan Asal Ternak dari Bali

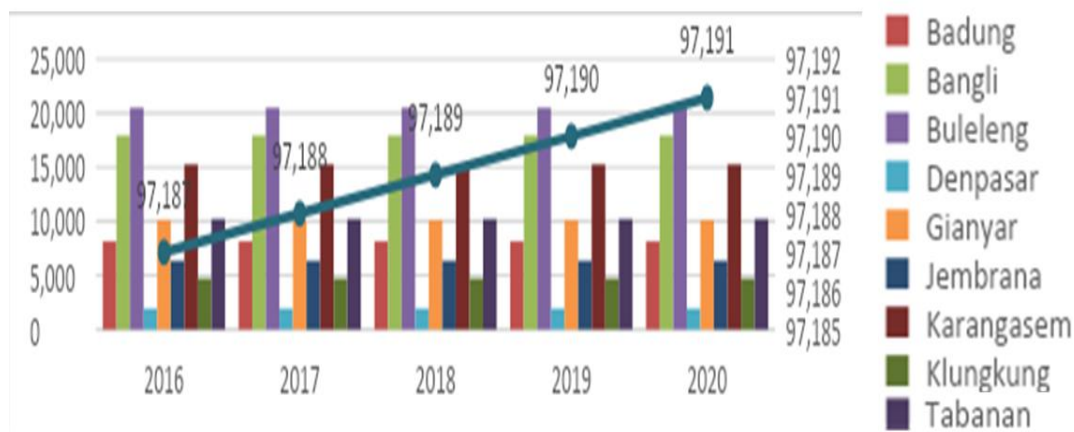
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Daging Sapi Beku (Kg)	63.553	52.830	-	68.910	36.689
Daging Sapi Olahan (Kg)	1.445.188	1.283.779	43.290	1.379.550	2.125.743
Daging Babi Beku (Kg)	644	951	-	-	117.950
Daging Ayam Beku (Kg)	803.688	441.750	20.000	721.530	963.550
Daging Olahan Babi (Kg)	1.583.906	964.364	76.250	924.960	999.950
Daging Ayam Olahan (Kg)	1.291.008	1.238.985	62.950	1.457.395	2.178.235
Telur Konsumsi (butir)	157.153.980	59.750.000	-	60.830.000	95.264.240
Keju (Kg)	92.975	35.150	-	200	-

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

7) Jumlah SDM Peternakan

Jumlah peternak terbanyak pada tahun 2017 ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 97.188. Sedangkan untuk jenis peternak yang paling banyak pada tahun 2017 adalah peternak sapi potong sebanyak 2.936 peternak. Jumlah peternak lain yaitu peternak kambing sebanyak 104 di tahun 2017 peternak dan peternak ayam ras pedaging sebanyak 202 peternak. Berdasarkan kelas kelompoknya peternak sapi memiliki kelas terbanyak dengan jumlah 2.936 pada tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 1.768 kelas pemula, 973 kelas lanjut, 180 kelas madya, dan 15 kelas utama.

Gambar 2.155 Jumlah Peternak



Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

Tabel 2.74 Kelas Kelompok Peternak

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi					
Pemula	1.768	1.768	1.768	1.768	664
Lanjut	973	973	973	973	263
Madya	180	180	180	180	62
Utama	15	15	15	15	6
Jumlah	2.936	2.936	2.936	2.936	
Kambing					
Pemula	74	74	74	74	60
Lanjut	26	26	26	26	16

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Madya	3	3	3	3	1
Utama	1	1	1	1	1
Jumlah	104	104	104	104	
Ayam Buras					
Pemula	89	89	89	89	10
Lanjut	75	75	75	75	5
Madya	28	28	28	28	2
Utama	10	10	10	10	0
Jumlah	202	202	202	202	

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

8) Situasi Harga dan Hasil Ternak

Harga hasil peternakan sangat bervariasi setiap tahunnya. Harga hasil peternakan dengan jelas dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 2.75 Pasar Hasil Peternakan

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
Sapi Potong Berat 375-400 kg	Kg/ Berat/ Hidup	43	43	42800	41875	-
Sapi Bibit Jantan Umur 2 Th	ekor	11.000.000	11.000.000	12.500.000	11.000.000	-
Sapi Bibit Betina Umur 2Th	ekor	8.500.000	8.500.000	10.000.000	7.520.000	-
Kerbau Umur 7 Bln	ekor	-				-
Kambing PE Berat 40 kg	ekor	-		2.500.000	2.100.000	-
Kambing PE Bibit Umur 4-5 Bln	ekor	-		2.500.000	1.175.000	-
Kambing Kacang Umur 6 Bln	ekor	-		800.000	750.000	-
Babi Potong Berat 100 Kg	Kg/ Berat/ Hidup	25	27.000	31.500	46	-
Babi Landrace Bibit Berat 12 Kg	Kg/ Berat/ Hidup	60	85.000	60.000	79	-

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
DOC Layer	ekor	5	5.300	6.000	15.500	10.245
DOC Broiler	ekor	5	5.500	6.000	7.750	7.434
DOD	ekor	6	5.200	5.200		-
Broiler Kg/BH	Kg/ Berat/ Hidup	22	24.000	21.500	25.350	21.797
Ayam Buras	ekor	55	60.000	60.000	53.050	-
Itik Bali Dewasa	ekor	55	55.000	40.000	57.825	-
Entog Betina	ekor	100	100.000	75.000	105.000	-
Entog Jantan	ekor	110	110.000	100.000	167.500	-
HASIL TERNAK						
Daging Ayam Broiler	Kg	34	34.000	34.000	41.500	37.102
Daging Ayam Buras	Kg	60	60.000	60.000	65.000	-
Daging Sapi	Kg	100	100.000	100.000	114.150	100.746
Daging Kambing	Kg	115	105.000	115.000	163.650	-
Daging Babi	Kg	55	55.000	65.000	86.650	87.679
Telur Ayam Ras	Butir	1	1.350	1.400	1.650	1.450
Telur Ayam Buras	Butir	2	2.000	2.000	1.875	2.194
Telur Itik	Butir	2	3.000	3.000	2.350	2.726

Sumber: Distan Pangan Provinsi Bali, 2022

D. Kehutanan

1) Luas Kawasan Hutan

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Peta Kawasan hutan di Provinsi Bali sesuai dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.8103/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi

Bali sampai dengan Tahun 2017 dengan luas 132.171,47 Ha, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, luas kawasan hutan di Provinsi Bali 132.171,247 Ha.

Tabel 2.76 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali

Kabupaten/ Kota	Fungsi Hutan								Jumlah
	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Yang Dapat Dikon- versi	Hutan Konservasi				
					Cagar Alam	Taman Nasio-nal	Taman Wisata Alam	Taman Hutan Raya	
Badung	1.127	-	-	170	-	-	14	424	1.734
Bangli	6.239	453	-	-	-	-	2.849	-	9.541
Buleleng	31.557	3.269	1.423	-	1.004	12.839	1.050	-	51.142
Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	735	735
Gianyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jembrana	34.069	2.742	590	-	-	6.188	-	-	43.589
Karangasem	13.996	196	-	-	-	-	-	-	14.192
Klungkung	805	244	-	-	-	-	-	-	1.049
Tabanan	8.896	-	-	-	746	-	549	-	10.190
Provinsi Bali	96.688	6.904	2.013	170	1.750	19.027	4.461	1.158	132.171

Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

Luas kawasan hutan 132,171 Ha terdiri atas Hutan Lindung (96.688 Ha), Hutan Produksi Terbatas (6.904 Ha), Hutan Produksi Tetap (2.013 Ha), Hutan Produksi yang dapat dikonversi (170 Ha), Cagar Alam (1.750 Ha), Taman Nasional (19.027 Ha), Taman Wisata (4.461 Ha) dan Taman Hutan Raya (1.158 Ha).

3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/ DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, maka luas lahan kritis di Provinsi Bali 46.895 Ha, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.77 Lahan Kritis di Provinsi Bali

No	Kabupaten / Kota	Lahan Kritis						
		Dalam Kawasan			Luar Kawasan Hutan			Total
		Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	
1	Badung	9	-	9	714	-	714	723
2	Bangli	3.208	300	3.508	5.858	-	5.858	9.366
3	Buleleng	2.941	-	2.941	9.798	-	9.798	12.739
4	Denpasar	-	-	-	-	-	-	-
5	Ginyar	-	-	-	343	-	343	343
6	Jembrana	109	-	109	361	-	361	470
7	Karangasem	2.181	1.771	3.952	14.486	208	14.694	18.646
8	Klungkung	1	-	1	886	5	891	892
9	Tabanan	354	-	354	3.362	-	3.362	3.716

No	Kabupaten / Kota	Lahan Kritis						
		Dalam Kawasan			Luar Kawasan Hutan			Total
		Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	
Total		8.803	2.071	10.874	35.808	213	36.021	46.895

Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

Lahan kritis di Provinsi Bali tersebar di Kabupaten se-Bali, dengan luas lahan kritis terbesar ada di Kabupaten Karangasem 18.646 Ha dan terendah di Kabupaten Gianyar 343 Ha.

Tabel 2.78 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan di Provinsi Bali

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Hutan (Ha)	132.528,22	132.528,22	132.171,47	136.827,05	136.827,05
2	Luas Hutan (Luar dan Dalam Kawasan) (Ha)	132.528,22	132.528,22	132.171,47	136.827,05	136.827,05
3	Luas Lahan Kritis (Ha)	46.895,12	42.220,12	37.595,12	33.120,12	32.770,12
4	Lahan yang direhabilitasi (Ha)	1.124,00	4.675,00	4.625,00	4.475,00	1.600,00
5	% Lahan yang direhabilitasi	2,40	11,07	12,30	13,51	4,88
	Jumlah Luas Rehabilitasi	3.840,75	8.515,75	13.140,75	17.615,75	19.215,75

Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media

pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS).

3) Perhutanan Sosial

Tabel 2.79 Perhutanan Sosial di Provinsi Bali

No	Kabupaten / Kota	Hutan Desa		HKM		HTR		Kemitraan		Hutan Adat	
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
1	Badung										
2	Bangli	4,00	546,00					18,00	804,32	3,00	350,00
3	Buleleng	24,00	9.450,00	4,00	150,00	1,00	117,00	10,00	637,90		
4	Denpasar										
5	Ginyar										
6	Jembrana	10,00	2.714,00	10,00	1.974,00			12,00	1.026,35		
7	Karangasem	5,00	1.387,00					8,00	711,30	1,00	591,28
8	Klungkung							2,00	175,00		
9	Tabanan							6,00	947,23	2,00	30,00
Total		43,00	14.097,00	14,00	2.124,00	1,00	117,00	56,00	4.302,10	6,00	971,28

Sumber: DKLH Provinsi Bali, 2022

Luasan Perhutanan Sosial di Provinsi Bali 21.671,10 Ha, dengan Persetujuan 120 Perhutanan Sosial dan jumlah penduduk mencapai 85.528

E. Energi Sumber Daya Mineral

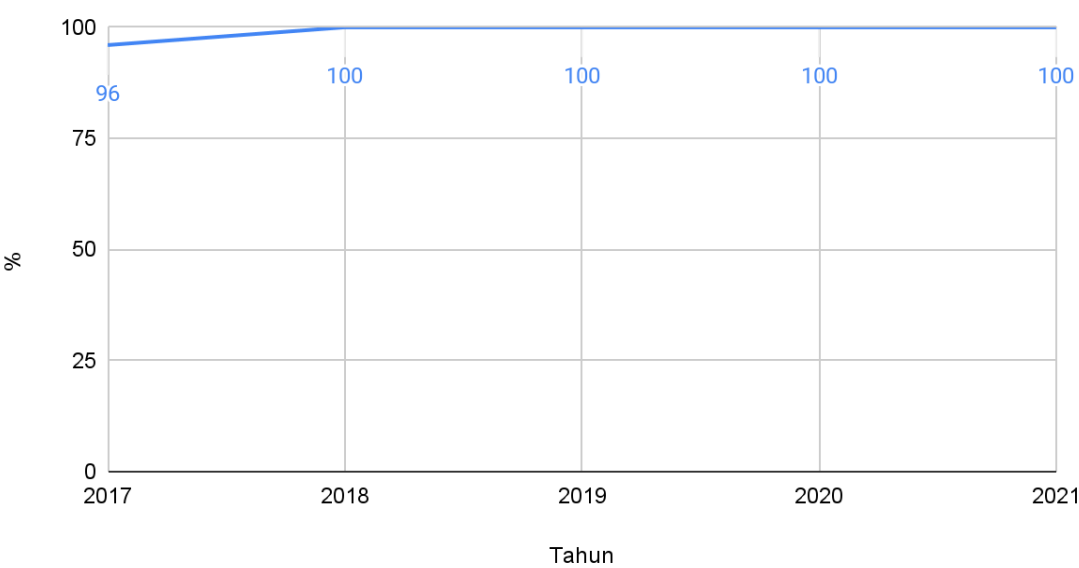
1) Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

Persentase rumah tangga pengguna listrik adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan

baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik di Provinsi Bali berdasarkan informasi dari PLN, pada tahun 2017 adalah sebesar 96%, pada tahun 2018 telah mencapai 100%, sampai dengan tahun 2021 masih tetap dapat tercapai 100%, dan kedepannya diharapkan dapat tetap terjaga sebesar 100 % meskipun ada penambahan jumlah rumah tangga.

Gambar 2.156 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik



Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

2) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik merupakan perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan daya listrik di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakatnya. Daya listrik terpasang merupakan jumlah daya listrik yang berasal dari pembangkit listrik yang telah terpasang, sedangkan kebutuhan daya listrik direpresentasikan melalui beban puncak pemakaian listrik dalam suatu jangka waktu tertentu di suatu wilayah.

Rasio ketersediaan daya listrik di provinsi Bali, pada tahun 2017 mencapai 96%, pada tahun 2018 dan 2019 menurun menjadi 80% karena adanya pengurangan daya oleh PT PLN Persero. Pada tahun 2020 dan 2021, ketersediaan daya listrik di Bali kembali 100%

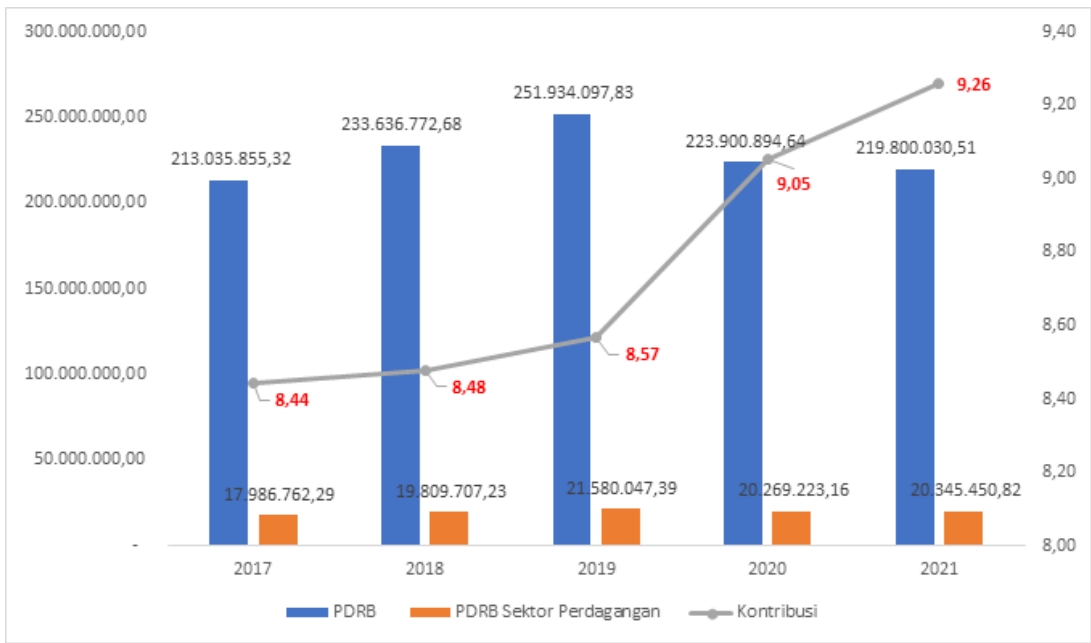
walaupun kebutuhan listrik menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 980 MW, karena adanya Pandemi COVID-19.

F. Perdagangan

1) Nilai Perdagangan

Nilai total PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (juta rupiah) pada tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh kondisi ekonomi Provinsi Bali yang masuk dalam tahap resesi (tumbuh negatif secara berturut-turut dari triwulan I sampai dengan triwulan IV) pada tahun 2021. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi di Provinsi Bali karena sektor utama penggerak ekonomi di Provinsi Bali, yaitu sektor pariwisata sama sekali tidak berjalan. Kebijakan pembatasan pergerakan baik itu secara nasional dan internasional menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang sangat luar biasa, yang menyebabkan subsektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menurun secara drastis. Selain itu pembatasan pergerakan juga terjadi secara lokal yang menyebabkan aktivitas ekonomi lainnya juga mengalami penurunan.

Gambar 2.157 Nilai Perdagangan Provinsi bali Tahun 2017-2021

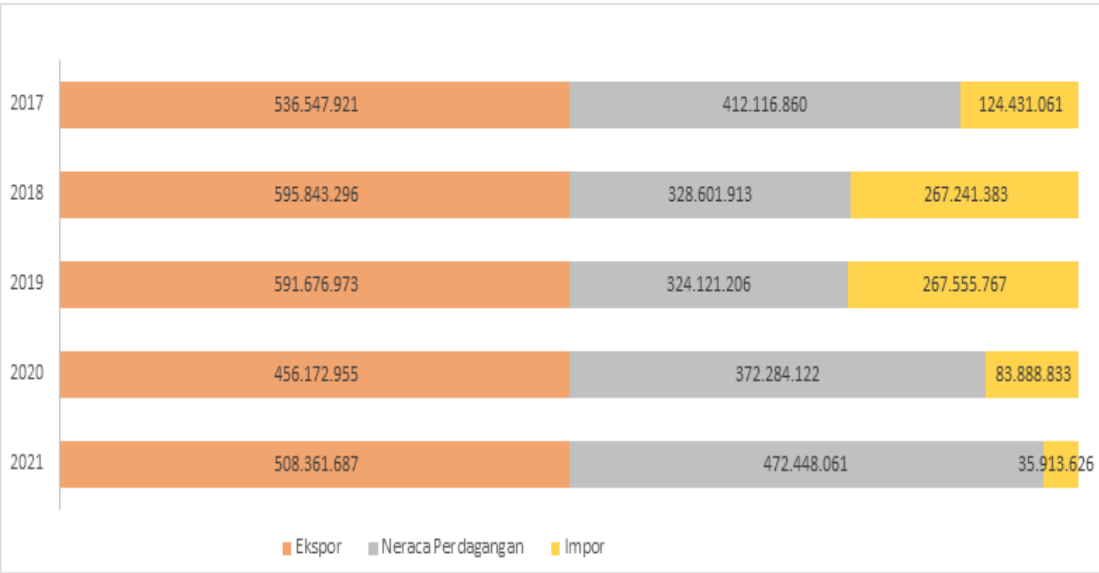


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor Provinsi Bali pada tahun 2017 adalah 536 Juta USD meningkat menjadi 508 Juta USD pada tahun 2021, sedangkan nilai Impor dari tahun 2017 adalah 124 Juta USD meningkat menjadi 35 Juta USD. menurunnya nilai Ekspor pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh menurunnya produksi akibat dari Pandemi COVID-19.

Gambar 2.158 Nilai Ekspor dan Impor di Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

3) Jumlah izin Usaha Perdagangan Luar Negeri

Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri cenderung meningkat selama kurun waktu 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 jumlah izin sebanyak 426 dan pada tahun 2021 sebanyak 593.

Tabel 2.80 Jumlah izin Usaha Perdagangan Luar Negeri

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah izin Usaha Perdagangan Luar Negeri	426	466	513	558	593

Sumber: Disperindag Provinsi Bali, 2022

4) Kinerja Perlindungan Konsumen

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki badan penyelesaian sengketa konsumen selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ada 4 Lembaga tetapi telah tidak melakukan operasional

sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana kewenangan penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan kewenangan provinsi pada tahun 2021 pemerintah provinsi bali menetapkan operasional BPSK Kota Denpasar sebagai pilot project dengan melakukan pemilihan anggota BPSK dan sekretariat BPSK Periode Tahun 2021-2026. Sedangkan untuk lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebanyak 7 selama kurun waktu 2017-2021. Selama lima tahun terakhir, penyelesaian sengketa konsumen telah mencapai 100 persen (seluruh pengaduan diselesaikan melalui mediasi).

Tabel 2.81 Kinerja Perlindungan Konsumen

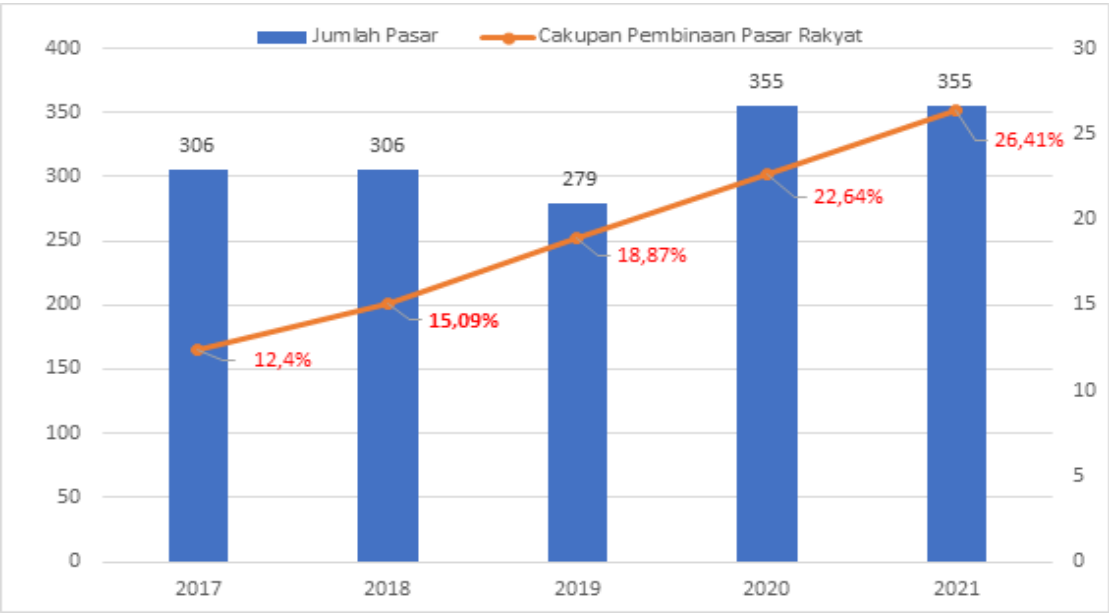
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kab/Kota yang memiliki Badan Penyelesaian sengketa konsumen/BPSK	4	4	4	4	4
Jumlah Kab/Kota yang memiliki lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat/LPKSM	7	7	7	7	7
Persentase penyelesaian sengketa konsumen melalui sistem pengawasan perlindungan konsumen (%)	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Jenis Barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ)	14	15	10	10	10
Persentase penyidikan terhadap hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidik (%)	-	-	-	-	-
Persentase SPBU yang telah dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota

Sumber: Disperindag Provinsi Bali, 2022

5) Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat

Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat Provinsi Bali pada tahun 2017 adalah sebanyak 306 pasar atau sebesar 12,4 persen (dari jumlah pasar sebanyak 306 Pasar Rakyat). Selanjutnya meningkat pada tahun 2021 sebesar 355 Pasar atau sebanyak 26,41 persen.

Gambar 2.159 Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat



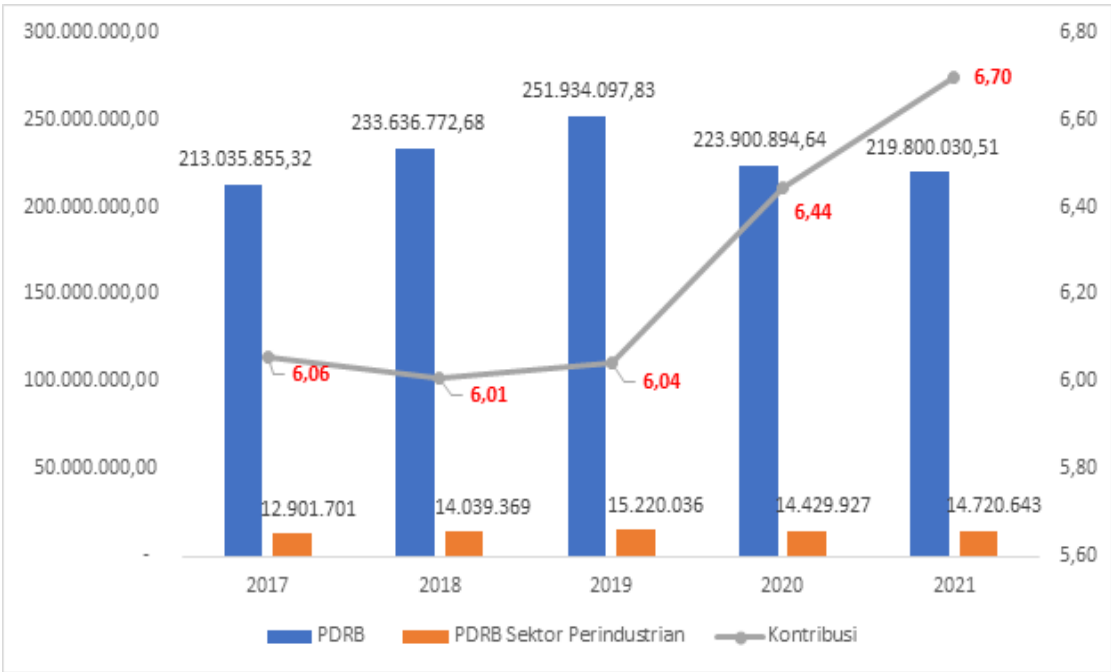
Sumber: Disperindag Provinsi Bali, 2022

G. Perindustrian

1) Nilai Perindustrian

Nilai sektor perindustrian ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) mengalami peningkatan dari 12.901.701 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi 14.720.643 juta rupiah pada tahun 2021. Sektor perindustrian berkontribusi sebesar 6,70 persen pada tahun 2021 terhadap pembentukan PDRB. Kontribusi tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,44 persen.

Gambar 2.160 Nilai Perindustrian

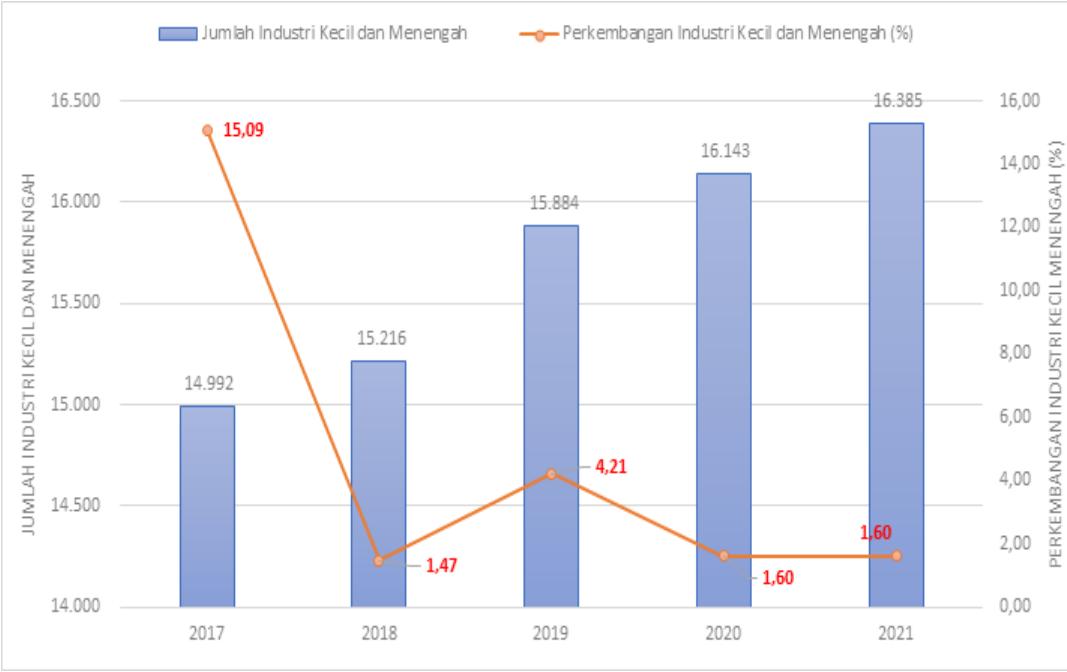


Sumber: BPS Provinsi Provinsi Bali, 2022

2) Jumlah Industri

Jumlah industri kecil dan menengah mengalami peningkatan dari 14.992 unit usaha pada tahun 2017 menjadi 15.216 unit usaha pada tahun 2018 dan 16.385 pada tahun 2021. Ini mengindikasikan bahwa jumlah industri di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Tercatat pertumbuhan industri kecil dan menengah mencapai di Provinsi Bali pada tahun 2017 adalah sebesar 15,09 persen, menurun secara signifikan pada tahun 2018 menjadi 1,47 persen. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 4,1 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,60 persen dan pada tahun 2021 stagnan pada 1,60 persen.

Gambar 2.161 Jumlah Industri Kecil dan Menengah

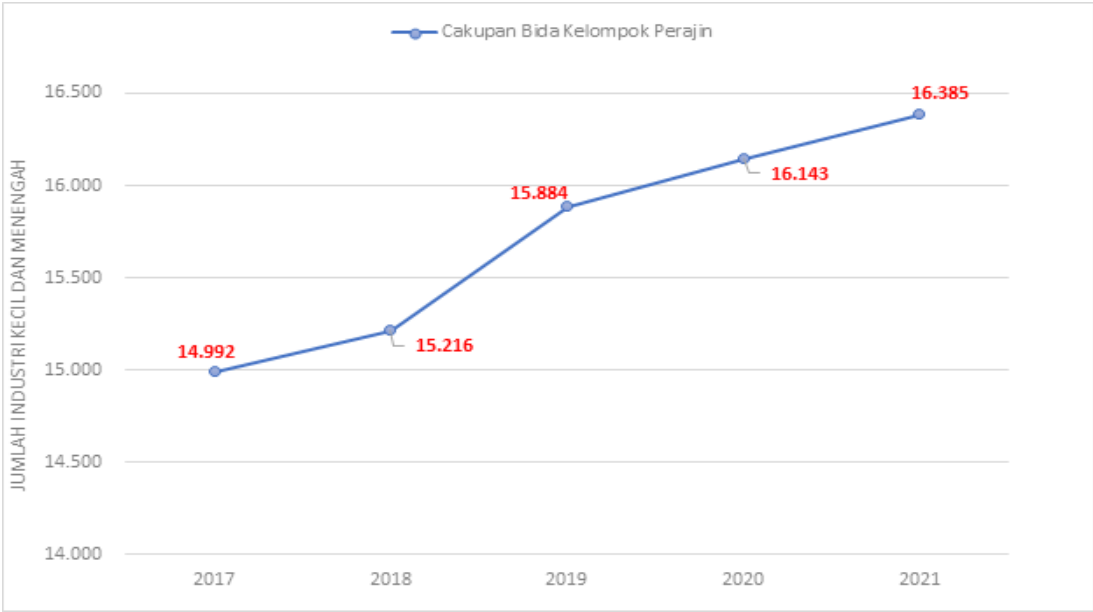


Sumber: Disperindag Provinsi Bali, 2022

3) Cakupan Bina Perajin

Cakupan bina Perajin pada tahun 2017 adalah sebesar 14.992 perajin di Provinsi Bali. Angka tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 15.216 pada tahun 2018, 15.884 pada tahun 2019, 16.143 pada tahun 2020 dan 16.385 Pada Tahun 2021.

Gambar 2.162 Cakupan Bina Perajin Tahun 2017-2021



Sumber: Disperindag Provinsi Bali, 2022

H. Transmigrasi

1) Capaian Pengiriman Transmigrasi

Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Undang-undang ketransmigrasian (UU Nomor 15 Tahun 1997) mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat. Pembangunan Nasional berbasis kewilayahan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar provinsi dalam satu pulau dan antar pulau di bidang ekonomi, sosial budaya serta sarana dan prasarana. Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diuraikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan salah satunya adalah di bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi.

Program transmigrasi merupakan program lanjutan yang telah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak Pra Repelita. Program tersebut dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan, kebutuhan papan, mendukung kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, mendukung ketahanan nasional, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menunjang penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dan mengurangi pengangguran serta pemerataan penduduk. Pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Bali telah dilaksanakan sejak sebelum adanya Repelita. Dalam perkembangannya, pelaksanaan sempat terhenti atau tertunda dari

tahun 2000 sampai dengan 2005, dan dimulai kembali pada tahun 2006.

Pada tahun 2017 capaian pengiriman transmigran dari Provinsi Bali sebanyak 17 KK, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5 KK dari kuota yang ditetapkan Pusat adalah sebanyak 15 KK, dan target kuota yang tersisa sebanyak 10 KK dikembalikan ke Pusat karena di daerah penempatan yang direncanakan yaitu di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah terjadi gempa. Pada tahun 2019 capaian pengiriman transmigran dari Provinsi Bali adalah sebanyak 6 KK. Pada tahun 2020 dan 2021 pengiriman transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi COVID-19, sehingga target yang telah ditetapkan oleh Pusat sebelumnya tidak dapat terealisasi. Pengiriman transmigran Bali ke lokasi transmigrasi pada tahun-tahun tersebut dilaksanakan melalui alokasi APBN.

Tabel 2.82 Capaian Pengiriman Transmigrasi

Indikator	2017	2018	2019
Capaian Pengiriman Transmigran	17 KK (72 Jiwa)	5 KK (23 Jiwa)	6 KK (24 Jiwa)

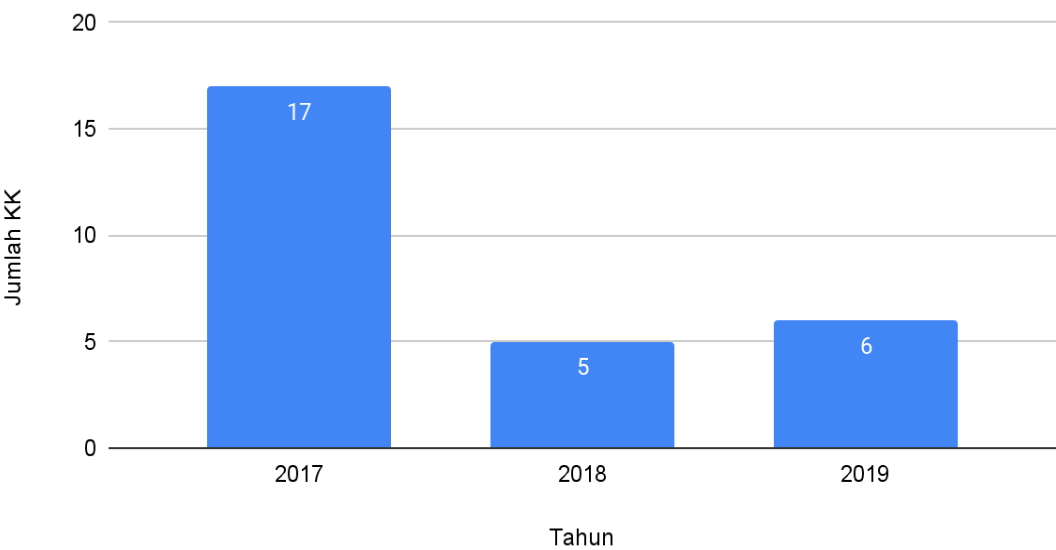
Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

2) Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU)

Para calon transmigran yang telah melalui proses seleksi dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, sebelum diberangkatkan ke daerah/kawasan transmigrasi, akan diberikan pelatihan dasar umum (PDU), seperti pelatihan pengolahan lahan, pertukangan, pertanian, dan lain sebagainya. Penyiapan calon transmigran sangat penting untuk menciptakan calon transmigran yang berkualitas, tangguh, tidak mudah menyerah, dan mempunyai semangat berjuang untuk maju mengembangkan kawasan transmigrasi di daerah lokasi transmigrasi. Seleksi dan pelatihan dibutuhkan untuk memberikan gambaran umum kondisi lokasi yang akan dituju, hak dan kewajiban sebagai transmigran, materi peningkatan motivasi dan sikap mental untuk maju, di samping bekal pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan lokasi yang dituju.

Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU) di Provinsi Bali pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sesuai dengan dengan Jumlah Transmigran yang akan diberangkatkan. Pada tahun 2017 calon transmigran yang mendapat pelatihan dasar umum adalah sebanyak 17 KK, tahun 2018 sebanyak 5 KK, dan tahun 2019 sebanyak 6 KK. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak terlaksana kegiatan pelatihan dasar umum dikarenakan tidak ada calon transmigran yang akan diberangkatkan ke daerah transmigrasi. Seperti halnya pengiriman transmigran Bali ke lokasi transmigrasi, kegiatan Pelatihan Dasar Umum juga dilaksanakan melalui alokasi APBN.

Gambar 2.163 Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU)



Sumber: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2022

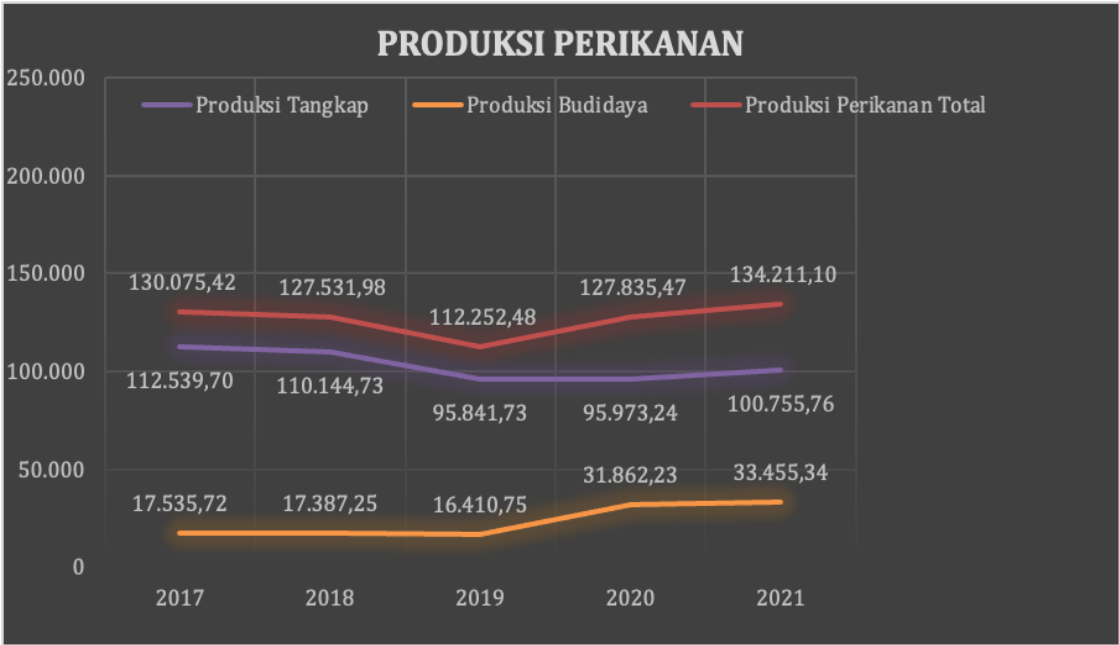
I. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 112.539,70 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 33.455,34 ton. Jumlah produksi kelautan dan perikan pada tahun 2017 sebesar 170.075,42 ton dan mengalami penurunan menjadi 112.252,48 ton pada tahun 2019. Namun, mengalami peningkatan sampai dengan

127.835,47 ton pada tahun 2020 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 134.211,10 ton.

Gambar 2.164 Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali



Sumber: DKP Provinsi Bali, 2022

2) Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan terus mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 33.52 kg/kapita/tahun menjadi 31,77 kg/kapita/tahun pada tahun 2019. Namun Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 38,83 kg/kapita/tahun sampai pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 44,81 kg/kapita/tahun

Tabel 2.83 Konsumsi Ikan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	33,52	33,26	31,77	38,83	44,81

Sumber: DKP Provinsi Bali, 2022

3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan mengalami penurunan yaitu 90% pada tahun 2017 menjadi 70% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100%.

Tabel 2.84 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	90	70	70	70	100

Sumber: DKP Provinsi Bali, 2022

4) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan terus mengalami penurunan dari 68,60% pada tahun 2017 menjadi 65,10% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 78,33%.

Tabel 2.85 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	68,60	67,44	66,32	65,10	78,33

Sumber: DKP Provinsi Bali, 2022

5) Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman terus mengalami penurunan dari 75,78% di tahun 2017 menjadi 64,56% di tahun 2019. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 67,82% akan tetapi masih pada batas penangkapan tidak melebihi potensi lestari sehingga potensi perikanan laut masih dalam batasan biologis yang aman.

Tabel 2.86 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

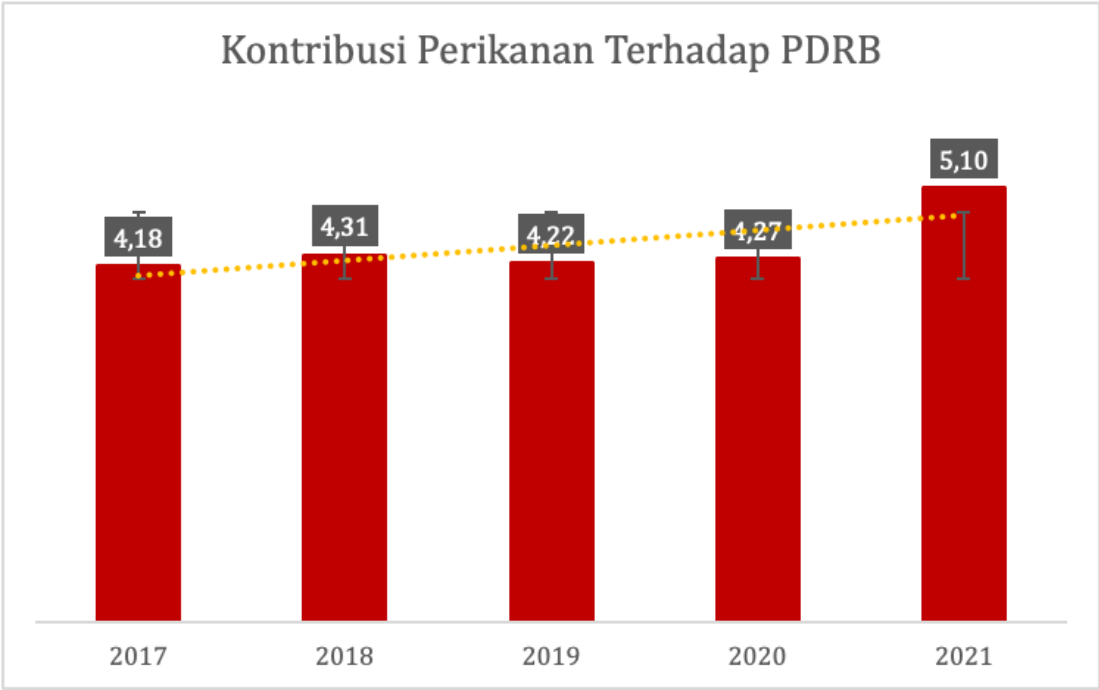
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada dalam batasan biologis yang aman (%)	75,78	74,27	64,51	64,56	67,82

Sumber: DKP Provinsi Bali, 2022

6) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Selama periode 2017-2021, kontribusi perikanan terhadap PDRB Bali cenderung meningkat dari 4,18 tahun 2017 menjadi 5,10 tahun 2021. Ini menunjukkan peran perikanan bagi perekonomian daerah cenderung meningkat. Walaupun terjadi peningkatan akan tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

Gambar 2.165 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2017-2021

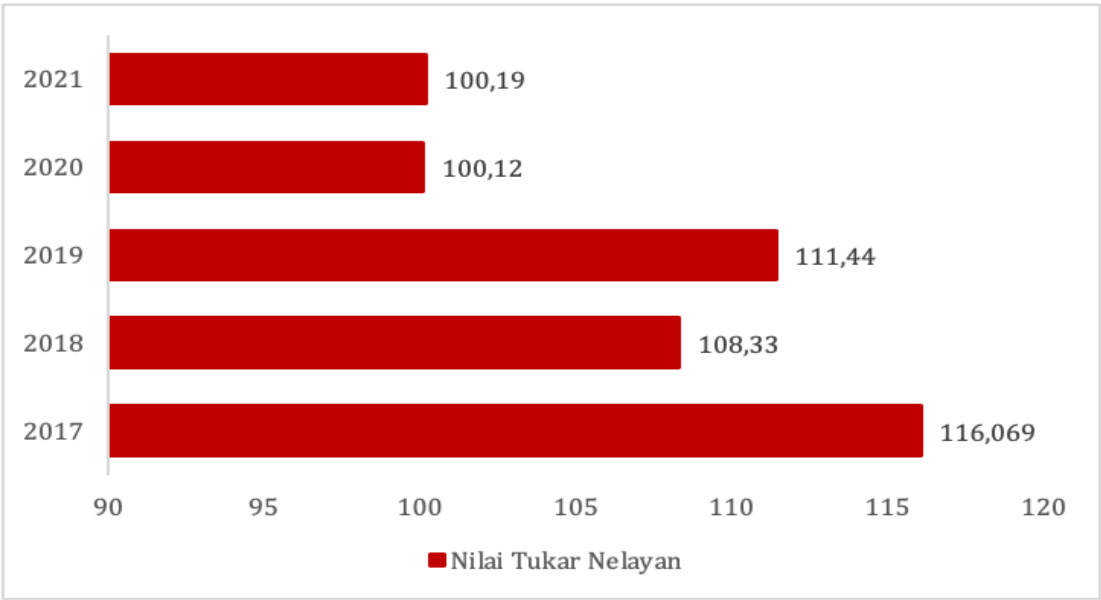


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

7) Nilai Tukar Nelayan

Rata-rata nilai tukar nelayan dan pembudidayaan ikan berfluktuasi selama kurun waktu 2017 sampai 2021.

Gambar 2.166 Nilai Tukar Nelayan



Sumber: DKP Provinsi Bali, 2022

2.3.4 Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

- 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA dan Perkada

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi PERDA. Dokumen perencanaan yang dimaksud, yaitu RPJPD, RPJMD, dan tiap tahunnya Perkada RKPD.

- 2) Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dokumen perencanaan terkait dengan tata ruang dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Saat ini RTRW Provinsi Bali tersebut sudah mengalami revisi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2020.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan RTRWP Bali 2009-2029, didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 23 Undang-

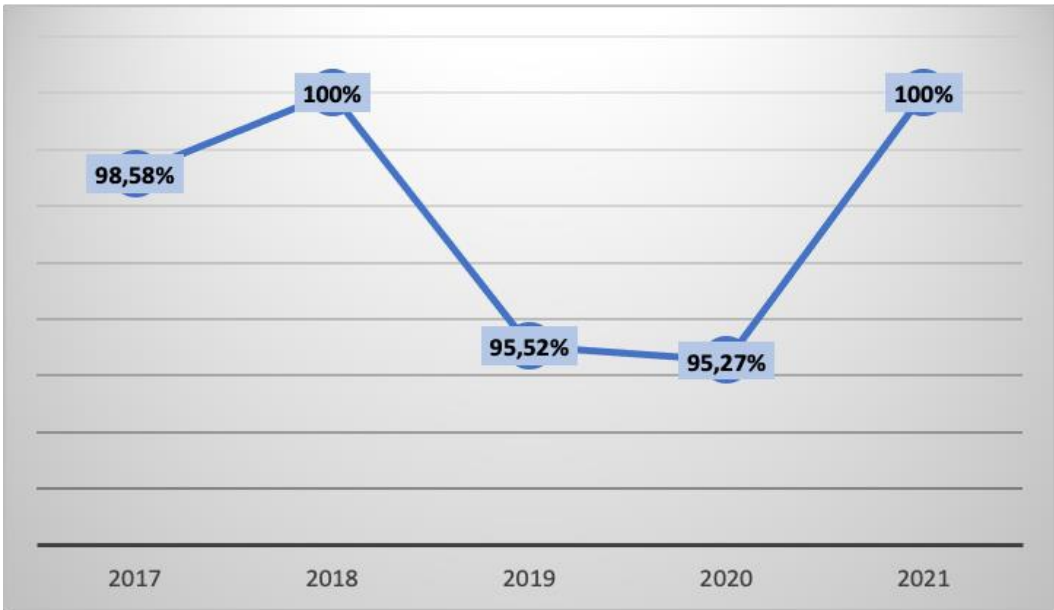
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan karena itu sekurang kurangnya harus memuat:

- a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b) Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi system perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c) Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d) Penetapan kawasan strategis provinsi;
- e) Arahana pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

3) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2017 mencapai 98,58 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 100 persen, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 95,52 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 95,27 persen. Pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar 100%

Gambar 2.167 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD



Sumber: Bappeda Provinsi Bali, 2022

3) Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

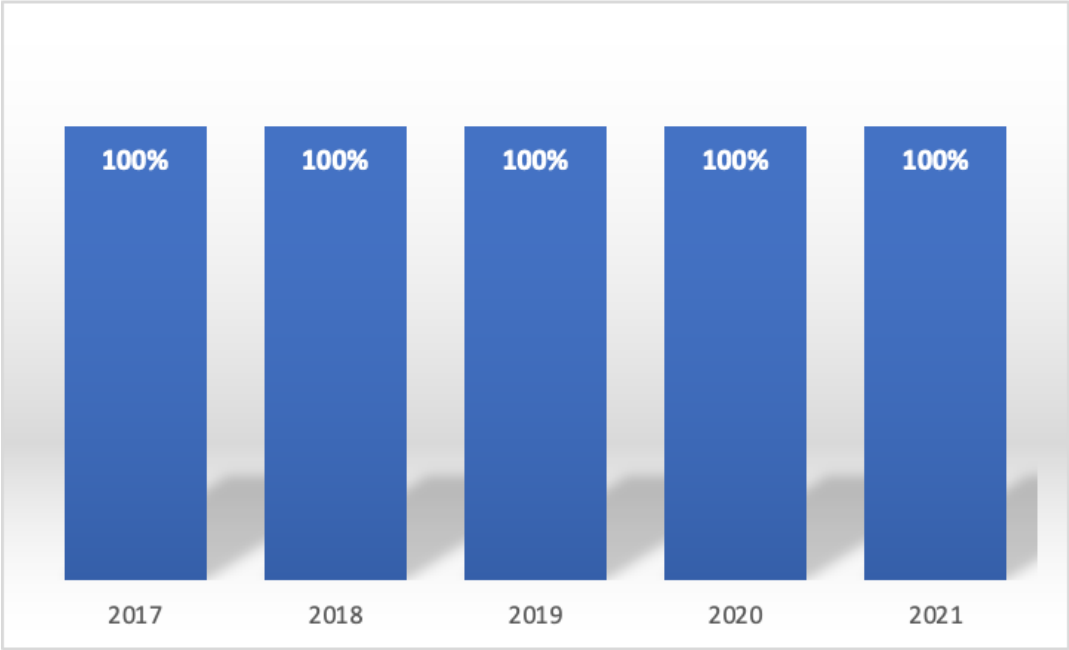
Tabel 2.87 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Provinsi Bali, 2022

- 5) Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW
- Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW telah mencapai 100 persen selama kurun waktu 2017 sampai 2021.

Gambar 2.168 Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW



Sumber: Bappeda Provinsi Bali, 2022

B. Keuangan

1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Bali semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Berikut disampaikan capaian opini BPK dari.

Tabel 2.88 Opini BPK

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Capaian Opini WTP berturut-turut bukan tanpa kekurangan, masih ada permasalahan yang masih menjadi catatan dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Bali konsen dalam mengurangi jumlah temuan serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan tersebut. Opini WTP merupakan wujud dari kinerja dan komitmen kita terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik. Oleh karena itu, komitmen dan semangat untuk terus menunjukkan kinerja yang positif tersebut harus terus dipupuk agar pencapaian ini tetap dapat dipertahankan.

2) Persentase SiLPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Menghitung persentase SiLPA diterapkan dengan cara membandingkan realisasi SiLPA tahun sebelumnya dengan anggaran. Berikut disajikan tabel realisasi SiLPA periode 2017-2021.

Tabel 2.89 Realisasi SiLPA Provinsi Bali Tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017	452.761.594.975,09	452.761.594.975,09	100,00
2018	408.311.832.886,74	404.137.168.978,49	98,98
2019	702.345.385.366,47	702.345.385.366,47	100,00
2020	831.815.527.448,65	831.863.603.723,48	100,01
2021	192.855.860.215,00	192.855.592.021,05	100,00

3) Persentase SILPA Terhadap APBD

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Menghitung persentase SILPA terhadap APBD dapat digunakan dengan cara Membandingkan Realisasi SILPA Tahun ini dengan anggaran keseluruhan. Berikut disampaikan persentase SILPA terhadap APBD tahun 2017-2021.

Tabel 2.90 persentase SILPA terhadap APBD tahun 2017-2021

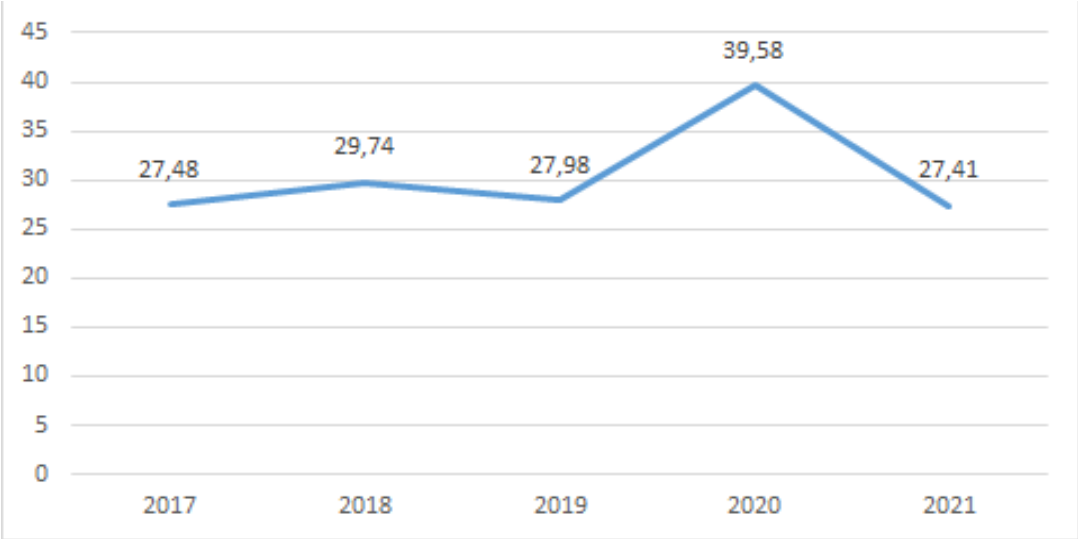
TAHUN	TOTAL BELANJA APBD	REALISASI SILPA	%
2017	6.750.176.103.311,42	408.311.832.886,74	6,05
2018	6.595.712.545.306,96	702.345.385.366,47	10,65
2019	7.201.196.359.769,47	831.815.527.448,65	11,55
2020	6.924.582.165.725,65	192.855.860.215,36	2,79
2021	7.903.323.253.052,00	850.341.671.769,52	10,76

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

4) Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Bab VII Pasal 81 Ayat (1) tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan grafik, tercatat dari tahun 2017-2021 Pemerintah Provinsi Bali telah konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran belanja daerah dalam APBD. Hanya pada tahun 2019 dan 2020 persentase anggaran pendidikan mengalami penurunan yaitu berturut-turut sebanyak 18,42% dan 19,01%.

Gambar 2.169 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Anggaran Induk

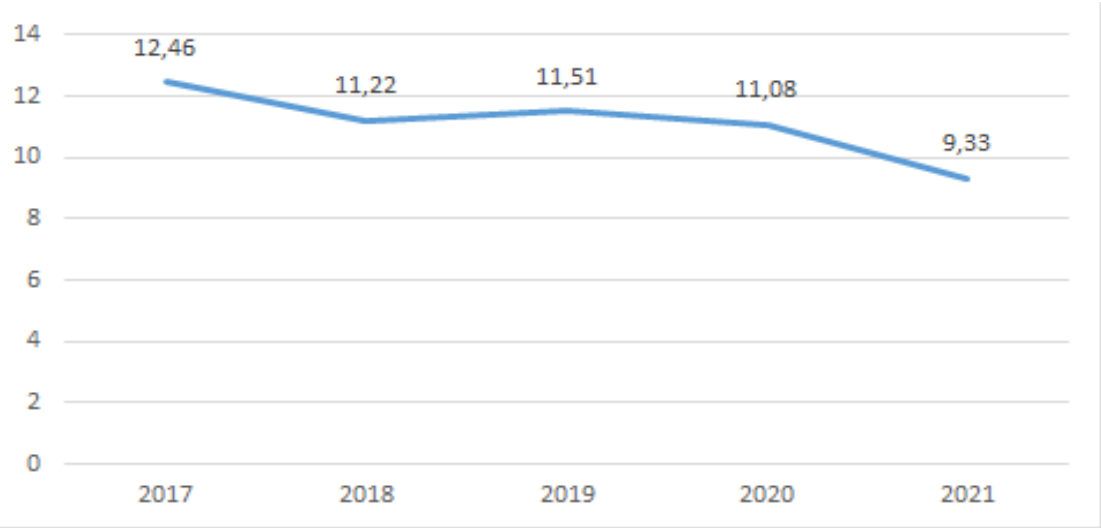


Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

5) Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten dan berkesinambungan mempertahankan pengalokasian anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran belanja daerah dalam APBD dari tahun 2017-2020. Sesuai data pada grafik, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali menurunkan anggaran kesehatan menjadi 9,33% dan 6,29%. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Gambar 2.170 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Anggaran Induk



Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

6) Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga. Berdasarkan tabel, proporsi Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung tidak mencerminkan belum berkualitaskannya APBD Provinsi Bali. Faktor paling penting adalah pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Tabel 2.91 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	25,51 : 64,42	25,05 : 74,71	28,21 : 71,79	32,87 : 67,13

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Pada Tahun Anggaran 2021 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sudah tidak diberlakukan lagi, hal ini diatur pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja daerah terdiri dari:

- a) Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
- b) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Adapun perbandingannya sesuai dengan format Permendagri 77 Tahun 2020 pada TA 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.92 Perbandingan Komponen Belanja
Pada Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021	
	Anggaran	%
BELANJA DAERAH	8.537.890.262.352,00	100
Belanja Operasi	4.761.429.797.936,00	55,77
Belanja Pegawai	1.833.334.389.243,00	21,47
Belanja Barang dan Jasa	1.853.567.058.693,00	21,71
Belanja Bunga	17.775.000.000,00	0,21
Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	0,12
Belanja Hibah	994.253.350.000,00	11,65
Belanja Bantuan Sosial	52.500.000.000,00	0,61
Belanja Modal	2.165.983.388.530,00	25,37
Belanja Tidak Terduga	54.000.000.000,00	0,63
Belanja Transfer	1.556.477.075.886,00	18,23
Belanja Bagi hasil	1.084.845.438.642,00	12,71
Belanja Bantuan Keuangan	471.631.637.244,00	5,52

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

7) Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Salah satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas sumber pendanaan tersebut. Kebijakan belanja bagi hasil pajak dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh kabupaten/kota di Bali. Berdasarkan tabel, sejak tahun 2016 persentase bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota dan Desa menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan dana bagi hasil pajak tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan ke masyarakat di wilayah masing-masing.

Tabel 2.92 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	18,10%	20,13%	19,98%	16,59%	13,48%

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

8) Penetapan APBD

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Penyusunan APBD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (3) Penetapan prioritas dan plafon sementara anggaran (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (5) Penyusunan Rencana Perda APBD (6) Penetapan APBD. Penetapan APBD dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Sesuai tabel

diatas, penetapan APBD selama periode 5 tahun dari tahun 2017-2021 telah sesuai ketentuan peraturan perundangan ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 2.94 Penetapan APBD Tahun 2017-2021

Tahun	Penetapan APBD
2017	Tepat Waktu
	30/12/2016
	No.12 Tahun 2016
	6.654.312.296.707,50
2018	Tepat waktu
	12/27/2017
	No. 12 Tahun 2017
	6.664.144.528.047,54
2019	Tepat waktu
	12/21/2018
	No. 10 Tahun 2018
	6.834.255.626.694,00
2020	Tepat waktu
	12/19/2019
	No. 11 Tahun 2019
	7.280.707.083.216,00
2021	Tepat Waktu
	29 / 12 / 2020
	No. 11 Tahun 2020
	8.537.890.262.352

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

C. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Lama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan berbeda-beda berdasarkan jenis pelatihan yang

dilaksanakan dan total jam pelajaran. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis dilaksanakan antara 6 hari sampai dengan 30 hari kerja. Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS pada lamanya pelaksanaan pelatihan telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara mengenai pembelajaran dalam kelas (klasikal) dan pelaksanaan implementasi di perangkat daerah masing-masing (non klasikal) dengan rincian sebagai berikut, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan jumlah hari klasikal 27 hari dan non klasikal 74 hari, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan jumlah hari klasikal 31 hari dan non klasikal 60 hari, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan jumlah hari klasikal 36 hari dan non klasikal 60 hari, Pelatihan Dasar CPNS dengan jumlah hari klasikal 51 hari dan non klasikal 74 hari. Capaian tiap tahun seperti tabel dibawah diperoleh dengan merata-ratakan jumlah hari pembelajaran dalam kelas (klasikal) sehingga di dapat 30 hari.

Tabel 2.95 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	30	30	30	30	30

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 2022

2) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal meningkat dari 6,13 persen pada tahun 2017 menjadi 8,57 pada Tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat menjadi 17,76, 19,34 dan 28,02 persen.

Gambar 2.171 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Provinsi Bali



Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 2022

3) Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Tabel 2.96 menunjukkan jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dibagi jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dimana jumlah peserta pelatihan tahun 2017 sebanyak 8,96 persen pejabat struktural yang meningkat pada tahun 2018 menjadi 14,04 persen pejabat struktural. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural meningkat secara berturut-turut menjadi 18,91 persen, 21,10 persen dan 25,07 persen.

Tabel 2.96 Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	8,96	14,04	18,91	21,10	25,07

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.172 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 2022

4) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Provinsi Bali

Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi pada instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021 sebanyak 38 Pejabat. Jabatan Administrasi terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana. Jumlah jabatan Administrasi mengalami penurunan dari 5172 Pejabat pada tahun 2017 menjadi 4277 Pejabat pada tahun 2021. Penurunan tersebut terjadi karena adanya transformasi dari Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional. Jumlah pemangku jabatan fungsional mengalami peningkatan dari 5981 Pejabat pada tahun 2019 menjadi 6309 pada tahun 2021.

Tabel 2.97 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah di Provinsi Bali

No	Jenis Jabatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	JPT	51	45	45	42	38
2	JA	5172	4355	5284	4654	4277
3	JF	6880	6924	5981	5933	6309

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 2022

D. Penelitian dan Pengembangan

1) Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah cenderung meningkat dari 13,6 persen pada tahun 2017 menjadi 16,6 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.98 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	16,6 6/36	16,6 6/36

Sumber: BRIDA Provinsi Bali, 2022

2) Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah cenderung meningkat dari 66,6 persen pada tahun 2017 menjadi 77,8 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.99 Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	66,6 % (6/8)	66,6 % (6/9)	66,6 % (6/8)	77,8 % 7/9	77,8 % 7/9

Sumber: BRIDA Provinsi Bali, 2022

E. Pengawasan

1) Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan di pengawasan Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan dari 51 pada tahun 2013 menjadi 16 pada tahun 2015. Namun, mengalami peningkatan menjadi 27 pada tahun 2016 dan 45 pada tahun 2017.

Gambar 2.173 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Provinsi Bali



Sumber: SIPD Provinsi Bali, 2022

2) Persentase Pelanggaran Pegawai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali telah melaksanakan Pembinaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari Tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah penanganan kasus hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 16 kasus hukuman disiplin yang terdiri dari:

- (1) Hukuman disiplin ringan: 2 (dua) surat keputusan yang merupakan hukuman disiplin teguran tertulis.
- (2) Hukuman disiplin sedang: 5 (lima) surat keputusan yang terdiri dari:
 - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebanyak 3 surat keputusan.
 - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) surat keputusan.
- (3) Hukuman disiplin berat: 9 (sembilan) surat keputusan yang terdiri dari:
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebanyak 8 (delapan) surat keputusan.
 - Pemberhentian tidak dengan hormat sebanyak 1 (satu) surat keputusan.

Dari 16 penjatuhan hukuman disiplin tersebut, 31,25% (5 kasus) merupakan pelanggaran karena kasus tindak pidana korupsi, dan 68,75% (11 kasus) merupakan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan jam kerja. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 prosentase penjatuhan hukuman disiplin mengalami fluktuasi naik turun yang tidak jauh berbeda, dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan 25% (dari 4 kasus di tahun 2013 menjadi 3 kasus di tahun 2014), dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 33,33% (dari 3 kasus di tahun 2014 menjadi 4 kasus di tahun 2015), dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 50% (dari 4 kasus di tahun 2015 menjadi 2 kasus di tahun 2016), dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 50% (dari 2 kasus di tahun 2016 menjadi 3 kasus di tahun 2017).

Dibandingkan dengan jumlah PNS per tahunnya bahwa prosentase penjatuhan hukuman disiplin pada tahun 2013 sebesar 0.062% (4 kasus dari 6.448 jumlah PNS), tahun 2014 sebesar 0.048% (3 kasus dari 6.283 jumlah PNS), tahun 2015 sebesar 0.066% (4 kasus dari 6.023 PNS), tahun 2016 sebesar 0.033% (2 kasus dari 5.995 PNS), tahun 2017 sebesar 0.025% (3 kasus dari 12.103 PNS).

Secara keseluruhan rata-rata penjatuhan hukuman disiplin PNS sampai dengan tahun 2017 sebesar 0,047% dibandingkan dengan jumlah PNS.

Tabel 2.100 Persentase Pelanggaran Pegawai

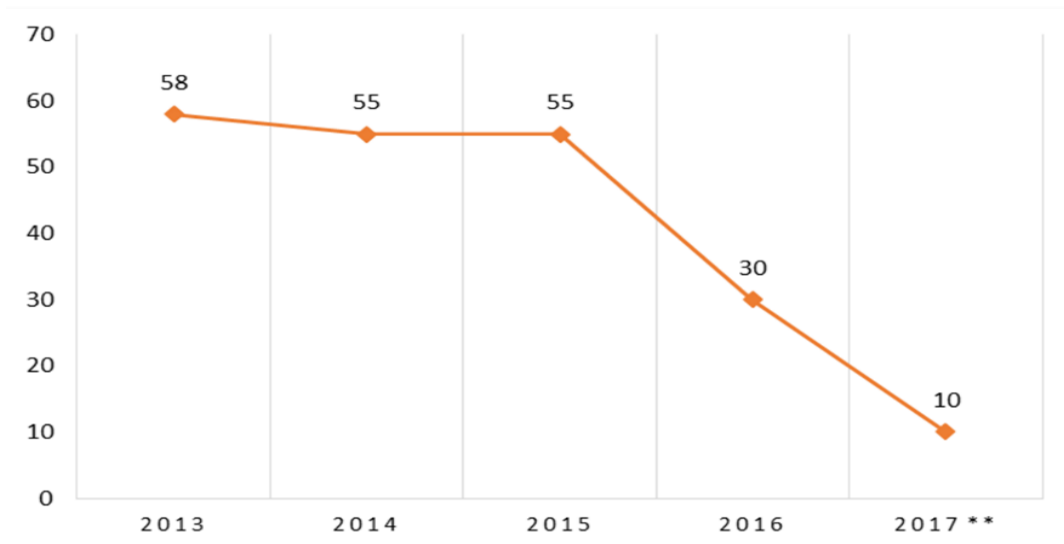
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pelanggaran Pegawai	0.025 %	0,08%	0,11%	0,04%	0,05%

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 2021

3) Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK mengalami penurunan selama kurun waktu 2013 sampai 2017 dari 58 temuan menjadi 10 temuan.

Gambar 2.174 Jumlah Temuan BPK di provinsi Bali



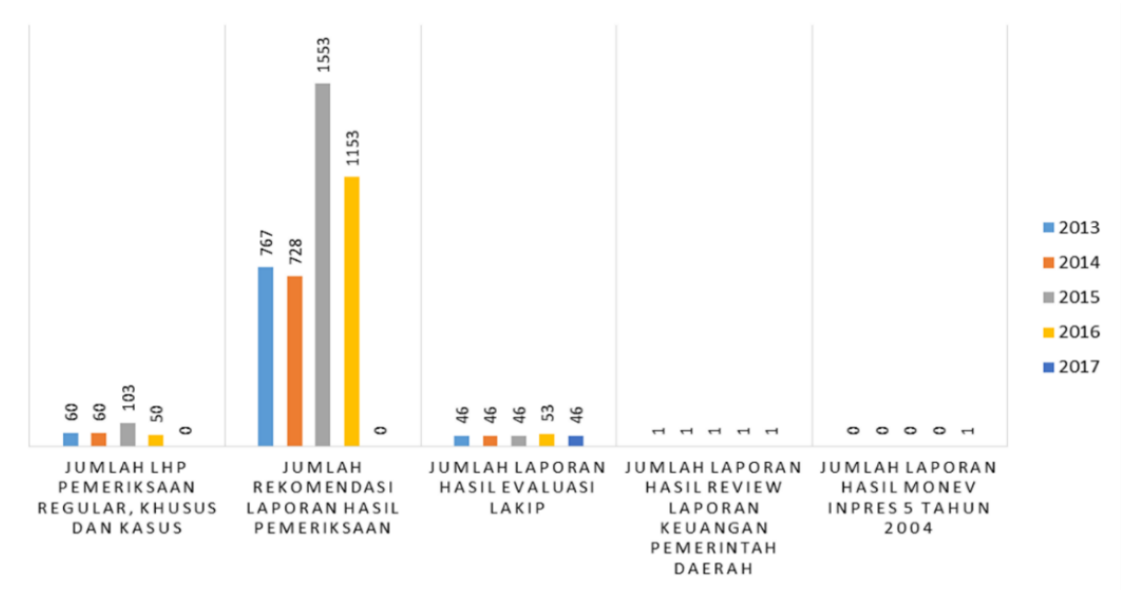
Sumber : Inspektorat

Sumber Data: SIPD Provinsi Bali, 2021

- 4) Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev

Jumlah LHP pemeriksaan regular, khusus dan kasus di Provinsi Bali sebesar 60 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 103 pada tahun 2015. Angka tersebut turun menjadi 50 pada tahun 2016. Jumlah rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selama tahun 2013 sampai 2017, yaitu 767; 728; 1553; dan 1153. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP sebesar 46 pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017. Sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 53. Jumlah laporan hasil review laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1 laporan pada tahun 2013 sampai 2017. Jumlah laporan hasil monev Inpres 5 Tahun 2004 pada tahun 2017 sebanyak 1 laporan.

Gambar 2.175 Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Money



Sumber : Inspektorat

Sumber: Data SIPD Provinsi Bali, 2021

F. Sekretariat DPRD

- 1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Tabel 2.101 Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rencana Kerja Tahunan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Data SIPD Provinsi Bali,2022

- 2) Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tabel 2.102 Fungsi Pengawasan, Pembentukan dan Fungsi Anggaran

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Fungsi Pengawasan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Data SIPD Provinsi Bali,2022

- 3) Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2.103 Fungsi Pengawasan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Fungsi Pengawasan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Data SIPD Provinsi Bali, 2022

G. Bencana

1) Jumlah Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut dengan tindakan cepat dan tepat dalam mengurangi risiko terkena bencana. Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat. Pembentukan UPTD Pengendalian Bencana Daerah dibantu oleh Palang Merah Perancis (FRC) melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Palang Merah Perancis tanggal 25 Agustus 2008 sedangkan BPBD Provinsi Bali mulai diisi personil pada tanggal 18 Januari 2012. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali yang baru berdiri hanya memiliki sistem peringatan dini yang jumlahnya belum banyak sehingga dalam tabel dibawah tertuang banyak tahun jumlah sistem peringatan dini masih kosong. Berikut jumlah sistem peringatan dini yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali.

Tabel 2.104 Jumlah Sistem Peringatan Dini

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gunung Meletus					
	Sistem Elektronik	-	Sirine Peringatan Dini Erupsi Gunung Berapi 6 unit	Sirine Peringatan Dini Erupsi Gunung Berapi 6 unit	Sirine Peringatan Dini Erupsi Gunung Berapi 6 unit	Sirine Peringatan Dini Erupsi Gunung Berapi 6 unit
2	Longsor					
	Sistem Elektronik	-	EWS Landslide Tabanan	EWS Landslide Buleleng	EWS Landslide Karangasem	EWS Landslide Karangasem
3	Gempa					
	Sistem Elektronik	-	-	Intensity Meter BMKG	WRS Ina TEWS Newgen Gempa dan Tsunami 1 unit	WRS Ina TEWS Newgen Gempa dan Tsunami 1 unit
4	Tsunami					
	Sistem Elektronik	Sirine Peringatan Dini Tsunami 9 unit	Sirine Peringatan Dini Tsunami 9 unit	Sirine Peringatan Dini Tsunami 9 unit	WRS InaTEWS Newgen Gempa dan Tsunami 1 unit dan Sirine Peringatan Dini Tsunami 9 unit	WRS InaTEWS Newgen Gempa dan Tsunami 1 unit dan Sirine Peringatan Dini Tsunami 9 unit

Sumber: BPBD Provinsi Bali, 2022

2) Jumlah Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan suatu kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis. Sering kali terjadinya bencana

di Provinsi Bali ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang karakteristik wilayah yang rawan terjadinya bencana. Berikut jumlah kawasan rawan bencana sesuai wilayah dan jenis bencana.

Tabel 2.105 Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali

Tahun	Uraian	Badung	Bangli	Buleleng	Denpasar	Gianyar
2019	Banjir	Tinggi : 0; Sedang : 39	Tinggi : 0; Sedang : 21	Tinggi : 0; Sedang : 48	Tinggi : 0; Sedang : 43	Tinggi : 0; Sedang : 36
	Gunung Meletus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Longsor	Tinggi : 4; Sedang : 6	Tinggi : 14; Sedang : 48	Tinggi : 2; Sedang : 90	Nihil	Tinggi : 1; Sedang : 25
	Gempa	Sedang : 58	Sedang : 40	Sedang : 100	Sedang : 42	Sedang : 69
	Tsunami	Tinggi : 11; Sedang : 5	Nihil	Tinggi : 40; Sedang : 6	Tinggi : 6; Sedang : 4	Tinggi : 4; Sedang : 6
	Lainnya	Nihil	Sedang : 15	Sedang : 22	Nihil	Sedang : 3
2020	Banjir	Tinggi : 0; Sedang : 39	Tinggi : 0; Sedang : 21	Tinggi : 0; Sedang : 48	Tinggi : 0; Sedang : 43	Tinggi : 0; Sedang : 36
	Gunung Meletus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Longsor	Tinggi : 4; Sedang : 6	Tinggi : 14; Sedang : 48	Tinggi : 2; Sedang : 90	Nihil	Tinggi : 1; Sedang : 25
	Gempa	Sedang : 58	Sedang : 40	Sedang : 100	Sedang : 42	Sedang : 69
	Tsunami	Tinggi : 11; Sedang : 5	Nihil	Tinggi : 40; Sedang : 6	Tinggi : 6; Sedang : 4	Tinggi : 4; Sedang : 6
	Lainnya	Nihil	Sedang : 15	Sedang : 22	Nihil	Sedang : 3
2021	Banjir	Tinggi : 0; Sedang : 39	Tinggi : 0; Sedang : 21	Tinggi : 0; Sedang : 48	Tinggi : 0; Sedang : 43	Tinggi : 0; Sedang : 36

Tahun	Uraian	Badung	Bangli	Buleleng	Denpasar	Gianyar
	Gunung Meletus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Longsor	Tinggi : 4; Sedang : 6	Tinggi : 14; Sedang : 48	Tinggi : 2; Sedang : 90	Nihil	Tinggi : 1; Sedang : 25
	Gempa	Sedang : 58	Sedang : 40	Sedang : 100	Sedang : 42	Sedang : 69
	Tsunami	Tinggi : 11; Sedang : 5	Nihil	Tinggi : 40; Sedang : 6	Tinggi : 6; Sedang : 4	Tinggi : 4; Sedang : 6
	Lainnya	Nihil	Sedang : 15	Sedang : 22	Nihil	Sedang : 3
2022	Banjir	Tinggi : 1 Sedang : 4 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 8 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 4 Rendah : 0	Tinggi : 2 Sedang : 4 Rendah : 0
	Gunung Meletus	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0
	Tanah Longsor	Tinggi : 3 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 4 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 8 Sedang : 0 Rendah : 1	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 3 Sedang : 2 Rendah : 0
	Gempa bumi	Tinggi : 0 Sedang : 5 Rendah : 1	Tinggi : 0 Sedang : 4 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 3 Rendah : 6	Tinggi : 1 Sedang : 3 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 7 Rendah : 0
	Tsunami	Tinggi : 4 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 4 Sedang : 3 Rendah : 0	Tinggi : 2 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 3 Sedang : 0 Rendah : 0
	Banjir Bandang	Tinggi : 1 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 1 Sedang : 0 Rendah : 1	Tinggi : 6 Sedang : 1 Rendah : 2	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 1 Sedang : 0 Rendah : 0
	Cuaca Ekstrim	Tinggi : 4 Sedang : 1 Rendah : 1	Tinggi : 0 Sedang : 2 Rendah : 2	Tinggi : 1 Sedang : 0 Rendah : 8	Tinggi : 4 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 5 Sedang : 0 Rendah : 2
	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi : 0 Sedang : 1 Rendah : 2	Tinggi : 0 Sedang : 1 Rendah : 3	Tinggi : 1 Sedang : 1 Rendah : 7	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 4
	Kekeringan	Tinggi : 0 Sedang : 6 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 4 Rendah : 0	Tinggi : 1 Sedang : 8 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 4 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 7 Rendah : 0

Tahun	Uraian	Badung	Bangli	Buleleng	Denpasar	Gianyar
	Likuifaksi	Tinggi : 0 Sedang : 2 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 8 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 1 Rendah : 0	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0
	COVID-19	Tinggi : 4 Sedang : 0 Rendah : 2	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 4	Tinggi : 0 Sedang : 1 Rendah : 8	Tinggi : 2 Sedang : 2 Rendah : 0	Tinggi : 1 Sedang : 2 Rendah : 4
	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 6	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 4	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 9	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 4	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 7
	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi : 3 Sedang : 0 Rendah : 1	Tinggi : 0 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 6 Sedang : 0 Rendah : 1	Tinggi : 2 Sedang : 0 Rendah : 0	Tinggi : 3 Sedang : 0 Rendah : 0

Tabel 2.106 Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali
(Lanjutan)

Tahun	Uraian	Jembrana	Karangasem	Klungkung	Tabanan
2019	Banjir	Tinggi : 47; Sedang : 0	Tinggi : 0; Sedang : 20	Tinggi : 0; Sedang : 24	Tinggi : 21; Sedang : 29
	Gunung Meletus	Nihil	Sedang : 13; Rendah : 43	Sedang : 0; Rendah : 16	Nihil
	Longsor	Tinggi : 11; Sedang : 20	Tinggi : 4; Sedang : 65	Tinggi : 3; Sedang : 25	Tinggi : 0; Sedang : 45
	Gempa	Sedang : 46	Sedang : 55	Sedang : 51	Sedang : 107
	Tsunami	Tinggi : 9; Sedang : 17	Tinggi : 0; Sedang : 19	Tinggi : 8; Sedang : 11	Tinggi : 0; Sedang : 7
	Lainnya	Sedang : 43	Sedang : 2	Sedang : 9	Sedang : 9
2020	Banjir	Tinggi : 47; Sedang : 0	Tinggi : 0; Sedang : 20	Tinggi : 0; Sedang : 24	Tinggi : 21; Sedang : 29
	Gunung Meletus	Nihil	Sedang : 13; Rendah : 43	Sedang : 0; Rendah : 16	Nihil
	Longsor	Tinggi : 11; Sedang : 20	Tinggi : 4; Sedang : 65	Tinggi : 3; Sedang : 25	Tinggi : 0; Sedang : 45
	Gempa	Sedang : 46	Sedang : 55	Sedang : 51	Sedang : 107

Tahun	Uraian	Jembrana	Karangasem	Klungkung	Tabanan
	Tsunami	Tinggi : 9; Sedang : 17	Tinggi : 0; Sedang : 19	Tinggi : 8; Sedang : 11	Tinggi : 0; Sedang : 7
	Lainnya	Sedang : 43	Sedang : 2	Sedang : 9	Sedang : 9
2021	Banjir	Tinggi : 47; Sedang : 0	Tinggi : 0; Sedang : 20	Tinggi : 0; Sedang : 24	Tinggi : 21; Sedang : 29
	Gunung Meletus	Nihil	Sedang : 13; Rendah : 43	Sedang : 0; Rendah : 16	Nihil
	Longsor	Tinggi : 11; Sedang : 20	Tinggi : 4; Sedang : 65	Tinggi : 3; Sedang : 25	Tinggi : 0; Sedang : 45
	Gempa	Sedang : 46	Sedang : 55	Sedang : 51	Sedang : 107
	Tsunami	Tinggi : 9; Sedang : 17	Tinggi : 0; Sedang : 19	Tinggi : 8; Sedang : 11	Tinggi : 0; Sedang : 7
	Lainnya	Sedang : 43	Sedang : 2	Sedang : 9	Sedang : 9

Sumber: BPBD Provinsi Bali, 2022

3) Jumlah Korban Bencana

Jumlah korban bencana dari semua jenis bencana yang sering terjadi di Bali sering disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang karakteristik wilayah masing-masing. Meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat juga penggunaan lahan di setiap wilayah di Provinsi Bali sehingga turut merupakan faktor penyebab terjadinya bencana dan timbulnya jumlah korban. Berikut tabel jumlah korban menurut jenis bencana dan Data tertanganinya bantuan pasca bencana.

Tabel 2.107 Jumlah Korban Bencana

Tahun	Uraian	Meninggal	Luka-Luka
2016	Banjir	1	1

Tahun	Uraian	Meninggal	Luka-Luka
	Gunung Meletus	0	0
	Longsor	0	0
	Gempa	0	0
	Tsunami	0	0
	Lainnya	10	5
2017	Banjir	2	0
	Gunung Meletus	0	0
	Longsor	26	3
	Gempa	0	0
	Tsunami	0	0
	Lainnya	7	4
2018	Banjir	2	0
	Gunung Meletus	0	0
	Longsor	7	2
	Gempa	2	14
	Tsunami	0	0
	Lainnya	7	0
2019	Banjir	0	0
	Gunung Meletus	0	0
	Longsor	7	12
	Gempa	0	0

Tahun	Uraian	Meninggal	Luka-Luka
	Tsunami	0	0
	Lainnya	28	45
2020	Banjir	0	0
	Gunung Meletus	0	0
	Longsor	3	1
	Gempa	0	0
	Tsunami	0	0
	Lainnya	63	40
2021	Banjir	0	0
	Gunung Meletus	0	0
	Longsor	4	12
	Gempa	1	124
	Tsunami	0	0
	Lainnya	1	17

Sumber: BPBD Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.108 Data Tertanganinya Bantuan Pasca Bencana

Tahun	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
2017	38	7	0
2018	19	19	0
2019	14	7	0
2020	10	7	0

Tahun	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
2021	12	14	0

Sumber: BPBD Provinsi Bali, 2022

- 4) Jumlah Pengungsi Akibat Bencana
- Jumlah pengungsi akibat bencana hanya ada pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan jumlah pengungsi akibat bencana pada tahun 2019-2021 tidak ada.

Tabel 2.109 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana

Tahun	Uraian	Jumlah Pengungsi
2017	Banjir	50
	Gunung Meletus	70.967
	Longsor	26
	Gempa	0
	Tsunami	0
	Lainnya	0
2018	Banjir	0
	Gunung Meletus	122
	Longsor	0
	Gempa	0
	Tsunami	0
	Lainnya	0
2019	Banjir	0

Tahun	Uraian	Jumlah Pengungsi
	Gunung Meletus	0
	Longsor	0
	Gempa	0
	Tsunami	0
	Lainnya	0
2020	Banjir	0
	Gunung Meletus	0
	Longsor	0
	Gempa	0
	Tsunami	0
	Lainnya	0
2021	Banjir	0
	Gunung Meletus	0
	Longsor	0
	Gempa	0
	Tsunami	0
	Lainnya	0

Sumber: BPBD Provinsi Bali, 2022

5) Jumlah Kerugian Akibat Bencana

Jumlah kerugian akibat bencana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sesuai dengan jenis bencana dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dan data kerusakan serta kerugian pasca bencana.

Tabel 2.110 Data Kerusakan Pasca Bencana Tahun 2017-2021

Jenis Bencana	Jumlah Kerusakan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Banjir	49	46	21	2	1
Gunung Meletus	-	-	-	-	-
Longsor	130	59	22	12	42
Gempa	1	1	359	221	1
Tsunami	-	-	-	-	0
Lainnya	61	33	46	37	108

Sumber Data: BPBD Provinsi Bali, 2022

Tabel 2.111 Data Kerugian Pasca Bencana

Jenis Bencana	Jumlah Kerusakan (dalam juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Banjir	775	281	154	59	5
Gunung Meletus	1	-	-	-	-
Longsor	1.063	828	334	118	488
Gempa	15	15	2.209	1.376	2,5
Tsunami	-	-	-	-	-
Lainnya	675	517	444,5	493	133,75

Sumber Data : BPBD Provinsi Bali, 2022

6) Jumlah Kejadian Bencana

Jumlah Kejadian Bencana yang merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam/non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan kerugian psikologis. Berikut tabel jumlah kejadian bencana sesuai jenis bencana.

Tabel 2.112 Jumlah Kejadian Bencana

Kejadian Bencana	2017	2018	2019	2020	2021
Banjir	99	153	14	26	84
Gunung Meletus	1	3	25	0	0
Longsor	259	258	75	96	268
Gempa	17	28	19	3	1
Tsunami	0	0	0	0	0
Kebakaran	311	443	264	129	211
Puting Beliung	22	23	20	256	254
Pohon Tumbang	3	1	0	0	566
Kecelakaan	507	586	620	370 (Kejadian lain-lain: pohon tumbang, bangunan roboh, penemuan	45 (Kejadian lain: abrasi dan gelombang pasang, dan
Pembunuhan	780	16	0		
Konflik Sosial	2	0	0		
Bangunan Roboh	12	40	18		

Kejadian Bencana	2017	2018	2019	2020	2021
Penemuan Mayat	41	18	12	mayat dan lain-lain)	bangunan roboh)

Sumber Data: BPBD Provinsi Bali, 2022

H. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Sejalan dengan meningkatnya urusan-urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali di Jakarta baik yang meliputi urusan administratif, teknis maupun koordinatif, peran dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali di Ibu Kota Negara Jakarta semakin strategis dalam memberikan pelayanan terhadap kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Daerah baik internal maupun eksternal.

- 1) Indeks kepuasan penerima pelayanan hubungan antar lembaga
 Dalam rangka penguatan peran Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta yang mengampu urusan koordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Penghubung melaksanakan pelayanan terhadap OPD-OPD di Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/kota terkait permintaan untuk koordinasi, konsultasi, pengambilan dokumen, serta penyerahan dokumen ke kementerian-kementerian maupun lembaga-lembaga pemerintahan/non pemerintahan di DKI Jakarta.

Tabel 2.113 Nilai IKM Penerima Pelayanan Hubungan Antar Lembaga

Pelayanan Hubungan Antar Lembaga	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai IKM	83,50	85,00	85,57	86,58	85,50

Sumber: Banhub Prov Bali, 2022

Tabel 2.114 Jumlah Permintaan Pelayanan Hubungan Antar Lembaga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Permintaan Pelayanan Hubungan Antar Lembaga	75	80	99	170	220

Sumber: Banhub Prov Bali, 2022

2) Indeks kepuasan tamu wisma Badan Penghubung Bali di Jakarta

Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta memiliki wisma yang terdiri dari 13 (tiga belas) kamar untuk tamu (PNS Pemprov Bali, Kab/Kota dan masyarakat umum) dan 3 kamar untuk VIP. Tarif wisma sangat terjangkau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tabel 2.115 Nilai IKM Pelayanan Tamu Wisma

Pelayanan terhadap tamu wisma	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai IKM	70,50	69,50	69,65	76,76	88,33

Sumber: Banhub Prov Bali, 2022

Tabel 2.116 Jumlah Tamu Wisma Badan Penghubung

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tamu (orang)	1200	1300	273	168	108

Sumber: Banhub Prov Bali, 2022

Tabel 2.117 Jumlah Kegiatan Protokol Pimpinan yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kegiatan Protokoler Pimpinan (Tahun)	90	87	61	19	120

Sumber: Banhub Prov Bali, 2022

3) Indeks kepuasan pengunjung Anjungan Bali TMII Jakarta

Salah satu tupoksi Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta adalah terkait promosi dan informasi di bidang ekonomi, seni dan budaya Bali. Badan Penghubung mempunyai sarana *show window* seni dan budaya Bali di Jakarta yaitu di Anjungan Bali TMII. Segala pelayanan dan kegiatan promosi seni budaya Bali dilaksanakan di Anjungan Bali seperti adanya pemandu wisata, pelatihan tari Bali, pelatihan gamelan Bali, pameran kerajinan dan kuliner khas Bali dan pagelaran-pagelaran seni budaya Bali. Di Tahun 2021 di Anjungan Bali tidak ada sama sekali kegiatan promosi karena adanya pandemi COVID-19.

Tabel 2.118 Nilai IKM Pengunjung Anjungan Bali TMII

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai IKM	85,50	90,30	92,00	88,50	73,29

Sumber: Banhub Prov Bali, 2022

Tabel 2.119 Jumlah Pengunjung Anjungan Bali TMII

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pengunjung (Orang)	240.000	252.000	166.957	41.295	26.568

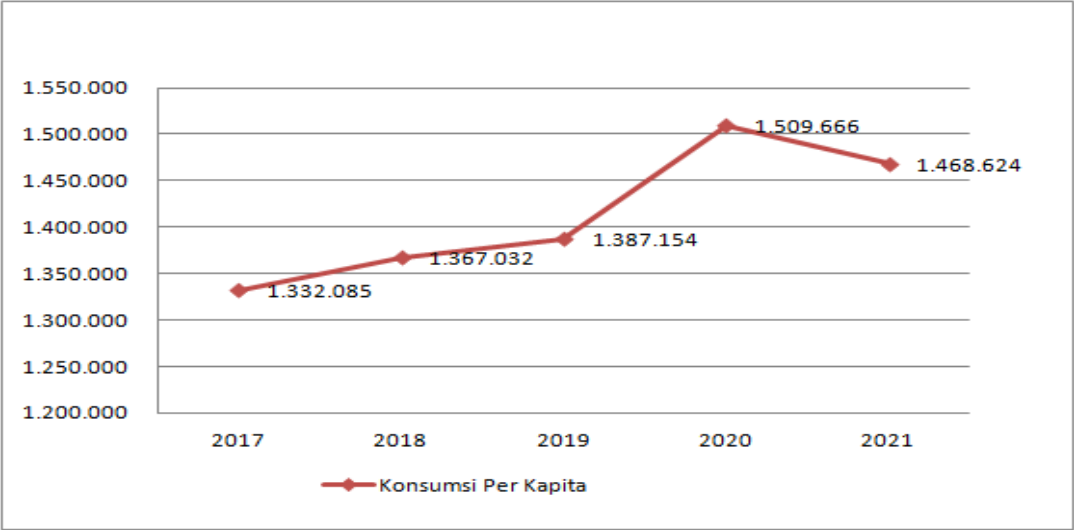
Sumber: Banhub Prov Bali, 2022

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021, yaitu 1.332.085 pada tahun 2017 menjadi 1.468.624 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pada sisi konsumsi rumah tangga di Provinsi Bali selama rentang waktu 5 tahun terakhir. Data ini sekaligus mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat di Provinsi Bali selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik, meskipun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021.

Gambar 2.176 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.4.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai 2019 secara rata-rata sudah di atas angka 100, namun mulai mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi rata-rata 94,275 dan tahun 2021

kembali mengalami penurunan rata-rata menjadi 92,758. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Ketidakstabilan harga komoditas yang dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakat, *supply and demand* menjadi faktor penyebab penurunan nilai harga. Disamping itu juga dipengaruhi oleh pandemi *COVID-19* dimana terjadi pembatasan pembatasan sosial terhadap aktivitas masyarakat, sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari petani dan masyarakat umum.

Tabel 2.120 Nilai Tukar Petani

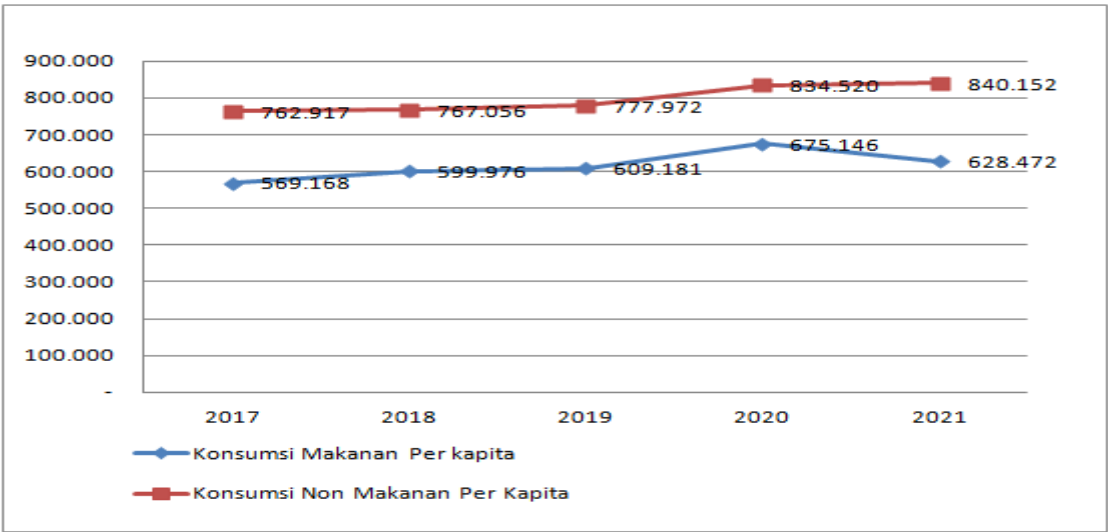
No	Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	106,25	103,48	103,65	96,27	93,09
2	Pebruari	105,79	103,88	103,98	96,63	92,46
3	Maret	104,72	103,5	104,13	97,1	91,46
4	April	104,98	103,18	103,45	94,81	92,12
5	Mei	104,57	103,23	103,37	93,54	91,93
6	Juni	104,49	103,54	103,58	93,53	92,38
7	Juli	104,14	103,4	104,89	93,92	92,58
8	Agustus	103,94	103,54	104,65	93,34	92,88
9	September	104,45	103,28	104,14	93,16	93,00
10	Oktober	104,49	103,7	103,66	92,83	93,40
11	Nopember	104,51	103,15	104,35	92,61	94,03
12	Desember	103,93	103,87	104,93	93,56	94,77

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.4.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran perkapita non makanan meningkat dari 762.917 pada tahun 2017 menjadi 834.520 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan kembali menjadi 840.152 di tahun 2021, sedangkan untuk pengeluaran perkapita makanan berfluktuasi dimana terjadi peningkatan dari 569.168 pada tahun 2017 menjadi 675.146 pada tahun 2020, namun kembali mengalami penurunan menjadi 628.472 di tahun 2021.

Gambar 2.177 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

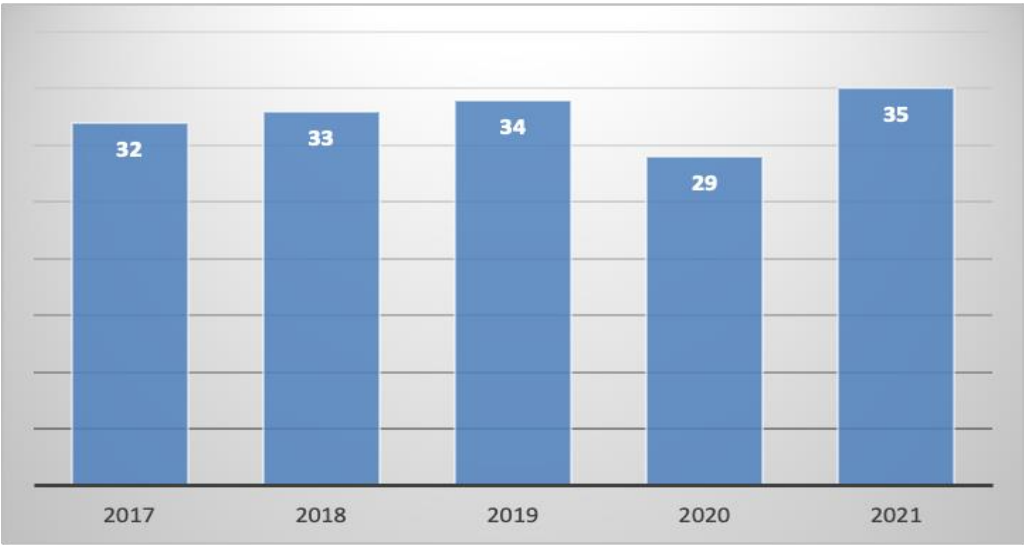


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.4.4 Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 Penduduk

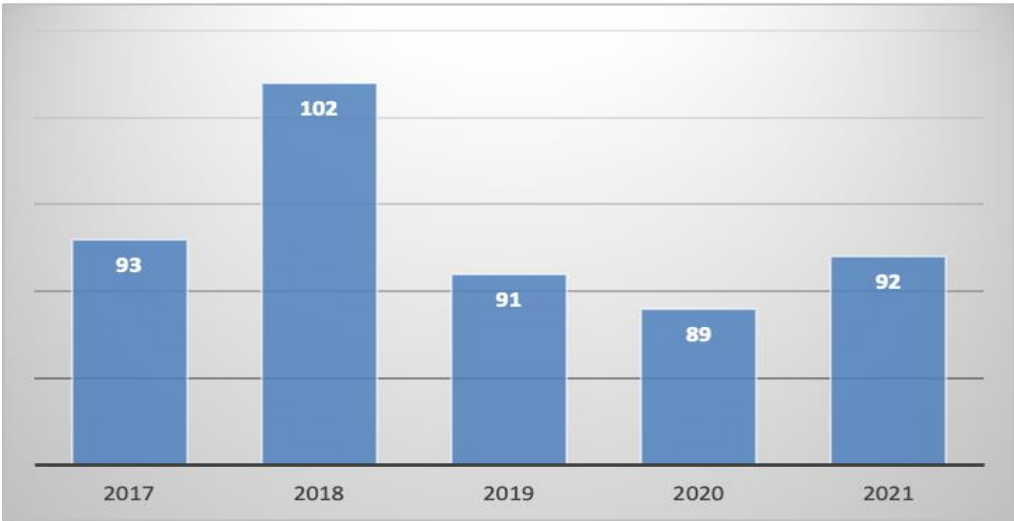
Jumlah layanan bank di Provinsi Bali tahun 2021 adalah 1.569 unit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 968 unit. Sementara jumlah ATM tahun 2021 sebanyak 3.102 buah meningkat dari tahun 2020 sebanyak 3.022 buah. Rasio jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2021 mencapai 35, meningkat dari 29 di tahun 2020. Sedangkan rasio jumlah ATM per 100.000 penduduk tahun 2021 sebanyak 92 meningkat dari tahun 2020 adalah 89.

Gambar 2.178 Jumlah Kantor Bank per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.179 Jumlah ATM per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

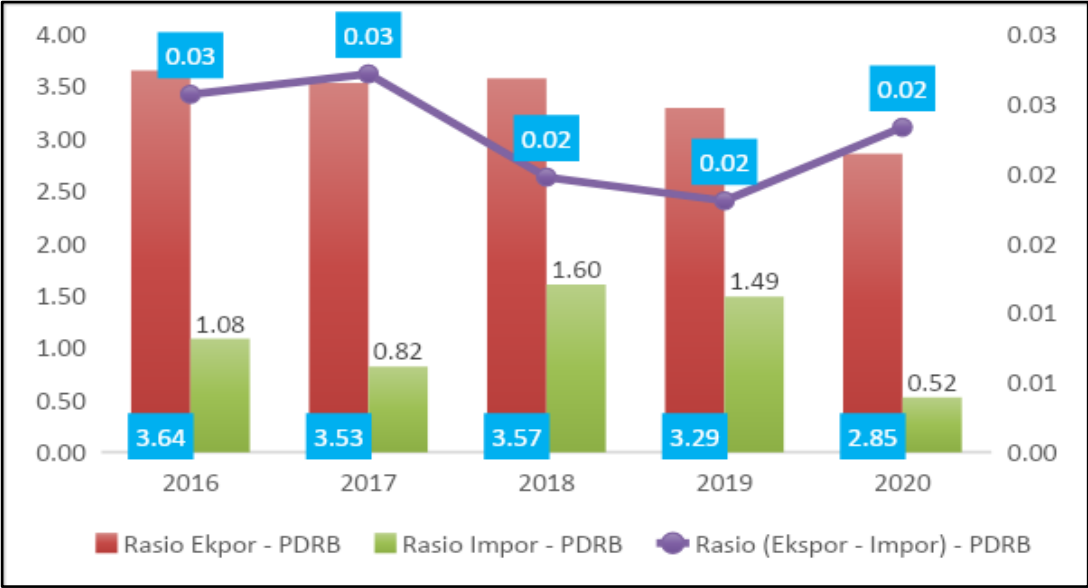


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.4.5 Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio (Ekspor-Impor) terhadap PDRB pada tahun 2016 dan 2020 adalah 0,03 persen dan 0,02 persen. Ini menunjukkan terjadinya penurunan rasio dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terjadinya penurunan ekspor disebabkan karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya ekspor di bidang jasa yaitu menurunnya kunjungan wisata mancanegara. Hal yang sama juga terjadi untuk rasio Impor terhadap PDRB dan rasio Ekspor terhadap PDRB seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.181.

Gambar 2.180 Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB di Provinsi Bali

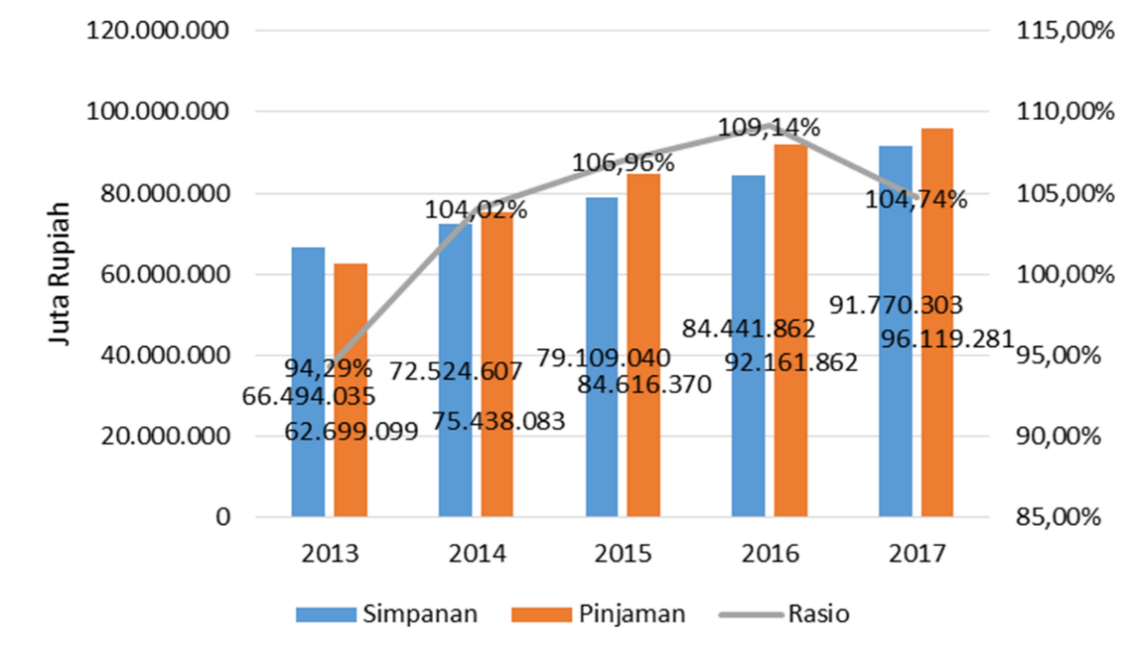


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.4.6 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank Umum cenderung meningkat dari 94,29 persen pada tahun 2013 menjadi 109,14 persen pada tahun 2016. Namun mengalami penurunan menjadi 104,74 persen pada tahun 2017.

Gambar 2.181 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum



Sumber: SIPD Provinsi Bali

2.4.7 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 secara tren mengalami penurunan, pada tahun 2018 angka kriminalitas menembus 4.607 kasus selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 4.376 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus kriminalitas di Provinsi Bali menurun menjadi 2.083 kasus dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi 1.937 kasus. Hal ini mengindikasikan keamanan di Provinsi Bali semakin kondusif.

Tabel 2.121 Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenisnya di Provinsi Bali, 2018-2021

Jenis Tindak Pidana	2018	2019	2020	2021
Pencurian	420	361	265	240
Penipuan	115	107	83	88
Pencurian Biasa	466	474	289	355
Penggelapan	218	202	131	142
Penganiayaan Ringan	89	5	278	255
Penganiayaan Berat	4	7	12	7
Narkotika	818	830	770	718
Perjudian	129	68	55	75
Pencurian dengan Kekerasan	59	58	53	27
Lain-lain	1.709	1.732	990	847

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

2.5 Hasil Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021

Standar Pelayanan Minimal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam rangka melaksanakan amanat

Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.122 Hasil Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target			Capaian		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Bidang Urusan Pendidikan							
a	Pelayanan Pendidikan Menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	100%	100%	74,70%	76,80%	75,80%
b	Pelayanan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	100%	100%	70,26%	70,26%	40,40%
2	Bidang Urusan Kesehatan							
a	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target			Capaian		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
b	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
a	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target			Capaian		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Perumahan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi Bali.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi Bali.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target			Capaian		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
5	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
a	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengawalan pejabat/orang-orang penting	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengamanan tempat-tempat penting	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional patroli	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target			Capaian		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
6	Bidang Urusan Sosial							
a	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target			Capaian		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
c	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanjar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target			Capaian		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
e	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 dari 30 IKU, terdapat 6 indikator yang telah mencapai/melebihi target kinerja akhir periode Tahun 2023, sebanyak 8 indikator yang capaiannya 90% sampai dengan <100%, 11 indikator yang capaiannya dibawah 90% dan terdapat 5 indikator yang sampai tahun 2021 belum tersedia data realisasinya (N/A).

Evaluasi capaian Indikator Aspek Kesejahteraan Rakyat sebanyak 23 indikator, pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 terdapat 10 indikator yang mencapai target, 11 indikator yang tidak mencapai target dan 2 indikator tidak tersedia data realisasinya. Tahun 2021 terdapat 8 indikator yang mencapai target, 13 indikator yang tidak mencapai target dan 2 indikator yang tidak ada tersedia data realisasinya. Evaluasi Capaian Aspek kesejahteraan Rakyat meliputi aspek kesejahteraan ekonomi dan aspek kesejahteraan sosial.

Hasil evaluasi capaian Indikator Aspek Pelayanan Umum dengan total indikator sebanyak 340 indikator, pada Tahun 2019 terdapat 226 indikator yang mencapai target, 95 indikator yang tidak mencapai target dan 19 indikator yang tidak ada tersedia data realisasinya. Tahun 2020 terdapat 203 indikator yang mencapai target, 115 indikator yang tidak mencapai target dan 22 indikator yang tidak ada tersedia data realisasinya. Tahun 2021 terdapat 195 indikator yang mencapai target, 118 indikator yang tidak mencapai target dan 27 indikator yang tidak ada tersedia data realisasinya. Sementara hasil Evaluasi Capaian Indikator Daya Saing secara umum aspek daya saing daerah Provinsi Bali diukur dari 6 kriteria, dan secara detail hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.123 Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Bali Tahun 2019-2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	REALISASI DAN TARGET TAHUN KE						% terhadap capaian akhir	TARGET KONDISI AKHIR 2023
				2019		2020		2021			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tingkat Inflasi Bali	%	3,4% (yoy)	3,5% ±1% (yoy)	2,37	3,00% ±1% (yoy)	0,55	3,00% ±1% (yoy)	2,01	67,00%	3,00% ±1% (yoy)
2	Ketersediaan pangan utama	%	100	100	100	100	100	100	126,9	126,9%	100
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	15	16	13.45	17	15.11	20	15.71	62,84%	25
4	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	%	25	27	98.7	29	29	31	31	88,57%	35
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	103.87	104.1	104.93	104.5	93.6	105	94,77	89,41%	106
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	116	116.6	111.44	117.3	100,12	117.9	100.19	84,05%	119.2
7	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71.4	71.8	71.99	72	72.13	72.3	72,24	99,64%	72.5
8	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9.72	10	8.84	10.28	8.95	10.56	9,06	79,47%	11.4
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16 -18 tahun	%	82.35	82.54	82.6	82.73	71,44	82.92	83,96	100,79%	83.3

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	REALISASI DAN TARGET TAHUN KE						% terhadap capaian akhir	TARGET KONDISI AKHIR 2023
				2019		2020		2021			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.21	13.49	8.84	13.63	8.95	13.77	13,40	95,37%	14.05
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	74.45	75,07 (74,97- 75,17)	75.38	75,31 (75,21- 75,41)	75.5	75,51 (75,41- 75,61)	75,69	97,31%	77,78 (75,56-80,00)
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	65.45	65	70.91	67	63.64	69.09	69,09	92,68%	74.55
13	Persentase Kemiskinan	%	3.91	3.85	3.61	3.59	4.45	3,75 (3,50-4,00)	4.72	79,45%	3,75 (3,50-4,00)
14	Tingkat pengangguran terbuka	%	1.4	1.28	1.57	1.17	5.63	5,63 (5,21-6,05)	5,37	43,20%	2,32 (1,90-2,74)
15	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76.56	75.77	73.77	76.03	74.32	76.3	73,54	95,76%	76.8
16	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	72.48	N/A	73.98	N/A	73.98	71.44	95,28%	74.98
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	23.4	45	23.26	45	18.76	18.34	16,66	64,25%	25.93
18	Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	9,950,080	0	9,262,290	8,542,500	774,020	1,371,680	335.590	1,93%	17,373,460

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	REALISASI DAN TARGET TAHUN KE						% terhadap capaian akhir	TARGET KONDISI AKHIR 2023
				2019		2020		2021			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Indeks kepuasan wisatawan	%	75	77	79	79	N/A	81	N/A	N/A	85
20	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,35 (6,20-6,40)	6,4 (6,20-6,60)	5.6	6,60 (6,40-6,80)	-9,33	3,00 (2,50-3,50)	-2,47	-49,40%	5,00 (4,60-5,40)
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	%	10	11	N/A	11.5	N/A	12	N/A	N/A	13
22	Indeks konektivitas	Rata-rata waktu tempuh (jam/100 km)	2.74	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2,55	110,87	2.3
23	Angka kriminalitas	Kasus	4,607	4,138	4,376	3,669	2,083	3,200	2,518	111,32%	2,262
24	Indeks demokrasi	%	78.8	79	81.83	80	77.59	81	75,35	93,02%	81
25	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	63.76	64.23	N/A	64.55	N/A	64.75	72,12	110,95%	65
26	Daya dukung lingkungan	%	16.93	17.11	N/A	17.29	17.29	17.46	N/A	N/A	17.82
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	61.51	62.08	63.62	62.64	71.98	63,21	63,31	87,44%	64.34

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	REALISASI DAN TARGET TAHUN KE						% terhadap capaian akhir	TARGET KONDISI AKHIR 2023
				2019		2020		2021			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	8.7	9.7	8.57	12.3	8.57	13,3	7,44	63,86%	15
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	0.4	0.43	0.43	1.1	0.68	0.97	2.27	162%	1.4
30	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66.16	68	68	70	70	72	70,10	92,24%	76

Tabel 2.124 Capaian Indikator Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.33	6.4 (6.20-6.60)	5.60 ▼	6.6 (6.40-6.80)	-9.33 ▼	3.00 (2.50-3.50)	-2.47 ▼	BPS	Belum tercapai
2	Laju Inflasi	%	3.4	3.50±1%	2.37 •	3.00±1%	0.55 •	3.00±1%	2.01 •	BPS	Inflasi Tahunan Kota Denpasar sebesar 2,01 (%) dan Inflasi Tahunan Kota Singaraja sebesar 2,39 (%)
3	PDRB per kapita	Jumlah	54.62 juta	53 juta-58 juta	57,76 juta •	56 juta- 61 juta	51,94 juta •	59 juta- 64 juta	50,38 juta •	BPS	
4	Indeks Gini	%	0.364	0.3582	0.37 ▼	0.3264	0.369 ▼	0.369	0.375 ▼	BPS	Belum Tercapai
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	3.91	3.85	3.61 •	3.59	4.45 ▼	3.75 (3.50-4.00)	4.72 ▼	BPS	
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	74.45	75.07 (74.97-75.17)	75.38 •	75.31 (75.21-75.41)	75.50 •	75.51 (75.41-75.61)	75.69 •	BPS	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Angka Melek Huruf	%	89.17	92.56	94.53 •	92.77	94.80 •	92.82	95.00 •	BPS	
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9.72	10	8.84 ▼	10.28	8.95 ▼	10.56	9.06 ▼	BPS	
9	Angka usia harapan hidup	tahun	71.4	71.8	71.99 •	72	72.13 •	72.3	72.24 •	BPS	
10	Persentase balita gizi buruk	%	2	2	1.33 •	2	0.6 •	1	0.2 •	Dinkes	
11	Prevalensi balita gizi kurang	%	13.1	13.1	4.46 •	12.5	8.5 •	10.1	1.7 •	Dinkes	
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100 •	100	100 •	100	100 •	Dinkes	
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2,561,518	2,533,567	2,508,294 ▼	2,588,567	2,567,919 ▼	2,653,567	2,580,523 ▼	BPS	Hasil Survey Angka Kerja Nasional Agustus 2021.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	76.56	75.77	73.77 ▼	76.03	74.32 ▼	76.30	73.54 ▼	BPS	Hasil Survey Angka Kerja Nasional Agustus 2021.
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	1.37	1.28	1.57 ▼	1.17	5.63 ▼	5.63 (5.2 1-6.05)	5.37 •	BPS	Hasil Survey Angka Kerja Nasional Agustus 2021.
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	77	N/A	79	N/A	80	N/A	BPS	Data tidak tersedia
17	Opini BPK	Status	Belum	WTP	WTP •	WTP	WTP •	WTP	WTP •	Inspektorat	Berdasarkan LHP BPK Nomor 65/LHP/XIX.DPS/05/2022 tanggal 13 Mei 2022
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	95.90	95.90	95.70 ▼	96.14	95.7 ▼	96.38	93 ▼	Distan dan TP	
19	Penguatan cadangan pangan	%	20	20	20 •	20	20 •	20	20 •	Distan dan TP	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	14.38	15.37	13.45 ▼	15.15	15.11 ▼	14.57	15.71 ●	BPS	
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	2.52	2.25	1.53 ▼	2.20	1.67 ▼	2.10	1.73 ▼	BPS	Kontribusi Sektor hanya rilis tahunan
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	1.48	1.38	1.34 ▼	1.46	1.54 ●	1.47	1.58 ●	BPS	Kontribusi Sektor hanya rilis tahunan
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	16.84	16.44	N/A	15.11	N/A	14.73	N/A	BPS	PDRB tidak menghitung kontribusi kelompok petani
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1	Pendidikan										
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	79.1	80.1	32.97 ▼	81.1	82,3 ●	82.1	31.07 ▼	Disdikpora	Merupakan Kewenangan disdikpora kab/kota
1.2	Angka Partisipasi Kasar										

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	105.9	106.688	109.38 ●	107.48	100,56 ▼	108.264	101.02 ▼	Disdikpora	
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	106.95	108.31	106.88 ▼	109.67	96.40 ▼	111.03	96.52 ▼	Disdikpora	
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	%	100.4	101.20	98.00 ▼	102.01	100,30 ▼	102.812	91.08 ▼	Disdikpora	
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan										
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	%	24.55	24.84	23.49 ▼	25.14	24,80 ●	25.43	24.84 ▼	Disdikpora	
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	%	11.73	12.02	11.69 ▼	12.32	21,78 ●	21.61	22.39 ●	Disdikpora	
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	%	23.41	23.7	23.89 ●	24	38.59 ●	24.29	31.84 ●	Disdikpora	
1.4	Angka Partisipasi Murni										
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96.06	100	99.63 ▼	100	92,06 ▼	100	95.99 ▼	Disdikpora	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	84.54	100	88.72 ▼	100	79,22 ▼	100	79.05 ▼	Disdikpora	
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	73.15	100	73.21 ▼	100	82,51 ▼	100	75.80 ▼	Disdikpora	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah										
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99.56	99.56	99.71 ●	99.56	99,21 ▼	99.56	95.99 ●	Disdikpora	
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	97.92	97.92	97.72 ▼	97.92	95,52 ▼	97.92	79.05 ▼	Disdikpora	
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	82.35	82.35	82.60 ●	82.35	71,44 ▼	82.35	75.80 ▼	Disdikpora	
1.6	Angka Putus Sekolah										
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.05	0.04	0.03 ▼	0.03	0,08 ●	0.02	0.01 ▼	Disdikpora	
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.10	0.09	0.12 ●	0.08	0,08 ●	0.07	0.06 ▼	Disdikpora	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0.25	0.24	0.55 ●	0.23	0,06 ●	0.22	0.20 ▼	Disdikpora	
1.7	Angka Kelulusan										
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Disdikpora	
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Disdikpora	
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.99	100	99.97 ▼	100	99,98 ▼	100	99.98 ▼	Disdikpora	
1.8	Angka Transisi (AT)										
1.8.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	%	96.24	97.3	96.73 ▼	98.36	98,74 ●	99.42	91.56 ▼	Disdikpora	
1.8.2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	%	95.85	96.91	96.79 ▼	97.97	97,89 ▼	99.03	93.77 ▼	Disdikpora	
1.9	Fasilitas Pendidikan										
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	93.28	94.03	96.69 ●	94.77	95,34 ●	95.52	43.21 ▼	Disdikpora	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs kondisi bangunan baik	%	92.07	92.82	97.46 ●	93.56	94,31 ●	94.31	51.21 ▼	Disdikpora	Merupakan kewenangan disdikpora kabupaten/kota
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	96.00	96.47	99.34 ●	96.93	97,06 ●	97.40	66.89 ▼	Disdikpora	karena adanya recofusing anggaran dan perlunya koordinasi yang lebih intensif
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	63.77	63.82	7.04 ▼	63.87	7,32 ▼	63.92	42.83 ▼	Disdikpora	Merupakan kewenangan disdikpora kabupaten/kota
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	%	18.12	23,61	0.86 ▼	22.73	23,08 ●	24.09	17.67 ▼	Disdikpora	karena adanya recofusing anggaran dan perlunya koordinasi yang lebih intensif
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	%	60.61	62,36	66.27 ●	64.99	63,84 ▼	65.57	62 ▼	Disdikpora	Merupakan kewenangan disdikpora kabupaten/kota

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	%	61.27	63,82	61.97 ▼	67.17	65,83 ●	66.83	77.79 ●	Disdikpora	
	- SMA/MA (per 1000 murid)	%	78.88		70.93 N/A		72,38 N/A		80.11 N/A	Disdikpora	
	- SMK (per 1000 murid)	%	70.05		56.65 N/A		63,78 N/A		75.47 N/A	Disdikpora	
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata										
1.14.1	SD/MI	%	0.03	0.03	1.54 ●	0.03	0,03 ●	0.03	0.01 ▼	Disdikpora	
1.14.2	SMP/MTS	%	0.09	0.09	2.01 ●	0.09	0,09 ●	0.09	0.06 ▼	Disdikpora	
1.14.3	SMA/SMK/MA	%	0.10	0.10	2.28 ●	0.10	0,10 ●	0.10	0.09 ●	Disdikpora	
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100.00	106.94	99.97 ▼	106.94	99,98 ▼	107.83	99.89 ▼	Disdikpora	
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	99.87	99.87	99.93 ●	99.88	99.91 ●	99.89	95.00 ▼	BPS	*)Capaian Smt II tahun 2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	92.98	92.98	94.53 ●	93.06	98,34 ●	93.14	95.00 ●	Disdikpora	
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV										
1.18.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	%	87.96	75.19	98.86 ●	75.88	76,85 ●	76.57	77.50 ●	Disdikpora	
1.18.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	%	93.16	94.08	94.31 ●	95.00	94,86 ▼	95.92	98.47 ●	Disdikpora	
1.18.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	%	95.91	96.42	96.62 ●	96.93	96,78 ▼	97.44	98.35 ●	Disdikpora	
1.18.4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)\	%	96.39	96.68	99.10 ●	96.97	97,08 ●	97.26	97.63 ●	Disdikpora	
2	Kesehatan										
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4,55	10	5.04 ●	10	5.51 ●	10	5.69 ●	Dinkes	
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5.17	6.67	0.62 ▼	6.35	0.59 ▼	6.99	6.33 ▼	Dinkes	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	3.2	4,50	3.59 ▼	4.41	3.66 ▼	4.41	4.22 ▼	Dinkes	
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	54.03	69	68 ▼	68	83.84 ●	67	189.79 ●	Dinkes	
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	%	1.45	1.46	1.5 ▼	1.47	22.81 ●	1.47	1.52 ●	Dinkes	
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk										
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	%	1.17	0.029	0.029 ●	0.029	0.027 ▼	0.027	0.027 ●	Dinkes	
2.6.2	Rasio klinik	%	0.021	0.021	0.021 ●	0.021	0.025 ●	0.032	0.033 ●	Dinkes	Jumlah klinik 129
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	%	0.12	0.12	0.12 ●	0.12	0.12 ●	0.12	0.12 ●	Dinkes	Jumlah pustu 518
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0.016	0.0016	0.016 ▼	0.0016	0.018 ●	0.0018	0.0019 ●	Dinkes	
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.35	0.36	1.56 ●	0.382	0.620 ●	0.95	0.97 ●	Dinkes	
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk										

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	%	1.85	1.94	1.85 ▼	2.04	2.630 ●	2.5	2.66 ●	Dinkes	
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	%	1.07	1.12	1.02 ●	1.18	1.46 ●	1.20	1.23 ●	Dinkes	
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	86.53	87.00	50.77 ▼	87.50	80.95 ▼	88.00	90.48 ●	Dinkes	
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95.97	96	97.57 ●	96.5	91.78 ▼	96.6	94.25 ▼	Dinkes	
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	99.16	100	96 ▼	100	90 ▼	100	95.67 ▼	Dinkes	
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinkes	
2.14	Case Detection Rate TBC	%	30	33	34 ●	34	19 ▼	35	24.48 ▼	Dinkes	
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	%	89	90	89 ▼	90	88 ▼	90	83.21 ▼	Dinkes	
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinkes	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17	Incidence Rate DBD	/100.00 0 pendud uk	21.1	110	116 ●	108	269.94 ●	106	59.84 ▼	Dinkes	Kasus BDB di Bali mengalami penurunan dan hal ini yang diharapkan
2.18	Penderita diare yang ditangani	%	70.20	100	64.12 ▼	100	100 ●	100	100 ●	Dinkes	
2.19	Angka kematian Malaria	%	0	<1	0 ▼	<1	0 ▼	<1	0 ▼	Dinkes	
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 pendud uk	0.02	< 1	0.01 ●	< 1	0.01 ●	< 1	0.01 ●	Dinkes	
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	%	66.4	70	72 ●	75	72 ▼	80	84 ●	Dinkes	
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	%	57.54	55	57 ●	55	57 ●	55	55 ●	Dinkes	
2.23	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	21	21	21 ●	21.5	21 ▼	22	22 ●	Dinkes	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinkes	
2.25	Cakupan kunjungan bayi	%	102.92	100	100 ●	100	99.92 ▼	100	96.81 ▼	Dinkes	
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	%	80	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinkes	
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	%	0.12	0.12	0.12 ●	0.12	0.12 ●	0.12	0.12 ●	Dinkes	
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	94.49	94.6	94.65 ●	95	86.91 ▼	95.5	90.42 ▼	Dinkes	
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	%	96.81	97	88.03 ▼	97.5	89.94 ▼	98	95.39 ▼	Dinkes	
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	35.71 ▼	100	72.88 ▼	100	75.56 ▼	Dinkes	
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	74.75 ▼	100	99.9 ▼	100	74.44 ▼	Dinkes	
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinkes	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.33	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	87.89 ▼	100	100 ●	100	86.49 ▼	Dinkes	Pemeriksaan penjangkaran dilakukan pada bulan Agustus pada tahun ajaran murid
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinkes	
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinkes	
2.36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3.1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	71.51	72.01	73.99 ●	74.26	75.55 ●	76.80	76.84 ●	D. PUPR Perkim	
3.2	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	%	68.00	68.50	57.46 ▼	69.40	62.47 ▼	58.06	70.50 ●	D. PUPR Perkim	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.4	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	%	80.81	77.44	82.66 ●	77.71	78.25 ●	77.98	79.01 ●	D. PUPR Perkim	79,01 - Berdasarkan Hasil Survey pada tahun 2021, karena belum dilakukan survey untuk tahun 2022
3.5	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	%	58	60	60 ●	64	56.31 ▼	68	64.60 ▼	D. PUPR Perkim	
3.6	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi yang bersertifikat	%	70	70	16.50 ▼	72	20.00 ▼	20	13.80 ▼	D. PUPR Perkim	
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	D. PUPR Perkim	
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan pengujian Jasa Konstruksi	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100.00 ●	D. PUPR Perkim	
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	%	100	100	100 ●	100	89.81 ▼	100	50.31 ▼	D. PUPR Perkim	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.10.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	%	86	87	67.82 ▼	89	70.33 ▼	90	90.00 ●	D. PUPR Perkim	
3.10.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	%	82	87	99 ●	88.50	87.26 ▼	89	- N/A	D. PUPR Perkim	Sambungan SR per akhir Juni sebanyak 15084 SR sedangkan perencanaan sd DSDP II 16147 SR, sehingga capaiannya per smtr I sebesar 93,42%
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang	%	90	91	100 ●	92	100 ●	93	93 ●	D. PUPR Perkim	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
4.5	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah	Persentase (%)	12	24	24 ●	36	28.44 ▼	48	- N/A	D. PUPR Perkim	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.6	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	%	8.2	8.0	7.70 ▼	7.70	7.70 ●	8.0	- N/A	D. PUPR Perkim	Tahun 2021 dlm tahap perencanaan dgn no DPA: DPPA/A.2/I.03.I.04. 2.10.01.0000/001/2 022, Keg: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Paket Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi PSU Permukiman, Lokasi : Desa Serahi, Desa Mengani dan Desa Belancan, Kec Kintamani, Kab. Bangli.

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat										
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	29.83	29.97	29.83 ▼	30,11	29.83 ▼	30.32	30.26 ▼	Satpol PP	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Satpol PP	
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	35.54	35.55	35.55 ●	35.56	39.77 ●	35.57	51.44 ●	Satpol PP	
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	44.62	44.63	44.63 ●	44.64	57.13 ●	44.65	65.81 ●	Satpol PP	
5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Satpol PP	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Sosial										
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	0.58	0.25	5.26 ●	0.27	0.06 ▼	0.29	0 N/A	Dinsos P3A	Tidak terdapat bantuan sosial pada APBD Dinas Sosial P3A Provinsi Bali sejak tahun 2021
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	0.67	0.96	10.48 ●	0.99	0.67 ▼	1.02	0.76 ▼	Dinsos P3A	
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	0.41	0.63	10.29 ●	0.65	0.43 ▼	0.67	0.43 ▼	Dinsos P3A	
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0.96	N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	Dinsos P3A	Program Pemberdayaan Sosial melalui Kube kepada PMKS dalam Panti dari tahun 2019 tidak ada
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	3,8	60	100 ●	60	100 ●	60	60 ●	Dinsos P3A	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	25	20	- N/A	20	N/A N/A	20	N/A N/A	Dinsos P3A	Tidak teralokasi anggaran untuk untuk WKBSM
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinsos P3A	
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinsos P3A	
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	60.03	60	17.81 ▼	60	52.63 ▼	60	4.8 ▼	Dinsos P3A	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
1	Tenaga Kerja										
1.1	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Per 1000 perusa haan	0,006:100 0 perusaha an	30 kasus 100% diganti 0,003 : 1000 perusahaan	0,003:1000 perusahaan ●	56 kasus 100% diganti 0,003 : 1000 perusahaan	0,003:1000 perusahaan ●	0,004:1000 perusahaan	0,003:10 00 perusah aan ●	Disnaker ESDM	
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	155	55.88 ▼	26	100 ●	100	50 ▼	Disnaker ESDM	
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	78.05	4113	80.44 ●	9977	100 ●	100	63.54 ▼	Disnaker ESDM	
1.4	Keselamatan dan perlindungan	%	0.94	146	3.18 ▼	183	4.28 ▼	4.71	5.66 ●	Disnaker ESDM	
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	29.93	92.630	32.1 ▼	96.050	33.12 ▼	33.26	42.77 ●	Disnaker ESDM	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0 ●	0	0 ●	0	0 ●	Disnaker ESDM	Tidak ada perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah yang tercatat
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	4.49	575	9.43 ▼	690	6.02 ▼	6.84	5.97 ▼	Disnaker ESDM	untuk target sampai dng tahun 2021 dan capaian sampai dng thn 2020 akan dirubah pada saat RPJMD telah ditetapkan.
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	42.26	183	67.07 ▼	226	17.89 ▼	21.79	23.49 ▼	Disnaker ESDM	
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	38.4	368	22.4 ▼	32	39.27 ●	17.6	18.86 ●	Disnaker ESDM	
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	75	100 ●	90	100 ●	100	100 ●	Disnaker ESDM	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	80	75	80 ●	261	80 ▼	-	N/A N/A	Disnaker ESDM	Dari tahun 2021 tidak ada dilaksanakan secara khusus terkait pelatihan kewirausahaan.
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	0.073:10.000 penduduk	0	0.071:10.000 penduduk ●	7.73	0.069:10.000 penduduk ●	0.069:10.000 penduduk	0.076:10.000 penduduk ●	Disnaker ESDM	Data jumlah lulusan menggunakan data tahun sebelumnya, karena data tahun 2022 belum tersdia, dan data jumlah penduduk menggunakan data proyeksi BPS.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	46.03	46.23	47.29 ●	46.43	47.53 ●	46.63	48.31 ●	Dinsos P3A	
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	9.09	9.90	14.11 ●	11.90	16.00 ●	13.90	16.36 ●	Dinsos P3A	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	46.70	47.10	49.47 ●	47.60	37.71 ▼	48.10	36.38 ▼	Dinsos P3A	
2.4	Rasio KDRT	%	0.056	0.049	0.035 ▼	0.048	0.021 ▼	0.047	0.013 ▼	Dinsos P3A	
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	72.55	72.65	65.86 ▼	72.75	70.75 ▼	72.85	67.86 ▼	Dinsos P3A	
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinsos P3A	
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinsos P3A	
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinsos P3A	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu										
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinsos P3A	
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinsos P3A	
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dinsos P3A	
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	88.50	88.50	100 ●	88.50	100 ●	88.50	100 ●	Dinsos P3A	
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	1.01	1.00	0.97 ●	1.00	1.00 ●	1.00	0.97 ●	Dinsos P3A	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	0.97	0.98	0.87 ▼	0.99	1.03 ▼	1.00	0.89 ▼	Dinsos P3A	
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	0.94	0.95	0.73 ▼	0.96	0.98 ●	0.97	0.72 ▼	Dinsos P3A	
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	%	0.93	0.94	1.00 ●	0.95	0.96 ●	0.96	1.05 ●	BPS	
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	0.93	0.94	0.94 ●	0.95	0.999 ●	0.96	1.00 ●	BPS	
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	-	-	N/A N/A	-	N/A N/A	-	N/A N/A	BPS	
3	Pangan										
3.1	Ketersediaan Pangan Utama										
3.1.1	Padi	Ton	847,523	849,523	836,081 ▼	851,523	783,989 ●	853,523	786,101 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	Data Angka Sementara 2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1.2	Jagung	Ton	43,892	44,000	54,920 ●	44,500	68,415 ●	45,000	61,086 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	Data Angka Sementara 2021
3.1.3	Kedelai	Ton	2,500	2,550	1,896 ▼	2,601	1,857 ▼	2,653	2,757 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	Data Angka Sementara 2021
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	4,408	4,596	4,458 ▼	4,686	7,099 ●	4,778	6,554 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	Data Angka Sementara 2021
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	53,267	54,000	91,766 ●	54,500	70,038 ●	55,000	77,846 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	Data Angka Sementara 2021
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	170	173	151 ▼	175	300 ●	177	386 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	Data Angka Sementara 2021
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	25,042	25,543	15,610 ●	26,054	27,774 ●	26,575	15,886 ▼	Distan dan Ketahanan Pangan	Data Angka Sementara 2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2,646	2,647	2,656 ●	2,648	2,650 ●	2,649	2,654 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita tahun 2022 bisa didapatkan hasilnya pada smtr II, karena data yang digunakan adalah data tetap tahun 2021 dan data tetapnya baru ada di smstr II
		Gram/Kap/Hari	63	63	63.10 ●	63	64,31 ●	63	63 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80.00	80.00	100.00 ●	85.00	85.00 ●	90.00	90 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pertanahan										
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	%	0	5	5 ●	15	15 ●	30	30.32 ●	BPN	1. Subyek hak tidak jelas/tidak sesuai dgn bidangnya/tidak diketahui pemiliknya(noname); 2. Belum adanya kesepatan antara masy. dgn Desa Adat terhadap Subyek haknya; 3. Pemekaran desa adat; 4. Partisipasi aparat desa dan relawan belum maksimal karena sedang difokuskan pada penyaluran dana bantuan penanganan Covid terkait PPKM; 5. Beberapa objek PTSL masih sengketa;

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											6. Pemilik tidak mau mensertipatkan tanah dengan berbagai alasan; 7. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan petugas yuridis dan fisik tidak maksimal dalam bekerja/adanya pembatasan terhadap zona merah; 8. Bidang berada disempadan pantai / Kawasan hutan;
5	Lingkungan Hidup										
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya ●	Ya	Ya ●	Ya	Ya ●	Dishut dan LH	
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya ●	Ya	Ya ●	Ya	Ya ●	Dishut dan LH	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya ●	Ya	Ya ●	Ya	Ya ●	Dishut dan LH	
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen ●	2 Dokumen	0 ▼	3 Dokumen	2 Dokumen ▼	Dishut dan LH	Pemuthakiran dan Finalisasi Dokumen RPPLH Provinsi Bali
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya	ya ●	ya	ya ●	ya	ya ●	Dishut dan LH	
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.89	92.39	94.35 ●	92.89	88.34 ▼	87.27	N/A N/A	Dishut dan LH	Data Tahun 2022 masih dalam perhitungan
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	63,17	64.67	63.33 ▼	66.17	64.33 ▼	67.93	N/A N/A	Dishut dan LH	
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	38,57	39.57	40.79 ●	40.57	40.58 ●	41.03	N/A N/A	Dishut dan LH	
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Jumlah	N/A	N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	61.72	N/A N/A	Dishut dan LH	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	6	2	1 ▼	2	N/A N/A	2	N/A N/A	Dishut dan LH	Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi untuk tahun 2022 tidak dapat terlaksana karena tidak adanya anggaran pelaksanaan kegiatan
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1	1 ●	1	1 ●	1	1 ●	D. PUPR Perkim	
5.12	Jumlah limbah B3 yang dikelola			-	9 Kab/Kota ●	-	9 Kab/Kota ●	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota ●	Dishut dan LH	Pembinaan dan pengawasan dilakukan ke 9 Kab/Kota, namun belum semua Kab/Kota menginput data limbah B3.
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persentase (%)	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Dishut dan LH	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 sudah tidak ada izin pengumpulan Limbah B3, namun berubah menjadi Persetujuan Tenis. Tahun 2021 ada 1 perusahaan yang memperpanjang izin menjadi persetujuan teknis yaitu PT. Bali Bumi Berkarya dan 1 perusahaan yang mengajukan Persetujuan teknis yaitu PT. Bakti Bumi Berseri. Untuk Tahun 2022 belum ada perusahaan yang mengajukan persetujuan teknis.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	17 perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	30 perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	25 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Dishut dan LH	3 Perusahaan pengawasan melalui dokumen yang diterima (pengawasan tidak langsung); 2 perusahaan pengawasan langsung.
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1 ●	1	1 ●	1	1 ●	Dishut dan LH	Pejabat Pengawas PPLHD belum dikukuhkan kembali
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	100	100	N/A N/A	100	N/A N/A	100	0.067 ▼	Dishut dan LH	Penetapan MHA dimaksud termasu dalam Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tahun 2022 belum dilaksanakan fasilitasi MHA dalam menghimpun data dan informasi profil MHA Kearifan lokasi atau pengetahuan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	%	100	100	N/A N/A	100	N/A N/A	100	0.067 ▼	Dishut dan LH	
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	%	100	100	N/A N/A	100	N/A N/A	100	0.067 ▼	Dishut dan LH	
5.19	Penetapan hak MHA	%	100	100	- N/A	100	N/A N/A	100	100 ●	Dishut dan LH	
5.20	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	30	0	- N/A	30	731 ●	30	60 ●	Dishut dan LH	Terlaksananya penguatan dan pendampingan pengelolaan sampah sebanyak 16 TPS3R di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, dengan jumlah lebih kuran 48 orang.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.21	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	100	100	100 ●	100	N/A N/A	100	N/A N/A	Dishut dan LH	Tidak adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana/prasarana dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota
5.22	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	30	40	- ●	40	731 ●	30	60 ●	Dishut dan LH	Terlaksananya penguatan dan pendampingan pengelolaan sampah sebanyak 16 TPS3R di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, dengan jumlah lebih kuran 48 orang.
5.23	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	30 Adiwiyata , 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata	46 Sekolah Adiwiyata, 1 Kalpataru ●	30 Adiwiyata	1 kalpataru ▼	30 Adiwiyata	7 Adiwiyata ▼	Dishut dan LH	Adanya perubahan target menjadi 10 orang/kelompok/sekolah. Usulan calon penghargaan nasional 7 Kalpataru dan 17 Adiwiyata (10 Calon Sekolah Adiwiyata Nasional

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan 7 Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri). Target 30 Adiwiyata merupakan penghargaan Adiwiyata Provinsi, namun tidak dilaksanakan.
5.24	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	15 kasus	20 kasus	10 kasus ●	20 kasus	3 kasus ●	2 Kasus	2 Kasus ●	Dishut dan LH	-
5.25	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	930,545,298	945,225,853	556,257.56 ●	961,841,563	894.951,05 ●	975,583,128	402,344 ●	Dishut dan LH	Data Tahun 2022 masih dalam proses penginputan di aplikasi SIPSN oleh Kab/Kota.
5.26	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi	%	73	80	54.74 ▼	75	44,96 ▼	74	44.96 ▼	Dishut dan LH	Data Tahun 2022 masih dalam proses penginputan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)										di aplikasi SIPSN oleh Kab/Kota.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	0.93	0.95	0.96 ●	0.97	0,48 ▼	0.99	0.99 ●	DPMD Dukcapil	
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	84	86.67	96.13 ●	89.17	92,08 ●	91.67	98.46 ●	DPMD Dukcapil	
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	40	45.38	37.33 ▼	50.38	42,76 ▼	55.38	47.94 ▼	DPMD Dukcapil	
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	ada	ada	ada ●	ada	ada ●	ada	ada ●	DPMD Dukcapil	
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	sudah	sudah	sudah ●	sudah	sudah ●	sudah	sudah ●	DPMD Dukcapil	
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	94.62	96.5	98.99 ●	98.5	99,10 ●	99	99.6 ●	DPMD Dukcapil	
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	33.64	41.5	42.07 ●	45.5	43,91 ▼	49.5	46.98 ▼	DPMD Dukcapil	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	43.78	49.06	49.21 ●	58.02	59,59 ●	66.98	65.09 ▼	DPMD Dukcapil	
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	%	12.29	12.29	12.29 ●	12.29	12,29 ●	12.29	12.29 ●	DPMD Dukcapil	
7.3	Persentase LPM Berprestasi	%	14.24	14.1	15.56 ●	16.33	15,56 ▼	18.56	16.97 ▼	DPMD Dukcapil	
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	%	60.61	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	DPMD Dukcapil	
7.5	Persentase Posyandu aktif	%	69.8	71.8	75.67 ●	73.8	78,60 ●	75.8	75.8 ●	DPMD Dukcapil	
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	200	225	225 ●	250	250 ●	275	275 ●	DPMD Dukcapil	
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50	76.92	76.92 ●	76.92	91,67 ●	76.92	76.92 ●	DPMD Dukcapil	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2.15	2.15	2.15 ●	2.15	2.15 ●	2.15	N/A N/A	DPMD Dukcapil	Data Agregat Tahun 2021
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.1	2.2	2.3 ●	2.2	2.2 ●	2.3	2.3 ●	DPMD Dukcapil	Capaian IKU Provinsi Bali Tahun 2021
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	29	33	33 ●	35	35 ●	40	40 ●	DPMD Dukcapil	Data BKKBN
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	13.73	15	15 ●	17	17 ●	20	20 ●	DPMD Dukcapil	PKK,BKKBN,Kanwil Agama, Koalisi Kependudukan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	1	1 ●	2	2 ●	2	2 ●	DPMD Dukcapil	Instruksi Gubernur Nomor 1545 Tahun 2019
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	3	3	3 ●	3	3 ●	3	3 ●	DPMD Dukcapil	BKKBN,PKK, DINKES, DISDIK, Perangkat Desa
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	2	5	11 ●	6	6 ●	8	11 ●	DPMD Dukcapil	7 Sekolah dan 7 DISDIK Kab/Kota
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2.02	2,3	2,3 ●	2,3	2,3 ●	2,3	2,4 ●	DPMD Dukcapil	Data Agregat Tahun 2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	57,9	57,9	79.95 ●	57.5	82,35 ●	57.3	82.06 ●	DPMD Dukcapil	Radalgram Mei 2022
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	36	30	32 ●	29	29 ●	28.4	18 ▼	DPMD Dukcapil	Capaian IKU Provinsi Bali Tahun 2021
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	35.12	36.15	36.42 ●	36.42	36,42 ●	37.10	N/A N/ A	DPMD Dukcapil	Tidak memiliki data tersebut
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	18.56	13.53	5.61 ▼	12.18	12,18 ●	10.96	5.45 ▼	DPMD Dukcapil	Radalgram Mei 2022
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	43.46	43	47.49 ●	42.45	42,25 ▼	42	48.03 ●	DPMD Dukcapil	Radalgram Mei 2022
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	29.6	24.6	92.39 ●	24	24 ●	23.5	15.1 ▼	DPMD Dukcapil	N/A

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	87.80	87.70	92.39 ●	91.16	24.00 ▼	91.42	88.01 ▼	DPMD Dukcapil	Data PK 21
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	85.2	86	87.9 ●	87	91,16 ●	88	84.4 ▼	DPMD Dukcapil	Data PK 21
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	70.48	70.48	78.2 ●	71.5	87,0 ●	72	83.16 ●	DPMD Dukcapil	Data PK 21
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	77.2	77.2	80.5 ●	80	84,3 ●	85	36.8 ▼	DPMD Dukcapil	Baru mencapai 23 Kegiatan yang memiliki PPKS, Data BKKBN
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	266	466	87.7 ●	500	80 ▼	510	342 ▼	DPMD Dukcapil	N/A

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	319 ●	100	500 ●	100	98.29 ▼	DPMD Dukcapil	
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	88.6	90	100 ●	91	100 ●	92	86.17 ▼	DPMD Dukcapil	Data PK 21
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	88.17 ●	1	91 ●	1	1 ●	DPMD Dukcapil	
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	DPMD Dukcapil	
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	7	8	100 ●	10	100 ●	12	12 ●	DPMD Dukcapil	N/A

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	22,7	22,7	8 ▼	22,7	10 ▼	22,7	21.7 ▼	DPMD Dukcapil	Harus dengan hasil survey
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	9.4	10.2	22.1 ●	15.03	22.7 ▼	15.5	99 ▼	DPMD Dukcapil	Hanya dari dana APBD
9	Perhubungan										
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum										
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	351,739	386,912	314,877 ▼	422,085	435,525 ●	457,258	1,323,23 ₂ ●	Dishub	Bidang Angkutan
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	13,958,28 ₆	13,958,286	15,697,534 ●	13,958,286	4,945,965 ▼	13,958,286	1,797,10 ₆ ▼	Dishub	Bidang Angkutan
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	23,779,17 ₈	23,800,000	24,169,561 ▼	23,900,000	5,806,270 ▼	24,000,000	3,776,59 ₁ ▼	Dishub	Bidang Moda
9.2	Jumlah izin trayek	Jumlah	141	145	96 ▼	150	96 ▼	155	382 ●	Dishub	Bidang Angkutan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	146,324	147,787	148,167 ▼	150,728	114,498 ▼	153,742	92.237 ▼	Dishub	pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan di kabupaten Klungkung dan Jembrana tidak melaksanakan uji berkala karena tidak memiliki sertifikat akreditasi pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan ditjen perhubungan darat sesuai dengan PM No. 19 Tahun 2021, selain itu melakukan uji kir berkala sebanyak 2 kali dalam setahun untuk masing-masing kendaraan wajib uji
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	8	8	8 ●	8	11 ●	8	34 ●	Dishub	Sesuai dengan KP 432 tahun 2017

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	2	1 ▼	2	1 ▼	2	1 ▼	Dishub	
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20 ●	20	20 ●	20	20 ●	Dishub	
9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	3	3	3 ●	3	3 ●	3	3 ●	Dishub	
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	%	25.41	26.56	27.01 ▼	35.00	27.01 ▼	45.00	28.89 ▼	Dishub	
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:470	1:400	0,14722222 2 ●	1:400	07:19,1 ▼	1:350	0,000234 9 ▼	Dishub	
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum										
9.9.1	Angkutan Darat										
	- Orang	Jumlah	351,739	386,912	314,877 ▼	422,085	435,525 ●	457,258	1,323,23 2 ●	Dishub	
	- Barang	Jumlah	121,818	127,908	392,129 ●	134,303	70,612 ▼	141,018	147,124 ●	Dishub	
9.9.2	Angkutan Laut										

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Orang	Jumlah	13,958,286	14,656,200	15,697,534 ●	15,354,115	4,945,965 ▼	16,052,029	1,797,106 ▼	Dishub	
	- Barang	Jumlah	543,159,485	570,317,459	200,412,990 ▼	597,475,434	1,539,540 ▼	624,633,408	83,935,216 ●	Dishub	
9.9.3	Angkutan Udara										
	- Orang	Jumlah	23,779,178	23,800,000	24,169,561 ●	23,900,000	5,806,270 ▼	24,000,000	3,776,591 ▼	Dishub	
	- Barang	Jumlah	313,520,106	350,096,479	372,013,846 ●	351,597,443	47,276,383 ▼	353,113,417	63,085,539 ▼	Dishub	
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun										
9.10.1	Dermaga										
	- Orang	Jumlah	13,958,286	14,656,200	15,697,534 ●	15,354,115	4,945,965 ▼	16,052,029	1,797,106 ▼	Dishub	
	- Barang	Jumlah	543,159,485	570,317,459	200,412,990 ▼	597,475,434	2,425,410 ▼	624,633,408	83,935,216 ▼	Dishub	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.10.2	Bandara										
	- Orang	Jumlah	23,779,178	23,800,000	24,169,561 ●	23,900,000	5,806,270 ▼	24,000,000	3,776,591 ▼	Dishub	
	- Barang	Jumlah	313,520,106	350,096,479	372,013,846 ●	361,597,443	47,276,383 ▼	353,113,417	63,085,539 ▼	Dishub	
9.10.3	Terminal										
	- Orang / Barang	Jumlah	351739 / 121818	386912/ 127908	314877/ 392129 ▼	422085/ 134303	326710/ 70 612 ▼	457258/ 141018	1323232/ 147124 ▼	Dishub	
10	Komunikasi dan Informatika										
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kim			120 ●		120 ●		120 ●	Diskominfo	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	50.00	60.00	N/A N/A	65.00	64.97 ▼	75.00	100.00 ●	Diskominfo	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon										
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	%	93.62	93.75	78.69 ▼	93,90	94.93 ●	94.07	83.62 ▼	Diskominfo	
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	%	5.34	4.48	3.51 ▼	4.34	3.65 ▼	3.84	2.08 ▼	Diskominfo	
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	%	46.42	51.23	54.08 ●	57.72	85.67 ●	62.50	67.75 ●	Diskominfo	
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	%	33.25	35.50	23.50 ▼	45.23	25.82 ▼	47.12	25.00 ▼	Diskominfo	
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
11.1	Persentase Koperasi Aktif	%	87.42	87.92	79.67 ▼	88.42	88,42 ●	88.92	68.94 ▼	Diskop UKM	
11.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	312,967	312,967	326,009 ●	327,353	313,967 ▼	412,265	412,265 ●	Diskop UKM	
11.3	Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk lokal	%	4.1	4.2	8.15 ●	5,7	8,35 ●	6,27	8.35 ●	Diskop UKM	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Penanaman Modal										
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	166	168	176 ●	170	3,958 ●	172	5,128 ●	DPMPTSP	
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	4.46	4.63	5.33 ●	4.80	5,33 ●	4.98	12.95 ●	DPMPTSP	
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	34.16	29.68	28.53 ▼	29.39	2,47 ▼	29.10	4.43 ▼	DPMPTSP	
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	0.16	0.16	0.16 ●	0.16	-22,41 ●	0.16	16.98 ●	DPMPTSP	
12.5	Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	Indeks	86	86	86 ●	86	92.99 ●	86	92.554 ●	DPMPTSP	
13	Kepemudaan dan Olah Raga										
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	76	77	77 ●	78	78 ●	79	65 ▼	Disdikpora	
13.2	Persentase Wirausaha Muda	%	0.82	0.83	0.83 ●	0.84	0 N/A	0.85	0 N/A	Disdikpora	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	51.2	52	52 ●	54	0 N/A	56	56 ●	Disdikpora	
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	38.88	40	50 ●	42	40 ▼	44	40 ▼	Disdikpora	
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	%	3.31	5	6.5 ●	7.5	0 N/A	10	23 ●	Disdikpora	
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	924 Orang	177 Orang	180 orang ●	186 Orang	0 N/A	192 Orang	173 Orang ▼	Disdikpora	
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	20 cabor	22 cabor	24 cabor ●	24 cabor	0 N/A	26 cabor	26 cabor ●	Disdikpora	
14	Statistik										
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9 ●	9	9 ●	9	9 ●	Diskominfos	
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1 Buku	1 Buku	1 Buku ●	1 Buku	1 Buku ●	1 Buku	1 Buku ●	Diskominfos	
15	Persandian										
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam	Persentase (%)	91.30	91.30	93.62 ●	93.48	100.00 ●	95.65	100.00 ●	Diskominfos	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Komunikasi Perangkat Daerah										
16	Kebudayaan										
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	4 ●	3	2 ▼	3	3 ●	Disbud	Kegiatan Bulan Bahasa Bali dan Pesta Kesenian Bali
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan										
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19,336	19,336	2,435 ▼	19,336	22,809 ●	19,336	22,809 ●	Disbud	Cagar Budaya registrasi nasional + Cagar Budaya Penetapan + Benda Museum Bali + Benda Taman Budaya
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97	67 ▼	97	493 ●	97	533 ●	Disbud	Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	631	88 ▼	651	673 ●	671	680 ●	Disbud	Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	4 ▼	5	16 ●	5	5 ●	Disbud	Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	328	328	226 ▼	328	532 ●	328	532 ●	Disbud	Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu										
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	-	-	9 ●	-	2,879 ●	-	- ●	Disbud	CB yang ditetapkan dengan SK Menteri, SK BPCB dan SK Bupati/Walkot dengan UU No. 5/92 dan UU 11/2010
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	-	-	2 ●	-	47 ●	-	- ●	Disbud	
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	-	-	11 ●	-	115 ●	-	122 ●	Disbud	
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	-	-	4 ●	-	4 ●	-	4 ●	Disbud	
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	233	260	337 ●	287	361 ●	314	220 ▼	Disbud	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Perpustakaan										
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	%	6	6.65	10.77 ●	8.5	8.039 ●	8.5	6 ▼	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	225.450	1.000	1,700 ●	1,500	130,610 ●	2,000	2,869 ●	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	-	N/A	- N/A	N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	61.823	30,000	41,538 ●	32,000	14,220 ▼	35,000	48 ▼	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	9,651	500	625 ●	750	39,790 ▼	1,000	42,659 ●	B. Organisasi Setda Prov. Bali	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	124	25	25 ●	30	30 ●	30	34 ●	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
18	Kearsipan										
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	42	20	11 ▼	20	20 ●	20	20 ●	Biro UP Setda Prov. Bali	Pengawasan Internal dilakukan semester II
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	70	30	N/A N/A	30	2 ▼	30	100 ●	Biro UP Setda Prov. Bali	
	Urusan Pilihan										
1	Pariwisata										
1.1	Kunjungan Wisatawan										
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	9,757,991	8,200,000	10,545,039 ●	8,395,000	4,213,316 ▼	4,000,000	4,301,592 ●	Dinas Pariwisata	Akibat Pandemi Covid-19
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	6,070,473	7,100,000	6,291,141 ▼	8,000,000	1,050,366 ▼	0	51 N/A	Dinas Pariwisata	Akibat Pandemi Covid-19

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Lama Tinggal Wisatawan										
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	4.00	4.50	4.30 ▼	4.60	4,84 ●	2.30	2.09 ▼	Dinas Pariwisata	Capaian smt 2 lebih kecil dari semester 1 karena lama tinggal wisnus semester 2 secara bulanan lebih kecil karena meningkatnya virus covid 19
1.2.2	Wisatawan Manca negara	Jumlah	10.45	9.8	8.2 ●	10.1	2,45 ▼	3.50	2.87 ▼	Dinas Pariwisata	Target tdk tercapai akibat Pandemi Covid-19
1.3	PAD Sektor Pariwisata	%	48.51	51.92	N/A	49.72	5,73 ▼	16.19	16.14 ▼	Dinas Pariwisata	Target tdk tercapai akibat Pandemi Covid-19
2	Pertanian										
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	14.38	15.37	13.45 ▼	15.15	15.11 ▼	14.57	15.71 ●	BPS	
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	2.25	2.25	1.53 ▼	2.20	1.67 ▼	2.10	1.73 ▼	BPS	*)Capaian Smt II tahun 2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	1.48	1.38	1.34 ▼	1.46	1.54 ●	1.47	1.58 ●	BPS	*)Capaian Smt II tahun 2021
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	%	13.81	16.44	N/A N/A	15.11	N/A N/A	14.73	N/A N/A	BPS	Yang dirilis BPS adalah kontribusi lapangan usaha/sector pertanian, bukan kelompok tani.
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar										
2.5.1	Padi	Jumlah	60.70	60,12	59.09 ▼	62.14	60,47 ▼	60.60	58.91 ▼	Distan dan Ketahanan Pangan	Terjadinya anomaly iklim dan adanya serangan OPT shg menurunkan luas tanam padi sehingga menyebabkan produktivitas turun
2.5.2	Jagung	Jumlah	43,892	24,34	33.05 ●	26.46	46,36 ●	33.17	32.18 ▼	Distan dan Ketahanan Pangan	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.5.3	Kedelai	Jumlah	2,687	15,28	13.34 ▼	14.11	13,68 ▼	13.09	13.78 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	Terjadinya anomaly iklim serta teknik budidaya yang masih bersifat tradisional
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	9,011	9.011	9.011 ●	9.011	9.011 ●	9.011	9.011 ●	Distan dan Ketahanan Pangan	Data tersedia pada semester II
3	Kehutanan										
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	1.6	2.72	223.24 ●	2.63	7.72 ●	2.57	16.24 ●	Dishut dan LH	RHL = 550 Ha. Target penurunan luas lahan kritis tahun 2022 yaitu 27.190 Ha.
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	105.50	696.00	639.42 ▼	580.00	797,00 ●	835.00	835.00 ●	Dishut dan LH	Kerusakan kawasan hutan 0 Ha dari target penanganan penurunan kerusakan hutan 835 Ha.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	%	60	60	73.15 ●	60	73.15 ●	60	71.19 ●	Dishutd an LH	HL = 97.405,95 Ha total luas kawasan hutan 136.827,05 Ha sesuai dengan SK Penetapan kawasan Hutan Provinsi Bali.
4	Energi dan Sumber Daya Mineral										
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	100	99.49	100 ●	99.67	100 ●	100	100 ●	Disnaker ESDM	Dari akhir tahun 2018 telah mencapai 100 persen
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	80	80	80 ●	80	100 ●	100	100 ●	Disnaker ESDM	Dari akhir tahun 2018 telah mencapai 100 persen

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa izin	%	-	50	- N/A	60	;- N/A	-	- N/A	Disnaker ESDM	Data yang dikelolanya data dari pelaku usaha pertambangan yang melakukan perizinan. Sejak terbitnya UU Nomor 3 tahun 2020 (yang efektif berlaku 11 Desember 2020), kewenangan pengelolaan minereal dan batubar amenjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
5	Perdagangan										
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	%	2	2.44	-40.98 ●	2.6	21.55 ●	2.75	1.25 ▼	Disperindag	
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	%	15.09	18.87	15.09 ▼	22.64	15.09 ▼	26.41	17.25 ▼	Disperindag	
6	Perindustrian										

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.1	Cakupan Bina Perajin	%	3.35	3.50	6.10 ▼	3.64	14.28 ▼	3.78	N/A	Disperindag	
7	Transmigrasi										
7.1	PersentaseTransmigran Swakarsa	%	-	40	- N/A	40	- N/A	-	- N/A	Disnaker ESDM	Tidak terdapat transmigran swakarsa
8	Kelautan dan Perikanan										
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	136,496.55	220,706.50	127,869.66 ▼	228,873.48	127,835.47 ▼	121,713.44	141,580.89 ●	Dislautkan	
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	34.56	31,17	31.77 ●	32.2	38,83 ●	34.87	44.81 ●	Dislautkan	dihitung 1 tahun sekali pada smt II
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	100	60	100 ●	70	100 ●	80	100 ●	Dislautkan	Capaian akhir tahun
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	107.36	60	183.88 ●	70	118,23 ●	80	78.33 ●	Dislautkan	
8.5	ProporsiTangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	97,157.60	99100.75	109,335.22 ▼	101,082.77	95,973.24 ▼	103,104.42	99,902.39 ▼	Dislautkan	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	%	80	80	80 ●	80	80 ●	80	80 ●	Dislautkan	
8.7	Nilai Tukar Nelayan	%	104.64	106.21	111.44 ▼	104.6	100,12 ▼	117.9	100.19 ▼	Dislautkan	
	Penunjang Urusan										
1	Perencanaan Pembangunan										
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Bappeda	
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Bappeda	
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Bappeda	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada ●	Ada	Ada ●	Ada	Ada ●	D. PUPR dan Perkim	
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	98.52 ▼	100	95.27 ▼	100	100 ●	Bappeda	
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Bappeda	
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	Bappeda	
2	Keuangan										
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP ●	WTP	WTP ●	WTP	WTP ●	BPKAD	WTP (hasil tahun 2021)
2.2	Persentase SiLPA	%	6	6	6 ●	6	2.79 ▼	6	6 ●	BPKAD	Angka merupakan angka realisasi un audited
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6	6	6 ●	6	2.79 ▼	6	10.76 ●	BPKAD	Angka merupakan angka realisasi unaudited

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	0	0	0 ●	0	1 kegiatan ▼	0	N/A N/A	BPKAD	Program/kegiatan yang tidak terlaksana pada Pemprov. Bali tidak tersedia datanya pada BPKAD Provinsi Bali.
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20	20	20 ●	20	29.63 ●	20	20 ●	BPKAD	
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	10	10	10 ●	10	12.95 ●	10	10 ●	BPKAD	
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	26,70 : 73,30	25,21 : 74,78	28,15:71,85 ●	26,66:73,33	31,78:68,22 ●	28,00:71,99	N/A N/A	BPKAD	Ada perubahan peraturan, jadi Tahun 2021 tidak ada lagi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1,249,485 ,906,461	1,629,026,1 99,757	1,302,125,7 15,639 ▼	1,702,672,66 9,256	1,054,748,7 83,172 ▼	1,797,918,0 66.903	1,084,84 5,438,64 2 ▼	BPKAD	
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu ●	Tepat Waktu	Tepat Waktu ●	Tepat Waktu	Tepat Waktu ●	BPKAD	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	20	20	20 ●	20	20 ●	20	20 ●	BKPSDM	
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	32	80	41.67 ●	48	47.23 ●	43	28.02 ●	BKPSDM	
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	7.61	30.00	39.12 ●	32.00	43.49 ●	34.00	25.07 ▼	BKPSDM	
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	45	46	45 ▼	49	42 ▼	49	37 ▼	BKPSDM	
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4,355	4,490	5,284 ●	4,441	4,654 ●	4,389	4,277 ▼	BKPSDM	
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	6,924	1,397	5,981 ●	1,057	5,932 ●	1,079	5,861 ●	BKPSDM	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penelitian dan Pengembangan										
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	BRIDA	
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100 ●	100	100 ●	100	100 ●	BRIDA	
	Penerapan SIDA:		-	-	-	-	-	-	-	BRIDA	
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44 ●	13,6 6/44	16,6 6/36 ●	13,6 6/44	16,66/36 ●	BRIDA	
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	%	66,6% 6/9	66,6% 6/8	66,6% 6/8 ●	66,6% 6/8	77,8% 7/9 ●	66,6% 6/8	77,8%7/9 ●	BRIDA	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Pengawasan		,								
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	9	44	44 ●	16	95.13 ●	27	99.10 ●	Inspektorat	· Per 1 Juli 2022 jumlah rekomendasi 2005-2021= 1287, ·sesuai rekomendasi= 1254 - belum sesuai = 13 · Tindak lanjut BPK tdk bisa ditentukan setiap tahun, melainkan akumulasi dari tahun 2005-2022.
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0.06	5	5 ●	5	0.01 ▼	5	2 ▼	BKSDM	
5.3	Jumlah Temuan BPK	%	14	55	55 ●	55	100 ●	30	47 ●	Inspektorat	
6	Sekretariat Dewan										
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada ●	Ada	Ada ●	Ada	Ada ●	Sekretariat DPRD	Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat kelengkapan DPRD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Provinsi Bali telah ditetapkan dalam SK DPRD Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun Sidang 2022
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada ●	Ada	Ada ●	Ada	Ada ●	Sekretariat DPRD	Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) selalu mengacu kepada rencana Kerja DPRD sebagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD mendukung rencana kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada ●	Ada	Ada ●	Ada	Ada ●	Sekretariat DPRD	Anggaran Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD telah tertuang dalam DPA No: DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 3 Januari 2022, Semester Berencana Provinsi Bali TA
	ASPEK DAYA SAING DAERAH										2022
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	%	17.45	17.14	17.91 ●	16.83	17.55 ●	16.52	17.85 ●	BPS	
2	Nilai Tukar Petani	%	103.87	104.10	98.16 ▼	104.50	94.27 ▼	105.00	92.84 ▼	BPS	
3	Angka kriminalitas	Kasus	4,607	4,138	4,376 ●	3,669	2,083 ▼	3,200	1,937 ▼	Polda Bali	
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72.48 (2017)	72.48	N/A N/A	73.98	N/A N/A	73.98	71.44 ▼	BPS	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	23.40	45	23.26 ▼	45	18.76 ▼	18.34	16.66 ▼	BPS	
6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	15	16	13.45 ▼	17	15.11 ▼	20.00	15.71 ▼	BPS	

Sumber: Evaluasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

2.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan /atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Kebutuhan Kerja Sama Antar Daerah (selanjutnya disingkat KSAD) semakin dirasakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga-lembaga KSAD yang telah ada, akan dibentuk dan dikembangkan. Keinginan dan inisiasi untuk membentuk lembaga KSAD ini didorong oleh tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah, bahwa mereka tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan hanya bersandar pada kemampuannya sendiri, tetapi juga tergantung kepada daerah lain, khususnya daerah-daerah tetangga.

KSAD telah dipandang sebagai salah satu bentuk solusi untuk meningkatkan kapasitas potensi daerah melalui pengembangan kinerja dengan memadukan potensi beberapa daerah dalam satu ikatan kerjasama. Pada era otonomi, setiap daerah dituntut untuk mampu berkompetisi dan bersaing dengan daerah lain agar mampu menarik investor dan mengoptimalkan pemanfaatan potensinya. Selain berkompetisi, peningkatan kapasitas daerah dapat dilakukan dengan bentuk lain. KSAD mampu menawarkan alternatif lain disamping dengan berkompetisi tersebut, yaitu dengan bekerja sama membangun dan memanfaatkan potensi masing-masing secara bersama. Kerjasama ini dilakukan untuk membangun potensi kewilayahan yang lebih besar, di dalam kerangka berkompetisi pada skala yang lebih luas. Melalui KSAD, daerah diajak untuk tidak hanya memandang potensi untuk berkompetisi melalui potensinya sendiri, tetapi memandangnya sebagai bagian dari sinergi kewilayahan yang lebih luas dan besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa Kerja Sama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan daerah lain, antara

daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 bahwa untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Selain KSAD juga dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri. Adapun Peraturan yang mendasari pelaksanaan kerjasama luar negeri adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri, dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menunjukkan adanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan dengan luar negeri, bahwa hubungan luar negeri tidak lagi merupakan monopoli negara (State Actor) tetapi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam mengimplementasikan KSAD terutama untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, menentukan kebijakan lebih lanjut, dilakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. Adapun kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai pihak diantaranya:

- A. Kesepakatan Bersama
 - a) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dengan nomor 075/01/KB/B.Pem.Kesra/I/2022.
 - b) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama

Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah dengan nomor 075/02/KB/B.Pem.Kesra/III/2022.

- c) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Teknis Pelaksanaan Penerimaan Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali dengan nomor 075/03/KB/B.Pem.Kesra/V/2022.
- d) Kesepakatan Bersama antara Universitas Pertamina dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali dengan nomor 075/04/KB/B.Pem.Kesra/VII/2022
- e) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Intelligent Transport System Indonesia tentang Penerapan Sistem Transportasi Cerdas di Provinsi Bali dengan nomor 075/06/KB/B.Pem.Kesra/VIII/2022.
- f) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Terbuka tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali dengan nomor 075/07/KB/B.Pem.Kesra/VIII/2022.
- g) Kesepakatan Bersama antara Universitas Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali dengan nomor 075/11/KB/B.Pem.Kesra/X/2022.

B. Perjanjian Kerjasama

- a) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Kerjasama Kajian/Penelitian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan nomor 075/01/PKS/B.Pem.Kesra/I/2022.
- b) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Stikom Indonesia (STIKI Indonesia) tentang Pendampingan Desa Adat di Bali dengan nomor 075/02/PKS/B.Pem.Kesra/II/2022.
- c) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) tentang Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Provinsi Bali dengan nomor
075/03/PKS/B.Pem.Kesra/IV/2022.

- d) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali dengan nomor 075/04/PKS/B.Pem.Kesra/III/2022.
- e) Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tentang Pengembangan Akses Pemasaran, Promosi, Pengembangan SDM dan Kemitraan Bagi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan nomor 075/05/PKS/B.Pem.Kesra/V/2022.
- f) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah 075/06/PKS/B.Pem.Kesra/V/2022.
- g) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata dengan nomor 075/07/PKS/B.Pem.Kesra/V/2022.
- h) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan dengan nomor 075/08/PKS/B.Pem.Kesra/V/2022.
- i) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama Bidang Kehutanan 075/09/PKS/B.Pem. Kesra/V/2022.
- j) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Kesehatan Bali di UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali 075/10/PKS/B.Pem. Kesra/V/2022.
- k) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Teknis Pelaksanaan

Penerimaan Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali 075/11/PKS/B.Pem. Kesra/VI/2022.

- l) Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali dengan nomor 075/12/PKS/B.Pem. Kesra/VI/2022.
- m) Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Politeknik Kesehatan Kartini Bali tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali dengan nomor 075/13/PKS/B.Pem. Kesra/VI/2022.
- n) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama Bidang Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dengan nomor 075/14/PKS/B.Pem. Kesra/VI/2022.
- o) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Tabanan dengan nomor 075/15/PKS/B.Pem. Kesra/VII/2022.
- p) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Buleleng dengan nomor 075/16/PKS/B.Pem. Kesra/VII/2022.
- q) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Klungkung dengan nomor 075/17/PKS/B.Pem. Kesra/VII/2022.
- r) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Karangasem dengan nomor 075/18/PKS/B.Pem. Kesra/VII/2022.
- s) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Penyediaan Tanaman Obat Pasca Panen dari Petani Lokal secara Berkelanjutan untuk

Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional di Provinsi Bali dengan nomor 075/21/PKS/B.Pem. Kesra/VIII/2022.

- t) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Gianyar tentang Penyediaan Tanaman Obat Pasca Panen dari Petani Lokal secara Berkelanjutan untuk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional di Provinsi Bali dengan nomor 075/22/PKS/B.Pem. Kesra/VIII/2022.
- u) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Bangli tentang Penyediaan Tanaman Obat Pasca Panen dari Petani Lokal secara Berkelanjutan untuk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional di Provinsi Bali dengan nomor 075/23/PKS/B.Pem. Kesra/VIII/2022.
- v) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem tentang Penyediaan Tanaman Obat Pasca Panen dari Petani Lokal secara Berkelanjutan untuk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional di Provinsi Bali dengan nomor 075/24/PKS/B.Pem. Kesra/VIII/2022.
- w) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Badung dengan nomor 075/25/PKS/B.Pem. Kesra/VIII/2022.

C. Nota Kesepakatan

- a) Nota Kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Sinergi Pelaksanaan Program Siap Siaga di Provinsi Bali dengan nomor 075/01/NK/B.Pem.Kesra/VIII/2022.
- b) Nota Kesepakatan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Sinergi Dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Bali dengan nomor 075/04/NK/B.Pem.Kesra/IX/2022.

D. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

- a) KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sarbagikung dengan Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.22/M.PPN/Hk/02/2020.

KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ayung untuk peningkatan cakupan pemenuhan pelayanan air minum bagi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

2.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Bali di Kabupaten/Kota

Pembangunan infrastruktur strategis yang sedang berlangsung di tahun 2022 dan direncanakan akan dikerjakan di Provinsi Bali diantaranya:

- 1) Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang berlokasi di Kabupaten Klungkung dengan luas 334 Ha direncanakan selesai di tahun 2025 dengan anggaran sebanyak Rp. 2,5 Triliun.
- 2) Pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani menyerap anggaran Rp 1,6 Triliun yang diperkirakan selesai pada tahun 2025.
- 3) Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali Ditargetkan selesai Tahun 2025 dengan anggaran Rp. 24 Triliun
- 4) Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub Denpasar ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan anggaran Rp. 6,1 Triliun.
- 5) Pembangunan Bendungan Sidan Badung ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 1,8 Triliun.
- 6) Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan akan selesai pada bulan Agustus tahun 2023 dengan menelan anggaran sebanyak Rp. 450 Miliar.

2.8 Capaian BUMD dalam Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Bali memiliki 5 (lima) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) maupun Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yaitu: 1) PT Jamkrida Bali Mandara; 2) Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna; 3) PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Sementara

4) Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali; dan 5) Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi baru saja terbentuk di tahun 2022 ini.

1) PT Jamkrida Bali Mandara

PT Jamkrida Bali Mandara dibentuk sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 dan Akte Pendirian Nomor 27 Tanggal 21 Nopember 2010 dengan modal dasar 50 Milyar dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 4 tanggal 11 Maret 2022. Adapun maksud dan tujuan dari pembentukan Perseroan Terbatas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tujuan: a) Memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; b) Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah Bali; c) Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dari laporan kinerja keuangan selama lima tahun terakhir pendapatan daerah dari deviden berfluktuasi dengan capaian tertinggi sebanyak 1,27 Miliar di tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 dengan hasil deviden untuk Pemerintah Provinsi Bali sebesar 924 juta lebih. Secara detail kondisi keuangan PT Jamkrida Bali Mandara selama tahun 2017-2021 ditampilkan pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125 Kondisi Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (dalam juta Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Aset	173.996,18	205.809,06	274.060,38	300.729,71	361.270,85
2	Liabilitas	33.498,83	63.182,16	126.524,92	154.753,96	198.838,59
3	Ekuitas	140.497,35	142.626,90	147.535,45	145.975,75	162.432,26
4	Pendapatan Usaha	20.886,28	27.777,25	54.461,59	54.378,01	62.261,71
5	Beban Pokok Pendapatan	1.738,44	3.117,85	5.755,84	7.215,75	10.540,21
6	Lab a Kotor	19.147,84	24.659,39	48.705,74	47.162,25	51.721,50
7	Beban Usaha	15.938,31	22.476,46	45.928,95	47.259,51	49.666,99

No	Uraian	Tahun (dalam juta Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
8	Pendapatan (beban) Diluar Usaha Pokok	1.223,20	1.060,75	1.435,71	2.757,47	1.021,40
9	Laba Usaha	4.432,73	3.243,68	4.212,50	2.660,21	3.075,92
10	Laba Bersih	4.432,73	3.243,68	4.212,50	2.660,21	3.075,92
11	Dividen Bagi Pemprov Bali	930,69	823,86	986,56	1.279,82	924,57

Sumber: PT Jamkrida Bali Mandara, 2022

2) Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna didirikan berdasarkan Akta pendirian Perda Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah. Selanjutnya mengalami beberapa kali Akta perubahan yaitu a) Perda Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah; b) Perda No 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah; c) Perda No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah; dan Perda No. 6 Tahun 2022 tanggal 26 Maret 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah *"Kerta Bali Saguna"*.

Adapun Maksud dan tujuan didirikannya Perusda ini adalah a) untuk dapat menyeimbangkan ekonomi Bali *"In Harmonia Progressio"*, dimana kemajuan Pariwisata diselaraskan dengan kemajuan di bidang energi, pertanian, industri pangan, sandang, papan, infrastruktur, ekonomi digital, transportasi, kesehatan, keamanan dan koordinasi potensi pariwisata untuk pengembangan event-event internasional; b) Mengembangkan struktur kerjasama dengan koperasi produk/service dengan dasar ekonomi gotong royong dimana Perusda diharapkan mampu menjadi katalisator dalam integrasi peningkatan kualitas SDM, inovasi/teknologi, akses pasar dan akses permodalan; c) Mengembangkan networking *"Bali Incorporated"* dengan Pemda Bali, BPD, LPD, Desa Adat, Kadin Bali, pengusaha putra daerah, untuk bersama-sama mengembangkan industri daerah untuk kemakmuran Bali.

Dari laporan kinerja keuangan selama lima tahun (2017-2021) terakhir Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna belum mampu memberikan Deviden kepada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Secara detail laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna ditampilkan pada Tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126 Kondisi keuangan Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna Tahun 2017-2021

No	Uraian	5 (lima) Tahun Terakhir (Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Aset	8.285,44	7.220,74	7.664,45	6.685,07	15.390,70
2	Liabilitas	1.120,14	2.390,25	4.616,56	6.209,01	21.854,09
3	Ekuitas	7.165,29	4.830,48	3.047,89	478,06	(6.463,39)
4	Pendapatan Usaha	4.641,08	3.034,73	3.381,62	4.997,60	9.552,38
5	Beban Pokok Pendapatan	(759,56)	(818,23)	(692,00)	(2.431,91)	(7.389,75)
6	Laba Kotor	3.593,02	2.110,43	2.594,44	2.471,80	2.162,62
7	Beban Usaha	(2.776,67)	(3.964,16)	(4.707,92)	(4.803,23)	(6.816,99)
8	Laba Usaha	816,34	(1.853,73)	(2.113,47)	(2.331,43)	(4.654,37)
9	Laba Bersih	1.730,32	(2.158,75)	(1.783,59)	(2.571,82)	(6.939,45)
10	Dividen Bagi Pemprov Bali	-	-	-	-	-

Sumber: Perumda Kerta Bali Saguna, 2022

3) PT Bank Pembangunan Daerah Bali

PT Bank Pembangunan Daerah Bali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan terbatas (PT) Bank BPD Bali dengan akta pendirian Nomor 7 Tanggal 12 Mei Tahun 2004. Untuk meningkatkan kegiatan usahanya PT Bank BPD Bali modal dasar awal pendirian sebesar 75 Miliar ditingkatkan menjadi 4 Triliun dalam Rapat umum Pemegang Saham tahun 2015.

Bank BPD Bali adalah bank pemerintah Provinsi Bali yang memiliki aktivitas nasional dan internasional yang turut berperan dalam pembangunan yakni mensukseskan program pemerintah

khususnya Pemerintah Provinsi Bali, serta untuk menumbuhkan perekonomian dengan fokus melayani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan kredit terhadap UMKM, dan selalu akan menjadi tumpuan bagi ketahanan perekonomian Bali. Hal ini sesuai dengan slogan Bank BPD Bali yaitu Bersama Anda Membangun Bali. Bank BPD Bali menjadi tumpuan dalam ketahanan perekonomian dan berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian di Bali, yang ditunjukkan pula dengan kinerja keuangan yang memberikan deviden kepada Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali hingga 175 Miliar di tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 141 Miliar. Secara detail kinerja keuangan dari Bank BPD Bali dari tahun 2017 hingga 2021 ditampilkan pada Tabel 2.127 berikut.

Tabel 2.127 Kondisi keuangan PT BPD Bali Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (dalam Miliar Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Aset	22.150,90	22.454,49	24.655,73	26.109,36	28.910,97
2	Liabilitas	18.881,99	19.060,03	21.154,01	22.904,65	25.591,63
3	Ekuitas	3.268,90	3.394,45	3.501,71	3.204,70	3.319,34
4	Pendapatan Usaha	2.457,71	2.468,09	2.656,37	2.631,93	2.583,31
5	Beban Pokok Pendapatan	862,14	851,14	936,85	914,52	912,67
6	Laba Kotor	712,41	738,41	773,79	706,20	740,02
7	Beban Usaha	883,15	878,52	945,71	1.011,19	930,60
8	Laba Usaha	705,81	733,15	771,22	697,56	721,03
9	Laba Bersih	524,50	537,02	569,85	521,80	549,15
10	Dividen Bagi Pemprov Bali	167,27	168,92	175,50	158,43	141,50

Sumber: PT BPD Bali, 2022

- 4)

Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali

Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali didirikan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Maksud dari pembentukan Perseroda ini yaitu untuk mengelola dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dalam bentuk kawasan

pembangunan terpadu daerah di Kabupaten Klungkung serta seluruh prasarana dan sarana penunjang lainnya. Secara khusus tujuan didirikan Perseroda ini yaitu untuk: a. melestarikan, memajukan dan memuliakan budaya Bali yang sudah dikembangkan oleh Krama dan Adat Bali untuk dapat diperkenalkan secara luas kepada masyarakat nasional maupun internasional; b. memajukan perekonomian Krama Bali yang mendedikasikan dirinya pada pelestarian pemajuan dan pemuliaan seni, olahraga, dan produk budaya lainnya; c. rehabilitasi lahan tidak produktif dan rawan bencana untuk melakukan penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, dan mengembangkan manfaat sosial serta ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan sekitarnya; dan d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

5) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali sesuai dengan Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2022. Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara profesional, akuntabel, dan transparan. Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi bertujuan untuk a) melakukan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha jasa pariwisata di Bali yang melaksanakan kegiatan transaksi penjualan produk dan/ atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha jasa lainnya dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan, pemerintah, dan masyarakat, melalui portal satu pintu pariwisata Bali; b) memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan pendapatan Provinsi; dan c) memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Provinsi secara *sakala-niskala*.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2017-2022)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah adalah pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah sedangkan pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan

penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005, gambaran kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun 2017-2022 disajikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dana penyesuaian, dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara time series menyajikan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Bali dari tahun 2017-2022 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2017-2022

Kode Rek.	Uraian	2017 (x Rp Juta)	2018 (x Rp Juta)	2019 (x Rp Juta)	2020 (x Rp Juta)	2021 (x Rp Juta)	2022 (x Rp Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	5.992.161,67	6.259.367,61	6.645.538,87	5.718.339,70	5.923.153,29	5.873.474,46	-0,12
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.398.472,28	3.718.499,64	4.023.156,31	3.069.474,22	3.117.070,09	3.850.887,35	3,80
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.872.354,21	3.230.732,17	3.463.996,39	2.607.990,40	2.458.530,85	3.229.957,00	4,13
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	46.431,88	40.241,78	33.841,78	18.966,86	14.298,57	14.266,00	-19,61

Kode Rek.	Uraian	2017 (x Rp Juta)	2018 (x Rp Juta)	2019 (x Rp Juta)	2020 (x Rp Juta)	2021 (x Rp Juta)	2022 (x Rp Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	188.456,14	170.219,14	171.076,25	177.395,02	160.711,86	220.696,47	4,49
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	291.230,04	277.306,55	354.241,89	265.121,94	483.528,72	385.967,88	12,00
4.2	Dana Perimbangan	2.535.995,75	2.493.979,97	2.548.063,87	2.564.355,20	2.763.602,02	1.967.302,00	-3,98
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169.597,18	182.554,55	126.532,56	206.614,86	217.120,44	160.646,00	3,86

Kode Rek.	Uraian	2017 (x Rp Juta)	2018 (x Rp Juta)	2019 (x Rp Juta)	2020 (x Rp Juta)	2021 (x Rp Juta)	2022 (x Rp Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.260.842,52	1.268.585,39	1.325.847,56	1.204.700,79	1.201.511,84	1.194.632,00	-0,97
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.105.556,05	1.042.840,04	1.095.683,76	1.153.039,55	1.344.969,74	612.024,00	-6,64
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	57.693,64	46.888,00	74.318,68	84.510,28	4.896,99	55.285,11	197,65
4.3.1	Pendapatan Hibah	15.654,53	5.388,00	5.884,28	5.708,00	4.924,11	4.925,11	-14,62
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00

Kode Rek.	Uraian	2017 (x Rp Juta)	2018 (x Rp Juta)	2019 (x Rp Juta)	2020 (x Rp Juta)	2021 (x Rp Juta)	2022 (x Rp Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500,00	41.500,00	68.434,41	78.802,28	37.584,26	50.360,00	103,01
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	34.539,11	0	0	0	0	0	0
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0
4.3.7	Alokasi Kurang Bayar DAK	0	0	0	0	0	0	0

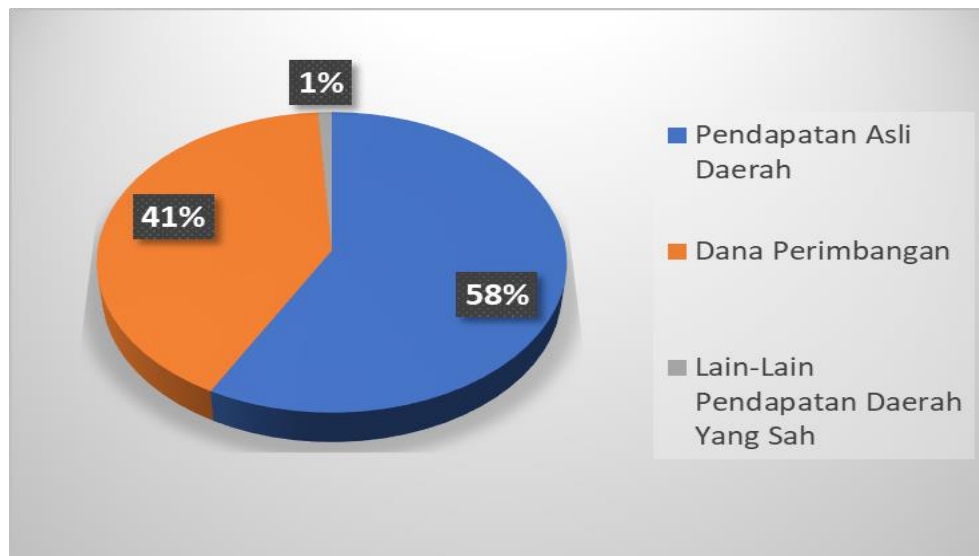
Kode Rek.	Uraian	2017 (x Rp Juta)	2018 (x Rp Juta)	2019 (x Rp Juta)	2020 (x Rp Juta)	2021 (x Rp Juta)	2022 (x Rp Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.3.8	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu Tahun 2017-2022 pertumbuhan pendapatan daerah berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,12%. Komposisi pendapatan asli daerah selama lima tahun tersebut secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3,8%, yang terutama ditopang dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memberikan sumbangan tertinggi yaitu rata-rata sebesar 12,00%. Pada pos dana perimbangan penurunan rata-rata selama kurun waktu 2017-2022 rata-rata sebesar -3,98%, penurunan ini disebabkan oleh Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,86%, dan diikuti oleh Dana Alokasi Khusus sebesar -6,64%. Hasil Pendapatan daerah dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang sangat signifikan selama kurun waktu 5 tahun disebabkan oleh tidak adanya bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya pada tahun 2018 sampai tahun 2022, namun demikian pertumbuhannya masih bisa diperbaiki akibat meningkatnya dana penyesuaian dan otonomi khusus untuk Provinsi Bali terutama pada tahun 2018 sampai tahun 2021.

Secara keseluruhan rata-rata proporsi pendapatan daerah Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai tahun 2022 didominasi oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan persentase sebesar 103,01% selanjutnya diikuti oleh pendapatan asli daerah sebesar 3,80% dan terakhir adalah lain-lain dana perimbangan dengan persentase 3,98%. Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Gambar 3.1 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah
Provinsi Bali Tahun 2017-2022



Sumber: Bapenda Provinsi Bali, 2022

Rincian dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

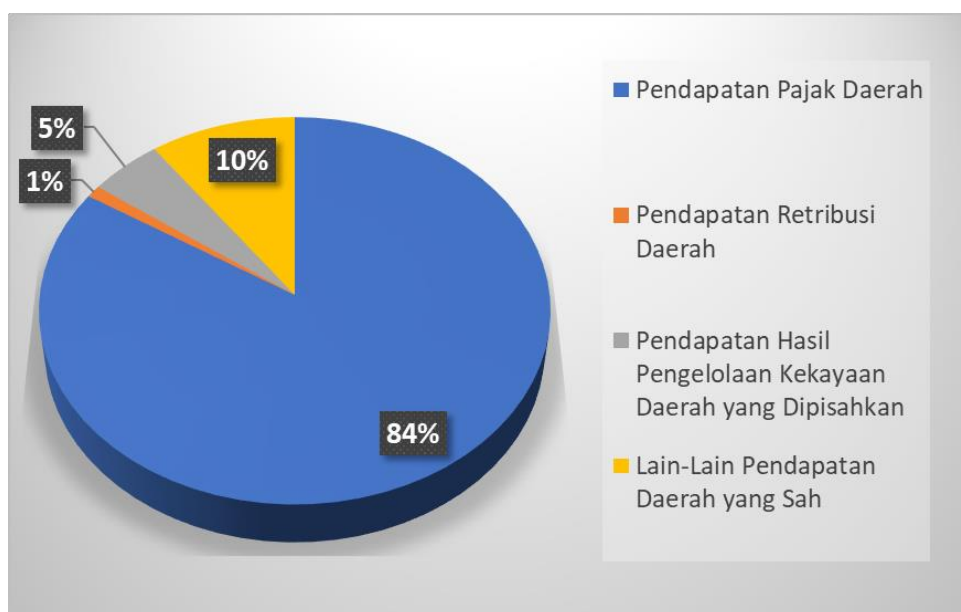
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara umum, kinerja pendapatan daerah Provinsi Bali periode 2017-2022, rata-rata pertumbuhan sebesar -0,12% (yoy). Pendapatan daerah Provinsi Bali yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sepanjang 6 tahun yaitu mencapai 3,80%, namun kenaikan tersebut masih dapat didukung dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang mampu memberikan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,00%. Dari tiga komponen lainnya mengalami kenaikan dan penurunan rata-rata pertumbuhan. Pendapatan Pajak mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,13%, Pendapatan Retribusi mengalami penurunan rata-rata sebesar -19,61%, dan Pendapatan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami rata-rata kenaikan sebesar 4,49%.

Rata-rata proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali selama tahun 2017–2022 posisi tertinggi masih didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah 84%, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 10%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5%, dan Pendapatan Retribusi Daerah 1%. Secara detail disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 3.2 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2017-2022

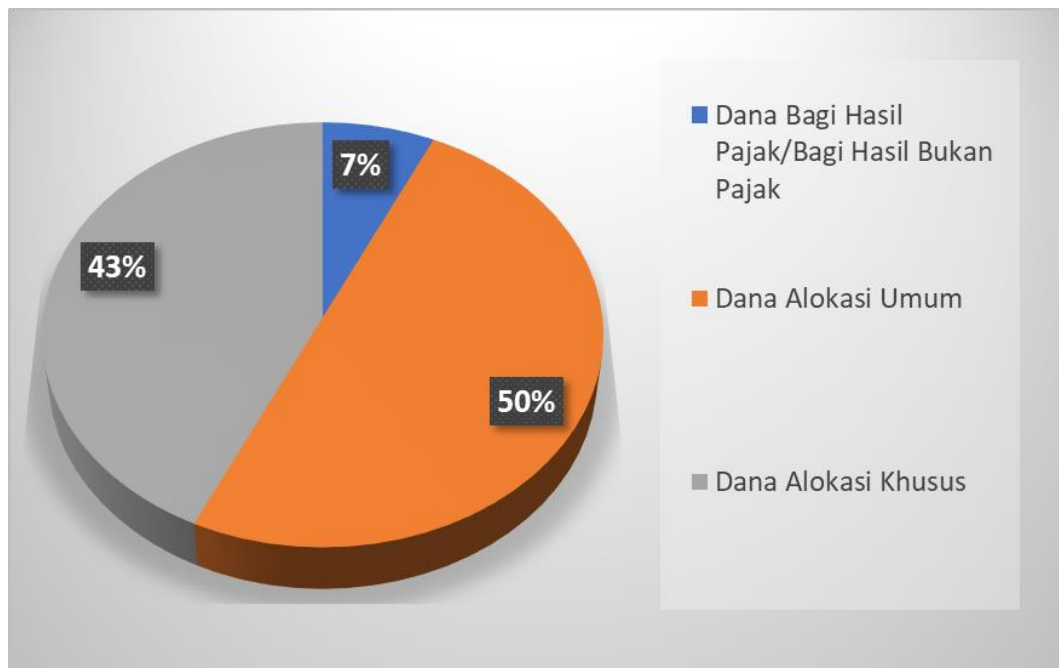


Sumber: Bapenda Provinsi Bali, 2022

b. Dana Perimbangan

Komposisi Dana Perimbangan selama tahun 2017–2022 berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 43% dan Dana Alokasi Umum sebesar 50%, sedangkan sisanya sebesar 7% merupakan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Gambar 3.3 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2017-2022

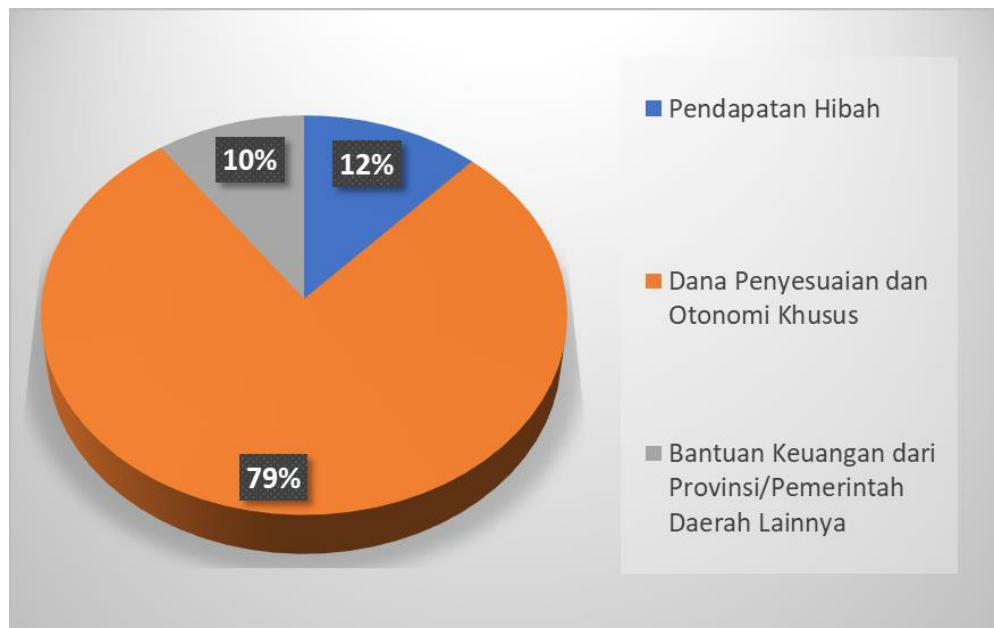


Sumber: Bapenda Provinsi Bali, 2022

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2017–2022 terdiri dari Penyumbang terbesar dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 79%, Pendapatan Hibah sebesar 12%, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 10%. Berikut adalah grafik rata-rata proporsi pendapatan daerah Provinsi Bali dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2017 – 2022.

Gambar 3.4 Rata-Rata Proporsi Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah Tahun 2017-2022



Sumber: Bapenda Provinsi Bali, 2022

2) **Belanja Daerah**

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi
- c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
- d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2017–2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	
BELANJA DAERAH	6.070.536,92	5.998.547,03	6.518.313,87	6.358.121,48	6.270.667,21	6.741.062,98	2,23
Belanja Operasi	3.699.216,84	3.719.657,19	3.845.688,34	4.123.413,15	4.218.534,73	3.784.571,21	0,64
Belanja Pegawai	1.507.301,42	1.590.437,52	1.590.611,06	1.597.686,83	1.653.001,01	1.740.505,72	2,95
Belanja Barang dan Jasa	1.048.533,25	1.043.683,82	1.259.521,49	1.601.051,75	1.580.080,27	1.684.211,49	10,52
Belanja Bunga	0	0	0	0	2.775	0	-20,00

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	
Belanja Subsidi	10.000,00	9.566,40	9.903,63	4.936,00	0	4.372,00	-30,19
Belanja Hibah	1.122.239,17	1.072.780,45	981.767,66	916.157,57	982.678,44	355.343,00	-15,23
Belanja Bantuan Sosial	11.143,00	3.189,00	3.884,50	3.581,00	0,00	139,00	-31,48
Belanja Modal	660.432,83	440.710,16	556.754,50	458.448,89	839.010,47	1.450.937,77	26,27
Belanja Tidak Terduga	154,55	187,5	1.182,72	334.861,36	13.503,46	4.759,00	5.720,84
Belanja Transfer	1.710.732,70	1.837.992,18	2.114.688,31	1.441.398,09	1.199.618,56	1.500.795,00	-0,20

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	Realisasi (x Rp Juta)	
Belanja Bagi Hasil	1.098.555,28	1.207.451,79	1.302.125,72	1.054.748,78	845.466,06	1.231.251,00	4,91
Belanja Bantuan Keuangan	612.177,42	630.540,39	812.562,59	386.649,31	354.152,50	269.544,00	-10,57

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan belanja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2017 - 2022 adalah sebesar 2,23%. Pertumbuhan ini cukup kecil dikarenakan terjadi penurunan belanja terbesar pada tahun 2018 sebesar 71.989.891.453,47 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komposisi belanja daerah Provinsi Bali terdiri dari Belanja Operasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,64%, Belanja Modal dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 26,27%, Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali mengalami pertumbuhan rata-rata terbesar 5.720,84%, dan Belanja Transfer dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,20%.

Melambung tingginya besaran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tentunya tidak lepas dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Realisasi BTT di TA 2019 sebesar Rp. 1.182.717.927,18 atau meningkat sebesar Rp.995.217.927,18 dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun anggaran 2020 realisasinya kembali melambung, yaitu sebesar Rp.334.861.356.708,30 atau meningkat sebesar Rp.333.678.638.781,12 dari realisasi tahun 2019. Anggaran BTT yang tinggi ini diperoleh dari hasil rasionalisasi/ refocusing dari pos belanja lainnya pada APBD Provinsi Bali.

Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun 2018 mengalami tantangan yang cukup berat, khususnya terkait dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang masih menunjukkan ketidakpastian. Hal ini berpengaruh terhadap tekanan terhadap pendapatan APBN, dimana berpengaruh terhadap dana transfer ke daerah. Dampak dari erupsi Gunung Agung pada Akhir Tahun 2017 serta masa recovery pasca erupsi juga memberikan tekanan terhadap realisasi pendapatan serta realisasi belanja itu sendiri. Sesuai tabel 3.2 realisasi belanja daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 5,9 triliun, turun sebesar 1,19% jika dibandingkan dengan kinerja belanja daerah pada tahun sebelumnya sebesar Rp6,07

triliun. Pertumbuhan negatif tersebut pertama terjadi dalam waktu 4 tahun terakhir. Pertumbuhan negatif pada tahun 2018 kontradiktif dengan pertumbuhan belanja pada tahun 2017 yang mampu mencapai angka 11,98% (yoy). Komponen yang mendorong pertumbuhan negatif tersebut adalah penurunan realisasi belanja langsung sebesar Rp1,722 triliun pada tahun 2017, turun menjadi Rp1,516 triliun pada tahun 2018. Pertumbuhan negatif sebesar 1,19% pada tahun 2018 masih didukung pertumbuhan positif belanja tidak langsung sebesar Rp4,478 triliun lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp4,348 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai ke-13 serta Tunjangan Hari Raya dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawainya.

Pertumbuhan belanja pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 11,98% (yoy). Angka pertumbuhan ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi kedua dalam rentang 6 tahun terakhir. Pencapaian signifikan ini didorong oleh perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat yang memindahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Pemindahan wewenang tersebut diikuti oleh pemindahan status kepegawaian Guru PNS dan tenaga non PNS ke Pemerintah Provinsi Bali. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan yang berasal dari DAU, serta linier dengan peningkatan pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi Belanja tidak langsung sebesar Rp3,857 triliun pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp4,348 triliun pada tahun 2017. Realisasi tersebut didorong oleh penambahan pembayaran gaji guru SMK/SMA serta tenaga non PNS. Selain itu sebagai dampak dari perpindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK juga mendorong pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa dari Rp. 735 miliar

pada tahun 2016 menjadi Rp. 1,048 triliun pada tahun 2017, meningkat sebesar 42,49%.

Selain permasalahan diatas, pada awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pandemi ini berpengaruh terhadap perekonomian global, tidak terkecuali pada Provinsi Bali. Untuk meminimalisir penularan, pemerintah pusat mengeluarkan instruksi agar pemerintah daerah menganggarkan belanja untuk penanganan pandemi ini. Pemerintah Provinsi Bali melakukan beberapa refocusing dan rasionalisasi untuk penanganan Covid-19 yang dialihkan pada pos Belanja Tidak Terduga. Peningkatan paling signifikan terjadi di TA. 2020, dimana Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.384.445.657.323,68 dan terealisasi sebesar Rp.334.861.356.708,30 atau 87,10% sedangkan di tahun sebelumnya Belanja Tidak Terduga hanya dianggarkan sebesar Rp. 12.098.276.508,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.182.717.927,18 atau 9,78%. Sementara di Tahun Anggaran 2021 sehubungan dengan telah sedikit meredanya kasus yang teridentifikasi dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 91.118.471.313 dan terealisasi sebesar Rp. 13.503.458.494 atau 14,82%. Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk pemulihan di bidang Kesehatan, Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial.

Pandemi ini juga berdampak terhadap pariwisata di Bali. Seperti yang kita ketahui bersama masyarakat di Bali sebagian bekerja di sektor pariwisata. Menurut data statistik jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali menurun drastis rentang tahun 2019-2021, adapun datanya secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali Menurut Pintu Masuk

PINTU MASUK WISMAN	2021	2020	2019
Bandara Ngurah Rai	43	1.059.198	6.239.543
Pelabuhan Benoa	8	10.275	35.667
Jumlah	51	1.069.473	6.275.210

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Menurunnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali dikarenakan pemberlakuan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah asal wisatawan mancanegara itu sendiri. Sepanjang tahun 2020 dan 2021 pemerintah pusat mengeluarkan aturan menutup beberapa penerbangan dari banyak negara yang memiliki angka tinggi pada kasus penularan Covid 19 dan adapun beberapa negara yang diberi akses kunjungan harus melewati mekanisme yang sangat ketat, misalnya diwajibkan karantina mandiri dengan biaya sendiri. Hal ini tentunya mempengaruhi wisatawan yang hendak berkunjung ke Bali. Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan drastis terhadap kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Hal ini tentunya berpengaruh langsung terhadap perekonomian masyarakat di Bali yang bekerja pada bidang pariwisata (hotel, akomodasi, transportasi, dll). Menurunnya perekonomian masyarakat, tentunya berpengaruh terhadap capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Bali. Sehingga sepanjang tahun anggaran 2020 dan 2021 dilakukan efisiensi terhadap jumlah belanja dalam APBD Pemerintah Provinsi Bali.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel di bawah ini menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/ kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Bali.

Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali 2017-2022

KODE REK.	URAIAN	2017 (x Rp juta)	2018 (x Rp juta)	2019 (x Rp juta)	2020 (x Rp juta)	2021 (x Rp juta)	2022 (x Rp juta)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	486.687,09	441.524,81	704.590,52	832637,64	1.197.855,60	1.193.797,00	22,40
6.1	Penerimaan Pembiayaan	486.687,09	441.914,81	704.590,52	832637,64	1.242.855,60	1.293.797,00	24,36
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	452.761,59	404.137,17	702.345,39	831863,60	192.855,60	850.296,00	69,11
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,00	0	-	0,00
6.1.3	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	33.925,49	37.777,64	2.245,14	774,03	1.050.000	0	27.061,09

KODE REK.	URAIAN	2017 (x Rp juta)	2018 (x Rp juta)	2019 (x Rp juta)	2020 (x Rp juta)	2021 (x Rp juta)	2022 (x Rp juta)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
6.1.3	Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	443.501	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	390	0	0,00	45.000	100.000	4,44
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00	0	100.000	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	390	0	0,00	45.000	0	-40,00
06.02.03	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00	0	0	0,00
06.02.04	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00	0	0	0,00

KODE REK.	URAIAN	2017 (x Rp juta)	2018 (x Rp juta)	2019 (x Rp juta)	2020 (x Rp juta)	2021 (x Rp juta)	2022 (x Rp juta)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	408.311,83	702.345,39	831.815,53	192855,86	850.341,68	326.207,00	58,58

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan rata rata sebesar 22,40%. Bila direview lebih lanjut terkait realisasi komponen belanja, realisasi belanja operasi mendominasi dibandingkan dengan realisasi belanja lainnya. Pada Tabel 3.2 realisasi Belanja Operasi yang didominasi oleh komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Menurut Komponen Belanja Tahun 2017-2022

Uraian	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Rata- rata Share 2017-2022 (%)
	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	
	(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		
BELANJA DAERAH	6.070.536,92	100	5.998.547,03	100	6.518.313,87	100	6.358.121,48	100	6.270.667,21	100	6.741.062,98	100	100,00
Belanja Operasi	3.699.216,84	60,9	3.719.657,19	62	3.845.688,34	59	4.123.413,15	64,9	4.218.534,73	67,3	3.784.571,21	56,14	61,70
Belanja Pegawai	1.507.301,42	24,8	1.590.437,52	26,5	1.590.611,06	24,4	1.597.686,83	25,1	1.653.001,01	26,4	1.740.505,72	25,82	25,51
Belanja Barang dan Jasa	1.048.533,25	17,3	1.043.683,82	17,4	1.259.521,49	19,3	1.601.051,75	25,2	1.580.080,27	25,2	1.684.211,49	24,98	21,56
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0	0	2.775,00	0,04	0	0	0,01
Belanja Subsidi	10.000,00	0,16	9.566,40	0,16	9.903,63	0,15	4.936,00	0,08	0	0	4.372,00	0,06	0,10

Uraian	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Rata- rata Share 2017-2022 (%)
	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	
	(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		
Belanja Hibah	1.122.239,17	18,5	1.072.780,45	17,9	981.767,66	15,1	916.157,57	14,4	982.678,44	15,7	355.343,00	5,27	14,46
Belanja Bantuan Sosial	11.143,00	0,18	3.189,00	0,05	3.884,50	0,06	3.581,00	0,06	0	0	139	0,002	0,06
Belanja Modal	660.432,83	10,9	440.710,16	7,35	556.754,50	8,54	458.448,89	7,21	839.010,47	13,4	1.450.937,77	21,52	11,48
Belanja Tidak Terduga	154,55	0	187,5	0	1.182,72	0,02	334.861,36	5,27	13.503,46	0,22	4.759,00	0,07	0,93
Belanja Transfer	1.710.732,70	28,2	1.837.992,18	30,6	2.114.688,31	32,4	1.441.398,09	22,7	1.199.618,56	19,1	1.500.795,00	22,26	25,89
Belanja Bagi Hasil	1.098.555,28	18,1	1.207.451,79	20,1	1.302.125,72	20	1.054.748,78	16,6	845.466,06	13,5	1.231.251,00	18,26	17,76

Uraian	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Rata- rata Share 2017-2022 (%)
	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	
	(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		(x Rp Juta)		
Belanja Bantuan Keuangan	612.177,42	10,1	630.540,39	10,5	812.562,59	12,5	386.649,31	6,08	354.152,50	5,65	269.544,00	4	8,13

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Share belanja Operasi memimpin pada rentang Tahun Anggaran 2017-2022 dengan rata-rata sebesar 61,70%, disusul oleh Belanja Transfer sebesar 25,89%, kemudian Belanja Pegawai 25,51% , kemudian terakhir Belanja bunga sebesar 0,01%.

Belanja Operasi yang didalamnya terdapat jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial memimpin persentase belanja pada rentang tahun anggaran 2017-2022 yaitu sebesar 61,70%. Dari beberapa jenis belanja dimaksud belanja pegawai memimpin dengan rata-rata sebesar 25,51%, disusul belanja barang dan jasa sebesar 21,56%, kemudian belanja hibah sebesar 14,46%, kemudian belanja subsidi, bantuan sosial dan bunga digabungkan berada di bawah angka 0,07%. Dari beberapa jenis belanja diatas, belanja bunga mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 25%, hal ini dikarenakan rentang tahun 2017 - 2020 Pemerintah Provinsi Bali tidak menganggarkan belanja bunga karena tidak adanya penerimaan pembiayaan berupa dana pinjaman baik dari pemerintah pusat maupun Lembaga keuangan dan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp. 2.775.000.000,00 karena adanya pembayaran biaya pengelolaan dana PEN kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pinjaman untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. Sedangkan jenis belanja yang mengalami persentase penurunan terbesar adalah belanja bantuan sosial yaitu sebesar -39,95, hal ini dikarenakan di tahun anggaran 2021 tidak terdapat realisasi. Sementara itu, belanja pegawai yang memiliki realisasi terbesar pada komponen belanja operasi rentang tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang konsisten, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,36%.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada periode 2017-2022

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,60%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 83,01% dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terdapat refocusing dan rasionalisasi anggaran termasuk belanja modal sehingga beberapa belanja modal yang diperlukan tertunda pelaksanaannya, dan baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, selain itu pertumbuhan belanja modal juga disebabkan karena pengeluaran belanja modal Tahun 2021 dan Tahun 2022 untuk pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang bersumber dari pinjaman PEN.

Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. BTT sepanjang tahun 2017-2022 mengalami pertumbuhan realisasi terbesar pada tahun 2020, yaitu sebesar 28.213% dari tahun anggaran sebelumnya. Adapun realisasi BTT di tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.182.717.927,18 sedangkan realisasi tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 334.861.356.708,30 atau terdapat selisih realisasi angka sebesar Rp. 333.678.638.781,12. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini terjadi karena kebijakan pemerintah untuk merasionalisasi jenis belanja lainnya untuk kemudian di refocusing ke belanja tidak terduga guna menanggulangi pandemi Covid-19 yang terjadi. Sementara di Tahun Anggaran 2021 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 91.118.471.313,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.503.458.494,00 atau sebesar 14,82%. Angka realisasi ini tentunya menurun dari angka realisasi tahun sebelumnya sebesar 95,97%, dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2021 ini penuluran yang terjadi berangsur menurun. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2022, belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp. Dan terealisasi sebesar Rp. Atau %.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer ini terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan (BKK) kepada kabupaten/ kota atau desa. Sepanjang tahun 2019 belanja transfer memiliki share tertinggi dari total belanja dalam APBD yaitu sebesar 32,44% seiring dengan meningkatnya PAD, namun mulai tahun 2020–2021 belanja transfer mengalami penurunan share yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga pendapatan daerah turun secara drastis. Seriring dengan mereda penularan wabah pandemi Covid-19 dan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi bali, belanja transfer pada Tahun Anggaran 2022, kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. Dan terealisasi sebesar Rp. Atau %

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada saat berakhirnya tahun anggaran. Posisi aset adalah memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pada tabel dibawah dapat dijelaskan Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Neraca dan LRA adalah laporan yang wajib disusun oleh SKPD, sedangkan PPKD selaku BUD hanya menyusun LAK dan Konsolidasi Neraca SKPD dan LRA SKPD menjadi Neraca Pemda dan LRA Pemda. Transaksi yang menjadi sumber dari mutasi rekening-rekening Neraca.

Pertumbuhan aset Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 4,4%. Rendahnya pertumbuhan aset disebabkan oleh rendahnya kinerja pertumbuhan komponen neraca. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Pada tahun 2018 aset lancar Pemerintah Provinsi Bali mencapai Rp 10 Triliun dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar minus 1,8%. Komponen lain yang menyumbang perlambatan pertumbuhan aset Pemerintah Provinsi Bali adalah piutang yang mengalami penurunan sebesar minus 61,3% dari tahun 2018 sebesar 253 miliar menjadi 98 miliar pada tahun 2019. Komponen yang menunjang pertumbuhan aset terjadi pada komponen investasi jangka panjang yang mengalami pertumbuhan sebesar 16,2% yaitu 1,2 triliun pada tahun 2018 menjadi 1,3 triliun pada tahun 2019.

Aset tetap pada tahun 2019 tumbuh sebesar 3,6%, sedangkan aset lainnya tumbuh sebesar 1,5%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adalah peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah.

Tabel 3.6 Neraca Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2022

REFE CALK	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	% PERTUMBUHAN
5.2.1	ASET	10.515.561.974.477,20	11.740.438.671.672,20	13.029.457.022.109,80	0,11
5.2.1.1	ASET LANCAR	375.703.308.559,43	1.117.758.848.614,66	659.968.020.222,67	0,78
5.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	191.594.109.904,54	850.341.671.769,52	349.769.518.917,27	1,42
5.2.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	60.445.286.323,08	678.376.581.522,36	260.570.333.845,77	4,80
5.2.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	-	-
5.2.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	-	-
5.2.1.1.1.4	Kas di BLUD	78.954.565.099,81	149.744.969.077,13	56.786.720.166,55	0,14
5.2.1.1.1.5	Kas Dana BOS	52.194.258.481,65	22.220.121.170,03	12.776.669.413,05	-0,50
	Kas Lainnya	0	0	60.728.160,90	
5.2.1.1.1.6	Setara Kas	0	0	19.575.067.331,00	-

REFKALK	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	% PERTUMBUHAN
5.2.1.1.2	Piutang	98.698.011.588,71	170.491.193.694,86	210.448.343.200,00	0,48
5.2.1.1.2.1	Piutang Pajak	27.168.286.627,00	30.114.857.123,00	49.755.902.471,00	0,38
5.2.1.1.2.2	Piutang Retribusi	153.220.000,00	235.534.000,00	238.677.000,00	0,28
5.2.1.1.2.3	Piutang Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	951.680.759,73	951.680.759,70	951.680.759,70	0,00
5.2.1.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	65.293.716.530,16	87.335.913.126,16	30.187.300.049,35	-0,16
	Piutang Lainnya	5.131.107.671,82	51.853.208.686,00	129.314.782.920,00	5,30
5.2.1.1.3	Penyisihan Piutang	-41.604.264.211,76	-51.237.992.436,91	-26.115.939.082,83	-0,13
	Penyisihan Piutang Pajak	-329.275.992,14	-518.386.387,62	-485.306.825,86	0,26
	Penyisihan Piutang Retribusi	-68.722.150,00	-49.815.602,50	-191.723.100,00	1,29
	Penyisihan Piutang Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-951.680.759,70	-951.680.759,70	-951.680.759,70	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-36.019.107.263,10	-45.652.367.030,84	-11.804.956.639,97	-0,24

REFE CALK	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	% PERTUMBUHAN
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	-4.235.478.046,82	-3.825.604.636,00	-3.807.604.636,00	-0,05
	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka	0	-240.138.020,25	-8.874.667.121,30	35,96
5.2.1.1.4	Beban Dibayar dimuka	412.064.314,43	722.327.675,30	510.373.969,85	0,23
5.2.1.1.4.1	Beban Dibayar Dimuka	412.064.314,43	722.327.675,30	510.373.969,85	0,23
5.2.1.1.5	Persediaan	126.603.386.963,51	147.441.647.911,89	125.355.723.218,33	0,01
	Persediaan Bahan	37.641.228.642,78	32.591.981.739,91	28.024.430.785,56	-0,14
	Persediaan Suku Cadang	40.723.273,80	42.919.048,40	87.938.943,80	0,55
	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	17.559.609.130,32	18.288.686.273,95	15.120.556.274,03	-0,07
	Obat-obatan	10.164.729.286,39	7.769.398.851,11	6.295.847.331,54	-0,21
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	55.073.999.942,82	84.531.447.267,00	70.530.143.618,56	0,18
	Natura dan Pakan	803.659.318,22	802.734.878,00	179.300.544,18	-0,39
	Persediaan Penelitian	5.319.437.369,18	2.367.355.553,52	2.006.090.376,66	-0,35
	Persediaan dalam Proses	0	1.047.124.300,00	2.984.267.298,00	1,85
5.2.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.373.168.127.148,48	1.458.257.006.033,47	1.557.846.801.644,75	0,07

REFE CALK	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	% PERTUMBUHAN
5.2.1.2.1	Investasi Non Permanen	0	0		
	Dana Bergulir	0	0		
5.2.1.2.2	Investasi Permanen	1.373.168.127.148,48	1.458.257.006.033,47	1.557.846.801.644,75	0,07
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.373.168.127.148,48	1.458.257.006.033,47	1.557.846.801.644,75	0,07
5.2.1.3	ASET TETAP	7.896.043.889.759,65	8.331.541.781.707,74	9.872.243.449.252,07	0,12
5.2.1.3.1	Aset Tetap Tanah	4.543.910.245.603,19	4.990.966.834.757,19	5.904.719.976.971,76	0,14
5.2.1.3.2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.689.371.955.634,83	1.790.300.297.587,57	1.902.914.942.612,85	0,06
5.2.1.3.3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.234.184.022.217,84	2.360.006.234.571,72	2.802.254.627.419,55	0,12
5.2.1.3.4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.951.716.071.415,07	3.040.956.037.952,56	3.435.866.888.158,92	0,08
5.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	48.818.604.458,25	62.926.373.297,25	71.537.786.207,25	0,21
5.2.1.3.6	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.711.749.703,80	82.259.039.629,80	119.528.622.700,55	1,62
5.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-3.593.668.759.273,33	-3.995.873.036.088,35	-4.364.579.394.818,82	0,10
5.2.1.5	ASET LAINNYA	870.646.649.009,61	832.881.035.316,29	839.398.750.990,29	-0,02
5.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	706.637.729.710,53	681.484.162.369,53	668.676.338.463,00	-0,03

REFKAL	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	% PERTUMBUHAN
5.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	13.315.142.767,65	18.588.690.787,65	24.352.871.621,65	0,35
5.2.1.5.3	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-7.971.487.342,00	-9.970.651.262,00	-14.523.595.547,00	0,35
5.2.1.5.4	Aset Lain - Lain	158.665.263.873,43	142.778.833.421,11	298.151.676.374,28	0,49
5.2.2	KEWAJIBAN	160.015.626.310,79	1.414.444.872.458,94	1.843.954.587.868,95	4,07
5.2.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	160.015.626.310,79	1.414.444.872.458,94	346.505.251.854,32	3,54
5.2.2.1.1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	1.050.000.000.000,00	0	-1,00
5.2.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	17.074.334.451,56	14.450.518.274,11	19.210.696.547,61	0,09
5.2.2.1.4	Utang Belanja dan Transfer	139.135.945.622,57	346.088.728.793,22	327.233.827.145,81	0,72
5.2.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.805.346.236,66	3.905.625.391,61	0	-0,49
05.02.03	EKUITAS	10.355.546.348.165,20	10.325.993.799.213,20	11.185.502.434.240,60	0,04
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10.515.561.974.476,00	11.740.438.671.672,20	13.029.457.022.109,60	0,11

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Walaupun Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, namun masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendapatan daerah yaitu:

- a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap pendapatan daerah.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan perlu ditingkatkan.
- c. Sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan perlu ditingkatkan.

Solusi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi.
- c. Mengoptimalkan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk pendanaan pembangunan daerah.
- d. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat.
- e. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi manajemen pajak daerah

- f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
- g. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data secara berkesinambungan.
- h. Mengoptimalkan pendapatan dari piutang pajak daerah.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Tahun 2017-2022)

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Kebijakan pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Bali periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip

tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

B. Dana Perimbangan, terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari organisasi dalam negeri seperti PT.Jasa Raharja..
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu:

A. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut:

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu:

- ☐ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - ☐ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - ☐ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - ☐ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - ☐ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti:

- ❑ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah, untuk memberikan aspek keadilan dan optimalisasi pendapatan melalui pembaharuan atas tarif pengenaan pajak dan retribusi berdasarkan potensi dan kondisi perekonomian daerah.
- ❑ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat selaku wajib pajak dan wajib pungut lainnya, sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menginformasikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dibidang perpajakan dan bidang pendapatan daerah lainnya.
- ❑ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu, untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan serta kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktifitas menggunakan kendaraan bermotor sehingga dapat mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.
- ❑ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif / biaya sesuai ISO 9001 – 2008 pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se-Bali
- ❑ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES, sebagai upaya sinergitas dengan BUMDes dalam mendekatkan dan kesadaran masyarakat membayar pajak sekaligus dapat menggerakkan unit usaha pada BUMDes.
- ❑ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya, untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan

tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- ❑ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil, sebagai bentuk koordinasi dalam pengembangan potensi pendapatan yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah berdasarkan tingkat pelayanan dengan memperhitungkan kondisi perekonomian di daerah.
- ❑ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya untuk mewujudkan pelayanan prima, yang transparan, mudah dan cepat.

c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

- ❑ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat, untuk memastikan potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber pendapatan;
- ❑ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya, untuk menganalisis pengembangan potensi sesuai ketentuan yang berlaku;
- ❑ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan dengan memperhatikan kondisi daerah serta permasalahan yang terjadi; dan
- ❑ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.

d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan

(KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2021 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah

dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa

Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.

3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari.

- A. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- B. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke

rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

- C. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- D. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- E. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- F. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

- A. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- B. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- C. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3.2.4 Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi
- c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
- d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Berikut disajikan total belanja daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa total belanja daerah selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun realisasi cenderung lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan. Terlihat pada tabel dibawah realisasi belanja daerah Provinsi Bali berada pada tren dibawah 90% penyebabnya adalah efisiensi anggaran, tidak terlaksananya beberapa kegiatan dan kurangnya perencanaan penyerapan anggaran yang baik.

Tabel 3.7 Proporsi Penggunaan Anggaran APBD Provinsi Bali
Tahun 2017–2022

TAHUN	RENCANA	REALISASI	(%)	SISA
2017	6.750.176.103.311	6.070.536.923.735	89,9	679.639.179.576
2018	6.595.712.545.307	5.998.547.032.282	90,9	597.165.513.025
2019	7.201.196.359.769	6.518.313.866.322	90,5	682.882.493.447
2020	6.924.582.165.725,65	6.358.121.475.263,61	91,82	566.460.690.462,04
2021	7.903.323.253.052,00	6.270.667.213.846,29	79,34	1.632.656.039.205,71
2022	7.541.821.522.461,00	6.749.127.037.109,59	89,49	792.694.485.351,41

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

3.2.5 Analisis Pembiayaan

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas:

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa

Guna mendukung Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelumnya, maka alokasi anggaran untuk belanja langsung diarahkan pada program dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin, pengangguran dan pemberdayaan masyarakat, menjamin ketahanan pangan, pelestarian dan pengembangan budaya, peningkatan pengelolaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.8 Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah
Provinsi Bali Tahun 2017-2020

URAIAN	2017 (x Rp Juta)	2018 (x Rp Juta)	2019 (x Rp Juta)	2020 (x Rp Juta)
BELANJA DAERAH	6.070.536,92	5.998.547,03	6.518.313,87	6.358.121,48
Belanja Tidak Langsung	4.348.259,19	4.495.096,87	4.679.217,63	4.273.707,90
Belanja Pegawai	1.493.989,76	1.571.381,34	1.567.790,82	1.572.773,89
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi	10.000,00	9.566,40	9.903,63	4.936,00
Belanja Hibah	1.122.239,17	1.072.780,45	981.767,66	916.157,57
Belanja Bantuan Sosial	11.143,00	3.189,00	3.884,50	3.581,00
Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1.098.555,28	1.207.451,79	1.302.125,72	1.054.748,78

URAIAN	2017 (x Rp Juta)	2018 (x Rp Juta)	2019 (x Rp Juta)	2020 (x Rp Juta)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	612.177,42	630.540,39	812.562,59	386.649,31
Belanja Tidak Terduga	154,55	187,50	1.182,72	334.861,36
Belanja Langsung	1.722.277,74	1.503.450,16	1.839.096,24	2.084.413,57
Belanja Pegawai	13.311,66	19.056,18	22.820,24	24.912,94
Belanja Barang dan Jasa	1.048.533,25	1.043.683,82	1.259.521,49	1.601.051,75
Belanja Modal	660.432,83	440.710,16	556.754,50	458.448,89

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Pada Tahun Anggaran 2021 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sudah tidak diberlakukan lagi, hal ini diatur pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
 - b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi
 - c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 - d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa
- Adapun perbandingannya sesuai dengan format Permendagri 77 Tahun 2020 pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.9 Perbandingan Komponen Belanja
Pada Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun 2022	
	Anggaran	%
BELANJA DAERAH	7.541.821.522.461,00	100
Belanja Operasi	4.076.148.648.130,00	54,05
Belanja Pegawai	1.824.026.422.662,00	24,19

Uraian	Tahun 2022	
	Anggaran	%
Belanja Barang dan Jasa	1.838.472.468.548,00	24,38
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	10.350.595.000,00	0,14
Belanja Hibah	403.159.161.920,00	5,35
Belanja Bantuan Sosial	140.000.000,00	0,00
Belanja Modal	1.800.399.412.612,00	23,87
Belanja Tidak Terduga	7.848.875.371,00	0,10
Belanja Transfer	1.657.424.586.348,00	21,98
Belanja Bagi hasil	1.354.111.107.615,00	17,95
Belanja Bantuan Keuangan	303.313.478.733,00	4,02

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa belanja pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk belanja gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja. Oleh karena

itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi APBD Provinsi Bali tahun 2017-2021 untuk belanja disajikan dalam tabel di atas. Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa anggaran belanja daerah Provinsi Bali mengalami perubahan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah Penerimaan PAD yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Produk Domestik Bruto, pembagian DAU yang diluar target yang direncanakan sehingga kedepannya diharapkan melakukan pembenahan serta perencanaan yang matang dalam penyusunan APBD serta perencanaan serapan anggaran yang baik.

3.2.6 Defisit Riil Anggaran

Dalam penggunaan anggaran belanja daerah Provinsi Bali dari tahun 2017-2022, defisit anggaran terjadi pada tahun 2017, 2020, 2021 dan 2022. Penutupan defisit anggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Struktur APBD yang berbasis kinerja, memungkinkan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan penerimaan tahun anggaran berikutnya. Secara rinci jumlah defisit anggaran 2017-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2017-2022

Uraian	Defisit Riil (juta)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Pendapatan Daerah	5.992,16	6.259,36	6.645,53	5.718,33	5.923,15	5.885,46
Belanja Daerah	6.070,53	5.998,54	6.518,31	6.358,12	6.270,66	6.749,12
Defisit Riil	(78,37)	260,82	127,22	(639,78)	(347,51)	(863,66)

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Untuk menutup defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2017-2022 (realisasi)

Uraian	Proporsi Dari Total Defisit (juta)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	452,76	404,13	702,34	831,86	192,85	850,29
Pencairan Dana Cadangan						
Hasil Penjualan Kekayaan						

Uraian	Proporsi Dari Total Defisit (juta)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daerah Yang di Pisahkan						
Penerimaan Pinjaman Daerah					1.050.000	443.502
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
Penerimaan Piutang Daerah						

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Berdasarkan tabel di atas, defisit yang terjadi pada tahun 2017 mampu ditutupi oleh komponen SiLPA pada APBD. Proporsi penutupan defisit riil yaitu 1,29% pada tahun 2017. Proporsi tersebut menurun/hilang pada tahun 2018 dan tahun 2019 dikarenakan APBD Tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi surplus masing-masing sebesar Rp 260 milyar dan 127 miliar. Namun pada 2020 dan 2021 defisit riil terjadi lagi dengan dan ditutupi oleh komponen SiLPA pada APBD masing-masing sebesar 10,06% di tahun 2020 dan 5,54% di tahun 2021. Demikian juga pada tahun 2022, defisit riil sebesar 863,66 Miliar ditutupi oleh SiLPA sebesar 850,29 miliar.

Analisis pembiayaan ini penting untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa

datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Bali Tahun 2017-2022

No.	Uraian	2017 (x Rp juta)		2018 (x Rp juta)		2019 (x Rp juta)		2020 (x Rp juta)		2021 (x Rp juta)		2022 (x Rp juta)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	Rp	% dari SiLPA	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	452.761,59	100,00	404.137,17	100,00	702.345,39	100,00	831.863,60	100,00	192.855,59	100,00	349.708,79	100,00
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	-130.539,66	-28,83	-140.803,35	-34,84	151.536,69	21,58	260.370,63	31,30	-364.537,73	- 189,02	-60.949,39	-17,43
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	114.881,34	25,37	-100.246,92	-24,81	-92.488,73	-13,17	-113.963,02	-13,70	-9.115,17	-4,73	-10.553,74	-3,02
4.	Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	46.563,45	10,28	10.519,73	2,60	498,00	0,07	280,28	0,03	0,00	0,00	-811.000,00	- 231,91

5.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	395.398,13	87,33	679.639,18	168,17	590.943,15	84,14	682.882,49	82,09	566.508,77	293,75	1.632.656,00	466,86
6.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.458,35	5,84	-44.971,48	-11,13	51.856,27	7,38	48,08	0,01	0,00	0,00	850.296,34	243,14
7	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,14	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2017-2021), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan kenaikan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya, kecuali pada Tahun Anggaran 2021 dimana terdapat penurunan jumlah SiLPA dari tahun sebelumnya mencapai Rp. 639.008.011.702,43 atau berkurang 76,82%. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.

- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan di mana dana tersebut dialokasikan.
- e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja APBD Bali 2024-2026

Berdasarkan hasil analisis dari data realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali (data realisasi tahun 2017-2021), maka ada beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyusunan proyeksi APBD Provinsi Bali 2024-2026 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyusunan proyeksi realisasi APBD Provinsi Bali (Pendapatan Belanja Daerah) pada tahun 2024-2026 disusun mengacu kepada realisasi APBD Provinsi Bali pada tahun 2017-2021.
- Penyusunan proyeksi APBD dilakukan berdasarkan asumsi konservatif dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) dan prakiraan realisasi tahun 2022.
- Penyusunan proyeksi realisasi APBD telah mempertimbangkan kinerja pertumbuhan ekonomi Bali, meskipun dalam kurun waktu rata-rata 5 tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan kinerja yang fluktuatif meningkat dari 5,56 % (yoy) di tahun 2017 menjadi 6,33 % (yoy) di tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 5,63% (yoy) di 2019 dan menurun

drastis menjadi -9,31% (yoy) pada tahun 2020, dan mulai mulai mengalami perbaikan menjadi -2,47% (yoy) di tahun 2021. Melihat kinerja ekonomi Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021), kinerja ekonomi Bali dipengaruhi oleh pandemic COVID-19. Dengan kondisi tersebut, penyusunan proyeksi APBD mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat dengan memperhatikan tingkat inflasi dalam periode 2024-2026.

- Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini juga belum mempertimbangkan bila terjadi kondisi *force majeure*, seperti bencana alam yang tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi Bali, khususnya industri pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi seluruh kinerja komponen pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen lain-lain pendapatan yang sah maupun realisasi belanja daerah secara umum.
- Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini, belum mempertimbangkan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, antara lain kebijakan dana perimbangan, retribusi, perpajakan, bantuan keuangan dan pengelolaan *cash flow* anggaran dari sisi pendapatan, termasuk dari sisi belanja (kebijakan pengembangan infrastruktur, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja barang dan jasa serta bantuan sosial).
- Penyusunan proyeksi APBD tahun 2024-2026 disusun dengan skema pendekatan pesimis dan optimis, sebagai range dalam proyeksi realisasi APBD ini.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan mendorong peningkatan ekonomi Bali tahun 2024-2026, Pemerintah Provinsi Bali tetap fokus pada **Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali** yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu:

1. Sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan.
 - A. Pembangunan pertanian yang sepenuhnya bertumpu pada kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal Alam Bali beserta isinya (genuine Bali) sebagai fondasi utama perekonomian Bali menuju kedaulatan pangan, melalui: a. Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air untuk kegiatan pertanian; b. Pengembangan dan pelestarian komoditas unggulan endemik Bali; c. Peningkatan intensifikasi lahan pertanian; d. Peningkatan ekstensifikasi melalui pemanfaatan lahan yang belum terpakai, baik lahan produktif maupun lahan non produktif sesuai dengan agroklimat; dan e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian Bali sesuai nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.
 - B. Pembangunan dan pengembangan pusatpusat perekonomian baru berbasis pertanian secara terintegrasi sesuai dengan potensi sumber daya lokal Alam Bali di Kabupaten/ Kota se-Bali, melalui: a. Pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten/Kota se-Bali; b. Pengembangan sentra komoditas pertanian berbasis kawasan; c. Pengembangan industri olahan produk pertanian sesuai potensi di Kabupaten/Kota se-Bali.
 - C. Pembangunan dan pengembangan sektor pertanian oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif, melalui: a. Regenerasi sumber daya manusia di bidang pertanian oleh generasi muda yang maju, mandiri, modern, kreatif, dan inovatif dalam mengelola usaha pertanian; b. Pengembangan

dan penguatan kelembagaan ekonomi petani milenial yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, perdagangan antar daerah, dan ekspor.

- D. Pembangunan dan pengembangan sektor pertanian berdasarkan nilai-nilai tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal Bali, melalui: a. Penguatan kelembagaan dan fungsi Subak dalam mengelola pertanian Bali dari hulu sampai ke hilir secara berkelanjutan; b. Revitalisasi fungsi *jineng/klumpu/glebeg* sebagai penyangga persediaan/cadangan pangan Krama Bali; c. Revitalisasi organisasi-organisasi tradisional Bali (seperti sekeha manyi, sekeha memula) dalam mengelola usaha pertanian.
- E. Pembangunan dan pengembangan pertanian dalam arti luas dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya Bali secara berkelanjutan melalui: a. Pengembangan pertanian yang ramah lingkungan; b. Pengembangan pertanian yang menjaga tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.
- F. Pembangunan dan pengembangan pertanian Bali diutamakan untuk: a. Meningkatkan kapasitas perekonomian Bali dengan mengutamakan/ memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal Bali; dari, oleh, dan untuk Krama Bali dalam mewujudkan kedaulatan pangan. b. Meningkatkan kapasitas perekonomian Bali yang berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing serta berkelanjutan.
- G. Pembangunan dan pengembangan pertanian Bali yang memadukan nilai-nilai kearifan lokal dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital, melalui: a. Penerapan/ perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian secara berkelanjutan; b. Menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan usaha pertanian yang efektif dan efisien.

- H. Pembangunan dan pengembangan pertanian Bali untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali, melalui: a. Peningkatan pendapatan petani yang ditandai dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP); b. Adanya jaminan pasar dan harga produk pertanian yang menguntungkan petani; c. Peningkatan aksesibilitas/ fasilitasi permodalan petani, untuk menghindari praktek tidak sehat seperti: jeratan tengkulak dan/atau sejenisnya; d. Mengefektifkan rantai pemasaran produk pertanian dengan meniadakan praktik tidak sehat yang merugikan petani.
- I. Pengembangan dan pemanfaatan pertanian dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan para pihak dengan menerapkan asas gotong-royong melalui: a. Pengembangan kawasan pertanian yang melibatkan para petani di wilayah Kabupaten/ Kota; b. Pengembangan pola kemitraan antar kelompok petani dengan pengguna produk pertanian; c. Pengembangan koperasi produksi pertanian untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam memenuhi sarana produksi, pemasaran, dan pemanfaatan produksi pertanian.
- J. Pengembangan pertanian Bali untuk memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global, melalui: a. Peningkatan keanekaragaman produk unggulan sesuai potensi wilayah Kabupaten/ Kota; b. Pengembangan akses pasar produk unggulan pertanian Bali melalui: 1) Revitalisasi pasar tradisional di Desa, Desa Adat, dan Perkotaan. 2) Pembangunan pusat-pusat pasar produk pertanian organik. 3) Pengembangan jejaring akses pasar produk pertanian ke pelaku usaha jasa pariwisata dan pasar modern di Bali. 4) Pengembangan perdagangan antar daerah dan ekspor produk pertanian. c. Pelindungan produk pertanian Bali melalui

program sertifikasi dan keamanan pangan produk pertanian lokal Bali dari gempuran produk luar.

- K. Pembangunan dan pengembangan pertanian Bali yang menghasilkan produk, usaha pertanian, dan pendapatan yang mampu membangkitkan kesadaran kolektif Krama Bali untuk:
 - a. Memprioritaskan penggunaan produk pertanian lokal Bali dalam memenuhi kebutuhan Krama Bali baik untuk ritual upacara adat maupun kehidupan sehari-hari; b. Pemanfaatan produk pertanian lokal Bali dalam pengembangan usaha, dan perdagangan antar daerah serta ekspor; serta c. Meningkatkan spirit jengah serta cinta/ bangga sebagai Krama Bali.

2. Sektor Kelautan dan Perikanan.

- A. Pembangunan kelautan dan perikanan bertumpu pada kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal kelautan dan perikanan sebagai fondasi utama perekonomian Bali menuju Krama Bali yang sejahtera, sehat, cerdas, dan unggul, serta budaya dan lingkungan yang lestari melalui:
 - a. Eksplorasi kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya kelautan dan perikanan yang masih terpendam; b. Peningkatan pengelolaan ruang laut secara harmonis antara ekosistem darat dan ekosistem laut, serta sinergitas antar sektor; c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara terukur, baik sumber daya hayati, sumber daya bukan hayati maupun jasa-jasa kelautan; d. Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati serta pelestarian tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal bahari Bali; e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan Bali sesuai nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.
- B. Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat perekonomian baru berbasis kelautan dan perikanan secara terpadu dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan potensi sumber daya lokal

Alam Bali di Kabupaten/Kota se-Bali, melalui: a. Pengembangan pemanfaatan komoditas unggulan berbasis sentra-sentra perikanan tangkap yang didukung oleh sentra-sentra pengolahan dan pemasaran produk; b. Pengembangan pembudidayaan komoditas unggulan yang adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat berbasis sentra-sentra perikanan budidaya dalam sistem produksi, pengolahan dan pemasaran secara terpadu dalam konsep Kelompok Bersama Satu pintu (KBS); c. Revitalisasi, pengembangan dan pemanfaatan potensi pergaramanan tradisional genuine Bali yang didukung dengan pengembangan/ diversifikasi produk dan akses pemasaran; d. Pengembangan diversifikasi/ keanekaragaman produk wisata bahari sesuai potensinya dengan didukung oleh infrastruktur dan layanan berkualitas.

- C. Pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif dan inovatif, melalui: a. Regenerasi nelayan, pembudidaya ikan, dan pegaram (petasik) Krama Bali, disertai dengan peningkatan kapasitasnya; b. Penguatan pemberdayaan sosial ekonomi pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petasik, dan pelaku wisata bahari) yang maju, mandiri, modern, kreatif dan inovatif dalam mengelola usaha kelautan dan perikanan; c. Pengembangan kewirausahaan dan kreativitas Krama Bali dengan mengadopsi kemajuan teknologi termasuk teknologi digital ke dalam usaha kelautan dan perikanan; d. Pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi pelaku utama kelautan dan perikanan yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional, dan ekspor.
- D. Pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan berdasarkan nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali, melalui: a. Pengarusutamaan, pelestarian, dan aktualisasi tradisi/ budaya, termasuk tradisi/ budaya bahari

- Bali yang adiluhung, dan kearifan lokal Segara Kerthi; b. Penguatan dan pemberdayaan fungsi Bendega sebagai lembaga tradisional Krama pesisir Bali dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut secara harmonis dan berkelanjutan; c. Revitalisasi *sekeha-sekeha*, seperti sekeha jukung, sekeha sorog, dan sekeha tasik sebagai wadah kebersamaan Krama Bali dalam mengelola usaha kelautan dan perikanan; d. Revitalisasi seni/ arsitektur/rancang bangun perahu tradisional Bali yang telah terancam punah.
- E. Pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya Bali secara berkelanjutan melalui: a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis ekosistem dan ramah lingkungan; b. Pengembangan kelautan dan perikanan yang menjaga tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali; c. Pengembangan kelautan dan perikanan yang menjaga dan melindungi kawasan suci laut, tempat-tempat suci dan spiritual, serta situs-situs yang dikeramatkan oleh Krama Bali; d. Penguatan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan daerah perlindungan budaya maritim Bali yang efektif dan berbasis Krama Bali; e. Peningkatan pelestarian jenis biota laut yang dilindungi, langka dan kharismatik khas Bali berbasis Krama dan kearifan lokal Bali; f. Peningkatan pelestarian/ konservasi, restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis Krama dan kearifan lokal Bali.
- F. Pengembangan kelautan dan perikanan Bali dalam meningkatkan kapasitas perekonomian Bali dengan mengutamakan/ memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal Bali dari, oleh, dan untuk Krama Bali yang sejahtera, sehat, cerdas, dan unggul;

- G. Pengembangan kelautan dan perikanan Bali untuk meningkatkan kapasitas perekonomian Bali yang berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing serta berkelanjutan.
- H. Pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan Bali yang memadukan nilai-nilai kearifan lokal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital, melalui:
 - a. Pengembangan riset dan inovasi di bidang kelautan dan perikanan secara kolaboratif dengan lembaga riset/ perguruan tinggi;
 - b. Penerapan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
 - c. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan usaha kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien, baik dalam sistem usaha produksi, pengolahan maupun pemasaran produk.
- I. Pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan Bali untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali, melalui:
 - a. Peningkatan perlindungan eksistensi atau lokasi berusaha bagi pelaku utama kelautan dan perikanan Krama Bali;
 - b. Peningkatan pendapatan nelayan yang ditandai dengan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN);
 - c. Adanya jaminan pasar dan harga produk kelautan dan perikanan yang menguntungkan pelaku utama kelautan dan perikanan.
 - d. Peningkatan aksesibilitas serta fasilitasi permodalan pelaku utama kelautan dan perikanan, untuk menghindari praktik tidak sehat seperti: jeratan tengkulak dan/atau sejenisnya.
 - e. Mengefektifkan rantai pemasaran produk kelautan dan perikanan dengan meniadakan praktik tidak sehat yang merugikan pelaku utama kelautan dan perikanan.
- J. Pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan para pihak

dengan menerapkan asas gotong royong, melalui: a. Pengembangan kawasan kelautan dan perikanan yang melibatkan para pelaku utama kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten/Kota; b. Pengembangan pola kemitraan antara kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan dengan pengguna produk kelautan dan perikanan yang saling menguntungkan; c. Pengembangan dan penguatan koperasi untuk memberikan kemudahan bagi pelaku utama kelautan dan perikanan dalam memenuhi sarana produksi, pemasaran, dan pemanfaatan produksi.

- K. Pengembangan kelautan dan perikanan Bali untuk memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global, melalui: a. Peningkatan keanekaragaman produk unggulan sesuai potensi wilayah Kabupaten/Kota dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; b. Pengembangan akses pasar produk unggulan kelautan dan perikanan Bali melalui: 1) Pengembangan pasar ikan modern di perkotaan. 2) Pengembangan kios dan/atau lapak-lapak pemasaran produk kelautan dan perikanan di pasar-pasar tradisional. 3) Pembangunan dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pusat pemasaran di Kabupaten/Kota sesuai potensinya. 4) Pengembangan perdagangan antar daerah dan ekspor produk perikanan; c. Pelindungan produk kelautan dan perikanan Bali melalui program sertifikasi dan keamanan produk kelautan dan perikanan lokal Bali dari gempuran produk luar; d. Pengarusutamaan standar mutu produk kelautan dan perikanan branding Bali yang berkesesuaian dengan standar mutu internasional termasuk standar mutu terkait isu-isu lingkungan global (*eco-labelling*, *illegal*

unregulated-unreported fishing, code of conduct on responsible fisheries).

- L. Pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan Bali yang menghasilkan produk, usaha kelautan dan perikanan, dan pendapatan yang mampu membangkitkan kesadaran kolektif Krama Bali untuk: a. Memprioritaskan penggunaan produk kelautan dan perikanan lokal Bali untuk memenuhi kebutuhan Krama Bali dalam kehidupan sehari-hari; b. Memanfaatkan produk kelautan dan perikanan lokal Bali dalam pengembangan usaha, menghela industri perikanan daerah, dan perdagangan antardaerah, serta ekspor; c. Meningkatkan spirit jengah serta cinta/ bangga sebagai Krama Bali.

3. Sektor Industri

- A. Pemanfaatan sumber daya lokal alam Bali beserta Isinya (genuine Bali) untuk pembangunan industri yang berkualitas, produktif, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan yang dijiwai tradisi, seni, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal Bali, melalui: a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri; b. Peningkatan kuantitas dan kualitas Krama Bali yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; c. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk-produk industri yang bersumber atau dijiwai oleh tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali (industri berbasis budaya branding Bali).
- B. Pembangunan dan pengembangan industri berbasis kawasan berdasarkan potensi sumber daya industri di masing-masing Kabupaten/ Kota di Bali, melalui: a. Pengembangan sentra Industri unggulan berbasis potensi wilayah seperti: industri

pangan, industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal, industri tekstil dan produk tekstil, industri kerajinan, industri elektronika dan telematika, industri transportasi, dan industri bahan baku tekstil; b. Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Berbasis Budaya Branding Bali secara terintegrasi dan simultan dari hulu sampai ke hilir; c. Pengembangan kawasan industri dan kawasan peruntukan industri.

- C. Pembangunan dan pengembangan sektor industri oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif, melalui: a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Krama Bali) secara inklusif, kreatif, dan inovatif dalam pembangunan dan pengembangan industri; b. Peningkatan Krama Bali yang terlibat sebagai wirausaha industri, tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri); c. Peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi Krama Bali dalam mengembangkan industri.
- D. Pembangunan dan pengembangan sektor industri branding Bali berbasis nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali, melalui: a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk industri branding Bali yang bernilai tinggi berbasis nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali; b. Peningkatan kreativitas dan inovasi produk industri branding Bali yang inovatif dan bernilai tinggi berbasis nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.
- E. Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dengan tata kelola yang baik, dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, melalui: a. Pelindungan dan pelestarian Alam dan Budaya Bali secara berkelanjutan dalam pembangunan dan pengembangan industri; b. Pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimalisasi kinerja proses produksi; c. Pemanfaatan sumber

daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pengolahan kembali (*recycle*). dan pemulihan (*recovery*).

- F. Pengembangan industri untuk meningkatkan kapasitas perekonomian Bali yang berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing serta berkelanjutan, melalui: a. Peningkatan pertumbuhan industri unggulan berbasis budaya branding Bali; b. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk industri; c. Penguatan jaminan mutu dan keamanan produk industri; d. Pengembangan desain produk dan kemasan.
- G. Pembangunan dan pengembangan industri dengan memadukan nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal dengan teknologi termasuk teknologi digital, melalui: a. Pengembangan dan penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk industri secara berkelanjutan; b. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam proses produksi, distribusi, dan tata kelola usaha industri; c. Riset dan inovasi untuk menciptakan produk baru melalui kerja sama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi.
- H. Pembangunan dan pengembangan industri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali, melalui: a. Peningkatan kontribusi sektor industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali; b. Peningkatan pendapatan pelaku industri; c. Peningkatan kontribusi sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja; d. Peningkatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada sektor industri.
- I. Pembangunan kawasan dan sentra industri sesuai potensi Kabupaten/Kota di Bali melibatkan para pihak dengan menerapkan asas gotong-royong, melalui: a. Pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang

melibatkan pihak swasta, IKM/UMKM, dan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota; b. Pengembangan pola kemitraan antar swasta, IKM/UMKM, dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal di wilayah Kabupaten/Kota; c. Pengembangan koperasi, sentra industri, kawasan peruntukan industri untuk memberikan kemudahan bagi IKM/UMKM, dan swasta dalam memenuhi sarana produksi dan pemasaran.

- J. Pengembangan industri untuk memperkuat perekonomian Bali agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global, melalui: a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan baku lokal yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku; b. Peningkatan infrastruktur penunjang sektor industri; c. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif. d. Memperluas akses produk industri ke pasar nasional dan global melalui berbagai promosi termasuk promosi digital; e. Penguatan kelembagaan; f. Peningkatan akses permodalan yang terjangkau oleh pelaku industri; g. Peningkatan investasi pada sektor industri yang didorong oleh iklim investasi dan pembiayaan yang baik; h. Penguatan struktur industri hulu sebagai penghasil bahan baku yang berkualitas dan industri antara yang berbasis sumber daya alam serta tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Pembangunan dan pengembangan industri unggulan berbasis budaya branding Bali yang mampu membangkitkan kesadaran kolektif Krama Bali, melalui: a. Peningkatan pendapatan pelaku industri Krama Bali; b. Peningkatan penggunaan produk industri lokal oleh Krama Bali; c. Peningkatan jumlah Krama Bali sebagai pelaku industri unggulan berbasis budaya branding Bali; d. Krama Bali ikut secara aktif sebagai agen promosi produk industri lokal Bali.

4. Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi.
 - A. Penumbuhan dan pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi dengan memanfaatkan bahan baku secara optimal dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, dan unggul, melalui: a. Optimalisasi pemanfaatan bahan baku untuk diolah/dikelola dalam menghasilkan produk IKM, UMKM dan Koperasi; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Krama) Bali yang kreatif dan inovatif sebagai pelaku IKM, UMKM dan Koperasi; c. Peningkatan keragaman produk IKM, UMKM dan Koperasi berbasis pada adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, dan unggul.
 - B. Penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra IKM, UMKM dan Koperasi unggulan secara terintegrasi sesuai dengan potensi sumber daya di masing-masing Kabupaten/ Kota se-Bali, melalui: a. Pengembangan IKM dan UMKM unggulan berbasis produk pertanian di Kabupaten/ Kota se-Bali, b. Pengembangan IKM dan UMKM unggulan berbasis produk kehutanan di Kabupaten/Kota se-Bali. c. Pengembangan IKM dan UMKM unggulan berbasis produk kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota se-Bali; d. Pengembangan IKM dan UMKM unggulan berbasis sumber daya bukan hayati di Kabupaten/Kota se-Bali.
 - C. Pembangunan dan pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif, melalui: a. Peningkatan kuantitas dan kualitas Krama Bali yang kreatif dan inovatif sebagai pelaku IKM, UMKM dan Koperasi; b. Peningkatan jiwa kewirausahaan Krama Bali dalam mengembangkan usaha IKM, UMKM dan Koperasi; c.

Peningkatan pelaku usaha IKM, UMKM dan Koperasi oleh kelompok milenial Krama Bali.

- D. Mengoptimalkan pemanfaatan nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali dalam mengembangkan produk dan usaha IKM, UMKM dan Koperasi, melalui: a. Peningkatan pengetahuan bagi perajin dan pelaku usaha IKM, UMKM dan Koperasi untuk memanfaatkan nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali dalam mengembangkan produk dan usaha; b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui magang, pendampingan dan pelatihan bagi perajin dan pelaku usaha IKM, UMKM dan Koperasi.
- E. Pembangunan dan pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem Alam dan Budaya Bali secara berkelanjutan melalui: a. Pengembangan serta pengelolaan produk dan usaha IKM, UMKM dan Koperasi yang ramah lingkungan seperti, proses produksi tanpa limbah dan pemanfaatan energi bersih tanpa polusi; b. Pengembangan serta pengelolaan produk dan usaha IKM, UMKM dan Koperasi yang selalu menjaga dan melestarikan tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.
- F. Pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi untuk meningkatkan kapasitas perekonomian Bali yang berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing serta berkelanjutan, melalui: a. Peningkatan jumlah, keragaman dan kualitas produk dan usaha IKM, UMKM dan Koperasi; b. Peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan serta mengelola produk dan usaha IKM, UMKM dan Koperasi; c. Peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk IKM, UMKM dan Koperasi; d. Peningkatan serta pengembangan desain produk dan kemasan.
- G. Pembangunan dan pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi yang memadukan nilai-nilai kearifan lokal dan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital, melalui: a. Penerapan/ perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi, dan daya saing produk IKM, UMKM dan Koperasi secara berkelanjutan; b. Menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan usaha IKM dan UMKM untuk memperluas akses pasar, efektif dan efisien; c. Pengembangan riset dan inovasi di bidang IKM, UMKM dan Koperasi dalam menghasilkan produk baru, bernilai tambah, dan kompetitif.

- H. Pembangunan dan pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali, melalui: a. Peningkatan pendapatan perajin dan pelaku usaha IKM, UMKM dan Koperasi; b. Penjaminan kepastian pasar, kepastian harga, dan kepastian pembayaran bagi produk IKM, UMKM dan Koperasi; c. Peningkatan aksesibilitas/fasilitasi permodalan usaha bagi pelaku usaha IKM, UMKM dan Koperasi; d. Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk menghindari persaingan yang tidak sehat; e. Penguatan jaringan usaha dan penetrasi pasar melalui kemitraan.
- I. Pembangunan dan pengembangan usaha IKM, UMKM dan Koperasi dengan melibatkan semua pihak dengan prinsip kebersamaan, melalui: a. Pengembangan sentrasentra produk dan usaha IKM, UMKM dan Koperasi unggulan yang melibatkan para pelaku usaha Krama Bali di wilayah Kabupaten/Kota; b. Peningkatan peluang usaha produk IKM, UMKM dan Koperasi dengan kemitraan rantai pasok; c. Pengembangan dan penguatan Koperasi untuk memudahkan pelaku usaha IKM dan UMKM dalam memenuhi sarana dan prasarana usaha.
- J. Peningkatan ketangguhan produk dan usaha IKM, UMKM dan Koperasi dalam memperkuat struktur dan fundamental

perekonomian Bali agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global, melalui: a. Peningkatan ketersediaan bahan baku IKM, UMKM dan Koperasi; b. Peningkatan keanekaragaman dan kualitas produk IKM, UMKM dan Koperasi unggulan sesuai potensi wilayah Kabupaten/Kota; c. Pengembangan akses pasar produk unggulan IKM, UMKM dan Koperasi; d. Meningkatkan kualitas produk IKM dan UMKM untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan global; e. Memberikan perlindungan terhadap produk dan usaha IKM, UMKM dan Koperasi dari adanya gempuran/ tekanan produk luar/ impor; f. Fasilitasi perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

- K. Pembangunan dan pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi yang menghasilkan produk dan pendapatan pelaku usaha yang mampu membangkitkan kesadaran kolektif Krama Bali untuk: a. Mengutamakan penggunaan produk lokal Bali dari IKM, UMKM dan Koperasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Krama Bali dan upacara adat; b. Pemanfaatan produk lokal Bali dari IKM, UMKM dan Koperasi dalam pengembangan usaha, perdagangan antar daerah dan ekspor; c. Peningkatan spirit jengah serta cinta/ bangga sebagai Krama Bali untuk menggunakan dan mempromosikan produk lokal Bali dari IKM, UMKM dan Koperasi.

5. Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital.

- A. Penumbuhan dan pembangunan Ekonomi Kreatif dan Digital yang berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, dan Branding Bali, melalui: a. Pengembangan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal Alam Bali menjadi produk Ekonomi Kreatif dan Digital yang berkualitas, bernilai tambah,

berdaya saing seperti kuliner, fesyen, kriya, seni rupa, arsitektur, seni pertunjukan, desain, dan lain-lain; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Krama) Bali yang penuh talenta seni, kreatif, dan inovatif sebagai pekerja kreatif dan pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan Digital yang profesional; c. Peningkatan produk Ekonomi Kreatif dan Digital berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, unggul, serta berkelanjutan yang berbasis tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.

- B. Mengembangkan sumber daya lokal yang khas dan unik di masing-masing wilayah sesuai potensinya menjadi produk Ekonomi Kreatif dan Digital unggulan yang berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing untuk pemerataan pusat pertumbuhan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Bali.
- C. Mengembangkan Ekonomi Kreatif secara terintegrasi dan kolaboratif yang didukung oleh kreativitas dan inovasi Krama Bali, melalui: a. Peningkatan kuantitas dan kualitas Krama Bali dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Digital; b. Peningkatan kuantitas dan kualitas Krama Bali sebagai pekerja kreatif dan pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan Digital; c. Peningkatan jiwa kewirausahaan pekerja kreatif Krama Bali dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital; d. Peningkatan kuantitas dan kualitas HaKI dari Krama Bali yang dikelola melalui Ekonomi Kreatif dan Digital oleh Krama Bali.
- D. Menumbuhkan dan mengembangkan produk dan usaha Ekonomi Kreatif dan Digital melalui peningkatan keragaman produk Ekonomi Kreatif dan Digital berbasis nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali (branding Bali), seperti: kuliner Bali, fesyen Bali, kriya Bali, seni rupa Bali, seni pertunjukan Bali, musik Bali, arsitektur Bali, desain interior

Bali, desain komunikasi visual Bali, desain produk Bali dan lain-lainnya.

- E. Menumbuhkan dan mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Digital dengan menjaga dan melindungi ekosistem alam dan Budaya Bali secara berkelanjutan, melalui: a. Pelindungan dan pelestarian Alam dan Budaya Bali secara berkelanjutan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital. b. Pemanfaatan sumber daya secara efisien dalam menghasilkan produk Ekonomi Kreatif dan Digital. c. Pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam menghasilkan produk Ekonomi Kreatif dan Digital.
- F. Mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Digital untuk meningkatkan kapasitas perekonomian Bali yang berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing serta berkelanjutan, melalui: a. Peningkatan daya saing usaha Ekonomi Kreatif dan Digital; b. Peningkatan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dan Digital dalam perekonomian Bali.
- G. Membangun dan mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Digital yang memadukan nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal Bali dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital, melalui: a. Penerapan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas; b. Penerapan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital; c. Pengembangan produk-produk baru, bernilai tambah, dan kompetitif melalui penerapan teknologi termasuk teknologi digital.
- H. Membangun dan mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara sakala dan niskala, melalui: a. Peningkatan pendapatan Krama Bali sebagai pekerja Kreatif maupun pelaku

usaha Ekonomi Kreatif dan Digital; b. Peningkatan kontribusi Ekonomi Kreatif dan Digital terhadap perekonomian, kehidupan sosial dan Budaya Krama Bali.

- I. Membangun dan mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Digital dengan melibatkan para pihak dengan menerapkan asas gotong-royong melalui:
 - a. Peningkatan keterlibatan pelaku usaha Krama Bali dalam pengembangan sentra-sentra Ekonomi Kreatif dan Digital;
 - b. Peningkatan sinergitas dan kerja sama antara sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan, industri, dan pariwisata dalam pengembangan ekonomi kreatif dan digital;
 - c. Peningkatan rasa kebersamaan antar pekerja dan pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan Digital.
- J. Mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Digital yang tangguh dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global, melalui:
 - a. Peningkatan pembiayaan bagi usaha Ekonomi Kreatif dan Digital;
 - b. Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha Ekonomi Kreatif dan Digital;
 - c. Peningkatan kualitas tata kelola dan sistem pengelolaan usaha Ekonomi Kreatif dan Digital;
 - d. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. Penyediaan infrastruktur yang memadai untuk pengembangan usaha Ekonomi Kreatif;
 - f. Peningkatan pemasaran dan promosi produk Ekonomi Kreatif dan Digital di dalam dan di luar negeri;
 - g. Pengembangan kelembagaan pendukung pemberdayaan kreativitas di sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat.
- K. Pembangunan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital yang dapat meningkatkan pendapatan pekerja kreatif dan pelaku usaha sehingga mampu membangkitkan kesadaran kolektif Krama Bali, melalui:
 - a. Peningkatan pendapatan Krama Bali sebagai pekerja kreatif dan pelaku usaha Ekonomi

Kreatif dan Digital; b. Peningkatan penggunaan produk Ekonomi Kreatif dan Digital branding Bali dalam memenuhi kebutuhan Krama Bali sehari-hari serta upacara adat; c. Peningkatan produk Ekonomi Kreatif dan Digital oleh Krama Bali untuk pengembangan usaha, perdagangan antar daerah dan ekspor; d. Peningkatan spirit jengah serta cinta/ bangga sebagai Krama Bali terhadap produk Ekonomi Kreatif dan Digital Branding Bali; e. Peningkatan apresiasi, pemanfaatan untuk usaha dan konsumsi karya kreatif oleh Krama Bali; f. Peningkatan kesadaran Krama Bali ikut secara aktif sebagai agen promosi produk Ekonomi Kreatif dan Digital Branding Bali.

6. Sektor Pariwisata

- A. Mengembangkan keunggulan dan keunikan sumber daya lokal Bali menjadi daya tarik wisata, antara lain: a. Daya tarik wisata berbasis alam; b. Daya tarik wisata berbasis budaya; c. Daya tarik wisata buatan; d. Daya tarik wisata spiritual.
- B. Mengembangkan Krama Bali secara optimal sebagai pelaku utama penyelenggaraan kepariwisataan yang kompeten dan profesional, unggul, dan berdaya saing. 3. Memberdayakan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang sangat kaya dan unik sebagai kekuatan daya tarik wisata yang harus dikelola secara beradab.
- C. Mengembangkan sumber daya lokal masing-masing wilayah sesuai potensinya menjadi Daya Tarik Wisata untuk menyeimbangkan pusat pertumbuhan perekonomian antar wilayah.
- D. Mengembangkan Krama Bali agar menjadi pelaku kepariwisataan yang kompeten, profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi.

- E. Pembangunan kepariwisataan yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.
- F. Mengembangkan Kepariwisata Bali dengan menjaga dan melindungi ekosistem alam dan budaya secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, melalui: a. Melarang wisatawan memasuki tempat suci dan tempat yang disucikan; b. Melarang segala tindakan yang mencemari tanah, danau, mata air, sungai, dan laut; c. Tidak merusak moral, mental, sikap, perilaku serta tatanan kehidupan genuine Krama Bali; d. Tidak merusak tumbuh-tumbuhan, dan keanekaragaman hayati endemik Bali; e. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dari limbah, sampah, dan polusi udara; f. Menjaga keluhuran adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali.
- G. Mengembangkan kepariwisataan Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal Bali secara optimal dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian Bali yang berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing, melalui: a. Pemberdayaan secara optimal Krama Bali sebagai pelaku utama Kepariwisata Bali; b. Meningkatkan solidaritas, sinergitas, kolaborasi, dan semangat kebersamaan sesama Krama Bali sebagai pelaku usaha pariwisata; c. Meningkatkan integrasi sektor pariwisata dengan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan industri kerajinan rakyat branding Bali; d. Mengembangkan Daya Tarik Wisata dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan perekonomian; e. Memberdayakan secara optimal serta memberikan proteksi sumber daya lokal Bali untuk meningkatkan kapasitas perekonomian Bali yang berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing.

- H. Menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta teknologi digital secara masif dalam Penyelenggaraan Kepariwisata yang berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing serta berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kepariwisataan lokal, nasional, dan global.
- I. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Bali harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Krama Bali melalui peningkatan pendapatan Krama Bali dan berkontribusi terhadap kehidupan sosial dan budaya Krama Bali guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara sakala-niskala.
- J. Membangun, mengembangkan dan mengelola kepariwisataan Bali dengan mengutamakan pelaku usaha pariwisata lokal berdasarkan asas gotong-royong serta mengedepankan sikap keberpihakan pada kolektivitas Krama Bali, melalui:
 - a. Peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata lokal Bali;
 - b. Peningkatan rasa kebersamaan sesama pelaku usaha pariwisata;
 - c. Peningkatan sinergi dan kolaborasi sektor pariwisata dengan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan industri kerajinan rakyat.
- K. Mengembangkan kepariwisataan Bali untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi persaingan usaha pariwisata secara lokal, nasional, dan global, melalui:
 - a. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan keragaman daya tarik wisata dan produk wisata;
 - b. Peningkatan kualitas Krama Bali sebagai SDM pariwisata;
 - c. Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;
 - d. Peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi darat, laut, dan udara secara terintegrasi;
 - e. Perluasan pasar pariwisata di dalam dan di luar negeri;
 - f. Peningkatan kualitas tata kelola Kepariwisata Bali.
- L. Pengembangan kepariwisataan Bali harus mampu membangkitkan spirit jengah dan cinta/bangga sebagai Krama

Bali dengan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara sakala-niskala, dalam menghadapi perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global, yaitu:

- a. Mampu meningkatkan pendapatan Krama Bali;
- b. Mampu memberi manfaat ekonomi dan kehidupan sosial sebesar-besarnya bagi Krama Bali;
- c. Mampu melindungi adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal;
- d. Mampu menjaga kelestarian lingkungan alam serta keanekaragaman hayati.
- e. Mampu menghadapi ketatnya persaingan secara nasional dan global.

Selanjutnya perhitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Bali tahun 2024–2026 berpedoman pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komposisi Belanja Daerah Provinsi Bali untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 dijelaskan sebagai berikut.

- a. Belanja Operasi, merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan kebutuhan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai

Proyeksi belanja pegawai telah memperhitungkan pemberian Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN melalui DAK Fisik. Belanja pegawai direncanakan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD, kenaikan gaji dan tunjangan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dialokasikan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, belanja subsidi diproyeksikan sama setiap tahun selama periode 2024–2026.

4) Belanja Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja hibah telah memperhitungkan belanja hibah yang bersumber dari APBN melalui Dana BOS diproyeksikan sama setiap tahunnya untuk periode 2024-2026.

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Berdasarkan hal tersebut, dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2014-2026.

b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan Belanja modal terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.

1) Belanja Tanah

Belanja Tanah merupakan pengeluaran untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2024.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal ini digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau

dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja modal ini digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja modal ini digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah Provinsi Bali mengupayakan untuk memprioritaskan alokasi belanja modal dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang dialokasikan sebesar 15% dari total proyeksi belanja daerah untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur dan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Bali pada tahun 2024-2026 disajikan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
I	PENDAPATAN DAERAH	6.182.194.776.093	5.921.934.369.161	6.187.764.377.570
A	Pendapatan Asli Daerah	3.665.740.521.990	3.279.657.402.354	3.407.435.462.352
1	Pajak Daerah	3.021.066.373.329	2.462.579.851.300	2.469.473.846.692
1)	PKB	1.560.141.905.096	1.069.000.942.400	1.069.000.942.400
2)	BBNKB	743.235.973.362	640.110.389.300	640.110.389.300
3)	PBBKB	385.875.000.000	405.168.750.000	405.168.750.000
4)	Pajak AP	3.528.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000
5)	Pajak Rokok	328.285.494.871	344.699.769.600	351.593.764.992
2	Retribusi Daerah	26.628.064.310	33.551.361.031	36.906.497.134
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	219.371.691.686	285.183.199.192	327.960.679.071
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	398.674.392.665	498.342.990.831	573.094.439.456
B	Pendapatan Transfer	2.459.900.920.103	2.582.895.966.108	2.712.040.764.413
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.553.334.000	59.381.000.700	68.288.150.805
II	BELANJA DAERAH	6.460.466.448.757	6.185.746.905.683	6.464.685.814.290
A	Belanja Operasi	4.286.741.258.559	4.421.839.897.694	4.619.095.586.771
1	Belanja Pegawai	1.743.818.568.219	1.760.629.583.321	1.809.616.914.370
2	Belanja Barang dan Jasa	1.798.584.650.632	1.905.450.534.592	1.985.376.964.228
3	Belanja Bunga	-	-	-

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
4	Belanja Subsidi	10.025.000.000	10.025.000.000	10.025.000.000
5	Belanja Hibah	711.272.139.708	728.454.104.781	801.116.201.923
6	Belanja Bantuan Sosial	23.040.900.000	17.280.675.000	12.960.506.250
B	Belanja Modal	1.079.546.740.676	883.408.038.192	907.805.150.183
1	Belanja Modal Tanah	82.334.162.689	57.050.373.210	55.672.667.945
2	Belanja Peralatan dan Mesin	135.105.432.145	122.818.530.895	139.832.045.081
3	Belanja Gedung dan Bangunan	608.879.881.311	465.771.922.852	452.751.749.854
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.330.053.539	215.084.024.091	234.804.615.659
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	34.897.210.992	22.683.187.144	24.744.071.644
C	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
1	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
D	Belanja Transfer	1.044.178.449.522	830.498.969.797	887.785.077.336
1	Belanja Bagi Hasil	652.697.346.891	456.888.142.823	502.576.957.106
2	Belanja Bantuan Keuangan	391.481.102.631	373.610.826.973	385.208.120.230
	Surplus/Defisit	-278.271.672.664	-263.812.536.522	-276.921.436.720
III	PEMBIAYAAN DAERAH	278.271.672.664	263.812.536.522	276.921.436.720
A	Penerimaan Pembiayaan	278.271.672.664	263.812.536.522	276.921.436.720

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	278.271.672.664	263.812.536.522	276.921.436.720
B	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
	Pembiayaan Netto	278.271.672.664	263.812.536.522	276.921.436.720
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Sumber: Bapenda dan Bappeda Provinsi Bali, 2022

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai dengan urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II, Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah yang terdiri dari program prioritas dan kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun rencana, seperti untuk prioritas bidang pendidikan sebesar

20% (dua puluh persen), urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen). Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat serta merupakan prioritas belanja wajib yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan prioritas II merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing Perangkat Daerah di Provinsi Bali. Program prioritas kedua ini sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bansos organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kab/kota dan pemerintah desa serta bidang belanja tak terduga.

Berikut disajikan data Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali sesuai perhitungan dari Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Uraian	Proyeksi Anggaran (Rp X Juta)		
		2024	2025	2026
1	Prioritas I	3.427.184.600.852	2.975.455.876.240	3.056.451.825.204
2	Prioritas II	1.610.499.017.187	1.774.447.128.682	1.903.919.226.934
3	Prioritas III	1.422.782.830.718	1.434.204.570.791	1.502.546.499.183
Total		6.460.466.448.757	6.185.746.905.683	6.464.685.814.290

Sumber: Bappeda Provinsi Bali, 2022

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Bali selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah; (1) Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial; (2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) Pelestarian Kebudayaan Bali; (4) Kerusakan dan pencemaran lingkungan serta ancaman perubahan iklim; (5) Pelayanan infrastruktur darat, laut dan udara; (6) Keamanan dan kenyamanan; (7) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Masalah pokok tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut.

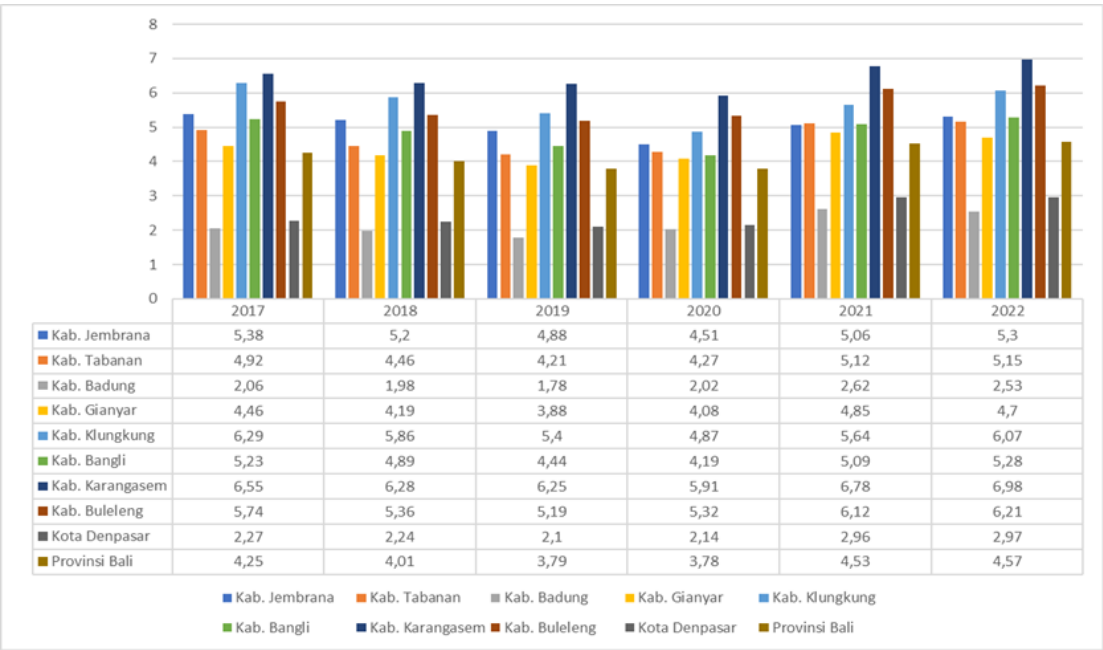
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali cenderung menurun selama kurun waktu 2017 sampai 2020 mencapai 3,78 persen. Namun mengalami peningkatan menjadi 4,53 di tahun 2021. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, hanya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang persentase kemiskinannya di bawah 3 persen. Persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota lainnya masih diatas 3 persen, bahkan ada sampai 6 persen yaitu di Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Sedangkan, jumlah penduduk miskin di Bali pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,53%, naik 0.75% dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Bali adalah sebesar 201,97 ribu orang. Bertambah sekitar 36,78 ribu

orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 yang tercatat sekitar 165,19 orang.

Gambar 4.1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 2017-2022



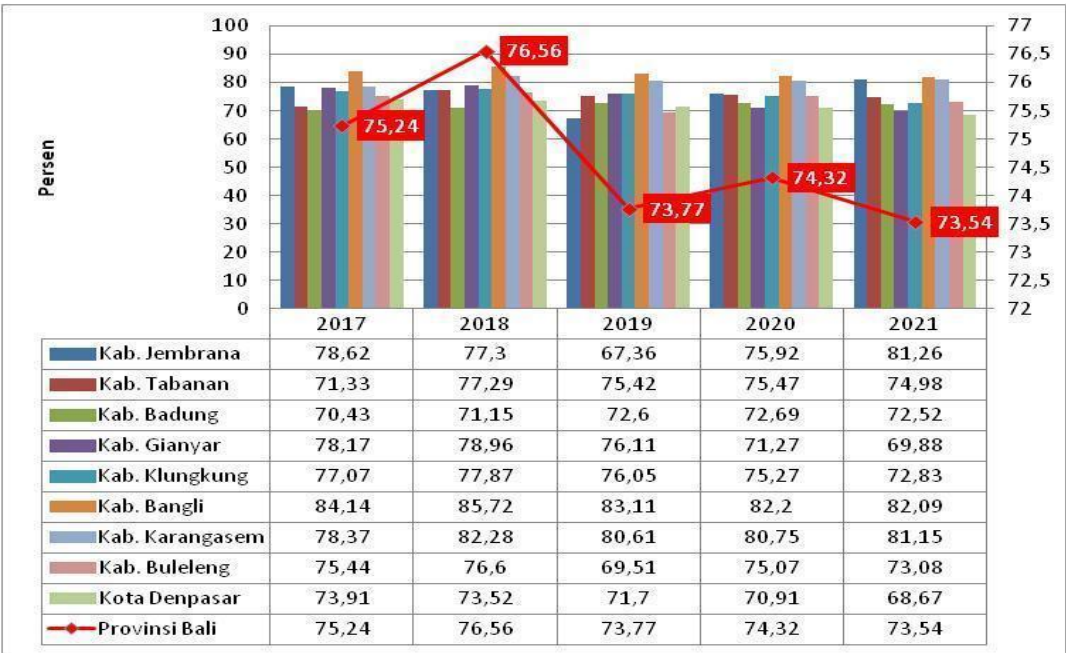
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali tahun 2021 sebesar 73,45%. Secara tren terjadi penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 76,56 persen. Pasca pandemi COVID-19 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali mengalami sedikit penurunan menjadi 5,37% di tahun 2021 dari sebelumnya sebanyak 5,63% pada tahun 2022. Kecenderungan peningkatan tingkat pengangguran salah satunya disebabkan karena terjadi *mismatch* (tenaga kerja dengan lapangan kerja). Dalam hal ini, karena lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Bali hanya terpusat di Kabupaten Badung dan sebagian besar dari sektor jasa dan pariwisata. Sementara lulusan sekolah berasal dari semua jenis jurusan yang ada, seperti ekonomi, teknik, MIPA, hukum, dan lain-lain.

Persentase wirausaha di Bali masih belum terlalu besar, baru mencapai 2,89% di tahun 2021. Angka tersebut masih belum ideal, idealnya persentase wirausaha minimal 12% agar dapat dikategorikan menjadi negara maju. Jumlah wirausaha ini perlu lebih ditingkatkan lagi, karena semakin banyak wirausaha maka peluang lapangan kerja

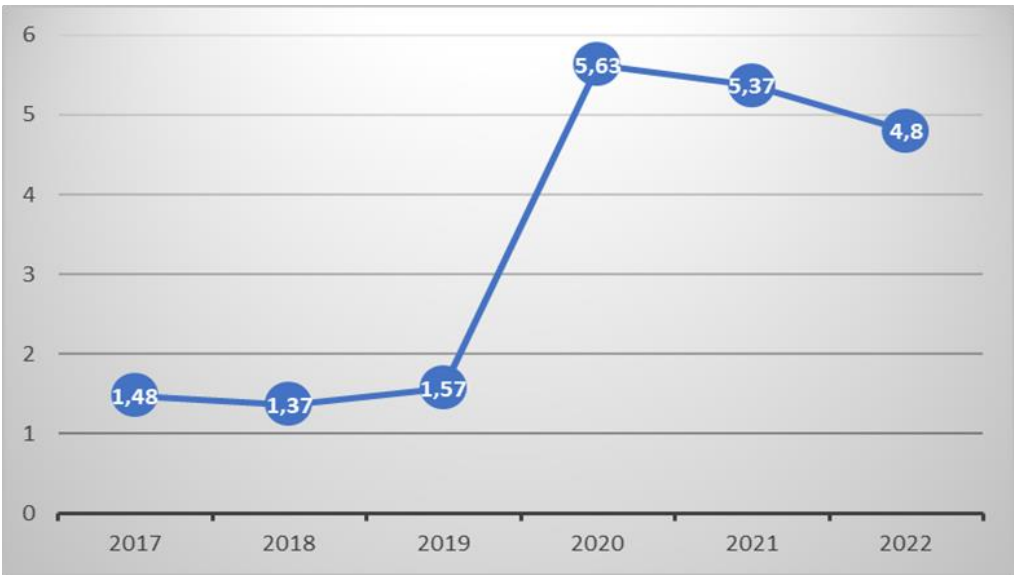
akan semakin besar sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang terjadi.

Gambar 4.2 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber Data: BPS Provinsi Bali, 2022

Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali 2017-2022

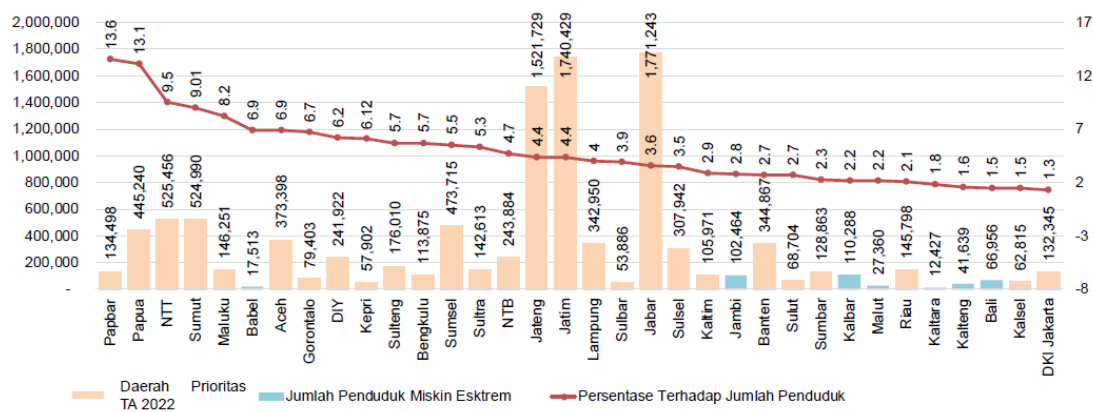


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Kemiskinan Ekstrem

Secara internasional, kemiskinan eskترم adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari U\$1,9 PPP (*purchasing power parities*). PPP adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US\$. Setidaknya, ada 3 (tiga) hal yang bisa dipahami sebagai penyebab kemiskinan ekstrem, yaitu 1) kondisi sosial-budaya; 2) keterbatasan sumber daya; dan 3) keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. (Sumber: Bank Dunia).

Gambar 4.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Indonesia sampai dengan Maret 2021



Dari Gambar 4.4 jumlah kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali sebanyak 66.956 jiwa(1,5%) dari jumlah penduduk Provinsi Bali. Posisi ini menempati terendah ketiga dari seluruh Provinsi se-Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara mengakibatkan terjadinya berbagai pembatasan kegiatan dan larangan perjalanan ke luar negeri. Situasi tersebut mengakibatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mengalami penurunan yang sangat tajam, bahkan pada tahun 2021 hanya ada 51 kunjungan. Dampak nyata yang dirasakan di Bali adalah pada lapangan usaha yang bergantung pada kunjungan wisatawan mancanegara. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, hampir seperempat perekonomian Bali tercipta dari lapangan usaha

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, namun setelah terjadinya pandemi lapangan usaha ini berkurang perannya hingga kurang dari seperlima. Aktivitas pariwisata dan ekonomi di Provinsi Bali jauh berkurang setelah terjadinya pandemi COVID-19, kondisi ini diduga mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Rendahnya pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap meningkatnya pengangguran di Provinsi Bali. Dalam 5 tahun terakhir, TPT Provinsi Bali secara konsisten berada di bawah 2% dan merupakan yang terendah secara nasional. Kondisi tersebut berubah setelah terjadinya pandemi COVID-19, TPT Provinsi Bali berada pada kisaran 5% pada Bulan Agustus 2020 dan kondisi ini terus berlanjut pada tahun 2021.

Target Pemerintah Provinsi Bali untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran selama dua tahun terakhir masih dibayangi oleh dampak COVID-19 sehingga terjadi fluktuasi. Persentase penduduk miskin ditargetkan dapat dikurangi menjadi 2,95% pada tahun 2021, mengalami peningkatan menjadi 4,53%. Demikian halnya dengan TPT yang ditargetkan mencapai 1,07% pada tahun 2021, mengalami peningkatan hingga mencapai 5,37%. Tingginya *gap* antara target dan capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah melakukan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak buruk secara sosial ekonomi.

Tabel 4.1 Rumusan Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Kemiskinan dan pengangguran	• Dampak pandemi COVID-19 • Rendahnya pendidikan, kesehatan, dan terbatasnya akses terhadap lapangan kerja, serta keterisolasian di beberapa wilayah di Provinsi Bali. • Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa • Rendahnya persentase wirausaha muda yang bergelut dalam bidang UMKM • Terjadi <i>mismatch</i> (tenaga kerja dengan lapangan kerja)

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
	• Iklim Investasi belum kondusif • Rendahnya nilai NTP dan NTN • Masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni • Tingginya tingkat ketergantungan terhadap pangan utama • Ketimpangan pendapatan masyarakat • Masih adanya masalah kesejahteraan sosial masyarakat

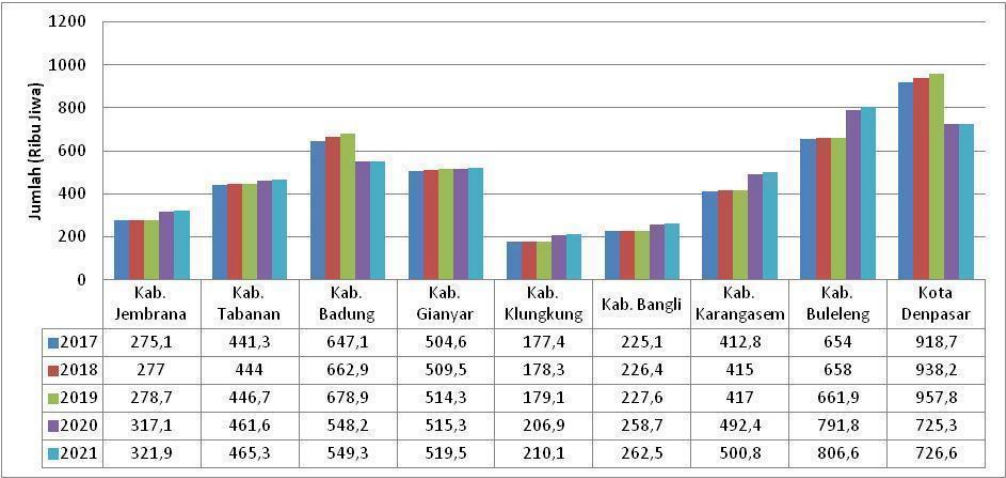
B. Kesenjangan

Kesenjangan masih menjadi permasalahan pembangunan yang harus diatasi di Provinsi Bali. Kesenjangan yang dimaksud, yaitu kesenjangan dari sisi penduduk, antar wilayah, antar sektor, dan gender.

- Kesenjangan Penduduk: Aspek kependudukan dalam pembangunan dapat menjadi peluang dan menjadi permasalahan dalam pembangunan. Penduduk dapat menjadi aset berharga dalam mendukung pembangunan jika dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan jika tidak diberdayakan secara optimal. Dalam hal ini, masalah meningkatnya jumlah penduduk dan ketimpangan penduduk akan menjadi sumber berbagai masalah pembangunan yang sudah dan akan terjadi di Provinsi Bali, yaitu masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jumlah penduduk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Namun, jumlah penduduk tidak merata di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kota Denpasar yang luas wilayahnya terkecil di Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 957,8 ribu jiwa pada tahun 2019 dan mengalami penurunan saat kondisi Pandemi menjadi 726,6 ribu jiwa di tahun 2021. Besarnya jumlah penduduk Kota Denpasar,

terlampau jauh dengan Kabupaten Klungkung yang memiliki jumlah penduduk terendah di Provinsi Bali yaitu 210,1 ribu jiwa pada tahun 2021.

Gambar 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk di atas 1,5% pada tahun 2018-2019, dan mengalami penurunan di tahun 2020 hingga 2021 karena dampak pandemi COVID-19. Namun, diprediksi akan meningkat kembali apabila situasi sudah mendekati normal. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar disamping karena meningkatnya angka kelahiran. Dalam 10 tahun terakhir TFR (angka kelahiran total) di Bali mengalami peningkatan dari 2,10 menjadi 2,30. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya persentase pasangan usia subur yang sedang memakai alat kontrasepsi (*current use*) dan berubahnya pola pemilihan metode kontrasepsi dari metode jangka panjang yang tingkat kelangsungan pemakaiannya (*continuation rate*) lebih tinggi ke metode jangka pendek yang tingkat kelangsungannya lebih pendek. Migrasi yang masuk ke Kota Denpasar dan Kabupaten Badung disebabkan karena pesatnya perkembangan sektor pariwisata di dua Kabupaten/Kota tersebut yang menjadi daya tarik bagi pencari

kerja sehingga terjadi perpindahan penduduk. Hal tersebut berarti akan terkait dengan kesenjangan antar sektor dan antar wilayah.

- Kesenjangan Antar Sektor: Selain kesenjangan penduduk, masih adanya kesenjangan antar sektor dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Bali. Sektor yang dimaksud yaitu antara sektor pariwisata dan pertanian. Hal tersebut terlihat dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) memberikan kontribusi paling dominan sebesar 23,25% pada tahun 2019, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 13,53%. Sektor pertanian awalnya adalah penggerak perekonomian Provinsi Bali sebelum sektor pariwisata mendominasi. Perlambatan sektor pertanian disebabkan oleh cenderung menurunnya hasil produksi karena kapasitas produksi yang cenderung stagnan. Selain itu, dipengaruhi juga oleh penurunan keterlibatan petani. Hal tersebut juga tidak dapat terlepas dari semakin meningkatnya sektor pariwisata. Meningkatnya sektor pariwisata dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain keramah-tamahan, kebersihan lingkungan, daya tarik objek wisata, ketersediaan berbagai fasilitas pariwisata, dan lainnya. Dampak dari meningkatnya sektor pariwisata yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal tersebut akan berpengaruh pada terjadinya alih profesi dari sektor pertanian ke sektor pariwisata.

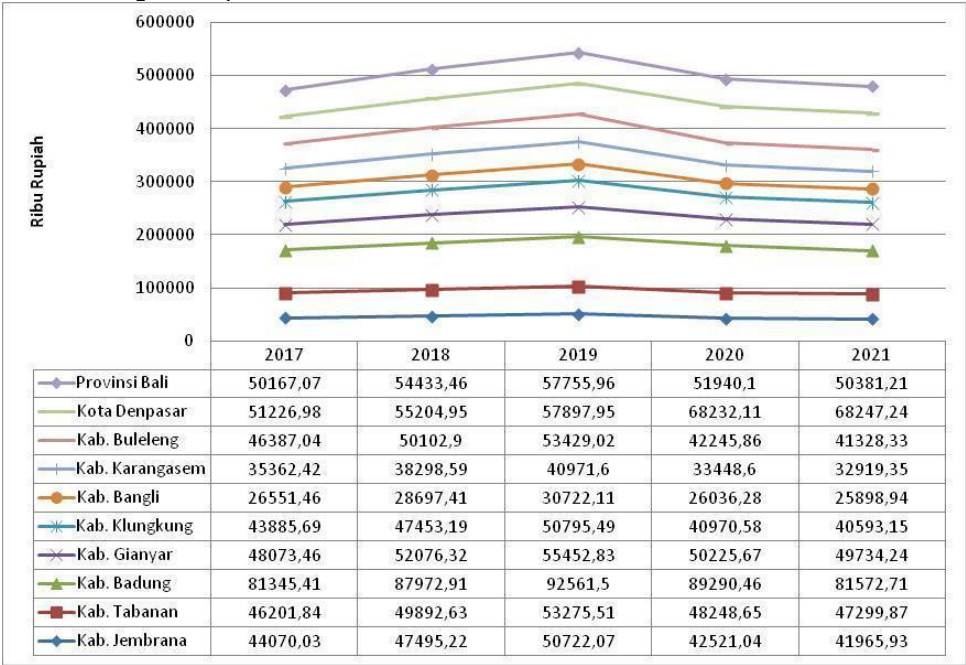
Gambar 4.6 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertanian terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

- Kesenjangan Antar Wilayah: Kesenjangan antar wilayah juga masih terjadi, yaitu Kabupaten Badung menjadi daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 81.572,71, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bangli yaitu Rp. 25.898,94. Penyebab kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali apabila dikaitkan dengan struktur perekonomian adalah persebaran yang tidak merata dari titik-titik destinasi pariwisata sehingga terdapat ketimpangan dalam menikmati benefit ekonomi dari aktivitas pariwisata. Sektor pariwisata di Provinsi Bali masih terkonsentrasi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar, sehingga berpengaruh terhadap tingginya pendapatan per kapita di daerah tersebut.

Gambar 4.7 PDRB Per Kapita Atas Dasar Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020, jumlah kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia terus bertambah pesat. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2020 pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 Oktober 2021, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari 4,2 juta jiwa, dan telah menyebabkan lebih dari 140 ribu kematian. Virus ini telah menyebar ke 34 provinsi di mana DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus terbanyak yaitu 858,3 ribu (20,4%) kasus, diikuti oleh Jawa Barat dengan 703,2 ribu (16,7%) kasus, dan Jawa Tengah dengan 482,4 ribu (11,5%) kasus.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, namun juga berdampak pada perekonomian, di mana pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,07% (yoy). Pandemi COVID-19 ini mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan PSBB ini membuat aktivitas masyarakat dan ekonomi menjadi terbatas. Konsumsi rumah

tangga yang melambat dan perilaku konsumen yang enggan keluar rumah karena adanya pembatasan mobilitas, menyebabkan turunnya permintaan agregat. Akibatnya, aktivitas perusahaan dan pekerja mandiri menurun dan/atau terhenti, menyebabkan turunnya penawaran agregat.

Provinsi Bali merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif paling besar. Selama tahun 2020, Provinsi Bali tumbuh negatif sebesar 9,31%. Ekonomi Bali dengan sektor pariwisata sebagai kontributor utama, sangat terdampak akibat adanya pemberlakuan kebijakan PSBB. Hal ini tercermin pada pertumbuhan negatif terdalam yang terjadi pada kelompok lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata utamanya sektor transportasi dan pergudangan sebesar 31,79%, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat mengalami kontraksi sebesar 27,52%. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen yang membentuk PDRB, kecuali konsumsi pemerintah mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada impor luar negeri sebesar 78,34%; diikuti penurunan ekspor luar negeri sebesar 76,23%; dan penurunan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/investasi) sebesar 12,21%.

Tertekannya pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali akibat pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali mengalami kenaikan, dari 3,61% (September 2019) menjadi 3,78% (Maret 2020), serta meningkat drastis menjadi 4,45% (September 2020) dan kembali naik menjadi 4,53% (Maret 2021). Selanjutnya kenaikan juga terjadi pada tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu dari 1,57% (Agustus 2019) dan 1,25% (Februari 2020), kemudian melonjak tinggi menjadi 5,63% (Agustus 2020), dan pada bulan Februari 2021 sedikit menurun menjadi 5,42%. Penurunan ekonomi yang signifikan di Provinsi Bali menyebabkan peningkatan kesenjangan pendapatan (indeks Gini) Provinsi Bali pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, dari 0,366 menjadi 0,369.

- Kesenjangan Gender: Kesenjangan gender juga masih terjadi di Provinsi Bali. Selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan angkatan kerja perempuan mencapai 65,67% pada tahun 2019. Angka tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 50%, namun demikian jumlah angkatan kerja perempuan masih di bawah angkatan kerja laki-laki. Angkatan kerja perempuan ini bekerja di berbagai sektor pembangunan seperti sebagai ASN, pegawai swasta, perdagangan dan lainnya. Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional juga masih di bawah laki-laki yaitu 48,05% pada tahun 2019, dan sumbangan pendapatan perempuan baru sebesar 38,61% pada tahun 2019. Partisipasi perempuan dalam bidang politik bisa dikatakan berkembang lambat. Partisipasi perempuan dalam parlemen masih jauh di bawah nasional yaitu hanya mencapai 9,09% atau sejumlah 5 orang pada tahun 2017. Persentase perempuan Bali yang bergabung dalam parlemen menduduki peringkat ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia. Walaupun terjadi peningkatan, namun masih jauh dari 30% kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Proporsi perempuan pekerja bebas non pertanian Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 25,53% dari total 129.932 orang pekerja bebas non pertanian. Artinya penduduk laki-laki masih mendominasi pekerja bebas non pertanian di Provinsi Bali. Dari sisi pendidikan, terlihat bahwa angka melek huruf pada tahun 2019 sebesar 96,99% penduduk laki-laki dan 91,66% untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak terbatas untuk laki-laki dan perempuan.

Perkembangan gender dapat dilihat secara nasional dengan menggunakan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG Provinsi Bali tahun 2019 sebesar 72,27, hal ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi lainnya dengan selisih angka yang cukup kecil, dengan pertumbuhan yang lambat. Angka tersebut menunjukkan bahwa para perempuan Bali dalam hal kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan

pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih di bawah dari para perempuan nasional.

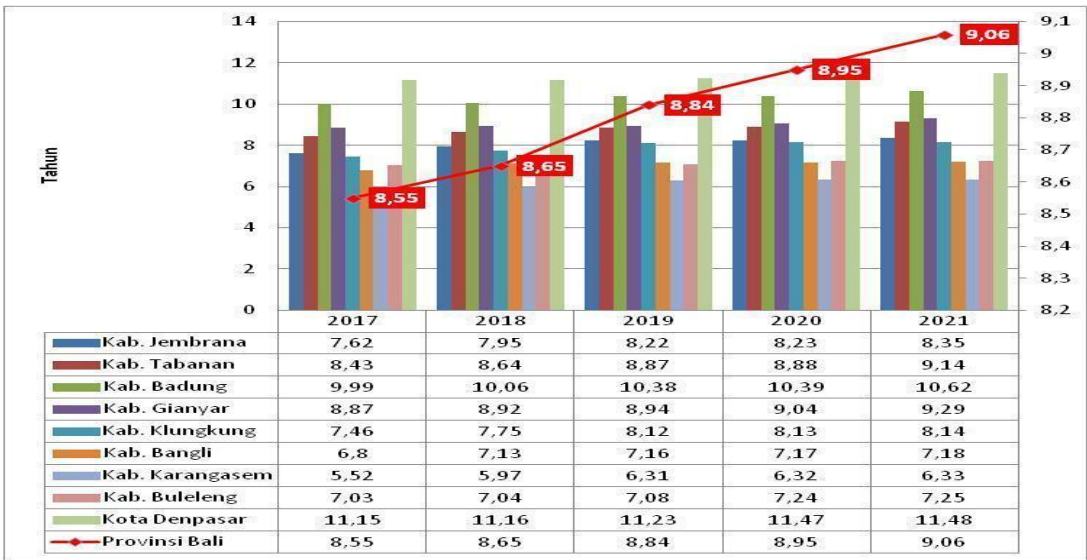
Tabel 4.2 Rumusan Permasalahan Kesenjangan

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Kesenjangan Penduduk	Tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan juga karena meningkatnya angka kelahiran
Kesenjangan Antar Sektor	Terjadinya perlambatan sektor pertanian dan sektor pariwisata yang berkembang pesat
Kesenjangan Antar Wilayah	Persebaran yang tidak merata dari titik-titik destinasi pariwisata sehingga terdapat ketimpangan dalam menikmati benefit ekonomi dari aktivitas pariwisata
Kesenjangan Gender	Belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama pada keluarga miskin yang jumlahnya masih banyak di Provinsi Bali

C. Kualitas SDM

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Permasalahan yang terjadi dari sisi pendidikan yaitu masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Meskipun rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 9,06 pada tahun 2021, tetapi masih jauh dari target wajib belajar 12 tahun. Adapun penyebab rata-rata lama sekolah belum mencapai target, karena masih adanya angka putus sekolah, seperti: tidak melanjutkan sekolah, DO (*Drop Out*), maupun dikeluarkan dari sekolah. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, rata-rata lama sekolah juga belum merata. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 11,48 di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Karangasem 6,33 pada tahun 2021.

Gambar 4.8 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bali
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Selain dari sisi pendidikan, permasalahan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali yaitu terjadinya perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif. Manusia Bali dahulu terkenal karena *jemet* (rajin, tekun), *seken, saja, beneh, luwih*, serta *undagi* (kreatif), sehingga menghasilkan karya-karya berbasis budaya tinggi. Perilaku Manusia Bali dahulu juga bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, dengan ciri yang rendah hati seperti *tragia, ipil-ipil* (sedikit demi sedikit tetapi konsisten), *lascarya* (tulus dan ikhlas), *lemuh tusing elung* (luwes tetapi tidak mudah patah), *dabdab* (teratur, sopan, dan matang), loyal serta berdedikasi tinggi. Manusia Bali saat ini memiliki cenderung konsumtif, moralitas menurun, kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal. Selain itu, manusia Bali dahulu sangat kuat dalam kohesi sosial yang ditunjukkan dengan ikatan *menyama braya* atau solidaritas. Namun saat ini ikatan *menyama braya* cenderung melemah

Tabel 4.3 Rumusan Permasalahan Kualitas SDM Bali

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Rata-rata lama sekolah yang belum mencapai target dan belum merata	• SPM urusan bidang Kesehatan dan Pendidikan belum terpenuhi • Masih Rendahnya APM jenjang Pendidikan tinggi

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
	Masih adanya putus sekolah, seperti tidak melanjutkan sekolah, DO (<i>Drop Out</i>), dikeluarkan dari sekolah
Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Terjadinya perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif	- Belum optimalnya sumber daya manusia Bali terhadap pergeseran struktur ekonomi dan adaptasi teknologi - Masih rendahnya tenaga kerja bersertifikat (kompetensi) - Cenderung konsumtif, moralitas menurun, kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal - Ikatan <i>menyama braya</i> cenderung melemah

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan yang terjadi terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD di Provinsi Bali, diuraikan sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah:

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. Pendidikan

- a) Belum tercapainya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (usia 16-18 tahun) sebesar 100% dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Khusus (usia 4-18 tahun) sebesar 100%;
- b) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi;
- c) Belum meratanya distribusi guru antar daerah;
- d) Belum optimalnya Sarana dan prasarana belajar pendidikan khusus.

B. Kesehatan

- a) Belum semua kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap;
- b) Belum semua Kabupaten memiliki RS Kelas B;
- c) Pelayanan RS kelas D Pratama belum optimal;
- d) Belum tersedianya RS berstandar internasional;

- e) Pelayanan kesehatan tradisional di Bali belum optimal;
- f) Belum semua penduduk Bali memiliki Jaminan Kesehatan;
- g) Sistem Informasi Kesehatan belum terintegrasi;
- h) Masih ditemukan adanya kematian ibu dan bayi;
- i) Belum tersedia pusat rehabilitasi Narkoba di Bali;
- j) Kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular;
- k) Kecenderungan peningkatan Penyakit berpotensi wabah.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah;
- b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik;
- c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit;
- d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi;
- e) Kepadatan lalu lintas/kemacetan pada beberapa ruas jalan arteri seperti ruas jalan antara Gilimanuk-Padangbai, di dalam Kota Denpasar dan sekitarnya;
- f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan;
- g) Kerusakan jalan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati melebihi tonase dari rencana;
- h) Penggunaan prasarana jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan disekitar atau sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya;
- i) Pelayanan air minum baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku;
- j) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
- k) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal;
- l) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
- m) Belum ada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Peraturan Daerah;

- n) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan;
- o) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang;
- p) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU);
- b) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a) Masih adanya pelanggaran tata ruang tidak sesuai dengan peruntukan;
- b) Dampak kemajuan teknologi informasi di berbagai sektor usaha dan jasa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Maraknya pembangunan usaha jasa pariwisata tanpa izin.

F. Sosial

- a) Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan;
- b) Masih adanya penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang belum mendapat penanganan rehabilitas Sosial;
- c) Belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d) Belum optimalnya perlindungan kepada korban bencana serta jaminan Sosial bagi masyarakat miskin;
- e) Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya;
- f) Belum optimalnya pelayanan sosial bagi penyandang keterlantaran.

G. Bencana

- a) Belum optimalnya mitigasi bencana guna menekan korban jiwa, harta maupun benda akibat bencana;
- b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana;
- c) Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana;
- d) Banyaknya Penduduk rentan baik fisik, sosial dan ekonomi.

URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR

A. Tenaga Kerja

- a) Meningkatnya jumlah pengangguran
- b) meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- c) penempatan PMI tidak sesuai ketentuan.
- d) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Masih rendahnya capaian IDG Provinsi Bali di tingkat Nasional;
- b) Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Eksekutif masih rendah;
- c) Partisipasi Angkatan Kerja perempuan masih dibawah dibandingkan dengan laki-laki;
- d) Belum semua PD memiliki data terpilah sehingga menyulitkan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- e) Partisipasi perempuan di lembaga lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki;
- f) Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki;
- g) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO masih cukup tinggi di Provinsi Bali;
- h) Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- i) Munculnya berbagai kasus perlindungan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan seperti tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking*;
- j) Munculnya berbagai kasus perlindungan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan seperti tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking*;
- k) Masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar ramah anak;
- l) Masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang belum memenuhi standar ramah anak;
- m) Belum semua kab/kota memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar;
- n) Kasus kekerasan Seksual pada anak;
- o) Masih adanya kasus eksploitasi, penelantaran anak, dan pembuangan bayi;
- p) Masih tinggi kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- q) Kasus perundungan atau *bullying*.

C. Pangan

- a) Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum optimal;
- b) Adanya alih fungsi lahan dan pemilikan lahan petani sempit;
- c) Keterbatasan air irigasi dan kualitas jaringan irigasi;
- d) Akses pemasaran dan permodalan petani lemah;
- e) Penguasaan teknologi bagi petani lemah;
- f) Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan;
- g) Koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal.

D. Pertanahan

- a) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan.

E. Lingkungan Hidup

- a) Belum optimalnya pelestarian ekosistem perairan danau di Bali;

- b) Belum optimalnya data informasi pengelolaan lingkungan hidup;
- c) Masih adanya pelanggaran lingkungan (pelanggaran tata ruang/alih fungsi lahan, pelanggaran sempadan, pelanggaran baku mutu);
- d) Belum optimalnya peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e) Masih adanya pencemaran air sungai, pantai, laut dan mata air;
- f) Masih adanya kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove;
- g) Masih adanya pencemaran udara;
- h) Masih tingginya emisi gas rumah kaca;
- i) Menurunnya sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati;
- j) Belum optimalnya pengelolaan sampah;
- k) Belum terakreditasi dan teregistrasi UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- l) Belum optimalnya kualitas pelayanan pengelolaan sampah di TPA Regional.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting;
- b) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Masih lemahnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- c) Kondisi prasarana/sarana desa dan teknologi tepat guna belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan;
- d) Peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang optimal.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang sesuai dengan kearifan lokal Bali.

I. Perhubungan

- a) Terjadinya Kemacetan lalu lintas terutama di daerah Kawasan Sarbagita dan Pusat-pusat kegiatan wisata;
- b) Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali;
- c) Masih rendahnya penggunaan angkutan umum;
- d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal);
- e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

J. Komunikasi dan Informatika

- a) Rendahnya publikasi terhadap program dan kebijakan pemerintah;
- b) Rendahnya pengelolaan opini publik;
- c) Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan;

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Masih terbatasnya akses koperasi dan UKM dalam pembiayaan dan permodalan;
- b) Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUMKM;
- c) Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi;
- d) Masih rendahnya daya saing dan produktivitas koperasi dan UMKM di Bali;
- e) Masih kurangnya kerjasama kemitraan ekonomi dan bisnis yang melibatkan KUMKM di Bali.

L. Penanaman Modal

- a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor;
- b) Belum memadainya infrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat;
- c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal;
- d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota;
- e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

M. Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Belum optimalnya akses data tentang kepemudaan dan olahraga provinsi Bali;
- b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda;
- c) Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga, kompetisi/festival olahraga yang melibatkan masyarakat luas;
- d) Prestasi olahraga belum optimal;
- e) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

N. Statistik

- a) Rendahnya pemuktahiran dan sektoral dari produsen data.

O. Persandian

- a) Rendahnya pengamanan data dan informasi pemerintah.

P. Kebudayaan

- a) Belum Optimalnya Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b) Belum Optimalnya Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi;
- c) Belum Optimalnya Pemajuan Kesenian;
- d) Belum Optimalnya Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan;
- e) Belum Optimalnya Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali;

- f) Belum Optimalnya Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
- g) Belum Optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Pemajuan Kebudayaan;
- h) Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan.

Q.Perpustakaan

- a) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
- b) Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional;
- c) Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan;
- d) Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan *E-Library*;
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan.

R.Kearsipan

- a) Terbatasnya SDM Pengelola Kearsipan;
- b) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan;
- c) Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip;
- d) Kurangnya pemahaman terhadap keberadaan dan manfaat tentang arsip;
- e) Pemerataan Pembinaan Arsip belum optimal.

URUSAN PILIHAN

A. Kelautan dan Perikanan

- a) Terbatasnya prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.

B. Pariwisata

- a) Belum meratanya pembangunan pariwisata Bali;
- b) Kurangnya koordinasi terkait pemasaran pariwisata dalam rangka menyasar pangsa pasar baru yang potensial;
- c) SDM pariwisata Bali masih banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi;
- d) Industri pariwisata Bali masih banyak yang belum memiliki sertifikat usaha.

C. Pertanian

- a) Pemanfaatan lahan belum optimal;
- b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit;
- c) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi;
- d) Akses Pemasaran Dan Permodalan Petani lemah;
- e) Penguasaan teknologi bagi petani lemah;
- f) Adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- g) Mutu produksi dan sistem perbenihan belum memadai.

D. Kehutanan

- a) Pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan yang belum optimal karena masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- b) Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan belum optimal karena kurangnya komitmen dan persepsi yang berbeda terhadap pengelolaan hutan;
- c) Pembinaan dan pengawasan penangkaran/lembaga konservasi serta peredaran flora dan fauna belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang konservasi Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan belum optimal karena masih tingginya gangguan keamanan hutan terutama kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan dan penebangan liar (*illegal logging*);
- d) Pemantapan kawasan hutan belum optimal karena masih banyaknya permasalahan tata batas;
- e) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan belum optimal karena belum tersedianya data base yang akurat;
- f) Tertib tata usaha kayu pada industri hasil hutan belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang tata usaha kayu;
- g) Belum optimalnya pengelolaan hutan di wilayah UPTD; dan
- h) Belum optimalnya pelayanan administrasi dan pemenuhan sarana prasarana perkantoran.

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi

- b) Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c) Potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang.
- d) Penurunan kualitas hidup dan Lingkungan.

F. Perdagangan

- a) Masih banyak pasar yang terkesan kumuh;
- b) Kurangnya Service kepada pelanggan;
- c) Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama;
- d) Belum optimalnya menggunakan *E-Monney*;
- e) Display barang kurang menarik;
- f) Pedagang kurang memperhatikan kualitas produk;
- g) Belum tersedianya penyimpanan untuk barang pokok;
- h) Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk lokal;
- i) Masih rendahnya permodalan;
- j) Kurangnya promosi baik dalam negeri maupun luar negeri;
- k) Kurangnya kemampuan pelaku usaha menganalisa pasar;
- l) Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri;
- m) Kurangnya kemampuan eksportir/importir memanfaatkan hasil perundingan perdagangan;
- n) Kebijakan/regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan;
- o) Belum optimalnya kelembagaan ekspor/impor;
- p) Kurangnya sarana pengujian mutu barang;
- q) Kurangnya jumlah SDM dan kemampuan penguji mutu barang;
- r) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan;
- s) Masih rendahnya edukasi konsumen tentang haknya.

G. Perindustrian

- a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun;
- b) Keterbatasan bahan baku industri;

- c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing;
- d) Jumlah produksi masih rendah;
- e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah;
- f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah;
- g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki sertifikat mutu produk;
- h) Masih Banyaknya Produk kayu yang belum memiliki SVLK;
- i) Kemasan produk masih belum sesuai standar;
- j) Kurangnya inovasi desain produk;
- k) Kurangnya pendampingan;
- l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/jiwa kewirausahaan;
- m) Kurangnya kesadaran tentang HaKI.

PENUNJANG URUSAN

A. Perencanaan

- a) Belum Optimalnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b) Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c) Belum optimalnya data perencanaan pembangunan daerah;
- d) Belum optimalnya capaian target perencanaan pembangunan daerah.

B. Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset

- a) Belum konsistennya PPTK melaksanakan rencana kegiatan dengan aliran kas yang sudah ditetapkan sehingga terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun;
- b) Belum memadainya penguasaan SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset (Aplikasi SIPKD dan SIMDA BMD) serta jaringan internet yang belum lancar/trouble di SKPD;
- c) Belum optimalnya rekonsiliasi nilai perolehan dan perhitungan aset sebagai akibat belum teridentifikasinya aset idle secara menyeluruh pada perangkat daerah/unit pengguna;

- d) Kurangnya pengamanan fisik (belum dipasang patok batas dan papan nama kepemilikan aset) terhadap aset Pemerintah Provinsi Bali;
- e) Belum optimalnya penyusunan RKBMD yang mengacu pada daftar inventaris barang dan rencana pemeliharaan barang;
- f) Belum optimalnya pengamanan aset tanah Pemprov Bali karena masih terdapat gugatan dan penguasaan oleh pihak ketiga.

C. Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan

- a) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD;
- b) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak khususnya kendaraan operasional Samling dan motor untuk optimalisasi door to door;
- c) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih rendah yang disebabkan masih lemahnya aturan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak tertib membayar pajak;
- d) Masih kurangnya kemampuan dan ketrampilan sumber daya aparatur dalam pengelolaan PAD dan penguasaan IT;
- e) Rencana penggunaan kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan sesuai dengan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

D. Kepegawaian

- a) Belum adanya basis data terpadu ASN sehingga menyulitkan dalam perumusan perencanaan manajemen ASN;
- b) Mutasi dan penempatan ASN belum sepenuhnya sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja;
- c) Belum jelasnya jenjang karir ASN
- d) Belum adanya standar kinerja yang terukur;
- d) Kualitas pelayanan kepegawaian belum optimal.

E. Pendidikan dan Pelatihan

- a) Jumlah ideal Widyaiswara dan kompetensi substantifnya belum memadai;
- b) Perencanaan dan pengelolaan Kediklatan belum optimal;
- c) Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan belum digerakkan secara optimal karena keterbatasan SDM pengelola;
- d) Pengelolaan Diklat belum berdaya saing;
- e) Belum terpenuhinya kebutuhan Anggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur 20 JP setiap tahun;
- f) Kebijakan Diklat satu pintu perlu disinergikan;
- g) Sarana dan prasarana pembelajaran belum memadai.

F. Penelitian dan Pengembangan

- a) Belum optimalnya pengembangan Inovasi Daerah;
- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).
- c) Belum optimalnya peran Riset sebagai *problem solver* pembangunan daerah serta belum didukung Kerjasama Pemanfaatan Hasil Riset.

G. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

- a) Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan bangunan dan fasilitas penginapan yang representative dan dana untuk pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan gedung. Dibutuhkan juga alat transportasi yang memadai;
- b) Secara kualitas dan kuantitas tenaga ASN di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- c) Pemanfaatan anjungan Daerah Bali sebagai show window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal;
- d) Kurangnya sarana promosi dan informasi dan SDM yang berkompetensi di bidang seni, budaya dan promosi.

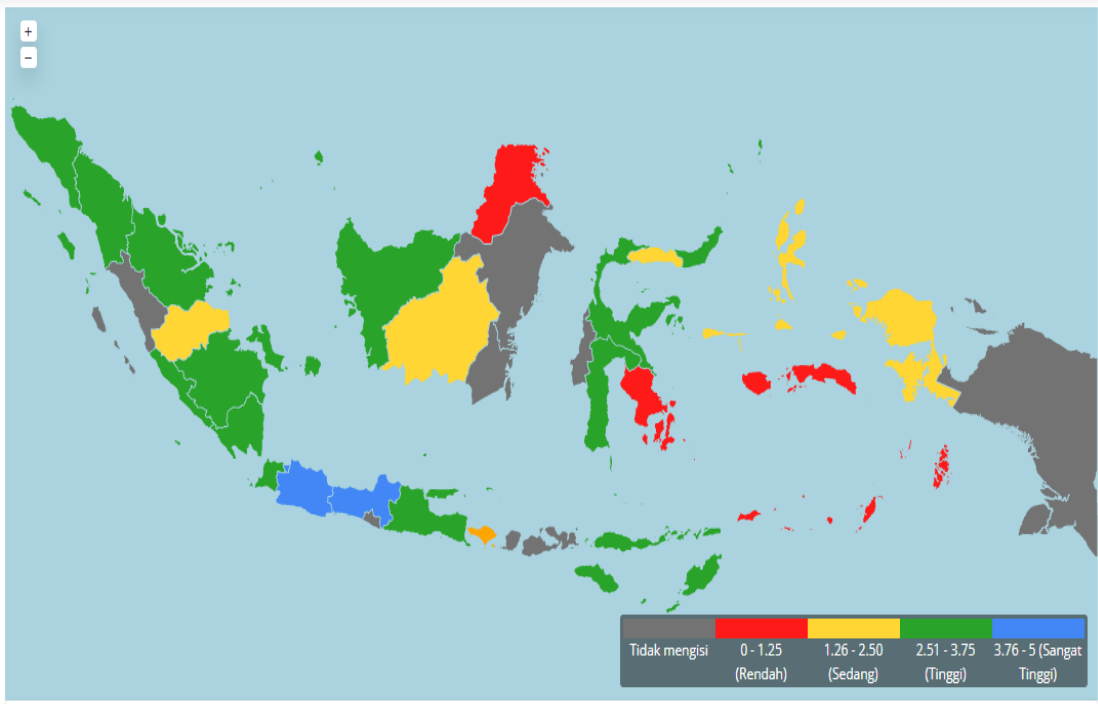
4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Tingkat Daya Saing

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya semakin tinggi. Daya Saing Daerah dapat mengukur Posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Disamping itu daya saing daerah mencerminkan profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, serta memberi gambaran tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

Dari hasil pengukuran Indeks daya saing daerah diketahui Provinsi Bali dalam kategori sedang dengan nilai/skor 1,4180, secara detail ditampilkan pada gambar dibawah.

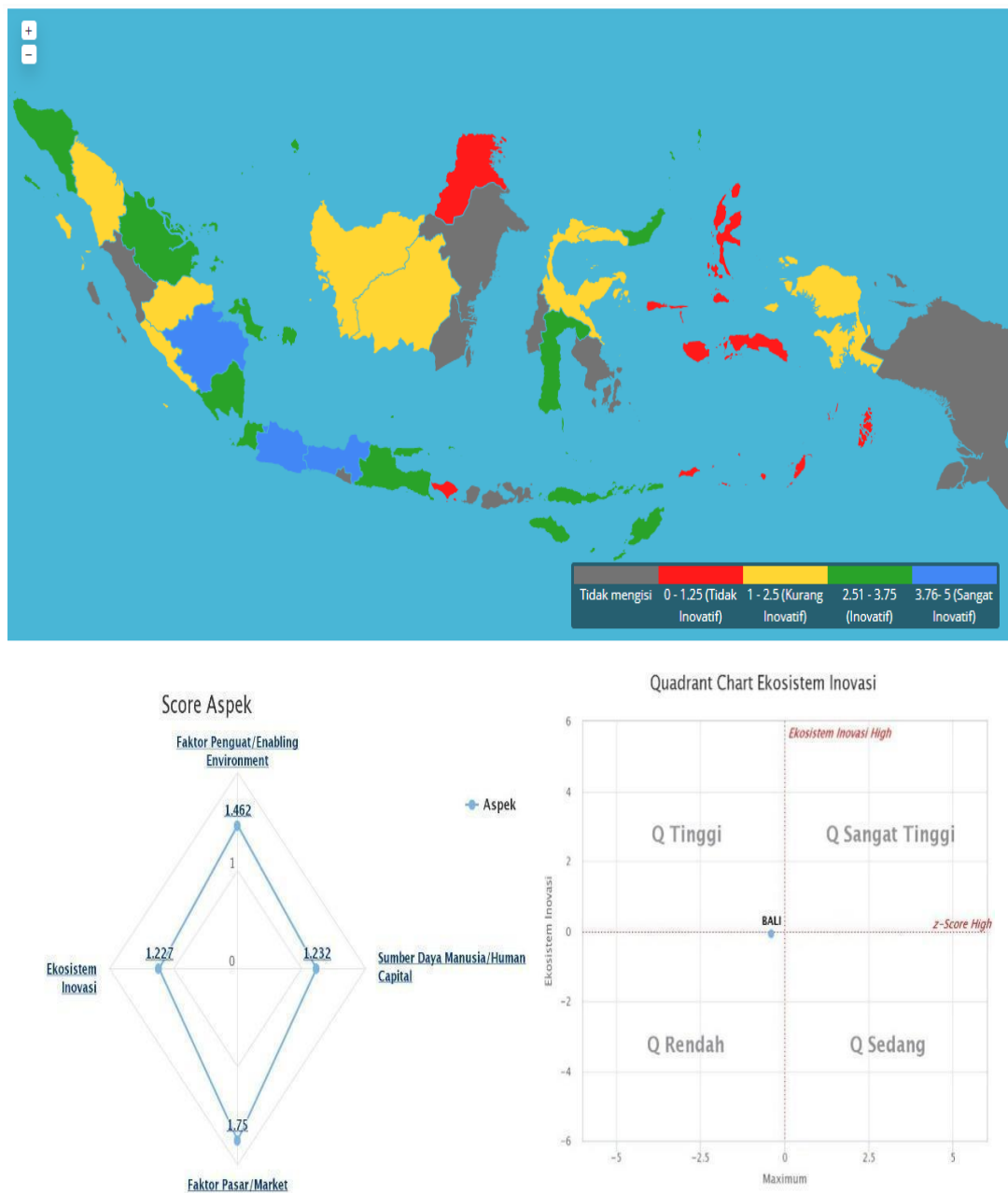
Gambar 4.9 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: BRIN, 2022

Pembentuk indeks daya saing daerah diukur dari Aspek, Pilar, dan dimensi. Dari sisi aspek yang terdiri dari 4 komponen yaitu: Provinsi Bali 1) aspek penguat/enabling environment, 2) aspek sumber daya manusia/human capital, 3) faktor Pasar/Market, 4) Ekosistem Inovasi. Dari 4 komponen tersebut Provinsi Bali memiliki nilai terendah pada aspek ekosistem inovasi (1.227) dan diikuti pada aspek sumber daya manusia (1,232). Nilai aspek ekosistem inovasi tersebut faktor pilar dinamika bisnis memperoleh nilai terkecil yaitu (0,7080) sedangkan dari dimensi komersialisasi memperoleh skor 0 dan teknologi 0.

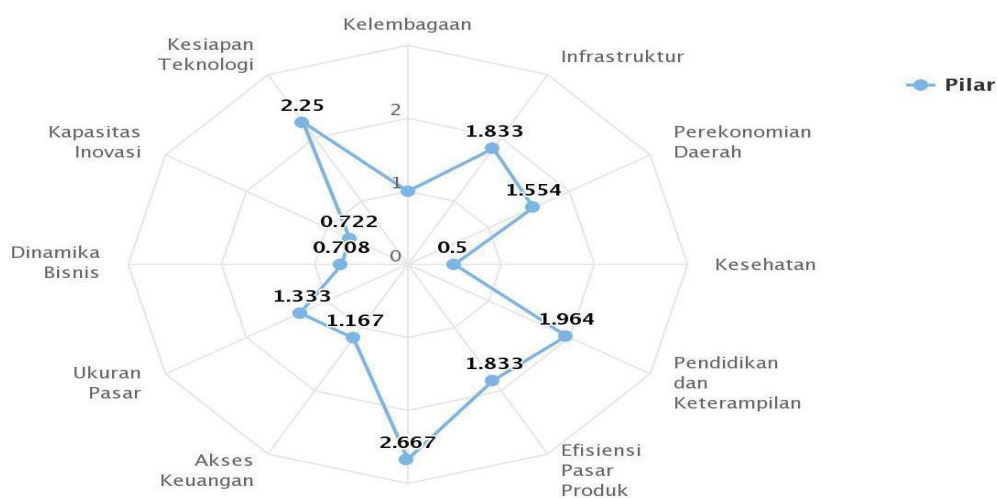
Gambar 4.10 Skor Ekosistem Inovasi Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: BRIN, 2022

Selanjutnya Indeks Daya Saing Daerah dari Pilar Kesehatan, Provinsi Bali memperoleh nilai/skor 0,5, diikuti oleh Dinamika Bisnis dengan skor 0,708, dan Kapasitas inovasi dengan nilai/skor 0,722. Capaian skor pilar secara detail disajikan pada Gambar 4.11 berikut.

Gambar 4.11 Capaian Skor Pilar Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: BRIN, 2022

Tabel 4.4 Rumusan Permasalahan Tingkat Daya Saing

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya ekosistem inovasi	• Rendahnya dinamika bisnis • Rendahnya komersialisasi • Rendahnya teknologi
Belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia	• Rendahnya penguasaan teknologi • Rendahnya jiwa kewirausahaan • Rendahnya rata-rata lama sekolah

2. Tradisi, Adat, dan Budaya

Kebudayaan Bali adalah aset yang sangat penting dan berharga, sehingga pembangunan kebudayaan Bali tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Akan tetapi, pembangunan kebudayaan Bali saat ini tidak mengalami kemajuan secara signifikan karena politik legislasi dan politik anggaran yang kurang memadai. Budaya lokal tidak mengalami kemajuan yang berarti kecuali hanya untuk sarana

komoditas ekonomi dan pariwisata saja. Selain itu, arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan kurang kuat. Permasalahan lainnya adalah eksistensi kebudayaan Bali (adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal) terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah dan kualitas, baik itu kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, dan pranata budaya.

Tabel 4.5 Rumusan Permasalahan Kebudayaan Bali

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan Bali	• Arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan kurang kuat • Cenderung konsumtif, moralitas menurun, kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal • ikatan <i>menyama braya</i> cenderung melemah • pengaruh budaya luar akibat globalisasi

B. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Bali pada pada tahun 2017 menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 61,12 hal ini dapat dilihat dari penjumlahan indeks kualitas air sebesar 61,39, indeks kualitas udara sebesar 96,63 dan tingkat tutupan lahan sebesar 36,38. Namun capaian Tahun 2019 belum dapat mencapai target Bali *Green Province* yaitu sebesar 70 yang disebabkan karena tingkat tutupan lahan yang masih relatif kecil.

Untuk itu tahun-tahun berikutnya harus bisa dioptimalkan pengembangan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), tanaman produksi, pemantapan ruang terbuka hijau, taman kota dan pedesaan

serta pengembangan kebun arboretum. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang lingkungan hidup masih ada beberapa yang belum tuntas dapat diselesaikan seperti capaian tingkat tutupan lahan yang disebabkan karena adanya alih fungsi lahan yang masih cukup tinggi serta kondisi lahan kritis yang berbatu dan kritis air, hal ini disebabkan karena laju percepatan kematian pohon yang ditanam lebih besar dari tingkat tanaman yang hidup.

Penanganan masalah sampah juga menjadi perhatian yang penting. Jumlah timbulan sampah semakin meningkat. Pada tahun 2017 tercatat jumlah timbulan sampah adalah sebesar 12.892,12 m³/hari. Hal tersebut memerlukan penanganan yang serius, karena sampah dapat menimbulkan dampak negatif lainnya yang tidak diinginkan. Penanganan sampah di Provinsi Bali menunjukkan angka 75 persen pada tahun 2016. Meskipun menunjukkan peningkatan, namun penanganan sampah selama kurun waktu 2014 sampai 2016 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 76 persen pada tahun 2016.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung berbagai upaya dalam rangka menanggulangi perubahan iklim. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri, dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan menjadi penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional di bawah baseline emisi GRK tahun 2030.

Salah satu indikator utama yang digunakan dalam PRK adalah Intensitas Emisi. Intensitas Emisi (IE) didefinisikan sebagai jumlah emisi Gas Rumah Kaca (CO₂e) per satuan output ekonomi (miliar rupiah PDB). Perilaku Intensitas Emisi dalam kurun waktu tertentu dapat menggambarkan relasi kecepatan peningkatan emisi terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan

ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada trade-off kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menurunkan emisi gas dan intensitas emisi rumah kaca dinyatakan melalui Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon tahun 2020. Berdasarkan RPRKD, Provinsi Bali menargetkan penurunan emisi sebesar 10,16% dari kondisi tanpa aksi (*Business as Usual*) pada Tahun 2021, yang akan dicapai melalui kegiatan pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, pengelolaan limbah domestik dan kelautan dan pesisir.

Pada sektor lahan, kegiatan pembangunan rendah karbon adalah rehabilitasi lahan, pertanian organik. Pada sektor energi, kegiatan pembangunan rendah karbon yang dilakukan adalah pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta efisiensi dan konservasi energi. Pada sektor pengelolaan limbah adalah pengelolaan sampah rumah tangga, sementara untuk sektor kelautan dan pesisir adalah rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

Tabel 4.6 Rumusan Permasalahan Lingkungan Hidup

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya penggunaan energi baru terbarukan	• Belum kompetitifnya biaya produksi • Masih terbatasnya sarana prasana pendukung
Belum optimalnya pelestarian lingkungan	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan limbah • Belum optimalnya sarana prasarana pengolahan limbah • Belum terpenuhinya cakupan ruang terbuka hijau • Masih adanya lahan kritis

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
	• Belum optimalnya penegakan hukum
Belum optimalnya penanganan sampah	• Meningkatnya jumlah penduduk dan wisatawan • Belum efektifnya penanganan sampah melalui 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) • Infrastruktur penanganan sampah yang masih kurang

C. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan “*engine of economic growth*” atau merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong bagi kesejahteraan penduduk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar yang semakin meningkat, seiring dengan percepatan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 2009–2029 bahwa pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada, dimana jaringan prasarana dan sarana dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional, sehingga pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk di kawasan perdesaan sehingga percepatan keseimbangan pembangunan antar wilayah dapat segera terwujud.

Kedepannya untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah, mengurangi waktu tempuh, serta mengurangi kemacetan direncanakan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten/Kota yang tidak terpusat dalam satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik se-Bali dalam jangka panjang

yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan pembangkit listrik adalah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik yang murah untuk Krama Bali dan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk industri, perdagangan, dan komersial serta pariwisata. Di antaranya pembangkit listrik tenaga air (air laut, air terjun, danau), pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

Tabel 4.7 Rumusan Permasalahan Infrastruktur

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya pemerataan infrastruktur antar wilayah, dan antar sektor.	• Pembangunan infrastruktur yang tidak merata antar wilayah dan antar sektor. • Menurunnya kondisi lingkungan sungai, mata air dan danau. • Belum adanya penyediaan lahan perumahan yang cukup, dan sistem sanitasi yang layak. • Peningkatan sampah dan limbah terutama di kawasan perkotaan Sarbagita • Kepadatan kendaraan pribadi menimbulkan kemacetan lalu lintas. • Belum optimalnya pemanfaatan transportasi publik.

D. Stabilitas Keamanan

Pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan banyak terjadi kegiatan bersifat internasional maupun nasional yang dilaksanakan di Bali. Seperti diketahui bahwa keamanan merupakan isu yang sangat sensitif bagi perkembangan pariwisata. Disamping itu masih adanya ancaman teroris yang menuntut untuk selalu waspada dan mengupayakan pencegahan aksi terorisme. Lebih-lebih daerah Bali yang merupakan daerah tujuan wisata terkenal dan sangat banyak dikunjungi wisatawan asing yang menjadi incaran para pelaku teror untuk melakukan aksi terorisme, sehingga keamanan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menjamin kenyamanan para wisatawan dan ketertiban di masyarakat.

Globalisasi melahirkan pemahaman baru tentang keamanan. Bali yang tidak bisa lepas dari pengaruh Globalisasi, dituntut menyesuaikan dengan pemahaman baru itu. Keamanan saat ini dan kedepan adalah keamanan yang komprehensif (*comprehensive security*), yang menyentuh seluruh aspek kehidupan menuju *human security*. Kebutuhan akan hal ini akan menjadi tuntutan dunia internasional terhadap Bali, dan menjadi tuntutan dunia pariwisata.

Tuntutan ini berkaitan dengan perkembangan ancaman yang tidak hanya sekedar ancaman tradisional (*traditional threat*), yaitu ancaman militer, namun telah berubah menjadi ancaman non-tradisional (*non traditional threat*), yaitu ancaman nir militer atau ancaman yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia.

Ancaman itu dapat berupa kejahatan transnasional terorganisasi, konflik berdasar identitas, terorisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat transnasional dan dipacu oleh frustrasi akibat perasaan-perasaan kesenjangan ekonomi, ketidak-adilan, “*xenophobia*”, ketidakamanan akibat globalisasi, imigran gelap, separasi politik, tuntutan solidaritas agama, yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatik, fundamentalis, dan kelompok radikal.

Disisi lain sistem peringatan dini merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut dengan tindakan cepat dan tepat dalam mengurangi risiko terkena bencana. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali yang baru berdiri hanya memiliki sistem peringatan dini yang jumlahnya belum banyak.

Bencana alam belakangan ini sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, gempa bumi, puting beliung, erupsi gunung berapi, arus laut dan gelombang tinggi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selain itu provinsi Bali juga rawan untuk terjadinya tsunami. Pada tahun 2016, kejadian bencana yang jumlahnya diatas 100 kejadian yaitu pohon tumbang dengan 426 kejadian, kebakaran sebesar 345 kejadian, dan tanah longsong sebanyak 176 kejadian. Di masa yang akan datang, perubahan iklim akan mempengaruhi terjadinya

bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selain bencana alam pada tahun 2020 terjadi bencana non alam biologis COVID-19 yang menyebabkan dampak yang sangat luar biasa baik pada sisi kesehatan masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi. Sampai saat ini sudah tercatat ada sebanyak 1,2 Juta kasus aktif COVID-19 dan sebanyak 1 juta orang sembuh dan 34 ribu dinyatakan meninggal. Perkembangan kasus covid yang belum menunjukkan tendensi untuk menurun menjadi ancaman besar dan isu yang harus segera ditangani karena mempengaruhi semua sektor kehidupan di Indonesia. Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata dunia berdampak luar biasa karena hampir 80% sektor ekonomi berasal dari pariwisata.

Tabel 4.8 Rumusan Permasalahan Keamanan dan kebencanaan

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya stabilitas keamanan	• Kesenjangan ekonomi, sosial dan pengaruh paham radikalisme,
Belum optimalnya penanganan bencana	• Sistem peringatan dini dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas • Kondisi alam Bali yang berada di kawasan jalur gempa Trans Himalaya dan deretan gunung berapi sangat rentan dengan bencana (tsunami serta bencana alam lainnya) diperlukan standar pembangunan perumahan agar terhindar dari bencana dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana yang handal;
Penanggulan bencana biologis COVID-19	• Belum terputusnya mata rantai COVID-19 yang menyebabkan peningkatan kasus aktif

E. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan pembenahan terkait dengan birokrasi dan layanan umum. Meskipun sudah mulai ada perubahan, namun masih perlu dioptimalkan. Perlu adanya

pengembangan ASN agar kualitas ASN dalam menjalankan tugas dapat lebih optimal. Berdasarkan data, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal menunjukkan 28,02 persen pada tahun 2021. Hal ini diharapkan mampu menjawab pengembangan kemampuan, jenjang karir dan etos kerja ASN.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2019-2023 sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023. Road Map menjadi acuan/pedoman selama 5 tahun bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan Reformasi Birokrasi dimana sudah mencakup 8 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, Ketatalaksanaan, Manajemen SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik. Disamping itu road map juga mencakup tentang *quick win*.

Tabel 4.9 Rumusan Permasalahan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kualitas ASN	Belum optimalnya sistem rekrutmen, pengembangan kemampuan, jenjang karir dan etos kerja ASN.
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik

4.2 Isu Global

4.2.1. Permasalahan Global Pandemi COVID-19

Global Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 di China telah melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai penjuru dunia tanpa kecuali. Akibatnya perekonomian global secara keseluruhan pada tahun 2020 anjlok pada tingkat terendah. Pada bulan Mei 2021, tanda-tanda positif pemulihan ekonomi global mengalami momentum penguatan, namun lonjakan kasus COVID-19 di India akibat varian

delta yang begitu dramatis dan menjalar ke berbagai belahan dunia tetap menimbulkan bayangan ketidakpastian dan risiko pelemahan ekonomi global datang kembali. Saat ini, pasar keuangan global cenderung stabil, yang terlihat dari turunnya indeks volatilitas di pasar saham dan pasar obligasi global. Aliran modal ke negara berkembang terus menunjukkan tren positif. Sementara itu di sektor riil, indikator *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur global di bulan Oktober 2021 mencapai 57,2. Ini merupakan angka tertinggi sejak sepuluh tahun terakhir. Di samping itu, harga komoditas global terus menunjukkan tren kenaikan bahkan lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Namun harus diwaspadai bahwa ketidakpastian tetap membayangi harga komoditas dalam jangka menengah.

Beberapa lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 5,6–5,9% di tahun 2021 didukung oleh low base-effect akibat kontraksi ekonomi di tahun 2020.⁷ Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menuju trayektori normalnya di kisaran 4,4%. Proyeksi ini sangat tergantung pada kemampuan dunia mengendalikan COVID-19 dan keberhasilan dari vaksinasi global. Sejalan dengan membaiknya perekonomian global dan terkendalinya wabah COVID-19, maka diharapkan pariwisata dunia akan pulih, namun akan lebih lambat. *The United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) melaporkan kunjungan wisatawan internasional dunia mengalami penurunan sebesar 40,34% pada Januari-Juli 2021 dibandingkan periode yang sama tahun 2020, atau turun sebesar 80,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2019, karena pembatasan perjalanan tetap tinggi akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan wilayah, Asia dan Pasifik terus mengalami penurunan terbesar dengan penurunan kedatangan internasional sebesar 95,27% dalam tujuh bulan pertama tahun 2021 dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Turunnya jumlah wisatawan Internasional berdampak pada penurunan pendapatan, dimana nilai pendapatan pariwisata internasional mengalami penurunan sebesar 64% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Seiring dengan peluncuran program vaksinasi, diharapkan aktivitas pariwisata global dapat dimulai kembali dengan lebih aman. Hal tersebut sangat bergantung pada koordinasi dengan berbagai negara dalam kebijakan

pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan untuk membantu memulihkan kepercayaan wisatawan. Dalam masa pemulihan dan dalam jangka lebih panjang, maka persaingan antar negara, antar daerah tujuan wisata, akan menjadi sangat ketat. Jumlah wisatawan yang akan bepergian dalam jangka pendek belum tentu akan kembali seperti sebelum pandemi COVID-19, karena pendapatan yang belum sepenuhnya pulih dan masih terdapat kekhawatiran untuk bepergian. Dari sisi penawaran (*supply side*) berbagai daerah tujuan wisata dunia akan berlomba-lomba promosi memberikan tarif yang murah dan kemudahan. Setelah pandemi COVID-19 pariwisata dunia mengarah kepada pariwisata yang menyesuaikan diri dengan situasi normal baru (*New Normal*). Mega trends pariwisata dunia adalah (i) *staycation*, yaitu kegiatan dan hubungan interaktif yang nyaman seperti di rumah (*homy*); (ii) destinasi jarak pendek/dekat; (iii) destinasi yang aman, bersih, sehat dan *secure*; (iv) destinasi yang ketat menjalankan protokol baru dan higienis; (v) pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab; (vi) destinasi yang menonjolkan kearifan lokal dan literasi masa lalu; (vii) destinasi yang menampilkan pengembangan produk yang menciptakan nilai-nilai otentik; (viii) destinasi yang didukung ekosistem digital, serta pariwisata dengan ceruk pasar terbatas (*niche market*); (ix) pariwisata pendidikan; (x) penyembuhan (*medical/healing*) dan kebugaran (*wellness*); serta (xi) pariwisata berwawasan lingkungan (*ecotourism*).

4.2.2 Gejolak Perekonomian Global

Penyebaran COVID-19 kembali meningkat didorong merebaknya varian Delta. Kasus harian COVID-19 sempat menunjukkan penurunan pada awal tahun 2021, di tengah munculnya varian Alpha pada akhir tahun 2020. Akselerasi vaksinasi di negara maju pada tahun 2021 berdampak positif pada penurunan penyebaran COVID-19, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Penyebaran di Asia mencapai puncaknya pada awal Mei, sedikit menurun pada Juni tetapi meningkat kembali pada Agustus 2021. Penduduk di *Emerging Markets and Developing Economies* (EMDEs), Asia yang memiliki tingkat vaksinasi rendah menjadi sasaran penyebaran varian Delta, antara lain di Indonesia, Malaysia, Thailand,

Vietnam, Filipina dan banyak negara lain. Di AS dan di Eropa, penyebaran varian Delta mencapai puncaknya pada Agustus 2021 tetapi tetap pada level yang tinggi hingga akhir tahun 2021. Sejak awal hingga pertengahan Maret 2022, kasus pandemi COVID-19 di tingkat global kembali sedikit meningkat, khususnya di beberapa negara Asia Timur. Kasus harian COVID-19 global pada 18 Maret tercatat sebesar 1,81 juta (1,7 juta – 7 days moving average). Gelombang Omicron sudah mereda namun kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya varian baru harus tetap dijaga. Peningkatan kasus di tingkat global ini didorong oleh penyebaran BA.2 (subvarian Omicron) yang menyebabkan lonjakan kasus di beberapa negara, seperti di kawasan Eropa, Korea Selatan, dan Vietnam.

Perbaikan ekonomi global tertahan seiring dengan peningkatan penyebaran COVID-19 varian Delta. Kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah penyebaran varian Delta lebih lanjut tidak terelakkan berdampak pada tertahannya aktivitas ekonomi. Besaran dampak kepada individu negara cukup bervariasi tergantung pada tingkat vaksinasi serta persepsi konsumen atas kekhawatiran gelombang lanjutan COVID-19. Dalam perkembangannya, seiring dengan menurunnya kasus varian Delta dan meningkatnya kembali mobilitas manusia, aktivitas ekonomi kemudian berangsur-angsur membaik di akhir 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, perbaikan ekonomi global terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pemulihan ekonomi di *Advanced Economies* (AEs), khususnya AS berjalan lebih cepat, didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang sangat besar. Di sisi lain, sebagian besar EMDEs, kecuali Tiongkok, masih harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negerinya, menuju pemulihan ekonomi. Di samping pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter juga menyebabkan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi di sebagian besar EMDEs. Secara keseluruhan, ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sekitar 5,7% pada tahun 2021 dan 4,4% pada tahun 2022, setelah kontraksi 3,1% pada tahun 2020. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus

berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran COVID-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering the Fed*, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi. Selain itu, kenaikan penyebaran varian Omicron yang berdampak pada peningkatan ketidakpastian, perlu terus dicermati dan diwaspadai. Sejumlah langkah koordinasi kebijakan internasional ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Sejumlah agenda penting mengemuka di forum-forum G20, *International Monetary Fund* (IMF), *Financial Stability Board* (FSB), *Bank for International Settlements* (BIS), maupun lainnya, terutama mengenai perluasan pasokan dan distribusi vaksin dari AEs ke EMDEs, penahapan dan kejelasan komunikasi dalam *exit policy*, langkah-langkah bersama mengatasi gangguan dalam mata rantai pasokan global, kelangkaan energi, dan *scarring effect*, serta kerja sama internasional dalam mengakselerasi digitalisasi dan ekonomi-keuangan hijau. Selaras dengan hal tersebut, agenda Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 akan terus mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berimbang, dengan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Perang antara Rusia dan Ukraina juga berimbas kepada perekonomian dunia. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 3,6% dari proyeksi sebelumnya 4,4% di awal 2022. Tidak hanya IMF, Bank Dunia (World Bank) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,1% menjadi 3,2% akibat perang Rusia-Ukraina, serta inflasi sebagai pemicunya. Menurut IMF, penurunan double-digit pada PDB Ukraina dan kontraksi pada ekonomi Rusia akan menciptakan efek domino terhadap seluruh negara di dunia. Bahan bakar dan harga pangan akan naik dengan cepat. Ini akan berdampak pada masyarakat kurang mampu di negara-negara dengan pendapatan rendah. Kenaikan laju inflasi akan memperumit tujuan bank sentral antara menahan tekanan harga dan melindungi pertumbuhan. Ketika negara maju

mengerek tingkat suku bunganya, IMF mengingatkan bahwa negara berkembang dan emerging market akan terbebani.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di mayoritas negara Asia pada tahun 2022 terpengkas karena konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia, lebih lambat dibanding yang sebelumnya diproyeksikan. Dimana Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada tahun 2022, lebih rendah 0,1 poin dari proyeksi yang dirilis pada bulan Oktober 2021. Ketika ekonomi Asia Timur dan Pasifik sedang memulihkan diri dari guncangan akibat pandemi, perang di Ukraina membebani momentum pertumbuhan. Fundamental dan kebijakan yang sebagian besar kuat dari kawasan ini akan membantunya mengatasi badai ini. Secara keseluruhan, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik sebesar 0,4 poin menjadi 5% untuk tahun 2022.

4.2.3 Sustainable Development Goals (SDG's)

Pencapaian tujuan pembangunan milenium yang berkelanjutan merupakan isu penting dalam peningkatan martabat kemanusiaan secara bersama sama. Isu ini meliputi beberapa tujuan pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi perbaikan lingkungan hidup. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dideklarasikan pada akhir tahun 2015, berorientasi pada peningkatan martabat dan kualitas hidup manusia melalui : (1) Perubahan konsep dan fokus isu yang mendasar secara signifikan terhadap isu-isu permasalahan lingkungan.; (2) Perkembangan pembangunan menjadi siklus yaitu *Economic Development-Population Development-Environment Development*.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki 6 aspek yang perlu dicapai dalam dunia global antara lain: *thriving lives and livelihoods* (kehidupan yang sehat dan layak), *sustainable food security* (keamanan dan ketahanan pangan), *secure sustainable water* (sumber air bersih), *universal clean energy* (energi yang aman), *healthy and productive ecosystems* (ekosistem yang produktif dan sehat),

governance for sustainable Societies (kebijakan yang berpihak terhadap komunitas). Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi

lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

- 16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan SDGs diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Provinsi Bali pada khususnya.

Berbeda dengan MDGs, metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut partisipasi warga. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda MDGs. Indonesia sangat serius dalam upaya mencapai indikator-indikator SDGs. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi

dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia kedepannya. Pelaksanaan SDG's berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDG's tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDG's di Indonesia.

Provinsi Bali, di tahun 2019 telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (RAD TBB/SDGs) Tahun 2019-2023 menjadikan pencapaian tujuan SDG's sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab seluruh unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat. Beberapa indikator masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah guna mendukung Pencapaian RAD SDG's Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah merampungkan penyusunan Rencana RAD-TPB dengan ditunjang oleh Kabupaten/Kota.

4.2.4 Lingkungan Hidup

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

Perlindungan lapisan ozon dan perubahan iklim (*Protocol Kyoto*), keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), polusi dari kapal, dan

perlindungan kehidupan laut.

Berdasarkan *Copenhagen Accord*, catatan yang dihasilkan dari rangkaian pembahasan 26 negara termasuk Indonesia, mengenai perubahan iklim dalam Conference of the Parties (COP) ke-15 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Copenhagen, Denmark, telah disepakati bahwa upaya mitigasi global (*global coherent mitigation actions*) secara sukarela/tidak mengikat dibutuhkan untuk membatasi peningkatan suhu global. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penurunan emisi GRK oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

Isu internasional tentang lingkungan hidup adalah perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim.

Berbagai kerusakan lingkungan yang dirasakan saat ini ternyata memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masa kini, lalu kemudian muncul keinginan untuk memperbaiki. Hal ini terjadi silih berganti sesuai dengan zamannya yang merupakan siklus hidup dari masa ke masa, dari zaman ke zaman dan dari peradaban ke peradaban. Kondisi memasuki peralihan dari fase buruknya dukungan lingkungan terhadap kehidupan menjadi fase positif terhadap lingkungan. Sekarang ini umumnya manusia telah menyadari pentingnya alam untuk kelangsungan hidup. Perlahan manusia memperbaiki alam yang telah rusak dan mengurangi hal-hal yang merugikan alam. Manusia melakukan upaya penyelamatan hutan dan makhluk hidup lain yang menggantungkan kehidupannya pada alam. Namun, banyak pula manusia yang terus mencemari alam tanpa memikirkan risiko yang ditimbulkan ke depan.

Berbagai upaya membatasi peningkatan suhu global dilakukan untuk penurunan emisi gas rumah kaca oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

Upaya mempertahankan lingkungan hidup agar kondisi lingkungan hidup yang baik dapat dinikmati oleh generasi saat ini hingga generasi mendatang. Oleh karena itu, isu lingkungan hidup menjadi isu utama dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan(SDG's).

4.2.5 Perkembangan Teknologi Informasi

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal. Teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

2.4.6 Ketahanan Pangan

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, bahkan dapat bergejolak secara sosial dan politik apabila ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

Menurut FAO *Agricultural and Development Economics Division* (June 2006) tentang "*Food Security*", ketahanan pangan dimaknai sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan juga merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan dapat dilihat dari kacamata keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko yang dihadapi oleh suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini masih banyak orang lapar. Salah satu ancaman serius dan ditakuti oleh umat manusia di muka bumi ini adalah terjadinya kelangkaan akan kecukupan pangan. Kelangkaan pangan ini telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika.

Tingginya harga pangan menjadi salah satu sebab munculnya gerakan reformasi yang radikal. Beberapa negara di Afrika mengalami persoalan pangan dan berakhir pada ketidakstabilan politik. Adanya dampak sosial yang cukup memprihatinkan dari meroketnya harga pangan dunia menciptakan kerusuhan-kerusuhan horizontal dan sekaligus mengancam stabilitas keamanan negara itu. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin mahal mendorong permintaan akan peningkatan pendapatan demi bertahan dalam situasi ekonomi dan politik yang sulit.

4.2.7 Keterbatasan Energi

Isu internasional energi dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energi dan pengembangan energi baru terbarukan, pertambangan ilegal dan pertambangan berkelanjutan. Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi

minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud sejak tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern, melipat gandakan efisiensi energi dan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga mengagendakan isu energi dan ketahanan pangan disamping isu-isu perekonomian. Para pelaku ekonomi dituntut untuk cerdas memilih komoditi yang akan diproduksi. Jika pilihan-pilihan ekonomi saja menjadi pertimbangan maka konflik kepentingan terjadi. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Isu global diatas akan menjadi konflik-konflik lokal jika tidak diantisipasi.

4.3 Isu Nasional

Krisis ekonomi akibat wabah COVID- 19 telah membuat banyak sektor terimbas di Indonesia. Sebagian besar aktivitas ekonomi harus terhenti dan dunia usaha terpuruk sangat dalam. Akibatnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,1%, jauh lebih rendah dari target pertumbuhan sebelum pandemi yaitu sebesar 5,2 – 5,5%. Ini berarti bahwa secara nominal perekonomian Indonesia kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah atau mengalami “kerugian” kurang lebih sebesar Rp 796 – 829 triliun. Penurunan aktivitas ekonomi dialami mayoritas daerah di Indonesia, termasuk Bali. Pada awalnya pada tahun 2021 diharapkan kondisi ekonomi mulai membaik. Namun, meningkatnya kembali kasus pandemi COVID-19 pada bulan Juli tahun 2021 menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi berjalan lebih lambat dari perkiraan awal.

Berbagai perkembangan indikator, nasional dan global, menggambarkan adanya momentum pemulihan ekonomi yang menguat, namun ancaman COVID-19 masih membayangi kondisi

ketidakpastian yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 masih akan terus dihadapi oleh Indonesia. Kunci utama adalah disiplin masyarakat untuk tetap ketat melaksanakan protokol kesehatan dan mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), sebagai hasil proses vaksinasi yang menyeluruh untuk rakyat Indonesia. Selama pandemi masih berlangsung, tingkat ketidakpastian usaha dan perekonomian masih akan tetap tinggi.

Di sisi lain, dampak COVID-19 ini telah semakin membuka berbagai kelemahan dalam fundamental perekonomian Indonesia, yang harus dipercepat upaya memperbaikinya dengan melakukan redesain transformasi ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Indonesia memiliki masalah struktural terkait dengan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi. Karena permasalahan struktural tersebut, Indonesia melakukan upaya transformasi ekonomi nasional di berbagai sektor dan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat fundamental ekonomi nasional, dan pada akhirnya mencapai visi Indonesia Maju Tahun 2045.

Dalam perspektif waktu jangka panjang, pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi nasional diarahkan agar harmonis dengan kecenderungan dan perkembangan perekonomian global, yaitu pencapaian SDGs, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi digital. Pada periode 2000 hingga sebelum terjadi pandemi, percepatan pertumbuhan ekonomi sebuah negara dipengaruhi oleh keterkaitan negara tersebut dalam jaringan ekonomi global atau dikenal dengan istilah *global value chains* (GVCs). Kini, pemulihan ekonomi global di tengah pandemi dan akibat pengaruh orientasi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, dunia memasuki era baru *green growth*. Meningkatnya kesadaran konsumen negara maju dan kepedulian produsennya terhadap teknologi ramah lingkungan membuat semua negara harus memperhatikan aspek lingkungan dalam proses produksi dan produk akhirnya. Indonesia juga melakukan hal serupa dengan menerapkan prinsip ekonomi ramah

lingkungan atau ekonomi hijau didukung dengan penerapan teknologi digital di berbagai aspek pembangunan.

4.4 Isu Strategis Provinsi Bali

Isu strategis Bali diperlukan sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat *top down* dan juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktivitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu-isu tersebut juga akan menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah. Dari berbagai permasalahan dominan yang dihadapi Provinsi Bali serta mempertimbangan isu strategis nasional dan internasional maka disepakati isu-isu strategis seperti berikut dan selanjutnya disandingkan sesuai dengan Tabel 4.10.

- 1. Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial;
- 2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- 3. Belum optimalnya Pelestarian Kebudayaan Bali;
- 4. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan ancaman perubahan iklim;
- 5. Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur darat, laut dan udara;
- 6. Ancaman keamanan dan kenyamanan;
- 7. Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat

Tabel 4.10 Sandingan Permasalahan Dominan dengan Isu Strategi

Permasalahan Dominan	Isu Strategis
- Kemiskinan, kesenjangan pendapatan, kesenjangan gender, dan pengangguran - Ketahanan pangan - Gejolak perekonomian global	Meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan sosial

Permasalahan Dominan	Isu Strategis
- Rata-rata lama sekolah yang belum mencapai target dan merata - Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - Perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif - Penurunan eksistensi kebudayaan Bali	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Bali
- Belum optimalnya penggunaan energi baru terbarukan - Belum optimalnya pelestarian lingkungan - Belum optimalnya penanganan sampah	Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan serta ancaman perubahan iklim
- Belum optimalnya pemerataan infrastruktur antar wilayah dan antar sektor - Perkembangan Teknologi Informasi	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur darat, laut dan udara
- Belum optimalnya stabilitas keamanan dan kenyamanan krama Bali dan wisatawan - Belum optimalnya penanganan Bencana	Ancaman keamanan dan kenyamanan
- Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kualitas ASN - Belum optimalnya kualitas pelayanan Publik	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama tiga tahun mendatang yaitu tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran maka akan dijabarkan telaah terhadap Dokumen RPJMN 2020-2024 dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 sebagai dasar dalam penentuan tujuan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

5.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran

5.1.1 Telaah Dokumen RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan

Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 9.

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pembangunan SDM Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2) Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3) Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM; 4) Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; 5) Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing

manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah; d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; f. Pengentasan kemiskinan; dan g. Peningkatan produktivitas dan daya saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; c. Moderasi beragama; dan d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui: a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; b. Pembangunan

konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; c. Pembangunan infrastruktur perkotaan; d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan c. Pembangunan Rendah Karbon; 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui: a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

5.1.2 Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah memiliki tahapan dalam penyusunannya, yaitu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, jangka menengah lima tahunan (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun. Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari

secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila 1 Juni 1945. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.

10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik,

dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.

21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPD Provinsi Bali akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Periode terakhir tahun 2020-2025. Arah Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan III, maka Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (*Genuine Bali*), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

Dari telaah RPJMN dan RPJP Provinsi Bali di atas maka selanjutnya dapat dirumuskan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama tiga tahun mendatang sebagai berikut:

Tujuan	1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali
Sasaran	1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali 2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali 3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan 4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok
Tujuan	2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing
Sasaran	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali
Tujuan	3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali
Sasaran	1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat 2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali 3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali
Tujuan	4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas lingkungan 2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih 4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
Tujuan	5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik 2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik

	3.	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tujuan	6.	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan
Sasaran	1.	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
	2.	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
	3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
	4.	Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
Tujuan	7.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran	1.	Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan
	3.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Adapun keterkaitan Misi, Tujuan RPJPD dengan RPD akan diuraikan secara detail dalam Tabel 5.1, sedangkan keterkaitan sasaran RPJMN dengan sasaran RPD secara detai diuraikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.1 Keterkaitan Misi, Tujuan RPJPD dengan RPD

RPJPD				RPD	
No	Misi RPJPD	No	Tujuan RPJPD	No	Tujuan RPD
1	Memastikan Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali	1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali
2	Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani	2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian		
7	Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya	7	Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali		
13	Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar Kab/Kota se-Bali	13	Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas		

RPJPD				RPD	
No	Misi RPJPD	No	Tujuan RPJPD	No	Tujuan RPD
14	Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar Kab/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru	14	Meningkatnya pasar pariwisata Bali		
15	Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif	15	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan		
16	Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kab/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas	16	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali		
17	Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali	17	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali		

RPJPD				RPD	
No	Misi RPJPD	No	Tujuan RPJPD	No	Tujuan RPD
3	Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan	3	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing
4	Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun	4	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas		
5	Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk pasaraman di Desa Pakraman/Desa Adat	5	Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal		
6	Mengembangkan sumber daya manusia yang berdayasaing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali	6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi		

RPJPD				RPD	
No	Misi RPJPD	No	Tujuan RPJPD	No	Tujuan RPD
8	Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan luar negeri	8	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing		
9	Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan luar negeri	9	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan		
10	Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali	10	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	3	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali
11	Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sat Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih	11	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi		

RPJPD				RPD	
No	Misi RPJPD	No	Tujuan RPJPD	No	Tujuan RPD
12	Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan	12	Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi		
21	Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih	21	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim
		22	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah		
18	Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali	18	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi

RPJPD				RPD	
No	Misi RPJPD	No	Tujuan RPJPD	No	Tujuan RPD
19	Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan	19	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	6	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan
20	Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali	20	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali		
22	Mengembangkan sistem tata kelolapemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpaduyang cepat, pasti dan murah	23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
		24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		

Tabel 5.2 Keterkaitan Sasaran RPJMN dengan Sasaran RPD

Sasaran RPJMN	Sasaran RPD
Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	• Meningkatnya perekonomian Krama Bali • Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali • Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok • Meningkatnya kemandirian Desa Adat
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	• Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali • Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan Krama Bali
Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera	Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan Krama Bali
Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali
Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Meningkatnya Daya Saing dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali
Terwujudnya pengentasan kemiskinan	• Meningkatnya perekonomian Krama Bali • Terwujudnya Pemerataan Pendapatan • Menurunnya Pengangguran • Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok
Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali
Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	• Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali • Meningkatnya pengembangan budaya spiritual dikalangan masyarakat Bali

Sasaran RPJMN	Sasaran RPD
	• Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”	• Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali • Meningkatnya pengembangan budaya spiritual dikalangan masyarakat Bali
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	• Terwujudnya ketertiban dan ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial • Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketertiban dan ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial
Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	• Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali • Meningkatnya pengembangan budaya spiritual dikalangan masyarakat Bali
Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Meningkatnya kualitas pendidikan
Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatnya konektivitas transportasi publik
Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Meningkatnya konektivitas transportasi publik
Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Meningkatnya penggunaan energi bersih
Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah • Meningkatnya kualitas lingkungan • Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	• Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

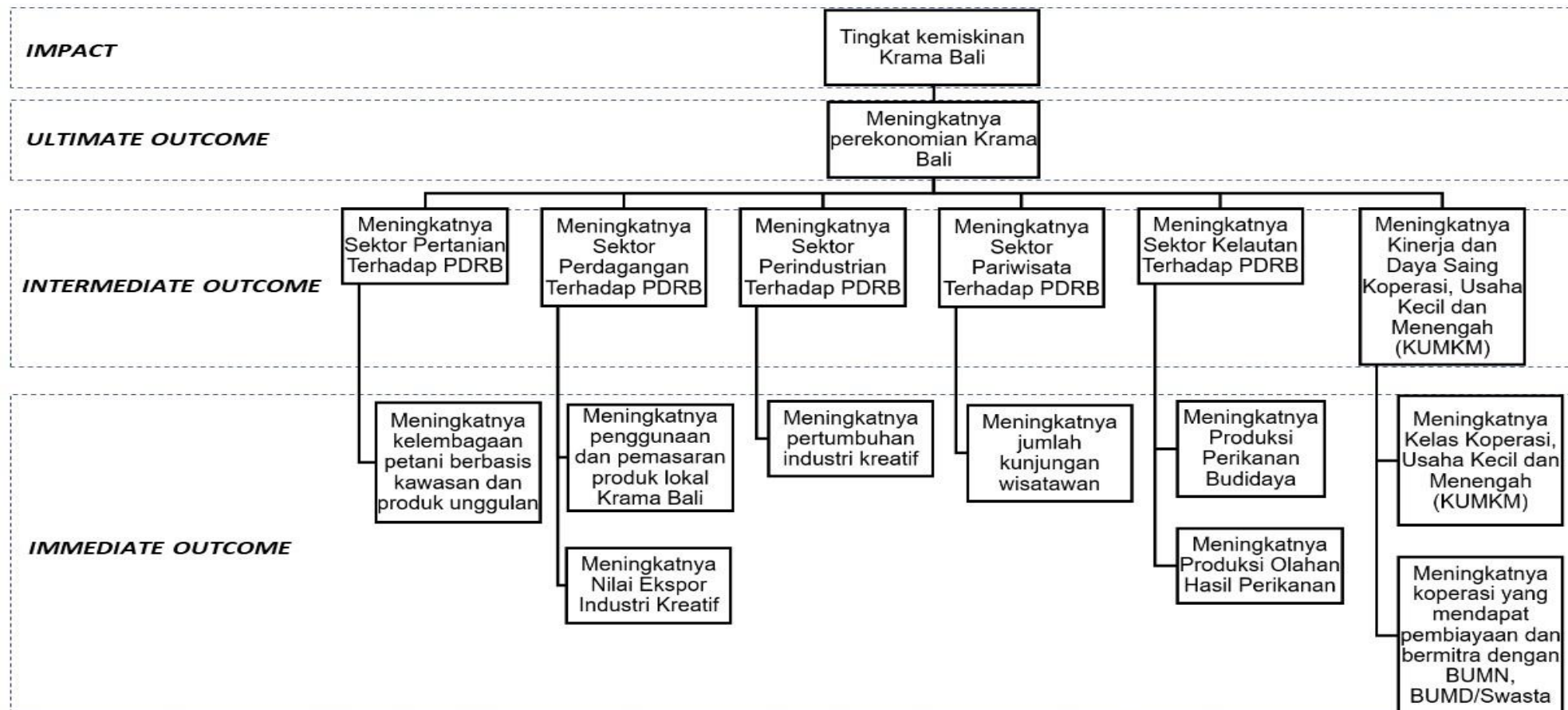
Sasaran RPJMN	Sasaran RPD
	• Meningkatnya pelayanan korban bencana
Pembangunan rendah karbon	Meningkatnya penggunaan energi bersih
Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	• Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN • Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan • Meningkatnya kualitas layanan publik dan inovasi daerah

5.2 Cascading Kinerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas maka diperlukan *cascading* kinerja yang diturunkan sampai ke level hasil (*outcome*). Dari *cascading* kinerja tersebut maka arsitektur kinerja pembangunan daerah akan tergambar dengan jelas, secara detail *Cascading* Kinerja per tujuan disajikan pada Gambar 5.1 sampai dengan Gambar 5.9, sedangkan untuk mengetahui tujuan, sasaran beserta indikator kinerja dan target tahunannya akan ditampilkan pada Tabel 5.3 berikut.

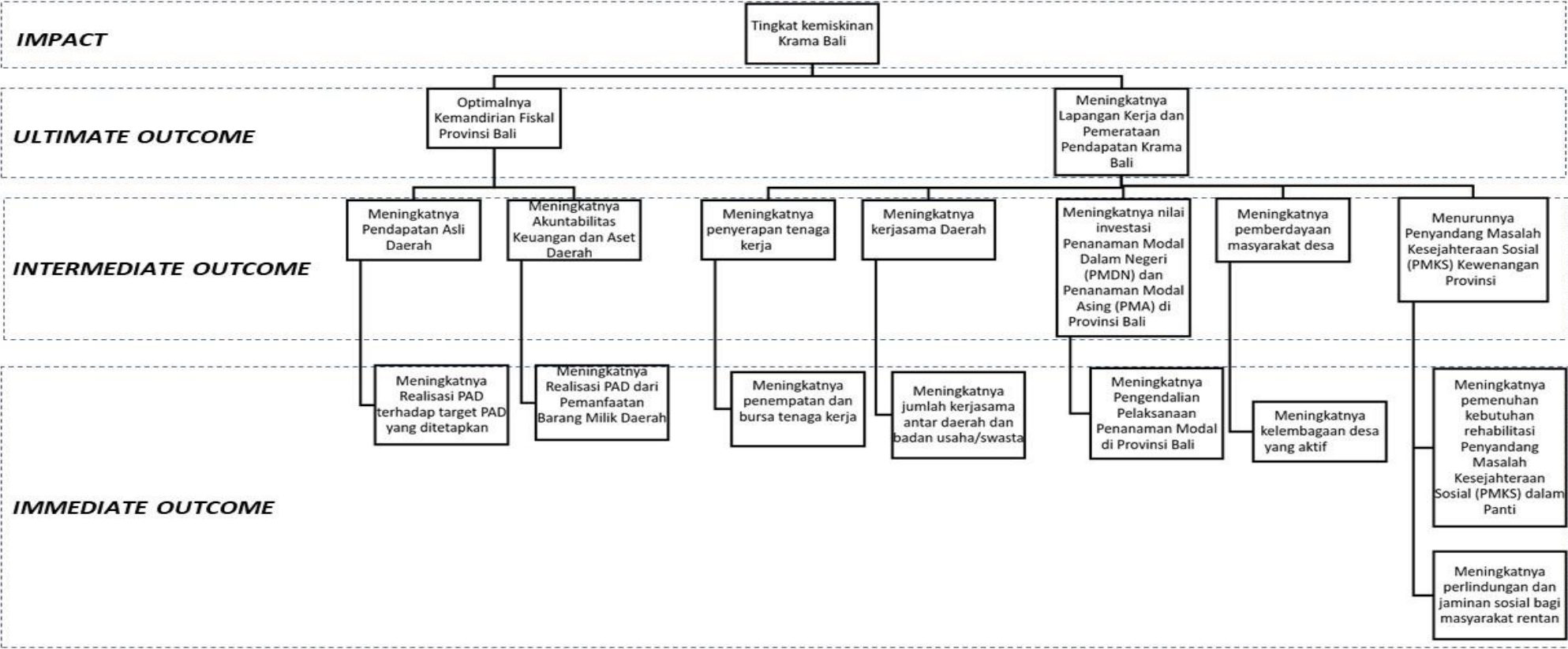
Gambar 5.1 Cascading Kinerja Tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN 1



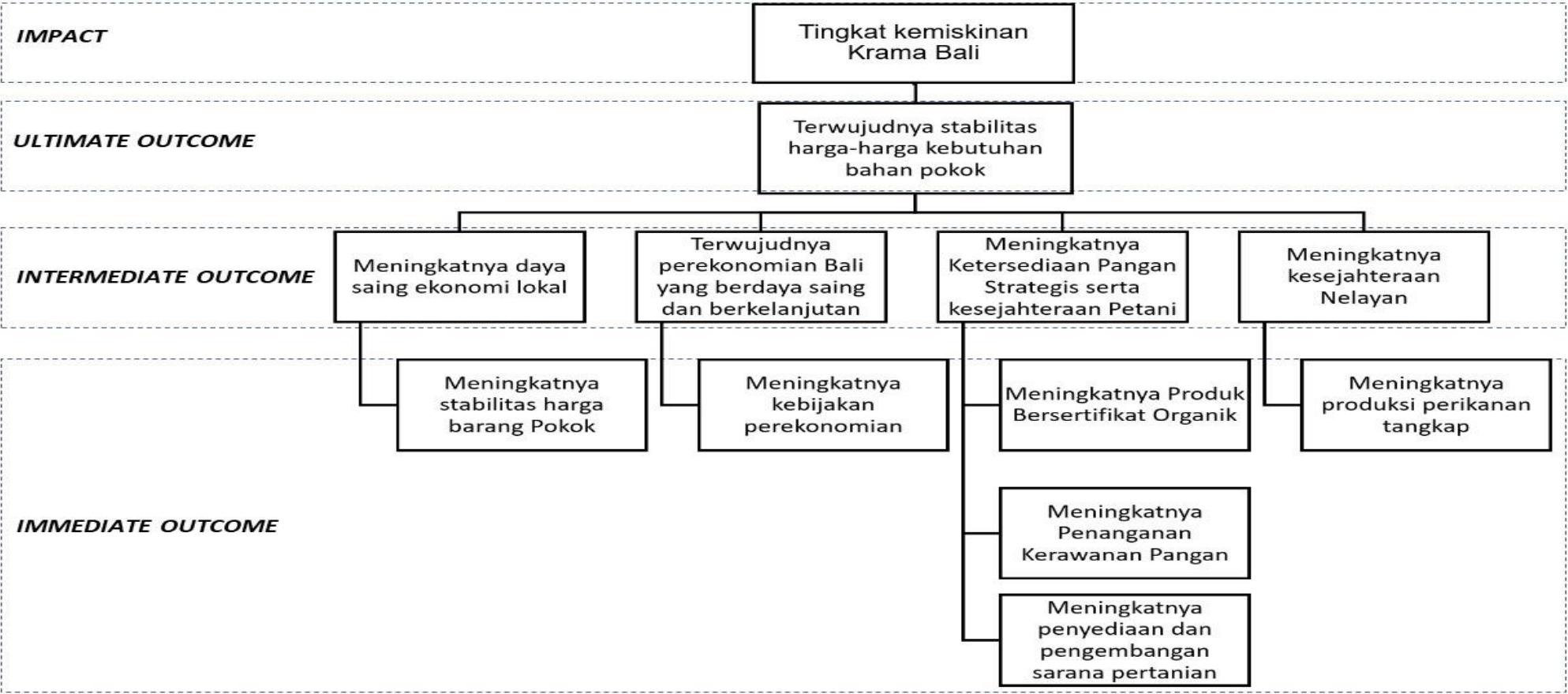
Gambar 5.2 Cascading Kinerja Tujuan 1 (lanjutan) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN 1



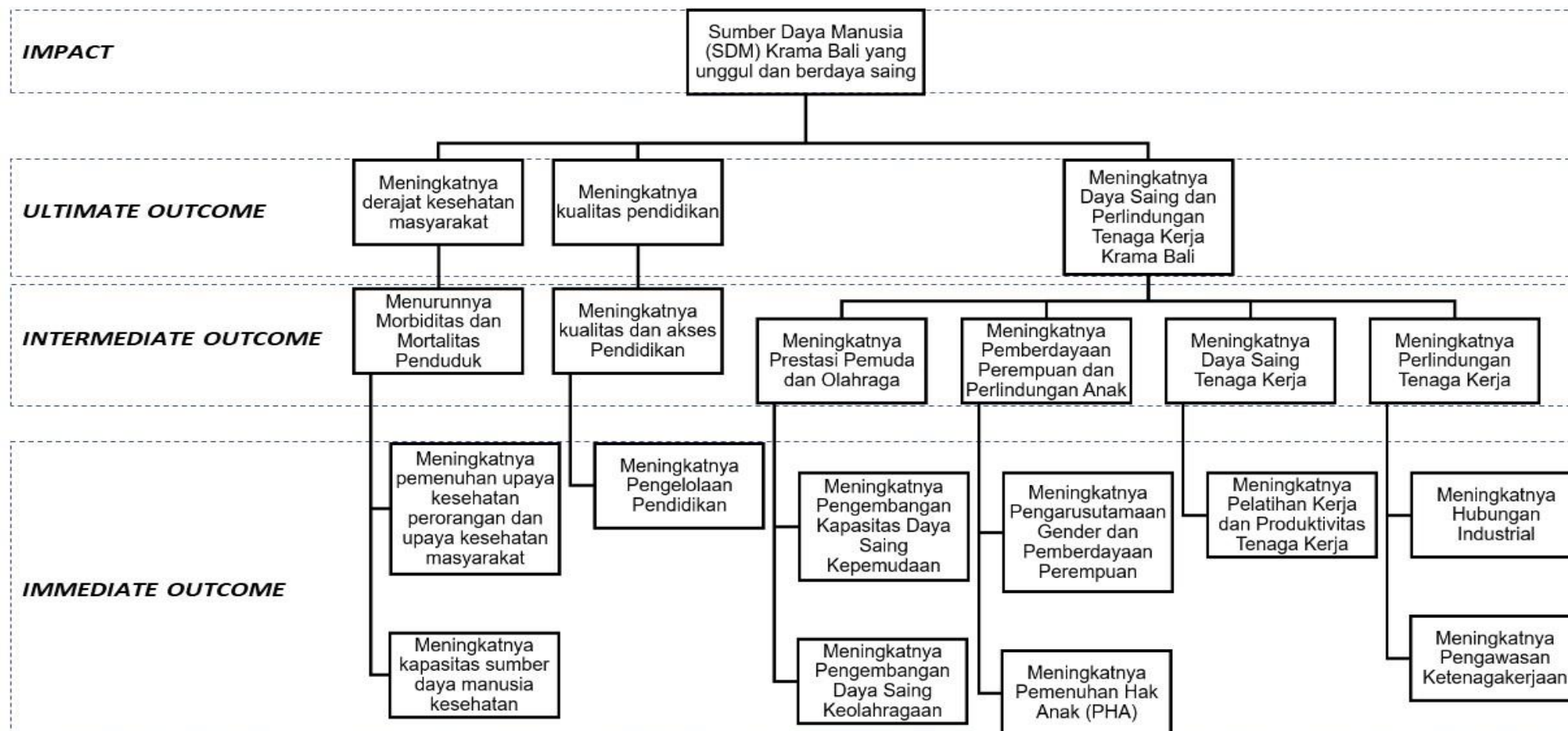
Gambar 5.3 Cascading Kinerja Tujuan 1 (lanjutan) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN 1



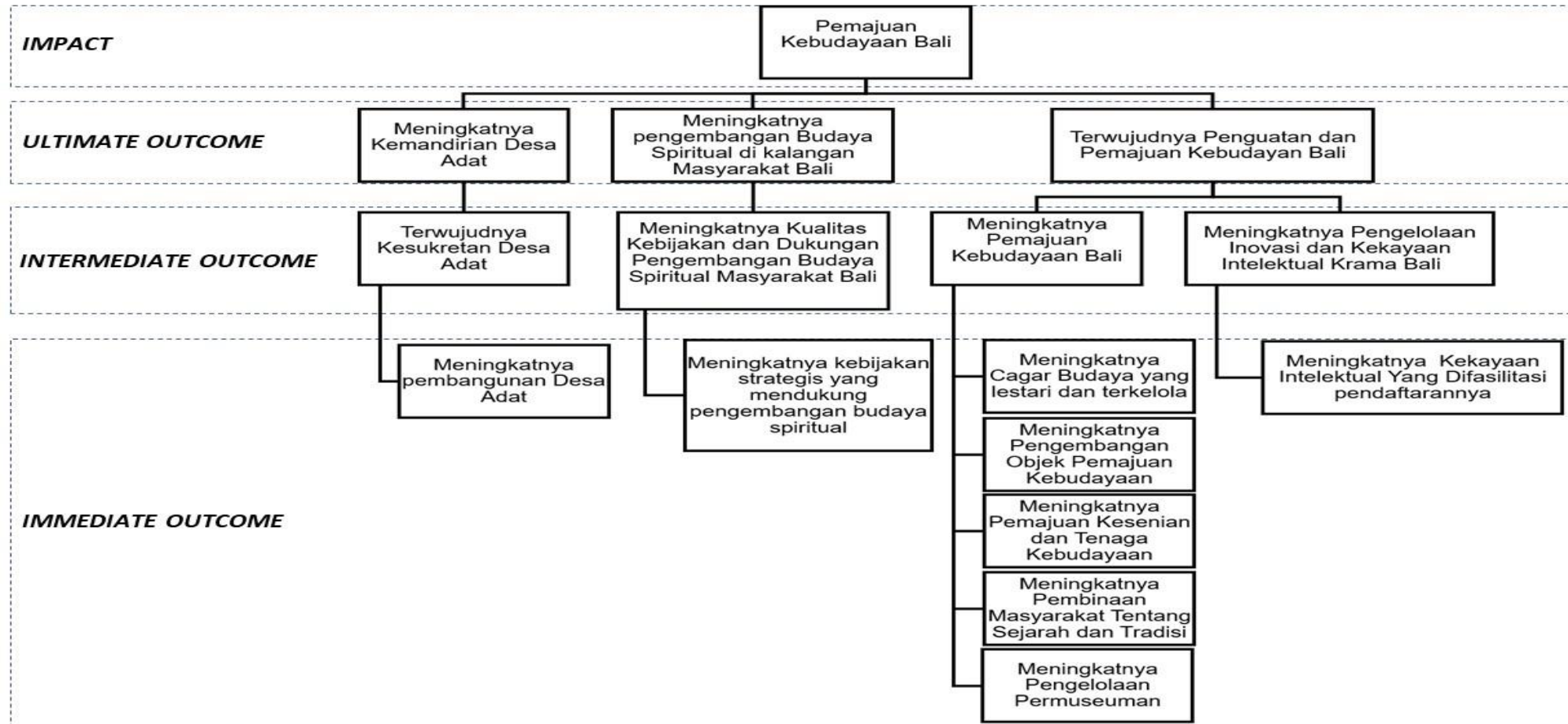
Gambar 5.4 Cascading Kinerja Tujuan 2 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN 2



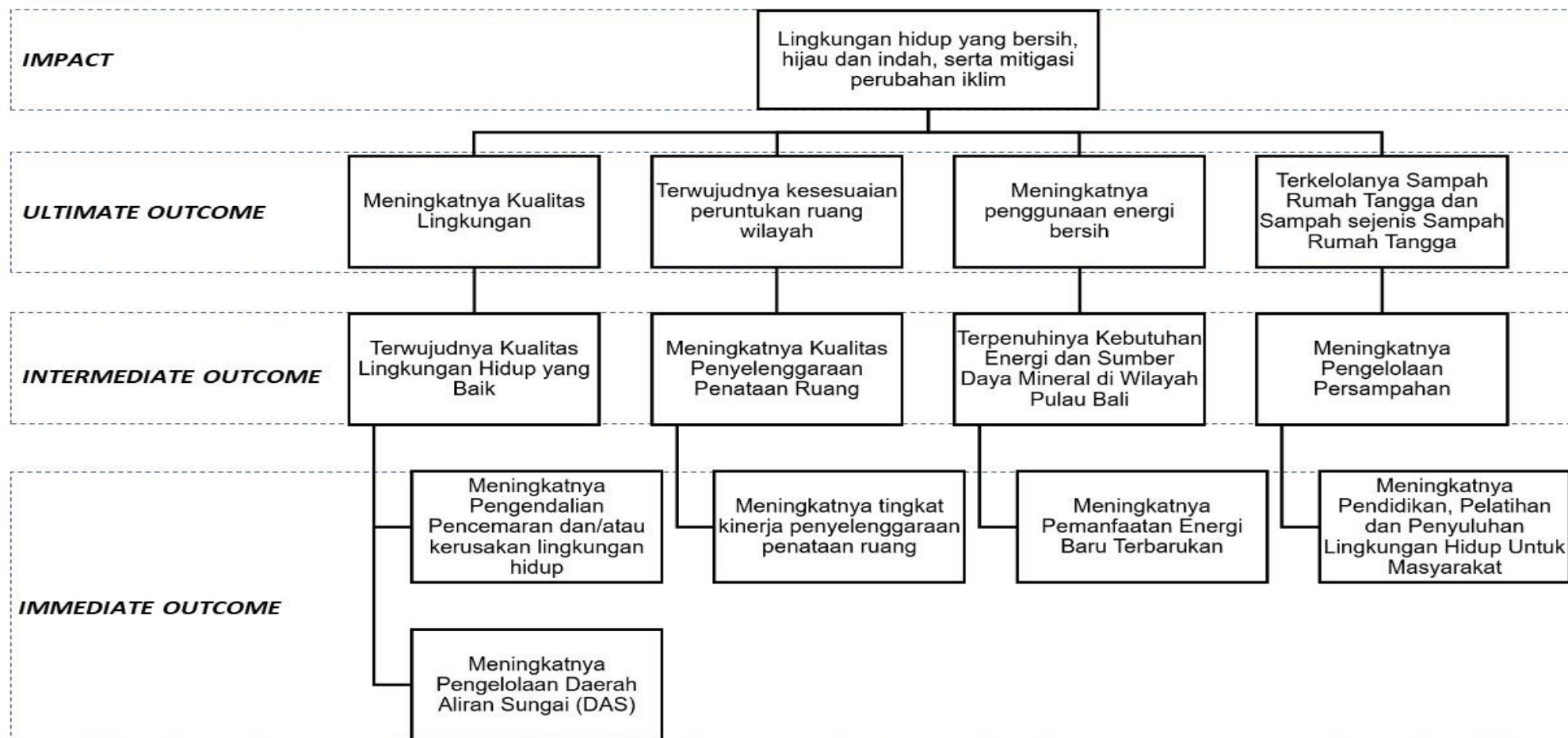
Gambar 5.5 Cascading Kinerja Tujuan 3 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN 3

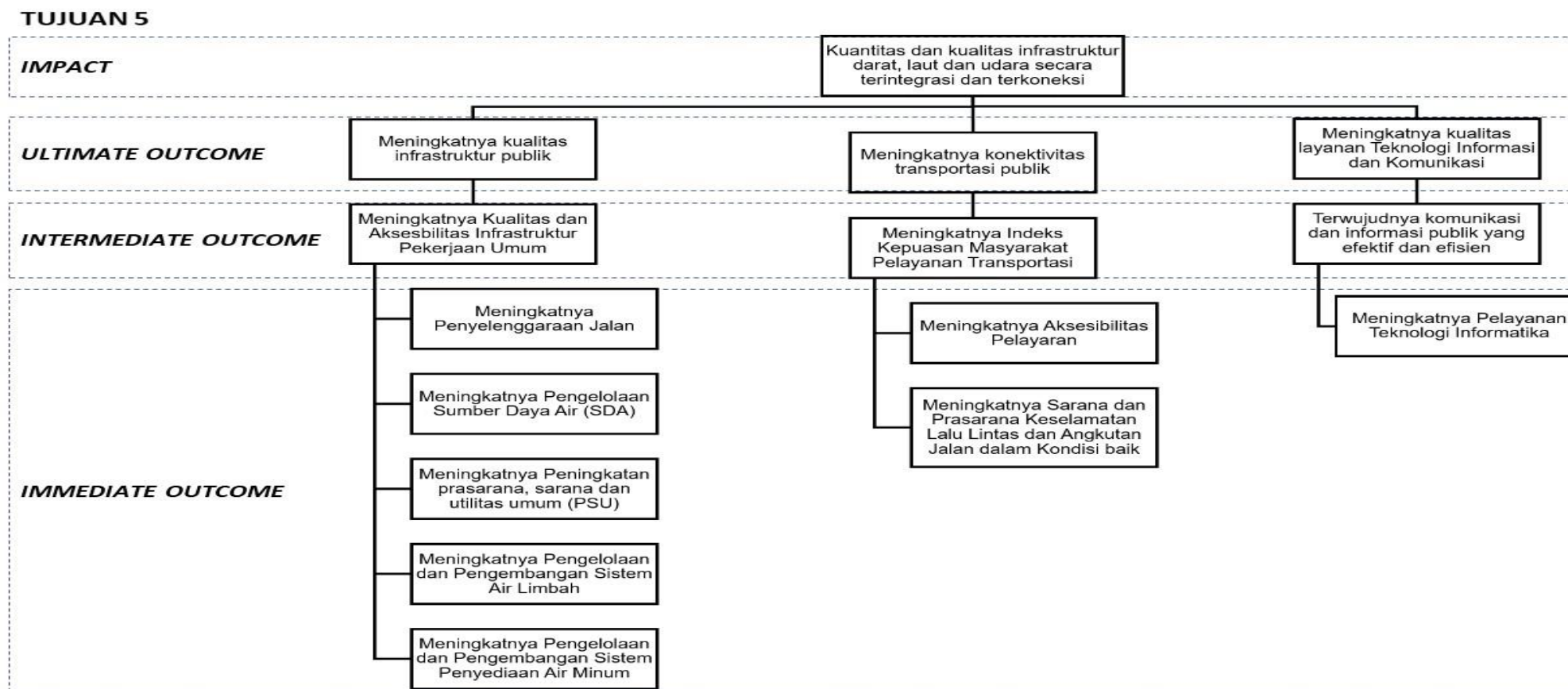


Gambar 5.6 Cascading Kinerja Tujuan 4 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN 4

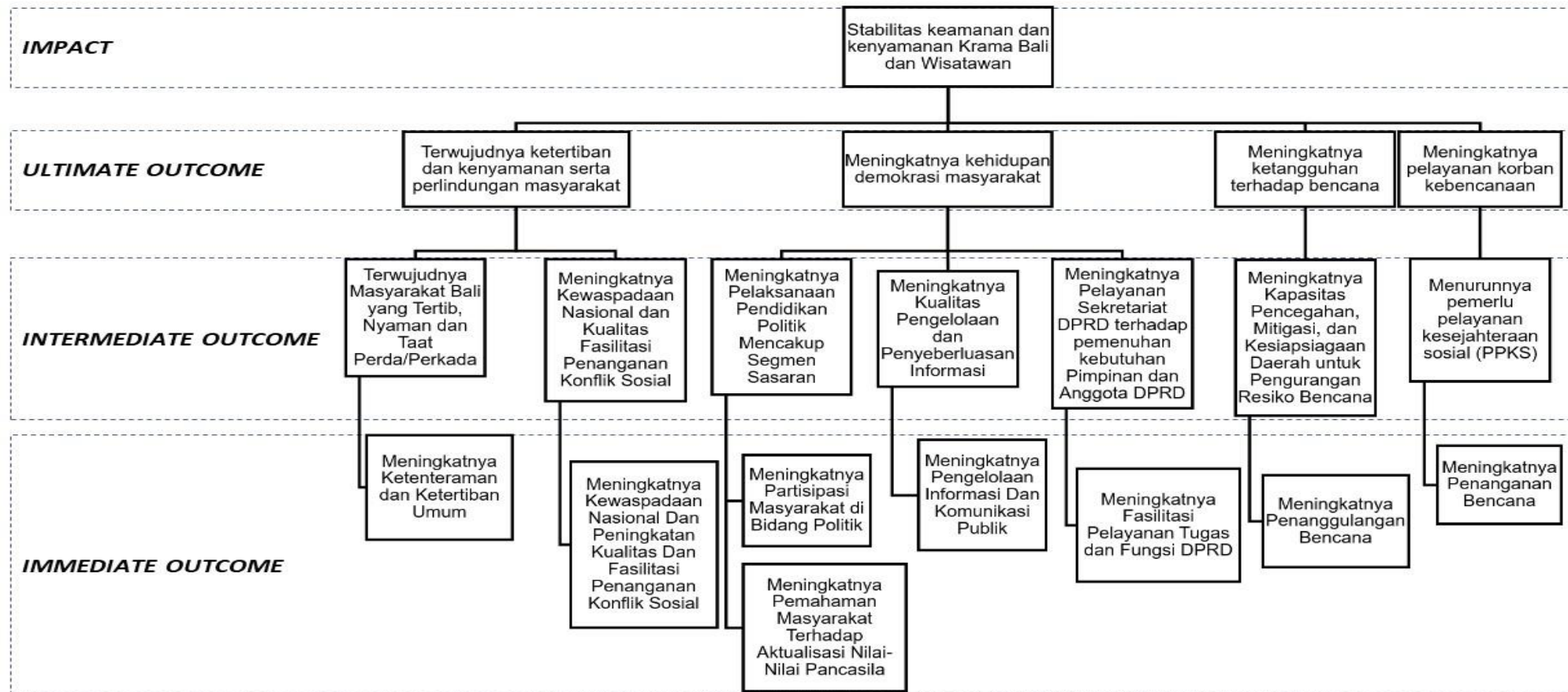


Gambar 5.7 Cascading Kinerja Tujuan 5 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026



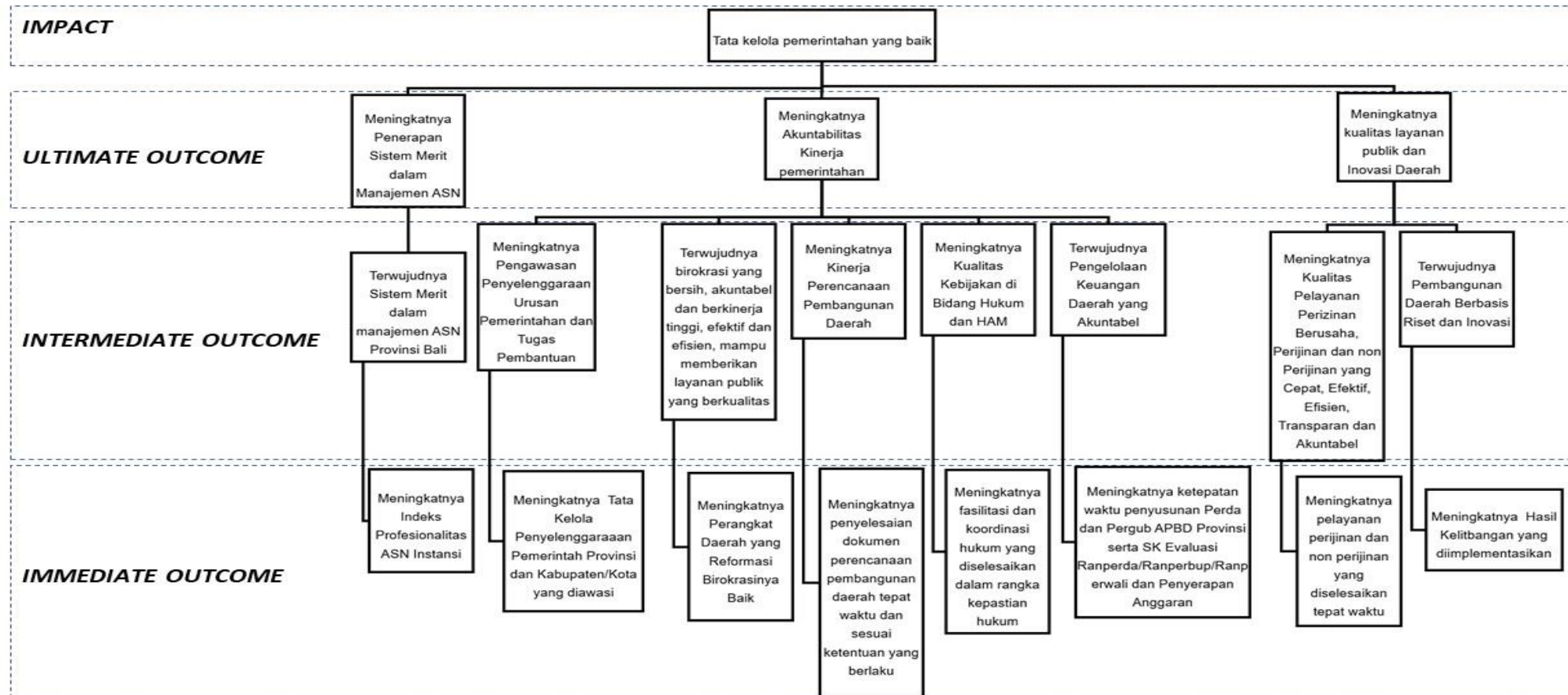
Gambar 5.8 Cascading Kinerja Tujuan 6 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN 6



Gambar 5.9 Cascading Kinerja Tujuan 7 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN 7



Tabel 5.3
Tujuan dan Sasaran Provinsi Bali 2024-2026

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE			KONDISI AKHIR	OPD	
						2024	2025	2026			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan 1	T1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali								
	Indikator Tujuan	:	Angka Kemiskinan		Persen	4,72	4,07	4,06	3,97	3,97	
	Sasaran	S1.1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,47	5,75 (5,25 - 6,25)	5,75 (5,25 - 6,25)	5,85 (5,35-6,35)	5,85 (5,35-6,35)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		S1.2	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	Persentase Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	58,24	60,45	55,33	54,34	55,33	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		S1.3	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali	Angka Pengangguran	Persen	5,37	2,57	2,01	1,41	1,41	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Gini Ratio	Nilai	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	
		S1.4	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	Angka inflasi	Persen	2,07	3±1	3±1	3±1	3±2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro PBJ-Ekonomi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Tujuan 2	T2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Manusia		Nilai	75,69	75,92	76,01	76,01	76,01	
	Sasaran	S2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Nilai	72,24	72,60	72,70	72,80	72,80	Dinas Kesehatan
		S2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,06	9,80	10,00	10,60	10,60	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE			KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
		S2.3	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	Indeks Daya Saing Krama Bali	Nilai	64,45	63,19	64,89	66,45	66,45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
3	Tujuan 3	T3	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali								
	Indikator Tujuan :		Indeks Pembangunan Kebudayaan		Nilai	66,40	67,97	68,47	68,98	68,98	
	Sasaran	S3.1	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	Persentase Desa Adat Mandiri	Persen	N/A	14,06	15,07	16,74	16,74	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
		S3.2	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	Indeks Pemajuan Tradisi	Persen	N/A	15,00	15,00	20,00	20,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		S3.3	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Nilai	N/A	65	66	67	67	Dinas Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Daerah
4	Tujuan 4	T4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim								
	Indikator Tujuan :		Indeks Provinsi Hijau		Nilai	62,73	79,73	80,20	80,72	71,41	
	Sasaran	S4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Nilai	61,51	71,81	71,93	72,04	72,04	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	7,44	12,37	13,26	14,58	14,58	
		S4.2	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	93,00	92,45	94,34	96,24	96,24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		S4.3	Meningkatnya penggunaan energi bersih	Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan	Persen	7,04	7,35	8,6	9,85	9,85	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
		S4.4	Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase pengelolaan sampah	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
5	Tujuan 5	T5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi								
	Indikator Tujuan :		Indeks Infrastruktur		Nilai	N/A	73,75	76,27	78,46	78,46	
	Sasaran	S5.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	72,03	75,11	76,87	78,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		S5.2	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas Transportasi	Nilai	N/A	0,61	0,62	0,63	0,63	Dinas Perhubungan
		S5.3	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	N/A	79,85	82,07	84,28	84,28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE			KONDISI AKHIR	OPD	
						2024	2025	2026			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Tujuan 6	T6	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan								
	Indikator Tujuan	1)	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		Nilai	N/A	70,37	65,06	59,76	59,76	
	Sasaran	S6.1	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan bangsa dan Politik
		S6.2	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	Indeks demokrasi	Nilai	73,35	81,00	81,00	81,00	81,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Sekretariat DPRD
	Indikator Tujuan	2)	Indeks Resiko Bencana		Nilai	124,19	115,10	111,70	108,30	108,34	
	Sasaran	S6.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Persentase Ketangguhan Bencana	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		S6.4	Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan	Persentase pelayanan terhadap korban bencana	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7	Tujuan 7	T7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik								
	Indikator Tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai	71	74,00	75,00	76,00	76	
	Sasaran	S7.1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	Nilai	0,80	0,82	0,83	0,85	0,85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		S7.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai AKIP	Nilai	79	80,50	81,00	81,50	81,5	Inspektorat, Biro Organisasi, Badan Perencanaan
				Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Pembangunan Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		S7.3	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	92,554	88,50	89,00	89,50	89,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Riset dan Inovasi Daerah
				Indeks Inovasi Daerah	Nilai	27,02	65,75	66,75	67,75	67,75	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai tujuan dan sasaran melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2024-2026 tersebut.

6.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI		
Tujuan 1	T1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali			
Indikator Tujuan	:	Angka Kemiskinan			
Sasaran	S1.1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	ST1.1.1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	
			ST1.1.2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	
			ST1.1.3	Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya	
			ST1.1.4	Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi	
	S1.2	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	ST1.2.1	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI	
	S1.3	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali	ST1.3.1	Meningkatkan kerjasama daerah
			ST1.3.2	Meningkatkan investasi daerah
			ST1.3.3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
			ST1.3.4	Menurunkan angka pengangguran terbuka
			ST1.3.5	Meningkatkan kemandirian PMKS
	S1.4	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	ST1.4.1	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya
			ST1.4.2	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian
			ST1.4.3	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan
Tujuan 2	T2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing		
Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Manusia		
Sasaran	S2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	ST2.1.1	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	S2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	ST2.2.1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
	S2.3	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	ST2.3.1	Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
			ST2.3.2	Meningkatkan partisipasi perempuan
			ST2.3.3	Memperkuat sistem perlindungan anak
			ST2.3.4	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi
			ST2.3.5	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
Tujuan 3	T3	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali		
Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Kebudayaan		
Sasaran	S3.1	Meningkatnya kemandirian Desa Adat	ST3.1.1	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat
	S3.2	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	ST3.2.1	Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual
	S3.3	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	ST3.3.1	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali
Tujuan 4	T4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim		
Indikator Tujuan	:	Indeks Provinsi Hijau		
Sasaran	S4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan	ST4.1.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	S4.2	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	ST4.2.1	Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/Pengurangan Resiko Bencana
	S4.3	Meningkatnya penggunaan energi bersih	ST4.3.1	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan
	S4.4	Menurunnya Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	ST4.4.1	Menurunkan Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI		
Tujuan 5	T5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi			
Indikator Tujuan	:	Indeks Infrastruktur			
Sasaran	S5.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	ST5.1.1	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.	
			ST5.1.2	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh	
	S5.2	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	ST5.1.3	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik	
	S5.3	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	ST5.1.4	Meningkatkan fasilitas infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi	
Tujuan 6	T6	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan			
Indikator Tujuan	1)	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat			
Sasaran	S6.1	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	ST6.1.1	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	
	S6.2	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	ST6.2.1	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	
Indikator Tujuan	2)	Indeks resiko bencana			
Sasaran	S6.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	ST6.3.1	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	
	S6.4	Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan	ST6.4.1	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	
Tujuan 7	T7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Indikator Tujuan	:	Indeks RB			
Sasaran	S7.1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	ST7.1	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	
	S7.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	ST7.2	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	S7.3	Meningkatnya kualitas layanan publik dan inovasi daerah	ST7.3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal "Branding Bali" serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi kerthi Bali			
2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	a. Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif			
		b. Meningkatkan SDM Pariwisata dan pemasaran pariwisata			
3	Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya	Mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa serta kemudahan ekspor			
4	Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi	Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi			
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	a. Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah			
		b. Memberikan Insentif dan Disinsentif Pajak			
		c. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah			
6	Meningkatkan kerjasama daerah	Mendorong kerjasama promosi dan pemasaran produk lokal Bali			
7	Meningkatkan investasi daerah	Mendorong kerjasama, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal			
		Memberikan insentif investasi			
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa			
9	Menurunkan angka pengangguran terbuka	Mengupayakan peningkatan akses dan kesempatan kerja			
		Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari kerja			
10	Meningkatkan kemandirian PMKS	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial			

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
11	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya	Mendorong ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah			
		Mendorong kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah			
		Mendorong penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok			
12	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian	Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani			
		mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian			
		Mendorong penguatan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan			
13	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan	Meningkatkan produksi, ketersediaan dan keragaman bahan pangan			
		Mengembangkan aneka olahan pangan yang bergizi aman dikonsumsi			
		meningkatkan akses pangan masyarakat			
		Mendorong pemerataan distribusi bahan pangan yang terjangkau			
14	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan			
		Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan			
		Transformasi bidang kesehatan pada upaya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan serta Upaya Kesehatan Tradisional			

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
15	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan			
		Meningkatkan sarana prasarana pendidikan			
		Mendorong pengembangan pendidikan vokasi			
		Meningkatkan capaian literasi dan numerasi			
16	Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif			
		Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat			
		Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga			
17	Meningkatkan partisipasi perempuan	Meningkatkan pengarusutamaan gender			
		Menurunkan kekerasan terhadap perempuan			
18	Memperkuat sistem perlindungan anak	Meningkatkan kualitas keluarga			
		Meningkatkan sistem data gender dan anak			
		Meningkatkan pemenuhan hak anak			
		Meningkatkan perlindungan khusus anak			
19	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Mendorong peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi			
20	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja			
21	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	Memperkuat Pemerintahan Desa Adat.			
		Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat			
		Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat			
		Memantapkan pembangunan Desa Adat			

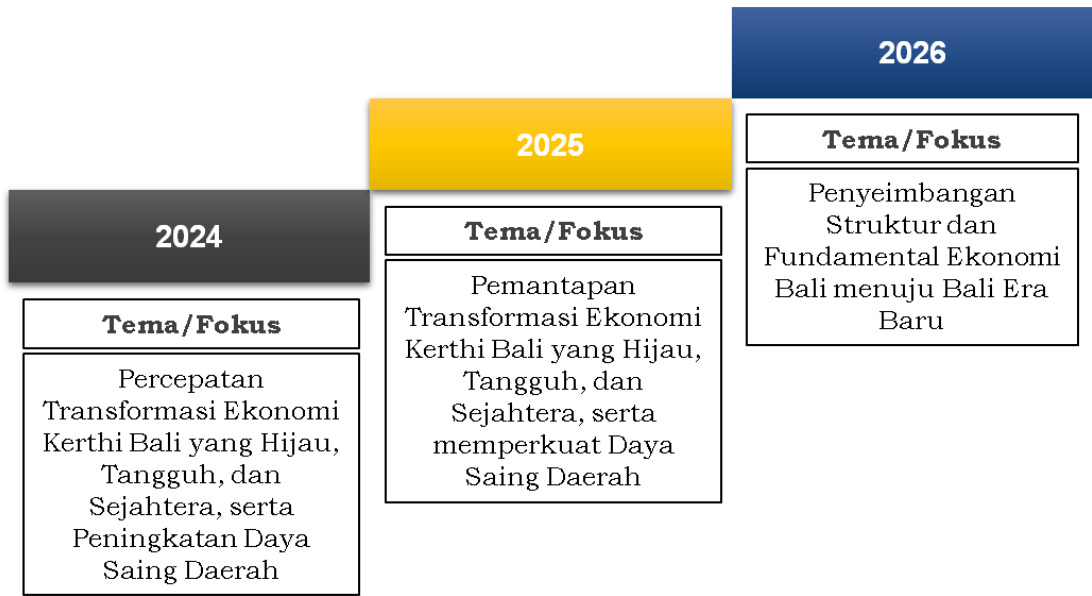
No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
22	Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Pengembangan sarana prasarana Bina Mental Spiritual yang mendukung penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar			
23	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	Memberdayakan lembaga , tenaga dan pranata kebudayaan dalam melestarikan dan membina seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk generasi muda			
		Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah serta Event, atraksi budaya, pameran kesenian, serta kegiatan adat dan budaya			
		Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya Seni, sastra dan budaya			
		Melestarikan cagar budaya			
24	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Krama Bali secara Menyeluruh di setiap sektor pembangunan			
25	Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/ Pengurangan Resiko Bencana	Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal dan mitigasi bencana/ pengurangan resiko bencana			
		Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah			

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
		Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang, Pengawasan Teknis Kinerja TURBINLAK Penyelenggaraan Penataan Ruang serta penguatan regulasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.			
		Meningkatkan penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali			
26	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan	Mendorong pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan			
27	Menurunkan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Mendorong masyarakat/penghasil sampah melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber			
28	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur darat, laut dan udara secara merata			
29	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh			
30	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik	Peningkatan fasilitas/sarana prasarana perhubungan			
31	Meningkatkan fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi	Membangun, peningkatan, dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi			
32	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional			
		Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum			

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
33	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945			
34	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Peningkatan Investasi pengurangan RB			
		Meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam PRB, penanganan darurat dan pemulihan			
		Peningkatan Penanggulangan bencana secara inklusif			
35	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penanganan korban kebencanaan			
36	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Mendorong pelaksanaan merit sistem untuk mewujudkan			
37	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah			
		Meningkatkan sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi			
		Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan			
38	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah			
		Mendorong Implementasi Riset dan Inovasi daerah			

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan RPD yang telah ditetapkan diatas, maka dapat dirancang tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan dalam RPD setiap tahunnya, maka tema pembangunan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.

Gambar 6.1 Tema/Fokus Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026



6.3 Program Prioritas

Program Prioritas Provinsi Bali tahun 2024-2026 difokuskan pada 69 program berikut.

1. Program Penyuluhan Pertanian;
2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program perencanaan dan pembangunan industry;
5. Program Pemasaran pariwisata;
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Program Pengembangan UMKM;
9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ;
10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
11. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Program Penempatan Tenaga Kerja;
13. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
14. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
16. Program Rehabilitasi Sosial ;
17. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

18. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
19. Program Perekonomian dan Pembangunan
20. Program Pengawasan Keamanan Pangan
21. Program Penanganan Kerawanan Pangan
22. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
23. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
24. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
25. Program Pengelolaan Pendidikan
26. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
27. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
28. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
29. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
30. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
31. Program Hubungan Industrial
32. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
33. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
34. Program Kesejahteraan Rakyat
35. Program Pengembangan Kebudayaan
36. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
37. Program Pembinaan Sejarah
38. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
39. Program Pengelolaan Permuseuman
40. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
41. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
42. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
43. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
44. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
45. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
46. Program Penyelenggaraan Jalan
47. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
48. Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

49. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
50. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
51. Program Pengelolaan Pelayaran;
52. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
53. Program pengelolaan Aplikasi Informatika;
54. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
55. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
56. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
57. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
58. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
59. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;
60. Program Penanggulangan Bencana;
61. Program Penanganan Bencana;
62. Program Kepegawaian Daerah;
63. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
64. Program Penataan Organisasi;
65. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
66. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
67. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
68. Program Pelayanan Penanaman Modal;
69. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Secara detail Program Prioritas Daerah tahun 2024-2026 per strategi beserta indikator, target tahunan, dan pagu indikatifnya disajikan pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tujuan 1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali										
	Indikator Tujuan	: Angka Kemiskinan	Persen	4,72	4,07		4,06		3,97		3,97	
	Sasaran											
	S1.1. Meningkatkan perekonomian Krama Bali	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,47	5,75 (5,25 - 6,25)	13.894.332.024	5,75 (5,25 - 6,25)	14.785.574.247	5,85 (5,35-6,35)	15.860.797.769	5,85 (5,35-6,35)	
	Program											
	1. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani berbasis kawasan dan produk unggulan	Persen	20,00	40,00	338.762.336	60,00	372.638.570	80,00	409.902.427	80,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	Persen	30	30	130.000.000	30	140.000.000	30	150.000.000	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3. Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	Persen	58,41	55	2.000.000.000	55	2.000.000.000	55	2.000.000.000	55	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4. Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh	Persen	1,5	1,5	6.078.995.255	1,5	6.115.644.780	1,5	6.152.209.258	1,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5. Program Pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	-24,07	12,50	634.571.491	16,67	698.028.640	19,05	767.831.504	19,05	Dinas Pariwisata
	6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	N/A	2	3.580.493.026	2	4.296.591.631	2	5.155.909.957	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
	7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produksi olahan hasil perikanan	Persen	N/A	2	328.509.916	2	343.610.626	2	389.503.423	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
	8. Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	Persen	N/A	3	335.000.000	3	341.700.000	3	348.534.000	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Persen	3,08	3,20	468.000.000	3,30	477.360.000	3,35	486.907.200	3,35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sasaran											
	S1.2. Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	Persentase Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	58,24	60,45	7.235.062.500	55,33	7.562.795.625	54,34	7.906.825.406	55,33	
	Program											
	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD yang ditetapkan	Persen	98,79	100	716.400.000	100	718.200.000	100	720.000.000	100	Badan Pendapatan Daerah
	2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persen	100	100	1.284.123.149	100	1.348.329.306	100	1.415.745.772	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persen	N/A	43	5.234.539.351	45	5.496.266.319	47	5.771.079.634	47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Sasaran											
	S1.3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali	Angka Pengangguran	Persen	5,37	2,57	14.182.983.595	2,01	12.070.901.425	1,41	13.145.391.787	1,41	
		Gini Ratio	Nilai	0,38	0,37		0,37		0,37			
	Program											
	1. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	25	30	355.500.000	34	355.500.000	36	375.000.000	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
	2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	Persen	N/A	70	1.760.420.000	75	1.820.460.000	80	1.960.456.000	80	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesra)
	3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi	Nilai	12,95	11,5	729.413.529	12,3	729.413.529	13,2	729.413.529	13,2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5							12	13
	4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	Persen	99.22	99.53	3.942.916.316	99.69	4.414.015.396	100	4.915.069.758	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	5. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dalam panti yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	21.87	27.14	7.056.108.750	31.44	4.390.387.500	32.87	4.800.577.500	91.37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persen	20.62	0.16	338.625.000	0.18	361.125.000	0.18	364.875.000	0.53	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Sasaran												
	S.1.4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	Angka inflasi	Persen	2,07	3±1	14.414.099.585	3±1	15.930.091.605	3±1	17.614.599.243	3±2	
Program												
	1.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	Persen	3.2	<7	100.000.000	<7	100.000.000	<7	100.000.000	<7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	119.750.400	100	131.725.439	100	144.897.984	100	Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali)
	3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Produk Bersertifikat Organik	Persen	0.60	0.87	745.398.556	1.10	819.938.412	1.20	901.932.253	1.20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	4. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	86.90	90.00	329.811.584	91.00	362.792.742	92.00	399.072.017	92.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	5. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	Persen	0.80	0.81	5.731.483.380	0.82	6.304.631.718	0.83	6.935.094.890	0.83	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase peningkatan produktivitas hortikultura	Persen	0,50	0,60	702.368.372	0,70	772.605.209	0,80	849.865.730	0,80	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Persen	0.50	0.60	3.824.061.098	0.70	4.206.467.208	0.80	4.627.113.929	0.80	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	Persen	0.50	0.60	2.015.405.568	0.70	2.216.946.125	0.80	2.438.640.737	0.80	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	N/A	2	845.820.627	2	1.014.984.752	2	1.217.981.703	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Tujuan 2	: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing										
	Indikator Tujuan	: Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	75,69	75,92		76,01		76,01		76,01	
	Sasaran											
	S2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Nilai	72,24	72,60	43.372.198.960	72,70	47.708.743.434	72,80	52.466.644.036	72,80	
	Program											
	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen	95	98,2	23.831.625.234	98,3	25.473.634.719	98,5	27.205.729.847	98,5	Dinas Kesehatan

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	90	95	666.655.068	96	1.124.677.188	97	1.667.637.181	97	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Nilai	85 Nilai	88,5	17.181.112.148	89	18.483.206.519	90	19.873.908.643	90	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa UCI	Persen	95,67	96	971.293.334	97	1.444.885.854	98	2.003.483.945	98	Dinas Kesehatan
		Persentase Faskes yang Terakreditasi	Persen	83	100	707.697.716	100	1.167.817.571	100	1.712.884.420	100	Dinas Kesehatan
	2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	Persen	69,17	75	13.815.460	76	14.521.583	77	3.000.000	77	Dinas Kesehatan
	Sasaran											
	S2.2. Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,06	9,80	545.891.285.374	10,00	560.538.991.078	10,60	588.668.721.027	10,60	
	Program											
	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun	Persen	40.40	100	22.318.155.135	100	22.917.010.213	100	24.067.062.785	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	83.96	100	285.829.704.153	100	293.499.270.420	100	308.228.049.949	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Lulusan Siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri		Persen	50.10	50.25	237.743.426.086	50.50	244.122.710.445	50.75	256.373.608.293	50.75	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
Sasaran												
S2.3. Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	Indeks Daya Saing Krama Bali	Nilai	64,45	63,19	38.770.464.150	64,89	40.837.307.858	66,45	42.818.083.255	66,45		
Program												
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Persen	53.00	71.50	1.775.000.000	72.00	1.863.750.000	72.50	1.956.937.500	72.50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	Persen	49.00	50.00	34.054.580.000	50.50	35.757.309.000	51.00	37.545.174.450	51.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	Persen	0	100	198.000.000	100	198.000.000	100	198.000.000	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	75.35	75.95	913.750.000	76.20	968.750.000	76.50	982.500.000	76.78	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	29.33	70	1.000.000.000	75	1.050.000.000	80	1.055.000.000	75	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	Persen	100	30	75.000.000	34	90.000.000	36	100.000.000	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
	6. Program Hubungan Industrial	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	Persen	5.87	10.44	400.000.000	11.97	425.000.000	13,49	450.000.000	13,49	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
	7. Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	Persen	100	100	307.040.000	100	435.050.000	100	478.550.000	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	Persen	100	100	47.094.150	100	49.448.858	100	51.921.305	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
3	Tujuan 3	: Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali										
	Indikator Tujuan	: Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	66,40	67,97		68,47		68,98		68,98	
	Sasaran											
	S3.1. Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	Persentase Desa Adat Mandiri	Persen	N/A	14,06	422.452.064.646	15,07	425.495.231.060	16,74	426.818.921.845	16,74	
	Program											
	1. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Indeks Membangun Desa Adat	Persen	0.6909	0.7090	422.452.064.646	0.8025	425.495.231.060	0.8750	426.818.921.845	0.8750	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
	Sasaran											
	S3.2. Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat	Indeks Pemajuan Tradisi	Persen	N/A	15	4.074.380.000	15	4.675.450.000	20	5.843.496.000	20	
	Program											
	1. Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan budaya spiritual	Persen	N/A	100	4.074.380.000	100	4.675.450.000	100	5.843.496.000	100	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesra)
	Sasaran											
	S3.3. Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	Indeks Pemajuan Budaya	Nilai	N/A	65	67.338.420.162	66	73.785.762.178	67	80.845.338.395	67	
	Program											
	1. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	5	5	61.328.826.556	5	67.461.709.211	5	74.207.880.132	5	Dinas Kebudayaan
	2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persen	5	5	1.468.872.014	5	1.615.759.215	5	1.777.335.137	5	Dinas Kebudayaan
	3. Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persen	5	5	135.815.800	5	149.397.380	5	164.337.118	5	Dinas Kebudayaan
	4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	Persen	520	0,2	789.905.792	0,2	868.896.371	0,2	955.786.008	0,2	Dinas Kebudayaan
	5. Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan masyarakat	Persen	75	78	3.240.000.000	79	3.240.000.000	80	3.240.000.000	80	Dinas Kebudayaan
	6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual Yang Difasilitasi Pendaftarannya	Persen	100	100	375.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Tujuan 4	: Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim											
	Indikator Tujuan	: Indeks Provinsi Hijau	Nilai	62,73	79,73		80,20		80,72		71,41		
	Sasaran												
	S4.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Persen	61,51	71,81	206.500.000	71,93	262.500.000	72,04	269.615.000	72,04		
		Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	7,44	12,37		13,26		14,58		14,58		
	Program												
	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Nilai	60.30	63.05b	56.500.000	63.10	92.500.000	63.15	93.585.000	63.15	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		Indeks kualitas air laut	Nilai	61.72	69.90	25.000.000	69.95	32.500.000	69.98	32.890.000	69.98	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		Indeks kualitas udara	Nilai	72.89	88.59	25.000.000	88.65	32.500.000	88.70	32.890.000	88.70	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	2. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	40.61	41.66	100.000.000	42.16	105.000.000	42.66	110.250.000	42.66	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	Sasaran												
	S4.2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	93,00	92,45	2.017.356.120	94,34	2.219.092.334	96,24	2.441.001.568	96,24		
	Program												
	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	93	93.62	2.017.356.120	94.34	2.219.092.334	96.24	2.441.001.568	96.24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Sasaran												
	S4.3. Meningkatkan penggunaan energi bersih	Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan	Persen	7,04	7,35	275.000.000	8,60	330.000.000	9,85	360.000.000	9,85		
	Program												
	1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	MW	8,62	70	275.000.000	75	330.000.000	89	360.000.000	89	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	Sasaran												
	S4.4. Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah	Persentase pengelolaan sampah	Persen	100	100	351.000.000	100	368.550.000	100	386.977.500	100		
	Program												
	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Persen	74	71	171.000.000	70	179.550.000	70	188.527.500	70	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Persen	24	28	180.000.000	30	189.000.000	30	198.450.000	30	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5	Tujuan 5	: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi											
	Indikator Tujuan	: Indeks Infrastruktur	Nilai	N/A	73,75		76,27		78,46		78,46		
	Sasaran												
	S5.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	72,03	542.550.843.873	75,11	427.977.248.075	76,87	387.189.765.051	78,46		
	Program												
1. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	79.95	78.67	422.917.985.846	82.65	303.322.759.734	85.27	276.413.724.008	85.27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
					6	7	8	9	10	11		
1	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	76.84	81.18	18.142.074.501	82.04	20.701.285.197	83.13	20.025.956.995	83.13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persen	48.33	48.63	52.869.968.326	48.74	60.412.726.016	48.87	44.734.252.392	48.87	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3. Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	Persen	70.00	70.00	2.359.819.948	71.00	1.858.386.576	72.00	1.478.386.576	72.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persen	89.50	90.90	2.030.183.800	92.00	957.090.552	93.00	887.445.080	93.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	Persen	91.35	95	44.230.811.452	95.5	40.725.000.000	96	43.650.000.000	96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sasaran											
	S5.2. Meningkatkan konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas Transportasi	Nilai	N/A	0,61	2.520.210.000	0,62	2.598.696.300	0,63	2.679.537.189	0,63	
	Program											
	1. Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	Persen	67.5	75	1.043.250.000	80	1.074.547.500	84	1.106.783.925	84	Dinas Perhubungan
	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	Persen	28.98	38.58	912.000.000	43.75	942.240.000	49.48	973.387.200	49.48	Dinas Perhubungan
		Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	Persen	72	73	564.960.000	73.45	581.908.800	73.85	599.366.064	73.85	Dinas Perhubungan
	Sasaran											
	S5.3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	N/A	79,85	43.148.500.000	82,07	55.382.000.000	84,28	55.382.000.000	84,28	
	Program											
	1. Program pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	N/A	79.85	43.148.500.000	82.07	55.382.000.000	84.28	59.182.000.000	84.28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Tujuan 6	: Merwujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan										
	Indikator Tujuan	: Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Nilai	N/A	70,37		65,06		59,76		59,76	
	Sasaran											
	S6.1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	Persen	100,00	100,00	22.690.092.192	100,00	24.158.865.240	100,00	26.109.808.502	100,00	
	Program											
	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	21.215.000.000	100	22.350.000.000	100	23.495.000.000	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	Persen	100	100	260.000.000	100	290.000.000	100	320.000.000	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Sistem Kewaspadaann Terintegrasi	Persen	77	90	1.215.092.192	95	1.518.865.240	100	2.294.808.502	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran												
S6.2. Meningkatkan kehidupan demokrasi masyarakat	Indeks demokrasi	Nilai	75,35	81,00	169.441.210.722	81,00	184.554.919.807	81,00	203.055.514.541	81,00		

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program											
	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	Persen	N/A	80	18.000.000.000	85	18.000.000.000	90	18.000.000.000	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	Persen	N/A	90	961.995.144	92	1.161.995.144	94	1.361.995.144	94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi yang disebarluaskan	Persen	93.20	93.40	22.630.000.000	94.10	24.893.000.000	94.80	27.382.300.000	94.80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	Persen	100	100	127.849.215.578	100	140.499.924.663	100	156.311.219.397	100	Sekretariat DPRD
	Indikator Tujuan	: Indeks resiko bencana	Nilai	124,19	115,10		111,70		108,30		108,34	
	Sasaran											
	S6.3. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana	Persentase Ketangguhan Bencana	Persen	100	100	8.384.173.690	100	8.134.173.690	100	8.503.382.375	100	
	Program											
	1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan darurat bencana	Persen	100	100	3.000.000.000	100	3.050.000.000	100	3.150.000.000	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	Persen	6.04	3	4.909.173.690	3	4.609.173.690	3	4.854.632.375	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	Persen	100	100	475.000.000	100	475.000.000	100	498.750.000	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sasaran					475.000.000	100%	475.000.000	100%	498.750.000		
	S6.4. Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	Persentase pelayanan terhadap korban bencana	Persen	100	100	663.750.000	100	663.750.000	100	663.750.000	100	
	Program											
1. Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	100	100	663.750.000	100	663.750.000	100	663.750.000	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
7	Tujuan 7	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik										
	Indikator Tujuan	: Indeks RB	Nilai	71	74		75		76		76	
	Sasaran											
	S7.1. Meningkatkan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	Nilai	0,80	0,82	8.532.267.330	0,83	8.958.880.697	0,85	9.406.824.731	0,85	
	Program											
	1. Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	Nilai	52,71	59,00	8.532.267.330	60,00	8.958.880.697	61,00	9.406.824.731	61	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Sasaran											
	S7.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai AKIP	Nilai	79	80,5	1.689.838.396.716	81,00	1.286.439.202.870	81,5	1.402.695.401.832	81,5	
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	
	Program											
	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	95	100	2.469.000.000	100	3.245.000.000	100	4.237.000.000	100	Inspektorat

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	Persen	81	87	1.064.359.995	89	1.170.795.995	91	1.287.875.595	91	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
	3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Persen	96.20	100	6.327.594.514	100	6.614.353.965	100	6.344.789.361	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	Persen	100	100	4.177.442.207	100	4.219.216.630	100	4.261.408.796	100	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/R anperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	Persen	100	100	1.675.800.000.000	100	1.271.189.836.280	100	1.386.564.328.080	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Sasaran											
S7.3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	92,55	88,50	13.084.124.442	89,00	14.493.018.324	89,50	15.943.018.324	89,50		
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	27,02	65,75		66,75		67,75		67,75		
Program												
	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Persen	100	100	959.124.442	100	943.018.324	100	943.018.324	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Persen	75	100	12.125.000.000	100	13.550.000.000	100	15.000.000.000	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang. Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Bali tahun 2024-2026 secara lengkap disajikan pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Bali
Tahun 2024-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
I	PENDAPATAN DAERAH	6.182.194.776.093	5.921.934.369.161	6.187.764.377.570
A	Pendapatan Asli Daerah	3.665.740.521.990	3.279.657.402.354	3.407.435.462.352
1	Pajak Daerah	3.021.066.373.329	2.462.579.851.300	2.469.473.846.692
1)	PKB	1.560.141.905.096	1.069.000.942.400	1.069.000.942.400
2)	BBNKB	743.235.973.362	640.110.389.300	640.110.389.300
3)	PBBKB	385.875.000.000	405.168.750.000	405.168.750.000
4)	Pajak AP	3.528.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
5)	Pajak Rokok	328.285.494.871	344.699.769.600	351.593.764.992
2	Retribusi Daerah	26.628.064.310	33.551.361.031	36.906.497.134
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	219.371.691.686	285.183.199.192	327.960.679.071
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	398.674.392.665	498.342.990.831	573.094.439.456
B	Pendapatan Transfer	2.459.900.920.103	2.582.895.966.108	2.712.040.764.413
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.553.334.000	59.381.000.700	68.288.150.805
II	BELANJA DAERAH	6.460.466.448.757	6.185.746.905.683	6.464.685.814.290
A	Belanja Operasi	4.286.741.258.559	4.421.839.897.694	4.619.095.586.771
1	Belanja Pegawai	1.743.818.568.219	1.760.629.583.321	1.809.616.914.370
2	Belanja Barang dan Jasa	1.798.584.650.632	1.905.450.534.592	1.985.376.964.228
3	Belanja Bunga	-	-	-
4	Belanja Subsidi	10.025.000.000	10.025.000.000	10.025.000.000
5	Belanja Hibah	711.272.139.708	728.454.104.781	801.116.201.923
6	Belanja Bantuan Sosial	23.040.900.000	17.280.675.000	12.960.506.250
B	Belanja Modal	1.079.546.740.676	883.408.038.192	907.805.150.183
1	Belanja Modal Tanah	82.334.162.689	57.050.373.210	55.672.667.945
2	Belanja Peralatan dan Mesin	135.105.432.145	122.818.530.895	139.832.045.081
3	Belanja Gedung dan Bangunan	608.879.881.311	465.771.922.852	452.751.749.854
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.330.053.539	215.084.024.091	234.804.615.659
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	34.897.210.992	22.683.187.144	24.744.071.644

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
C	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
1	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
D	Belanja Transfer	1.044.178.449.522	830.498.969.797	887.785.077.336
1	Belanja Bagi Hasil	652.697.346.891	456.888.142.823	502.576.957.106
2	Belanja Bantuan Keuangan	391.481.102.631	373.610.826.973	385.208.120.230
	Surplus/Defisit	-278.271.672.664	-263.812.536.522	-276.921.436.720
III	PEMBIAYAAN DAERAH	278.271.672.664	263.812.536.522	276.921.436.720
A	Penerimaan Pembiayaan	278.271.672.664	263.812.536.522	276.921.436.720
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	278.271.672.664	263.812.536.522	276.921.436.720
B	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
	Pembiayaan Netto	278.271.672.664	263.812.536.522	276.921.436.720
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah

Daerah Provinsi Bali, serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah, dan unsur pemerintahan umum. Secara detail Program Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan		Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)		Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026													
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
(1)			(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(17)		(18)	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																									
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evahuasi Manajemen Kinerja	Nilai	80.90	81.50	981.204.281.018	81.75	1.023.332.073.518	82.00	1.033.565.394.253	82.00	3.038.101.748.789	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	83.96	100	285.829.704.153	100	293.499.270.420	100	308.228.049.949	100	887.557.024.522	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
				Persentase Lulusan Siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	Persen	50.10	50.25	237.743.426.086	50.50	244.122.710.445	50.75	256.373.608.293	50.75	738.239.744.824	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun	Persen	40.40	100	22.318.155.135	100	22.917.010.213	100	24.067.062.785	100	69.302.228.133	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
				Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK	Persen	50.35	77.50	883.800.000	80.00	816.763.239	82.50	754.821.006	82.50	2.455.384.245	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pemahaman Peserta Didik Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Persen	56.90	60.00	220.544.905	60.25	231.572.150	60.50	243.150.757	60.50	695.267.812	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik	Persen	100	100	27.451.170	100	28.823.729	100	30.264.915	100	86.539.814	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Nilai Rata-Rata Bahasa Bali pada Satuan Pendidikan	Nilai	69.80	70.40	76.500.000	70.60	80.325.000	70.80	84.341.250	70.80	241.166.250	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
								1.528.303.862.467		1.585.028.548.714		1.623.346.693.209		4.736.679.104.390														
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																									
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evahuasi Manajemen Kinerja	Nilai	87,66	82	281.929.748.276	82,5	281.448.323.104	83	307.051.315.414	83	870.429.386.794	Dinas Kesehatan													
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD	Nilai	81	81,5	231.660.000.000	82	243.500.400.000	82,5	255.392.280.000	82,5	730.552.680.000	Dinas Kesehatan													
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen	95	98,2	23.831.625.234	98,3	25.473.634.719	98,5	27.205.729.847	98,5	76.510.989.800	Dinas Kesehatan													
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Nilai	85	88,5	17.181.112.148	89	18.483.206.519	90	19.873.908.643	90	55.538.227.310	Dinas Kesehatan													
				Persentase Desa UCI	Persen	95,67	96	971.293.334	97	1.444.885.854	98	2.003.483.945	98	4.419.663.133	Dinas Kesehatan													
				Persentase Faskes yang Terakreditasi	Persen	83	100	707.697.716	100	1.167.817.571	100	1.712.884.420	100	3.588.399.707	Dinas Kesehatan													
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Nilai	90	95	666.655.068	96	1.124.677.188	97	1.667.637.181	97	3.458.969.437	Dinas Kesehatan													
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	Persen	100	100	786.893.152	100	866.257.890	100	15.574.118	100	1.668.725.160	Dinas Kesehatan													
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	Persen	69,17	75	13.815.460	76	14.521.583	77	3.000.000	77	31.337.043	Dinas Kesehatan													
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	Persen	81	85	107.786.448	86	118.565.093	87	130.421.602	87	356.773.143	Dinas Kesehatan													
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	Persen	44	66,67	82.250.000	66,67	98.475.000	66,67	116.322.500	66,67	297.047.500	Dinas Kesehatan													
								557.938.876.836		573.740.764.521		615.172.557.671		1.746.852.199.027														

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	85	85	33.756.793.243	85	35.263.694.859	85	37.026.879.601	85	106.047.367.703	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persen	48.33	48.63	52.869.968.326	48.74	60.412.726.016	48.87	44.734.252.392	48.87	158.016.946.734	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	76.84	81.18	18.142.074.501	82.04	20.701.285.197	83.13	20.025.956.995	83.13	58.869.316.693	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	Persen	91.35	95	44.230.811.452	95.5	40.725.000.000	96	43.650.000.000	96	128.605.811.452	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	Persen	100	100	12.265.804.266	100	12.929.094.479	100	13.625.549.203	100	38.820.447.948	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persen	89.50	90.90	2.030.183.800	92.00	957.090.552	93.00	887.445.080	93.00	3.874.719.432	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persen	68	75	197.562.424.321	76	280.043.511.683	77	283.093.946.800	77	760.699.882.804	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	79.95	78.67	422.917.985.846	82.65	303.322.759.734	85.27	276.413.724.008	85.27	1.002.654.469.588	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Persen	100	100	3.396.852.318	100	2.919.170.718	100	2.019.170.718	100	8.335.193.754	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Persen	10.25	22.77	1.499.014.976	25.90	1.474.014.976	29.03	1.474.014.976	29.03	4.447.044.928	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	93	93.62	2.017.356.120	94.34	2.219.092.334	96.24	2.441.001.568	96.24	6.677.450.022	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
								790.689.269.169		760.967.440.548		725.391.941.341		2.277.048.651.058		
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persen	100	100	1.007.403.152	100	1.007.403.152	100	1.007.403.152	100	3.022.209.456	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	N/A	5.94	1.474.314.200	4.89	2.697.504.572	3.84	3.920.881.572	3.84	8.092.700.344	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	Persen	70.00	70.00	2.359.819.948	71.00	1.858.386.576	72.00	1.478.386.576	72.00	5.696.593.100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
								4.841.537.300		5.563.294.300		6.406.671.300		16.811.502.900	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82.09	83.3	24.197.000.000	83.6	25.349.000.000	84	26.516.000.000	84	76.062.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	21.215.000.000	100	22.350.000.000	100	23.495.000.000	100	67.060.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	Persen	100	100	260.000.000	100	290.000.000	100	320.000.000	100	870.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Pengembangan SDA Pol PP	Persen	N/A	100	140.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen	83.35	83.60	28.430.465.968	83.85	30.010.465.968	84.10	27.443.145.958	84.10	85.884.077.894	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	Persen	6.04	3	4.909.173.690	3	4.609.173.690	3	4.854.632.375	9	14.372.979.755	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase penanganan darurat bencana	Persen	100	100	3.000.000.000	100	3.050.000.000	100	3.150.000.000	100	9.200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	Persen	100	100	475.000.000	100	475.000.000	100	498.750.000	100	1.448.750.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								82.626.639.658		86.283.639.658		86.437.528.333		255.347.807.649	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	A	A	28.666.144.807	A	30.098.597.022	A	31.224.719.522	A	89.989.461.351	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	Persen	22.57	13.88	446.250.000	13.88	451.500.000	14.24	472.500.000	44.33	1.370.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Persen	N/A	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	135.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	21.87	27.14	7.056.108.750	31.44	4.390.387.500	32.87	4.800.577.500	91.37	16.247.073.750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persen	20.62	0.16	338.625.000	0.18	361.125.000	0.18	364.875.000	0.53	1.064.625.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	100	100	663.750.000	100	663.750.000	100	663.750.000	100	1.991.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Penanganan TMP sesuai standar	Persen	100	100	405.000.000	100	405.000.000	100	420.000.000	100	1.230.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
								37.620.878.557		36.415.359.522		37.991.422.022		112.027.660.101	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	86.79	86.80	32.565.392.920	86.82	33.676.984.148	86.84	60.472.921.986	86.84	126.715.299.054	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	29.33	70	1.000.000.000	75	1.050.000.000	80	1.055.000.000	75	3.105.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	Persen	100	30	75.000.000	34	90.000.000	36	100.000.000	100	265.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	25	30	355.500.000	34	355.500.000	36	375.000.000	100	1.086.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	Persen	5.87	10.44	400.000.000	11.97	425.000.000	13,49	450.000.000	13,49	1.275.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	Persen	100	100	307.040.000	100	435.050.000	100	478.550.000	100	1.220.640.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	Persen	100	100	47.094.150	100	49.448.858	100	51.921.305	100	148.464.313	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
							34.750.027.070		36.081.983.006		62.983.393.291		133.815.403.367		
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								62.983.393.291		133.815.403.367		
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	A	A	1.895.250.000	A	1.946.000.000	A	1.996.750.000	A	5.838.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	Persen	N/A	100	198.000.000	100	198.000.000	100	198.000.000	100	594.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan korban kekerasan	Nilai	12.57	12.10	175.000.000	11.89	197.500.000	11.44	210.000.000	11.44	582.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	Nilai	72.39	72.89	258.500.000	73.14	328.350.000	73.56	377.850.000	73.56	964.700.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	Persen	N/A	28	45.000.000	35	55.000.000	37	65.000.000	100	165.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	75.35	75.95	913.750.000	76.20	968.750.000	76.50	982.500.000	76.78	2.865.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan	Nilai	1.45	1.34	99.900.000	1.28	141.525.000	1.22	183.150.000	1.22	424.575.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
							3.585.400.000		3.835.125.000		4.013.250.000		11.433.775.000		
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi	Persen	85	89	533.463.576	92	586.809.934	96	645.490.927	96	1.765.764.437	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	86.90	90.00	329.811.584	91.00	362.792.742	92.00	399.072.017	92.00	1.091.676.343	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/ka pita/hari	2672	2675	217.382.240	2680	239.120.464	2685	263.032.510	2690	719.535.214	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Produk Bersertifikat Organik	Persen	0.60	0.87	745.398.556	1.10	819.938.412	1.20	901.932.253	1.20	2.467.269.221	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	Persen	95.80	95.80	171.318.944	95.90	188.450.838	96.00	207.295.922	96.00	567.065.704	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
							1.997.374.900		2.197.112.390		2.416.823.629		6.611.310.919		
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						2.197.112.390		2.416.823.629		6.611.310.919		
2	10	06	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	Persen	N/A	100	37.896.400	100	37.896.400	100	37.896.400	100	113.689.200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persen	10	30	280.423.300	50	280.423.300	70	280.423.300	70	841.269.900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							318.319.700		318.319.700		318.319.700		954.959.100		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						318.319.700		318.319.700		954.959.100		
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	78	A	530.500.000	A	557.025.000	A	584.876.250	A	1.672.401.250	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	78	A	363.400.000	A	381.570.000	A	400.648.500	A	1.145.618.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan Bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	Persen	N/A	100	300.000.000	100	315.000.000	100	330.750.000	100	945.750.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	Persen	92	94.46	200.000.000	94.85	260.000.000	96	263.120.000	96	723.120.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	10.16	12.37	120.000.000	13.26	140.000.000	14.58	142.000.000	14.58	402.000.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Indeks kualitas air	Nilai	60.30	63.05b	56.500.000	63.10	92.500.000	63.15	93.585.000	63.15	242.585.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Indeks kualitas air laut	Nilai	61.72	69.90	25.000.000	69.95	32.500.000	69.98	32.890.000	69.98	90.390.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Indeks kualitas udara	Nilai	72.89	88.59	25.000.000	88.65	32.500.000	88.70	32.890.000	88.70	90.390.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persen	N/A	100	800.000.000	100	840.000.000	100	882.000.000	100	2.522.000.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3	Persen	N/A	100	150.000.000	100	157.500.000	100	159.390.000	100	466.890.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	Persen	65	68	90.000.000	70	94.500.000	72	99.225.000	72	283.725.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH	Persen	N/A	100	51.000.000	100	53.550.000	100	56.227.500	100	160.777.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Persen	24	28	180.000.000	30	189.000.000	30	198.450.000	30	567.450.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Persen	74	71	171.000.000	70	179.550.000	70	188.527.500	70	539.077.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	N/A	30	90.000.000	35	94.500.000	40	99.225.000	40	283.725.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase fasilitas pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	Persen	N/A	100	90.000.000	100	94.500.000	100	99.225.000	100	283.725.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	Persen	100	100	7.630.120.000	100	8.011.626.000	100	8.412.207.300	100	24.053.953.300	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
								10.872.520.000		11.525.821.000		12.075.237.050		34.473.578.050	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	Persen	88.89	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	1.350.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	Persen	88.89	100	350.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	1.250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								750.000.000		850.000.000		1.000.000.000		2.600.000.000	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82.65	82.75	16.981.489.767	82.85	17.830.564.256	82.95	18.722.092.468	82.95	53.534.146.491	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa	Desa	2 Desa	27 Desa	126.405.946	29 Desa	139.046.540	31 Desa	152.951.194	87 Desa	418.403.680	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa cepat berkembang	Persen	58.96	84.90	840.042.800	93.87	924.047.080	100	1.016.451.788	100	2.780.541.668	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	Persen	99.22	99.53	3.942.916.316	99.69	4.414.015.396	100	4.915.069.758	100	13.272.001.470	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								21.890.854.829		23.307.673.272		24.806.565.208		70.005.093.309	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana	Sektor	6	4	663.844.869	4	730.229.355	4	803.252.291	18	2.197.326.515	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								663.844.869		730.229.355		803.252.291		2.197.326.515	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Kinerja	Persen	83.82	83.85	29.178.900.000	83.90	30.054.267.000	84	30.955.895.010	84	90.189.062.010	Dinas Perhubungan

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan		Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)		Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026												
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
(1)			(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(17)		(18)
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita		Persen		72.5		82,5		3.081.600.000		83		3.174.048.000		83,5		3.269.269.440		83,5		9.524.917.440		Dinas Perhubungan
		Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik			Persen		28.98		38.58		912.000.000		43.75		942.240.000		49.48		973.387.200		49.48		2.827.627.200		Dinas Perhubungan		
		Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional			Persen		63		65		667.680.000		66		687.710.400		66.5		708.341.712		66.5		2.063.732.112		Dinas Perhubungan		
		Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan			Persen		72		73		564.960.000		73.45		581.908.800		73.85		599.366.064		73.85		1.746.234.864		Dinas Perhubungan		
		Rasio konektivitas layanan angkutan darat			Rasio		0.71		0,86		519.537.216		0,88		535.123.332		0,90		551.177.032		0,90		1.605.837.580		Dinas Perhubungan		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase Aksesibilitas Pelayaran		Persen		67.5		75		1.043.250.000		80		1.074.547.500		84		1.106.783.925		84		3.224.581.425		Dinas Perhubungan
		Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM			Persen		50		50		477.750.000		50		488.182.500		75		498.927.975		75		1.464.860.475		Dinas Perhubungan		
2	15	05	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Persentase lintasan kereta api yang terbangun		Persen		15		25		450.000.000		35		675.000.000		45		900.000.000		45		2.025.000.000		Dinas Perhubungan
												36.895.677.216				38.213.027.532				39.563.148.358				114.671.853.106			
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										36.895.677.216				38.213.027.532				39.563.148.358				114.671.853.106		
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai		81.50		82.75		20.613.000.000		82.80		22.674.827.550		82.85		24.942.721.180		82.85		68.230.548.730		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase informasi yang disebarluaskan		Persen		93.20		93.40		22.630.000.000		94.10		24.893.000.000		94.80		27.382.300.000		94.80		74.905.300.000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Nilai		N/A		79.85		43.148.500.000		82.07		55.382.000.000		84.28		59.182.000.000		84.28		157.712.500.000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
												86.391.500.000				102.949.827.550				111.507.021.180				300.848.348.730			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										86.391.500.000				102.949.827.550				111.507.021.180				300.848.348.730		
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		Nilai		82.26		82.31		18.900.000.000		82.38		19.278.000.000		82.47		19.663.560.000		82.47		57.841.560.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta		Persen		3.08		3.20		468.000.000		3.30		477.360.000		3.35		486.907.200		3.35		1.432.267.200		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM		Persentase UMKM Naik Kelas		Persen		N/A		3.00		335.000.000		3.00		341.700.000		3.00		348.534.000		9.00		1.025.234.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP		Persen		59.26		3.00		252.000.000		3.70		257.040.000		4.60		262.180.800		11.30		771.220.800		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi berkualitas		Persen		61.32		7.00		75.000.000		7.00		76.500.000		7.00		78.030.000		21.00		229.530.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi		Persen		25.00		25.00		4.238.593.108		25.00		4.323.364.970		25.00		4.409.832.269		75.00		12.971.790.347		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase pertumbuhan wirausaha		Persen		0.06		6.00		670.000.000		6.00		683.400.000		6.00		697.068.000		18.00		2.050.468.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
												24.938.593.108				25.437.364.970				25.946.112.269				76.322.070.347			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										24.938.593.108				25.437.364.970				25.946.112.269				76.322.070.347		
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		Nilai		83.78		78.5		18.244.358.914		79		18.244.358.914		79.5		18.244.358.914		79.5		54.733.076.742		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	5128	12350	414.000.000	12650	460.000.000	13000	506.000.000	13000	1.380.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	Persen	32.33	33	414.000.000	33.5	437.000.000	34	460.000.000	34	1.311.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Persen	100	100	959.124.442	100	943.018.324	100	943.018.324	100	2.845.161.090	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi	Nilai	12.95	11.5	729.413.529	12.3	729.413.529	13.2	729.413.529	13.2	2.188.240.587	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	160.542.986	100	160.542.986	100	160.542.986	100	481.628.958	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							20.921.439.871		20.974.333.753		21.043.333.753		62.939.107.377			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA													
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Persen	53.00	71.50	1.775.000.000	72.00	1.863.750.000	72.50	1.956.937.500	72.50	5.595.687.500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	03	Program Pengembangan Daya Saing Kcolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	Persen	49.00	50.00	34.054.580.000	50.50	35.757.309.000	51.00	37.545.174.450	51.000	107.357.063.450	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepramukaan	Persen	48.00	52.50	500.000.000	53.00	525.000.000	53.50	551.250.000	53.50	1.576.250.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
							36.329.580.000		38.146.059.000		40.053.361.950		114.529.000.950			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	N/A	4.00	593.200.000	4.20	652.520.000	4.40	717.772.000	4.40	1.963.492.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
							593.200.000		652.520.000		717.772.000		1.963.492.000			
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Evalaksan	Nilai	N/A	75	680.000.000	76	748.000.000	77	822.800.000	77	2.250.800.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
							680.000.000		748.000.000		822.800.000		2.250.800.000			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	81	82	37.034.701.765	82,00	40.738.171.941	82	44.811.989.135	82	122.584.862.841	Dinas Kebudayaan	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	5	5	61.328.826.556	5	67.461.709.211	5	74.207.880.132	5	202.998.415.900	Dinas Kebudayaan	
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persen	5	5	1.468.872.014	5	1.615.759.215	5	1.777.335.137	5	4.861.966.366	Dinas Kebudayaan	
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persen	5	5	135.815.800	5	149.397.380	5	164.337.118	5	449.550.298	Dinas Kebudayaan	
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan dikelola	Persen	520	0,2	789.905.792	0,2	868.896.371	0,2	955.786.008	0,2	2.614.588.171	Dinas Kebudayaan	
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan masyarakat	Persen	75	78	3.240.000.000	79	3.240.000.000	80	3.240.000.000	80	9.720.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80.39	80.80	13.947.384.567	80.85	14.307.384.567	80.90	14.360.590.383	80.90	42.615.359.517	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	
2	22	09	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Indeks Membangun Desa Adat	Persen	0.6909	0.7090	422.452.064.646	0.8025	425.495.231.060	0.8750	426.818.921.845	0.8750	1.274.766.217.551	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	
							540.397.571.140		553.876.549.746		566.336.839.758		1.660.610.960.644			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	Persen	51	56	699.684.800	58	763.560.550	60	836.235.225	60	2.299.480.575	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	Persen	N/A	4.20	89.072.700	4.20	104.072.700	4.20	118.161.350	4.20	311.306.750	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
							788.757.500		867.633.250		954.396.575		2.610.787.325			

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan		Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)		Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Tahun 2024				Tahun 2025		Tahun 2026			Target		Rp						
											Target		Rp		Target		Rp											
(1)			(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(17)		(18)	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																									
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip			Nilai Evaluasi Kearsipan		Nilai		61		63		134.709.474		64		141.444.948		65		148.517.195		65		424.671.617		Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Protokol)
						Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip		Persen		50		100		134.709.474		100		141.444.948		100		148.517.195		100		424.671.617		Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Protokol)
												269.418.948				282.889.895				297.034.390				849.343.233				
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Nilai evaluasi manajemen kinerja		Persen		78		81		25.222.622.029		82		27.196.566.361		83		31.583.109.323		83		84.002.297.713		Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Persen		N/A		71		700.000.000		73		800.000.000		74		900.000.000		74		2.400.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
						Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		Persen		N/A		44		417.938.776		46		541.526.531		100		709.831.836		100		1.669.297.143		Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap		Persen		N/A		2		845.820.627		2		1.014.984.752		2		1.217.981.703		2		3.078.787.082		Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		Persen		N/A		2		3.580.493.026		2		4.296.591.631		2		5.155.909.957		2		13.032.994.614		Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku		Persen		N/A		2		275.000.000		3		330.000.000		4		396.000.000		4		1.001.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			Persentase produksi olahan hasil perikanan		Persen		N/A		2		328.509.915		2		343.610.626		2		389.503.423		2		1.061.623.964		Dinas Kelautan dan Perikanan
						Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan		Persen		N/A		2		256.008.393		2		377.665.843		2		487.805.477		2		1.121.479.713		Dinas Kelautan dan Perikanan
						Tingkat Konsumsi Ikan		Kg/Kapita/Tahun		44.81		48.68		262.771.516		49.65		295.471.321		50.64		342.788.448		50.64		901.031.285		Dinas Kelautan dan Perikanan
												31.889.164.282				35.196.417.065				41.182.930.169				108.268.511.516				
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																									
3	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		Persen		82.65		84		15.868.053.656		85		17.305.871.992		86		18.800.177.098		86		51.974.102.746		Dinas Pariwisata
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Persen		13		14		539.945.489		14		718.744.055		14		1.062.156.311		14		2.320.845.855		Dinas Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata			Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan		Persen		-24.07		12.50		634.571.491		16.67		698.028.640		19.05		767.831.504		19.05		2.100.431.635		Dinas Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persen		1		3		231.000.000		3		254.100.000		3		279.510.000		3		764.610.000		Dinas Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan		Persen		43		46		651.361.215		47		701.297.336		48		729.667.070		48		2.082.325.621		Dinas Pariwisata
												17.924.931.851				19.678.042.023				21.639.341.983				59.242.315.857				
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																									
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		Nilai		81.00		81.50		52.309.335.930		81.60		55.288.416.678		81.70		59.165.899.593		81.70		166.763.652.201		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			Persentase peningkatan populasi ternak		Persen		0.80		0.81		5.731.483.380		0.82		6.304.631.718		0.83		6.935.094.890		0.83		18.971.209.988		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian		Persen		90		90		5.434.636.890		90		5.978.100.578		90		6.575.910.636		90		17.988.648.104		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase peningkatan produktivitas perkebunan		Persen		0.50		0.60		3.824.061.098		0.70		4.206.467.208		0.80		4.627.113.929		0.80		12.657.642.235		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	
					Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	Persen	0.50	0.60	2.015.405.568	0.70	2.216.946.125	0.80	2.438.640.737	0.80	6.670.992.430	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Persentase peningkatan produktivitas hortikultura	Persen	0,50	0,60	702.368.372	0,70	772.605.209	0,80	849.865.730	0,80	2.324.839.311	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	Persen	71	15	1.325.824.232	15	1.458.406.655	15	1.604.247.321	15	4.388.478.208	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	Persen	64.2	5	3.611.554.326	5	3.972.709.759	5	4.369.980.734	5	11.954.244.819	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Persen	82.91	82.91	1.682.471.268	82.91	1.850.718.395	82.91	2.035.790.234	82.91	5.568.979.897	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani berbasis kawasan dan produk unggulan	Persen	20.00	40.00	338.762.336	60.00	372.638.570	80.00	409.902.427	80.00	1.121.303.333	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
								76.975.903.400		82.421.640.895		89.012.446.231		248.409.990.526		
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
3	28	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	78	A	38.843.623.564	A	40.785.804.742	A	42.825.094.979	A	122.454.523.285	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)	Nilai	78	A	379.300.000	A	398.265.000	A	418.178.250	A	1.195.743.250	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)	Nilai	78	A	420.300.000	A	441.315.000	A	463.380.750	A	1.324.995.750	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)	Nilai	78	A	639.900.000	A	671.895.000	A	705.489.750	A	2.017.284.750	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)	Nilai	78	A	845.900.000	A	888.195.000	A	932.604.750	A	2.666.699.750	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)	Nilai	78	A	184.300.000	A	193.515.000	A	203.190.750	A	581.005.750	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	Persen	3.67	3.06	302.600.000	3.16	317.730.000	3.26	333.616.500	3.26	953.946.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Barat	Persen	3.67	3.06	180.000.000	3.16	189.000.000	3.26	198.450.000	3.26	567.450.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan	Persen	3.67	3.06	180.000.000	3.16	189.000.000	3.26	198.450.000	3.26	567.450.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur	Persen	3.67	3.06	180.000.000	3.16	189.000.000	3.26	198.450.000	3.26	567.450.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Utara	Persen	3.67	3.06	180.000.000	3.16	189.000.000	3.26	198.450.000	3.26	567.450.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai	Persen	79.50	5.5	90.000.000	11	94.500.000	16.5	99.225.000	16.5	283.725.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)		
3	28	05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok	Persen	N/A	2.82	95.400.000	4.23	100.170.000	4.23	105.178.500	11.27	300.748.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
				Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Barat	Persen	1.69	6.67	95.400.000	6.67	100.170.000	13.33	105.178.500	26.67	300.748.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
				Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Selatan	Persen	N/A	3.33	95.400.000	6.67	100.170.000	3.33	105.178.500	13.33	300.748.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
				Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Timur	Persen	1.69	1.33	95.400.000	1.33	100.170.000	2.67	105.178.500	5.33	300.748.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
				Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Utara	Persen	1.69	4.55	95.400.000	9.09	100.170.000	4.55	105.178.500	18.18	300.748.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
3	28	06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	40.61	41.66	100.000.000	42.16	105.000.000	42.66	110.250.000	42.66	315.250.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
				Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Persen	4.89	6.61	94.881.000	6.82	99.625.050	7.46	104.606.303	7.46	299.112.353	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
								43.097.804.564				45.252.694.792		47.515.329.532		135.865.828.888	
3			29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												
3	29	02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	Persen	55.00	62.50	60.000.000	65.00	60.000.000	67.50	60.000.000	67.50	180.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
3	29	03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	Persen	55.00	58.00	200.000.000	61.00	230.000.000	64.00	240.000.000	64.00	670.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	MW	8,62	70	275.000.000	75	330.000.000	89	360.000.000	89	965.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
								535.000.000				620.000.000		660.000.000		1.815.000.000	
3			30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82,30	82,40	19.078.021.110	82,50	21.232.805.997	82,60	23.627.767.649	82,60	63.938.594.756	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,07	82,00	500.000.000	82,00	600.000.000	82,00	700.000.000	82,00	1.800.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar ber SNI	Pasar	4	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000	3	630.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	Persen	3,2	<7	100.000.000	<7	100.000.000	<7	100.000.000	<7	300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	Persen	58,41	55	2.000.000.000	55	2.000.000.000	55	2.000.000.000	55	6.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	49,68	49,70	1.019.456.244	49,72	1.091.401.868	49,74	1.165.542.055	49,76	3.276.400.167	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	Persen	30	30	130.000.000	30	140.000.000	30	150.000.000	30	420.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
								23.017.477.354				25.374.207.865		27.973.309.704		76.364.994.923	
3			31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3	31	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82,30	82,40	250.285.196	82,50	275.313.716	82,60	302.845.087	82,60	828.443.999	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh	Persen	1,5	1,5	6.078.995.255	1,5	6.115.644.780	1,5	6.152.209.258	1,5	18.346.849.293	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Data Industri	Persen	100	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	495.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							6.494.280.451		6.555.958.496		6.620.054.345		19.670.293.292		
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD	Persen	N/A	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	255.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
							80.000.000		85.000.000		90.000.000		255.000.000		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01		SEKRETARIAT DAERAH												
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen kinerja	Nilai	81	83	146.914.814.566	83	149.085.443.795	83	158.463.103.385	83	454.463.361.746	Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Protokol)
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinai	Nilai Evaluasi Manajemen kinerja	Nilai	84	85	1.427.019.050	86	1.569.720.955	87	1.726.693.051	87	4.723.433.056	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
4	01	02	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	Persen	81	87	1.064.359.995	89	1.170.795.995	91	1.287.875.595	91	3.523.031.585	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	82	2.325.840.000	84	2.468.540.000	86	2.516.648.000	86	7.311.028.000	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesra)
4	01	03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	Persen	N/A	70	1.760.420.000	75	1.820.460.000	80	1.960.456.000	80	5.541.336.000	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesra)
4	01	04	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan budaya spiritual	Persen	N/A	100	4.074.380.000	100	4.675.450.000	100	5.843.496.000	100	14.593.326.000	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesra)
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	80,5	1.534.730.112	81	1.550.077.413	81,5	1.565.578.187	81,5	4.650.385.712	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
4	01	05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	Persen	100	100	4.177.442.207	100	4.219.216.630	100	4.261.408.796	100	12.658.067.633	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen	82	83	3.196.176.760	84	3.515.794.436	85	3.867.373.879	85	10.579.345.075	Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian)
4	01	06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	119.750.400	100	131.725.439	100	144.897.984	100	396.373.823	Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian)
				Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	5.00	5.50	78.927.200	6.00	86.819.920	6.00	95.501.912	6.00	261.249.032	Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian)
4	01	07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	Persen	85	90	617.810.600	95	679.591.660	95	747.550.826	100	2.044.953.086	Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian)

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)
4	01	08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	76	87	82.566.000	100	81.740.340	100	89.914.374	100	254.220.714	Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian)
								167.374.236.890		171.055.376.583		182.570.497.988		521.000.111.461	
4	02		SEKRETARIAT DPRD												
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja	Persen	78	85	93.382.249.026	86	95.359.279.788	87	98.173.142.124	87	286.914.670.938	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Fasilitas Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	Persen	100	100	127.849.215.578	100	140.499.924.663	100	156.311.219.397	100	424.660.359.638	Sekretariat DPRD
								221.231.464.604		235.859.204.451		254.484.361.521		711.575.030.576	
5	01		PERENCANAAN												
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	87.11	87.13	21.195.710.865	87.15	22.888.346.356	87.17	25.177.180.993	87.17	69.261.238.214	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Persen	96.20	100	6.327.594.514	100	6.614.353.965	100	6.344.789.361	100	19.286.737.840	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	2.847.735.070	100	3.132.508.577	100	3.445.759.435	100	9.426.003.082	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
								30.371.040.449		32.635.208.898		34.967.729.789		97.973.979.136	
5	02		KEUANGAN												
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	84	87	29.426.250.000	87.5	30.897.562.500	88	32.442.440.625	88	92.766.253.125	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	Persen	100	100	1.675.800.000.000	100	1.271.189.836.280	100	1.386.564.328.080	100	4.333.554.164.360	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persen	N/A	43.00	5.234.539.351	46.00	5.496.266.319	47.00	5.771.079.634	47.00	16.501.885.304	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persen	100	100	1.284.123.149	100	1.348.329.306	100	1.415.745.772	100	4.048.198.227	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	84,13	87	140.780.436.350	88	141.607.665.000	88	142.447.750.000	88	424.835.851.350	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	100%	100%	50.400.000	100%	50.400.000	100%	51.075.000	100%	151.875.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	Persen	98,79	100	716.400.000	100	718.200.000	100	720.000.000	100	2.154.600.000	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD, PPRD Bapenda	Persen	91,8	100	14.783.597.500	100	14.802.266.200	100	14.827.900.000	100	44.413.763.700	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	52,63	60,45	500.000.000	56,23	500.000.000	56,23	500.000.000	56,23	1.500.000.000	Badan Pendapatan Daerah
								1.868.575.746.350		1.466.610.525.605		1.584.740.319.111		4.919.926.591.066	

Kode			BIDANG Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)		
5	03	01	KEPEGAWAIAN												
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja	Nilai	85,73	86	36.636.327.728	86,5	36.636.327.728	87	36.636.327.728	87	109.908.983.184	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	Nilai	52,71	59,00	8.532.267.330	60,00	8.958.880.697	61,00	9.406.824.731	61	26.897.972.758	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							45.168.595.058		45.595.208.425		46.043.152.459		136.806.955.942		
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus Pengembangan SDM berbasis Kompetensi	Persen	100	100	4.119.409.794	100	4.325.380.284	100	4.541.649.298	100	12.986.439.376	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							4.119.409.794		4.325.380.284		4.541.649.298		12.986.439.376		
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	78	79	14.225.000.000	80	15.397.500.000	81	16.837.250.000	81	46.459.750.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	Persen	75	100	12.125.000.000	100	13.550.000.000	100	15.000.000.000	100	40.675.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
				Persentase Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi Pendaftarannya	Persen	100	100	375.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	1.325.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
							26.725.000.000		29.397.500.000		32.337.250.000		88.459.750.000		
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG												
5	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80,96	82	6.500.000.000	82	6.800.000.000	82	7.000.000.000	82	20.300.000.000	Badan Penghubung
5	07	02	Program Pelayanan Penghubung	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	Persen	84,91	90	3.860.000.000	90	4.139.000.000	90	4.325.000.000	90	12.324.000.000	Badan Penghubung
							10.360.000.000		10.939.000.000		11.325.000.000		32.624.000.000		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01		INSPEKTORAT DAERAH												
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	85	87	23.650.000.000	87,5	24.760.000.000	88	25.117.000.000	88	73.527.000.000	Inspektorat
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	95	100	2.469.000.000	100	3.245.000.000	100	4.237.000.000	100	9.951.000.000	Inspektorat
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Persen	90	100	1.240.000.000	100	1.975.000.000	100	2.475.000.000	100	5.690.000.000	Inspektorat
							27.359.000.000		29.980.000.000		31.829.000.000		89.168.000.000		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82,92	83	13.168.168.092	83,5	13.324.168.092	84	13.424.168.092	84	39.916.504.276	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	Persen	N/A	90	961.995.144	92	1.161.995.144	94	1.361.995.144	94	3.485.985.432	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	Persen	N/A	80	18.000.000.000	85	18.000.000.000	90	18.000.000.000	90	54.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	Persen	N/A	80	325.000.000	85	525.000.000	90	725.000.000	90	1.575.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	Persen	16,6	80	441.995.144	85	641.995.144	90	941.995.144	90	2.025.985.432	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Sistem Kewaspadaann Terintegrasi	Persen	77	90	1.215.092.192	95	1.518.865.240	100	2.294.808.502	100	5.028.765.934	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							34.112.250.572		35.172.023.620		36.747.966.882		106.032.241.074		
TOTAL PAGU							6.460.466.448.757		6.185.746.905.683		6.464.685.814.290		19.110.899.168.730		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja, yang merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Selanjutnya indikator kinerja tersebut diklasifikasikan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*Output*) adalah jumlah barang atau jasa yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam waktu tertentu, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk kegiatan lebih lanjut. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap tujuan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Secara detail IKU Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	TARGET		
				2024	2025	2026
				TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	6	7	8
1	Angka Kemiskinan	Persen	4,53	4,07	4,06	3,97
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,47	5,75 (5,25- 6,25)	5,75 (5,25- 6,25)	5,85 (5,35- 6,35)
3	Angka Pengangguran	Persen	5,37	2,57	2,01	1,41
4	Indeks Gini	Nilai	0,38	0,366	0,364	0,362
5	Laju Inflasi	Persen	2,07	3±1	3±1	3±1
6	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	58,24	60,45	55,33	55,33
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	75,69	76,50	76,58	76,65
8	Angka umur harapan hidup	Tahun	72,24	72,60	72,70	72,80
9	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,06	9,8	10	10,6
10	Indeks Daya Saing Krama Bali	Nilai	N/A	63,189	64,887	66,451
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	66,40	67,97	68,47	68,98
16	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Nilai	63,21	71,81	71,93	72,04
17	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,44	12,37	13,26	14,58
18	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	93,00	92,45	94,34	96,24
19	Persentase Energi Baru Terbarukan	Persen	7,04	8,45	10,65	12,06
20	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	100	100	100	100
21	Persentase Desa Adat Mandiri	Persen	N/A	14,06	15,07	16,74
22	Indeks Pemajuan Tradisi	Persen	N/A	15,00	15,00	20,00
23	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Nilai	N/A	65	66	67
24	Indeks Provinsi Hijau	Nilai	N/A	67,05	67,57	68,13
25	Indeks Infrastruktur	Nilai	N/A	73,75	76,27	78,46
26	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	71,06	76,18	78,34	80,10
27	Rasio Konektivitas Transportasi	Nilai	N/A	0,86	0,88	0,9
28	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	N/A	79,85	82,07	84,28

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	TARGET		
				2024	2025	2026
				TARGET	TARGET	TARGET
29	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Nilai	N/A	96,50	90,00	84,00
30	Indeks demokrasi	Nilai	75,35	76,00	77,00	78,00
31	Indeks resiko bencana	Nilai	124,19	115,14	111,69	108,34
32	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71	74,00	75	76,00
33	Indeks Merit Sistem	Nilai	0,80	0,82	0,83	0,85
34	Nilai AKIP	Nilai	79	81	81	82
35	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
36	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	84,53	88,5	89	89,5
37	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	Nilai	70	82,5	83	83,5
38	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	27,02	65,75	66,75	67,75

8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2024-2026 dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara detail disajikan dalam Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	(2,47)	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	5,85 (5,35-6,35)	5,85 (5,35-6,35)	Bappeda
2	Laju Inflasi	Persen	2,07	3±1	3±1	3±1	3±1	Bappeda
3	PDRB per kapita	Jumlah	50,38 juta	56 - 61 juta	58 - 62 juta	59- 64 juta	59- 64 juta	Bappeda
4	Indeks Gini	Persen	0,38	0,366	0,364	0,362	0,362	Bappeda
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	4,53	4,07	4,06	3,97	3,97	Bappeda
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	75,69	76,5	76,58	76,65	76,65	Bappeda
7	Angka Melek Huruf	Persen	95	95,8	96,8	97	97	Disdikpora
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,06	9,8	10	10,6	10,6	Disdikpora
9	Angka usia harapan hidup	tahun	72,2	72,6	72,7	72,8	72,8	Dinas Kesehatan
10	Persentase balita gizi buruk	Persen	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	Dinas Kesehatan
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	Dinas Kesehatan
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	Dinas Kesehatan
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2.580.523	2.709.549	2.845.026	2.987.273	2.987.273	DisnakerESDM
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	73,54	77,22	81,08	85,13	85,13	DisnakerESDM
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,37	2,57	2,01	1,41	1,41	Bappeda
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,53	88,5	89	89,5	89,5	Biro Organisasi
17	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	88,20	92,90	94,40	96,00	96,00	Distanpangan
19	Penguatan cadangan pangan	Persen	0	2,30	3,40	4,60	4,60	Distanpangan
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	1,58	1,59	1,60	1,61	1,61	Distanpangan
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	1,73	1,74	1,75	1,76	1,76	Distanpangan
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	2,13	2,14	2,15	2,16	2,16	Distanpangan
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	4,94	4,95	4,96	4,97	4,97	Distanpangan
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Nilai Tukar Petani	Persen	92,84	98,00	100,00	102,00	102,00	Distanpangan
2	Angka kriminalitas	Kasus	1.937	1.850	1.750	1500	1500	BPS
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	16,02	18,56	18,60	19,34	19,34	DisPariwisata
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	10,61	10,62	10,63	10,64	10,64	Distanpangan
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Pendidikan							
1.1	Angka Partisipasi Kasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persen	91,08	104,68	104,9	105	105	Disdikpora
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan							
1.2.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	31,84	100	100	100	100	Disdikpora
1.3	Angka Partisipasi Murni							
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	75,80	85,00	87,50	90,00	90,00	Disdikpora
1.4	Angka Partisipasi Sekolah							
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	75,80	100	100	100	100	Disdikpora
1.5	Angka Putus Sekolah							
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,20	0,18	0,16	0,12	0,12	Disdikpora
1.6	Angka Kelulusan							
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	99,98	99,82	99,84	99,88	99,88	Disdikpora
1.7	Angka Transisi (AT)							
1.7.1	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persen	93,77	99,5	99,7	99,8	99,8	Disdikpora
1.8	Fasilitas Pendidikan							
1.8.1	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	66,89	98,35	98,40	98,45	98,45	Disdikpora
1.9	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persen	17,67	23,98	23,98	24	24	Disdikpora
1.10	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persen	77,79	67	67,03	67,08	67,08	Disdikpora
	- SMA/MA (per 1000 murid)		80,11	67	67,03	67,08	67,08	Disdikpora
	- SMK (per 1000 murid)		75,47	67,08	67,08	68	68	Disdikpora

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.11	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata							
1.11.1	SMA/SMK/MA	Persen	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	Disdikpora
1.12	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	95	99,92	99,94	99,96	99,96	Disdikpora
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95	93,35	93,38	94	94	Disdikpora
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV							Disdikpora
1.14.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persen	97,63	97,92	97,96	97,98	97,98	Disdikpora
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5,8	9,5	9,5	9,5	9,5	Dinas Kesehatan
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	Dinas Kesehatan
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	Dinas Kesehatan
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	189,65	65	65	65	65	Dinas Kesehatan
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persen	1,45	1,61	1,61	1,61	1,61	Dinas Kesehatan
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk							
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persen	0,028	0,027	0,026	0,026	0,026	Dinas Kesehatan
2.6.2	Rasio klinik	Persen	0,041	0,056	0,060	0,065	0,065	Dinas Kesehatan
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persen	0,117	0,113	0,112	0,111	0,111	Dinas Kesehatan
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persen	0,0165	0,0166	0,0166	0,0167	0,0167	Dinas Kesehatan
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persen	0,97	0,98	0,99	1,00	1,00	Dinas Kesehatan
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk							
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persen	2,66	2,67	2,68	2,69	2,69	Dinas Kesehatan
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persen	1,23	1,25	1,26	1,27	1,27	Dinas Kesehatan
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	85,00	88,50	88,50	88,50	88,50	Dinas Kesehatan
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	96,2	96,8	96,8	96,8	96,8	Dinas Kesehatan
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	96,79	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen						Dinas Kesehatan
2.14	Case Detection Rate TBC	Persen	25	40	42	44	44	Dinas Kesehatan
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persen	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	100	70	60	50	50	Dinas Kesehatan
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.19	Angka kematian Malaria	Persen	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	0,001	<1	<1	<1	<1	Dinas Kesehatan
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persen	82	85	87	90	90	Dinas Kesehatan
2.22	Cakupan kunjungan bayi	Persen	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	Dinas Kesehatan
2.23	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.24	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	0,803	0,808	0,810	0,811	0,811	Dinas Kesehatan
2.25	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	90,3	96	96	96	96	Dinas Kesehatan
2.26	Cakupan Pelayanan nifas	Persen	95,1	98	98	98	98	Dinas Kesehatan
2.27	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	73,7	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.28	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	78,2	97,7	97,7	97,7	97,7	Dinas Kesehatan
2.29	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.30	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	86,1	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.31	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	76,84	81,18	82,04	83,13	83,13	PUPR
3.2	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persen	48,33	48,63	48,74	48,87	48,87	PUPR
3.4	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	79,01	79,27	85,02	88,07	88,07	PUPR
3.5	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persen	68	75	76	77	77	PUPR
3.6	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Persen	10,25	14,78	16,9	19,01	19,01	PUPR
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persen	100	100	100	100	100	PUPR
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	PUPR
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	Persen	40	44	47	50	50	PUPR
3.10.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persen	91,35	93,05	94,35	95,51	95,51	PUPR

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.10.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persen	89,5	95.1	96	97	97	PUPR
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persen	93	96	97	98	98	PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.5	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persen	100	100	100	100	100	PUPR
4.6	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	8	5,94	4,89	3,84	3,84	PUPR
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	30,32	31,00	31,01	31,02	31,02	Satpol PP
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	Satpol PP
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	35,57	36,00	36,01	36,02	36,02	Satpol PP
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	44,65	44,68	44,69	44,70	44,70	Satpol PP
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100	100%	Satpol PP
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	0	0,43	0,64	0,862	0,862	DSP3A
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	0,76	1,87	1,87	1,88	1,88	DSP3A
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	12	25,9	26,08	26,21	26,21	DSP3A
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	14,89	18,08	19,14	20,21	20,21	DSP3A
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	0	5	10	15	15	DSP3A
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	DSP3A
6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100	100	DSP3A
6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	0,8	0,92	0,92	0,92	0,92	DSP3A
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	Tenaga Kerja							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 Perusahaan	0,011	0,009	0,008	0,007	0,024	DisnakerESDM
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	50	100	100	100	100	DisnakerESDM
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	63,54	66,23	66,49	66,86	66,53	DisnakerESDM
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persen	6,57	20,53	21,01	21,55	63,08	DisnakerESDM
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	42,87	43,37	43,87	44,37	44,37	DisnakerESDM
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	4,01	21,04	21,62	22,26	64,91	DisnakerESDM
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen	16,02	20,24	20,45	21,74	59,78	DisnakerESDM
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	61,32	19,39	20,73	22,02	20,73	DisnakerESDM
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	DisnakerESDM
01.10	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	DisnakerESDM
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	45,59	46,5	47,55	48,59	48,59	DSP3A
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	16,36	17,45	18,5	19,56	19,56	DSP3A
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	47,33	48,15	48,35	48,45	48,45	DSP3A
2.4	Rasio KDRT	Persen	0,013	0,011	0,011	0,01	0,01	DSP3A
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	67,61	68,25	68,75	68,95	68,95	DSP3A
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	DSP3A
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	DSP3A
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	DSP3A

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	DSP3A
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100	DSP3A
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	DSP3A
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	DSP3A
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	97,20	97,30	97,35	97,45	97,45	DSP3A
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	87,11	87,18	87,24	97,27	97,27	DSP3A
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	74,82	74,94	75,00	75,02	75,02	DSP3A
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	25,28	26,79	27,70	28,7	28,70	DSP3A
2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	95,00	95,10	95,18	95,26	95,26	DSP3A
3	Pangan							
3.1	Ketersediaan Pangan Utama							
3.1.1	Padi	Ton	680.802	684.887	689.681	695.198	695.198	Distanpangan
3.1.2	Jagung	Ton	67.992	68.400	68.879	69.430	69.430	Distanpangan
3.1.3	Kedelai	Ton	3.278	3.298	3.321	3.347	3.347	Distanpangan
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	5.414	5.446	5.485	5.528	5.528	Distanpangan
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	193.043	194.201	195.561	197.125	197.125	Distanpangan
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	213	214	216	218	218	Distanpangan
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	13.792	13.875	13.972	14.084	14.084	Distanpangan
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2.672	2.675	2.680	2.685	2.690	Distanpangan
		Gram/Kap/Hari	62,90	57,00	57,00	57,00	57,00	Distanpangan
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	95,80	95,80	95,90	96,00	96,00	Distanpangan
4	Pertanahan							
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persen	30	60	70	80	80	PUPR
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	DKLH
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	DKLH
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	DKLH
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	2	1	1	1	3	DKLH
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	DKLH
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,28	88,59	88,65	88,70	88,70	DKLH
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	54,29	63,05	63,10	63,15	63,15	DKLH
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,11	41,66	41,66	41,66	41,66	DKLH
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,14	69,90	69,95	69,98	69,98	DKLH
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	0	1	1	1	3	DKLH
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1	1	1	1	Bappeda
5.12	Jumlah limbah B3 yang dikelola		9	9	9	9	9	DKLH
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persen	100	100	100	100	100	DKLH
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	10	68	70	72	72	DKLH
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1	1	1	DKLH
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persen	0,067	0,067	0,067	0,067	0,201	DKLH
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persen	0,067	0,067	0,067	0,067	0,201	DKLH
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persen	0,067	0,067	0,067	0,067	0,201	DKLH
5.19	Penetapan hak MHA	Persen	100	100	100	100	100	DKLH
5.20	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	60	30	30	30	90	DKLH
5.21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	60	30	30	30	90	DKLH
5.22	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	7 Adiwiyata	45	45	60	150	DKLH
5.23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	2	2	2	2	6	DKLH

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbunan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	402.343,88	727.477,025	729.878,916	729.878,916	729.878,916	DKLH
5.25	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persen	44,96	71	70	70	70	DKLH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persen	0,99	1	1	1	1	DPMD DUKCAPIL
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	98,46	98,96	99,46	99,96	99,96	DPMD DUKCAPIL
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	47,94	67,38	69,38	71,38	71,38	DPMD DUKCAPIL
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	DPMD DUKCAPIL
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	DPMD DUKCAPIL
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,6	100	100	100	100	DPMD DUKCAPIL
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	46,98	60	62	64	64	DPMD DUKCAPIL
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	65,09	88,05	91,02	94,35	94,35	DPMD DUKCAPIL
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persen	7,96	31,84	39,80	47,76	47,76	DPMD DUKCAPIL
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persen	16,97	25,25	27,48	29,71	29,71	DPMD DUKCAPIL
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	DPMD DUKCAPIL
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persen	70,78	79	79,5	80	80	DPMD DUKCAPIL
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	275	330	335	340	340	DPMD DUKCAPIL
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	97,49	98,43	98,75	99,06	99,06	DPMD DUKCAPIL
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	DPMD DUKCAPIL
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	DPMD DUKCAPIL
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	100	100	100	100	100	DPMD DUKCAPIL
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	20	50	60	66	66	DPMD DUKCAPIL
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	1	1	1	1	DPMD DUKCAPIL
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	3	6	7	8	8	DPMD DUKCAPIL
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	11	18	22	26	26	DPMD DUKCAPIL
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1,42	2	2	2	2	DPMD DUKCAPIL
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	53,44	54	54,5	55	55	DPMD DUKCAPIL
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	15,5	28	27,5	27	27	DPMD DUKCAPIL
8.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,9	9,86	9,7	9,5	9,5	DPMD DUKCAPIL
8.12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	45,42	50	51	52	52	DPMD DUKCAPIL
8.13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	15,1	23	23	23	23	DPMD DUKCAPIL
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	DPMD DUKCAPIL
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	59,93	62,0	63,0	64,0	64,0	DPMD DUKCAPIL
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	26,03	26,2	26,4	26,9	26,9	DPMD DUKCAPIL
8.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	36,8	42	43	44	44	DPMD DUKCAPIL
8.18	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	67,05	68	69	70	70	DPMD DUKCAPIL
8.19	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	98,29	100	100	100	100	DPMD DUKCAPIL
8.20	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	86,17	93	94	95	95	DPMD DUKCAPIL
8.21	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	1	1	1	DPMD DUKCAPIL
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	DPMD DUKCAPIL
8.23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	100	100	100	DPMD DUKCAPIL
8.24	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	21,7	21,7	21,8	21,9	21,9	DPMD DUKCAPIL
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum							Dishub

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	1.323.232	1.720.202	2.236.262	2.907.141	2.907.141	Dishub
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	1.797.106	1.976.817	2.174.498	2.391.948	2.391.948	Dishub
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	3.776.591	3.814.357	3.833.240	3.852.123	3.852.123	Dishub
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	117	197	207	217	217	Dishub
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	92	110.200	125.150	130.120	130.120	Dishub
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis							
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	34	40	40	40	40	Dishub
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	1	1	1	1	Dishub
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20	20	20	Dishub
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	3	3	3	3	3	Dishub
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	28,89	38,58	43,74	49,48	49,48	Dishub
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0002349	0,00023	0,000227	0,00022	0,00022	Dishub
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
9.9.1	Angkutan Darat							
	- Orang	Jumlah	1.323.232,00	1.720.202,00	2.236.262,00	2.907.141,00	2.907.141,00	Dishub
	- Barang	Jumlah	147.124,00	166.240,00	169.250,00	171.350,00	171.350,00	Dishub
9.9.2	Angkutan Laut							
	- Orang	Jumlah	1.797.106	1.976.817	2.174.498	2.391.948	2.391.948	Dishub
	- Barang	Jumlah	83.935.216	100.722.259	120.866.711	145.040.053	145.040.053	Dishub
9.9.3	Angkutan Udara							
	- Orang	Jumlah	3.776.591	3.814.357	3.833.240	3.852.123	3.852.123	Dishub
	- Barang	Jumlah	63.085.539	63.716.394	64.031.822	64.662.677	64.662.677	Dishub
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun							
9.10.1	Dermaga							
	- Orang	Jumlah	1.797.106	1.976.816,6	2.174.498	2.391.948	2.391.948	Dishub
	- Barang	Jumlah	83.935.216	100.722.259	120.866.711	145.040.053	145.040.053	Dishub
9.10.2	Bandara							
	- Orang	Jumlah	3.776.591	3.814.357	3.833.240	3.852.123	3.852.123	Dishub
	- Barang	Jumlah	63.085.539	63.716.394	64.031.822	64.662.677	64.662.677	Dishub
9.10.3	Terminal							
	- Orang / Barang	Jumlah	1323232/147124	1720202/166240	2236262/16925	2907141/171350	2907141/171350	Dishub
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		120	120	120	120	120	Diskominfo
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	100	100	100	100	100	Diskominfo
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon							
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persen	94,10	96,95	97,92	98,9	98,90	Diskominfo
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persen	2,21	1,89	1,8	1,71	1,71	Diskominfo
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persen	87,8	94,09	95,97	97,89	97,89	Diskominfo
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	25	26,14	26,93	26,93	26,93	Diskominfo
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	68,94	70,45	71,56	72,75	72,75	Koperasi UKM
11.2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	0,04	4,00	4,00	4,00	12,00	Koperasi UKM
11.3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	0,00	8,00	8,00	8,00	24,00	Koperasi UKM
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	5.128	5.500	6.000	6.500	6.500	DPMPPTSP
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	12,95	13,00	13,25	13,50	13,50	DPMPPTSP
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	4,43	5	5,5	6	6	DPMPPTSP
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persen	16,98	17	17,25	17,5	17,5	DPMPPTSP
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	92,554	88,5	89	89,5	89,5	DPMPPTSP
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	65	81,5	82	82,02	82,02	Disdikpora
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	0	0,88	0,92	1	1	Disdikpora
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	56	60,25	60,35	60,78	60,78	Disdikpora
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	40	49	51	55	55	Disdikpora

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persen	23	16	18	18,7	18,7	Disdikpora
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	173	215	223	230	230	Disdikpora
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Cabor	26	30	33	35	35	Disdikpora
14	Statistik							
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9	9	9	Diskominfo
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1	1	1	1	1	Diskominfo
15	Persandian							
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	Diskominfo
16	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	6	6	6	6	DisBud
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan							DisBud
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	22.809	20	20	20	22.869	DisBud
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	533	5	5	5	568	DisBud
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	680	5	5	5	695	DisBud
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	5	5	5	DisBud
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	532	533	534	535	535	DisBud
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu							
16.3.1	Situs Cagar Budaya	Jumlah	122	122	122	122	122	DisBud
16.3.2	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	4	4	4	4	4	DisBud
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	220	220				DisBud
17	Perpustakaan							
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	6	5	5,5	6	16,5	Biro Organisasi
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	2869	300	350	375	1025	Biro Organisasi
17.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	48	120	125	130	375	Biro Organisasi
17.4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	42.659	300	350	375	1025	Biro Organisasi
17.5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	34	27	23	21	27	Biro Organisasi
18	Kearsipan							
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	20	50	100	100	20	Biro Umum
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	100	50	75	100	100	Biro Umum
LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	Pariwisata							
1.1	Kunjungan Wisatawan							
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Orang	4.301.592	7.500.000	8.500.000	10.000.000	10.000.000	DisPariwisata
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Orang	51	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	DisPariwisata
1.2	Lama Tinggal Wisatawan							
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	2,09	2,65	2,75	2,85	2,85	DisPariwisata
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	2,87	3,65	3,75	3,85	3,85	DisPariwisata
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persen	2,07	26,33	32,04	42,18	42,18	DisPariwisata
2	Pertanian							
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persen	1,58	1,59	1,60	1,61	1,61	Distanpangan
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persen	1,73	1,74	1,75	1,76	1,76	Distanpangan
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	0	2,13	2,14	2,15	2,17	2,17	Distanpangan
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persen	4,94	4,96	4,99	5,03	5,03	Distanpangan
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar							
2.5.1	Padi	Ku/Ha	60,59	60,95	61,38	61,87	61,87	Distanpangan
2.5.2	Jagung	Ku/Ha	43,21	43,47	43,77	44,08	44,08	Distanpangan
2.5.3	Kedelai	Ku/Ha	15,79	15,88	16,00	16,11	16,11	Distanpangan
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	1	1	1	1	1	Distanpangan
3	Kehutanan							
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persen	16,24	6,61	6,82	7,46	7,46	DKLH
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	13	31.658,84	31.626,18	31.593,52	31.593,52	DKLH
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	71,19	70	70	70	70	DKLH
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	100	100	100	100	100	DisnakerESDM
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	1,54	1,52	1,56	1,48	1,48	DisnakerESDM

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Perdagangan							
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	95,96	96	96	96	96	DPP
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persen	17,25	19,41	21,56	23,72	23,72	DPP
6	Perindustrian							
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persen	1,5	1	1	1	1	Disperindag
7	Transmigrasi							
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	0	0	0	0	0	DisnakerESDM
8	Kelautan dan Perikanan							
8.1	Produksi Perikanan	Ton	141.580,89	156.667.96	172.334.76	189,568.24	189,568.24	DKP
8.2	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/tahun	44,81	49,29	54,22	59,64	59.64	DKP
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	100	100	100	100	100	DKP
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persen	78.33	82.24	86.35	90.66	90.66	DKP
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	99.902,39	104,897.51	110,142.38	115,649.51	115,649.51	DKP
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persen	80%	84%	88%	92%	92%	DKP
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100.19	100.22	100.25	100.28	100.28	DKP
PENUNJANG URUSAN								
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	Bappeda
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	Bappeda
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	Bappeda
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2.2	Persentase SILPA	Persen	405,66	6	6	6	6	BPKAD
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	18,41	6	6	6	6	BPKAD
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persen	N/A	0	0	0	0	BPKAD
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	27,89	20	20	20	20	BPKAD
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	7,07	10	10	10	10	BPKAD
2.7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1.127.384.356.596	1.192.689.709.947	1.075.417.107.659	1.129.187.963.042	1.129.187.963.042	BPKAD
2.8	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKD
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen	30	30	30	30	30	BKDPSDM
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	28.02	2,04	2,4	2,66	2,66	BKDPSDM
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	25,07	10	10,1	10,43	10,43	BKDPSDM
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	42	42	42	42	42	BKDPSDM
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Orang	4.277	3.489	3.286	3.076	3.076	BKDPSDM
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	6.309	5.636	5.252	4.881	4.881	BKDPSDM
4	Penelitian dan Pengembangan							
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	Brida
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	Brida
	Penerapan SIDA:							Brida
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	16,6	80	85	90	90	Brida
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persen	77,8	80	85	90	90	Brida
5	Pengawasan							
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	87,38	85	87	90	95	Inspektorat
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	100	85	87	90	95	Inspektorat
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persen	81,43	85	87	90	95	Inspektorat
6	Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekwan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekwan
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekwan

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 memuat rencana strategis daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Penyusunan RPD ini telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (tahapan keempat tahun 2022-2025), serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis. RPD ini merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali, sebagai rencana tahunan pemerintah daerah.

Dalam upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bali, penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 tetap berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, RKP tahunan, RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025, serta RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, serta isu-isu strategis yang berkembang pada tahun berkenan.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran pemerintahan daerah, termasuk DPRD, masyarakat, dan dunia usaha di Provinsi Bali wajib mendukung program RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini dengan sebaik-baiknya.

2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan menjaga konsistensi antara RPD dengan dokumen rencana Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen rencana pembangunan tetap terjaga.
4. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2024-2026 dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah wajib mengevaluasi pencapaian target kinerja program yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Penjabat (Pj) Gubernur Bali.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 sebagai dasar penyusunan perubahan RPD dan sebagai bahan penyusunan rancangan teknokratis RPJMD periode berikutnya.
7. RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi *existing*;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. Terjadi Perubahan yang mendasar; dan/atau

- d. Dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

CASCADING KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI 2024-2026

LAMPIRAN 1-7

[illegible]

CASCADING KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI 2024-2026

LAMPIRAN 1-7

TUJUAN

SASARAN PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PRIORITAS

Meningkatkan Standar Daya Manusia (SDM) Kota Bali yang unggul dan berdaya saing						
INDIKATOR TUJUAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Manusia	persentase hasil pembangunan dari waktu daerah,seluruh dalam rpg daerah dari pembangunan yaitu tenaga kerja, pengetahuan,tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Sumber data : BPS	Nilai	75,92	76,01	76,01	

Meningkatnya kualitas pendidikan						
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	
Angka rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal. Sumber data : BPS	Tahun	9,80	10,00	10,60	

Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan						
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah	Perbandingan penduduk yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Persen	101,25	101,5	101,73	
Persentase Sekolah Tingkat Pendidikan Menengah dan Khasa yang terakreditasi baik	Jumlah sekolah pendidikan menengah dan khasa yang terakreditasi A dan B dibagi jumlah pendidikan menengah dan khasa	Persen	93	93,1	93,2	

Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga						
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	
a. Persentase Prestasi Pemuda	Perbandingan pemuda yang berpartisipasi dengan seluruh pemuda di Provinsi Bali	Persen	60,00	61,00	62,00	
b. Persentase Prestasi olahraga	Perbandingan atlet yang berpartisipasi dengan seluruh atlet di Provinsi Bali	Persen	51,50	51,55	51,60	

Meningkatnya Daya Saing dan Perilaku dan Perilaku Kerja Kota Bali						
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	
Indeks Daya Saing Kota Bali	Komponen dari persentase pemuda aktif, persentase partisipasi keolahragaan, IDG, Indeks Pendidikan Anak, Persentase tenaga kerja yang memiliki jenjang sosial dan persentase tenaga kerja yang berkecukupan kompetensi. sumber data : BPS dan perangkat daerah	Nilai	63,1885	64,887	66,451	

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perilaku Anak						
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	
a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	rata-rata aritmatika dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam politik, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. sumber data : BPS	Nilai	72,20	72,23	72,25	
b. Indeks perlindungan Anak (IPA)	Ukuran untuk mengetahui capaian perlindungan anak berdasarkan 5 faktor sumber data BPS/KemendPPPA	Nilai	77,52	77,93	78,12	

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja						
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	
Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	Jumlah tenaga kerja/pemati kerja yang berkecukupan kompetensi terhadap jumlah tenaga kerja/pemati kerja yang dipg kompetensi	Persen	82,94	86,74	89,84	

Meningkatnya Perilaku dan Perilaku Kerja						
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	
Persentase kepatuhan jaman sosial ketenagakerjaan tenaga kerja formal	Jumlah kepatuhan BPJS ketenagakerjaan tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja formal	Persen	43,37	43,67	44,37	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program pemenuhan upan kesehatan perangan dan upan kesehatan masyarakat	Persentase Desa UK1	Capaian 80% Kabupaten Kota dengan inovasi dasar lengkap	Persen	96	97	98	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas yang terakreditasi	Rumah Sakit yang terakreditasi	Persen	100	100	100	
	Cakupan Keperawatan JEN	Jumlah keperawatan JEN dibagi jumlah penduduk	Persen	98,2	98,3	98,5	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar	Persen	95	96	97	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit desa, RSUD Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, UPD B&P, UPD KESDAL, UPD L&PPT melalui survei	Nilai	88,3	89	90	
Program peningkatan kapabilitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Jumlah puskesmas yang memenuhi ketersediaan 9 tenaga kesehatan dibagi jumlah seluruh puskesmas	Persen	75	76	77	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Usia 16-18 tahun	Perbandingan Pendidikan usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah dengan penduduk usia 16-18 tahun	Angka	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Disabilitas Usia 4-18 tahun	Perbandingan Pendidikan disabilitas usia 4-18 tahun yang sedang bersekolah dengan penduduk disabilitas usia 4-18 tahun	Angka	100,00	100,00	100,00	
	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	Perbandingan lulusan siswa SMK yang diterima bekerja dengan lulusan seluruh siswa SMK	Persen	50,25	50,50	50,75	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kependidikan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	Perbandingan pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dengan jumlah seluruh pemuda	Persen	71,50	72,00	72,50	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang berpartisipasi	Perbandingan cabang olah raga yang berpartisipasi dengan seluruh cabang olah raga	Persen	50,00	50,50	51,00	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga yang menerapkan P3D dan PPKG	Jumlah lembaga yang menerapkan pengarusutamaan berbasis gender dibagi jumlah lembaga dibagi 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHAK)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHAK)	Ukuran untuk mengetahui capaian pemenuhan hak anak berdasarkan 4 faktor sumber data BPS/KemendPPPA	Nilai	75,90	76,20	76,50	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Berkecukupan Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi kompetensi pada tahun n terhadap target 3 tahun (200 orang)	Persen	30%	34%	36%	Dinas Ketenagakerjaan dan Bangun Standar Daya Manusia
	Persentase Calon Tenaga Kerja Berkecukupan Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan pada UPD B&P yang disertifikasi kompetensi terhadap total peserta pelatihan yang dipg kompetensi	Persen	70%	75%	80%	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Hubungan Industrial	Persentase Pemenuhan Peraturan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang telah menegahkan PP sesuai dengan Tahun n terhadap total perusahaan yang ada di Bali (dari rekrutmen kerja), berdasarkan data perusahaan Kabupaten Kota, data dasar perusahaan tahun 2021	Persen	10,44	11,97	13,49	Dinas Ketenagakerjaan dan Bangun Standar Daya Manusia
Program Pengarusutamaan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Pematuhan Peraturan Perusahaan di Bidang Jumlah	Jumlah perusahaan yang pematuhan seluruh program BPJS ketenagakerjaan (8 program seperti GHI, JKK, JKN dan JP) terhadap total perusahaan di Bali berdasarkan data WLP online, data dasar Tahun 2021	Persen	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Perusahaan yang Menegahkan Penggajian K3	Jumlah perusahaan yang menegahkan K3 melalui pengisian logbook kerja keselamatan kerja terhadap perusahaan yang diwajibkan pada tahun n yang dilaksanakan oleh UPD Balai Higienitas KK (realisasi atau target yang ditetapkan)	Persen	100,00	100,00	100,00	

CASCADING KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI 2024-2026

TUJUAN

SASARAN PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PRIORITAS

Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali					
INDIKATOR TUJUAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Pembangunan Kebudayaan	tercapainya komposisi 22 indikator yang dikelompokkan dalam tujuh domain. Tujuh domain tersebut dikelompokkan secara global, meliputi: Domains Ekonomi, Pendidikan, Pemerintahan, Partisipasi Sosial, Kesehatan Gender, Komunikasi, dan Wisata Budaya, sumber data: Kemdikbud	Nilai	67,07	68,47	68,98

Meningkatnya Kesejahteraan Desa Adat					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Desa Adat Mandiri	Penjumlahan desa adat mandiri dibagi jumlah desa adat dikali 100%, sumber data: perangkat daerah	Persen	14,06	15,07	16,74

Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Pemajuan Tradisi	Komposit dari persentase jejaring kewajiblerasan adat, Budaya Spiritual dan Kewajiblerasan Rakyat, sumber data: perangkat daerah	Nilai	13,00	15,00	20,00

Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Pemajuan Kebudayaan	Komposit dari capaian budaya tak benda yang telah ditetapkan dan capaian cagar budaya yang ditetapkan, sumber data: perangkat daerah	Nilai	65	66	67

Terwujudnya Kesejahteraan Desa Adat					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kerdipan Krana Bali	Jumlah Desa Adat yang mandiri dibagi persentase jumlah Desa Adat dikali 100%	Persen	10,38	10,72	11,72

Meningkatnya Kualitas Kelahiran dan Dukungan Pengembangan Budaya Spiritual Masyarakat Bali					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Penyusunan kebijakan dan strategi terkait budaya spiritual	Jumlah kebijakan pengembangan budaya spiritual dibagi jumlah kebijakan lain menurut budaya spiritual dikali 100%	Persen	15,00	15,00	20,00

Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Bali					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
a. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan dibagi jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terdaftar dikali 100%	Persen	10,2	10,2	10,2
b. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia	Jumlah objek warisan budaya tak benda yang ditetapkan dibagi jumlah warisan budaya tak benda yang terdaftar dikali 100%	Persen	5%	5%	5%

Meningkatnya Penguatan Inovasi dan Kearifan Intelektual Krana Bali					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Kearifan Intelektual Daerah yang terfasilitasi pendakarnya	Jumlah produk kearifan intelektual yang difasilitasi dibagi jumlah usulan Kearifan Intelektual	Persen	100	100	100

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Indeks Membangun Desa Adat	Perubahan indeks pemerintahan, pemerintahan, pemajuan budaya adat, dan pengembangan desa adat dibagi 8 sumber data: perangkat daerah	Nilai	0,709	0,8025	0,875	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Kewajiblerasan Rakyat	Persentase tindak lanjut kebijakan strategi yang mendukung pengembangan budaya spiritual	jumlah kebijakan yang mendukung pengembangan budaya spiritual dibagi dengan jumlah kebijakan lain pemerintahan daerah dan non pemerintahan daerah dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pelestarian Dan Penghinaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terlelela	Jumlah Cagar Budaya yang lestari dan terlelela dibagi jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dikali 100%	Persen	0,20	0,20	0,20	Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah ragam Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan pada even dibagi jumlahObjek Pemajuan Kebudayaan dikali 100%	Persen	5,00	5,00	5,00	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Jumlah senka yang teridentifikasi dibagi jumlah senka yang terdaftar dikali 100%	Persen	5,00	5,00	5,00	
Program Pemertanian Sejarah	Persentase Peningkatan Pemertanian Masyarakat Terting Sejarah dan Tradisi	Jumlah pelaku sejarah tradisi yang diberikan pembinaan terering pelestarian sejarah dan tradisi dibagi jumlah masyarakat pelaku sejarah tradisi yang ada di setiap Kabupaten Kota dikali 100%	Persen	5,00	5,00	5,00	
Program Pengabdian Masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	Total nilai survei dibagi jumlah pengumng dikali nilai rasio dikali 100%	Persen	78,00	79,00	80,00	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Penguatan dan Pengembangan Daerah	Persentase Kearifan Intelektual Yang Difasilitasi pendakarnya	Jumlah produk Kearifan Intelektual yang difasilitasi dibagi jumlah usulan Kearifan Intelektual	Persen	100,00	100,00	100,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

CASCADING KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI 2024-2026

TUJUAN

SASARAN PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PRIORITAS

Meningkatkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mengatasi perubahan iklim					
INDIKATOR TUJUAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Persepsi Hijau	Komposit dari 45% IKLH, 10% Persentase penurunan GRK, 20% Persentase Penyelenggaraan Perawatan Ruang, 10% Persentase EBT dan 15% persentase pengalihan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga; number data: perangkat daerah	Nilai	67,05	67,51	68,13

Terwujudnya layanan perawatan ruangan ruang wilayah					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase penyelenggaraan perawatan ruang	Realisasi penyelenggaraan perawatan ruang dengan indikator program dalam kriteria data ruang	Persen	92,45	94,34	96,24

Meningkatnya penggunaan energi bersih					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Penggunaan Energi Bersih Terbarukan	Revisi pemenuhan kapasitas EBT terhadap total kapasitas pembangkit	Persen	7,33%	8,60%	9,85%

Terlaksananya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase pengalihan sampah	Realisasi pengalihan sampah dibagi target pengalihan sampah dikali 100%	Persen	100	100	100

Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Capaian indikator IKLH tahun n dikurangi n-1 dikali 100%	Nilai	-0,59	0,12	0,11

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perawatan Ruang					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan perawatan ruang	Jumlah rata-rata nilai pelaksanaan komponen kinerja tahap penyelenggaraan perawatan ruang yang dicapai dibagi jumlah nilai keseluruhan komponen kinerja penyelenggaraan perawatan ruang yang diperoleh; semua kriteria penilaian per Undang-Undangan	Persen	93,62%	94,34	96,24

Terperolehnya Ketahanan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Pemenuhan EBT	Jumlah pemenuhan EBT terhadap jumlah daya mampu eksisting	Persen	8,43	10,65	12,06

Meningkatnya Pengalihan Perampasan					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase pengalihan sampah	Capaian pengalihan sampah tahun n dikurangi n-1 dikali 100%	%	1,02	1,01	0

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	Komposit dari perhitungan indeks kualitas udara	Nilai	88,59	88,65	88,70	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas air	Komposit dari perhitungan Indeks kualitas air	Nilai	63,05	63,10	63,15	
	Indeks kualitas air laut	Komposit dari perhitungan Indeks kualitas air laut	Nilai	69,90	69,95	69,98	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Indeks Kualitas Lahan	Komposit dari perhitungan Indeks Kualitas Lahan	Nilai	41,66	42,16	42,66	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Penyelenggaraan Perawatan Ruang	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan perawatan ruang	Jumlah ETV Kabupaten Kota yang ditetapkan dibagi total secara provinsi ETV Kabupaten Kota	Persen	93,62	94,34	96,24	Dinas Perencanaan Umum, Perawatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemantauan Pemenuhan Energi Bersih Terbarukan	Jumlah pemenuhan EBT terhadap jumlah daya mampu eksisting	MW	70 MW	75 MW	80 MW	Dinas Ketahanan Energi dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pengawasan Pemukiman, Perumahan dan Pengalihan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Pengalihan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Jumlah pengalihan SRT dan SSRT dibagi jumlah timbulan SRT dan SSRT	Persen	26,00	30,00	30,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Persentase Pemungutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Jumlah pemungutan SRT dan SSRT dibagi jumlah timbulan SRT dan SSRT	Persen	71,00	70,00	70,00	

CASCADING KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI 2024-2026

LAMPIRAN 1-7

TUJUAN

SASARAN PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PRIORITAS

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi dan terkelola					
INDIKATOR TUJUAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Infrastruktur	Perhitungan 60% Indeks Layanan Infrastruktur Wilayah + 40% Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi + 20% Rasio Keterlaksanaan Transportasi sumber data: Perangkat Daerah	Nilai	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Meningkatnya kualitas infrastruktur publik					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Layanan Infrastruktur	Komposit 50% capaian infrastruktur linier yang ditambah 40% capaian infrastruktur SDAs + 10% capaian infrastruktur Cipta Karya	Nilai	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Meningkatnya Kualitas dan Absorbtibilitas Infrastruktur Pelayanan Umum					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pelayanan Umum	Hasil survei kepuasan Layanan Infrastruktur Pelayanan Umum	Persen	70	75	80

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Perantara dalam Kondisi Mantap	Jumlah panjang jalan kondisi sedang dan baik dibagi total panjang jalan	Persen	78,67	82,65	83,27	Dinas Perhubungan Umum, Perantara Ruang, Perantara dan Kawasan Perumahan
Program Pengaliran Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana daya air kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana daya air	Persen	48,63	48,74	48,87	
	Persentase Cakupan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Panjang jaringan irigasi primer dan sekunder yang terungkap dibagi total panjang jaringan irigasi sekunder dan primer dikali 100%	Persen	81,18	82,04	83,13	
Program Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase kersandusm busan kawasan permukiman yang dikoreksi PSU	Jumlah Kawasan Kumuh yang Ditata Dragen Total Target - Kawasan Kumuh x 100% Tipe penghitungan = Kumulatif Sander data - Pengungat Daerah	Persen	79,00	71,00	72,00	
Program Pengaliran dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Jumlah lokasi kawasan yang terfasilitasi sarana dan prasarana absorbtibilitas / jumlah kawasan di wilayah mdaik perkotam yang mendistribusikan supas absorbtibilitas (125 lokasi) x 100%	Persen	90,90	92,00	93,00	
Program Pengaliran dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	Jumlah sistem penyediaan Air Minum	Persen	95	95,5	96	

Meningkatnya keterlaksanaan transportasi publik					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Rasio Keterlaksanaan Transportasi	Rasio keterlaksanaan angkutan darat ditambah rasio angkutan laut ditambah rasio angkutan udara ditambah rasio keterlaksanaan kereta api ditambah rasio keterlaksanaan perikanan	Nilai	0,61	0,62	0,63

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Transportasi					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Transportasi	Hasil survei indeks kepuasan pengguna layanan transportasi	Persen	72,5	75	80

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pengaliran Pelayanan	Persentase Absorbtibilitas Pelayanan	Jumlah pelayanan yang dilayani dibagi total sarana pelayanan dikali 100%	Persen	75	80	84	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LALAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Ketersediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana lalu lintas dalam kondisi baik dibagi total sarana prasarana lalu lintas dikali 100%	Persen	58,58	43,75	40,48	
	Persentase terpelaksana standar pelayanan minimum angkutan	Jumlah angkutan yang memenuhi standar SPM dibagi total angkutan umum dikali 100%	Persen	73	73,45	73,85	

Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komposit dari indeks SPBE, indeks keterlaksanaan informasi publik, indeks pengembangan statistik dan indeks evaluasi	Nilai	79,85	82,07	84,28

Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai yang mengkonstruksikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan, sumber data: Kewaspasid	Nilai	3,2	3,4	3,6

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program pengaliran Aplikasi Informatika	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komposit persentase layanan teknologi informatika dari pusat data, jaringan area pemerintahan terdistribusi dan aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	Persen	79,85	82,07	84,28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

CASCADING KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI 2024-2026

TUJUAN

SASARAN PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PRIORITAS

Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Keresmi Bali dan Wisatawan					
INDIKATOR TUJUAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Ketertarikan Umum dan Kenyamanan Masyarakat	Responst 100% dari Jumlah kasus transaksi yang diselesaikan dibagi jumlah kasus transaksi tahun dasar dikali 100% dan 100% dari jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda tahun dasar dikali 100%; sumber data: pengingat daerah	Nilai	70,17	65,00	50,76
Indeks Brainer Berencana	Pemilihan kapabilitas yang disarankan oleh indikator ketahanan daerah dari seluruh stakeholder penyelenggaraan bencana; sumber data: BRPB	Nilai	115,10	111,70	108,30

Terwujudnya ketertarikan dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Presentase penanganan pelanggaran ketertarikan dan kenyamanan umum (transaksi)	Presentase jumlah kasus pelanggaran transaksi yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran transaksi yang ada	Persen	100,00	100,00	100,00

Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks demokrasi	Komposit dari 7 indikator tingkat pemerintahan demokrasi di Indonesia berdasarkan pelaksanaan dan keberhasilan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi Sumber data: IPS	Nilai	81,00	81,00	81,00

Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Presentase Ketangguhan Bencana	Realisasi Indeks Ketahanan Daerah dibagi target Indeks Ketahanan Daerah dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00

Meningkatnya pelayanan korban bencana					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Presentase pelayanan terhadap korban bencana	Jumlah korban bencana yang ditangani dibagi jumlah korban bencana	Persen	100,00	100,00	100,00

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	Gambarkan persepsi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di masyarakat Sumber: Pengingat Daerah berdasarkan survey	Persen	75	77	78

Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan Politik Mencakup Segmen Sasaran					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat	Gambarkan tingkat pemahaman peserta masyarakat akan aspek pendidikan politik masyarakat (Sumber: Pengingat Daerah berdasarkan survey)	Persen	76,00	77,00	78,00

Meningkatnya Kualitas Pengalihan dan Penyebarluasan Informasi					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komposit dari 7 indikator penilaian tingkat pengalihan informasi publik	Nilai	93,50	93,50	93,60

Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Presentase pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Realisasi pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD dibagi target pemenuhan kebutuhan dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00

Meningkatnya Kapasitas Pemangahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Ketahanan Daerah	Komposit dari 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah, sumber data: BRPB	Nilai	0,52	0,55	0,58

Menurunnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (DPK%)					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tertangani	Jumlah Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tertangani dibagi jumlah pemerlu layanan dalam panti	persen	100	100	100

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Keterampilan dan ketertarikan Umum	Presentase Pelanggaran K3 (ketertarikan, keterampilan, keselamatan) yang ditindaklanjuti	Presentase jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditangani dibagi jumlah kasus pelanggaran K3 yang ada dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Presentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	Jumlah kasus pelanggaran perda/perkada yang ditangani dibagi jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Presentase Sistem Kewaspadaan Terintegrasi	Komposit dari tipe aspek: 1. Jumlah konflik sosial yang terpetakan dibagi jumlah daerah sesuai konflik dikali 100%; 2. Jumlah konflik sosial yang terungkap dibagi jumlah konflik sosial yang terpetakan dikali 100%; 3. Jumlah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) pada aspek ideologi ekonomi sosial budaya, pemerintahan dan keamanan yang terungkap dibagi jumlah total ATHG dikali 100%	Persen	90	95	100	Badan Eksekutif Bangsa dan Politik

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Peran Partas Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengambilan Etika Serta Budaya Politik	Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	Jumlah kehadiran peserta pendidikan politik dibagi jumlah peserta pendidikan politik dikali 100%	Persen	80	85	90	Badan Eksekutif Bangsa dan Politik
	Program Pengantar Identifikasi Pancasila dan Karakter Kefungsian	Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan yang paham materi wawasan kebangsaan (yang menjawab benar 80%) dibagi jumlah kehadiran peserta dikali 100%	Persen	90	92	94	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pengalihan Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase informasi yang disebarluaskan	Komposit presentase informasi yang disebarluaskan melalui media, PPD dan internet	Persen	93,40	94,10	94,80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Presentase Realisasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETRAK)	Jumlah fasilitas Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD dibagi Jumlah Program kerja DPRD dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Penyelenggaraan Bencana	Presentase penurunan Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana n dikurangi n-1 dibagi n-1 dikali 100%	Persen	3,00	3,00	3,00	Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah
	Presentase penanganan darurat bencana	Realisasi penanganan darurat bencana dibagi target penanganan darurat bencana dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	
	Presentase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	Realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana dibagi target rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Penanganan Bencana	Presentase korban bencana yang tertangani	Jumlah korban bencana tertangani dibagi jumlah korban bencana dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pembangunan Anak

CASCADING KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI 2024-2026

TUJUAN

SASARAN PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PRIORITAS

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik					
INDIKATOR TUJUAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi	Skor pengaduan rasional reformasi birokrasi, sumber data: KEMENDIPA	Nila	74,00	75,00	76,00

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Nilai AKIP	Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Publikasi Keren PAN RI)	Nila	80,50	81,00	81,50
Optim DPR	Optim Hasil Pemeliharaan Badan Perencana Keuangan (DPK) dan Laporan Keuangan, Sumber Data: Belan Pemerintah Kabupaten (LDP DPR)	Optim	W/P	W/P	W/P

Meningkatnya Kualitas Layanan publik dan Internal Daerah					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Nila	88,50	89,00	89,50
Indeks Inovasi Daerah	Sistem Pengaduan dan pelayanan berbasis program pelayanan pengaduan pemerintahan daerah, sumber data: KEMENDAGRI	Nila	65,75	66,75	67,75

Terwujudnya Sistem Merit dalam manajemen ASN Provinsi Bali					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Merit Sistem	Nila pengisian sistem merit di instansi pemerintah yang meliputi kategori, nilai indeks, Sumber data: Komisi Aparatur Sipil Negara	Indeks	0,81	0,83	0,85

Meningkatnya Penguasaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Tugas Penguasaan					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Penguasaan Pemerintahan Daerah	Jumlah urusan pemerintahan laksanakan yang diawasi, dibagi jumlah keseluruhan urusan laksanakan dibagi 100%	Indeks	85,00	90,00	95,00

Terwujudnya layanan yang bersih, akuntabel dan berkualitas tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan layanan publik yang berkualitas					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Perangkat Daerah dengan Predikat Reformasi Birokrasi baik	Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh nilai RB baik dibagi seluruh Perangkat Daerah dibagi 100%	Persen	87,00	89,00	91,00

Meningkatnya Kinerja Pemantauan Pembangunan Daerah					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase ketuntasan target pemantauan pembangunan daerah tahun ke a dibagi target kinerja pembangunan daerah tahun ke a dibagi 100%	Realisasi kinerja pembangunan daerah tahun ke a dibagi target kinerja pembangunan daerah tahun ke a dibagi 100%	Persen	100,00	100,00	100,00

Meningkatnya Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Kelulusan Hukum dan HAM yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah kelulusan hukum dan HAM yang selesai dilaksanakan dibagi jumlah dari kelulusan hukum dan HAM yang diajukan DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibagi 100%	Persen	100,00	100,00	100,00

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diawasi sesuai SAP dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diawasi sesuai SAP dan tepat waktu dibagi Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibagi 100%	Persen	100,00	100,00	100,00

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan non Perizinan yang Cepat, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan non Perizinan	Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur terak dibagi nilai tertinggi	Nila	88,50	89,00	89,50

Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Perumusan Hasil Riset yang diimplementasikan dalam Perumusan Kebijakan	Jumlah riset yang diimplementasikan dibagi jumlah riset yang dihasilkan	Persen	100	100	100

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan Daerah	Indeks Produktivitas ASN Instansi	Nila Indeks Produktivitas ASN ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara	Nila	59,00	60,00	61,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pemberdayaan Penguasaan	Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diawasi dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	Inspektur

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Penguasaan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	Jumlah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dibagi 100%	Persen	87	89	91	Non Organisasi

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pemantauan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pemantauan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketuntasan yang berlaku	lampiran dari Jumlah dokumen pemantauan tepat waktu dibagi jumlah dokumen pemantauan dibagi 100%, Tingkat ketuntasan data RPTD terhadap kelengkapan data RPTD, Jumlah rekomendasi hasil pengendalian evaluasi pemantauan terhadap dokumen yang direvisi dibagi 100%	Persen	100	100	100	Badan Pemantauan Pembangunan Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitas dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah produk hukum daerah yang selesai di koordinasi dan koordinasi yang diselesaikan dibagi jumlah produk hukum daerah dan koordinasi hukum yang diajukan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kota dibagi 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	Non Hukum

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pengolahan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu pengisian Perda dan Pengal APBD Provinsi serta SK Daerah Raperwal/R	Jumlah dokumen Perda dan Pengal APBD Provinsi serta SK Raperwal/Raperwali dan Raperpres Anggaran Tepat Waktu dibagi Jumlah dokumen Perda dan Pengal APBD Provinsi serta SK Raperwal Raperwali/Raperpres dan Raperpres Anggaran dibagi 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Pelayanan Pemantauan Model	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai Perizinan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diselesaikan sesuai perizinan perizinan dan non perizinan dibagi dengan jumlah permohonan perizinan non perizinan masuk dibagi 100%	Persen	100,0	100,0	100,0	Unit Pemantauan Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelulusan Yang Diimplementasikan	Jumlah Kelulusan yang diimplementasikan dibagi jumlah Kelulusan yang dihasilkan	Persen	100	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah